PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

"PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING"

BAPPEDA KAB. BANGKA
TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2020

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dilakukan penetapan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangjat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

PENETAPAN RKPD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2021 untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program,* berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 serta mengacu kepada prioritas nasional.
(2) Rincian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MATERI RKPD TAHUN 2021

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, pagu indikatif berdasarkan fungsi Perangkat Daerah, rancangan alokasi dana serta informasi mengenai pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Materi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
    b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan RKPD Tahun 2021.

BAB IV

PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menentukan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021.
(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Tahun 2021.

Pasal 6

(1) Berdasarkan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda dan Badan Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

(2) APIP melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juli 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan "**BANGKA SETARA**" sebagai Visi Pembangunan tahun 2019-2023. Sebuah visi yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat Kabupaten Bangka terpenuhi ketahanan materil dan spiritual yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang setara/mulia/tinggi karena keberhasilan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal yang tercermin dalam kondisi : pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, gerbang kota dan pariwisata yang berskala internasional dan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi pencapaian visi ini tentu saja diperlukan perencanaan pembangunan yang handal. Karena kami yakin, hanya dengan perencanaan yang handal, pencapaian visi **BANGKA SETARA** dapat tercapai. Untuk memenuhi aspek organisatoris, kebijakan perencanaan pembangunan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2021, yang setelah mendapatkan legitimasi hukum akan menjadi instrument penting dan *powerfull* guna mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021.

RKPD Tahun 2021 ini berisikan penjabaran beberapa aspek penting perencanaan, diantaranya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan prioritas pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan

dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan daerah berbatasan.

Saya percaya kehadiran Dokumen RKPD 2021 ini, akan menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang Setara.

Sungailiat, Juni 2020

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR GRAFIK xii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-12
1.4. Maksud dan Tujuan I-17
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-23

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis II-2
2.1.1.3 Kondisi Topografis II-2
2.1.1.4 Kondisi Geologi II-3
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi II-4
2.1.1.6 Kondisi Klimatologi II-5
2.1.2. Kondisi Penggunaan Lahan II-10
2.1.2.1 Kawasan Budidaya II-10
2.1.2.2 Kawasan Lindung II-11
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah II-12
2.1.3.1 Potensi Perkebunan II-12
2.1.3.2 Potensi Pertanian II-15
2.1.3.3 Potensi Perikanan II-16
2.1.3.4 Potensi Peternakan II-17
2.1.3.5 Potensi Pertambangan II-18
2.1.3.6 Potensi Industri II-19
2.1.3.7 Potensi Pariwisata II-21
2.1.3.8 Potensi Perdagangan dan Jasa II-25
2.1.3.9 Wilayah Rawan Bencana II-26
2.1.4. Aspek Demografi II-29
2.1.4.1 Jumlah Penduduk II-30
2.1.4.2 Komposisi penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio II-31
2.1.4.3 Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur II-32
2.1.4.4 Komposisi penduduk Menurut Pekerjaan II-34
2.1.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35
2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-35
2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-43
2.1.5.2.1 Pendidikan II-43
2.1.5.2.2 Kesehatan II-45
2.1.5.2.3 Pertanahan II-48

2.1.5.2.4 Ketenagakerjaan II-48
2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-49
2.1.6. Aspek Pelayanan Umum II-50
2.1.6.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-50
2.1.6.1.1 Pendidikan II-50
2.1.6.1.2 Kesehatan II-53
2.1.6.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-57
2.1.6.1.4 Perumahan Rakyat dan Permukiman II-60
2.1.6.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-64
2.1.6.1.6 Sosial II-64
2.1.6.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar II-65
2.1.6.2.1 Tenaga Kerja II-65
2.1.6.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-66
2.1.6.2.3 Pangan II-67
2.1.6.2.4 Pertanahan II-68
2.1.6.2.5 Lingkungan Hidup II-68
2.1.6.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-69
2.1.6.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-70
2.1.6.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-71
2.1.6.2.9 Perhubungan II-72
2.1.6.2.10 Komunikasi dan Informatika II-72
2.1.6.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II-73
2.1.6.2.12 Penanaman Modal II-73
2.1.6.2.13 Kepemudaan dan Olahraga II-75
2.1.6.2.14 Statistik II-75
2.1.6.2.15 Kebudayaan II-76
2.1.6.2.16 Perpustakaan II-76
2.1.6.2.17 Kearsipan II-77
2.1.6.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-78
2.1.6.3.1 Kelautan dan Perikanan II-78
2.1.6.3.2 Pariwisata II-79
2.1.6.3.3 Pertanian II-79
2.1.6.3.4 Perdagangan II-81
2.1.6.3.5 Industri II-81
2.1.6.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang II-82
2.1.6.4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-82
2.1.6.4.2 Perencanaan II-82
2.1.6.4.3 Bidang Keuangan II-84
2.1.6.4.4 Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah II-84
2.1.6.4.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan II-85
2.1.7. Aspek Daya Saing Daerah II-89
2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-89
2.1.7.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita II-89
2.1.7.1.2 Nilai Tukar Petani II-90

2.1.7.1.3 Nilai Tukar Nelayan II-91
2.1.7.2 Fokus Iklim Investasi II-92
2.1.7.2.1 Angka Kriminalitas II-92
2.1.7.2.2 Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu II-92
2.1.7.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah II-93
2.1.7.2.4 Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha II-94
2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-96
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2020 ..... II-96
2.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-96
2.2.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-114
2.2.1.3 Urusan Pilihan II-136
2.2.1.4 Penunjang Urusan II-145
2.2.2. Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* II-163
2.2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-168
2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis II-175
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-175
2.3.2. Isu Strategis II-195

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021 ..... III-2
3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia III-2
3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional III-4
3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi III-7
3.1.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten III-9
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021 ..... III-25
3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021 ..... III-25
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-51
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-51
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-54
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-54
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-60
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-68

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tema Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-37
4.3. Prioritas Pembangunan Tahun2021 ..... IV-62
4.3.1. Prioritas Reformasi Birokrasi IV-71
4.3.2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas IV-74
4.3.3. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perekonomian IV-76
4.3.4. Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata IV-77
4.3.5. Prioritas Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas IV-81
4.3.6. Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat IV-87
4.3.7. Prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup IV-89
4.3.8. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDG's IV-91
4.3.9. Kebijakan dan Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal IV-100
4.3.10. Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender IV-106
4.3.11. Arah Kebijakan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim IV-109

4.3.12. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) IV-111
4.4 Program Spesifik Unggulan Daerah IV-153
4.4. Inovasi Daerah IV-156

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan V-1
5.2. Pendanaan Daerah V-16
5.2.1. Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... V-16
5.2.2. Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ..... V-32
5.2.3. Pendanaan Perangkat Daerah dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... V-46

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci VI-7

BAB VII PENUTUP VII-1
7.1. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Pembangunan VII-1
7.2. Kaidah – Kaidah Pendanaan Pembangunan VII-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

2.1. Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bnagka Tahun 2019 ..... II-2
2.2. Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan II-5
2.3. Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-10
2.4. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-11
2.5. Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka II-14
2.6. Luas Panen (ha) dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019 ..... II-15
2.7. Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-20
2.8. Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-21
2.9. Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-21
2.10. Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka II-24
2.11. Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-27
2.12. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per km² Menurut Kecamatan Di Kabupaten BangkaTahun 2015-2019 ..... II-30
2.13. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 ..... II-31
2.14. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 (%) II-32
2.15. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-33
2.16. Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019 ..... II-34
2.17. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019 ..... II-36
2.18. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten BangkaTahun 2015 – 2019 ..... II-37
2.19. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-42
2.20. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-43
2.21. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-45
2.22. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 dan Tahun 2018 ..... II-46
2.23. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM Tahun 2019 dan Tahun 2020 ..... II-46
2.24. Perbandingan Jumlah Kasus Positif, Kematian dan Kesembuhan Akibat COVID-19 (Per 17 Juni 2020) II-47
2.25. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenaga kerjaan Kabupaten Bangka Tahun 2014 -2019 ..... II-48
2.26. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka

Tahun 2014 -2019 ..... II-49
2.27. Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-51
2.28. Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-51
2.29. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-52
2.30. Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka Tahun 2013-2019 ..... II-52
2.31. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-53
2.32. Daftar 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-54
2.33. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-55
2.34. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-56
2.35. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-58
2.36. Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-58
2.37. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019 ..... II-59
2.38. Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019 ..... II-60
2.39. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-61
2.40. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2013-2019 ..... II-61
2.41. Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-62
2.42. Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-62
2.43. Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019 ..... II-63
2.44. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-64
2.45. Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019 ..... II-65
2.46. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019 ..... II-66
2.47. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-67
2.48. Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2013–2019 ..... II-68
2.49. Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019 ..... II-69
2.50. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-70
2.51. Jumlah PUS dan Peserta KB AktifKabupaten Bangka Tahun 2014–2019 ..... II-71
2.52. Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019 ..... II-71
2.53. Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-72
2.54. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Komunikasi dan Informatika II-72
2.55. Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2019 ..... II-73
2.56. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2019 ..... II-75
2.57. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019 ..... II-76
2.58. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2019 ..... II-76
2.59. Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019 ..... II-77

2.60. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019 ..... II-77
2.61. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019 ..... II-78
2.60. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Spending of Money Tourism Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019 ..... II-79
2.61. Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019 ..... II-80
2.62. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-81
2.63. Kontribusi SektorIndustri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-81
2.64. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-82
2.65. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Penunjang Bidang Perencanaan II-83
2.66. Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Penunjang Bidang Keuangan II-84
2.67.Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan SDM Daerah II-85
2.68.Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019 Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan SDM Daerah II-85
2.69. Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019 ..... II-86
2.70. Nilai Tukar Petani Kabupaten BangkaTahun 2015 - 2018 ..... II-87
2.71. Nilai Tukar Petani Kabupaten BangkaTahun 2015 - 2018 ..... II-88
2.72. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019 ..... II-89
2.73. Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD II-93
2.74. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-93
2.75. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-95
2.76. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-100
2.77. Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-104
2.78. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ururusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-107
2.79. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ururusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-108
2.80. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ururusan SosialTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-109
2.81. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Ururusan Tenaga KerjaTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-110

2.82. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Ururusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-111
2.83. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pangan Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-112
2.84. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Ururusan PertanahanTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-113
2.85. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Lingkungan HidupTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-114
2.86. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-115
2.87. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-116
2.88. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-118
2.89. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-119
2.90. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang komunikasi dan informatika sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-121
2.91. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-122
2.92. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-123
2.93. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang penanaman modal sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-124
2.94. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-125
2.95. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Statistik sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023 ..... II-127
2.96. Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-128
2.97. Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-129
2.98. Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-130
2.99. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-132

2.100.Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-135
2.101.Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Pertanian sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-136
2.102.Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Perdagangan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023 ..... II-138
2.103.Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023 ..... II-140
2.104.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya, Inspektorat sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019 - 2023 ..... II-141
2.105.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaSekretariat Daerah sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-144
2.106.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaSekretariat DPRD sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-147
2.107.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaKewilayahan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-148
2.108.Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-149
2.109.Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-153
2.110.Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-155
2.111.Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023 ..... II-157
2.112.Bidang dan Tujuan Utama *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2019 ..... II-159
2.113.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-165
2.114.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-166
2.115.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-167
2.116.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-168
2.117.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-168
2.118.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-169
2.119.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan II-171
2.120.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan II-172
2.121.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perpustakaan II-173
2.122.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial II-174
2.123.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-175
2.124.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Tenaga Kerja II-176
2.125.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Koperasi dan UMKM II-177
2.126.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan II-177

2.127.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perindustrian.....II-178
2.128.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanaman Modal.....II-179
2.129.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pariwisata.....II-179
2.130.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian.....II-181
2.131.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kelautan dan Perikanan.....II-182
2.132.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....II-183
2.133.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....II-184
2.134.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan.....II-185
2.135.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perhubungan.....II-185
2.136.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Komunikasi dan Informatika.....II-186
2.137.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Lingkungan Hidup.....II-187
2.138.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanggulangan Bencana.....II-187
2.139.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....II-188
2.140.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Kelompok Pemerintahan.....II-189
2.141.Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka.....II-192
3.1. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Kelompok Pemerintahan..... III-6
3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021 ..... III-8
3.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021 ..... III-11
3.4. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Menurut Sektor Tahun 2015 – 2019 ..... III-14
3.5. Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2019 ..... III-18
3.6. Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021..... III-19
3.7. Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... III-22
3.8. Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka 2017 – 2018 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021 ..... III-24
3.9. Prediksi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-30
3.10. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah) III-52
3.11. Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah)..... III-67
3.12. Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah)..... III-69
4.1. Urutan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Berdasarkan RPJPD 2015-2025 ..... IV-10
4.2. Urutan Prioritas Pembangunan Daerah, 2005-2025 ..... IV-11
4.3. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan dengan Permasalahan dan Isu Strategis..... IV-30
4.4. Matriks Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ..... IV-42
4.5. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023..... IV-43
4.6. Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten

Bangka 2019-2023 terhadap RKPD tahun 2021 ..... IV-46
4.7. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-49
4.8. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Proyeksi Capaian Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-50
4.9. Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dengan Prioritas RKPD 2021 ..... IV-63
4.10. Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional Tahun 2021 ..... IV-66
4.11. Konsistensi Prioritas Reformasi Birokrasi terhadap Program Prioritas Prioritas IV-73
4.12. Konsistensi Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas terhadap Program Prioritas IV-75
4.13. Konsistensi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perekonomian terhadap Program Prioritas IV-77
4.14. Konsistensi Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata terhadap Program Prioritas IV-80
4.15. Kebijakan *Refocussing* Sektor Perdagangan dan Jasa IV-82
4.16. Konsistensi Prioritas Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas terhadap Program Prioritas IV-83
4.17. Konsistensi Prioritas Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas terhadap secara Makro terhadap Program Prioritas IV-87
4.18. Konsistensi Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terhadap Program Prioritas IV-88
4.19. Konsistensi Prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup terhadap Program Prioritas IV-90
4.20. Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dengan Program Daerah IV-94
4.21. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Pendidikan IV-100
4.22. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Urusan Bidang Kesehatan IV-102
4.23. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Pekerjaan Umum IV-103
4.24. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Perumahan Rakyat IV-104
4.25. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-105
4.26. Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Sosial IV-106
4.27. Program Daerah Mendukung Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-109
4.28. Program Daerah Tahun 2021 Pendukung Penanggulangan Bencana IV-111
4.29. Aspek Tematis dalam Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-113
4.30. Aspek Holistik dalam Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-119
4.31. Proyeksi Capaian Sasaran Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-129
4.32. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat IV-133
4.33. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu IV-136
4.34. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat IV-138
4.35. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang IV-141
4.36. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali IV-143
4.37. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip IV-145

4.38. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam IV-147
4.39. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar IV-150
4.40. Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2020 ..... IV-155
4.41. Keterkaitan dan *Supporting* antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Prioritas Kabupaten Bangka, Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung dan RKP 2021 ..... IV-163
4.42. Keterkaitan dan *Supporting* antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Misi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ..... IV-166
5.1. Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... V-16
5.2. Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... V-31
5.3. Dukungan Anggaran RKPD 2021 Kabupaten Bangka terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ..... V-32
5.4. Pagu Indikatif OPD (Belanja Langsung) Tahun 2021 ..... V-37
6.1. PenetapanIndikatorKinerjaUtamaKabupaten BangkaTahun 2021 ..... VI-3
6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... VI-10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka I-11
1.2. Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-13
1.3. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran I-15
1.4. Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Presiden dan Visi Misi Kepala Daerah I-16
2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka II-1
2.2. Peta Geologi Kabupaten Bangka II-4
2.3. Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2019 ..... II-6
2.4. Peta Distribusi Curah Hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari, April, Agustus dan Desember 2019 ..... II-8
2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka II-12
2.6. Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka II-13
2.7. Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka II-13
2.8. Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka II-16
2.9. Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka II-16
2.10. Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka II-17
2.11. Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka II-18
2.12. Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka II-19
2.13. Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka II-20
2.14. Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka II-22
2.15. Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... II-22
2.16. Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka II-25
2.17. Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka II-26
3.1. Dampak COVID 19 terhadap Perekonomian Dunia III-3
3.2. Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021 ..... III-20
3.3. Intervensi Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... III-33
3.4. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus Melambat III-34
3.5. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Minimnya Peran Investasi Agro Industri dan Industri Hilir III-38
3.6. Arah Pembangunan dalam Mengatasi Rendahnya Akselerasi Sektor Pariwisata sebagai *Core Sector* Baru III-40
3.7. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Liberalisasi Perdagangan Sektor Unggulan III-42
3.8. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Lemahnya Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan Usaha III-43
3.9. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rapuhnya Keterkaitan antar Sektor Perekonomian III-44
3.10. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Keterbatasan Daya Dukung Pembiayaan Jangka Panjang III-45
3.11. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rentannya Landasan Perekonomian Pedesaan III-46

3.12. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Kompleksitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III-46
3.13. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Sulitnya Menjaga Permintaan dan Penawaran Barang III-47
3.14. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Inkonsistensi Komitmen Kerjasama Antar Daerah III-48
3.15. *Frame* Kebijakan Sensitif Pasca COVID 19 ..... III-49
3.16. Skenario Dampak Bantuan dan Jaminan Sosial Pasca COVID 19 ..... III-50
3.17. Formulasi Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) III-59
3.18. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Pembangunan Manusia III-61
3.19. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan III-62
3.20. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan III-63
3.21. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi III-65
3.22. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Berwawasan Lingkungan III-65
4.1. Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 ..... IV-3
4.2. Empat Pilar Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV-4
4.3. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV-5
4.4. Kerangka Pembangunan Tahun 2021RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV-5
4.5. Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ..... IV-9
4.6. Posisi RKPD 2021 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 ..... IV-11
4.7. Fokus/Tema Rencana Pembangunan Tahunan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 ..... IV-27
4.8. Integrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka RKPD dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tema RKP Tahun 2021 ..... IV-29
4.9. Ilustrasi Perumusan Permasalahan, Isu Strategis dan Kaitannya terhadap Prioritas Pembangunan IV-29
4.10. Integrasi Tema dan Prioritas RKPD 2021 ..... IV-37
4.11. Keterkaitan Tema Prioritas RKPD 2021 Terhadap Arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2019-2023 ..... IV-63
4.12. Keterkaitan Sasaran dan Prioritas dalam RKPD 2021 dengan Sasaran dan Prioritas Nasional dalam RKP 2021 ..... IV-65
4.13. Keterkaitan Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2021 ..... IV-71
4.14. Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... IV-72
4.15. Pelaksanaan Upaya Pencipataan Pembangunan Manusia Berkulaitas Melalui Mou di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan IV-75
4.16. Empat Sektor Unggulan Ekonomi Kabupaten Bangka Berdasarkan Kontribusi Terhadap PDRB Tahun 2019 ..... IV-84
4.17. Aspek Integratif Program Prioritas 1 Reformasi Birokrasi IV-122
4.18. Aspek Integratif Program Prioritas 2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas IV-122
4.19. Aspek Integratif Program Prioritas 3 Pembangunan Infrastruktur Perekonomian IV-123
4.20. Aspek Integratif Program Prioritas 4 Pengembangan Industri Pariwisata IV-124
4.21. Aspek Integratif Program Prioritas 5 Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas IV-124
4.22. Aspek Integratif Program Prioritas 6 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat IV-125
4.23. Aspek Integratif Program Prioritas 7 Pelestarian Lingkungan Hidup IV-126
4.24. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat Tahun 2021 ..... IV-133
4.25. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Belinyu Tahun 2021 ..... IV-135
4.26. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2021 ..... IV-138
4.27. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Merawang Tahun 2021 ..... IV-140

4.28. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Pemali Tahun 2021.....IV-142
4.29. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Riau SilipTahun 2021 .....IV-145
4.30. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan BakamTahun 2021.....IV-147
4.31. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Puding Besar Tahun 2021 .....IV-149

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik

2.1. Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2019..... II-23
2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2019 (%)..... II-33
2.3. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019..... II-35
2.4. PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019..... II-38
2.5. Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019..... II-38
2.6. Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019..... II-39
2.7. Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019..... II-41
2.8. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019..... II-42
2.9. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019..... II-44
2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019..... II-45
2.11. Perkembangan Angka Partisipasi MurniSD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019..... II-46
2.12. Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat Kabupaten Bangka Tahun 2013-2019..... II-48
2.13. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019..... II-57
2.14. Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten BangkaTahun 2017–2019..... II-68
2.15. Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019..... II-68
2.16. Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 ..... II-75
3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 ..... III-12
3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Menurut Sektor Tahun 2015-2019..... III-14
3.3. Peran Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tahun 2019 ..... III-16
3.4. Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 ..... III-17
3.5. Kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2021 ..... III-23
3.6. Proporsi Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2021 Menurut Pelaku Ekonomi III-23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sementara itu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Pada pasal 386 menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi pada lingkungan pemerintah daerah sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 -2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Musrenbang;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD dimulai dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD dan Penetapan RKPD. Di dalam prosesnya melibatkan unsur masyarakat melalui kegiatan forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) RKPD mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten maupun melalui penyertaan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang RPJMD. Di sisi lain untuk menjaring informasi dan masukan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Bangka melakukan kegiatan "Natak Kampung" yaitu agenda kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke desa/kelurahan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat, berdiskusi terkait aspirasi masyarakat

terhadap pembangunan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka. RKPD ini wajib disusun oleh Bupati/Wakil Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bangka dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

Agar penyusunan RKPD Tahun 2021 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan dilakukan penelaahan berbagai sektor dan dokumen yang meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Penelaahan capaian kinerja tahun sebelumnya;
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
7. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
8. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
9. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan RKPD Provinsi;
10. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
11. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
12. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya berkesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis, dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangka mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menerapkan beberapa pendekatan. Dari orientasi prosesnya, penyusunan RKPD Tahun 2021 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

1. *Pendekatan Teknokratik*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2021 dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. *Pendekatan Partisipatif*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2021 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan musrenbang.

   Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat desa/kelurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai prosedur yang

berlaku forum partisipatif ini dilanjutkan dengan pelaksanaan forum Konsultasi Publik dan hasilnya diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat.

Selain Musrenbang, Pemerintah Kabupaten Bangka juga melaksanakan Program "Natak Kampung". Program Natak Kampung merupakan kegiatan Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati ke desa-desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Bangka dalam upaya mendekatkan diri dengan warga masyarakat, berdialog langsung dengan seluruh anggota masyarakat tidak terkecuali masyarakat inklusif dan atau kelompok masyarakat yang rentan yang sering sekali kurang mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk mengemukaan saran dan masukan di dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara formal seperti Musrenbang. Karena di dalam forum Musrenbang suara masyarakat diwakilkan melalui para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang diundang. Sementara keterlibatan kelompok masyarakat rentan ini penting didalam proses perencanaan pembangunan untuk mengetahui kebutuhan mereka agar mereka dapat mengakses langsung hasil pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Program ini dilakukan sepanjang tahun secara periodik, dimana dalam program ini masyarakat dengan Bupati dan Wakil Bupati dapat berkomunikasi dua arah menyampaikan saran dan masukan serta aspirasi yang akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka ke depan. Hasil Natak Kampung akan menjadi masukan yang terhimpun dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dengan demikian, berdasarkan usulan-usulan tersebut, musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing OPD sesuai

program prioritas yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan.

3. *Pendekatan Politik*, dengan pendekatan penyusunan RKPD 2021 dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka sebagai proses penyusunan perencanaan program pembangunan karena rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih. Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RKPD 2021 merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan tahun ke 3 (tiga) RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

4. *Pendekatan atas-bawah* (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga ke tingkat nasional.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2021 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integratif

dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.

Penguatan pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD 2021 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan *Money Follows Program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan RKPD 2021 dilaksanakan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD 2021

   Penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, rancangan awal RKPD Provinsi tahun 2021, Rancanga Awal RKP 2021, program strategis nasional 2021, dan pedoman penyusunan RKPD yang dilaksanakan pada bulan November 2019. Rancangan awal RKPD berisikan panduan dan koridor perencanaan

pembangunan untuk tahun 2021. Rancangan Awal RKPD 2021 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

2. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

   Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Konsultasi publik dilaksanakan pada Bulan Januari 2020. Rancangan Awal RKPD yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Perangkat Daerah pada Bulan Februari 2020 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

   Merupakan forum yg memfasilitasi pembahasan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan pertimbangan. Selain itu dalam Forum Perangkat Daerah dilakukan *desk* Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk menyepakati prioritas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan menyelaraskan usulan program dan kegiatan yang bersifat *Top Down* maupun *Bottom Up* dari desa/kelurahan dan kecamatan dan dari Natak Kampung. Forum Perangkat Daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Bulan Februari tahun 2020. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan berdasarkan saran dan masukan Forum Perangkat Daerah disampaikan ke BAPPEDA untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Musrenbang Desa/Kelurahan

   Musrenbang Desa dan Kelurahan tahun 2020 dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Februari 2020. Musrenbang Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa yang di dalam pelaksanaannya didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis Kabupaten dan Camat.

5. Rancangan RKPD

   Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD bedasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah diverifikasi, hasil telaah terhadap RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional. Penyusunan Rangcangan RKPD 2021 dilaksanakan pada Bulan April 2020. Rancangan RKPD akan menjadi bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

6. Musrenbang RKPD di Kecamatan

   Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 10 – 20 Februari 2020 pada 8 Kecamatan di Kabupaten Bangka.

7. Musrenbang RKPD Kabupaten

   Musrenbang RKPD di Kabupaten Bangka dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2020 melalui pembahasan *desk* untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokus kegiatan. Penyelarasan program dan kegiatan kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan kewenangan desa yang diusulkan berdasarkan musrenbang kecamatan.

8. Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kabupaten. Rancangan Akhir RKPD dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah sudah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD dilaksanakan paling lambat Bulan Mei 2020.

9. Penetapan RKPD

   Rancangan Akhir RKPD yang sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2021. Rancangan Perkada diajukan ke Gubernur untuk difasilitasi. Rancangan Perkada yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dan diundangkan paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Secara lengkap proses penyusunan RKPD Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka

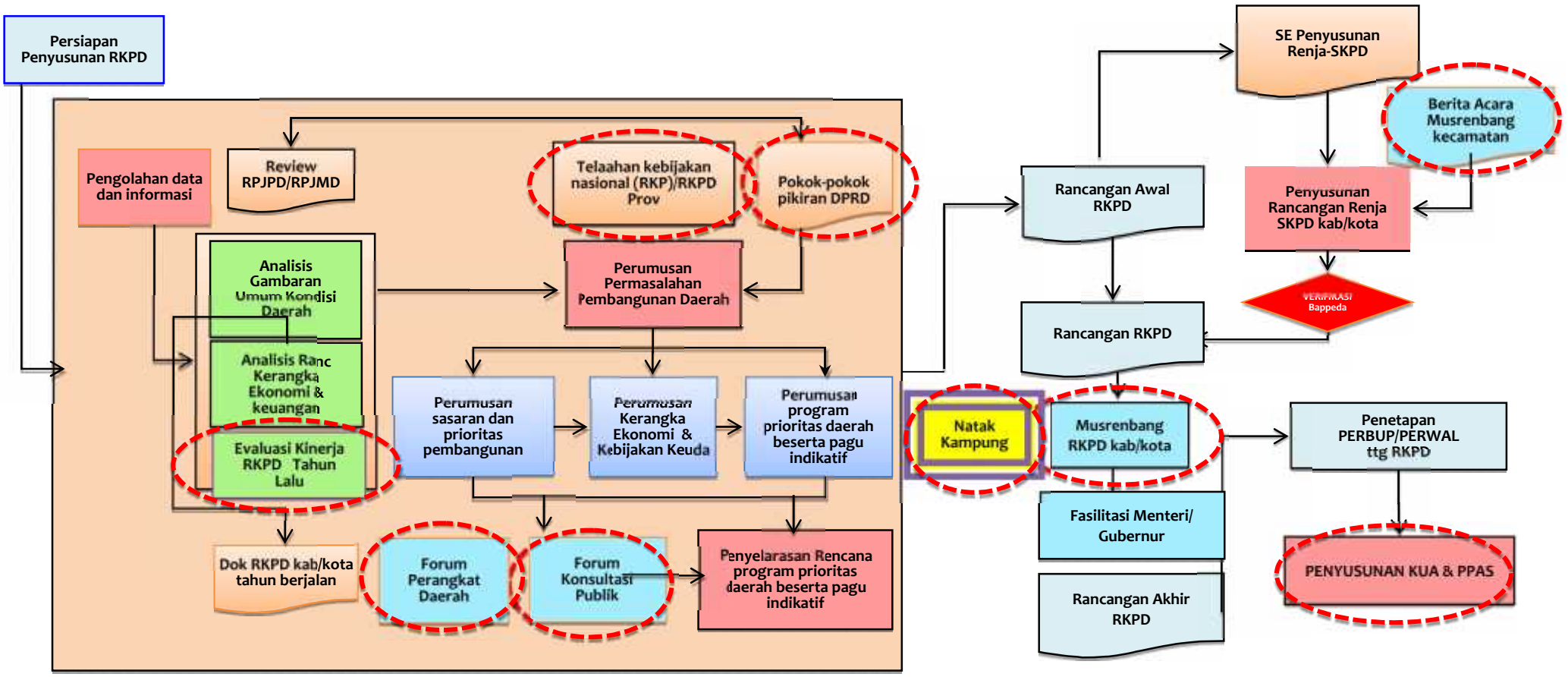

Dokumen RKPD Tahun 2021 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting diantaranya :

1. RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 tahun ke 3 (tiga) yang selaras dengan RPJMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017-2022.
2. RKPD Tahun 2021 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2021.
3. RKPD Tahun 2021 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.
4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancanagan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri e);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan

Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D),sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 4).

Berkenaan dengan dasar hukum penyusunan RKPD, terdapat perbedaan cukup signifikan dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Khususnya pada regulasi yang menjadi dasar hukum penyusunan program dan kegiatan, dimana dalam RKPD tahun 2021 penyusunan program dan kegiatan sudah berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menyatakan bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini disampaikan diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

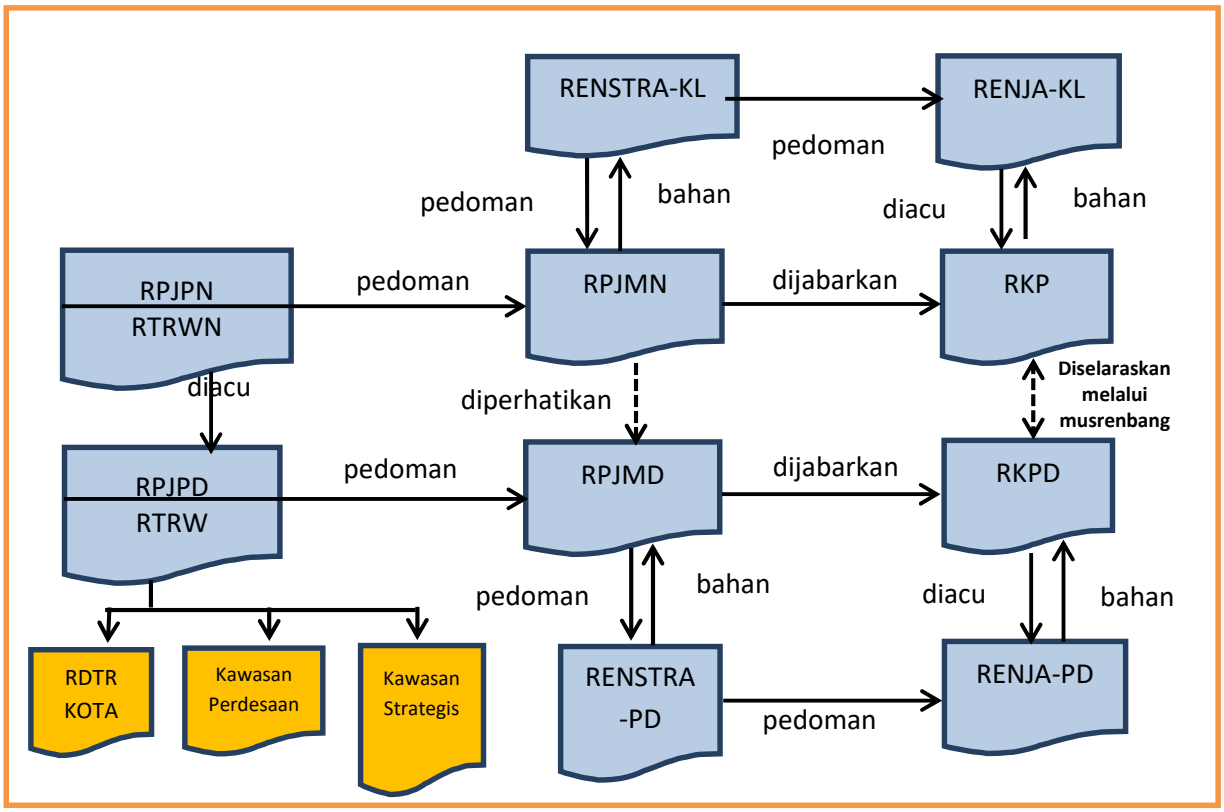

Sebagaimana diagram alur diatas maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional diatas menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dan Renja-PD serta berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra-PD dan Renja-PD juga akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan RKPD.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan yaitu RKPD dan Renja-PD. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra-PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat dimana penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 (lima) tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra-PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra-PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun mengacu pada Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Nasional. Karenanya Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 ini kemudian telah disusun rencana rincinya agar lebih operasional berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034, Kawasan Industri Jelitik Sungailiat, Kawasan Industri Perikanan Terpadu Teluk Kelabat Belinyu dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Penyusunan rencana rinci ini tidak terlepas dari bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka agar pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan potensi ruang sebagaimana telah dipetakan melalui dokumen-dokumen perencanaan keruangan tersebut sehingga pembangunan dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang sesuai dengan potensinya, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta meminimalisir terjadinya resiko bencana. Sampai dengan tahun 2020 dari sebanyak 514 Kabupaten/Kota di Indonesia baru terdapat 55 Daerah (11%) yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk Kabupaten Bangka.

Keterkaitan lainnya dari dokumen perencanaan ini adalah hubungannya dengan penganggaran. Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari anggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan. Dalam pengelolaan pemerintahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran dijelaskan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RAPBD.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, dan RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran ini dijelaskan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.3
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

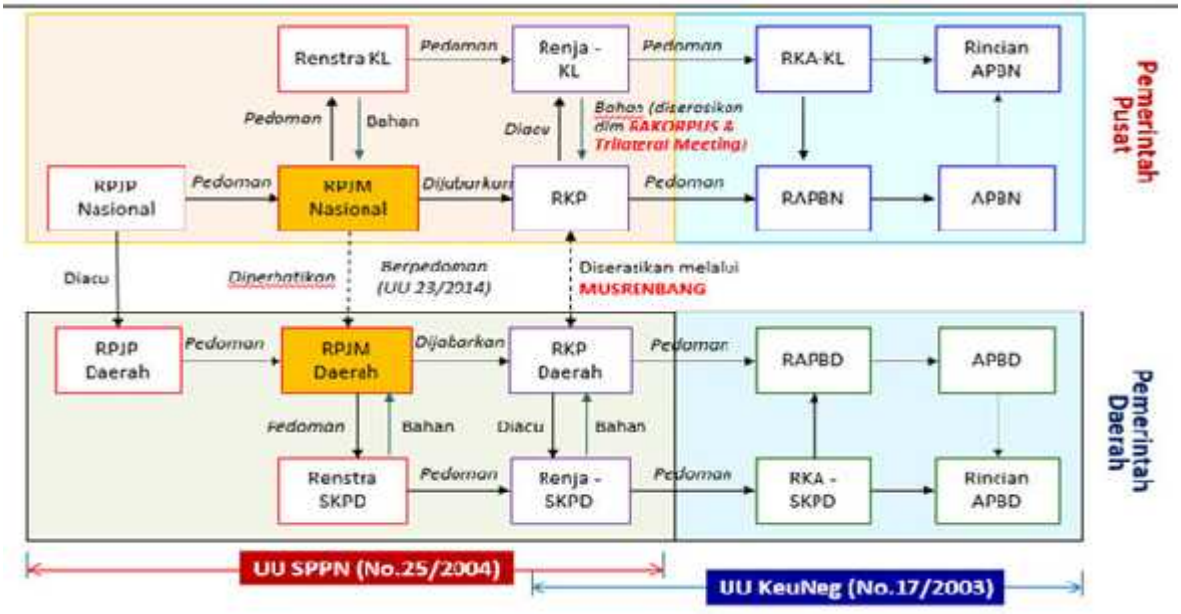

Dilihat dari sisi lainnya dokumen perencanaan ini juga memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Presiden dan Kepala Daerah. Bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Sedangkan RPJMD adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMN juga menjabarkan visi, misi dan program Presiden. Sementara penjabaran RPJMN dan RPJMD per tahun adalah berupa dokumen perencanaan tahunan yang disebut RKP dan RKPD. Sehingga RKP dan RKPD adalah merupakan rencana tahunan dari visi, misi dan program Presiden dan Kepala Daerah. Dalam hal ini penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah merupakan penjabaran RPJMD tahun ke 3 yang disusun mengacu pada RKP tahun 2021. Keterkaitan antara dokumen RKP dan RKPD dengan visi dan misi Presiden dan Kepala Daerah dijelaskan pada gambar dibawah ini :

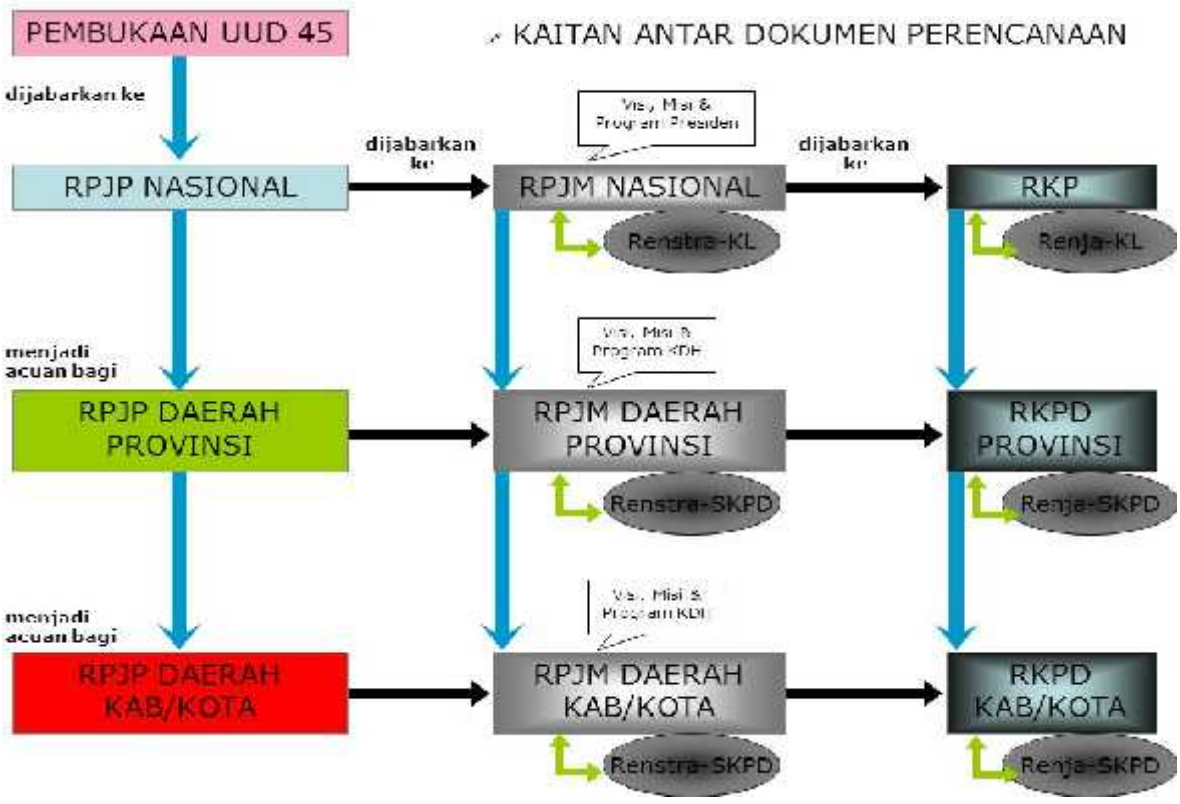

Gambar 1.4
Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Presiden dan Visi Misi Kepala Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini dimaksudkan :

a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah, dan;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berupa :

1. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka dan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2021;
2. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Sebagai pedoman bagi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021.
4. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal serta Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang RKPD.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan RKPD bagi Kabupaten Bangka dan sasaran penyusunan RKPD bagi Kabupaten Bangka.

1.5 Sistematika RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Uraian evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka pendanaan.

a. Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan tahun 2021 serta pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan tema pembangunan tahun 2021.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2021 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dan mengacu pada RPJMD Provinsi tahun 2017-2022 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan provinsi.

c. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang mengacu pada RPJMD tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Bupati bagi PD dalam rangka menyusun dokumen Renja-PD.

Bagian ini dapat memuat antara lain :

1. Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja OPD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam RKPD.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara PD dengan memperhatikan peran, tanggung jawab dan tugas PD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten, memiliki luas kurang lebih sebesar 2.950,68 Km^2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Secara administratif, Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 62 desa dan 19 kelurahan, dengan pembagian kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten BangkaTahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Kelurahan	Desa
1	Sungailiat	146,63	12	1
2	Bakam	425,04	-	9
3	Pemali	140,06	-	6
4	Merawang	215,26	-	10
5	Puding Besar	271,32	-	7
6	Mendo Barat	683,67	-	15
7	Belinyu	514,60	7	5
8	Riau Silip	624,11	-	9
	Jumlah	**2.950,68**	**19**	**62**

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara pulau Bangka pada posisi antara $105^{0}38'$-$106^{0}18'$ Bujur Timur dan $1^{0}3'$-$2^{0}21'$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah yaitu: (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam.

2.1.1.3. Kondisi Topografis

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti : pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut

adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batuan Plutonik Masam.

- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sunda Land dan merupakan bagian terangkat dari peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari *Granite Belt* yang berumur Yura – Kapur yang membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malasyia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. *Granite Belt* sendiri merupakan deretan formasi batuan granite kaya akan mineral *cassiterite* yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Tin Belt*.

Pulau-pulau dari *The Tin Belt* diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya *Sunda Shelf*. Pupili (1973) menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak *Paleozoikum* Bawah dimana berdasarakan Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah penunjaman *(subduction zone)* berada di bagian timur Malysia dan pada Mesozoikum Bawah – tengah menghasilkan busur gunung api *(magmatic arc)* dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat.

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Bangka

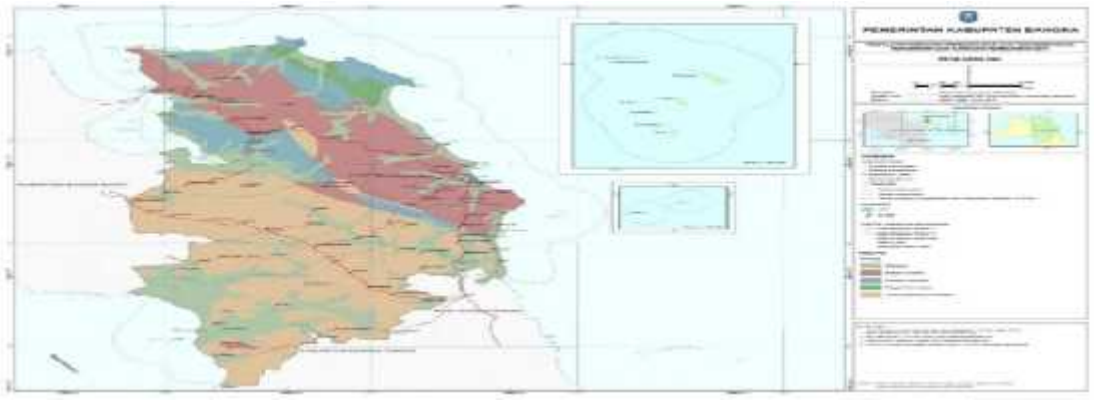

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan, pengayaan (*leaching*), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (*craton*) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Bangka lebih didominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Secara detail, Kabupaten Bangka mempunyai 38 (tiga puluh delapan) aliran sungai, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai tepanjang dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan

Kecamatan		Nama Sungai	Panjang (m)	Nama Sungai	Panjang (m)
1.	Sungailiat	S. Jeliti	3.000		
2.	Bakam	S. Telang	5.000	S. Layang	32.500
		S. Mabat	15.000		
3.	Merawang	S. Baturusa	31.250		
4.	Puding Besar	S. Perai	10.000	S. Kayubesi	500
		S. Kerang	8.000	S. Jeruk	15.000
		S. Kotawaringin	20.000	S. Lubang	6.000
5.	Mendo Barat	S. Mendo	28.500	S. Penagan	2.500
		S. Rukam	20.000	S. Penjirang	5.000
		S. Air Pandan	20.000	S. Kelabingil	3.000
		S. Sembilang	2.000		
6.	Belinyu	S. Panji	10.000	S. Belinyu	6.000
		S. Pasir	5.000	S. Berok	3.000
		S. Pejem	4.500	S. Romodong	3.000
		S. Tengkalak	2.000	S. Bubus	4.000
		S. Jeliti	3.000	S. Sembuang	5.000
		S. Bayat	9.000	S. Sekak	5.000
		S. Layang	12.000	S. Buntang	1.500
		S. Jelutung	12.000		
7.	Riau Silip	S. Tengkalak	5.000	S. Mapur	21.250
		S. Bedukang	900	S. Semubur	3.000
		S. Deniang Laut	1.300	S. Perimping	2.750

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bangka beriklim tropis dengan rata-rata suhu 27,3 derajat Celcius dan kelembaban udara rata-rata 80,3 % pada tahun 2019. Untuk kecepatan angin pada tahun 2019 rata-rata sebesar 2,8 dan rata-rata tekanan udara sebesar 1010,1. Pada tahun 2019 jumlah hari hujan sebesar 196 hari.

Gambar 2.3.
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan
Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2019

Kecamatan *Subdistrict*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Suhu/*Temperature*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	22,5	27,3	34,9
Merawang		22,5	27,3	34,9
Puding Besar		22,5	27,3	34,9
Sungailiat		22,5	27,3	34,9
Pemali		22,5	27,3	34,9
Bakam		22,5	27,3	34,9
Belinyu		22,5	27,3	34,9
Riau Silip		22,5	27,3	34,9
Bangka		**22,5**	**27,3**	**34,9**

Kecamatan *Subdistrict*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Kelembaban/*Humidity*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	32	80,3	99
Merawang		32	80,3	99
Puding Besar		32	80,3	99
Sungailiat		32	80,3	99
Pemali		32	80,3	99
Bakam		32	80,3	99
Belinyu		32	80,3	99
Riau Silip		32	80,3	99
Bangka		**32**	**80,3**	**99**

Kecamatan *Subdistrict*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Kecepatan Angin/*Wind Velocity*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	0	2,8	11,4
Merawang		0	2,8	11,4
Puding Besar		0	2,8	11,4
Sungailiat		0	2,8	11,4
Pemali		0	2,8	11,4
Bakam		0	2,8	11,4
Belinyu		0	2,8	11,4
Riau Silip		0	2,8	11,4
Bangka		**0**	**2,8**	**11,4**

Sumber: BMKG, Stasiun Meteorologi Pangkalpinang,

Kecamatan *Subdistrict*	Stasiun BMKG *BMKG Station*	Tekanan Udara/*Atmospheric Pressure*		
		Minimum *Minimum*	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	1004,7	1010,1	1015,3
Merawang		1004,7	1010,1	1015,3
Puding Besar		1004,7	1010,1	1015,3
Sungailiat		1004,7	1010,1	1015,3
Pemali		1004,7	1010,1	1015,3
Bakam		1004,7	1010,1	1015,3
Belinyu		1004,7	1010,1	1015,3
Riau Silip		1004,7	1010,1	1015,3
Bangka		**1004,7**	**1010,1**	**1015,3**

Kecamatan *Subdistrict*	Stasiun BMKG BMKG Station	Jumlah Curah Hujan *Number of Precipitation (mm)*	Jumlah Hari Hujan *Number of Rainy Days (day)*	Penyinaran Matahari *Duration of Sunshine (%)*
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	2 073,3	196	58,9
Merawang		2 073,3	196	58,9
Puding Besar		2 073,3	196	58,9
Sungailiat		2 073,3	196	58,9
Pemali		2 073,3	196	58,9
Bakam		2 073,3	196	58,9
Belinyu		2 073,3	196	58,9
Riau Silip		2 073,3	196	58,9
Bangka		**2 073,3**	**196**	**58,9**

BPS Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

Adapun kondisi distribusi curah hujan di wilayah Kabupaten Bangka secara umum hampir sama dengan distribusi curah hujan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Distribusi Curah Hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bulan Januari, April, Agustus dan Desember 2019

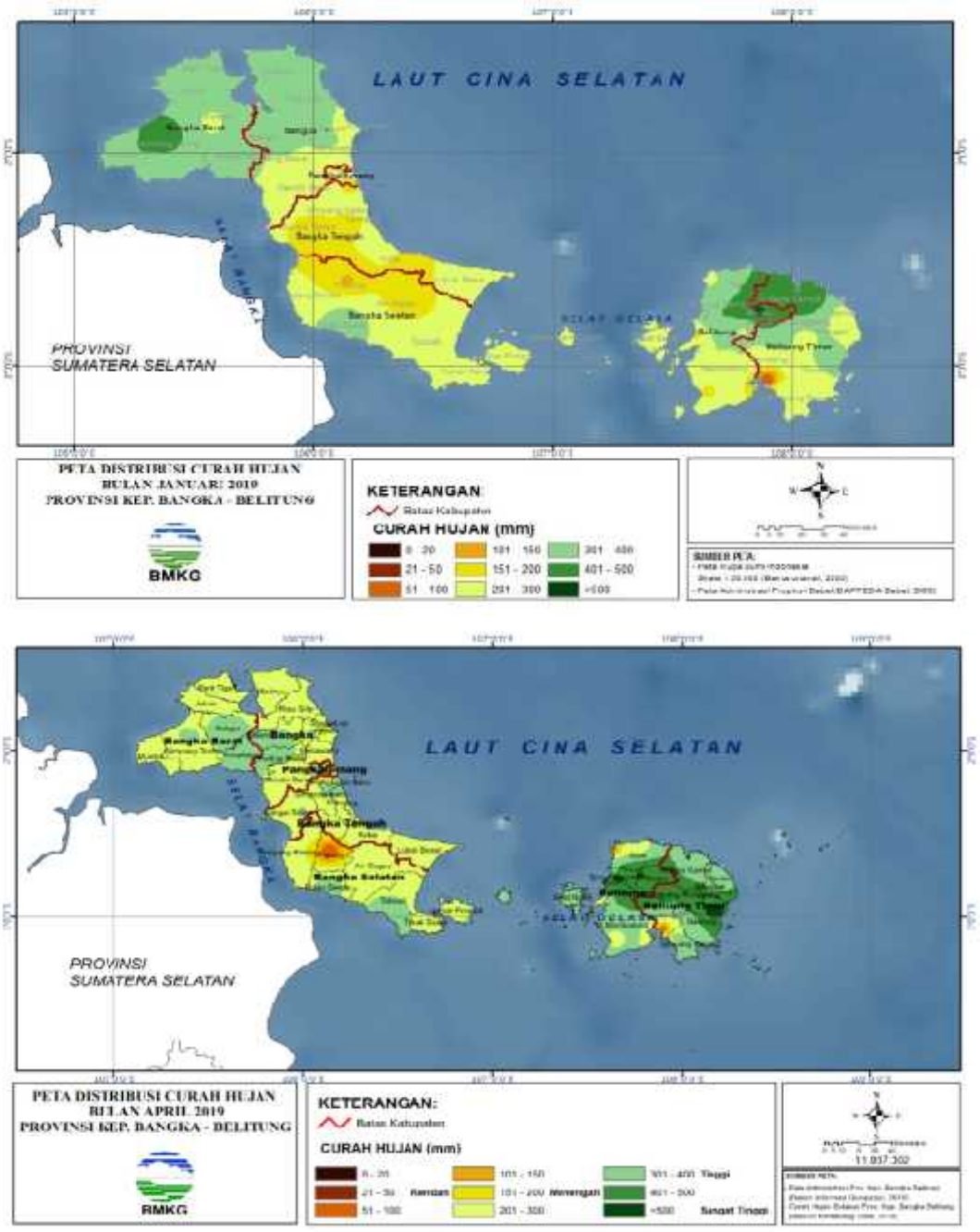

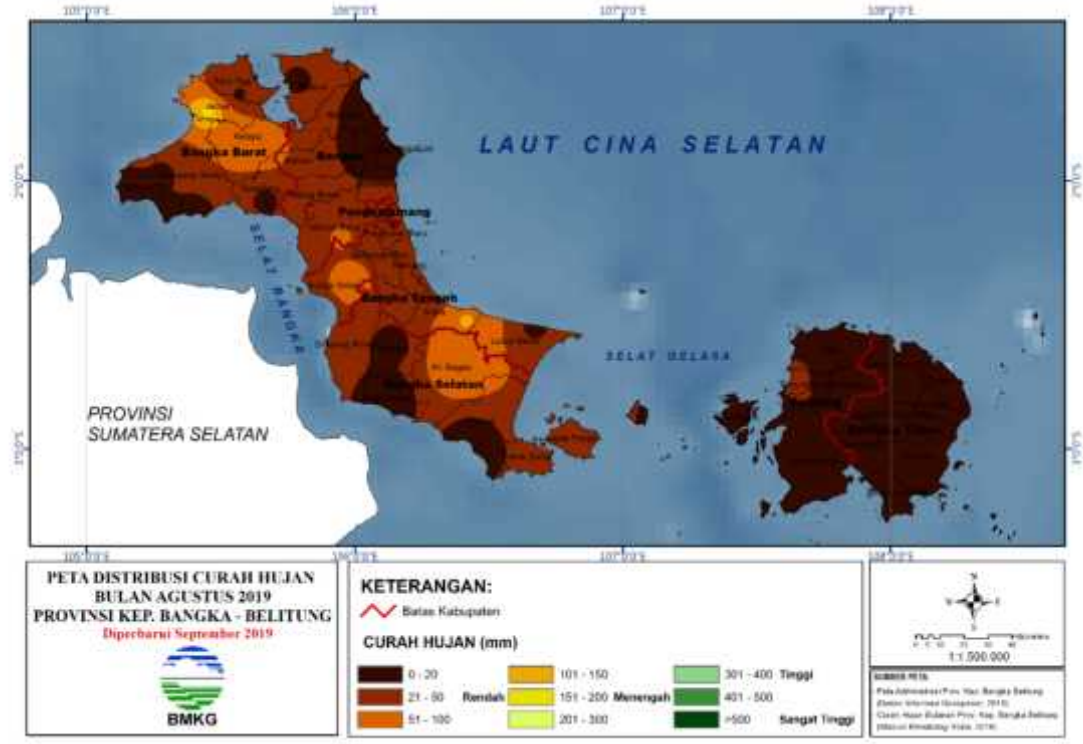

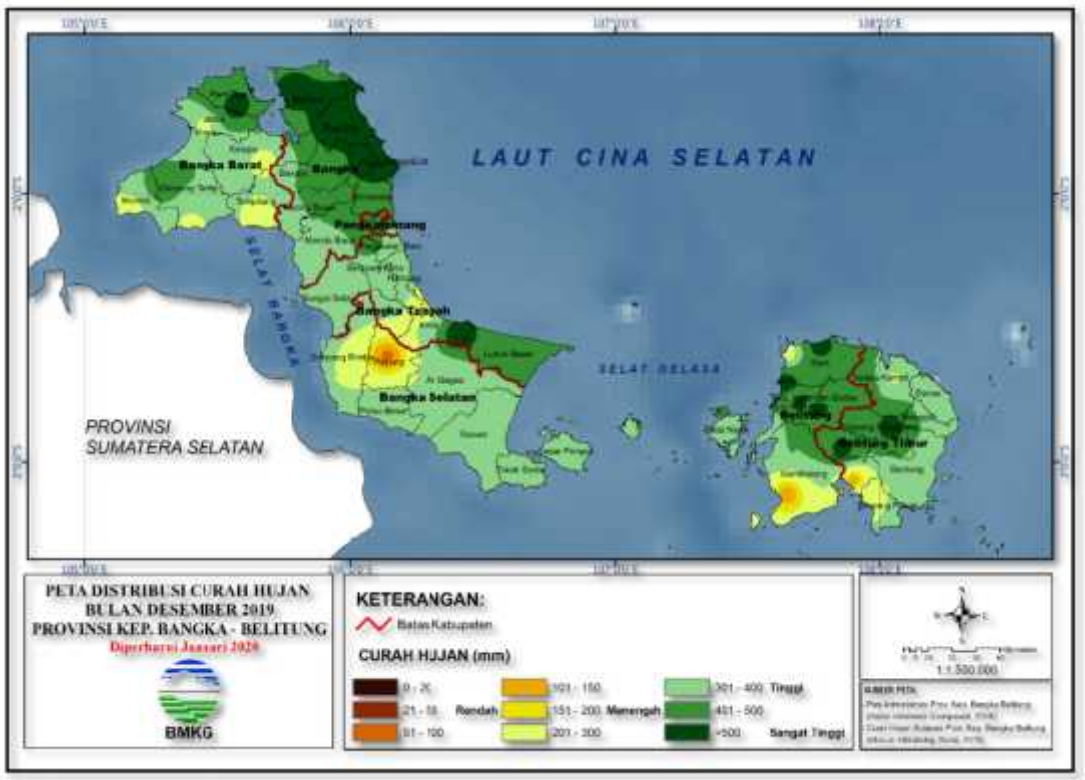

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, 2020

2.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

2.1.2.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 261.823,44 Ha atau 88,09% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti pada tabel 2.3. Kawasan budidaya ini mencakup kawasan pertanian, kawasan permukiman, pertambangan dan industri. Secara spasial, pola ruang kawasan budidaya mengarah pada bagian wilayah Barat-Timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan.

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting
Kabupaten BangkaTahun 2019

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	Kawasan Hutan Produksi	70,105.04	23.21
2	Kawasan Hutan Rakyat	13,894.97	4.60
3	Kawasan Pertanian	15,220.87	5.04
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	10,346.93	3.43
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	4,873.94	1.61
4	Kawasan Perkebunan	98,662.13	32.66
	Kawasan Usaha Perkebunan	56,297.17	18.64
	Kawasan Perkebunan Rakyat	42,364.96	14.02
5	Kawasan Peternakan	700.00	0.23
6	Kawasan Perikanan	3,309.54	1.10
7	Kawasan Pertambangan	28,441.33	9.42
8	Kawasan Pertambangan Rakyat	4,125.00	1.37
9	Kawasan Industri	983.13	0.33
10	Kawasan Pariwisata	948.23	0.31
11	Kawasan Pemukiman Kota	9,680.43	3.20
12	Kawasan Pemukiman Pedesaan	19,906.87	6.59
13	Kawasan Peruntukan Lainnya	681.49	0.23
	JUMLAH	**266,659.03**	**88,28**

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

2.1.2.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 35.409,97 Ha atau sekitar 11,91% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti tersaji pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting
Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS(HA)	(%)
1	Kawasan Hutan Lindung	16.897,95	5,68
2	Kawasan Perlindungan Setempat	2.162,39	0,73
	Kawasan Sempadan Pantai	963,43	0,32
	Kawasan Sempadan Sungai	1.062,64	0,36
	Kawasan Sempadan Danau/Kolong	136,32	0,05
3	Kawasan Hutan Konservasi	15.619,51	5,25
4	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	600,00	0,20
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	130,12	0,04
	JUMLAH	**35.409,97**	**11,72**

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Kawasan yang termasuk ke dalam kawasan lindung antara lain HL Pejem, HL Bubus II, HL Bubus, HL Sungailiat Mapur, dan HL Kotawaringin. Sementara untuk kawasan hutan konservasi memiliki luas kurang lebih 24.961,40 ha atau 8,46 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka yakni HK Gunung Maras (Sumber: BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020).

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bangka baik lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung seperti pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

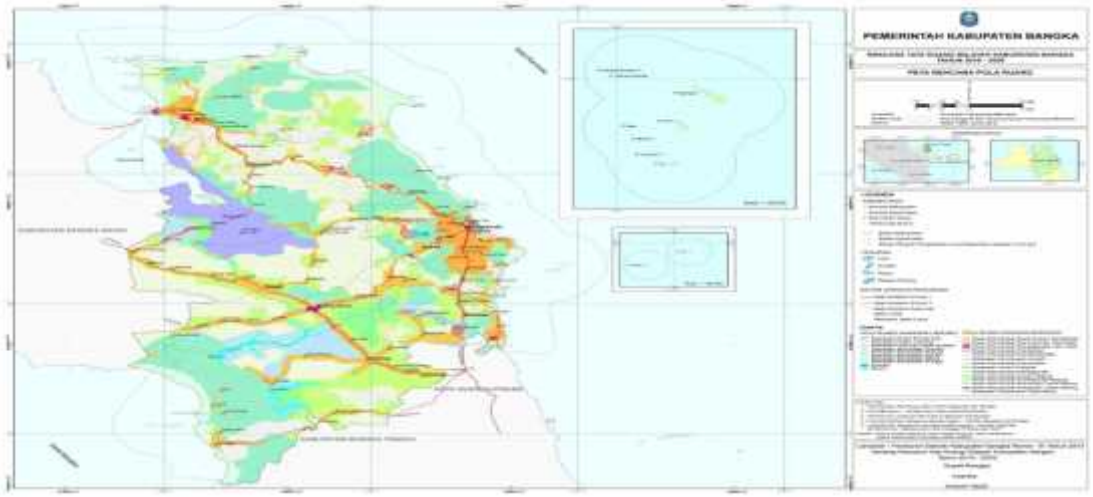

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

2.1.3.1. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat. Pengembangan potensi perkebunan besar/sedang/kecil untuk komoditas perkebunan seperti: sawit dan singkong. Pengembangan potensi perkebunan rakyat untuk komoditas berupa: lada, karet, dan singkong.

Gambar 2.6
Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka.Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi perkebunan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.6. dan Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Adapun wilayah sentra produksi tanaman perkebunan tersebar pada 4 (empat) kecamatan seperti disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Lada	Bakam, Puding Besar, Mendo Barat
2	Karet	Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang,
3	Singkong Casesa	Mendo Barat, Riau Silip, Puding Besar, Belinyu, Sungailiat
4	Kelapa Sawit	Bakam, Puding Besar, Belinyu, Riau Silip, Merawang, Mendo Barat
5	Kelapa	Sungailiat, Riau Silip

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

Luas panen dan produksi komoditi tanaman perkebunan Kabupaten Bangka kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi seperti disajikan pada Tabel 2.1.6.

Luas panen komoditi lada tahun 2019 seluas 4.138,95 ha meningkat dibanding tahun 2018 seluas 3.464,82 ha. Demikian juga produksinya, tahun 2019 sebesar 4.479,21 ton meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 4.259,82 ton.

Sementara luas panen komoditi karet tahun 2019 sebesar 17.075,17 ha menurun dibanding tahun 2018 sebesar 17.140,20 ha. Akan tetapi berbeda dengan produksinya, tahun 2019 sebesar 51.304,93 ton meningkat drastis dibanding tahun 2018 sebesar 22.672,30 ton.

Salah satu komoditi perkebunan yang mulai dikembangkan di wilayah Kabupaten Bangka adalah singkong casesa sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka. Hal ini didukung dengan keberadaan pabrik pengolahan tapioka di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Sungailiat. Luas panen dan produksi singkong casesa setiap tahun semakin meningkat, data terakhir tahun 2019 luas panen mencapai 1.848,50 ha dengan produktivitas sebesar 28.707,50 ton.

Luas panen komoditi kelapa sawit tahun 2019 seluas 8.697,32 ha, meningkat dibanding tahun 2018 seluas 8.616,70 ha. Produksinya juga meningkat pada tahun 2019 sebesar 39.067,04 ton dibanding tahun 2018 sebesar 38.550,50 ton.

Luas panen komoditi kelapa tahun 2019 seluas 2.343,53 ha, menurun dibanding tahun 2018 seluas 2.901,90 ha. Akan tetapi, produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2.343,53 ton dibanding tahun 2018 sebesar 2.140,10 ton.

Tabel 2.6
Luas Panen (ha) dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan (Ton)
Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019

No	Komoditi	2017		2018		2019	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Lada	5.989,53	5.927,85	3.464,82	4.259,94	4.138,95	4.479,21
2	Karet	32.110,07	41.412,77	17.140,20	22.672,30	17.075,17	51.304,93
3	Singkong Casesa	614,50	9.375,00	1.517,00	22.755,00	1.848,50	28.707,50
3	Kelapa Sawit	21.375,11	83.547,73	8.616,70	38.550,50	8.697,32	39.067,04
4	Kelapa	6.421,52	1.205,86	2.901,90	2.140,10	2.935,77	2.343,53

Sumber : Data Statistik Perkebunan, Dinas Pangan Pertanian Kab. Bangka, 2020

2.1.3.2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi cukup besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Sektor pertanian juga berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan serta peningkatan daya saing komoditi produk pertanian tahun 2019. Peningkatan daya saing komoditas dan produk olahan pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna peningkatan *Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian* serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir.

Secara keseluruhan, potensi pertanian memiliki luas kurang lebih 15.220,87 ha atau 5,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertanian ini terdiri dari: (i) potensi pertanian lahan basah yaitu dengan luas kurang lebih 10.346,93 ha atau 3,43% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, dan

(ii) potensi pertanian lahan kering yaitu dengan luas kurang lebih 4.873,94 ha atau 1,61% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertanian tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.8. dan Gambar 2.9.

Gambar 2.8
Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Gambar 2.9
Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

2.1.3.3. Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan

budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air laut, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing komoditi produk perikanan.

Potensi perikanan ini memiliki luas kurang lebih 3.309,54 ha atau 1,10% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

2.1.3.4. Potensi Peternakan

Kabupaten Bangka memiliki potensi peternakan yang cukup besar karena kawasan peternakan ini menyebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan ini dapat terintegrasi dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa khususnya dengan mengintegrasikan peternakan sapi di dalam kawasan perkebunan sawit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang.

Potensi peternakan ini memiliki luas kurang lebih 700 ha atau 0,23% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

2.1.3.5. Potensi Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang masih berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Peruntukan kawasan pertambangan yang memiliki potensi untuk diusahakan melalui penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan usaha pertambangan. WIUP di Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, nonlogam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu:

- WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat);
- WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Namun, berdasarkan pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka, secara keseluruhan potensi pertambangan di Kabupaten Bangka memiliki luas

lebih kurang 32.566,33 ha atau 10,78% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertambangan ini terdiri dari: (1) potensi pertambangan dengan luas 28.441,33 ha atau atau 9.42% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (2) potensi pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha atau 1,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertambagan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12
Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

2.1.3.6. Potensi Industri

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kabupaten Bangka sebagai daerah industri dan perdagangan. Pemerintah daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2005 menetapkan Kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Secara keseluruhan, potensi industri direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang dengan luasan lebih kurang 983,13 ha atau 0,33% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2..13.

Gambar 2.13
Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Perkembangan jumlah industri besar, menengah dan kecil di Kabupaten Bangka tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7, Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.7
Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	4	279	343.727.232
2	Merawang	3	194	162.132.198
3	Pemali	0	0	0
4	Puding Besar	1	100	230.000.000
5	Mendo Barat	0	0	0
6	Bakam	2	162	354.967.348
7	Riau Silip	1	0	27.800.000
8	Belinyu	1	526	151.000.000
	JUMLAH	**12**	**1.261**	**1.269.626.778**

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

Tabel 2.8
Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	15	1.092	65.152.000
2	Merawang	10	474	57.690.353
3	Pemali	2	30	9.275.000
4	Puding Besar	1	119	8.200.000
5	Mendo Barat	2	157	18.031.305
6	Bakam	0	0	0
7	Riau Silip	4	315	22.732.000
8	Belinyu	2	190	5.500.000
	JUMLAH	**36**	**2.377**	**186.580.658**

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

Tabel 2.9
Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	898	3.010	34.925.909.000
2	Merawang	302	1.037	8.713.092.000
3	Pemali	323	832	10.153.050.000
4	Puding Besar	206	379	1.689.900.000
5	Mendo Barat	210	454	3.046.450.000
6	Bakam	164	317	1.837.000.000
7	Riau Silip	114	289	36.521.068.848
8	Belinyu	301	1.027	10.083.080.000
	JUMLAH	**2.518**	**7.345**	**106.969.549.848**

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

2.1.3.7. Potensi Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 948,23 ha atau 0,31% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat, seperti disajikan pada Gambar 2.14.

Gambar 2.14
Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Potensi pariwisata di Kabupaten Bangka ini semakin memberikan keyakinan bagi para investor seiring upaya kuat dan intens yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dalam upaya menciptakan dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang lebih 600 ha dari 948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka.Pada kawasan ini akan dibangun *golf resort, leisure and entertainment, cultural resort, wellness resort, dan tourism village*, seperti disajikan pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2019

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2018

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2017–2019 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan rataan sebanyak 86.966 orang. Jika pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka berjumlah 85.102 orang, mengalami pertumbuhan hingga 12,79 persen atau bertambah sebanyak 9.650 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 75.452 orang saja, dan kembali mengalami peningkatan jumlah kunjungan hingga mencapai sebanyak 100.345 orang atau tumbuh sebesar 17,91 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi salah satu event internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yakni *Event Internasional SungailiatTriathlon2019* yang bertempat di Pantai Tanjung Pesona Sungailiat, Sungailiat *Adventure Trail*, Bangka *Outdoor,Lintas Timur Trail Run*, festival kepariwisatan dan berbagai festival budaya lainnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1
Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2019

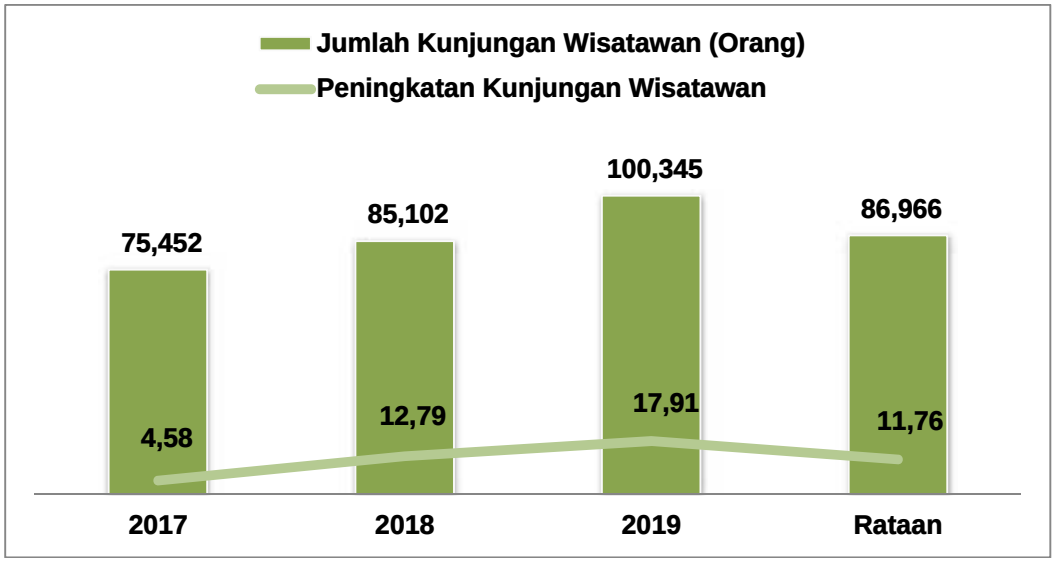

Sumber: Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

Munculnya beberapa spot baru destinasi wisata di Kabupaten Bangka seperti Pantai Tongachi dengan penangkaran penyunya, Pantai Tikus Emas, *Ecopark* Pemali dan lain-lain mampu memacu peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka, disamping beberapa lokasi wisata yang telah

ada lebih dulu dan tetap menarik untuk dikunjungi. Selengkapnya beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
1	Sungailiat	1. Pantai Matras 2. Pantai Parai Tenggiri 3. Pantai Tanjung Pesona 4. Pantai Tongachi 5. Pantai Tikus Emas 6. Pantai Rebo 7. Pantai Rambak 8. Pantai Mang Kalok 9. Pantai Takari 10. Novila Kuala 11. Puri Tri Agung 12. Bukit Mahayana 13. Pantai Teluk Uber	- Hotel Tanjung Pesona, Hotel Parai, Novilla Hotel, Puri Ansel, Batu Bedaun Resort, Hotel Sunjaya, Hotel ST 12, Boss Hotel, Hotel Tri Mustika - Penginapan - Restoran - Rumah makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
2	Pemali	1. Pemandian Air Panas Tirta Tapta 2. Air Simpur 3. Bukit Tujuh Sempan 4. *Ecopark* Pemali	- Rumah makan - Cafe - Tempat Ibadah
3	Merawang	1. Pantai Air Anyir 2. Pantai Temberan 3. Hutan Nyato Kimak	- Hotel Jatimas - Rumah makan - Tempat Ibadah
4	Belinyu	1. Pantai Penyusuk 2. Pantai Remodong 3. Pantai Levar 4. Wisata Aik Bedelew 5. Mangrove Perpat Permai 6. Mangrove Sungai Buntu 7. Situs Benteng Kutopanji 8. Kelenteng Bongkap 9. Goa Maria Belinyu 10. Kuil Pha Kak Liang	- Hotel Dragon, Sam Pesaren Hotel, Mink-Mink Inn - Penginapan - Rumah Makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
5	Riau Silip	1. Gunung Maras 2. Pantai Tuing	- Cafe - Tempat Ibadah
6	Bakam	Hutan Raya Rimbe Mambang	- Rumah makan - Tempat Ibadah
7	Mendo Barat	Situs Benteng Kota Kapur	- Rumah makan - Tempat Ibadah

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

2.1.3.8. Potensi Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan potensi kawasan seluas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada gambar 2.16. Potensi sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut skalanya, yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, kawasan perdagangan Belinyu, kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

Gambar 2.16
Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan Belinyu dikembangkan di sepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktiftas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga,

ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan, showroom mobil, motor, *sparepart* kendaraan, bengkel, dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.

2.1.3.9. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum wilayah di Pulau Bangka termasuk Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat dijelaskan karena bentuk morfologi Pulau Bangka yang cenderung datar. Gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten Bangka seperti dijelaskan dalam peta berikut :

Gambar 2.17.
Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka

Sumber: Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana Kab. Bangka, Bappeda, 2014

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya banjir genangan air di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan air laut saat pasang dan tingginya curah hujan pada musim penghujan. Namun, genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Kejadian bencana lainnya secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah kebakaran hutan pada musim kemarau dan adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut.

Berdasarkan data tahun 2019, dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka ada 6 (enam) Kecamatan yang termasuk rawan terjadi bencana sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	LOKASI/ KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ LINGKUNGAN	JENIS BENCANA	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BANGUNAN
A.1	**KECAMATAN SUNGAILIAT**				
	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana				
	1. Kel. Kudai				
	- Jl. A. Yani	Banjir	-	1.342 Org	347
	- Kp. Pasir	Banjir	-	591 Org	170
	-				
	2. Kel. Parit Padang				
	- Lingk. Parit Padang	Banjir	4 Ha	270 Org	64
	- Lingk. Sudi Mampir	Banjir	2 Ha	38 Org	20
	- Lingk. Lubuk Kelik	Banjir	2 Ha	41 Org	20
	- Lingk. Rambak	Banjir	3 Ha	80 Org	27
	3. Kel. Srimenanti Lingk. Sidodadi	Banjir Genangan Air	-	1.495 Org	400
	4. Kel. Sungailiat				
	- Lingk. Maria Goreti	Banjir/	10 Ha	30 KK	15
	- Lingk. Nelayan I Daerah yang Berpotensi Terjadi Bencana	Gelombang Pasang	- -	2.700 Jiwa	550
	5. Kel. Kudai				
	- Lingk. Parit IV	Gelombang	-	878 Org	216

NO	LOKASI/ KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ LINGKUNGAN	JENIS BENCANA	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BANGUNAN
		Pasang Wabah Penyakit Banjir			
B.2	**KECAMATAN PUDING BESAR**				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana				
	- Desa Kayu Besi	Banjir	1 Ha	100 org	60
	- Desa Kota Waringin	Banjir	12.000 m2	104 org	26
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana	-	-	-	-
C.3	**KECAMATAN BAKAM**				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana	-	-	-	-
		Banjir Genangan Air dan Tanah Longsor	25.270 m2	2.887	549
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana				
	1. Bukit Layang	Banjir Genangan Air dan Tanah Longsor	5.500 m2	855	195
	2. Mangka				
D.4	**KECAMATAN BELINYU**				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana	Banjir Genangan air	79.766 m2	2.866	816
	1. Desa Riding Panjang Kp Jintan				
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana				
	1. Kel. Kuto Panji Kp. Berok & Sungai Keladi	Banjir Genangan Air	24.739 m2	11.693	2.712
	Desa Bintet Dusun Pesaren	Banjir Genangan Air	68.670 m2	2.092	445
E.5	**KECAMATAN MERAWANG**				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana				
	1. Desa Kimak	Banjir	3 Ha	70 Orang	24
	2. Desa Jurung	Banjir	1 Ha	275 Orang	6
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana	-	-	-	-

NO	LOKASI/ KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ LINGKUNGAN	JENIS BENCANA	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BANGUNAN
F.6	**KECAMATAN PEMALI**				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana				
	1. Desa Air Duren	Banjir & Genangan air	7.650 Ha	3.024 Jiwa	-
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana	-	-	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Bangka, 2020

2.1.4. Aspek Demografi

Aspek demografi memberikan deskripsi tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014;102).

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, akan tetapi juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, serta kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah

kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2019 semester 2sebanyak 318.756 jiwa dengan kepadatan 108 jiwa per km^2, meningkat dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 317.052 jiwa dengan kepadatan 107 jiwa per km^2, seperti tersaji pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk dan Kepadatan per km^2 Menurut Kecamatan
Di Kabupaten BangkaTahun 2015-2019

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km^2 (jiwa)
1	Sungailiat	146,38	91.822	627,29
2	Bakam	488,1	18.473	37,85
3	Pemali	127,87	33.379	261,04
4	Merawang	164,4	29.743	180,92
5	Puding Besar	383,29	19.484	50,83
6	Mendo Barat	570,46	48.853	85,64
7	Belinyu	546,5	49.229	90,08
8	Riau Silip	523,68	27.773	53,03
Time series	**2019**	**2.950,68**	**318.756**	**108,03**
	2018	**2.950,68**	**317.052**	**107**
	2017	**2.950,68**	**313.689**	**106**
	2016	**2.950,68**	**311.525**	**105**
	2015	**2.950,68**	**309.067**	**105**

Sumber:Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2019

Dari Tabel 2.12 diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi pertambahan penduduk sebanyak 1.074 jiwa. Pertambahan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar

karena berkembangnya daerah Kabupaten Bangka dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka.

2.1.4.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Selama tahun 2014-2019, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan, seperti disajikan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio
Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sungailiat	46.709	45.113	91.822	103,54
2	Bakam	9.659	8.814	18.473	109,59
3	Pemali	17.092	16.287	33.379	104,94
4	Merawang	15.288	14.455	29.743	105,76
5	Puding Besar	10.244	9.240	19.484	110,87
6	Mendo Barat	25.499	23.354	48.853	109,18
7	Belinyu	25.108	24.121	49.229	104,09
8	Riau Silip	14.358	13.415	27.773	107,03
	2019	**163.957**	**154.799**	**318.756**	**105,92**
	2018	**163.189**	**153.863**	**317.052**	**106,06**
	2017	**161.912**	**151.777**	**313.689**	**106,68**
	2016	**160.915**	**150.610**	**311.525**	**106,84**
	2015	**159.361**	**149.706**	**309.067**	**106,45**

Sumber:Dindukpencapil Kabupaten Bangka,2019

Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 163.957 jiwa atau sebesar 51,43 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 154.799 jiwa atau sebesar 48,57 persen. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, seperti disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten BangkaTahun 2015-2019 (%)

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
0 – 4	7,45	7,68	7,36	7,8	7,76
5 – 9	9,52	9,24	9,02	9,28	9,76
10 – 14	9,59	9,31	9,4	9,21	9,50
15 – 19	8,38	8,61	8,78	8,71	8,94
20 – 24	7,73	7,9	7,84	7,77	7,89
25 – 29	9,3	9,11	8,71	8,34	7,46
30 – 34	9,48	9,47	9,21	8,99	8,72
35 – 39	8,65	8,77	9,15	9,11	8,78
40 – 44	6,87	7,13	7,24	7,23	7,41
45 – 49	5,73	5,79	6,03	6,06	6,09
50 – 54	4,85	4,8	4,78	4,76	4,91
55 – 59	4,45	4,28	4,31	4,25	4,10
60 – 64	3,26	3,37	3,42	3,43	3,46
65 – 69	2,02	2,07	2,23	2,34	2,49
70 – 74	1,09	1,05	1,06	1,11	1,30
≥ 75	1,61	1,41	1,46	1,6	1,44
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2019 (Data Diolah)

Dalam bentuk piramida penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2019, tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2019 (%)

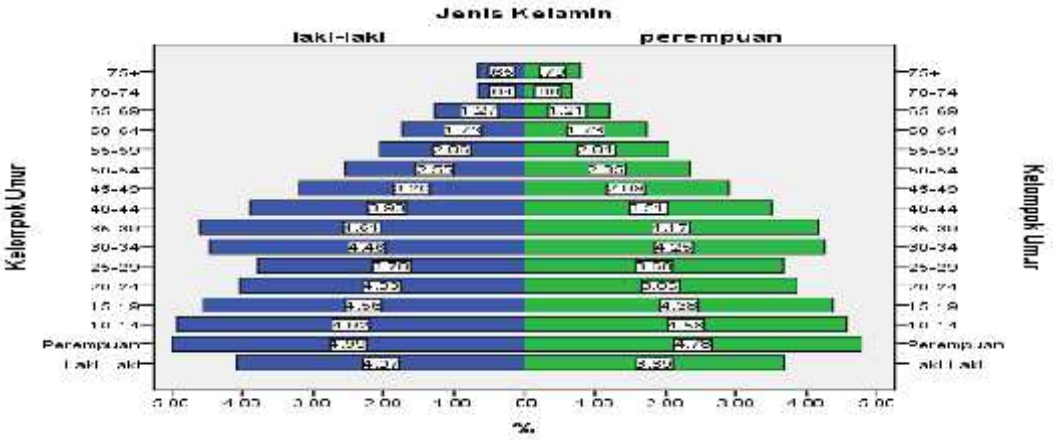

Rasio Ketergantungan

Pada Tahun 2019, Kabupaten Bangka memperoleh bonus demografi yang dalam kata lain Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non Produktif (0-14 tahun dan >=65 tahun) seperti yang tergambar di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif
di Kabupaten BangkaTahun 2019

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	44.549	27,17	41.581	26,86	86.130	27,02
2	15-64	111.227	67,84	104.742	67,66	215.969	67,75
3	>=65	8.181	4,99	8.476	5,48	16.657	5,23
Jumlah		**163.957**	**100,00**	**154.799**	**100,00**	**318756,00**	**100,00**

Sumber : Dindukpencapil Kab. Bangka, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita peroleh rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Tahun 2019 yang secara definisinya merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umurmuda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Rumus ratio ketergantungan adalah :

$$D = \frac{P_{0-1} + P_{6+}}{P_{1-6}} x\ 100\%$$

Dimana :

DR = Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

P_{0-14} = Jumlah Penduduk Usia 0-14

P_{15-64} = Jumlah Penduduk Usia 15-64

P_{65} = Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun ke atas

Sehingga didapat sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{P_{0-1} + P_{6+}}{P_{1-6}} x\ 100\%$$

$$= \frac{86.130 + 16.657}{215.969} x\ 100\%$$

$$= 47{,}59\%$$

2.1.4.4 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Secara struktur, pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 (tiga) sektor yaitu primer, sekunder dan tersier, seperti terlihat pada tabel 2.16. Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan, perikanan, usaha pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup pekerjaan dalam usaha usaha industri pengolahan dan usaha kontruksi. Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019

SEKTOR	TAHUN			RATAAN
	2017	2018	2019	
PRIMER	47,82	47,30	44,36	46,49
SEKUNDER	12,72	15,30	16,19	14,74
TERSIER	39,46	37,40	39,45	38,77
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

2.1.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan RKPD 2021 Kabupaten Bangka terlebih dahulu disusun capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari3 (tiga) fokus yaitu (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) kesejahteraan sosial; dan (3) seni budaya dan olah raga.

2.1.5.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka
Tahun 2015-2019

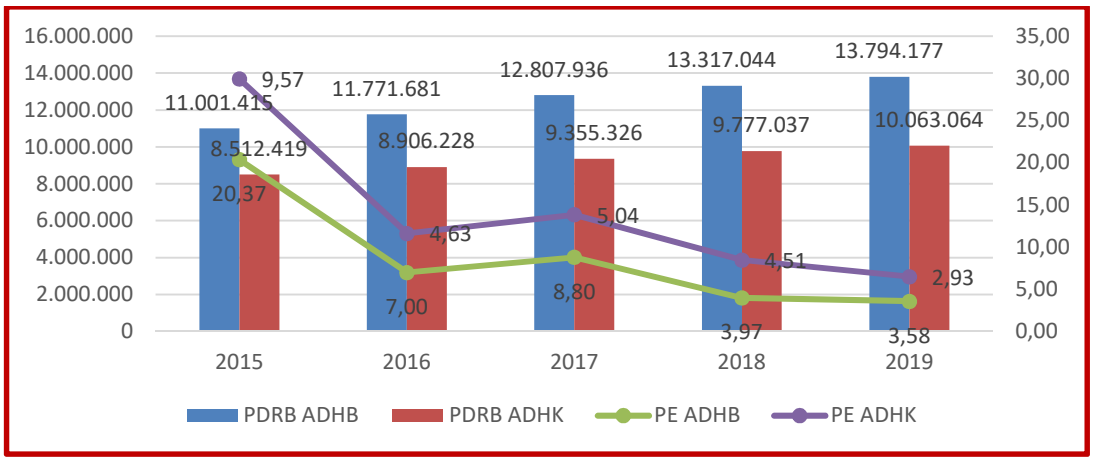

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Sementara perkembangan PDRB menurut sektor atau lapangan usaha selama periode tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18.

Tabel 2.17
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka
Tahun 2015 – 2019

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha(Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.358,78	2.554,17	2.608,.42	2.594,48	2.683,99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.463,58	1.476,18	1.592,60	1.487,37	1.370,82
C	Industri Pengolahan	2.485,12	2.574,15	2.865,56	2.968,49	2.927,90
D	Pengadaan Listrik & Gas	19,57	26,23	31,71	34,96	34,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	2,50	2,85	3,09	3,25
F	Konstruksi	964,87	1.048,01	1.189,44	1.306,43	1.479,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.355,74	1.516,73	1.706,86	1.857,97	1.954,85
H	Transportasi dan Pergudangan	245,19	266,01	292,54	315,95	350,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,11	295,15	320,83	352,50	406,76
J	Informasi &Komunikasi	195,50	214,56	236,29	263,30	295,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	302,41	328,23	352,14	380,65	398,50
L	Real Estate	370,45	393,82	426,89	476,29	502,11
M,N	Jasa Perusahaan	26,09	27,81	30,56	34,39	37,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	548,05	598,26	658,93	704,07	750,26
P	Jasa Pendidikan	225,78	256,48	277,82	301,84	328,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.,87	111,51	121,83	131,86	148,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	70,01	81,88	92,67	103,40	119,79
Produk Domestik Regional Bruto		**11.001,.41**	**11.771,68**	**12.807,94**	**13.317,04**	**13.794,18**

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten BangkaTahun 2015 – 2019

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.685,29	1.779,35	1.781,09	1.911,35	1.975,12
B	Pertambangan dan Penggalian	1.303,97	1.324,89	1.385,52	1.387,05	1.400,20
C	Industri Pengolahan	2.085,12	2.168,22	2.319,79	2.351,86	2.326,79
D	Pengadaan Listrik & Gas	15,54	17,78	18,63	20,21	19,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,61	1,70	1,85	1,92	2,01
F	Konstruksi	683,61	723,60	779,37	819,40	896,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.003,41	1.052,49	1.128,49	1.189,19	1.213,81
H	Transportasi dan Pergudangan	172,79	182,84	195,53	210,61	222,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188,85	200,64	211,13	224,99	245,15
J	Informasi &Komunikasi	178,51	195,07	210,39	234,63	262,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	225,70	240,23	245,84	256,64	264,45
L	Real Estate	287,23	295,01	310,26	338,14	346,54
M,N	Jasa Perusahaan	18,67	19,14	19,85	21,23	21,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385,76	409,65	434,30	472,36	500,01
P	Jasa Pendidikan	147,60	157,26	165,51	180,07	192,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,85	82,88	87,93	92.61	101,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	49,91	55,48	59,85	64,78	72,23
Produk Domestik Regional Bruto		**8.512,42**	**8.906,23**	**9.355,33**	**9.777,04**	**10.063,06**

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Sementara perkembangan PDRB per kapita dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2015-2019 dapat diihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

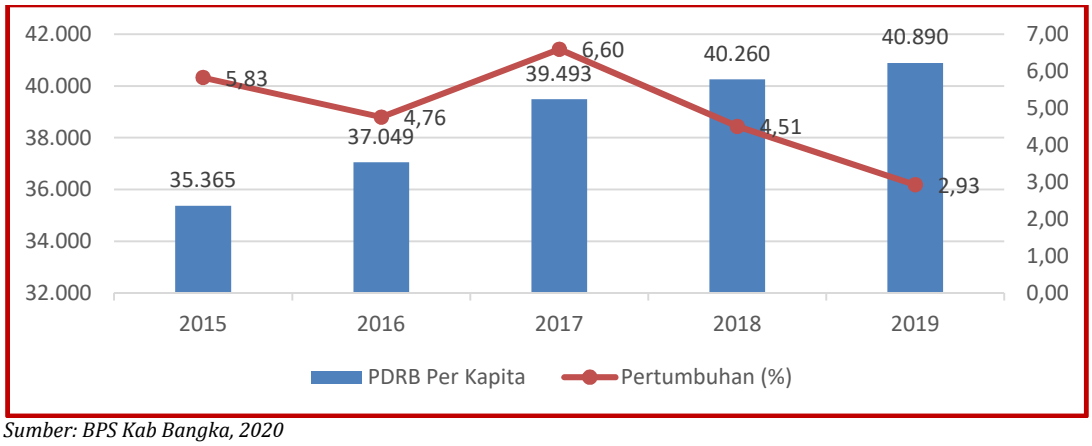

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

b. Laju Inflasi

Laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

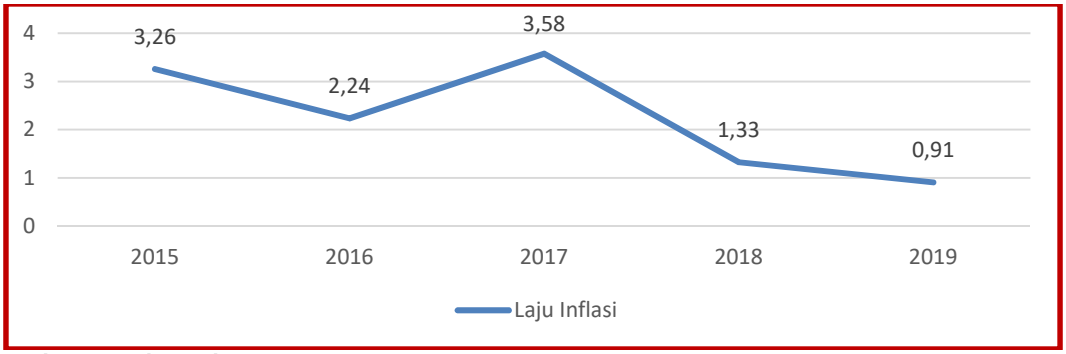

Sumber: BPS Kab. Bangka, 2020

Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah 10 % (sepuluh persen). Pada tahun 2019 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami penurunan inflasi yang sangat ekstrim sebesar 0,91 persen. Angka inflasi 0,91 tahun 2019 ini menunjukkan angka inflasi yang menurun dibandingkan denganangka inflasi tahun 2018 yang sebesar 1,33 persen. Laju inflasi sektoral

pada tahun 2019 yang menurun ini disumbang oleh semua sektor lapangan usaha.

c. Indeks Disparitas Pendapatan Antar Kecamatan

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarkecamatan di Kabupaten Bangka digunakan teknik analisis Indeks Williamson.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai indeks sebesar 0,198 – 0,189. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Bangka termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan.

Grafik 2.6
Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

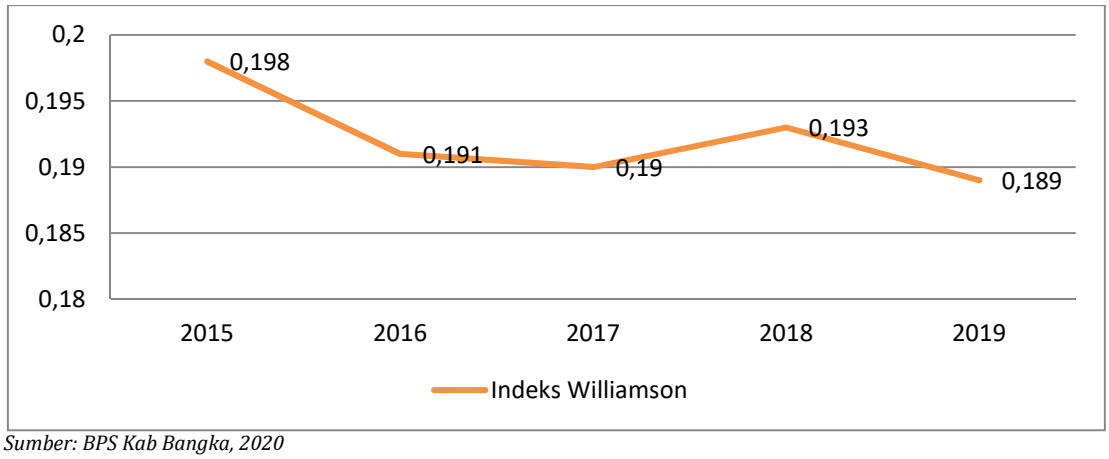

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

d. Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0.4<GR < 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada periode 2015-2019, Gini Ratio berkisar pada angka 0,259 hingga 0,269, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ketimpangan pendapatan ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, Gini Ratio berada pada angka 0,259. Angka ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,282 di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan hingga mencapai 0,269 pada tahun 2019, seperti disajikan pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7
Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

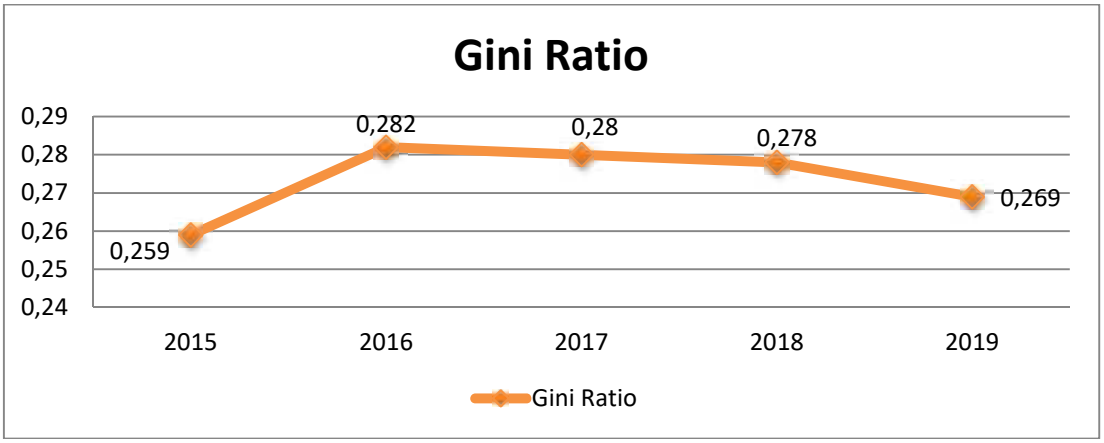

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

e. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Grafik 2.8. menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2014 – 2019 mempunyai trend yang terus meningkat. Pada tahun 2014 penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 94,80 persen, kemudian menurun hingga mencapai 94,37 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016 serta meningkat lagi menjadi 94,90 pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 94,53 dan terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 95,08.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

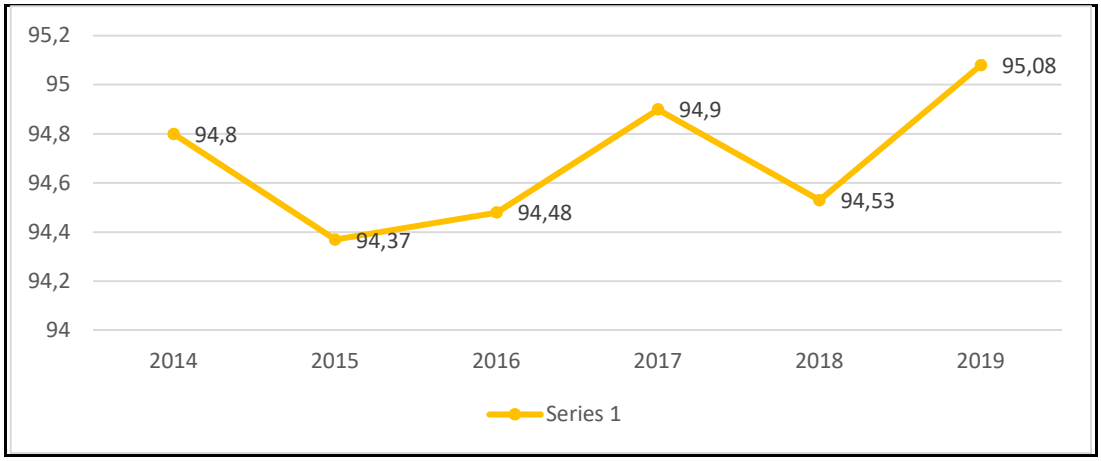

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

f. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya tren perkembangan IPM dalam empat tahun terakhir, tersaji pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,79	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39
2	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	10.679	10.904	11.279	11.420	12.043	12.480
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,36	12,37	12,58	12,68	12,76
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92	7,94	7,96	8,19	8,20	8,23
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,47	70,48	70,52	70,56	70,73	70,99

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 -2019, IPM terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Bangka sebesar 69,79 pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 menjadi 70,03 dan 70,43 pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai 71,80 dan pada tahun 2019 sebesar 72,39. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuknya.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,92 pada tahun 2014 menjadi 8,23 di tahun 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,33 di tahun 2014 menjadi 12,76 di tahun 2019. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,47 pada tahun 2014 menjadi 70,99 di tahun 2019. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 10,679 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 12,480 juta rupiah di tahun 2019. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

2.1.5.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan terhadap indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.

2.1.5.2.1 Pendidikan

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf

Tabel 2.20 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca di Kabupaten Bangka selama periode 2014-2019 cenderung mengalami fluktatif. Pada tahun 2019, angka melek huruf Kabupaten Bangka sebanyak 99,65 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka
Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penduduk berusia 15 Tahun keatas yang bisa membaca	96,74	98,24	97,89	97,83	98,49	99,66
2	Angka Buta Huruf	1,76	2,13	2,23	2,17	1,53	0,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Bangka, 2019

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Selengkapnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2014 hingga 2019, tersaji pada Grafik 2.9

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka
Tahun 2014– 2019

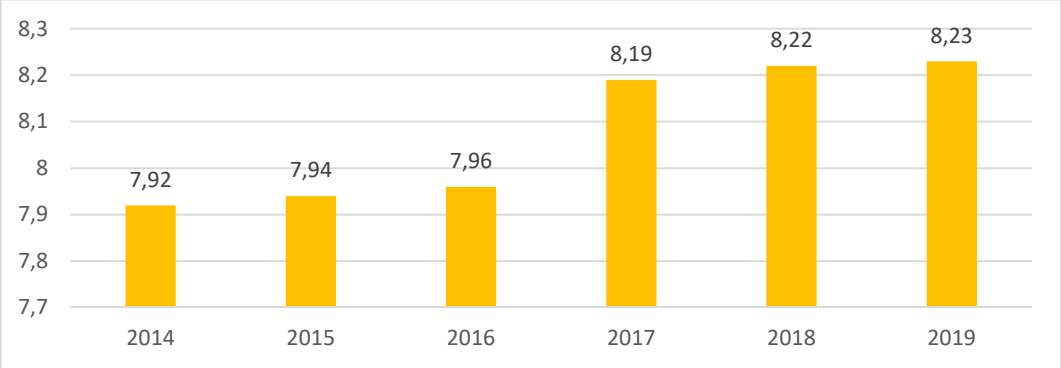

Sumber: BPS Kab. Bangka, 2020

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang terus meningkat dengan interval antara 7,88 tahun sampai dengan 8,23 tahun.

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

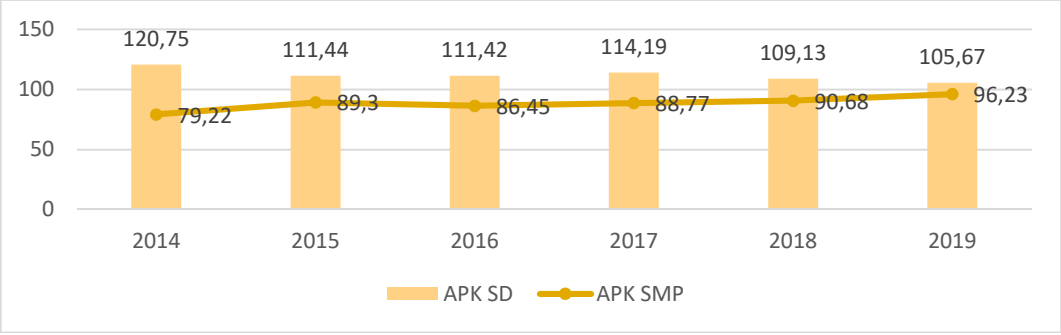

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab Bangka, 2019
Dinas Dikpora Kab. Bangka, 2019

d. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Selengkapnya perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten Bangka tahun 2014-2019 tersaji pada grafik 2.11.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi MurniSD dan SMP
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

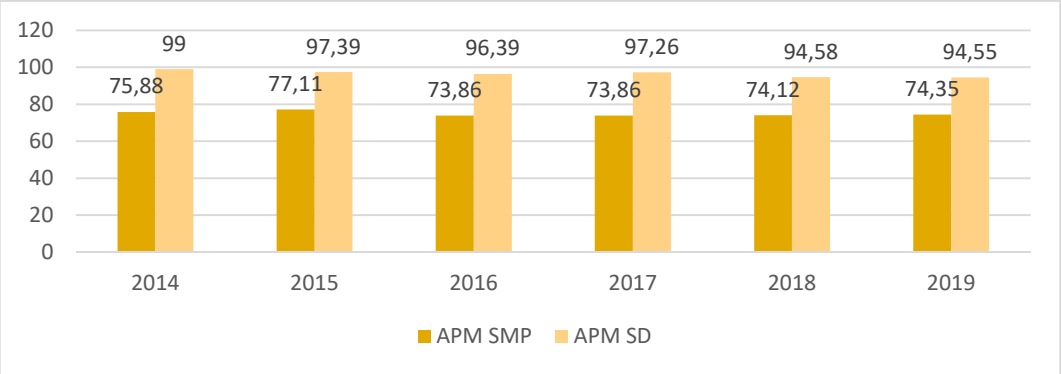

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Bangka, 2019
Dinas Dikpora Kab Bangka, 2019

2.1.5.2.2 Kesehatan

Beberapa indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2014-2019 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel 2.21

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kematian bayi	5,35	4,87	4,36	4,22	3,39	3,25
Angka usia harapan hidup	70,47	70,49	70,52	70,56	70,73	70,99
Persentase balita gizi buruk	0,17	0,08	0,06	0,04	0,02	0,02

Sumber: BPS Kab Bangka, 2019

Angka kematian bayi menurun sangat signifikan dari 5,35 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2014 menjadi hanya 3,25 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2019. Angka usia harapan hidup terkoreksi dari 70,47 tahun menjadi 70,99 tahun pada tahun 2019. Begitu juga, persentase balita gizi buruk menurun dari 0,17 persen pada tahun 2014 hingga mencapai 0,02 persen saja pada tahun 2019. Khusus indikator persentase balita gizi buruk ini sangat erat kaitannya dengan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.22 dan Tabel 2.23.

Tabel 2.22
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan Riskesdas
Tahun 2013 dan Tahun 2018

Uraian	Tahun	
	2013	**2018**
Angka Stunting (%)	32,27	18,20

Sumber : Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018

Tabel 2.23
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM
Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun	
	2019 (23 Feb 2019)	**2020 (23 Feb 2020)**
Angka Stunting (%)	8,9	5,05

Sumber : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, 2020

Berdasarkan tabel di atas, prevalensi angka *stunting* Kabupaten Bangka hasil Riskesdas yang dilakukan penghitungan per lima tahun sekali diperoleh data di tahun 2013 sebesar 32,27 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 18,20 persen. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan pengukuran prevalensi *stunting* berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per tanggal 23 Februari yang menunjukkan penurunan angka *stunting* dari sebesar 8,9 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,05 persen di tahun 2020.

Pada tahun 2020, lebih dari separuh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami situasi krisis dalam bidang kesehatan sejak kemunculan *COVID-19 (Corona Virus Disease-19)*. Jumlah kasus pasien yang positif terinfeksi COVID-19 dan diiringi kasus kematian semakin hari semakin meningkat. Kabupaten Bangka merupakan salah satu wilyah di Indonesia yang terdampak dengan situasi ini dengan kasus positif COVID-19 per 17 Juni 2020 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, walaupun tanpa ada kasus kematian dan angka kesembuhan sebanyak 14 (empat belas) orang. Perbandingan jumlah kasus tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Perbandingan Jumlah Kasus Positif, Kematian dan Kesembuhan Akibat COVID-19 (Per 17 Juni 2020)

	Kasus Positif	Kesembuhan		Kematian	
		n	%	n	%
Dunia	8.248.185	4.298.972	52,12	445.144	5,40
Indonesia	41.431	16.243	39,20	2.276	5,49
Kabupaten Bangka	**57**	**14**	**24,56**	**0**	**0,00**

Sumber : Publikasi Data COVID-19, Dinas Kesehatan Kab. Bangka, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat angka kematian di Indonesia disebabkan oleh *Covid-19* terbilang cukup tinggi yaitu 2.276 kasus kematian dengan *death rate* sebesar 5,49 %. Berdasarkan data terkini penyebaran *COVID-19* di Indonesia, angka kematian tertinggi didominasi pada kelompok umur diatas 45 tahun yang tentu hal ini sangat berdampak dengan usia harapan hidup di Indonesia. Tak hanya itu, lebih dari 1.000 kasus positif diantaranya menyerang anak-anak dan balita yang dalam artiannya walaupun angka kematian tertinggi didominasi kelompok umur diatas 45 tahun tak menutup kemungkinan kelompok usia anak dan balita pun memiliki tingkat resiko kematian yang serupa. Tercatat per 10 Juni 2020 angka kematian akibat kasus positif COVID-19 usia anak dan balita mencapai 30 (tiga puluh) kasus yang tentu akan berdampak pada angka kematian bayi di Indonesia.

2.1.5.2.3 Pertanahan

Beberapa indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2013-2018 seperti pada grafik 2.12. Tahun 2013 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 5,19 persen saja, meningkat hingga mencapai 28,5 persen pada tahun 2019.

Grafik 2.12
Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2019

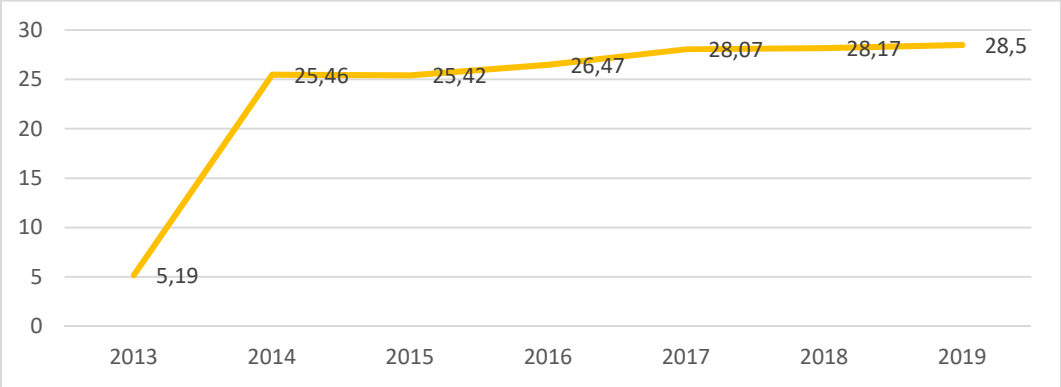

Sumber: DINPERKPP Kab Bangka, 2019

2.1.5.2.4 Ketenagakerjaan

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting sekaligus persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Tabel 2.17 menyajikan perkembangan indikator kinerja bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka tahun 2014-2019.

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja yang Bekerja	132.128	131.559	139.674	149.771	149.323	153.874
Angkatan Kerja	144.181	144.364	150.187	156.011	155.733	159.950
Rasio Penduduk yang Bekerja	0,92	0,91	0,93	0,96	0,96	0,96

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,92, mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga mencapai 0,91 pada tahun 2015 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 mencapai 0,96.

2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator sepertijumlahpenyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

Tabel 2.26
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	10	6	8	8	8
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	11	11	11	10	10	10
3	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	367	434	435	478	478	479
4	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	10	10	10	10	10	11
5	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03
6	Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk	1,20	1,39	1,41	1,52	1,52	1,52

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kab. Bangka, 2020

2.1.6. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.1.6.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.6.1.1 Pendidikan

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Mengingat pentingnya pendidikan dasar, maka diperlukan sistem pembelajaran, kualifikasi dan sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini erat kaitannya dengan hasil belajar siswa yang dapat diukur dari pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran teori ataupun praktek yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Disamping itu, beberapa indikator kinerja terkait dengan pelayanan dasar bidang pendidikan menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan. Selengkapnya perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018 tersaji pada Tabel 2.25.

Tabel 2.27
Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	102,99	106,66	107,21	109,33	100,00	103,56
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	82,96	89,25	91,78	95,5	95,35	96,27
3	Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Rasio Guru/Murid	4,0	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
5	Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang dipelukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan yang berkualitas. Selengkapnya perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Perkembangan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah SD Bangunan Baik	94.09	89,53	90,28	93,71	93,73	93,92
2	Sekolah SMP Bangunan Baik	84.09	85,70	94,19	96,66	96,68	97,78

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak, dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu.

Tabel 2.29
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka
Tahun 2014-2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56,7	72,6	72,8	73,01	73,03	73,05

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

Tabel 2.27 menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2014 – 2019 terus mengalami fluktuasi. Persentase PAUD terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 56,7 persen. Akan tetapi,peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2016, dimana persentase PAUD mencapai 72.8 persen. Di tahun 2019 persentase PAUD mengalami kenaikan menjadi 73,05 persen.

d. Angka Putus Sekolah (APUS)

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2013-2019 disajikan pada tabel 2.28.

Tabel 2.30
Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka
Tahun 2013-2019

No	Uraian	Realisasi						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI	0,1	0,1	0,1	0,08	0,07	0,05	0,06
2	Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs	0,8	0,5	0,2	0,2	0,18	0,16	0,23

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

e. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang sama. Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka tahun 2013 – 2019 tersaji pada tabel 2.28.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelulusan SD/ MI	97.6	99.3	97,97	99,58	99,60	99,85
2	Angka Kelulusan SMP/ MTs	99.75	98.2	99,85	99,90	99,88	99,61
3	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	99.84	98.14	99,91	99,95	99,97	99,85
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV	70,74	70,15	75,97	82,17	82,19	84,54

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

2.1.6.1.2 Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru yang dicanangkan PBB yaitu SDG's sebagai kelanjutan dari program MDG's, bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun data sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Daftar 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kabupaten Bangka Tahun 2019

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH PENDERITA
1	*COMMON COLD* / FLU BIASA	14.719
2	ISPA / INFEKSI SALURAN PERNAPASAN ATAS	11.991
3	*HYPERTENSI* / TEKANAN DARAH TINGGI	10.518
4	*DYSPEPSIA* /GANGGUAN PENCERNAAN	8.055
5	*MYALGIA* / NYERI OTOT	6.189
6	*DIABETES MELLITUS*	4.721
7	*NECROSIS OF PULP* / KERUSAKAN GIGI	4.237
8	*PURE HYPERCOLESTEROL* / KOLESTEROL TINGGI	3.518
9	*PULPITIS* / PERADANGAN GIGI	2.643
10	*DIARRHOAE DAN GASTROENTERITUIS* / DIARE DAN INFEKSI USUS	1.826
TOTAL		**68.417**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka, 2020

a. Angka Kematian Bayi

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	REALISASI					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	4,87	4,87	4,36	4,22	4,19	3,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

Perkembangan angka kematian bayi selama enam tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 4,87, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 3,25. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (*maternal mortality rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita

yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Uraian	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	0,94	0,94	0,81	0,68	0,65	0,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

Secara umum selama tahun 2014-2019 AKI di Kabupaten Bangka terus menunjukan penurunan, yaitu 0,94 pada tahun 2014 dan menurun menjadi 0,61 pada tahun 2019. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat dan dengan optimalisasi inovasi "SMS Bunda Cerdas". Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian

makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Persentase Balita gizi buruk mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 0,13 persen pada tahun 2014 menjadi 0,02 persen pada tahun 2019.

Grafik 2.13
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

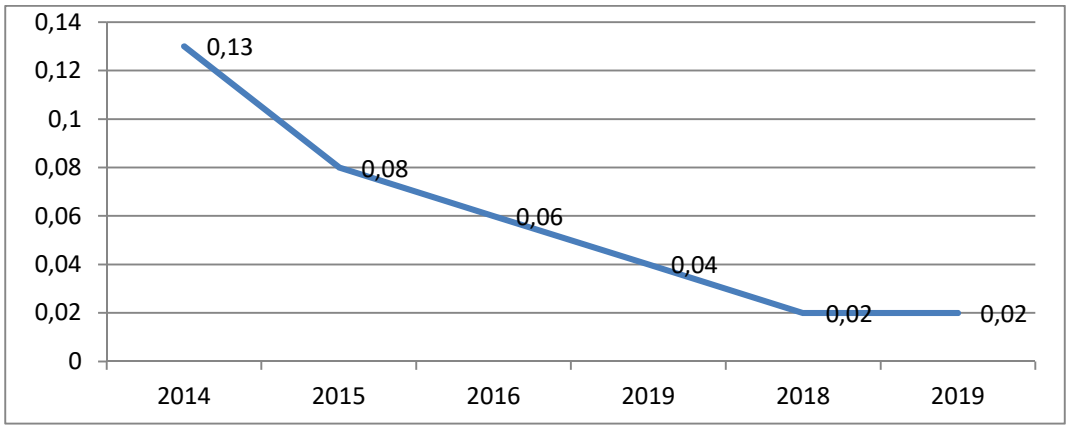

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

2.1.6.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Di tahun 2014 rasionya sebesar 44,87 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 62,48 persen di tahun 2015 dan 70,00 persen di tahun 2016. Di banding tahun sebelumnya rasio jalan dalam kondisi baik di tahun 2017 sebesar 73,18 persen atau mengalami mengalami peningkatan sebesar 7,52 persen dibanding tahun 2016 dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 0,7 persen dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 74,59 persen.

Tabel 2.35
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	329.579	458.966	461.842	537.422	547.343	547.864
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
Persentase (%)	44,87	62,48	70,00	73,18	73,25	74,59

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2019

b. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2014-2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 86,69% meningkat menjadi sebesar 98,07% di tahun 2019, seperti tersaji pada Tabel 2.336. Peningkatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan pembangunan cetak sawah yang dilakukan dalam skala maksimal pada tahun sampai dengan tahun 2017 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bangka baik dari APBD Kabupaten Bangka, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN. Pembangunan cetak sawah yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat melalui kegiatan Upaya Khusus tanaman padi sejak tahun 2016 diharapkan mampu mendukung upaya ketahanan pangan daerah Kabupaten Bangka.

Tabel 2.36
Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	1.174	1.206	2.210	2.220	2.235	2.240
Luas irigasi Kabupaten	1.337	1.337	2.284	2.284	2.284	2.284
Ratio (%)	**86,69**	**90,20**	**96,76**	**97,20**	**97,85**	**98,07**

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2019

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bangka perlu dilakukan penyusunan indikasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/*urgensi* dari program/sub program maupun sektor/subsektor yang harus diprioritaskan.

Tabel 2.37
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	100	100	100	100	100	100
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	74,61	74,65	75,79	76,77	76,79	91,26
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	87,31	87,33	87,90	88,39	88,40	95,63

Sumber : DPUPRP Kabupaten Bangka, 2019

Rencana kegiatan pembangunan dalam RTRW Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan program pembangunan pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan program pembangunan pengembangan struktur tata ruang (pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah).

d. Luas Wilayah Produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2019 memiliki luas sebesar 210.052,5 ha dari luas seluruh wilayah/kawasan budidaya sebesar 261.823,44 ha, secara rinci disajikan pada tabel 2.36.

Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi.

Tabel 2.38
Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif (Ha)	213.045,73	215.009,41	216.554,17	260.544,25	210.052,5
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44
3	Rasio (1/2)	81,37	82,12	82,71	99,51	80,23

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2019

Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
   - kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
   - kawasan peruntukan pertanian lahan kering
3. Kawasan peruntukan perkebunan;
4. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
5. Kawasan peruntukan peternakan;
6. Kawasan peruntukan perikanan;
7. Kawasan peruntukan pertambangan;
8. Kawasan peruntukan industri;
9. Kawasan peruntukan pariwisata;

2.1.6.1.4 Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pada urusan wajib perumahan ini yang menjadi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunannya adalah sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bangka semakin bertambah setiap tahun, sehingga pada pada tahun 2019 persentase rumah layak huni mencapai sebesar 97,40%.

Tabel 2.39
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Layak Huni	61.057	61.638	61.712	65.901	76.814	77.627
Jumlah Seluruh Rumah	62.592	62.990	63.080	69.388	78.376	79.669
Ratio	97,55	97,85	97,83	94,97	98,01	97,40

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2019

b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada Tabel 2.38. Realisasi jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2019 meningkat menjadi 89.820 atau sebesar 98,71 persen dibanding tahun 2018 sebesar 91,69 persen. Dukungan pencapaian target ini dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan dari APBN melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) I dan II.

Tabel 2.40
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2019

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	62.686	65.435	66.910	78.775	81.960	87.782	89.820
Jumlah RT	74.503	76.121	77.771	81.180	90.998	95.734	90.998
Rasio (%)	84,14	85,96	86,03	97,04	90,07	91,69	98,71

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2020

c. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan listrik di Kabupaten Bangkapada tahun 2019 meningkat menjadi 59.932 rumah tangga atau sebesar 98,67% dibanding tahun 2018 sebanyak 57.578 rumah tangga, seperti tersaji pada Tabel 2.39. Pada prinsipnya seluruh desa di Kabupaten Bangka sudah dialiri listrik walaupun belum semua masyarakat memiliki sambungan rumah terhadap listrik yang sudah tersedia.

Tabel 2.41
Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RT yang memiliki sambungan listrik (Unit)	44.280	47.653	51.026	60.211	57.578	59.932
Jumlah RT (Unit)	62.592	62.909	63.080	69.388	71.737	86.176
Ratio (%)	70.74	75.75	80.89	86.77	93,93	98,67

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2014-2019 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014sebesar 85,73% dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 menjadi sebesar 94,12%, seperti tersaji pada tabel 2.40.

Tabel 2.42
Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rumah Tangga Bersanitasi	85,73	86,78	86,81	91,67	91,69	94,12

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2019

Kenaikan jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bangka merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja-AMPL) yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan jamban yang didanai dari APBD

Kabupaten (pemicuan), Program Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten Bangka 2019, Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2019, Program Pembangunan Rumah Layak Huni Dana Bantuan Provinsi 2018, peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan.

e. Lingkungan Permukiman Kumuh

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangkaberdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka adalah :

- Kecamatan Sungailiat yaitu Lingkungan Nelayan I seluas 26,32 ha, Lingkungan Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday 3,572 ha, dan
- Kecamatan Belinyu yaitu Kelurahan Kuto Panji seluas 2,44 ha dan Kelurahan Air Jukung seluas 27,98 ha;
- Dengan total luas 105,42 ha.
- Namun, setelah dilakukan verifikasi data melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diperoleh data kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bangka seluas 81,63 ha.

Tabel 2.43
Lingkungan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	78,52	78,52	72,25	50,02	49,27
Luas Wilayah	302.879	302.879	302.879	302.879	302.879
Ratio (%)	0,026	0,026	0,024	0,017	0,016

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2019

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 kurang lebih 49,27 ha atau sebesar 0,016 persendari total luas wilayah, seperti tersaji pada Tabel 2.41. Kondisi ini menurun dibanding luas tahun 2018 yang kurang lebih sebesar 50,02 ha atau sebesar 0,017 persen dari total luas wilayah. Kondisi ini disebabkan keberhasilan dari program pengentasan kumuh kota terhadap lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan dan perbaikan drainase, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana persampahan, dan air limbah.

2.1.6.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol, dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja yaitu angka kriminalitas kabupaten seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.44
Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019

No	JenisKriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	480	442	343	273	342
2.	JumlahPenduduk	309.067	311.525	313.689	316.093	318.756
3.	**AngkaKriminalitas**	**0,002**	**0,002**	**0,001**	**0,001**	**0,001**

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

2.1.6.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan. Berdasarkan tabel 2.43, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2014-2019 cenderung fluktuatif.

Tabel 2.45
Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019

Uraian	Tahun						Satuan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Jumlah Penduduk miskin	16.009	14.987	16.760	15.014	17.290	16.520	Rumah Tangga
2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial							
a. Penduduk rawan Sosial dan Sarana							
1). Lanjut Usia Terlantar	258	251	247	35	35	35	Orang
2). Komunitas Adat Terpencil	50	-	-	0	0	0	Orang
3). Penyandang Cacat	1.009	1073	1.053	930	930	1.714	Orang
7). Pengungsi dan Korban Bencana	3.099	17	713	343	343	138	Orang
b. Jumlah Penghuni Panti Asuhan	87	107	51	106	106	125	Orang
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)							
a. Karang Taruna	177	76	76	76	76	67	Orang
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	8	8	8	8	8	8	Orang

Sumber : Dinsos Kab. Bangka dan BPS Kab. Bangka, 2020

2.1.6.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.6.2.1 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 sebanyak 155.733 orang dan pada tahun 2019 menjadi159.950 orang. Data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari jumlah 285 orang pekerja yang mendaftar sebanyak 103 orang pekerja diantaranya telah ditempatkan.

Tabel 2.46
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	144.181	144.364	146.755	149.103	155.733	159.950
2	Jumlah Penduduk usia 15 – 64 Tahun	192.813	211.247	215.370	218.530	230.001	153.874
3	Jumlah Pekerja yang Ditempatkan	1.001	512	763	862	897	103
4	Jumlah Pekerja yang Mendaftar	1.125	617	824	977	989	285

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2019

2.1.6.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki.

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (*Gender Parity Index/GPI*) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki.

Selengkapnya perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 2014-2019 tersaji pada Tabel 2.45.

Tabel 2.47
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar						
▪ Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,07	1,02	0,96	0,99	1,01	1,01
▪ Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,02	1,96	1,01	1,51	1,50	0,96
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	17,14

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2019

2.1.6.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting, disamping ketersediaan pangan itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi.

Grafik 2.14
Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton)
Kabupaten BangkaTahun 2017–2019

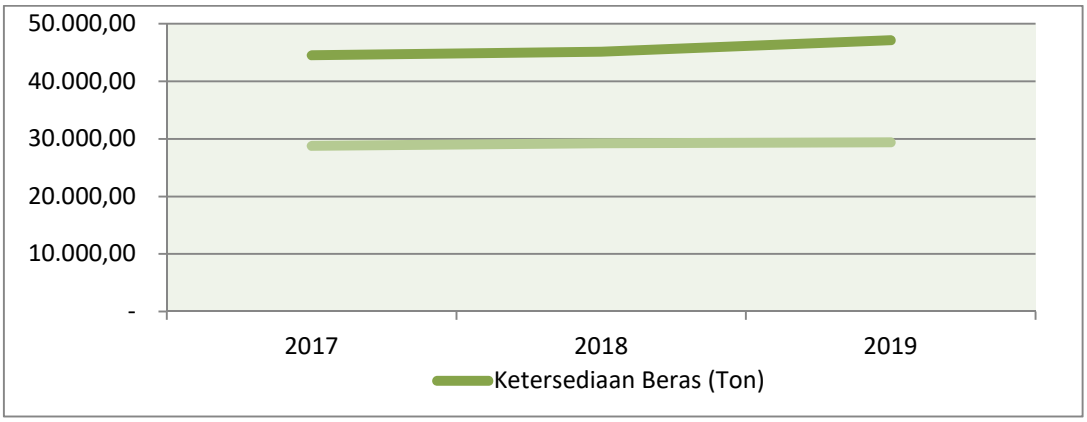

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2019

2.1.6.2.4 Pertanahan

Indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2014-2019. Tahun 2014 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 24,46 persen saja, meningkat hingga mencapai 28,5 persen pada tahun 2019.

Grafik 2.15
Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

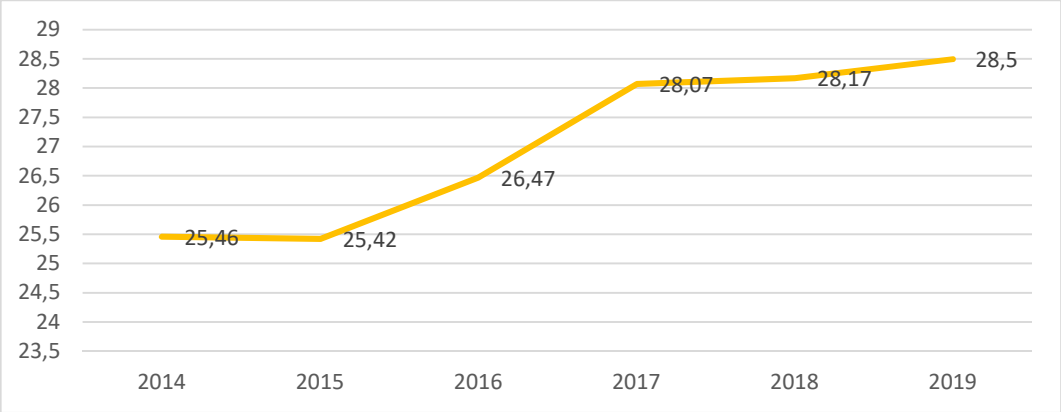

Sumber: DINPERKPP Kab Bangka, 2019

2.1.6.2.5 Lingkungan Hidup

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2014-2019 tersaji pada tabel 2.46.

Tabel 2.48
Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2013–2019

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Persentase Penanganan Sampah	90,82	91,24	91,30	91,70	91,72	76,55

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Jumlah TPS per Satuan Penduduk	0,29	0,14	0,19	0,23	0,25	0,25

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2020

2.1.6.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan capaian yang sangat baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari rasio kepemilikan KTP pada tahun 2019 mencapai 99,11 persen, meningkat dibandingkan rasio kepemilikan KTP tahun 2018 sebesar 92,79 persen, seperti tersaji pada tabel 2.47

Tabel 2.49
Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2014–2019

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019**
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,79	0,84	0,93	0.95	0,97	0,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,72	0,73	0,84	0,86	0,88	0,88
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,73	0,73	0,73	0.75	0,79	0,79
4	Kepemilikan KTP (%)	81,45	85,80	92,50	92,75	92,79	99,11
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	78,91	80,42	84,67	88,18	88,20	92,60
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dindukpencapil Kab. Bangka,2019

Berdasarkan data pada Tabel 2.47, untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga tahun 2019 telah mencapai nilai sebesar 92,60%. Hal ini di sebabkan karena adanya inovasi "**Bang Muda**" atau Bangka Mudah Dapat Akta. Program ini merupakan inovasi dimana begitu bayi lahir langsung mendapatkan akta gratis. Sedangkan untuk

ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan sejak tahun 2011, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2011.

2.1.6.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun dan persentase Desa Swasembada. Perkembangan capaian masing-masing indikator tersebut dalam periode tahun 2017-2019 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Perkembangan Rata-rata Indeks Desa Membangun
dan Persentase Desa Swasembada
Kabupaten Bangka Tahun 2017 - 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,6437	0,6711	0,6760
	Jumlah Desa Maju	4	10	11
	Jumlah Desa Berkembang	48	52	51
	Jumlah Desa Tertinggal	10	0	0
2	Persentase Desa Swasembada (%)	16,13	24,19	25,81
	Jumlah Desa Swasembada	10	15	16
	Jumlah Desa se- Kabupaten Bangka	62	62	62

Sumber : Laporan Kinerja 2019 Dinsospemdes Kab. Bangka, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rata-rata Indeks Desa membangun Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari 0,6437 pada tahun 2017 menjadi 0,6760 pada tahun 2019. Hal ini seiring dengan peningkatan status perkembangan desa, di mana pada tahun 2017 masih terdapat 10 Desa yang termasuk kategori Desa Tertinggal, mengalami peningkatan status pada tahun 2018 sehingga seluruhnya memenuhi kategori Desa Berkembang. Demikian pula halnya dengan Desa yang termasuk kategori Desa Maju meningkat dari 4 Desa pada tahun 2017 menjadi 11 Desa pada tahun 2019. Sementara jumlah Desa Swasembada juga mengalami peningkatan dari 10 Desa pada tahun 2017 menjadi 16 Desa pada tahun 2019.

2.1.6.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Dari Tabel 2.50, diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah PUS di Kabupaten Bangka sebanyak 50.437 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta aktif sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38.015 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 38.092 orang.

Tabel 2.51
Jumlah PUS dan Peserta KB AktifKabupaten Bangka Tahun 2014–2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS	56.196	56.196	47.318	49.980	49.017	50.437
2	Jumlah Peserta KB Aktif	45.799	43.073	38.350	37.041	38.092	38.015

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka,2019

Tabel 2.52
Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluarga Prasejahtera	2.271	1.936	805	469	271
2	Keluarga Sejahtera 1	11.892	11.680	3.776	2.921	2.076
Jumlah		**14.163**	**13.616**	**4.581**	**3.390**	**2.347**

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Tabel 2.50 menunjukan bahwa jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2015 Keluarga Prasejahtera berjumlah 2.271 dan Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 11.892. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 jumlah Keluarga Prasejahtera tinggal sebanyak 271 kepala keluarga dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 2.076keluarga, atau dengan kata lain,

mengalami penurunan total Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 11.816 keluarga.

2.1.6.2.9 Perhubungan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Perhubungan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa kontribusi sub sektor transportasi terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRBKabupaten Bangka
Tahun 2014 – 2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	1,84%	1,97%	2,11%	2,19%	2,27%	2,54%

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2020

2.1.6.2.10 Komunikasi dan Informatika

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahn Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 201- 2019

URAIAN	TAHUN	
	2018	2019
Indeks SPBE	2,36	2,47
Kategori	Cukup	Cukup

Sumber : Laporan Kinerja 2019 Dinkominfotik Kab.Bangka, 2020

2.1.6.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 138 unit dan meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 140 unit. Sementara jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebanyak 32.118 unit, seperti tersaji pada tabel 2.53.

Tabel 2.55
Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2016– 2019

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif (unit)	138	138	138	140
2	Koperasi Tidak Aktif (unit)	86	69	65	65
3	Jumlah Induk Koperasi (unit)	-	-	-	-
4	Jumlah Koperasi Primer (unit)	224	207	203	205
5	Jumlah KUD (unit)	9	8	8	8
6	Jumlah Non KUD (unit)	215	199	195	197
7	Pengusaha Besar	-	-	-	-
8	Pengusaha Menengah	34	37	37	37
9	Pengusaha Kecil	22.579	22.615	22.615	22.615
10	Pengusaha Mikro	29.442	29.472	32.021	32.118

Sumber : DINPMP2KUKM Kab. Bangka, 2019

2.1.6.2.12 Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Komoditi inilah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa. Sektor ini

dibentuk oleh 3 (tiga) subsektor yaitu: subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel, dan subsektor restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sektor yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2015-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada grafik 2.16. Pada tahun 2015, nilai PMDN sebesar Rp.242.442.940.000,- rupiah dan PMA sebesar US$26.241.620,-sementara nilai investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 PMDN sebesar Rp. 255.355.520.000,- dan PMA sebesar Rp. 21.476.640,-.

Grafik 2.16
Nilai Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

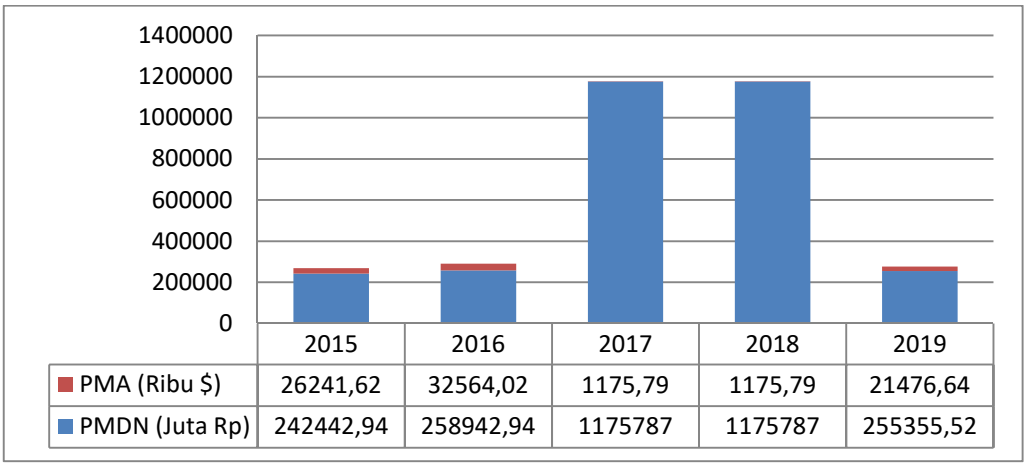

	2015	2016	2017	2018	2019
PMA (Ribu $)	26241,62	32564,02	1175,79	1175,79	21476,64
PMDN (Juta Rp)	242442,94	258942,94	1175787	1175787	255355,52

Sumber : DINPMP2KUKMKabupaten Bangka, 2019

Terjadi pergeseran sektor investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-2014, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi serta bidang perdagangan sebagai sektor penunjang. Namun, selama tahun 2015-2016, bidang pertambangan dan energy mulai ditinggalkan dan investor beralih ke bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta perdagangan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus berjalan meskipun tidak lagi ditopang oleh sektor pertambangan sebagai sektor penggerak utama perekonomian. Dengan demikian, Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah

berhasil menghadapi era pasca pertambangan timah dengan mencari sektor alternatif penggerak perekonomiannya.

2.1.6.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	367	434	435	478	478	479
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	10	10	10	10	10	11
3	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03
4	Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk	1,20	1,39	1,41	1,52	1,52	1,52

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kab. Bangka, 2020

2.1.6.2.14 Statistik

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diukur melalui indikator persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan *up to date*, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik
Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan up to date	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Laporan Kinerja Dinkominfotik Kab.Bangka, 2020

2.1.6.2.15 Kebudayaan

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kebudayaan dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019

No	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	10	6	8	8	8
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	11	11	11	10	10	10

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kab. Bangka, 2020

2.1.6.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam pengusaan informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan daerah Kabupaten Bangka hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 2.59
Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan daerah	6.976	7.761	8.200	11.713	12.643
2	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah	13.646	15.216	15.959	16.038	18.751
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	4.230	4.720	78.282	79.351	143.486

Sumber : Dinas Kearsipandan Perpustakaan Kab. Bangka,2020

Pada tahun 2019, jumlah koleksi judul buku sebanyak 12.643 judul buku, naik sebanyak 930 judul dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tersaji pada tabel 2.57. Sementara itu, jumlah koleksi buku pada tahun 2019 sebanyak 18.715 buku atau naik sebanyak 2.677 buku dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2018 berjumlah 79.351 orang dan naik secara signifikan di tahun 2019 menjadi 143.486 orang.

2.1.6.2.17 Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka diukur melalui beberapa indikator, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan
Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang tertib arsip (baku, sesuai ketentuan Permendagri)	50,00	40,37	53,91	67,43	69,57
2.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang dibina dan dilatih (pembinaan dan pelatihan pengelola arsip)	10,43	48,65	83,48	100,00	20,00*

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.	Persentase arsip dinamis dan statis yang terdata dan tertata baik (sama dengan terselamatkan, tidak kacau)	0,00	3,39	7,49	20,04	21,88*
4.	Persentase arsip dinamis dan statis yang tertata dan terpelihara baik (dirawat)	0,00	100,00	100,00	100,00	24,96*
5.	Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (di data arsip statis)	2,94	2,94	2,94	17,65	17,65

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Bangka, 2020

* Tahun 2019, target kembali ke awal karena tahun pertama RPJMD 2019-2023

2.1.6.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.6.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2019 sebanyak 26.214,82 ton, sementaraketersediaan sarana kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2019 sebanyak 2.842 unit.

Tabel 2.61
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat
Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019

URAIAN	TAHUN					SATUAN
	2015	2016	2017	2018	2019	
Perikanan Laut						
1. Jumlah Tangkapan	26.005	27.216	27.761	27.761	26.214	Ton
2. Jumlah Kapal Penangkap Ikan	2.556	2.577	2.982	2.982	2.842	Unit
3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan	5.176	10.082	8.949	8.949	6.669	KK
4. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	1	1	1	1	1	Unit
Perikanan Darat						
1. Tambak						
a. Luas	16	23,50	66,11	66,11	271,26	Ha
b. Jumlah Produksi	302,5	472,77	596,07	596,07	1.925,21	Ton

URAIAN	TAHUN					SATUAN
	2015	2016	2017	2018	2019	
Perikanan Darat						
2. Kolam						
a. Luas	1.733	9,09	9,63	9,63	32,27	Ha
b. Jumlah Produksi Rumah Tangga	162,82	180,20	187,02	187,02	200,28	Ton

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2020

2.1.6.3.2 Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam terutama timah yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata dianggap sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan karena potensi pariwisata Kabupaten Bangka yang sagat besar diharapkan menjadi penunjang sektor lainnya sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan *spending of money tourism* selama kurun waktu 2015-2019 seperti tersaji pada Tabel 2.60.

Tabel 2.62
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan *Spending of Money Tourism*
Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	71.738	72.309	75.618	77.130	90.714
2	*Spending Of Money Tourism*	Milyar/tahun	6,78	7,11	7,65	8,77	16,31

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

2.1.6.3.3 Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bangka merupakan program prioritas karena terkait dengan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan tabel 2.61, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 luas panen padi seluas 5.315,7 hektar dengan produksi beras sebesar 10.092,5 ton,

sementara jumlah konsumsi beras sebesar 30.498,7 ton/tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap beras dari luar daerah masih tinggi yaitu sekitar 20.406,2 ton/tahun.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2019 seluas 759,9 Ha, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seluas 895,4 Ha, demikian juga dengan produksi jagung pada tahun 2019 menjadi 3.799,5 ton. Konsumsi perkapita jagung selama tahun 2019 sebanyak 637,5 ton.

Tabel 2.63
Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi
Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019

Uraian	Capaian					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Padi						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	3.118	3.585,5	5.078	5.078	5.315,7	Ha
2). Produksi Beras	3.799,0	4.320,0	9.569,4	9.569,4	10.092,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi Beras	29.437	31.899	35.088	35.088	30.498,7	Ton/Tahun
B. Jagung						
1). Jumlah Areal Produksi (Panen)	26,0	325,4	407,0	895,4	759,9	Ha
2). Jumlah Produksi	78,0	976,0	1.223,1	4924,7	3.799,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	370,0	483,0	624,9	634,1	637,5	Ton/tahun
C. Singkong dan Hasil Umbi-Umbian						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	701,0	1.333,0	1.148,0	1.826,0	2.049,0	Ha
2). Jumlah Produksi	5.990,0	12.107,0	10.158,5	24.779,0	28.281,0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	7.983,0	9.118,0	10.485,7	10.640,3	10.697,5	Ton/tahun

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Tabel 2.61 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong dan umbi-umbian pada tahun 2019 seluas 2.049 Ha, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seluas 1.826 Ha. Demikian pula produksi meningkat menjadi 28.281 ton.

2.1.6.3.4 Perdagangan

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Perdaganagan terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

Tabel 2.64
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,10%	12,32%	12,88%	13,33%	13,96%	14,17%

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

2.1.6.3.5 Industri

Keberhasilan pelaksanaan urusan industri di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

Tabel 2.65
Kontribusi SektorIndustri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	23,53%	22,59%	21,87%	22,37%	22,29%	21,23%

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

2.1.6.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.1.6.4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Perkembangan hasil EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD
Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2018

URAIAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
TAHUN LPPD	2015	2016	2017	2018
SKOR EKPPD	3,1841	3,2760	3,1147	3,2853
PERINGKAT NASIONAL	67	62	60	BELUM RILIS

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka, 2020

2.1.6.4.2 Bidang Perencanaan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah hasil penilaian perencanaan dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat Provinsi dan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tingkat Nasional.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan hasil penilaian terhadap perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bangka memperlihatkan hasil yang sangat positif sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
HASIL PENILAIAN TINGKAT PROVINSI	Peringkat I Penghargaan Anugrah Pangripta Serumpun Sebalai 2016	Peringkat I Penghargaan Anugrah Pangripta Serumpun Sebalai 2017	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2018	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2019	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2020
HASIL PENILAIAN TINGKAT NASIONAL	Penghargaan Top 5 Anugerah Pangripta Nasional 2016	Penghargaan Top 4 Anugerah Pangripta Nasional 2017	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2018	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2019	Penghargaan Top 3 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perencanaan adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemkab Bangka mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja)
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2020

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil Penilaian AKIP (Komponen Perencanaan Kinerja)	17,04	19,95	20,27	22,30	22,95

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

2.1.6.4.3 Bidang Keuangan

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir semakin membaik, dalam hal ini dapat dilihat melalui opini hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LKPD Pemkab Bangka	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.6.4.4 Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah

Fokus layanan pada Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah termasuk Pemkab Bangka adalah Indeks Profesionalitas ASN yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanan Pngukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi (pendidikan formal), Kompetensi (riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya), Kinerja

(penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja individu dan organisasi), dan Disiplin (riwayat hukuman disiplin).

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka selama empat tahun terakhir, walaupun masih berada pada kategori "Rendah", akan tetapi menunjukkan perbaikan secara kontinyu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2019

URAIAN	TAHUN			
	2016	2017	2018**	2019
Indeks Profesionalitas ASN	66,64	68,80	58,80	67,26
Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2020

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka mengalami peningkatan dari 66,64 pada tahun 2016 menjadi 68,80 pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga masuk kategori "Sangat Rendah" dengan nilai 58,80. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi pengukuran berdasarkan ketentuan dari pusat. Selanjutnya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, maka pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,26 dengan kategori "Rendah".

2.1.6.4.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemkab Bangka termasuk salah satu pemerintah daerah dengan kategori "Sangat Inovatif" berdasarkan hasil penilaian *Innovative Government Award* (IGA) oleh

Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam lima tahun terakhir juga selalu mendapatkan apresiasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan beberapa inovasi berhasil menembus Top 35, Top 45 dan Top 99 Inovasi Terbaik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.71
Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka
Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI		OPD PENGUSUL	KET
1	2016	5 inovasi	1	SIM data AMPL Bangka, Tak Lekang oleh Waktu	BAPPEDA	3 Inovasi TOP 99, 1 inovasi TOP 35
			2	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan "Ibu"	DINKES	
			3	Kurangi Risiko Kecacatan dan Kematian Melalui Layanan Gawat Darurat oleh PSC SPGDT yang berbasis IT.	SPGTD	
			4	Eliminasi Malaria	DINKES	
			5	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
2	2017	9 inovasi	1	SENSASI SILET PSC 119 (Sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan Emergency Terpadu)	SPGTD	1 inovasi TOP 99, Bang Muda
			2	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
			3	Si Surtam (Survey Kontak Malaria, Eliminasikan Malaria Di Bangka)	DINKES	
			4	SMS Bunda Cerdas	DINKES	
			5	Bangka Jambanisasi Total (Bang Jamal)	BAPPEDA	
			6	Kemiskinan Bangka dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			7	"MAJELIS SABTU!!" – Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			8	Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) – Petani Menjadi Tuan Tanah Di Daerahnya Sendiri	DINAS PERTANIAN	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI		OPD PENGUSUL	KET
			9	BANG MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) – Solusi Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	DINAS DUKCAPIL	
3	2018	11 inovasi	1	Perburuan Si Resti Turunkan AKI	DINKES	11 inovasi telah melalui seleksi administrasi KEMENPAN RB, SIMPANAN CANTIK memperoleh TOP 99
			2	Rumah Bang Baliga (Rumah Penimbangan Balita Siaga) Solusi Pemantauan Status Gizi Balita Diluar Jadwal Posyandu	DINKES	
			3	Layanan Emergency Berbasis IT Solusi Kegawatdaruratan Medis Dan Non Medis Kabupaten Bangka	DINKES	
			4	"SIMPANAN CANTIK" (Sistem Pelayanan Cepat Akurat dan Tepat Medik) RSUD DEPATI BAHRIN Kabupaten Bangka	RSUD DEPATI BAHRIN	
			5	MADU SARI (Masyarakat Peduli Sampahnya Sendiri)	DINAS LH	
			6	Nelayan Mudah Informasi, Pembinaan, dan Administrasi (NeMu IPAd)	DINAS PERIKANAN	
			7	Bang Rasyid (Bangka Rumah Sehat Idaman)	BAPPEDA	
			8	"Jari Manis Si Kembang Desa" Jaring Informasi Masyarakat Miskin Dengan Sistem Dan Aplikasi Kembang Desa	BAPPEDA	
			9	"Majelis Sabtu!!" – Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			10	Tujuh Pendekar Tampan (Tuntas Dan Rampungkan Pembangunan Jamban)	BAPPEDA	
			11	Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN	
4	2019	12 inovasi	1	Anak Bangka Sehat Cerdas (ABSC)	DINKES	2 inovasi TOP 99
			2	Gerlingan ODGJ	DINKES	Ransel Si Dora
			3	Ojek Lansia	DINKES	Ojek Lansia
			4	Matras TB	DINKES	
			5	SMS Bunda Cerdas	DINKES	1 inovasi TOP 45

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			6	Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Si Resti Cikar	DINKES	Ransel Si Dora
			7	Ransel Si Dora	DINKES	
			8	”Nganggung” Germas	DINKES	
			9	Si Manis Teman Kelompok Wanita Tani	PANGAN	
			10	Pintu Kite	DIN PMP2KUKM	
			11	PORCATWIN 5 in 1	DINKES	
			12	”Lada Putih” RSUD Depati Bahrin Turunkan AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
5	2020	14 inovasi	1	Laboratorium Terpadu Publikasi Inovasi Bangka (LA REPUBLIKA)	BAPPEDA	
			2	Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			3	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			4	Si Tumbuh Cerdas (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Hidup Cerdas dan Sehat)	BAPPEDA	
			5	TIMAH CORNER SEBAGAI EFEKTIFITAS UPAYA PENYELAMATAN ARSIP SEJARAH TIMAH BANGKA DI KABUPATEN BANGKA	DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN	
			6	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Balik Kocokan Arisan “IBU”	DINKES	
			7	PAMOR KANCIL	DINKES	
			8	SMART-IN PIRT	DINKES	
			9	“GERLINGAN ODGJ” Gerakan PERLINDUNGAN ODGJ	DINKES	
			10	“Matras” TBC	DINKES	
			11	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA PADI SAWAH)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	TOP 99
			12	PENINGKATAN LAYANAN PATEN DENGAN SISTEM APLIKASI	KECAMATAN BAKAM	
			13	“SILADA PUTIH” RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI		OPD PENGUSUL	KET
			14	Open Links : Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Sekolah Oleh Seluruh Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua dan Peserta Didik) Dalam Rangka Memperkuat Pembentukan Karakter di SD Negeri 12 Sungailiat Kabupaten Bangka	SDN 12 Sungailiat	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

2.1.7. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, baik domestik ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi.

2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.7.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel 2.69.

Tabel 2.72
Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2019

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.679	10.904	11.279	11.420	12.043	12.480

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (%)	45,41	44,33	52,06	45,21	50,13	53,25
Pengeluaran konsumsi makanan per kapita (%)	54,59	55,67	47,94	54,79	49,87	46,75

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2020

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka selama tahun 2014-2019 menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 12,04 juta rupiah/orang/tahun menjadi 12,48 juta rupiah/orang/tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor antara lain bertambahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (meningkatnya konsumsi barang dan jasa) atau juga bisa disebabkan oleh kenaikan harga. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non makanan per kapita dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi non makanan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi per kapita selama tahun 2014-2019 rata-rata sebesar 48,40 persen sedangkan pengeluaran konsumsi makanan per kapita rata-rata sebesar 51,60 persen.

2.1.7.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2.73
Nilai Tukar Petani Kabupaten BangkaTahun 2015 - 2018

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019**
Nilai Tukar Petani	89,80	89,96	95,00	91,45	95,17

Sumber:BPS Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 Nilai Tukar Petani menunjukkan trend yang fluktuatif, sempat mengalami peningkatan dan mencapai angka 95,00 pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 91,45, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 95,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah cukup sejahtera.

2.1.7.1.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan memberikan gambaran tentang kemampuan nelayan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. NTN tahun 2019 sebesar 113,17 berarti harga produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan subsektor perikanan tangkap lebih tinggi dari harga barang/jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi nelayan subsektor perikanan tangkap.

Tabel 2.74
Nilai Tukar Petani Kabupaten BangkaTahun 2015 - 2018

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019**
Nilai Tukar Petani	100,00	106,47	113,85	113,10	113,17

Sumber:BPS Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 NTN menunjukkan trend yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Nelayan sudah cukup sejahtera.

2.1.7.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, lama proses perijinan, jenis pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

2.1.7.2.1 Angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penuruan, hanya saja pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 308 kasus dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 273 kasus, seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75
Angka KriminalitasKabupaten Bangka Tahun 2015–2019

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019**
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	480	442	343	273	308
2.	Jumlah Penduduk	309.067	311.525	313.689	316.093	318.756
3.	**Angka Kriminalitas**	**0,002**	**0,002**	**0,001**	**0,001**	**0,001**

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

2.1.7.2.2 Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM. Adapun penerbitan perizinan yang dilayani meliputi 14 (empat belas) bidang, yaitu :

1) Bidang Kesehatan
2) Bidang Pekerjaan Umum
3) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
4) Bidang Perhubungan
5) Bidang Lingkungan Hidup
6) Bidang Usaha Kepariwisataan
7) Bidang Pertanahan
8) Bidang Peternakan

9) Bidang Pendapatan
10) Bidang Perikanan
11) Bidang Sosial dan Tenaga Kerja
12) Bidang Pertanian dan Perkebunan
13) Bidang Penanaman Modal dan KUKM
14) Bidang Pendidikan

Dalam rangka mendorong investasi melalui percepatan penerbitan perijinan usaha, maka diterbitkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka, di mana penandatanganan perizinan langsung dilakukan oleh Kepala PTSP sehingga proses penerbitan perizinan lebih cepat.

2.1.7.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu komponen penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah di sektor pajak dan retribusi. Beberapa regulasi sudah diterbitkan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 tentang Pajak Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Dibawah ini dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka :

1. Pajak Daerah terdiri dari :
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak hiburan
    d. Pajak reklame

e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
g. Pajak parkir
h. Pajak air tanah
i. Pajak sarang burung walet

2. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
   b. Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan
   c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
   d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   e. Retribusi Pelayanan Pasar
   f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
   g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
   h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Retribusi Perizinan Tertentu :
   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
   b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
   c. Retribusi Izin Trayek
   d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.7.2.4 Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Penataan regulasi di Kabupaten Bangka dalam rangka mendukung iklim usaha dan investasi sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka. Regulasi yang sudah diterbitkan untuk mendukung iklim usaha antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka;

17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka;
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka

2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian sasaran, program dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun N-1, N terhadap target akhir RPJMD 2019-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Kode Capaian	Status Capaian Kinerja Tahunan	Kode Capaian	Status capaian Kinerja RPJMD
	Tinggi (85-100)	TT	Telah tercapai (100)
	Sedang (50-84)	AT	Akan tercapai (50-99)
	Rendah(<50)	UK	Upaya Keras (<50)

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2020

2.2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 6 program dengan 26 indikator kinerja. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga indikator program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	**APK SD**	**Angka**	**117,86**	**107,49**	**91,20**		**118,11**	**118,31**	**100,17**		**119,00**	**118,31**	**99,42**	**AT**
		APM SD	**Angka**	**98,25**	**97,43**	**99,17**		**98,50**	**98,67**	**100,17**		**99,20**	**98,67**	**99,47**	**AT**
		APK SMP	**Angka**	**107,65**	**96,23**	**89,39**		**107,79**	**107,92**	**100,12**		**109,00**	**107,92**	**99,01**	**AT**
		APM SMP	**Angka**	**89,00**	**74,90**	**84,16**		**89,25**	**89,45**	**100,22**		**90,00**	**89,45**	**99,39**	**AT**
		APK PAUD	**Angka**	**55,00**	**61,81**	**112,38**		**57,00**	**58,00**	**101,75**		**63,00**	**58,00**	**92,06**	**AT**
		Angka Melanjutkan SD/ MI	**Angka**	**100,00**	**97,46**	**97,46**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**AT**
		Angka Putus Sekolah SD/ MI	**Angka**	**0,14**	**0,14**	**100,00**		**0,13**	**0,11**	**115,38**		**0,10**	**0,11**	**90,00**	**AT**
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	**Angka**	**0,76**	**0,76**	**100,00**		**0,70**	**0,67**	**104,29**		**0,55**	**0,67**	**78,18**	**AT**
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Penduduk terhadap Lembaga PAUD	Rasio	1 : 156	1 : 156	100,00		1 : 136	1 : 136	100,00		1 : 76	1 : 136	55,88	TT
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SD	Rasio	1 : 26	1 : 26	100,00		1 : 26	1 : 26	100,00		1 : 26	1 : 26	100,00	TT
		Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SMP	Rasio	1 : 30	1 : 30	100,00		1 : 30	1 : 30	100,00		1 : 30	1 : 30	100,00	TT
		Persentase Siswa Penerima Beasiswa SD	%	0,68	0,68	100,00		0,68	0,68	100,00		0,68	0,68	100,00	TT
		Persentase Siswa Inklusi SD Penerima Bantuan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Persentase Siswa Penerima Beasiswa SMP	%	1,87	1,87	100,00		1,87	1,87	100,00		1,87	1,87	100,00	TT
		Persentase Siswa Inklusi SMP Penerima Bantuan	%	34,00	34,00	100,00		34,00	34,00	100,00		34,00	34,00	100,00	TT
3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase PKBM terhadap Jumlah Desa	%	16,00	16,00	100,00		16,00	16,00	100,00		16,00	16,00	100,00	TT
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang bersertifikasi	%	59,00	59,00	100,00		69,00	69,00	100,00		100,00	69,00	69,00	AT
		Persentase Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi	%	10,00	15,00	150,00		19,00	27,00	142,11		44,00	27,00	61,36	AT
		Persentase Pengawas yang bersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikasi	%	51,00	51,00	100,00		64,00	79,00	123,44		100,00	79,00	79,00	AT
Rata-rata						**104,17**				**105,46**				**88,77**	**AT**
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	**Rata-rata angka keseluruhan nilai Ujian SD / MI**	**Angka**	**207,99**	**203,80**	**97,99**		**214,06**	**214,07**	**100,00**		**232,30**	**214,07**	**92,15**	**AT**
		Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	**%**	**44,00**	**31,00**	**70,45**		**50,00**	**42,00**	**84,00**		**90,00**	**42,00**	**46,67**	**UK**
		Persentase Sekolah yang Berpartisipasi dalam Peningkatan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**AT**

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
		Pendidikan Karakter													
		Rata-rata Angka Keseluruhan Nilai Ujian SMP/MTs	**Angka**	**208,58**	**204,46**	**98,02**		**214,66**	**215,73**	**100,50**		**232,89**	**215,73**	**92,63**	**AT**
		Persentase Kelulusan Pendidikan Dasar (%)	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**AT**
		Peringkat Prestasi Akademis	**Angka**	**5,00**	**4,00**	**120,00**		**4,00**	**3,00**	**120,00**		**1,00**	**3,00**	**60,00**	**AT**
		Peringkat Prestasi Non Akademis	**Angka**	**5,00**	**2,00**	**160,00**		**4,00**	**3,00**	**120,00**		**1,00**	**3,00**	**60,00**	**AT**
		Persentase Guru Yang Bersertifikasi	**%**	**59,00**	**59,00**	**100,00**		**69,00**	**69,00**	**100,00**		**100,00**	**69,00**	**69,00**	**AT**
		Persentase Tenaga Kependidikan Yang Bersertifikat	**%**	**51,00**	**51,00**	**100,00**		**61,00**	**61,00**	**100,00**		**80,00**	**61,00**	**76,25**	**AT**
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Nilai Rata-Rata Ujian SD/MI	Nilai	207,99	203,80	97,99		214,06	214,07	100,00		232,23	214,07	92,18	AT
		Nilai Rata-Rata Ujian SMP/MTs	Nilai	208,58	204,46	98,02		214,66	215,73	100,50		65,00	215,73	331,89	AT
		Angka Lulusan SD/MI sederajat	Angka	99,65	100,00	100,35		99,65	99,65	100,00		100,00	99,65	99,65	AT
		Angka Lulusan SMP/MTs sederajat	Angka	99,20	100,00	100,81		99,30	99,30	100,00		99,60	99,30	99,70	AT
		Persentase Lembaga PAUD terakreditasi A	%	4,00	4,00	100,00		7,00	8,00	114,29		14,00	8,00	57,14	AT
		Persentase Lembaga SD Berakreditasi A	%	44,00	44,00	100,00		47,00	47,00	100,00		55,00	47,00	85,45	AT
		Persentase Lembaga SMP Berakreditasi A	%	70,00	70,00	100,00		77,00	77,00	100,00		100,00	77,00	77,00	AT
		Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan terakreditasi A	%	18,00	18,00	100,00		36,00	36,00	100,00		91,00	36,00	39,56	UK
6	Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Peringkat OSN Tingkat Provinsi	Peringkat	4,00		0,00		3,00	3,00	100,00		1,00	3,00	50,00	AT
		Peringkat O2SN Tingkat Provinsi	Peringkat	3,00	4,00	75,00		2,00	3,00	75,00		1,00	3,00	50,00	AT
		Peringkat FLS2N Tingkat Provinsi	Peringkat	4	4,00	100,00		4	3,00	125,00		1	3,00	50,00	AT
		Peringkat GSI Tingkat Provinsi	Peringkat	3,00	0,00	0,00		2,00	3,00	150,00		1,00	3,00	50,00	AT
		Persentase Siswa Berkarakter Baik	%	98,75	98,75	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	AT
		Sekolah yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata	%	10,00		0,00		12,00	12,00	100,00		20,00	12,00	60,00	AT
Rata-rata						**76,58**				**104,63**				**88,76**	**AT**

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 46 (empat puluh

enam) indikator program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Prediksi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	**Angka Kematian Ibu**	**per 100.000 KH**	**65,00**	**61,99**	**104,00**		**61,99**	**61,99**	**100**		**58,00**	**61,99**	**93,56**	**AT**
	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	**Angka Kematian Bayi**	**per 1000 kelahiran hidup**	**3,30**	**3,25**	**101,51**		**3,25**	**3,25**	**100,0**		**3,10**	**3,25**	**95,38**	**AT**
	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	**Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular**	**Persen**	**100,00**	**100**	**100,00**		**100,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	**AT**
		Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular	**Persen**	**100,00**	**100**	**100,00**		**100,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	**AT**
		Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk	**Persen**	**0,038**	**0,02**	**147,00**		**0,02**	**0,02**	**100**		**0,01**	**0,02**	**50,00**	**UK**
	RATA-RATA					**110,50**				**100,00**				**87,79**	**AT**
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peresentase ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	80,00	55,00	68,75		83	83	100		100	83	83	AT
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan GP2SP	Persen	20,00	20,00	100,00		40	40	100		100	40	40	UK
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pengembangan wajib sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	95,00	73,00	76,84		75	75	100		92,5	75	81,08	AT
		Persentase upaya kesehatan masyarakat sekunder	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	% produk pangan beredar yang memiliki sertifikat PIRT	Persen	100,00	71,00	71,00		100	80	80		100	80	80	AT
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase kelompok asuhan mandiri pemanfaatan	Persen	37,04	75,00	202,48		40	85	212,5		95	85	89,47	AT

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Prediksi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
		toga dan akupresure di wilayah kerja puskesmas													
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase puskesmas yang melaksanakan kampenye kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100	100	100	AT
		Persentase balita yang dipantau berat badannya (D/S)	Persen	65,00	129,00	198,46		65	100	153,8		94	100	106,38	AT
6	Program Perbaikan Gizi Mayarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Katagori penilaian Ibu ASI dan Balita	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase balita yang berat badannya naik (N/D)	Persen	90	91	101,11		90	91	101,1		94	91	96,81	AT
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat	Persen	94,00	94,00	100,00		94,5	94,5	100,0		100	94,5	94,5	AT
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular langsung	Persen	100	115	115,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit endemik/epidemik	Persen	100	123	123,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit menular seksual	Persen	100	120	120,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase pelayaan kesehatan pada usia produktif	Persen	55	68	123,64		57	70	122,8		85	70	82,35	AT
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	38	69	55,07		36	36	100,0		15	36	41,67	UK
		persentase pelayanan kesehatan matra dan haji	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi standar	Persen	87,50	100	114,29		100	100	100,0		100	100	100	AT
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	96	87	90,63		98	98	100,0		100	98	98	AT
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	95	95,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Ibu Hamil	Persen	96	85	88,54		98	90	91,8		100	90	90	AT
		Persentase Ibu Bersalin	Persen	96	107	111,46		98	98	100,0		100	98	98	AT

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Prediksi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
		Mendapatkan Pelayanan Persalinan													
12	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		% distribusi obat ke unit pelayanan	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		% pemeriksaaan sempel pada lab kesehatan	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Puskesmas yang menjalankan manajemen mutu pelayanan Puskesmas	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen BOK	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Puskesmas yang memiliki sistem manajemen dan informasi kesehatan	Persen	91,67	98	106,91		91,67	98	106,9		100	98	98	AT
13	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase FKTP yang memiliki SDM sesuai standar	Persen	83	99	119,28		91,6	91,6	100,0		98	91,6	93,47	AT
		Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
14	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase pelayanan pusling gigi	Persen	50	103	206,00		55	55	100,0		100	55	55	UK
		Persentase Pelayanan P3K	Persen	100	110	110,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase Penduduk miskin yang medapatkan pelayanan kesehatan dasar	Persen	70	98	140,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	70	104	148,57		72	72	100,0		80	72	90	AT
15	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	% Puskesmas yang menjalankan manajemen mutu pelayanan Puskesmas	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan	Persentase Pendapatan UPT BLUD Dinkes	Persen	100,00	100,00	100,00		100	100	100,0		100	20	24,60	TT
	RATA-RATA					**112,15**				**106,73**				**93,56**	

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. 5 (lima) indikator sasaran dengan rata-rata capaian 110,50 (status tinggi), terdiri dari :
   a. Angka Kematian Ibu
   b. Angka Kematian Bayi
   c. Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
   d. Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular
   e. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk
2. 41 (empat puluh satu) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian kinerja 112,15 (kategori tinggi) terdiri dari:
   a. Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai standar
   b. Persentase pelaksanaan GP2SP
   c. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
   d. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar
   e. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pengembangan wajib sesuai standar
   f. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
   g. Persentase upaya kesehatan masyarakat sekunder
   h. % produk pangan beredar yang memiliki sertifikat PIRT
   i. Persentase kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresure di wilayah kerja puskesmas
   j. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan kesehatan tradisional
   k. Persentase puskesmas yang melaksanakan kampenye kesehatan
   l. Persentase balita yang dipantau berat badannya (D/S)
   m. Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
   n. Persentase Katagori penilaian Ibu ASI dan Balita
   o. Persentase balita yang berat badannya naik (N/D)
   p. Persentase lingkungan desa/kelurahan sehat
   q. Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular langsung
   r. Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit endemik/epidemik

s. Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit menular seksual
t. Persentase pelayaan kesehatan pada usia produktif
u. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
v. persentase pelayanan kesehatan matra dan haji
w. Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi standar
x. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita
y. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
z. Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Ibu Hamil
aa. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
bb. Persentase UPT Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan
cc. % distribusi obat ke unit pelayanan
dd. % pemeriksaaan sempel pada lab kesehatan
ee. Persentase Puskesmas yang menjalankan manajemen mutu pelayanan Puskesmas
ff. Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen BOK
gg. Persentase Puskesmas yang memiliki sistem manajemen dan informasi kesehatan
hh. Persentase FKTP yang memiliki SDM sesuai standar
ii. Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar
jj. Persentase pelayanan pusling gigi
kk. Persentase pelayanan P3K
ll. Persentase penduduk miskin yang medapatkan pelayanan kesehatan dasar
mm. Penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
nn. Persentase puskesmas yang menjalankan manajemen mutu pelayanan Puskesmas
oo. Persentase pendapatan UPT BLUD Dinkes

Kinerja penyelenggaran wajib pelayanan dasar Bidang kesehatan yang diimplementasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah meliputi 6 (enam)

indikator kinerja sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pelayanan rumah sakit yang sesuai standar	**Status rumah sakit terakreditasi**	**Kategori**	**Paripurna**	**Paripurna**	**100,00**		**Paripurna**	**Paripurna**	**100**		**Paripurna**	**Paripurna**	**100**	**TT**
		Persentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	**Persen**	**85**	**86,01**	**101,19**		**86**	**86**	**100,0**		**100**	**86**	**86**	**AT**
		Persentase Indek kepuasan masyarakat	**Persen**	**85**	**83,69**	**98,46**		**87**	**87**	**100,0**		**90**	**87**	**96,67**	**AT**
	Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya	**Persentase sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya**	**Persen**	**85**	**84,39**	**99,28**		**90**	**90**	**100,0**		**100**	**90**	**90**	**AT**
	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit untuk mendukung pelayanan kepada pasien	**Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit yang memnuhi standar**	**Persen**	**90**	**88,37**	**98,19**		**90**	**90**	**100,0**		**100**	**90**	**90**	**AT**
	Meningkatnya kinerja keuangan rumah sakit	**Cost recovery ratio**	**Persen**	**120**	**99,13**	**82,61**		**130**	**125**	**96,2**		**160**	**125**	**78,125**	**AT**
	RATA-RATA					**96,62**				**99,36**				**73,47**	**AT**
1	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase elemen penilaian akreditasi bagian tata usaha yang memenuhi standar akreditasi	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		95	90	94,74	AT
		Persentase elemen penilaian akreditasi bidang pelayanan yang memenuhi standar akreditasi	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		95	90	94,74	AT
		Persentase elemen penilaian akreditasi bidang perencanaan yang memenuhi standar akreditasi	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		95	90	94,74	AT
		Persentase elemen penilaian akreditasi bidang keperawatan yang memenuhi standar akreditasi	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		95	90	94,74	AT
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tenaga medis yang memiliki SIP dan STR	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
		Persentase tenaga keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	85	85	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
3	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bahan baku makan minum pasien yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	100	100	AT
4	Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase gedung RS yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
		Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
		Persentase obat-obatan yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
		Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpenuhi	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase gedung RS yang terpelihara	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
		Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpelihara	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
		Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpelihara	Persen	90	90	100,00		90	90	100,0		100	90	90	AT
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan	Persentase pendapatan rumah sakit	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase efisiensi anggaran rumah sakit	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT
		Persentase indikator SPM bagian tata usaha yang mencapai target	Persen	85	85	100,00		86	86	100,0		100	86	86	AT
		Persentase indikator SPM bagian pelayanan yang mencapai target	Persen	85	85	100,00		86	86	100,0		100	86	86	AT
		Persentase indikator SPM bagian perencanaan yang mencapai target	Persen	85	85	100,00		86	86	100,0		100	86	86	AT
		Persentase indikator SPM bagian keperawatan yang mencapai target	Persen	85	85	100,00		86	86	100,0		100	86	86	AT
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat jasa rumah sakit	Persen	85	85	100,00		87	87	100,0		100	87	87	AT
		Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	70	70	100,00		70	70	100,0		80	70	87,5	AT
		Length of Stay (LOS)	status	2	2	100,00		2	2	100,0		3	2	66,67	
		Turn Over Interval (TOI)	status	2	2	100,00		2	2	100,0		3	2	66,67	
		Persentase pelaksanaan	Persen	100	100	100,00		100	100	100,0		100	100	100	AT

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
		mutu keperawatan													
	RATA-RATA					127,05				127,82				110,20	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. 6 (enam) indikator sasaran dengan rata-rata capaian 96,62 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Status rumah sakit terakreditasi
   b. Persentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit
   c. Persentase Indek kepuasan masyarakat
   d. Persentase sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya
   e. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit yang memnuhi standar
   f. Cost recovery ratio
2. 25 (dua pulu lima) indikator program dengan rata-rata capaian 127,05 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase elemen penilaian akreditasi bagian tata usaha yang memenuhi standar akreditasi
   b. Persentase elemen penilaian akreditasi bidang pelayanan yang memenuhi standar akreditasi
   c. Persentase elemen penilaian akreditasi bidang perencanaan yang memenuhi standar akreditasi
   d. Persentase elemen penilaian akreditasi bidang keperawatan yang memenuhi standar akreditasi
   e. Persentase tenaga medis yang memiliki SIP dan STR
   f. Persentase tenaga keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan
   g. Persentase bahan baku makan minum pasien yang terpenuhi
   h. Persentase gedung RS yang terpenuhi

i. Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpenuhi
j. Persentase obat-obatan yang terpenuhi
k. Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpenuhi
l. Persentase gedung RS yang terpelihara
m. Persentase pengadaan alat kesehatan RS yang terpelihara
n. Persentase sarana dan prasaana keperawatan yang terpelihara
o. Persentase pendapatan rumah sakit
p. Persentase efisiensi anggaran rumah sakit
q. Persentase indikator SPM bagian tata usaha yang mencapai target
r. Persentase indikator SPM bagian pelayanan yang mencapai target
s. Persentase indikator SPM bagian perencanaan yang mencapai target
t. Persentase indikator SPM bagian keperawatan yang mencapai target
u. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat jasa rumah sakit
v. *Bed Occupation Rate* (BOR)
w. *Length of Stay* (LOS)
x. *Turn Over Interval* (TOI)
y. Persentase pelaksanaan mutu keperawatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 3 (tiga)indikator kinerja sasaran dan 15 (lima belas) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	74,31	76,05	102,34		76,05	76,05	100		80,24	76,05	94,78	AT
		Persentase Panjang Jembatan	%	93,21	98,07	105,21		94,57	94,57	100		97,15	94,57	97,34	AT

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
		dalam Kondisi Baik													
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	**%**	**98,89**	**n.a**			**99,5**				**100**			
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Aset Lahan yang Disertifikasi (%)	%	100	100	100		0	n.a			100	100	100	TT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	74,59	74,59	100		76	76	100		80,24	76	94,72	AT
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
3	Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Daerah	Persentase Pencapaian Target Kinerja (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam Kondisi Baik (%)	%	70	70	100		75	75	100		85	75	88,23	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	74,59	74,59	100		76	76	100		80,24	76	94,71	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	%	98,5	98,5	100		99	99	100		100	99	99	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Dasar	**Persentase Masyarakat yang Terlayani Sanitasi Dasar**	**%**	**98,65%**	**85,88**	**100**		**87,20**	**87,20**	**100**		**100**	**87,20**	**87,20**	**AT**
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	**%**	**94,57%**	**85,43**	**100**		**86,15**	**86,15**	**100**		**100**	**86,15**	**86,15**	**AT**
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (%)	%	78,45	78,45	100		81,12	81,12	100		100	81,12	81,12	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
8	Program Pengendalian Banjir	Persentase Penanggulangan Daerah Rawan Banjir (%)	%	73,12	73,12	100		75,86	75,86	100		100	75,86	75,86	AT

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
	Meningkatnya Akses Infastruktur Dasar														
9	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Persentase Infrasturktur Pedesaan yang Dibangun (%)	%	79,3	79,3	100		81,48	81,48	100		84,68	81,48	96,22	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
10	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	74,59	74,59	100		76	74,59	98,14		80,24	74,59	92,95	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
11	Program Pembangunan Gedung dan Penataan Ruang	Persentase Gedung dan Fasilitas Perkantoran yang Baik (%)	%	0	n.a			90	90	100		100	90	90	AT
	Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata														
12	Program Pembina Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Kontruksi yang Terlatih (%)	%	0	n.a			72,88	72,88	100		71,32	72,88	102,19	TT
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	**Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**	**90**	**100**		**100**	**90**	**90**	**AT**
		Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	**%**	**32,38**	**n.a**			**32,38**	**n.a**			**32,38**	**n.a**		**UK**
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Data/Infomasi Tata Ruang Kabupaten Bangka (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang														
14	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan dan Penataan Ruang (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang														
15	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Reward dan Punishment Penataan Ruang (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	RATA-RATA					**100**				**100**				**78,33**	**AT**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator pelayanan umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akses Infastruktur Penunjang Perekonomian dan Pariwisata untuk indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik sebesar 94,75% (status tinggi)dan indikator

Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik sebesar 97,34% (status tinggi)

2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akses Infastruktur Dasar untuk indikator Persentase Masyarakat yang Terlayani Sanitasi Dasar sebesar 87,20 % (status tinggi).
3. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang sebesar 90% (status sedang).
4. Rata-rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 78,33% (status sedang) terdiri dari:
   a. Persentase Aset Lahan yang Disertifikasi ;
   b. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik;
   c. Persentase Pencapaian Target Kinerja ;
   d. Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam Kondisi Baik;
   e. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik;
   f. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik;
   g. Persentase Pemenuhan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
   h. Persentase Penanggulangan Daerah Rawan Banjir;
   i. Persentase Infrastruktur Pedesaan yang Dibangun;
   j. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik;
   k. Persentase Gedung dan Fasilitas Perkantoran yang Baik;
   l. Persentase Tenaga Ahli Kontruksi yang Terlatih;
   m. Persentase Data/Infomasi Tata Ruang Kabupaten Bangka;
   n. Pemanfaatan dan Penataan Ruang;
   o. Persentase *Reward* dan *Punishment* Penataan Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diimplementasikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.78 sebagai berikut :

Tabel 2.81

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Ururusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir
RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pemenuhan rumah yang layak bagi masyarakat	**Persentase Pemenuhan Backlog Rumah**	**%**	**35,00**	**35,00**	**100,00**		**40,00**	**40,00**	**100,00**		**55,00**	**40,00**	**72,73**	**AT**
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	**%**	**98,60**	**98,60**	**100,00**		**99,19**	**99,79**	**100,60**		**100,00**	**99,79**	**99,79**	**AT**
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan MBR yang memiliki Rumah	%	91,30	65,00	71,19		93,41	89,97	96,32		96,80	89,97	92,94	AT
		Persentase Pengembangan Perumahan yang Memiliki Site Plan	%	100,00	90,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
Rata-rata						**85,60**				**98,16**				**96,47**	**UK**
	Meningkatnya Permukiman yang Layak Huni	**Persentase Penurunan Luasan permukiman kumuh**	**%**	**100,00**	**67,99**	**67,99**		**100,00**	**86,73**	**86,73**		**100,00**	**86,73**	**86,73**	**AT**
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Infrastruktur lingkungan yang memadai	%	65,00	65,00	100,00		70,00	70,00	100,00		90,00	70,00	77,78	AT
3	Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	50,00	50,00	100,00		69,00	69,00	100,00		100,00	69,00	69,00	AT
4	Program Pengembangan Data/Informasi Permukiman	Persentase Kesesuaian Perencanaan Kawasan Permukiman	%	37,04	35,00	94,49		61,73	73,97	119,83		100,00	73,97	73,97	AT
Rata-rata						**98,16**				**106,61**				**73,58**	**AT**

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP, Kesbangpol, dan BPBD dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.79 sebagai berikut :

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Ururusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir
RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Ketertiban Umum	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**	**%**	**50,00**	**50,00**	**100,00**		**60,00**	**60,00**	**100,00**		**90,00**	**90,00**	**100,00**	**TT**
1	Program	Persentase	%	100,0	100,00	100,00		100,0	100,00	100,00		100,0	100,00	100,00	TT

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Objek Vital Pemda yang aman dan terawasi		0				0				0			
		Persentase Objek Destinasi Wisata yang aman dan terawasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Angka Tunawisma	%	0,45	0,45	100,00		0,45	0,45	100,00		0,40	0,45	87,50	AT
		2. Angka Prostitusi	%	1,25	1,25	100,00		1,20	1,20	100,00		1,15	1,20	95,65	AT
		3. Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	%	0,70	0,70	100,00		0,68	0,68	100,00		0,60	0,68	86,67	AT
		4. Persentase Angka Kasus Perjudian	%	6,75	6,75	100,00		6,70	6,70	100,00		6,65	6,70	99,25	AT
		5.Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	%	7,70	7,70	100,00		7,50	7,50	100,00		7,00	7,50	92,86	AT
Rata-rata						**100,00**				**100,00**				**94,56**	**TT**
	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**%**	5,30	**5,00**	**94,34**		6,30	**5,70**	**90,48**		7,30	**5,70**	**78,08**	**AT**
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Partisipasi Aktif dalam Pelestarian Budaya Bangsa	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Persentase Penanganan Konflik Antar Umat Beragama	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Cakupan Parpol yang Menerima Bantuan Keuangan	%	81,23	81,23	100,00		83,51	83,51	100,00		86,46	83,51	96,59	AT
4	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota per 10.000 Penduduk	%	42,00	42,00	100,00		42,30	42,00	99,29		42,90	42,00	97,90	AT
Rata-rata						**100,00**				**99,82**				**98,62**	**TT**
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	**Persentase Kasus Bencana Alam yang ditangani sesuai SOP**	**%**	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	**TT**
		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani sesuai SOP	**%**	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	**TT**
5	Program Pemcegahan Dini dan Penggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelayanan Bencana Alam Kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
Rata-rata						**100,00**				**100,00**				**100,00**	**TT**

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar bidang urusan Sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.80 sebagai berikut :

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urursan SosialTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Tepat Waktu dan Sasaran**	**%**	**100,00**	**99,00**	**99,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**TT**
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	69,00	69,00	100,00		100,00	78,00	78,00		100,00	78,00	78,00	AT
		Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	%	39,00	39,00	100,00		48,00	65,00	135,42		90,00	65,00	72,22	AT
		Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	%	40,00	40,00	100,00		60,00	57,73	96,22		90,00	57,73	64,14	AT
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	83,17	100,00	120,24		84,31	100,00	118,61		88,17	100,00	113,42	TT
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	%	100,00	80,00	80,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	%	65,75	75,00	114,07		97,46	87,00	89,27		100,00	87,00	87,00	AT
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	%	75,00	100,00	133,33		78,00	79,81	102,32		90,00	79,81	88,68	AT
4	Program Pemberdayaan Panti asuhan/Panti Jompo	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	%	75,00	75,00	100,00		78,00	77,81	99,76		90,00	77,81	86,46	AT
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
		Persentase Perusahaan yang Melaksanakan CSR sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2012	%	75,00	75,00	100,00		80,00	80,00	100,00		92,00	80,00	86,96	AT
Rata-rata						**100,00**				**100,00**				**87,69**	**AT**

2.2.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan Dasar bidang urusan Tenaga Kerja diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.81 sebagai berikut :

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Ururusan Tenaga KerjaTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	**Persentase Tingkat Kesempatan Kerja**	**%**	**68,16**	**96,20**	**141,14**		**68,18**	**96,31**	**141,26**		**68,24**	**96,31**	**141,13**	**TT**
1	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	9,07	9,07	100,00		26,17	27,81	106,27		34,62	27,81	80,33	AT
		Persentase Alumnus SMK yang Mendapat SKKNI	%	7,00	7,00	100,00		9,00	11,00	122,22		11,00	11	100,00	TT
		Persentase Pembinaan dan Monev BKK (Bursa Kerja Khusus) di Lembaga Pendidikan	%	0,00	0,00	0,00		23,18	24,56	105,95		29,17	24,56	84,20	AT
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	33,33	36,14	108,43		34,91	37,31	106,87		37,79	37,31	98,73	AT
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	**Persentase Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagkerjaan dan Syarat-syarat Kerja**	**%**	**47,89**	**47,89**	**100,00**		**49,30**	**49,30**	**100,00**		**55,73**	**55,73**	**100,00**	**TT**
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perusahaan yang membuat & mengesahkan peraturan perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	%	28,38	28,38	100,00		31,94	31,94	100,00		43,94	31,94	72,69	AT
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanajian Bersama (PB)	%	53,33	70,83	132,81		60,00	73,41	122,35		66,67	73,41	110,11	TT
Rata-rata						**110,31**				**107,31**				**95,38**	**AT**

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan Dasar bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diimplementasikan oleh DP2KBP3A dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.82 sebagai berikut :

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Ururusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir
RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Indeks**	**61,04**	**61,04**	**100,00**		**64,50**	**64,50**	**100,00**		**64,50**	**64,50**	**100,00**	**TT**
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Menerapkan PPRG	%	52,94	79,41	150,00		64,71	80,71	124,73		100,00	80,71	80,71	AT
		Persentase Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan Anak yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	AT
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	21,78	22,81	104,73		22,50	23,79	105,73		24,00	23,79	99,13	AT
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	20,67	22,73	109,97		23,20	24,51	105,65		25,00	24,51	98,04	AT
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	18,71	18,52	98,98		19,50	20,00	102,56		24,85	20,00	80,48	AT
Rata-rata						**110,61**				**106,44**				**93,06**	**AT**

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan Dasar bidang urusan Pangan diimplementasikan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.83 sebagai berikut :

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pangan Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadp tahun akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kemudahan Masyarakat untuk Mengakses Pangan	**Pendistribusian Bahan-bahan pokok**	**%**	**82,71**	**82,71**	**100,00**		**85,18**	**85,89**	**100,83**		**92,59**	**85,89**	**92,76**	**AT**
		Stabilitas harga bahan pokok	**%**	**84,61**	**84,61**	**100,00**		**84,61**	**89,73**	**106,05**		**92,31**	**89,73**	**97,21**	**AT**
		Penguatan Cadangan Pangan Daerah	**%**	**120000**	**16.200**	**135,00**		**170000**	**29.708**	**174,75**		**320000**	**29.708**	**92,84**	**AT**
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Toko Warung Penyedia Bahan Pangan Pokok (%)	%	82,71	82,71	100,00		85,18	85,89	100,83		92,59	85,89	92,76	AT
		Pemantauan Harga Pangan Pokok di Pasar Tradisional dan Pasar Modern (%)	%	84,61	84,61	100,00		84,61	89,73	106,05		92,31	89,73	97,21	AT
		Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	Kg	12.000	16.200	135,00		17.000	29.708	174,75		32.000	29.708	92,84	AT
Rata-rata						**100,00**				**127,21**				**94,27**	**AT**
	Kecukupan Ketersediaan Pangan Daerah	**Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**	**%**	**121,00**	**121,00**	**100,00**		**122,00**	**121,71**	**99,76**		**125,00**	**121,71**	**97,37**	**AT**
		Intervensi Daerah Rawan Pangan	**%**	**25,00**	**25,00**	**100,00**		**25,00**	**25,00**	**100,00**		**37,50**	**25,00**	**66,67**	**AT**
2	Program Peningkatan Bahan Makanan	Persentase Kecukupan Pangan Masyarakat (%)	%	120,00	121,00	100,83		121,00	121,71	100,59		124,00	121,71	98,15	AT
		Persentase Desa/Kelurahan Intervensi Rawan Pangan (%)	%	7,41	7,41	100,00		7,41	5,87	79,22		11,11	5,87	52,84	AT
Rata-rata						**100,42**				**89,90**				**75,49**	**AT**
	Peningkatan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar	**Persentase Keamanan Pangan Segar**	**%**	**90,00**	**90,00**	**100,00**		**92,00**	**92,00**	**100,00**		**98,00**	**92,00**	**93,88**	**AT**
3	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Produsen Pangan Segar Yang Mendapatkan Sertifikasi Pangan (Produsen)	Produsen	8	8	100,00		8	15	187,50		8	20	250,00	AT
		Persentase Pasar Yang Dilakukan Pembinaan Tentang Keamanan Pangan Segar (%)	%	66,67	66,67	100,00		77,78	87,53	112,54		88,89	87,53	98,47	AT
		Persentase Desa/Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan Tentang Keamanan Pangan Segar (%)	%	44,44	44,44	100,00		46,91	51,37	109,51		54,32	51,37	94,57	AT
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	%	66,67	66,67	100,00		77,78	86,53	111,25		88,89	86,53	97,35	AT

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadp tahun akhir RPJMD	
Rata-rata						**100,00**				**130,20**				**135,10**	**AT**
	Peningkatan Keberagaman dan Keseimbangan Gizi Yang Dikonsumsi Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**%**	**84,60**	**84,60**	**100,00**		**85,10**	**85,10**	**100,00**		**86,60**	**85,10**	**98,27**	**AT**
4	Program Pengembangan Pola Pangan	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	Rasio	1:0,92	1:0,92	100,00		1:0,94	1:0,97	100,05		1:1,00	1:0,97	99,95	AT
		Rasio Tingkat Konsumsi Protein	Rasio	1:1,44	1:1,44	100,00		1:1,39	1:1,37	99,97		1:1,24	1:1,37	100,21	AT
		Konsumsi Sayur dan Buah (gram/hari)	gram/ hari	105	105	100,00		110,00	117,00	106,36		125	117,00	93,60	AT
		Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga (%)	%	1,84	1,84	100,00		2,04	2,02	99,02		2,64	2,02	76,52	AT
		Persentase Kelompok Binaan Yang Memproduksi Olahan Pangan Lokal (%)	%	20,97	20,97	100,00		22,00	23,77	108,05		28,00	23,77	84,89	AT
Rata-rata						**100,00**				**102,69**				**91,03**	**AT**

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan Dasar bidang urusan Pertanahan diimplementasikan oleh DINPERKPP dengan beberapa Indikator kinerja daerah yang tersaji pada tabel 2.84 sebagai berikut :

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urursan PertanahanTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023.

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	**Persentase Lahan Pemerintah Daerah Yang Disertifikat**	**%**	**28,50**	**35,35**	**124,04**		**29,00**	**37,00**	**127,59**		**33,00**	**37,00**	**112,12**	**TT**
		Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**TT**
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
		Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	%	28,20	28,00	99,29		28,35	28,20	100,00		29,00	28,20	97,24	AT
2	Program	Persentase	%	100,0	100,00	100,0		100,0	100,00	100,0		100,0	100,00	100,00	TT

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2018 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Konflik Lahan yang Ditangani Konflik Pertanahan		0		0		0		0		0			
3	Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pemenuhan Informasi Data Pertanahan Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	TT
Rata-rata						**99,82**				**100,00**				**84,31**	**AT**

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan Dasar bidang urusan Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan beberapa indikator kinerja daerah yang tersaji pada table 2.85 sebagai berikut :

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Lingkungan HidupTahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16
	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	**Persentase Pengelolaan Persampahan**	**%**	**90,00**	**90,23**	**100,26**		**97,00**	**97,59**	**100,61**		**99,00**	**97,59**	**98,58**	**AT**
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	13,69	68,45		22,00	20,00	90,91		27,00	20,00	74,07	AT
		Persentase Penanganan Sampah	%	41,28	76,55	185,44		42,44	79,54	187,42		45,13	79,54	176,25	TT
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,00	71,86	121,80		60,00	72,67	121,12		62,00	72,67	117,21	TT
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,00	88,27	99,18		90,00	89,65	99,61		93,00	89,65	96,40	AT
		Persentase Penanganan Kasus Lingkungan	%	23,00	25,00	108,70		21,00	26,00	123,81		20,00	26,00	130,00	TT
Rata-Rata						**116,71**				**124,57**				**118,79**	**TT**
	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Indeks**	**63,00**	**63,07**	**100,10**		**65,02**	**65,07**	**100,08**		**65,10**	**65,07**	**99,95**	**AT**
3	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase Lahan yang Dikonservasi	%	33,00	33,00	100,00		67,00	67,00	100,00		100,00	67,00	67,00	AT
4	Program	Persentase	%	22,04	22,04	100,00		20,00	37,98	189,90		50,00	37,98	75,96	AT

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019 - 2023			Status Capaian RPJMD
				Target	realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi sampai 2020	Capaian terhadap tahun akhir RPJMD	
	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi													
5	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Frekuensi Penyampaian Informasi Bidang Lingkungan Hidup	%	90,00	100,00	111,11		95,00	100,00	105,26		100,00	100,00	100,00	TT
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH Publik yang dikelola	%	1,3350	1,3350	100,00		1,3351	1,3351	100,00		1,3355	1,3351	99,97	AT
Rata-Rata						**102,78**				**123,79**				**85,73**	**AT**

6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Angka**	**74.77**	**74.77**	**100.00**		**74.77**	**74.77**	**100.00**		**85.40**	**74.77**	**87.55**	**AT**
		Zona Hijau Pelayanan Publik	**Angka**	**98.41**	**98.41**	**100.00**		**98.41**	**98.41**	**100.00**		**100.00**	**98.41**	**98.41**	**AT**
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**92.98**	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	%	70.00	70.00	100.00		80.00	80.00	100.00		100.00	80.00	80.00	AT
		Cakupan Penerbitan KTP	%	95.00	95.00	100.00		97.50	97.50	100.00		100.00	97.50	97.50	AT
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	90.00	90.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	90.00	90.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		85.00	75.00	88.24	AT
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**				**100.00**				**93.15**	**AT**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 93,15% terdiri dari :
   a. Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan
   b. Cakupan Penerbitan KTP
   c. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran
   d. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
   e. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel 2.87 berikut ini.

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 20	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif**	**Persen**	**65**	**71**	**109,231**		**70**	**70**	**100**		**95**	**70**	**73,68**	**AK**
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa	**Persentase Desa dengan Klasifikasi Swasembada**	**Persen**	**28**	**31**	**110,7 14**		**35**	**35**	**100**		**75**	**35**	**46,67**	**UK**
	RATA-RATA					**109,973**				**100**				**60,18**	**AK**
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Keberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 20	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran unsur masyarakat dalam musrenbang (%)	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
6	Program Pengembangan dan Pemasyarakatan teknologi Tepat Guna	Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
7	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	Persen	84	80	95,24		86	84,00	97,67		92	84,00	91,30	AT
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkriteria Baik	Persen	80	75	93,75		90	80	88,89		100	80	80	AT
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeolaan Keuangan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Terbina	Persen	100	100	100,00		100	100	100		100	100	100	TT
	RATA-RATA					98,78				98,51				96,81	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian 109,97 (status tinggi), terdiri dari :
   a. Persentase Lembaga ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Aktif
   b. Persentase Desa dengan Klasifikasi Swasembada
2. 9 (Sembilan) indikator program dengan rata-rata capaian 98,97 (status tiggi), terdiri dari:
   a. Persentase Keberdayaan Masyarakat Desa
   b. Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif
   c. Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa
   d. Persentase kehadiran unsur masyarakat dalam musrenbang (%)

e. Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
f. Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan
g. Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas
h. Persentase Desa Berkriteria Baik

3. Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Terbina

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 4 (empat) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.88 berikut ini.

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menurunnya Angka Kelahiran	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Persen**	**2,5**	**2,41**	**103,60**		**2,45**	**2,41**	**101,66**		**2,30**	**2,41**	**95,44**	AT
		Jumlah Rata - Rata Anak per Keluarga	**Rasio**	**1,72**	**1,55**	**109,88**		**1,67**	**1,55**	**107,74**		**1,6**	**1,55**	**103,23**	AT
	Menurunnya Angka Pernikaan Dini	**Rata - Rata Usia Kawin Pertama Wanita**	**Umur**	**19**	**19**	**100,00**		**20**	**20**	**100**		**20**	**20**	100,00	AT
	Menurunya Keluarga Pra KS dan KS I	**Persentase Keluarga Pra KS dan KS I**	**Persen**	**5,51**	**2,79**	**149,36**		**5,31**	**2,79**	**190,32**		**3,15**	**2,79**	**112,90**	AT
	RATA-RATA					**115,71**				**124,93**				**102,89**	AT
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	Persen	69,86	86,67	124,06		70,71	71,00	100,4101		73,07	71,00	97,17	AT
2	Program Keluarga Berencana	Cakupan unmet need	Persen	15,51	4,80	323,13		14,63	14,63	100		12,62	14,63	86,26	AT
3	Program Keluarga Berencana	Ratio ASFR 15-19 tahun	Persen	48,48	46,16	95,21		48,35	48,35	100		47,94	48,35	98,72	AT
4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (KRR)	cakupan PIK remaja berkinerja baik	Persen	30	30	100,00		40,00	40,00	100		70	40,00	57,14	AT
5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	UPPKS di setiap Desa/ kelurahan (%)	Persen	50,62	85,12	168,15		69,49	69,49	100		90,12	69,49	77,11	AT
		Cakupan BKB Berkinerja baik	Persen	50	50	100,00		50	50	100		80	50	62,5	AT

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
		Cakupan BKR Berkinerja baik	Persen	50	50	100,00		50	50	100		80	50	62,5	AT
		Cakupan BKL Berkinerja baik	Persen	50	50	100,00		50	50	100		80	50	62,5	AT
	RATA-RATA					138,82				100,05				75,49	

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 115,71 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Total Fertility Rate (TFR)
   b. Jumlah Rata - Rata Anak per Keluarga
   c. Rata - Rata Usia Kawin Pertama Wanita
   d. Persentase Keluarga Pra KS dan KS I
2. 8 (delapan) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 138,83 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Cakupan Peserta KB Aktif (%)
   b. Cakupan unmet need
   c. Ratio ASFR 15-19 tahun
   d. cakupan PIK remaja berkinerja baik
   e. UPPKS di setiap Desa/ kelurahan (%)
   f. Cakupan BKB Berkinerja baik
   g. Cakupan BKR Berkinerja baik
   h. Cakupan BKL Berkinerja baik

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan

2 (dua) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.89 berikut ini.

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 20	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Transportasi yang Aman	**Persentase Angkutan transportasi dalam kondisi yang baik**	**Persen**	**80**	**80**	**100,0**		**85,00**	**85,00**	**100**		**100,00**	**85,00**	**85,00**	**AT**
		Presentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	**Persen**	**4,50**	**4,45**	**101,12**		**4**	**4**	**100**		**2,00**	**4**	**50,00**	**UK**
	RATA_RATA					**100,56**				**100,00**				**67,50**	**AT**
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Transportasi yang Aman	Persen	77,00	57,00	74,0		79,00	79,00	100		85,00	79,00	92,94	AT
		Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas	Persen	67,13	67,15	100,03		67,59	67,59	100		68,97	67,59	98,00	AT
		Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Persen	65,00	65	100		70,00	70,00	100		85,00	70,00	82,35	AT
		Persentase Desa yang Mendapat Layanan Angkutan Sekolah Gratis	Persen	5,00	5	100		10,00	10,00	100		25,00	10,00	40,00	UK
		Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	80	100		85,00	85,00	100		100,00	85,00	85,00	AT
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Persen	65,46	65,46	100		65,92	65,92	100		67,30	65,92	97,95	AT
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	Persen	4,50	4,45	101,12		4	4	100		2,00	4	50,00	UK
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Persen	67,13	67,13	100		67,59	67,59	100		68,97	67,59	98,00	AT
	RATA_RATA					96,90				100,00				80,53	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sampai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 100,56 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Angkutan transportasi dalam kondisi yang baik
   b. Presentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas
2. 8 (delapan) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 96,90 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Transportasi yang Aman
   b. Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas
   c. Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan
   d. Persentase Desa yang Mendapat Layanan Angkutan Sekolah Gratis
   e. Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik
   f. Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
   g. Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas
   h. Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar komunikasi dan informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi , Informasi dan Statistik dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.90 berikut ini.

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang komunikasi dan informatika sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**Indeks E-Government**	**Nilai**	**2,5**	**2,5**	**100**		**2,7**	**2,7**	**100**		**3,3**	**2,7**	**81,82**	**AT**
		Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	**Persen**	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	**AT**
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**Persen**	**60**	**67,14**	**111,9**		**70**	**70**	**100**		**100**	**70**	**70**	**AT**
	RATA_RATA					**103,97**				**100**				**83,94**	
1	Program Pengembanga	Persentase Sistem	Persen	41,90	41,90	100		61,90	61,90	100		100	61,90	61,9	AT

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJM	
	n Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Informasi Manajemen Pemerintah													
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	Persen	40	40	100		50	50	100		80	50	62,5	AT
2	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Layanan Publik Berbasis TIK	Persen	51,61	51,61	100		67,74	67,74	100		100	67,74	67,74	AT
3	Program Pengembangan Persandian daerah	Terwujudnya Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Kep. Babel	Persen	100,00	100,00	100		100,00	100,00	100		100	100,00	100	AT
4	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase Kebijakan Strategis Pemda yang Diinformasikan kepada Masyarakat	Persen	80,00	80,00	100		85,00	85,00	100		100	85,00	85	AT
	RATA_RATA					100				100				75,43	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 103,97 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Indeks E-Government
   b. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah
   c. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
2. 5 (lima) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari :
   a. Persentase Sistem Informasi Manajemen Pemerintah
   b. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan
   c. Persentase Layanan Publik Berbasis TIK
   d. Terwujudnya Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Kep. Babel
   e. Persentase Kebijakan Strategis Pemda yang Diinformasikan kepada Masyarakat

11. Persandian

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.91 berikut ini.

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	PREDIKSI CAPAIAN S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	74.77	74.77	100.00		74.77	74.77	100.00		85.40	74.77	87.55	
		Zona Hijau Pelayanan Publik	Angka	98.41	98.41	100.00		98.41	98.41	100.00		100.00	98.41	98.41	
	RATA-RATA SASARAN					100.00				100.00				92.98	
1	Program Pengembangan Persandian Daerah	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	
	RATA-RATA PROGRAM					100.00				100.00				100.00	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik

Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% (status tinggi) yaitu Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan.

12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah dengan 2 (dua) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.92 berikut ini.

Tabel 2.95
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 20	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	Persen	86	86	100		87	87	100		90	87	96,67	AT
2	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Kompetitif Usaha Kecil menengah	Persentase UMKM yang Naik Kelas (%)	Persen	5	5	100		6	6	100		9	6	66,67	AT
	RATA-RATA					100				100				81,67	

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Koperasi Aktif (%)
   b. Persentase UMKM yang Naik Kelas (%)

13. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan Pilihan bidang penanaman modal diimplementasikan oleh Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran daerah dan 2 (dua) indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2.96
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang penanaman modal sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	**Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP**	**Persen**	**65**	**65**	**100**		**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	**TT**
	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal No Indikator	**Persentase Peningkatan Investasi Daerah**	**Persen**	**33,33**	**33,33**	**100**		**34**	**34**	**100**		**100**	**34**	**34**	**UK**
	RATA_RATA					**100**				**100**				**67**	**AT**
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan / Non Perizinan sesuai SOP	Persen	65	65	100		100	100	100		100	100	100	TT
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Promosi Investasi yang dilaksanakan (%)	Persen	33,33	33,33	100		34	34	100		100	34	34	UK
	RATA_RATA					100				100				67	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP
   b. Persentase Peningkatan Investasi Daerah
2. 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Pelayanan Perizinan / Non Perizinan sesuai SOP
   b. Persentase Promosi Investasi yang dilaksanakan (%)

14. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.94 berikut ini.

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah	**Persentase pemuda yang berjiwa kepemimpinan, berwirausaha, dan berorganisasi**	**Persen**	**3,00**	**3,00**	**100**		**3,00**	**3,00**	**100**		**5**	**3,00**	**60,00**	**AT**
	Meningkatnya prestasi cabang olahraga pelajar dan mahasiswa	**Persentase Kabupaten Bangka dalam event keolahragaan SD tingkat provinsi**	**Persen**	**91,30**	**100**	**109,53**		**91,30**	**91,30**	**100**		**95**	**91,30**	**96,11**	**AT**
		Persentase Kabupaten Bangka dalam event keolahragaan SMP tingkat provinsi	**Persen**	**91,30**	**80**	**87,62**		**91,30**	**91,30**	**100**		**95**	**91,30**	**96,11**	**AT**
	RATA-RATA					**99,05**				**100,00**				**84,07**	**AT**
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Pemuda yang aktif Berorganisasi	Persen	2,50	2,50	100		2,50	2,50	100		3	2,50	83,33	AT
2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang aktif Berwirausaha	Persen	0,02	0,02	100		0,02	0,02	100		0,04	0,02	50,00	UK
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berkembang di masyarakat	Persen	45	45	100		50,00	50	100		60,00	50	83,33	AT
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memadai	Persen	20	20	100		40	40	100		100	40	40,00	UK
	RATA-RATA					100				100				64,17	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 99,05 (status tinggi), terdiri dari:

   a. Persentase pemuda yang berjiwa kepemimpinan, berwirausaha, dan berorganisasi

b. Persentase Kabupaten Bangka dalam event keolahragaan SD tingkat provinsi

c. Persentase Kabupaten Bangka dalam event keolahragaan SMP tingkat provinsi

2. 4 (empat) indikator kinerja sasaran program dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:
   a. Persentase Pemuda yang aktif Berorganisasi
   b. Persentase Pemuda yang aktif Berwirausaha
   c. Persentase cabang olahraga yang berkembang di masyarakat
   d. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memadai

15. Statistik

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.95 berikut ini.

Tabel 2.98
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Statistik sampai Tahun 2019, Prediksi Tahun 2020, dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019-2023

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI S/D 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	**Persentase Data Statistik yang Aktual**	**Persen**	**90**	**90**	**100**		**90**	**90**	**100**		**100**	**90**	**90**	**AT**
	RATA-RATA					**100**				**100**				**90**	**AT**
1	Program pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat	Persen	90	90	100		90	90	100		100	90	90	AT
	RATA-RATA					100				100				90	AT

Dari tabel diatas diketahui bahwa status capaian indikator Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:

a. Persentase Data Statistik yang Aktual

2. 1 (satu) indikator kinerja program dengan rata-rata capaian 100 (status tinggi), terdiri dari:

   a. Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat

16. Kebudayaan

Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.96 berikut ini

Tabel 2.99
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan**	**%**	**12,81**	**12,81**	**100**		**14,67**	**12,81**	**87,32106**		**16,69**	**12,81**	**76,75**	**AT**
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelaku Seni Budaya yang Aktif	%	12,5	12,50	100		12,5	12,5	100		60	25	41,67	UK
	Meningkantnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah														
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Adat Budaya Daerah yang dilestarikan	%	4	5	125		5	5	100		20	10	50	AT
	Meningkantnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah														
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya	%	n.a	-			20	20	100		20	20	100	TT
	Meningkantnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah														
4	Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelaku Seni Budaya yang Aktif	%	12,5	12,5	100		12,5	12,5	100		60	25	41,67	UK
	RATA-RATA					100				100				58,33	AT

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang bidang kebudayaan sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah sebesar 76,75% (status sedang).
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 58,33% (status sedang) terdiri dari:
   a. Pelaku Seni Budaya yang Aktif;
   b. Persentase Adat Budaya Daerah yang dilestarikan;
   c. Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya.

17. Perpustakaan

Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perputakaan melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada table 2.96 berikut ini

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Sumber Daya Perpustakaan Umum Daerah Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Sumber Daya Peralatan Yang Memenuhi Standar Nasional	%	86,67	86,67	100		93,33	93,33	100		100	93,33	93,33	AT
		Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka	%	5,38	18,25	339,22		5,68	5,68	100		5,68	5,68	100	TT
		Persentase Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Kompetensi Teknis	%	83,33	62,5	75		100	100	100		100	100	100	TT
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jenis Koleksi Bahan Pustaka Perpusda	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daeah	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase Perpustakaan	%	75	75	100		20	20	100		100	95	95	AT

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
		Desa/Kelurahan/ Kecamatan yang dikembangkan													
		Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	%	0	n.a	0		50	50	100		100	50	50	AT
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Umum Daerah	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Kategori	Puas	Puas	100		Puas	Puas	100		sangat puas	Puas	100	AT
2	Program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum	Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daeah	%	0	n.a			25	25	100		100	25	25	UK
RATA-RATA						**100**				**100**				**50**	**AT**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang bidang perpustakaan sampai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Sumber Daya Perpustakaan Umum Daerah Sesuai Standar Nasional Perpustakaan untuk indikator Persentase Sumber Daya Peralatan Yang Memenuhi Standar Nasional sebesar 93,33% (status tinggi), sedangkan indikator Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Persentase Sumber Daya Manusia yang Memenuhi Kompetensi Teknis sebesar 100% (status tinggi)
2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Umum Daerah sebesar 100% (status tinggi)
3. Rata-rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 50% (status sedang) terdiri dari:
   a. Persentase Jenis Koleksi Bahan Pustaka Perpusda;
   b. Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah;
   c. Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/ Kecamatan yang dikembangkan;
   d. Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah;
   e. Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah

18. Kearsipan

Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perputakaan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.96 berikut ini

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				Rpjmd 2019-2023			Status Capaian Rpjmd
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Prediksi Capaian S/D 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Tertib Kearsipan Lembaga Daerah	Persentase OPD,Kelurahan dan Desa yang Tertib Arsip	%	69,57	70	100		73,91	73,91	100		100	73,91	73,91	AT
		Persentase BUMD yang Tertib Arsip	%	100	100	100		50	50	100		100	75	75	AT
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase Arsip Dinamis Daerah yang Diselamatkan	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase Arsip Dinamis Daerah yang disusutkan/ dimusnahkan	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase Arsip Statis Daerah yang Diselamatkan	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase Arsip Statis Daerah yang Direproduksi	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Tertib Kearsipan Lembaga Daerah														
2	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Arsip Dinamis dan Statis Daerah yang terpelihara baik	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
		Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang disupervisi	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Tertib Kearsipan Lembaga Daerah														
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD, Kelurahan dan Desa yang dibina dan dilatih	%	n.a	n.a			25	25	100		100	25	25	UK
	RATA-RATA					100				100				37,85	UK

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang bidang kearsipan sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Tertib Kearsipan Lembaga Daerah, untuk indikator Persentase OPD,Kelurahan dan Desa yang Tertib Arsip sebesar 73,91% (status sedang) dan indikator Persentase BUMD yang Tertib Arsip sebesar 75% (status sedang).
2. Rata rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 38,85% (status rendah) terdiri dari:
   a. Persentase Arsip Dinamis Daerah yang Diselamatkan;
   b. Persentase Arsip Dinamis Daerah yang disusutkan/ dimusnahkan;
   c. Persentase Arsip Statis Daerah yang Diselamatkan;
   d. Persentase Arsip Statis Daerah yang Direproduksi;
   e. Persentase Arsip Dinamis dan Statis Daerah yang terpelihara baik;
   f. Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang disupervisi;
   g. Persentase OPD, Kelurahan dan Desa yang dibina dan dilatih.

2.2.1.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja Urusan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan diimplementasikan oleh Dinas Perikanan melalui (enam) indikator kinerja sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.97 berikut ini

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			Status Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi Smpai 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikana	**Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**1,43**	**1,43**	**100,00**		**1,53**	**1,53**	**100,00**		**1,83**	**1,53**	**83,61**	**AT**
		Prosentase	**%**	**2,60**	**2,60**	**100,**		**2,65**	**2,65**	**100,**		**2,80**	**2,65**	**94,64**	**AT**

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			Status Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi Smpai 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
	n	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**				**00**				**00**					
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Nelayan dan Pembudidaya	**Jumlah nelayan yang mampu mengguna kan teknologi penangkapan ikan**	**Orang**	**40,00**	**42,00**	**105,00**		**40,00**	**40,00**	**100,00**		**100,00**	**80,00**	**80,00**	**AT**
		Jumlah pembudidaya ikan yang mampu mengguna kan teknologi budidaya ikan	**Orang**	**30,00**	**30,00**	**100,00**		**30,00**	**30,00**	**100,00**		**100,00**	**60,00**	**60,00**	**AT**
3	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	Prosentase Capaian Target Kinerja	%	0,00	n.a			0,00	n.a			100,00	n.a		
4	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase Penyuluhan Ke Masyarakat Perikanan	%	20,00	20,00	100,00		0,00	n.a			100,00	20,00	20,00	UK
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat Perikanan		**%**	**20,00**	**20,00**	**100,00**		**20,00**	**20,00**	**100,00**		**100,00**	**40,00**	**40,00**	**UK**
5	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersediany a Data Perikanan (%)	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat Perikanan														
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya		**%**	**20,00**	**20,00**	**100,00**		**20,00**	**20,00**	**100,00**		**100,00**	**40,00**	**40,00**	**UK**
7	Program Penguatan Kelembag	Jumlah KUB dan POKDAKAN	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			Status Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi Smpai 2020	Capaian Terhadap Tahun Akhir Rpjmd	
	aan Masyarakat Perikanan	yang naik kelas dari Pemula ke Madya													
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**25985,09**	**25697,17**	**98,89**		26.485,088	26.485,088	**100,00**					
		Jumlah produksi perikanan budidaya	**Ton**	**1103,61**	**2125,49**	**192,59**		1.114,648	1.114,648	**100,00**					
8	Program Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mendapatkan perlindungan	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Akses Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	**Jumlah akses daerah dan jaringan pemasaran**	**Lokasi/ unit**	**3,00**	**3,00**	**100,00**		**2,00**	**2,00**	**100,00**		**10,00**	**5,00**	**50,00**	**AT**
9	Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Akses Daerah Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Perikanan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**3,30**	**3,32**	**100,61**		**3,40**	**3,40**	**100,00**		**3,70**	**3,40**	**91,89**	**AT**
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Perikanan	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Perikanan	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	RATA-RATA					**100,00**				**100,00**				**40,00**	**UK**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator Urusan Pemerintahan Pilihan bidang kelautan dan perikanan sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan untuk indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 83,6% (status tinggi) dan indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 94,64% (status tinggi)
2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Nelayan dan Pembudidaya untuk indikator Jumlah nelayan yang mampu menggunakan

teknologi penangkapan ikan sebesar 80% (status tinggi) dan indiaktor Jumlah pembudidaya ikan yang mampu menggunakan teknologi budidaya ikan sebesar 60% (status tinggi).

3. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat Perikanan sebesar 40% (status rendah)
4. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebesar 40% (status rendah)
5. Capaian indikator sasaranMeningkatnya Akses Pemasaran Hasil Produksi Perikanan sebesar 50% (status sedang)
6. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Perikanan sebesar 91,89% (status tinggi)
7. Rata-rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 40% (status rendah) terdiri dari:
   a. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan;
   b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;
   c. Prosentase Capaian Target Kinerja;
   d. Persentase Penyuluhan Ke Masyarakat Perikanan;
   e. Tersedianya Data Perikanan (%);
   f. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya;
   g. Jumlah KUB dan POKDAKAN yang naik kelas dari Pemula ke Madya;
   h. Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mendapatkan perlindungan;
   i. Jumlah Akses Daerah Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
   j. Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Perikanan

2. Pariwisata

Kinerja Urusan Pilihan bidang pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.98 berikut ini.

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi Sampai 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Daerah	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**%**	**12,81**	**12,81**	**100,00**		**14,67**	**12,81**	**87,32**		**16,69**	**12,81**	**76,75**	**AT**
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Event, Destinasi, Pameran, Media Promosi)	%	20,00	20,00	100,00		100,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Daerah														
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata Yang Berkualitas (%)	%	20,00	20,00	100,00		100,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Daerah														
3	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase mitra pariwisata yang dibina	%	20,00	20,00	100,00		20,00	20,00	100,00		100,00	40,00	40,00	UK
	RATA-RATA					**100,00**				**100,00**				**40,00**	**UK**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator pelayanan umum Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Daerah untuk indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan sebesar 76,75% (status sedang)
2. untuk 3 (tiga) indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 40% (status rendah) terdiri dari:
   a. % Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Event, Destinasi, Pameran, Media Promosi);
   b. Destinasi Wisata Yang Berkualitas (%);
   c. Persentase mitra pariwisata yang dibina.

3. Pertanian

Kinerja Urusan Pilihan bidang pertanian diimplementasikan oleh Dinas Pangan dan Pertanian melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.99 berikut ini.

Tabel 2.104
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Pertanian sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	19,49	19,49	100		21,06	21,06	100		22,1	21,06	95,29	AT
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Jumlah Kelompok Tani (Persen)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan														
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman Pangan (%)	%	80	80	100		80	80	100		100	80	80	AT
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan														
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menerima Sarana dan Prasarana Pertanian (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan														
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Poktan yang Menerima Bibit Tanaman Hortikultura	%	100	100	100		100	100	100		100	100	100	TT
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan														
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian yang dinilai (Orang)	orang	58	58	100		58	58	100		58	58	100	TT
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan														
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular (Zoonosis) (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Ketersediian Pangan														
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Ternak yang Sehat (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Meningkatnya Produk Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan Strategis	Ton	3369,21	3.369	100		2700	2700	100					

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian	Target	Prediksi Realisasi	Capaian (%)	Prediksi Status Capaian	Target Akhir 2023	Prediksi Realisasi S/D 2020	Capaian terhadap Tahun Akhir RPJMD (%)	
		(Lada)													
		Produksi Sektor Perkebunan Strategis (Sawit)	Ton	38550,75	39.067	101,34		40000	40000	100					
8	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan	Persentase Kelompok Tani yang Menerima Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
	Ketersediaan Data Pertanian	Persentase Data Pertanian (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Persentase Ketersediaan Data Pertanian (%)	%	20	20	100		20	20	100		100	40	40	UK
RATA-RATA						**100**				**100**				**57,78**	**AT**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator pelayanan umum Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan sebesar 95,29% (status tinggi)
2. Capaian indikator sasaran Ketersediaan Data Pertanian 40% (status rendah)
3. Rata-rata capaian indikator kinerja program sudah tercapai sebesar 57,78% (status sedang) terdiri dari:
   a. Peningkatan Jumlah Kelompok Tani (Persen);
   b. Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman Pangan (%);
   c. Persentase Kelompok Tani yang Menerima Sarana dan Prasarana Pertanian (%);
   d. Persentase Poktan yang Menerima Bibit Tanaman Hortikultura;
   e. Jumlah Penyuluh Pertanian yang dinilai (Orang);
   f. Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular (Zoonosis) (%);
   g. Persentase Ternak yang Sehat (%);
   h. Persentase Kelompok Tani yang Menerima Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (%);
   i. Persentase Ketersediaan Data Pertanian (%).

4. Kehutanan

Pelaksanaan Urusan Kehutanan diintervensi melalui 1 program dengan 1 indikator kinerja. Urusan Kehutanan merupakan kewenangan dari Provinsi bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, akan tetapi program dalam urusan kehutanan masih bisa di pergunakan. Untuk urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Capaian program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan indikator kinerja keanekaragaman hayati hutan yang dilindungi capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2019 masih nihil.

5. Perdagangan

Kinerja Urusan Pilihan bidang perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.100 berikut ini.

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Perdagangan sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 – 2023

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKSI STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	**Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**%**	**13,78**	**14,17**	**102,83**		**14,19**	**14,19**	**100**		**14,68**	**14,19**	**96,66**	**AT**
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penurunan pelanggaran Alat UTTP (%)	%	20	20,00	100		20	20	100		100	40	40	AT
		Penurunan Peredaran Barang dan jasa yang tidak sesuai standar (%)	%	n.a	n.a	0		n.a	n.a	0		2,50			
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB														
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Promosi Produk Perdagangan (%)	%	20	20	100		24,78	24,78	100		28,57	24,78	86,73	AT

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKSI STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
		Ketersediaan Kebutuhan pokok sampai di tingkat pasar kecamatan (%)	%	85,00	85,00	100		86,72	86,72	100		87,50	86,72	99,10	AT
	RATA-RATA					**100**				100				**75,28**	AT

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator pelayanan umum Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perdagangan sampai tahun 2020 sudah tercapai, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB sebesar 96,66% (status tinggi)
2. Capaian indikator kinerja program sebesar 75,28% (status sedang) terdiri dari:
   a. Penurunan pelanggaran Alat UTTP (%)
   b. Penurunan Peredaran Barang dan jasa yang tidak sesuai standar (%)
   c. Peningkatan Promosi Produk Perdagangan (%)
   d. Ketersediaan Kebutuhan pokok sampai di tingkat pasar kecamatan (%).

6. Industri

Kinerja Urusan Pilihan bidang industri diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagaimana tertuang pada tabel 2.101 berikut ini.

Tabel 2.106
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian sampai tahun 2019, Prediksi Tahun 2020 dan Prediksi Target Akhir RPJMD 2019 - 2023

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKSI STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolah	**Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap**	**%**	**22,56**	**21,23**	**94,1**		**22,58**	**22,58**	**100**		**22,64**	**22,58**	**99,73**	**AT**

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKSI STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
	an terhadap PDRB	**PDRB**													
1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	%	23,40	23,40	100		24,65	23,40	94,92		33,15	23,40	70,58	AT
2	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM Terlatih terhadap Jumlah IKM	%	5,25	5,25	100		13,66	13,66	100		16,56	13,66	82,48	AT
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM	%	n.a	n.a							16,56			
RATA-RATA						**100**				**97,46**				**76,53**	**AT**

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator pelayanan umum Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian sampai tahun 2020 sudah tercapai, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB sebesar 99,73% (status tinggi)
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 76,54 **%** (status sedang) terdiri dari:
   a. Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM
   b. Persentase IKM Terlatih terhadap Jumlah IKM
   c. Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM

2.2.1.4. Penunjang Urusan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya diimplementasikan oleh Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya yang diimplementasikan oleh Inspektorat ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja

program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.102 berikut ini.

Tabel 2.107
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya, Inspektorat sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Angka**	**74.77**	**74.77**	**100.00**		**74.77**	**74.77**	**100.00**		**85.40**	**74.77**	**87.55**	**AT**
		Zona Hijau Pelayanan Publik	**Angka**	**98.41**	**98.41**	**100.00**		**98.41**	**98.41**	**100.00**		**100.00**	**98.41**	**98.41**	AT
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**92.98**	
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level Peran dan Layanan APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		Level Pengelolaan SDM APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		Level Praktik Profesional APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		Level Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		Level Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		Level Struktur Tata Kelola APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	**TT**
		% OPD yang Perencanaan Kinerjanya Minimal Kategori BB	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		100.00	75.00	75.00	**AT**
		% OPD yang Pengukuran Kinerjanya Minimal Kategori BB	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		100.00	75.00	75.00	**AT**
		% OPD yang Pelaporan Kinerjanya Minimal Kategori BB	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		100.00	75.00	75.00	**AT**
		% OPD yang Evaluasi Internalnya Minimal Kategori BB	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		100.00	75.00	75.00	**AT**
		% OPD yang Capaian Kinerjanya Minimal Kategori BB	%	70.00	70.00	100.00		75.00	75.00	100.00		100.00	75.00	75.00	**AT**
		% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Aset yang Material	%	75.00	75.00	100.00		80.00	80.00	100.00		95.00	80.00	84.21	**AT**
		% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	%	75.00	75.00	100.00		80.00	80.00	100.00		95.00	80.00	84.21	**AT**
		% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	%	75.00	75.00	100.00		80.00	80.00	100.00		95.00	80.00	84.21	**AT**
		% Rekomendas	%	75.00	75.00	100.00		80.00	80.00	100.00		95.00	80.00	84.21	**AT**

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	CAPAIAN TERHADAP TAHUN AKHIR RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		i Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti													
		% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	%	64.71	64.71	100.00		73.53	73.53	100.00		100.00	73.53	73.53	AT
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan NPHD	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase OPD yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Zona Integritas (ZI)	%	17.65	17.65	100.00		29.41	29.41	100.00		44.12	29.41	66.66	AT
2	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TTT
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Auditor yang Bersertifikat Penjenjangan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		% Auditor yang Bersertifikat	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
	RATA-RATA PROGRAM					100.00				100.00				85.41	AT

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Lainnya Inspektorat sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 85,41% terdiri dari :
   a. Level Peran dan Layanan APIP
   b. Level Pengelolaan SDM APIP
   c. Level Praktik Profesional APIP
   d. Level Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP
   e. Level Budaya dan Hubungan Organisasi APIP
   f. Level Struktur Tata Kelola APIP

g. % OPD yang Perencanaan Kinerjanya Minimal Kategori BB
h. % OPD yang Pengukuran Kinerjanya Minimal Kategori BB
i. % OPD yang Pelaporan Kinerjanya Minimal Kategori BB
j. % OPD yang Evaluasi Internalnya Minimal Kategori BB
k. % OPD yang Capaian Kinerjanya Minimal Kategori BB
l. % OPD yang Bebas dari Penyimpangan Aset yang Material
m. % OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material
n. % Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti
o. % Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani
p. % OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3
q. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
r. Persentase Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan NPHD
s. Persentase OPD yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Zona Integritas (ZI)
t. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
u. % Auditor yang Bersertifikat Penjenjangan
v. % Auditor yang Bersertifikat

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya yang diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaSekretariat Daerah sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	74.77	74.77	100.00		74.77	74.77	100.00		85.40	74.77	87.55	AT
		Zona Hijau Pelayanan Publik	Angk	98.41	98.41	100.00		98.41	98.41	100.00		100.0	98.41	98.41	AT

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat		a									0			
	RATA-RATA SASARAN					100.00				100.00				92.98	AT
1	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani	Persentase Partisipasi Aparatur yang Mengikuti Acara Penyegaran Rohani	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya yang diakomodir	%	20.00	20.00	100.00		30.00	30.00	100.00		60.00	30.00	50.00	AT
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase BUMD yang Memiliki Manajemen yang Sehat	%	85.00	85.00	100.00		87.00	87.00	100.00		95.00	87.00	91.58	AT
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan dengan Kinerja dalam Kategori Baik	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	%	BB	BB	BB		BB	BB	BB		A	BB	A	TT
6	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Penetapan Kebijakan Administrasi Wilayah dan Perbatasan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
7	Program Pembakuan Nama Rupabumi	Persentase Data Informasi RBI yang termanfaatkan oleh Stakeholders	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kerja sama Daerah Yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian Draft Produk Hukum (SK, NPHD, Mou, dll) sesuai SOP	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Produk Hukum Daerah yang tersosialisasikan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Peningkatan Pemekaran Kelurahan/Desa	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
11	Program Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan sesuai dengan Pembagian Urusan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
12	Program Advokasi dan Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
13	Program Peduli Hukum dan HAM	Skor Kabupaten Peduli Ham	%	76.00	76.00	100.00		77.00	77.00	100.00		80.00	77.00	96.25	AT
		Persentase Desa Sadar Hukum	%	10.00	10.00	100.00		25.00	25.00	100.00		85.00	25.00	29.41	UK

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan data Sumber Daya Alam yang Potensial	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
15	Program Pelayanan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang jasa yang dilaksanakan secara Elektronik													
		- Belanja Pengadaan 50jt - 200jt	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		- Belanja Pengadaan mulai dari 200 juta	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
16	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	Persentase Penyelasaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
17	Program Ketatalaksanaan	Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
18	Program Reformasi Birokrasi	Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	%	72.00	72.00	100.00		74.00	74.00	100.00		80.00	74.00	92.50	AT
19	Program Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah	Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada Masyarakat	%	85.00	85.00	100.00		90.00	90.00	100.00		100.00	90.00	90.00	AT
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang Meningkat Kompetensinya	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**	**TT**			**100.00**	**TT**			**94.22**	**AT**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% (status tinggi) yaitu :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 94,22% terdiri dari :
   a. Persentase Partisipasi Aparatur yang Mengikuti Acara Penyegaran Rohani
   b. Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ
   c. Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya yang diakomodir

d. Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
e. Persentase BUMD yang Memiliki Manajemen yang Sehat
f. Persentase Kecamatan dengan Kinerja dalam Kategori Baik
g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
h. Persentase Penetapan Kebijakan Administrasi Wilayah dan Perbatasan
i. Persentase Data Informasi RBI yang termanfaatkan oleh Stakeholders
j. Persentase Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan
k. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian Draft Produk Hukum (SK, NPHD, Mou, dll) sesuai SOP
l. Persentase Produk Hukum Daerah yang tersosialisasikan
m. Persentase Peningkatan Pemekaran Kelurahan/Desa
n. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan sesuai dengan Pembagian Urusan
o. Persentase Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum
p. Skor Kabupaten Peduli Ham
q. Persentase Desa Sadar Hukum
r. Persentase Ketersediaan data Sumber Daya Alam yang Potensial
s. Persentase Pemilihan Penyedia Barang jasa yang dilaksanakan secara Elektronik :
   - Belanja Pengadaan 50jt - 200jt
   - Belanja Pengadaan mulai dari 200 juta
t. Persentase Penyelasaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tepat Waktu
u. Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
v. Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
w. Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
x. Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada Masyarakat

y. Persentase Peningkatan Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang Meningkat Kompetensinya

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya yang diimplementasikan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaSekretariat DPRD sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Angka**	**74.77**	**74.77**	**100.00**		**74.77**	**74.77**	**100.00**		**85.40**	**74.77**	**87.55**	**AT**
		Zona Hijau Pelayanan Publik	**Angka**	**98.41**	**98.41**	**100.00**		**98.41**	**98.41**	**100.00**		**100.00**	**98.41**	**98.41**	AT
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**92.98**	**AT**
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Perundang-Undangan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Keuangan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Cakupan Pemenuhan SOP Bidang Umum	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**				**100.00**				**100.00**	**TT**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% (status tinggi) yaitu :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% (status tinggi) terdiri dari :
   a. Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Perundang-Undangan
   b. Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Keuangan
   c. Cakupan Pemenuhan SOP Bidang Umum

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya Kewilayahan yang diimplementasikan oleh Kecamatan ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi LainnyaKewilayahan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Angka**	**74.77**	**74.77**	**100.00**		**74.77**	**74.77**	**100.00**		**85.40**	**74.77**	**87.55**	**AT**
		Zona Hijau Pelayanan Publik	**Angka**	**98.41**	**98.41**	**100.00**		**98.41**	**98.41**	**100.00**		**100.00**	**98.41**	**98.41**	AT
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**92.98**	**AT**
1	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani	Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan dengan Kinerja dalam Kategori Baik	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Persentase SOP yang diterapkan dalam Proses Pelayanan	%	20.00	20.00	100.00		40.00	40.00	100.00		100.00	40.00	40.00	**UK**
3	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	%	BB	BB	BB		BB	BB	BB		A	BB	A	**TT**
4	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Pemerintahan Umum yang tertangani	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**				**100.00**				**85.00**	**AT**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Lainnya Kewilayahan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Zona Hijau Pelayanan Publik
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 85% terdiri dari :
   a. Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ
   b. Persentase Kecamatan dengan Kinerja dalam Kategori Baik

c. Persentase SOP yang diterapkan dalam Proses Pelayanan
d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
e. Persentase Layanan Pemerintahan Umum yang tertangani

2. Bidang Perencanaan

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Perencanaan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan
sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	**Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**Kategori**	**B**	**B**	**B**		**B**	**B**	**B**		**A**	**B**	**A**	**TT**
		Indeks SPBE	**Angka**	**2.38**	**2.38**	**100.00**		**2.60**	**2.60**	**100.00**		**3.00**	**2.60**	**86.67**	**AT**
		Indeks Profesionalitas ASN	**Angka**	**62.34**	**62.34**	**100.00**		**65.97**	**65.97**	**100.00**		**75.01**	**65.97**	**87.95**	**AT**
		Hasil EKPPD terhadap LPPD	**Kategori**	**ST**	**ST**	**ST**		**ST**	**ST**	**ST**		**ST**	**ST**	**ST**	**TT**
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**87.31**	
1	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Capaian Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase OPD yang mengintegrasikan data perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase data perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang terdokumentasikan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase ketersediaan data dan informasi potensi dan pemanfaatan kawasan budidaya perikanan yang up to date (%)	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase ketersediaan data dan informasi	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan yang up to date (%)													
		Persentase Data yang Akurat dan *up to date*	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
2	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Jumlah Kerjasama Partnership Melalui Pembiayaan Pembangunan	Angka	5.00	5.00	100.00		5.00	5.00	100.00		5.00	5.00	100.00	TT
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat Kompetensi	%	31.25	31.25	100.00		31.25	31.25	100.00		37.50	31.25	83.33	AT
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan Program OPD sesuai Rencana Kerja OPD	%	75.00	75.00	100.00		77.00	77.00	100.00		85.95	77.00	89.59	AT
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	%	72.00	72.00	100.00		74.00	74.00	100.00		80.00	74.00	92.50	AT
		Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	%	67.00	67.00	100.00		69.00	69.00	100.00		75.00	69.00	92.00	AT
		Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang	%	5.00	5.00	100.00		10.00	10.00	100.00		25.00	10.00	40.00	UK
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis berbasis ekonomi	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Monitoring Inflasi Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti oleh OPD	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Rekomendasi FPED yang ditindaklanjuti	%	65.00	65.00	100.00		69.00	69.00	100.00		82.00	69.00	84.15	AT
6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		berbasis sosial budaya													
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis berbasis prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
8	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan Program OPD sesuai Rencana Kerja OPD	%	83.95	83.95	100.00		84.95	84.95	100.00		87.95	84.95	96.59	AT
	RATA-RATA PROGRAM					100.00				100.00				94.70	AT

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Penunjang Perencanaan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
   b. Indeks SPBE
   c. Indeks Profesionalitas ASN
   d. Hasil EKPPD terhadap LPPD
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 94,70% terdiri dari :
   a. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Capaian Pembangunan Daerah
   b. Persentase OPD yang mengintegrasikan data perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
   c. Persentase data perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang terdokumentasikan
   d. Persentase ketersediaan data dan informasi potensi dan pemanfaatan kawasan budidaya perikanan yang up to date (%)
   e. Persentase ketersediaan data dan informasi tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan yang up to date (%)
   f. Persentase Data yang Akurat dan *up to date*
   g. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
   h. Jumlah Kerjasama Partnership Melalui Pembiayaan Pembangunan

i. Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat Kompetensi
j. Persentase pelaksanaan Program OPD sesuai Rencana Kerja OPD
k. Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
l. Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD
m. Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP
n. Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
o. Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD
p. Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang
q. Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis berbasis ekonomi
r. Persentase Monitoring Inflasi Daerah
s. Persentase Rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti oleh OPD
t. Persentase Rekomendasi FPED yang ditindaklanjuti
u. Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis berbasis sosial budaya
v. Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan strategis berbasis prasarana wilayah dan sumber daya alam
w. Persentase pelaksanaan Program OPD sesuai Rencana Kerja OPD.

3. Bidang Keuangan

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Keuangan diimplementasikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan
sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun	Kategori	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	TT

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	daerah yang akuntabel	**Sebelumnya**													
		Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	**Angka**	**0.2**	**0.2**	**100.00**		**0.3**	**0.3**	**100.00**		**0.6**	**0.3**	**50.00**	**AT**
	RATA-RATA SASARAN					**100.00**				**100.00**				**50.00**	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Persentase OPD yang Menerapkan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dengan Hasil Terukur	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Persentase OPD yang Mencatat Aset ke dalam Buku Inventaris secara Benar	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
		Persentase OPD yang Menggunakan Aset secara Tepat	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	%	18.00	18.00	100.00		18.00	18.00	100.00		25.00	18.00	72.00	**AT**
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	2.00	2.00	100.00		2.00	2.00	100.00		2.00	2.00	100.00	**TT**
		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor PBB dan BPHTB	%	21.00	21.00	100.00		22.00	22.00	100.00		25.00	22.00	88.00	**AT**
3	Program Optimalisasi Dana Perimbangan /Transfer	Persentase Penerimaan dari Daerah Dana Perimbangan /Transfer	%	97.00	97.00	100.00		97.00	97.00	100.00		98.00	97.00	98.98	**AT**
		Persentase Penerimaan dari Dana Transfer Provinsi	%	76.00	76.00	100.00		77.00	77.00	100.00		80.00	77.00	96.25	**AT**
4	Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
5	Program Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pajak Daerah	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	**TT**
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**				**100.00**				**96.27**	**AT**

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Penunjang Keuangan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
   b. Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 95,93% terdiri dari :
   a. Persentase Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu
   b. Persentase OPD yang Menerapkan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dengan Hasil Terukur
   c. Persentase OPD yang Mencatat Aset ke dalam Buku Inventaris secara Benar
   d. Persentase OPD yang Menggunakan Aset secara Tepat
   e. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
   f. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
   g. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor PBB dan BPHTB
   h. Persentase Penerimaan dari Daerah Dana Perimbangan/Transfer
   i. Persentase Penerimaan dari Dana Transfer Provinsi
   j. Persentase Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah
   k. Persentase Layanan Administrasi Pajak Daerah.

4. Bidang Kepegawaian dan Sumbe Daya Manusia Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian
sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	74.77	74.77	100.00		74.77	74.77	100.00		85.40	74.77	87.55	AT
		Zona Hijau Pelayanan Publik	Angka	98.41	98.41	100.00		98.41	98.41	100.00		100.00	98.41	98.41	AT
	RATA-RATA SASARAN					100.00				100.00				92.98	AT

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	63.50	63.50	100.00		65.62	65.62	100.00		75.00	65.62	87.49	AT
		Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	13.33	13.33	100.00		17.14	17.14	100.00		24.44	17.14	70.13	AT
		Persentase Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	20.00	20.00	100.00		25.00	25.00	100.00		75.00	25.00	33.33	UK
		Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	%	20.00	20.00	100.00		30.00	30.00	100.00		60.00	30.00	50.00	AT
		Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat	%	31.25	31.25	100.00		31.25	31.25	100.00		37.50	31.25	83.33	AT
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Disiplin Aparatur	Angka	67.00	67.00	100.00		70.00	70.00	100.00		83.30	70.00	84.03	AT
		Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
3	Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Kebutuhan Analisis Jabatan	%	55.00	55.00	100.00		60.00	60.00	100.00		75.00	60.00	80.00	AT
4	Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
	RATA-RATA PROGRAM					**100.00**				**100.00**				**99.74**	**AT**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Penunjang Kepegawaian sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Zona Hijau Pelayanan Publik

2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 99,74% (status tinggi) terdiri dari :
   a. Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi
   b. Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
   c. Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
   d. Persentase Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
   e. Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kompetens di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
   f. Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat
   g. Indeks Disiplin Aparatur
   h. Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi
   i. Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Kebutuhan Analisis Jabatan
   j. Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sampai Tahun 2019, Prediksi 2020 dan Prediksi RPJMD 2019-2023

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	2019				2020				RPJMD 2019-2023			STATUS CAPAIAN RPJMD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET	PREDIKSI REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN	TARGET AKHIR 2023	PREDIKSI REALISASI s/d 2020	PREDIKSI CAPAIAN s/d 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	B	B	B		B	B	B		A	B	A	TT
		Indeks SPBE	Angka	2.38	2.38	100.00		2.60	2.60	100.00		3.00	2.60	86.67	AT
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	62.34	62.34	100.00		65.97	65.97	100.00		75.01	65.97	87.95	AT
		Hasil EKPPD terhadap LPPD	Kategori	ST	ST	ST		ST	ST	ST		ST	ST	ST	TT
	RATA-RATA SASARAN					100.00				100.00				87.31	AT
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
		Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	%	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	TT
	RATA-RATA PROGRAM					100.00				100.00				100.00	TT

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019, data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja sasaran terdiri dari :
   a. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
   b. Indeks SPBE
   c. Indeks Profesionalitas ASN
   d. Hasil EKPPD terhadap LPPD
2. Rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% (status tinggi) terdiri dari :
   a. Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan
   b. Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian
   c. Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan.

2.2.2. Evaluasi Capaian *Sustainable Development Go*als (SDG's)

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG's Kabupaten Bangka sesuai RKPD Tahun 2018 Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, bahwa hampir semua indikator MDG's telah tercapai, namun masih beberapa indikator yang belum tercapai terutama yang termasuk ke dalam indikator pada T.3, T.5, dan T.7 yaitu : indikator angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), indikator *unmeet need* (kebutuhan Keluarga Berencana/ KB) dan memastikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga pada tahun 2019, urusan kesehatan dan lingkungan hidup diharuskan menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mencapai target MDG's yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (*Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

Gambar 2.15. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021. Secara detail, sinkronisasi SDG's dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.115
Bidang dan Tujuan Utama
***Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Capaian**
Kinerja Daerah Tahun 2019

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
1	Kemiskinan	Mengurangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan aspek	Angka Kemiskinan (%)	4,97
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,65
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14
2	Makanan	Mengurangi kelaparan melalaui peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama per 1.000 Penduduk (Kg/1000 Penduduk)	161.200
			Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan	75,95

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
			Ketersediaan Energi dan Protein per	121,18
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,99
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	3,93
			Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup	0,62
			Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,02
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,23
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,76
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	72,07
			Indeks Pembangunan Gender	88,49
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air	98,71
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	95,12
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Rasio Elektrifikasi	98,12
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan,	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,58
			Peningkatan PDRB per Kapita (%)	1,57

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
		pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	74,59
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	98,91
			Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten	93,77
			Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	73,99
10	Ketimpangan	Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara	Indeks Gini	0,269
			Indeks Williamson	0,189
			Kriteria Bank Dunia	23,06
11	Hunian	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk ▪ Rasio Pemukiman Layak Huni ▪ Rasio Lingkungan Permukiman Kumuh	0,21 0,996 0,016
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,10
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT untuk Makanan (%)	55,74
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan (%)	46,26

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
13	Iklim	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	32,38
			Ketaatan terhadap RTRW	100%
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air (%)	100,00
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber yang tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara (%)	100,00
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Praktik *Illegal Fishing* dan Perusakan Sumber Daya Kelautan	22,73
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi	Rasio Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	16,36
			Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100,00

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
		penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka (%)	0
16	Lembaga	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Hasil Evaluasi AKIP	70,18
			Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	74,07
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	32,36
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	31,83
			Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Pembangunan	61,04
			Perlindungan dan Pembinaan KDRT	100
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi	53

2.2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bangka berusaha menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bangka 2019-2023 yaitu terwujudnya BANGKA SETARA melalui pelaksanaan visi yang sejalan dengan percepatan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Bangka melaksanakan 6 (enam) urusan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, urusan keamanan dan ketertiban umum dan urusan sosial dengan indikator-indikator SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia (SETARA).

Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Bangka tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Target dan capaian SPM Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.116
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	69,44%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)	100%	101,19%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	21,59%

B. Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(human immunodeficiency virus)*. Target dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.117
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,13%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,65%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	101,10%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,17%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,04%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68,09%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,55%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86,80%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita DM	Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,59%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,36%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	107,24%

C. Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.118
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	87%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	95,12%

D. Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

E. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Jenis pelayanan dasar Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhaap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.120
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	70,73%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	70,73%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
		bencana		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

F. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Target dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.121
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial
Kabupaten Bangka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	91,13%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
4.	Rehabilitasi sosial	Jumlah warga negara/	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
	dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (*gap*) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang dinilai penting dan patut dipertimbangkan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
- mendukung peningkatankualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
- terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
- memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Selain berpedoman pada norma-norma tersebut di atas, identifikasi masalah juga memperhatikan permasalahan yang dirumuskan oleh DPRD

melalui pokok-pokok pikiran DPRD, memperhatikan permasalahan yang didapatkan dari proses Musrenbang, melihat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan data-data yang ditampilkan pada gambaran umum kondisi daerah.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras untuk perbaikan. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka.

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.122
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masih di bawah standar nasional - angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 8,23 tahun sementara standar nasional 8,34 tahun - angka harapan lama sekolah tahun 2019 12,76 tahun sementara standar nasional 12,95 tahun - masih adanya anak usia sekolah (7-15 tahun) yang tidak sekolah, terutama pada jenjang SMP (usia 13-15 tahun)	- Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan) - Belum idealnya distribusi dan ketersediaan guru antar wilayah Kecamatan - Masih rendahya tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada setiap jenjang pendidikan. - Masih terdapat disparitas nilai akreditasi pada beberapa lembaga pendidikan. Pemerintah
2	Pokok Pikiran DPRD	- perlunya penambahan fasilitas utama dan pelengkap pada sekolah-sekolah yang ada di luar ibukota Kabupaten, agar kualitas pendidikan lebih merata - redistribusi guru PNS ke sekolah-sekolah yang berada di luar ibukota Kabupaten, karena sebagian besar masih bergantung pada guru honorer - agar lebih diperhatikan dukungan anggaran bagi sekolah swasta dan	

No	Analisis		Permasalahan
		lembaga pendidikan non formal seperti pesantren.	Kabupaten Bangka berkomitmen target seluruh jenjang pendidikan memiliki nilai akreditasi A. - Belum optimalnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 69,44 % pada tahun 2019. - Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 21,59 % pada tahun 2019
3	Isu Musrenbang	- penambahan/perbaikan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, toilet sekolah - pengadaan sarana prasarna sekolah (meja, kursi, buku, alat peraga pendidikan, alat laboratorium, alat kesenian) - pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan - penyediaan dana pendamping BOS	

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 2.123
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- masih terdapat kasus pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang tidak sesuai standar karena masalah akses yaitu ibu hamil datang ke faskes untuk pertama kalinya dengan usia kehamilan di atas 2 minggu sehingga tidak bisa dihitung sebagai cakupan pelayanan, adanya kasus abortus dan persalinan prematur sebelum ANC lengkap - masih terdapat pelayanan persalinan tidak sesuai standar pada tahun 2019 yaitu sebanyak 513 persalinan di poskesdes, 1 persalinan di rumah dengan pertolongan nakes dan 1 persalinan non	- Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil - Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu bersalin - Belum optimalnya pelayanan kesehatan balita - Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia produktif, antara lain terbatasnya logistik untuk skrining gula darah - rendahnya kesadaran wanita usia produktif yang sudah menikah untuk melakukan pemeriksaan IVA

No	Analisis		Permasalahan
		nakes - masih ada sebanyak 2,83 % balita belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan kunjungan 8 kali balita	- Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, antara lain belum semua desa memiliki posyandu lansia, mobilitas lansia yang terbatas serta kesiapan logistik untuk skrining kesehatan lansia yang belum mencukupi - Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tidak menular (penderita hipertensi dan penderita diabetes mellitus) - Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki sarana NICU untuk menangani kasus neonatal - Kurangnya tenaga dokter spesialis - Terbatasnya jumlah armada ambulance dan tenaga medis yang mendukung layanan SPGDT - dampak COVID-19 menyebabkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan kesehatan menjadi sangat besar
2	Pokok Pikiran DPRD	- masih banyak warga yang tergolong miskin/ kurang mampu tetapi tidak mendapatkan fasilitas Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan - pentingnya sosialisasi IVA Test bagi perempuan yang sudah menikah - fasilitas kesehatan sudah tersedia di wilayah pedesaan, akan tetapi belum memiliki fasilitas pelayanan yang memenuhi standar	
3	Isu Musrenbang	- penambahan/perbaikan sarana prasarana rumah sakit - penambahan sarana prasarana SPGDT - menugaskan dokter pada RSUD untuk melanjutkan pendidikan spesialis - penambahan dan re-distribusi tenaga kesehatan	

c. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perpustakaan sebagai berikut.

Tabel 2.124
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perpustakaan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- perpustakaan daerah 1 unit, dengan jumlah pengunjung tahun 2019 sebanyak 6.030 orang - perpustakaan keliling 1 unit	- rendahnya minat baca dan budaya baca siswa maupun masyarakat - belum optimalnya pemerataan

No	Analisis		Permasalahan
		- perpustakaan desa/kelurahan 36 unit - Taman Bacaan Masyarakat 10 unit - tenaga pustakawan berjumlah 3 orang	kelembagaan perpustakaan/taman baca di tingkat desa/kelurahan - terbatasnya jumlah tenaga pustakawan berdasarkan jurusan dan jenjang kependidikan - Pelayanan perpustakaan masih belum berbasis teknologi informasi dengan jaringan yang sangat terbatas - jumlah koleksi perpustakaan yang masih belum memenuhi standar baik buku cetak ataupun buku berbasis *e-book*
2	Pokok Pikiran DPRD	- Perpustakaan daerah perlu dilengkapi dengan layanan *e-library* yang dapat diakses melalui handphone. - penempatan layanan perpustakaan keliling di pusat-pusat keramaian masyarakat dan lokasi yang belum memiliki perpustakaan desa/kelurahan maupun Taman Baca Masyarakat	
3	Isu Musrenbang	- penambahan buku koleksi perpustakaan - peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan	

d. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan pada urusan Sosial sebagai berikut.

Tabel 2.125
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- angka kemiskinan tahun 2019 sebesar 4,92%, menurun dibandingkan 5,47% di tahun 2018	- belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar - belum seluruh masyarakat miskin ter-cover layanan PBI-BPJS Kesehatan - data masyarakat miskin yang belum *up to date* dan terintegrasi
2	Pokok Pikiran DPRD	- sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial belum banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi - belum ada data masyarakat miskin yang terpadu dan terintegrasi sehingga pemberdayaan terhadap masyarakat miskin masih bersifat sektoral	
3	Isu Musrenbang	- pembangunan/pemugaran rumah tidak layak huni - pembangunan rumah singgah - pemberian bantuan alat bantu	

No	Analisis		Permasalahan
		kepada penyandang disabilitas - pemberian bantuan modal usaha	- dampak COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin

e. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

Tabel 2.126
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 sebesar 72,07 - tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 47,02% pada tahun 2019	- belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender - Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan - Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender - Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional - Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik
2	Pokok Pikiran DPRD	- peran perempuan dalam kehidupan politik perlu didorong karena keterwakilan perempuan terutama di lembaga legislatif masih sangat rendah - memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk berperan dalam birokrasi pemerintahan - perlindungan bagi anak di Kabupaten Bangka di beberapa bidang masih belum optimal antara lain: masih ditemukannya tenaga kerja usia anak, banyak ditemukannya anak yang merokok, dan semakin maraknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.	
3	Isu Musrenbang	- sosialisasi penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga - penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender - penguatan kelembagaan dan fungsi P2TP3A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	

No	Analisis		Permasalahan
		Perempuan dan Perlindungan Anak) - pemberian bantuan modal usaha khusus kelompok perempuan	- Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak

f. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada urusan Tenaga Kerja sebagai berikut.

Tabel 2.127
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan TenagaKerja

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- angka pengangguran pada tahun 2019 sebesar 3,80 % - struktur tenaga kerja 44,36% didominasi sektor primer	- kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah - terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja - daya serap tenaga kerja masih didominasi di perkotaan
2	Pokok Pikiran DPRD	- perlunya peran pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja lokal terutama dalam hal kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta dalam menghadapi persaingan pasar global ke depan - pemerintah harus mendorong perluasan kesempatan kerja dengan strategi antara lain: peningkatan realisasi investasi, memfasilitasi pegembangan UKM dan wirausaha baru, dukungan kepada industri kreatif, dan memperbanyak kegiatan/proyek APBD yang bersifat padat karya	
3	Isu Musrenbang	- mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier agar lebih banyak meyerap tenaga kerja - mendorong pertumbuhan industri di wilayah pedesaan agar terjadi pemerataan daya serap tenaga kerja - kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja - pasar/bursa tenaga kerja	

g. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Permasalahan pembangunan pada urusan Koperasi dan UMKM sebagai berikut.

Tabel 2.128
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Koperasi dan UMKM

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- jumlah koperasi tahun 2019 sebanyak 205 unit - koperasi yang aktif sebanyak 136 unit atau 66,34 % - jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 354 unit	- masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM - manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik - produktivitas koperasi dan UMKM masih rendah - kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah - belum optimalnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM - minimnya akses pemasaran produk koperasi dan UMKM
2	Pokok Pikiran DPRD	- permasalahan yang dihadapi UMKM adalah masalah klasik yaitu sulitnya akses permodalan, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya dukungan dari pemerintah maupun dunia usaha bagi pemasaran produk UMKM - koperasi yang ada jumlahnya cukup banyak, akan tetapi sangat sedikit yang sudah berhasil mensejahterakan anggotanya, perlu dorongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah agar koperasi dapat lebih berperan dalam membantu perekonomian masyarakat	
3	Isu Musrenbang	- pembinaan bagi koperasi dan UMKM - peningkatan kompetensi SDM koperasi dan UMKM - bantuan sarana prasarana bagi koperasi dan UMKM	

h. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel 2.129
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 14,17 %	- masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan

No	Analisis		Permasalahan
2	Pokok Pikiran DPRD	- kondisi fisik sebagian pasar yang ada sudah memerlukan perbaikan/rehabilitasi - perlu pengaturan yang lebih tegas terhadap para pedagang agar dapat ikut menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar - pedagang kaki lima termasuk kategori UMKM yang memberikan dampak positif bagi perekonomian, akan tetapi keberadaanya harus diatur agar tidak menimbulkan permasalahan sosial	terhadap PDRB - belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk lokal ke luar daerah - belum optimalnya upaya peningkatan kualitas produk lokal - perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan
3	Isu Musrenbang	- pembinaan dan pengembangan BUMDesa - pembangunan/peningkatan pasar kecamatan dan pasar desa	

i. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan pada urusan Perindustrian sebagai berikut.

Tabel 2.130
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perindustrian

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 21,23 %	- perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya. - Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan - kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap
2	Pokok Pikiran DPRD	- industri pengolahan terutama dengan bahan baku timah dan bahan galian lainnya harus didorong karena ketersediaan bahan baku yang berlimpah - sudah saatnya pemerintah mengupayakan berdirinya industri hilir produk olahan kelapa sawit (contohnya minyak goreng), karena jika hanya sebatas pengolahan CPO tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kab. Bangka - pemerintah juga harus terus memberi dukungan bagi industri kecil yang sudah ada agar dapat bertahan dan berkembang	
3	Isu	-	

	Musrenbang		bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri

j. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan Penanaman Modal sebagai berikut.

Tabel 2.131
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Penanaman Modal

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- jumlah realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp.577.505.163.010,- (PMDN) dan Rp.322.149.641.625,- (PMA)	- Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. - Belum optimalnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM. - Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi
2	Pokok Pikiran DPRD	- pemerintah bersama pihak legislatif harus mendorong penyusunan regulasi yang dapat menciptakan iklim investasi daerah yang lebih mudah bagi pelaku usaha - informasi dan data terkait peluang dan potensi investasi daerah harus terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses oleh semua stakeholder - promosi investasi harus dilakukan melalui cara-cara inovatif dan kreatif dengan memeanfaatkan media sosial dan lain-lain, jangan hanya melalui pameran yang menghabiskan anggaran cukup besar	
3	Isu Musrenbang	- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha dan perizinan investasi	

k. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan Pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2.132
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pariwisata

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Kontribusi investasi sektor pariwisata dibanding total investasi pada tahun 2019 sebesar 0,15%	- masih rendahnya investasi di sektor pariwisata - belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata - belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya. - minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait) - kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat - produksi dan pengembangan cinderamata khas daerah masih sangat terbatas - kondisi darurat COVID-19 mengakibatkan hal-hal sbb : ➢ adanya pembatasan bahkan pelarangan penerbangan dan perjalanan kapal penumpang sehingga akses keluar masuk terhambat ➢ aturan *social distancing* mengakibatkan event-event pariwisata tidak dapat dilaksanakan ➢ jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri menurun drastis ➢ banyak objek wisata yang tidak beroperasional
2	Pokok Pikiran DPRD	- pengembangan pariwisata daerah harus berbasis potensi lokal tingkat desa/kelurahan sehingga mampu menumbuhkan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal - pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan - promosi pariwisata harus dilakukan melalui cara-cara inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan media sosial, dll - destinasi wisata yang dikembangkan harus berbeda dan beragam antara wilayah satu dengan lainnya, agar wisatawan memiliki banyak pilihan - memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal sekitar destinasi wisata tentang peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta serta pentingnya peran serta mereka dalam mengembangkan wisata - pemerintah harus lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur yang menunjang kelancaran usaha pariwisata	
3	Isu	- penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat	

No	Analisis		Permasalahan
	Musrenbang	kabupaten - promosi destinasi wisata unggulan	➢ kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu cukup lama

l. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanian sebagai berikut.

Tabel 2.133
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 19,46 % - Nilai Tukar Petani tahun 2018 sebesar 91,45	- masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB - masih rendahnya Nilai Tukar Petani akibat harga komoditas perkebunan rakyat (karet dan kelapa sawit) yang mengalami penurunan - tingginya ketergantungan terhadap produk hortikultura dari luar daerah akibat minat masyarakat menanam tanaman hortikultura masih rendah - berkurangnya luas lahan pertanian akibat aktivitas pertambangan timah dan alih fungsi lahan - belum optimalnya akses maupun penggunaan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan
2	Pokok Pikiran DPRD	- pemerintah harus mempermudah akses petani terhadap penggunaan alat-alat mesin pertanian milik pemerintah agar produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani juga meningkat - perlu revitalisasi dan diversifikasi tanaman pertanian - perlunya dukungan kebijakan dan regulasi yang dapat membantu menjaga kestabilan harga komoditas pertanian terutama hasil perkebunan (lada, karet dan kelapa sawit) - kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi akses permodalan bagi petani dengan menggandeng perbankan seperti KKSR dan KSR harus dilanjutkan - perlu mendorong petani agar mau bertanam hortikultura untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap pasokan dari luar daerah - penyediaan infrastruktur yang menunjang pertanian harus lebih diperhatikan	
3	Isu Musrenbang	- pemberian bantuan sarana prasarana pertanian kepada Kelompok Tani - mendorong masyarakat agar	

No	Analisis		Permasalahan
		lebih fokus menanam tanaman hortikultura melalui program KRPL - pemberian bantuan bibit tanaman buah-buahan - penguatan kapasitas penyuluh pertanian	hasil pertanian - masih sedikitnya petani dan peternak yang memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian

m. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut.

Tabel 2.134
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 26.346,51 Ton dengan nilai produksi Rp. 832.195.942.710,- - jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 2.125,49 Ton dengan nilai produksi Rp. 124.578.722.440,- - Nilai Tukar Nelayan tahun 2018 sebesar 113,10	- sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai - ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan - masih adanya *illegal fishing* (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat - masih rendahnya produksi perikanan budidaya - rehabilitasi
2	Pokok Pikiran DPRD	- pemberian bantuan modal, alat tangkap, dll bagi nelayan harusnya dapat memberdayakan dan akhirnya menumbuhkan kemandirian, sehingga akhirnya nelayan tsb tidak perlu lagi diberikan bantuan - kebijakan asuransi bagi nelayan merupakan hal yang sangat baik dan harus diteruskan - pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pengembangan perikanan budidaya, untuk memenuhi kebutuhan pangan yang pasti akan semakin meningkat, karena perikanan laut merupakan sumber daya yang tetap memiliki keterbatasan	

No	Analisis		Permasalahan
3	Isu Musrenbang	- pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya - penguatan kapasitas penyuluh perikanan	mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi

n. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut.

Tabel 2.135
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2019 mencapai 74,59 % - proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2019 mencapai 98,91 % - proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik tahun 2019 mencapai 93,77 % - ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah tahun 2019 sebesar 32,38 %	- belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik - Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah - keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya - dampak COVID-19 salah satunya pembatalan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berasal dari DAK Fisik dan DID pada tahun 2020, sehingga kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten akan
2	Pokok Pikiran DPRD	- perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar teliti dan matang karena kemampuan APBD yang terbatas, sementara DAK Fisik Bidang Jalan juga semakin berkurang - perencanaan pembangunan jembatan harus lebih teliti dan matang dengan memperhitungkan kondisi banjir di beberapa wilayah yang setiap tahun semakin parah, jangan sampai karena jembatan kurang kuat akibatnya roboh saat terkena banjir sehingga anggaran pembangunannya yang besar menjadi sia-sia - perlu perencanaan pembangunan infrastruktur yang komprehensif untuk mengatasi banjir di beberapa	

No	Analisis		Permasalahan
		wilayah kecamatan	menurun
3	Isu Musrenbang	- pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan - pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi	

m. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pembangunan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut.

Tabel 2.136
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- lingkungan pemukiman kumuh tahun 2019 sebesar 0,016 % - persentase rumah tidak layak huni tahun 2019 sebesar 2,6 % - 95,12 % masyarakat terlayani sanitasi dasar - 98,71 % masyarakat memiliki akses air bersih	- Akses penyediaan air bersih yang masih belum memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan - Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara - Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota - keterbatasan APBD untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni - dampak COVID-19 yaitu pembatalan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2020 termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum
2	Pokok Pikiran DPRD	- maraknya pembangunan perumahan subsidi, tapi tidak dibarengi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang memenuhi standar oleh pengembang - minimnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal oleh masyarakat, sehingga akan sulit mengontrol perkembangan permukiman, jika tidak diantisipasi sejak awal berpotensi menjadi kawasan kumuh di masa mendatang - sosialisasi pentingnya sanitasi yang baik bagi masyarakat terutama di pedesaan harus lebih digalakkan	

No	Analisis		Permasalahan
3	Isu Musrenbang	- pembangunan rumah layak huni - pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) - pembangunan IPAL komunal	

n. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanahan sebagai berikut.

Tabel 2.137
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	-	- sebagian masyarakat tidak bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan sarana umum (pembangunan/ pelebaran jalan, siring, pasar, dll) jika tidak ada ganti rugi dari pemerintah - masih ada aset lahan milik Pemkab Bangka yang belum memiliki sertifikat - sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki
2	Pokok Pikiran DPRD	- masih ada konflik pertanahan antar orang pribadi maupun antara orang pribadi dengan perusahaan yang belum diselesaikan dengan tuntas. Hal ini jika dibiarkan berpotensi menjadi konflik sosial	
3	Isu Musrenbang	- program sertifikasi gratis/ PTSL/ Prona/ Proda - pensertifikatan lahan aset Pemkab Bangka	

o. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.138
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Perhubungan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	-	- belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada - masih rendahnya kesadaran pengemudi
2	Pokok Pikiran DPRD	- jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat menjadikan kerawanan dalam berlalu lintas juga ikut meningkat. Oleh karena itu,	

No	Analisis		Permasalahan
		perlu ditingkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada sehingga tercipta keamanan dan keselamatan berkendara bagi masyarakat - pemerintah harus mengupayakan secepatnya pembangunan terminal untuk melayani angkutan umum di Kota Sungailiat karena keberadaan terminal merupakan keharusan bagi sebuah kota	dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya - banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran terkait aturan lalu lintas - tingginya angka kecelakaan lalu lintas
3	Isu Musrenbang	- pembangunan terminal - penambahan lampu pengatur lalu lintas di persimpangan	

p. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Tabel 2.139
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka tahun 2019 pada angka 2,47 termasuk kategori Cukup	- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi termasuk internet di daerah pedesaan, bahkan masih ada desa yang belum terlayani internet sama sekali - Belum optimalnya integrasi sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Bangka
2	Pokok Pikiran DPRD	- Pengembangan infrastruktur teknologi informasi merupakan kebutuhan pokok bagi Pemerintah dan masyarakat sehingga harus dipercepat. Hal ini dalam rangka peningkatan efisiensi komunikasi, akses informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah, murah dan cepat.	
3	Isu Musrenbang	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang penerapan teknologi informasi	

q. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

Tabel 2.140
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Urusan Lingkungan Hidup

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2019 mencapai 63,07 - Jumlah sampah yang dikelola di TPS baru mencapai	- Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Bangka - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk sampah. - Masih minimnya bank sampah dan TPS3R - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih terutama masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan - Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena aktivitas penambangan, perluasan pemukiman penduduk, dan kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang - Belum optimalnya penegakan aturan terkait tata ruang yang dampaknya merugikan usaha pelestarian lingkungan
2	Pokok Pikiran DPRD	- Perlunya regulasi dengan saknsi tegas yang dapat memaksa masyarakat agar dapat ikut serta menjaga kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan illegal logging, tidak melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan, dsb.	
3	Isu Musrenbang	- Penambahan titik pengumpulan sampah rumah tangga - Penyediaan tempat sampah bagi masyarakat dan di tempat-tempat umum - Pembangunan TPS3R	

r. Urusan Penanggulangan Bencana

Permasalahan pembangunan pada urusan Penanggulangan Bencana sebagai berikut.

Tabel 2.141
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanggulangan Bencana

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	-	- Koordinasi antar instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal, karena BPBD sebagai instansi koordinator baru dibentuk pada tahun 2020 - Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana - Belum tersedianya database identifikasi daerah rawan bencana - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti *illegal loging, illegal mining,* membuang sampah sembarangan, dsb.
2	Pokok Pikiran DPRD	- pemerintah kabupaten harus melibatkan pemerintah provinsi, pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan bencana termasuk perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi pasca bencana, karena kemampuan APBD Kabupaten sangat terbatas	
3	Isu Musrenbang	- Penyediaan sarana dan prasarana terkait penanggulangan bencana - Sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bencana	

s. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai berikut.

Tabel 2.142
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- cakupan kepemilikan KTP-el tahun 2019 sebesar 99,11 % - cakupan kepemilikan KK tahun 2019 sebesar 98,72% - cakupan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	- masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan

No	Analisis		Permasalahan
		sebesar 92,60 %	- masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dokumen Kartu Identitas Anak
2	Pokok Pikiran DPRD	- harus dicari solusi bagi penduduk pendatang yang sudah berdomisili di Kabupaten Bangka cukup lama, tetapi belum memiliki dokumen kependudukan resmi - perubahan peraturan kependudukan harus disosialisasikan secara intens kepada masyarakat	
3	Isu Musrenbang	- sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat - penyediaan layanan mobile/ keliling	

t. Urusan Penunjang

Permasalahan pembangunan pada kelompok Pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 2.143
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan
Pada Kelompok Pemerintahan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data Makro	- Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 sebesar 60,80 dengan predikat B - Hasil evaluasi AKIP tahun 2019 dengan predikat BB - Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebesar 2,47 dengan kategori Cukup - Indeks Profesionalitas ASN sebesar 67,26 - Opini hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 rata-rata sebesar 74,07	- Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi, karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. - Belum optimalnya capaian evaluasi AKIP, walaupun tahun 2019 sudah mendapat predikat BB, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan - Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah - Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan
2	Pokok	- Kebijakan pengelolaan kepegawaian harus	

No	Analisis		Permasalahan
	Pikiran DPRD	mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang professional, berintegritas dan berdedikasi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam rangka menciptakan *clean and good governance* - Perlunya penerapan *reward and punishment* dalam manajemen kepegawaian - Pengelolaan aset daerah harus memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah	- Distribusi pegawai belum proporsional sesuai dengan formasi dan kebutuhan. - Belum optimalnya penempatan pegawai dalam hal kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan dan tugas. - Belum optimalnya penerapan sistem e-kinerja ASN - Terbatasnya kemampuan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan ASN - Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Isu Musrenbang	-	

2.3.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan.

Salah satu permasalahan yang baru muncul pada tahun 2020 dan berdampak sangat besar terhadap identifikasi isu strategis dalam penyusunan perencanaan tahun 2021 yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak sangat besar terhadap pembangunan Nasional khususnya pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2019-2023 mengalami

perubahan signifikan. Pengusungan RPJMD dengan tematik sektor pariwisata dan beragam potensi pengembangan yang telah dilakukan dan trend pengembangan sektor pariwisata tersebut selalu mengalami peningkatan, maka dengan adanya COVID-19 ini membuat para pelaku usaha sektor pariwisata sangat terpukul. Kondisi hotel, restoran, objek wisata, dan industri-industri pendukung sektor pariwisata menjadi tertekan yang mengakibatkan omzet atau target penjualan tidak tercapai, sehingga pendapatan yang diperoleh pelaku usaha tersebut menurun drastis.

Di sektor primer ekonomi dampak dari COVID-19 ini salah satunya adalah terhambatnya proses ekspor komoditi andalan Kabupaten Bangka yang juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan dari permasalahan di atas juga akan berdampak terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu sehingga diperkirakan pembiayaan pembangunan akan berkurang pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan data dan informasi dalam permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi isu strategis di Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Isu kemiskinan mencakup permasalahan multidimensi yang sangat kompleks, karena bukan hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, akan tetapi berhubungan dengan kerentanan dan kerawanan orang, kelompok, atau komunitas. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi, maupun Kabupaten Bangka. Bahkan sesuai dengan amanat SDG's di tahun 2030 kemiskinan harus diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Kondisi perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kemiskinan (%)	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92

Sumber : BPS Kabupaten Bangka

Berdasarkan data statistik pada tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun tetap berada pada kisaran 4,00-5,00 persen. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin mencapai 5,63 persen, kemudian turun menjadi 5,52 persen pada tahun 2016, kembali mengalami penurunan hingga menjadi 5,10 pada tahun 2017, namun kembali meningkat hingga mencapai 5,47 persen pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 4,92 persen pada tahun 2019.

Salah satu dampak COVID-19 sebagian masyarakat di Kabupaten Bangka masih diliputi rasa khawatir dan ketidakpastian terhadap masa depan dan kesejahteraannya. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan berpotensi menjadi sangat besar. Oleh karena itu, perlu intervensi lebih besar dari pemerintah untuk menekan pertambahan penduduk miskin pada tahun 2021.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang digunakan secara universal untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IMP), yang merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolahdan rataan lama pendidikan. Indikator kesehatan direpresentasikan oleh tingkat harapan hidup saat lahir.Indikator perekonomian direpresentasi-kan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat.

IPM Kabupaten Bangka mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan.

Tabel 2.145
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39
2	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	10.904	11.279	11.420	12.043	12.480
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,36	12,37	12,58	12,68	12,76
4	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,94	7,96	8,19	8,20	8,23
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,48	70,52	70,56	70,73	70,99

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Selama periode 2015 -2019, IPM terus mengalami peningkatan dari 70,03 di tahun 2015 hingga 72,39 di tahun 2019. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuk-nya. Dari sisi pendidikan, angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,36 tahun menjadi 12,68 tahun di tahun 2018. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,94 tahun menjadi 8,20 tahun di tahun 2018. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,48 tahun menjadi 70,73 tahun di tahun 2018. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 10,90 juta rupiah menjadi 12,04 juta rupiah di tahun 2018. Pada tahun 2019, sebagai dampak pelaksanaan pembangunan, IPM dan berbagai variabel komposit-nya juga terus mengalami perbaikan. IPM meningkat hingga mencapai 72,39, dengan capaian variabel daya beli masyarakat 12,48 juta rupiah, angka harapan lama sekolah 12,76 tahun, rataan lama sekolah 8,23 tahun dan angka harapan hidup 70,99 tahun. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

Angka IPM Kabupaten Bangka belum optimal dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan agar kualitas

sumber daya manusia meningkat yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan industri pengolahan yang dianggap tidak *sustainable* dan rentan terhadap volatilitas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.146
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,54	4,63	5,04	4,51	2,93

Sumber : BPS Kabupaten Bangka

Trend pertumbuhan ekonomi terlihat cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,63%, kembali mengalami peningkatan menjadi 5,04% pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 4,51% pada tahun 2018, dan kembali mengalami perlambatanyang sangat siginifikan hingga menyentuh2,93% saja pada tahun 2019. Secara umum, perlambatan ini cenderung disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, menurunnya fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global, kondisi tersebut diperkuat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya mencapai 5,02% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai 5,17%, walaupun tingkat elastisitasnya tidak begitu kuat, namun

tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan momentum pertumbuhan ekonomi regional.

Kedua, karena kebijakan regulasi perdagangan komoditi timah dan kebijakan operasional smelter sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan salah satu poin penting yaitu setiap smelter wajib menerapkan Competent Person (CP) sebagai upaya penataan tambang dan kepastian asal-usul bahan baku mineral, dimana setiap sumber daya dan cadangan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh CP terkait sebelum akhirnya dapat memproses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Aturan tersebut mengakibatkan setidaknya 30 (tiga puluh) smelter timah swasta yang ada berhenti beroperasi, sementara yang dapat beroperasi hanya PT. Timah dan 3 (tiga) smelter swasta. Kondisi tersebut menyebabkan produksi timah menurun sehingga otomatis ekspor timah pun menurun, sementara ekspor timah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Kebijakan tersebut diambil selain untuk membatasi ekspor dalam bentuk bahan mentah dan *ilegal mining* juga lebih berorientasi kepada nilai tambah (*value added*) komoditas sekaligus mengurangi perusakan lingkungan secara masif (*pro environment*).

Pembangunan industri pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat wisata pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan.

Selanjutnya, struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah karena hampir seluruh komoditas pertanian berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Berbagai langkah dilakukan

untuk melakukan transformasi ekonomi sudah dilakukan melaluipembangunan sarana dan prasarana pembangunan sektor strategis namun masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat.

Minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai.

Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian tahun 2021 adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian nasional termasuk Kabupaten Bangka hingga tahun 2022.

4. Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan bagian dari area reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 telah mengamanatkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu : mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Reformasi	N/A	45,58 *	58,00	57,68	60,80

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	Birokrasi					

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebesar 60,80 dengan kategori "B" mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 57,69 dengan kategori "CC". Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, antara lain :

- Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi atau pencabutan beberapa peraturan yang dinilai tidak harmonis
- Menyusun peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja RPJMD dan pengembangan *e-gov* telah dilakukan, namun masih focus pada kebutuhan tata kelola internal; dan
- Melakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun guna memastikan keselarasan struktur organisasi dengan peta proses bisnis yang juga telah ditindaklanjuti dengan rencana restrukturisasi di beberapa OPD.

Walaupun Indeks Reformasi Birokrasi sudah mendapat kategori "B", akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka antara lain :

- Telah melakukan penunjukan agen perubahan, namun agen perubahan yang ditunjuk belum mampu memberikan kontribusi dalam perubahan budaya kerja di masing-masing unit kerjanya.
- Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti: belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
- Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian *reward & punishment,* pengembangan karir serta kompetensi pegawai;

- Telah menetapkan unit kerja Zona Integritas pada unit kerja strategis dan memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat, namun upaya-upaya pembangunan ZI pada unit kerja tersebut dinilai belum optimal.
- Belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap OPD, peningkatan hanya terlihat dari pemanfaatan aplikasi dan penerapan kebijakan yang bersifat umum, belum terlihat adanya inovasi-inovasi dari masing-masing OPD dalam memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.
- Hasil pengukuran Indeks Integritas Jabatan sebesar 2,73 dari skala 4 dan Indeks Integritas Organisasi sebesar 3,20 dari skala 0-4 menunjukkan masih ada *gap* sehingga masih ada ruang perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem integritas.
- Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan Indeks 3,33 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan masih ada *gap* atau selisih antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
- Hasil survey pesepsi korupsi dengan Indeks 3,31 dalam skala 4 menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka isu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi masih harus menjadi fokus perhatian pada perencanaan pembangunan tahun 2021.

5. Pemerataan Infrastruktur

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumber daya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan/sanitasi) belum maksimal. Hal ini terutama karena keterbatasan

APBD Kabupaten Bangka. Sementara keterlibatan swasta sangat minim dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial.

Tabel 2.148
Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	62,48	70,00	73,18	73,25	74,59
2	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	90,20	96,76	97,20	97,85	98,07
3	Persentase Rumah Tangga Terlayani Sanitasi Dasar	86,78	86,81	91,67	91,69	94,12
4	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	86,03	97,04	90,07	91,69	98,71
5	Persentase Rumah Layak Huni	97,85	97,83	94,97	98,01	97,40

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2019 proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 74,59 %, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 98,91 %, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik mencapai 93,77 %, masyarakat yang terlayani sanitasi dasar baru mencapai 94,12 %, masyarakat yang memiliki akses air bersih baru mencapai 98,71 %, dan masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni mencapai 97,40 %.

Berdasarkan data di atas, pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastuktur karena ketersediaan infrastruktur memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian (investasi, pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dll), serta kualitas SDM (kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, sanitasi, dll), yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harus diperhatikan juga pemerataan

penyediaan infrastruktur antar wilayah Kecamatan agar terjadi pemertaan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kecamatan.

6. Pariwisata Sebagai Sektor Ekonomi Alternatif

Sektor Pariwisata adalah sektor ekonomi potensial dan bersifat *sustainable* di Kabupaten Bangka sehingga diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir di mana jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata 86.966 orang per tahun, yang diikuti dengan peningkatan *spending of money tourism* sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.149
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	71.738	72.309	75.618	77.130	90.714
2	*Spending Of Money Tourism* (Milyar)	6,78	7,11	7,65	8,77	16,31

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka, 2019

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan pariwisata salah satunya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Melalui penetapan KEKPariwisata diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Bangka. Kemungkinan hal ini sangat besar bisa terwujud karena KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi beberapa hal juga masih menjadi kendala dan penghambat dalam pembangunan pariwisata antara lain :

- Investasi pada sektor pariwisata sangat kecil, hanya sekitar 0,15 % dari total investasi pada tahun 2019
- Penyediaan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata unggulan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
- Kemitraan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha pariwisata belum optimal
- Pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2019 menyebabkan sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Bangka mengalami kemerosotan yang sangat besar, terutama akibat aturan *social distancing* dan *physical distancing* yang menyebabkan tempat-tempat wisata kehilangan pengunjung

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tahun 2021 dirasa sangat perlu memasukkan peran pemerintah daerah dalam membangkitkan sektor pariwisata.

7. Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang harus menjadi fokus pemerintah pada perencanaan pembangunan tahun 2021 dengan alasan sebagai berikut :

a. Kabupaten Bangka dengan potensi pertambangan timah yang besar tentu saja memiliki potensi perusakan lingkungan yang tidak kecil baik di daratan maupun di perairan dan laut. Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 berada pada angka 65,10, sehingga masih perlu upaya lebih besar untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.
b. Isu *Green Economy* yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan

berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

c. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam prilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hokum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.

d. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka karena dampak kerusakan lingkuan yang massif pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, wabah penyakit dan sebagainya yang akan memerlukan biaya sangat besar untuk menanganinya.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2019-2023. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Mencermati dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2021 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dan harus diselaraskan dengan arah pembangunan RPJMD 2019-2023 tahun ke-3 (tiga) yang diarahkan untuk "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Kesejahteraan Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**".

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, perlu dilakukan analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bangka secara menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan *time series methods* agar memperoleh hasil yang signifikan dengan tingkat kriteria kesalahan ramalan yang kecil.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia

Pasca melambatnya perekonomian dunia pada tahun 2019 yang lalu akibat tingginya tensi perang dagang antara Amerika dan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, tingginya rasio hutang *(debt ratio)* negara – negara berkembang, melonjaknya harga minyak dunia akibat ekses gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah yang melibatkan Amerika dan Iran beserta aliansinya ternyata diperparah dengan munculnya "musuh yang tak terlihat" *(invisible enemy)* pada akhir tahun 2019 berupa pendemi COVID 19 yang telah menyebar ke hampir 210 negara dunia dengan tingkat keparahan yang sangat masif dengan kasus mencapai 3,3 juta jiwa per tanggal 2 Mei 2020 disertai korban jiwa mencapai hampir 239 ribu jiwa di seluruh dunia. Tingkat keparahan akibat momok pandemi tersebut, secara nyata menggerus stabilitas ekonomi dan sosial di seluruh dunia, rendahnya daya beli masyarakat dunia sebagai pengaruh kebijakan *lockdown* di beberapa negara seperti China, Jerman, Spayol, Inggris, Italia dan Amerika Serikat serta penerapan *physical and social distancing* menyebabkan dikotomi antara *supply and demand* sehingga proses input ouput produksi di sektor industri tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan sporadis sebagai solusi terbaik perusahaan dalam menekan biaya produksi *(overhead production)* disamping sulitnya memperoleh bahan baku *(raw material)* produksi.

Gambar 3.1.
Dampak COVID 19 terhadap Perekonomian Dunia

Sumber : Bappenas, 2020

Berdasarkan gambar 3.1. diatas, proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya diperkirakan mencapai 2,5 persen ternyata diprediksi mengalami resesi hingga mencapai – 2,0 persen sampai dengan - 2,8 persen oleh 2 lembaga kredibel di bidang ekonomi dan keuangan dunia. Mencermati kalkulasi ekonomi tersebut, maka dapat dipastikan seluruh aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia akan mengalami kemunduran, bahkan lebih parah dibandingkan pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 yang lalu. Perekonomian beberapa negara mitra penting Indonesia seperti Inggris diperkirakan akan mencapai - 5,1 persen, Amerika Serikat mendekati - 4,1 persen, Jerman dikisaran - 3,9 persen dan China hanya dilevel - 0,2 serta India – 0,1 persen. Ibarat dua sisi mata pisau, resesi ekonomi global akan menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah pengangguran secara *overload* yakni mencapai 195 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin bertambah mendekati 420 - 580 juta jiwa atau sebesar 5,42 – 7,48 persen dengan asumsi penduduk di tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,76 milyar jiwa.

Memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, yang secara langsung turut dipengaruhi oleh lesunya aktivitas perdagangan internasional akibat terganggunya proses produksi dan turunnya permintaan akan barang dan jasa secara global tentunya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin dalam. Kondisi ini

diperparah dengan adanya kebijakan Uni Eropa sepanjang tahun 2019 kemarin yang menaikkan tarif bea masuk produk biodiesel dari Indonesia sebesar 8 – 18 persen dalam rangka melindungi produk dalam negeri dan proteksionisme yang erat kaitannya dengan isu perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) laju pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang penting daerah seperti Jepang diproyeksi sebesar – 5,2 persen, Singapura diperkirakan tumbuh sebesar – 3,5 persen, Korea Selatan diperkirakan sebesar -1,2 persen, China hanya sebesar 1,2 persen dan India hanya mencapai 1,9 persen. Asumsi makro ekonomi negara - negara mitra dagang tersebut akan berdampak langsung volume dan nilai ekspor daerah pada tahun 2020 ini menimbang selama ini Kabupaten Bangka dikenal sebagai daerah yang menjadikan ekspor sebagai salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian daerah *(export promotion)* dengan komoditas utama berupa penghasil bijih timah terbesar di dunia dan komoditas perkebunan yang berkualitas ekspor seperti minyak sawit mentah, karet dan lada dengan nilai ekspor yang mencapai 1,36 milyar US dolar pada tahun 2019.

3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, stabilitas perekonomian nasional dihadapkan pada kondisi yang cukup berat, yang berasal dari ketidakpastian dan turbulensi kondisi perekonomian global. Kondisi ini diperparah dengan epidemi virus corona baru (COVID 19) yang pertama kali muncul pada desember 2019 yang lalu di Wuhan China yang kemudian menyebar keseluruh dunia karena memang secara ilmu virologi, COVID 19 tergolong virus yang sangat mudah menginfeksi manusia dan memiliki tingkat penularan yang tinggi. Selain itu, kondisi perekonomian global sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik Amerika Serikat yang melangsungkan pemilihan presiden pada tahun 2020 ini, patut dinanti apakah Presiden Donald

Trump akan terpilih kembali dan terus melanjutkan kebijakan perang dagang dengan China. Kondisi ini melatarbelakangi kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian perekonomian global, hal ini diperkuat dengan langkah beberapa lembaga keuangan dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF) yang langsung memangkas proyeksi perekonomian global hingga mencapai minus 3 persen atau terjerumus dalam kondisi resesi ekonomi yang nyata sehingga dibutuhkan formulasi baru dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakmampuan global dalam mengatasi penyebaran COVID 19 secara cepat dan tuntas terutama di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan China tentunya akan berimbas pada kapasitas untuk menggerakkan perekonomian secara *full employment* tentunya secara langsung berdampak pada stabilitas perekonomian negara-negara berkembang *(developing country)* terutama terkait dengan tingginya tingkat arus keluar modal asing dari pasar keuangan *(capital outflow)* yang akan mengakibatkan nilai tukar mata uang di sejumlah negara berkembang mengalami fluktuasi dan cenderung melemah. Di kawasan eropa, ketidakpastian juga muncul terkait proses peralihan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) diperburuk dengan prospek pemulihan *(recovery)* dari krisis ekonomi masih belum berjalan sesuai harapan. Demikian juga yang terjadi di China sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia yang dihadapkan pada ketidakstabilan ekonomi akibat mewabahnya COVID 19 setelah dalam 30 tahun terakhir ini rata – rata selalu tumbuh diatas 10 persen.

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut secara kongkret telah berdampak pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2019 kemarin, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,02 persen saja, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi lima tahun sebelumnya yang masih berada diatas level 6 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 5,17 persen atau lebih rendah dari penyesuaian target sasaran pembangunan nasional tahun 2019

yakni sebesar 5,2 persen. Secara detail, perkembangan indikator ekonomi makro nasional tahun 2018-2019 dan proyeksi tahun 2020-2021 tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018-2019
Dan Proyeksi Tahun 2020-2021

Indikator Makro	2018	2019	Proyeksi		
			Before COVID 19	*After* COVID 19	2021
			2020		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,02	5,30	2,30	4,5 – 5,5
Pengangguran (%)	5,34	5,28	5,00	7,30	6,9 - 7,3
Angka Kemiskinan (%)	9,82	9,41	8,68	9,39	8,7 – 9,2
Inflasi	3,13	2,72	3,5	3,0 ± 1	3,0 ± 1
Gini Rasio	0,389	0,382	0,378	0,379	0,377 - 0,385
Indeks Pembangunan Manusia	71,39	71,92	72,51	72,30	73,19 - 73,26

Sumber : BPS, 2020

Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksi sebesar 4,5 – 5,5 persen. Meningkatnya target laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 lebih dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi nasional yang dipicu melalui peningkatan investasi pasca implementasi *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan membaiknya kontribusi ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan terutama proyek–proyek infrastruktur pemerintah yang mulai memberikan hasil serta terus membaiknya investasi swasta. Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian akan berdampak positip terhadap indikator makro lainnya seperti tingkat pengangguran dan kesejahteraan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan RKP implementatif, sama sekali berbeda seperti pada saat penyusunan RKP Tahun 2020 yang merupakan RKP transisi sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan presiden terpilih yang dilantik. Selain itu, RKP Tahun 2021 untuk pertama kalinya merujuk RPJMN 2020 – 2024 yang secara legal formal sudah ditetapkan sebagai penentuan struktur prioritasnya. Beberapa hal terkait dengan penyusunan RKP Tahun 2021 dalam rangka memperkuat komitmen

kebijakan pemerintah yang efektif, maka diterapkan 7 agenda pembangunan beserta langkah kongkret pencapaiannya yaitu : i) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; ii) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; iii) SDM berkualitas dan berdaya saing; iv) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; v) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; vi) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan vii) Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat maka penyusunan RKP 2021 dilakukan melalui pendekatan *clearing house* program pembangunan untuk memastikan i) Seluruh rencana pembangunan K/L maupun intansi lainnya sesuai dengan RPJMN/RKP dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, daerah dan lainnya; ii) Memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya; dan iii) Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan dengan mengintegrasikan sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan sektor :

1) Industri.
2) Pariwisata; dan
3) Investasi.

3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi

Secara umum, kondisi perekonomian provinsi tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian nasional. Membaiknya harga komoditas unggulan daerah sebagai dampak stabilitas perekonomian global mempengaruhi kontribusi ekspor daerah. Investasi yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah ternyata memberikan kontribusi yang signifikan akibat membaiknya nilai tukar sehingga resiko investasi cenderung lebih rendah. Disisi

lain, membaiknya perekonomian daerah juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu terakhir, pertumbuhan ekonomi provinsi terus mengalami peningkatan. Secara detail, perkembangan indikator ekonomi makro provinsi tahun 2018-2019 dan proyeksi tahun 2020-2021 tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

Indikator Makro	2018	2019	Proyeksi		
			2020	*Before* COVID 19 2021	*After* COVID 19
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46	3,32	3,93	4,50– 4,80	3,00 – 3,25
Pengangguran (%)	3,65	3,62	3,58	3,50	5,00 – 5,50
Angka Kemiskinan (%)	5,25	4,62	4,57	4,30 – 4,50	5,00 – 5,50
Inflasi (%)	3,18	2,62	2,50 – 3,00	3,00 – 3,50	3,0 ± 1
Gini Rasio	0,272	0,262	0,261	0,260	0,260
Indeks Pembangunan Manusia	70,67	71,30	71,90	71,70	72,10

Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel,2020

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, beberapa indikator makro mengalami peningkatan kinerja, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 hanya mencapai 3,32 persen saja dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai 4,46 persen. Angka kemiskinan yang terkoreksi positif dari 5,25 persen pada tahun 2018 menjadi hanya 4,62 persen pada tahun 2019. Demikian juga dengan tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,65 persen pada tahun 2018 menjadi 3,62 persen pada tahun 2019. Dengan demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 70,67 menjadi 71,30 pada tahun 2019.

Dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian provinsi maka kebijakan pembangunan ekonomi provinsi diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja.
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan.

3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing.
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah.
5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan sumber daya alam.
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi.
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
8. Pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global.
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan.
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian.
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

3.1.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Kabupaten Bangka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tumbuh dengan laju 4,51 persen - 5,04 persen atau dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 4,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2019 yang diukur menurut PDRB Harga Konstan tumbuh hanya sebesar 2,93 persen, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang justru mencapai 4,51 persen. Krisis ekonomi global yang dipicu perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan sepanjang tahun 2019 yang lalu memberikan andil terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi oleh trend pertumbuhan ekonomi nasional yang juga masih mengalami perlambatan (5,02%) seiring tekanan perekonomian global akibat penurunan permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia dan ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan terutama Timur Tengah dan Laut China Selatan. Merebaknya krisis kesehatan dunia akibat COVID 19 yang berimplikasi terdapat penurunan daya saing ekonomi global terutama terkait negara – negara mitra dagang daerah seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepang yang diprediksi mengalami resesi dan India serta China yang diperkirakan hanya tumbuh dikisaran 1,2 – 1,9 persen maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka diproyeksi hanya sebesar -2,96 persen, dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan menjadi 2,95 persen pada tahun 2021 dengan beberapa asumsi program percepatan pemulihan ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 3.3.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Bangka Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

Indikator Makro	2018	2019	Proyeksi		
			Before COVID 19	After COVID 19	2021
			2020		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51	2,93	3,92	-2,96	2,95
Pengangguran (%)	4,12	3,80	3,71	5,43	4,85
Angka Kemiskinan (%)	5,47	4,92	4,89	5,60	5,11
▪ Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,66	0,65	0,64	0,69	0,67
▪ Indeks Keparahan Kemiskinan	0,17	0,14	0,13	0,19	0,17
Inflasi (%)	(0,51)	0,64	1,25	0,63	2,17
PDRB Per Kapita (Juta Rp) HK	29,56	30,24	30,99	29,35	31,46
PDRB Per Kapita (Juta Rp) HB	40,26	40,89	41,69	40,37	41,72
Gini Rasio	0,278	0,269	0,269	0,271	0,270
Indeks Williamsom	0,192	0,189	0,188	0,190	0,189
Ketimpangan Kriteria Bank Dunia	23,12	23,15	23,16	23,06	23,09
Indeks Eksploitasi Ekonomi	59,25	59,20	59,06	59,17	59,16
Indeks Ketimpangan Wilayah	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29

Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2019 yang tercermin dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, mengalami sedikit perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pola tersebut diakibatkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Krisis finansial global tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok – ASEAN, Masyarakat Ekonomi Asean (ME), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan perkembangan teknologi merupakan beberapa contoh perubahan yang di adaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Selengkapnya perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019 tersaji pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka
Tahun 2015 – 2019

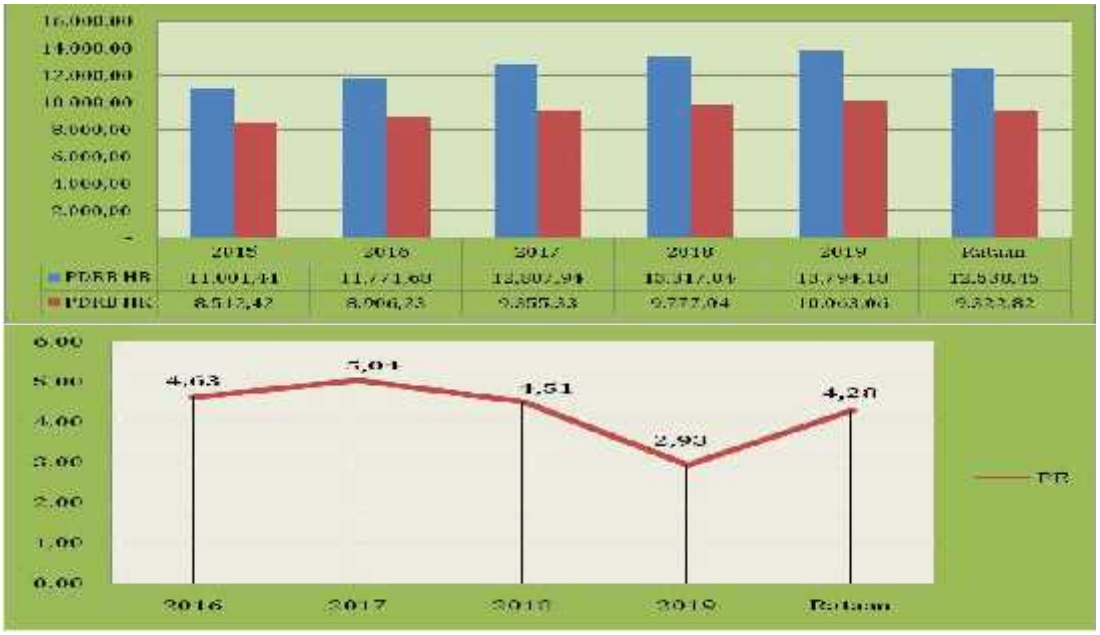

Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2020

Secara makro struktur perekonomian Kabupaten Bangka masih didominasi oleh sektor tersier dan primer dengan kontribusi masing-masing sebesar 35,27 persen dan 32,80 persen. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kabupaten Bangka akan didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yang diproyeksi sebagai *the nextcore business* Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun kedepan dengan *core sector* (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor tersier masih memegang peranan utama kontribusi terhadap PDRB dengan kontibusi mencapai 38,38 persen yang didominasi oleh sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 14,17 persen. Berbeda halnya dengan sektor primer dan sekunder, sektor tersier ternyata mengalami peningkatan kontribusi hingga mencapai 1,42 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (36,96%). Sedangkan pariwisata yang merupakan potensi unggulan daerah yang di representasikan oleh lapangan

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, kontribusinya terhadap struktur perekonomian relatif kecil meskipun dengan kecenderungan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor tersier pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi 38,59 persen. Kontribusi kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka tahun 2019 diwakili oleh sektor sekunder berada pada peringkat kedua dalam perekonomian dengan kontribusi sebesar 32,23 persen, yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,23 persen dan 10,73 persen. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga mencapai (0,16) persen jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya (32,39) persen. Selama 5 (lima) tahun terakhir kontribusi sektor ini cenderung mengalami fluktuatif dengan kontribusi terbesar terjadi di tahun 2018. Pada tahun 2020 diperkirakan sektor ini berkontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 32,70 persen.

Sedangkan sektor primer dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar sektor ini, walaupun dari tahun 2015 sampai 2019 terlihat bahwa peranannya selalu mengalami penurunan dari 34,74 persen menjadi 29,40 persen. Demikian juga pada tahun 2020 kontribusi sektor ini diperkirakan kembali mengalami penurunan menjadi 28,71 persen. Penurunan kontribusi sektor primer ini didorong oleh kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan sedangkan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya. Selengkapnya, nilai dan kotribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Distribusi PDRB Kabupaten Bangka
Menurut Sektor Tahun 2015 – 2019

Tabel 3.4.
Distribusi PDRB Kabupaten Bangka
Menurut Sektor Tahun 2015 – 2019

SEKTOR	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
PRIMER	34,74	34,24	32,80	30,65	29,40
SEKUNDER	31,56	31,01	31,93	32,39	32,23
TERSIER	33,70	34,75	35,27	36,96	38,38

Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2020

Tahun 2015 sampai 2019, industri pengolahan masih merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 21,23 persen. Namun trend perkembangan lapangan usaha ini cenderung terus mengalami penurunan yang di sebabkan penurunan pada sub kategori industri logam dasar dengan komoditas utamanya timah. Tingginya tingkat ketergantungan sektor tersebut terhadap timah dengan tingkat produksi yang terus berkurang maka peranannya diproyeksikan akan digeser oleh sektor unggulan lainnya terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kontributor terbesar kedua adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan kontribusi pada tahun 2018 sebesar 19,48 persen dan menurun menjadi 19,46 persen pada tahun 2019. Kedepan, lapangan usaha ini diproyeksikan akan menjadi kontributor terbesar PDRB Kabupaten Bangka.

Sejak tahun tahun 2012, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang mengalahkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan daerah yang mengedepankan lapangan usaha ini. Prioritas utama pada lapangan usaha ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi menuju Kabupaten Bangka sebagai pusat industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian (perkebunan), perikanan dan pariwisata. Semakin menurunnya sektor pertambangan dan penggalian lebih disebabkan tingkat produksi yang semakin berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang *unrenewable* serta daya degradasi lahan dan *landscape* yang sangat tinggi. Dengan pertumbuhan yang fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Walaupun lapangan usaha ini dengan komoditas utama berupa timah sangat identik dengan Kabupaten Bangka dan telah menjadi jantung kehidupan ekonomi masyarakat Bangka sejak belum merdeka. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan sebagai the *next prime mover* karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain. Diharapkan kedepan lapangan usaha ini, menjadi dasar pertumbuhan Kabupaten Bangka menjadi pusat industri dan perdagangan.

Dilihat dari pertumbuhan riil lapangan usaha, pertumbuhan di tahun 2019 masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Bangka memiliki pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai kategori lapangan usaha dengan perincian yakni (i) kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,95 persen, (ii) kategori jasa lainnya sebesar 11,50 persen, (iii) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,98 persen, (iv) kategori konstruksi sebesar 9,38 persen, (v) kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,96 persen, (vi) kategori jasa pendidikan sebesar 6,69 persen, (vii) kategori administrasi pemerintahan,

pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,85 persen; (viii) kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,73 persen, (ix) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,69 persen, (x) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,34 persen; (xi) kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,04 persen, (xii) kategori real estet sebesar 2,48 persen, (xiii) kategori jasa perusahaan sebesar 2,45 persen; (xvi) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,07 persen, (xv) kategori pertambangan dan penggalian sebesar 0,95 persen, dan (xvi) kategori industri pengolahan sebesar (1,07) persen; serta (xvii) kategori pengadaan listrik dan gas sebesar (3,96) persen.

Grafik 3.3.
Peranan Sektoral PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Tahun 2019

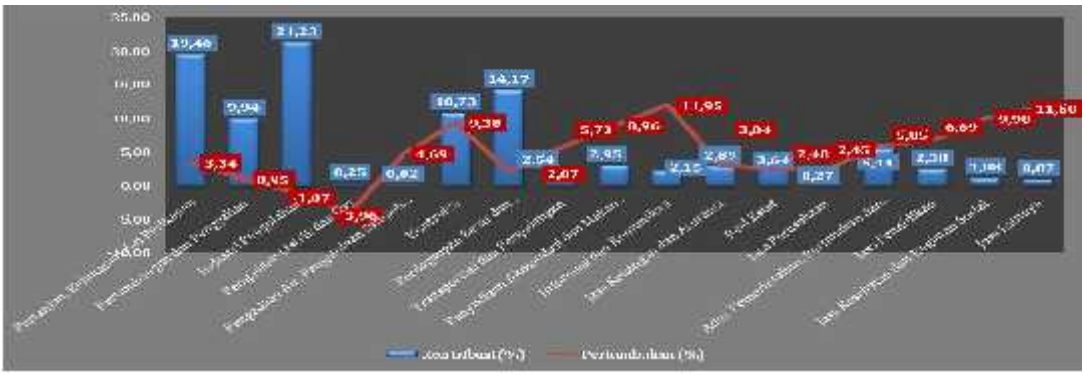

Sumber : BPS Kab. Bangka, diolah, 2020

Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka *core business* dan posisi relatif masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangkaakan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian ini sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap akan mendominasi. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tidak lagi menjadi bagian *core business* yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada lapangan usaha industri pengolahan khususnya subkategori

industri makanan dan minuman dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai representasi dari pariwisata. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi *core business* beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang dapat dijadikan akseleratornya.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi pada beberapa perubahan variabel ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi dan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong tingkat permintaan atau konsumsi masyarakat yang akan berdampak pada kenaikan harga (inflasi).

Grafik 3.4.
Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019

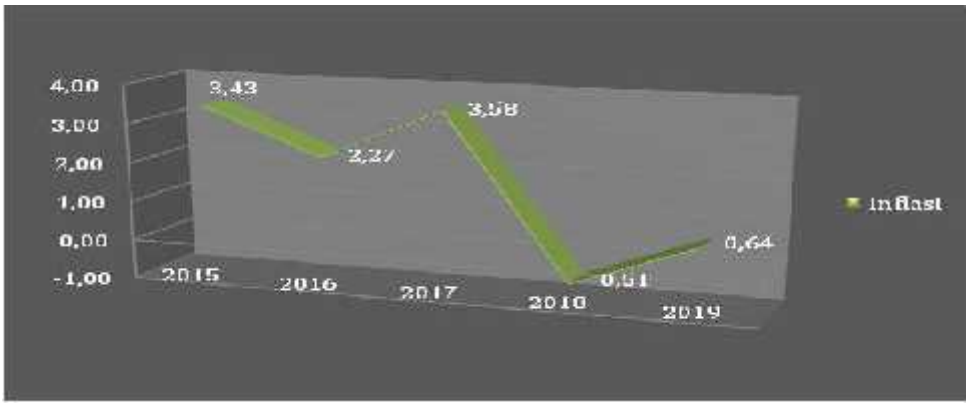

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

Grafik 3.4 menunjukkan laju inflasi lapangan usaha selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Pada tahun 2018 sektor – sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar (0,51) persen. Angka inflasi tahun 2018 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi tahun 2017 yang sebesar 3,58 persen.

Namun pada tahun 2019, angka inflasi meningkat menjadi 0,64 persen dan diproyeksikan pada tahun 2020 turun menjadi 0,63 persen. Laju inflasi sektoral pada tahun 2019 sebagian besar disumbang oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan dan transportasi dan pergudangan berturut-turut sebesar 5,90, 5,81 dan 5,03 persen. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar (8,70) persen.

Tabel 3.5.
Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2019

Lapangan Usaha	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,56	2,02	(7,31)	0,11
Pertambangan dan Penggalian	(0,73)	3,17	(6,71)	(8,70)
Industri Pengolahan	(0,39)	4,05	2,18	(0,30)
Pengadaan Listrik dan Gas	17,08	15,44	1,63	1,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,55	4,71	4,35	0,04
Konstruksi	2,61	5,37	4,47	3,56
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	4,96	3,30	3,08
Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,83	0,27	5,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,18	3,30	3,11	5,90
Informasi dan Komunikasi	0,44	2,11	(0,08)	0,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,97	4,83	3,55	1,60
Real Estat	3,51	3,07	2,37	2,86
Jasa Perusahan	3,99	5,92	5,25	5,81
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,79	3,89	(1,76)	0,67
Jasa Pendidikan	6,62	2,92	(0,14)	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13	2,99	2,76	2,73
Jasa Lainnya	5,22	4,92	3,09	3,89
PDRB	**2,27**	**3,58**	**(0,51)**	**0,64**

Sumber : BPS Kab. Bangka, diolah, 2020

Grafik 3.4 diatas juga menunjukkan trend laju inflasi yang dibawah 5 (lima) persen dalam kurun waktu 2015-2019 mengindikasikan bahwa pergerakan perekonomian atau aktivitas perekonomian berjalan lancar, dengan kata lain semua aspek perekonomian dari hulu ke hilir memberikan dampak positip bagi ekonomi daerah. Meningkatnya penghasilan perkapita penduduk

maupun tingkat kesejahteraan penduduk tentunya berkorelasi positip terhadap meningkatnya daya beli serta daya *saving* masyarakat.

Tabel 3.6.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

Indikator Makro	2018	2019	Proyeksi		
			Before COVID 19 2020	After COVID 19 2020	2021
Indeks Pemberdayaan Gender	62,20	62,56	63,13	62,31	62,63
Indeks Pembangunan Gender	88,24	88,49	88,87	88,26	88,45
Indeks Pembangunan Manusia	71,80	72,39	72,98	72,27	72,67

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk melihat tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan di daerah, maka pengukuran Indeks Pemberdayan Perempuan menjadi sangat penting. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan progress yang singnifikan dari 59,40 di tahun 2013 hingga mencapai 62,56 di tahun 2019 dan diproyeksi akan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 62,63 di tahun 2021. Sejalan dengan tujuan SDG's, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan trend yang sangat menggembirakan yakni dari 86,77 di tahun 2013 hingga mencapai 88,49 di tahun 2019. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Kabupaten Bangka sudah semakin sempit, sehingga besaran IPG diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 88,45 di tahun 2021. Peningkatan kedua indikator makro tersebut ternyata berbanding lurus terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara umum

dianologikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka dalam kurun 5 tahun terakhir sangat menggembirakan yakni berkisar antara 70,03 hingga 72,39 dengan rataan sebesar 71,15. Pencapaian IPM tahun 2015 (70,03) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi *(high human development)* dan diperkirakan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Bangka berada dalam kisaran 72,67.

Agar pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diatas dapat terealisasi dengan optimal, maka perlu dilakukan kalkulasi ekonomi secara komprehensif dengan menggunakan variabel komposit yang dibutuhkan sehingga daerah tidak menemui kesulitan yang berarti dalam menentukan besaran kebutuhan dana/investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Selengkapnya kerangka pemikiran kebutuhan pendanaan tahun 2021 tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2.
Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis data yang dilihat pada tabel dibawah menunjukkan hampir 64,71 persen sektor dalam struktur perekonomian memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut menimbang sektor - sektor tersebut mempunyai keunggulan komperatif dibandingkan dengan

sektor perekonomian lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi dengan nilai LQ mencapai 1,13, kemudian sektor jasa lainnya 1,11, sektor penyediaan akomodasi dan air minum 1,06 dan sektor perekonomian lainnya dengan rentang 1,01 – 1,05. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan *progress* yang cukup baik dengan rataan diatas 4 persen, walaupun demikian mencermati ketidakpastian yang akan terjadi di tahun 2021 nanti *(year of uncertainty)*, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksi berada dibawah rentang tersebut yakni hanya sebesar 2,95 persen. Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dilakukan untuk mengetahui efektivitas tingkat produksi dan memperkirakan kebutuhan dana yang dapat diinvestasikan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah. Rataan ICOR tahun 2015 - 2017 sebesar 5,44 merupakan komposisi terbaik yang diperoleh dalam kondisi normal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sehingga diperkirakan kebutuhan pendanaan tahun 2021 mencapai 1,38 triliun rupiah dengan rincian sebesar 1,00 triliun rupiah untuk menggerakkan kurang lebih 11 sektor perekonomian potensial dan sisanya sebesar 377,29 milyar rupiah untuk 6 sektor perekonomian non potensial berdasarkan hasil analisis LQ. Sektor konstruksi diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 279,54 milyar rupiah, kemudian sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan membutuhkan dana masing – masing sebesar 234,22 milyar rupiah dan 156,06 milyar rupiah. Selengkapnya analisis terkait kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2021

Sektor Ekonomi	Rataan LQ 2017 - 2019	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (2021)	Proyeksi PDRB 2021 (Milyar Rp)	Rataan ICOR 2017 - 2019	Kebutuhan Investasi (Milyar Rp)
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1,00	2,05%	2.051,10	3,72	156,06
Pertambangan & Penggalian	0,95	0,46%	1.414,17	6,26	40,64
Industri Pengolahan	0,96	0,88%	2.374,15	5,77	120,48
Pengadaan Listrik Dan Gas	0,98	6,96%	21,78	4,61	6,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	1,02	4,80%	2,23	4,83	0,52
Konstruksi	1,06	6,77%	978,90	4,22	279,54
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1,01	5,56%	1.286,48	3,28	234,22
Transportasi Dan Pergudangan	1,05	5,64%sensi	238,90	8,47	114,04
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,06	4,27%	260,93	3,21	35,74
Informasi Dan Komunikasi	1,13	4,02%	279,42	6,28	70,48
Jasa Keuangan Dan Asuransi	0,99	4,58%	283,14	4,10	53,13
Real Estate	1,02	4,00%	368,14	3,81	56,17
Jasa Perusahaan	1,00	4,08%	22,93	4,61	4,31
Adm. Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	3,74%	529,90	4,91	97,40
Jasa Pendidikan	1,06	4,68%	205,25	4,88	46,92
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,06	4,42%	108,12	3,94	18,81
Jasa Lainnya	1,11	8,68%	80,03	6,53	45,38
Kab. Bangka	**1,03**	**2,95%**	**10.505,55**		**1.380,82**

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020, Data diolah

Berdasarkan gambar 3.7 diatas, maka dapat diketahui proporsi masing – masing sektor dalam perekonomian yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang diinginkan sebesar 2,95 persen. Konsumsi diprediksi masih menjadi *core bussines* terbesar dalam perekonomian dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 62,52 persen, kemudian diikuti oleh sektor investasi dengan besaran kontribusi mencapai 24,54 persen, pengeluaran pemerintah dikisaran 11,93 persen dan net ekspor diprediksi hanya mencapai 1,01 persen saja. Selengkapnya kontribusi masing – masing sektor terhadap perekonomian daerah tersaji pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.5
Kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2021

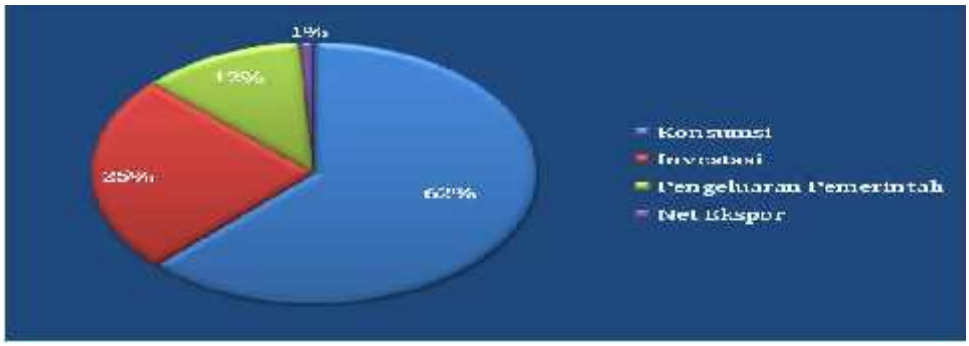

Sumber : Bappeda Bangka (data diolah), 2020

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, investasi bangunan dan non bangunan yang dilakukan pemerintah daerah diprediksi berada dikisaran 37,92 persen atau hampir sebesar 523,65 milyar rupiah, kemudian sektor swasta dengan proporsi mencapai 24,99 persen atau setara 345,00 milyar rupiah dan peran APBN dan APBD I masing – masing diperkirakan hanya sebesar 18,14 persen dan 8,96 persen saja. Selengkapnya proprosi kebutuhan pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2021 menurut pelaku ekonomi tersaji pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Proprosi Kebutuhan Pendanaan Kab. Bangka Tahun 2021
Menurut Pelaku Ekonomi

Kedepan, fokus pemerintah daerah selain terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan permasalahan distribusi pendapatan masyarakat agar tidak terjadi *gap* yang cukup besar antar kelompok masyarakat kecil, menengah dan kaya. Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka tahun 2017-2018 dan proyeksi tahun 2020-2021 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka 2017 – 2018 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Makro	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	2019	Proyeksi	
		2017	2018			2020	2021
1	**PDRB (Milyar Rupiah)**						
	a. Harga Berlaku	12.807,94	13.317,04	509,10	13.794,18	14.215,72	14.727,81
	b. Harga Konstan	9.355,33	9.777,04	421,71	10.063,06	10.204,87	10.505,55
2	**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**	**5,04**	**4,51**	**(0,53)**	**2,93**	**-2,96**	**2,95**
3	**Tingkat Inflasi**	**3,58**	**(0,51)**	**(4,09)**	**0,64**	**0,63**	**2,17**
4	**Distribusi Persentase ADHB**						
	Primer	**32,80**	**30,65**	**(2,15)**	**29,40**	**28,30**	**27,40**
	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,37	19,48	(0,89)	19,46	18,97	18,52
	b. Pertambangan dan Penggalian	12,43	11,17	(1,26)	9,94	9,33	8,88
	Sekunder	**31,93**	**32,39**	**0,46**	**32,23**	**32,19**	**31,88**
	c. Industri Pengolahan	22,37	22,29	(0,08)	21,23	20,74	20,32
	d. Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,26	0,01	0,25	0,29	0,30
	e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,03
	f. Kontruksi	9,29	9,81	0,52	10,73	11,14	11,22
	Tersier	**35,27**	**36,96**	**1,69**	**38,38**	**39,51**	**38,91**
	g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,33	13,95	0,62	14,17	14,51	14,96
	h. Transportasi dan Pergudangan	2,28	2,37	0,09	2,54	2,62	2,71
	i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,50	2,65	0,15	2,95	3,03	3,16
	j. Informasi dan Komunikasi	1,84	1,98	0,14	2,15	2,22	2,32
	k. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,86	0,11	2,89	3,00	3,06
	l. Real Estet	3,33	3,58	0,25	3,64	3,78	3,89
	m. Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,02	0,27	0,28	0,29

No	Indikator Makro	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	2019	Proyeksi	
		2017	2018			2020	2021
	n. Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	5,29	0,15	5,44	5,56	5,68
	o. Jasa Pendidikan	2,17	2,27	0,10	2,38	2,49	2,57
	p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,99	0,04	1,08	1,10	1,14
	q. Jasa Lainnya	0,72	0,78	0,06	0,87	0,91	0,96
5	**Ketenagakerjaan**						
	a. Tk. Penangguran Terbuka (%)	4,29	4,12	(0,17)	3,80	5,43	4,85
	b. Jumlah Pengangguran (Jiwa)	2.343	2.670	327,00	6.076	7.847	6.683
6	**% Penduduk Miskin**	**5,10**	**5,47**	**0,37**	**4,92**	**5,60**	**5,11**
	a. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	16,45	18,02	1,57	16,52	18,33	16,62
7	**PDRB Perkapita (Juta Rp)**	**39,49**	**40,26**	**0,77**	**40,89**	**40,37**	**41,72**
8	**Indeks Pembangunan Manusia**	**71,09**	**71,80**	**0,71**	**72,39**	**72,27**	**72,67**
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,56	70,73	0,17	70,99	71,01	71,05
	b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,19	8,20	0,01	8,23	8,24	8,25
	c. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,58	12,68	0,10	12,76	12,77	12,80
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	11.420	12.043	623,00	12.480	11.983	12.850

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2020

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bangka disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut pada tahun 2021 diimplementasikan dengan melanjutkan kegiatan - kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya pencapaian tujuan tersebut. Diharapkan

pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2020, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2021, yakni :

1) **Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam kurun satu tahun terakhir mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi COVID 19 yang melanda secara global**.

   Retrogresi laju pertumbuhan tersebut disebabkan dampak ketidakpastian perekonomian global akibat penyebaran COVID 19 yang secara masif mempengaruhi produksi pertanian, pariwisata, agro industri, jasa-jasa, pertambangan dan industri logam dasar. Komoditas yang terdampak dari kontraksi perekonomian global seperti bijih timah, lada, karet, kelapa sawit (CPO), ubi kasesa, tapioka dan perikanan. Selain itu kurangnya inovasi dalam teknologi produksi dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah (*value added*) komoditas unggulan menyebabkan output produksi yang dihasilkan belum memiliki keunggulan komperatif. Anomali iklim, hama/penyakit dan rendahnya tingkat pembukaan lahan-lahan baru terutama untuk pertanian, perkebunan dan tanaman pangan akan mempengaruhi tingkat produktivitas disamping dipengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan produksi (*return to scale*). Untuk lebih meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi, maka pengembangan sektor unggulan tersebut di atas di masa depan seharusnya diarahkan pada peningkatan investasi pengembangan agroindustri yang disertai dengan perbaikan kualitas tenaga kerja sektor pertanian, pariwisata, agroindustri, jasa–jasa, pertambangan dan industri logam dasar. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena beberapa sektor tersebut memiliki tingkat *backward and forward linkage* yang tinggi.

2) **Minimnya peran investasi di sektor agroindustri dan industri hilir pertanian dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi.** Rendahnya kontribusi investasi di sektor tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang masih terbatas, kemampuan ekspor yang masih rendah, kurangnya daya dukung infrastruktur pertanian, dan masih lemahnya kemitraan antara agroindustri skala besar/sedang dengan agroindustri skala kecil/rumah tangga.

   Iklim usaha yang sehat dan kondusif akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan investasi yang sehat dan kondusif menjadi syarat mutlak bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah daerah saat ini. Komitmen perbaikan iklim investasi ini berupa perbaikan dibidang perundang-undangan (simplifikasi regulasi), pelayanan dan penyederhanaan prosedur serta birokrasi perlu semakin diperkuat dan dimplementasikan.

3) **Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah sebagai *core bussines* baru dalam perekomonian daerah**. Sektor pariwisata mempunyai peran strategis dalam menciptakan nilai tambah perekonomian daerah. Selain sebagai nilai tambah, sektor pariwisata juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga diharapkan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan *(pro poor)* dan penyediaan lapangan pekerjaan *(pro job)*.

4) Kontribusi terbesar PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bangka didominasi oleh ekspor dengan kisaran sebesar 36 - 67 persen, terutama yang berasal dari komoditi unggulan seperti karet, kelapa sawit, lada, perikanan, CPO, timah dan industri turunannya. Dengan demikian beberapa sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, agroindustri sangat dipengaruhi oleh praktek liberalisasi perdagangan internasional. **Liberalisasi perdagangan sektor unggulan daerah** seperti sektor

pertanian, pariwisata, agro industri, jasa - jasa, pertambangan dan industri logam dasar akan melahirkan pasar yang tidak sehat dan melebarkan ketidakadilan. Pengaturan harga oleh kartel tanpa melalui interaksi penawaran dan permintaan oleh perusahaan merupakan bentuk kegagalan pasar yang akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

5) **Lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan kemitraan usaha sektor pertanian** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani lada, karet, kelapa sawit, ubi kasesa dan tapioka. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih dibawah kisaran 100,00. Rendahnya kekuatan posisi tawar petani disisi hulu menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh atas penjualan produk pertanian menjadi rendah, tingkat keuntungan yang seharusnya diperoleh petani justru diperoleh para pedagang dan pelaku usaha lainnya di sektor hilir.

6) **Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh** sehingga berdampak pada kinerja sektor unggulan (sektor basis) yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya, rendahnya keunggulan komparatif sektor unggulan tersebut mengakibatkan pemenuhan kebutuhan wilayah termasuk ke daerah lain belum dapat terpenuhi sepenuhnya.

7) **Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemik COVID 19**. Padahal sektor ini memberikan kontribusi berkisar 60-70 persen dalam PDRB dan menyerap hampir 79,01 persen pekerja bergerak di sektor ini. Hal ini disebabkan diberlakukannya kebijakan kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID 19 *(phsycal dan social distancing)* selain permasalahan terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dalam pembangunan daerah melalui pengembangan skema mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga.

Kondisi jasa keuangan saat ini masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka pendek sedangkan pemanfaatan pasar modal masih terbatas sehingga akses perkreditan melalui bank konvensional sulit untuk dipenuhi oleh UMKM.

8) **Rentannya landasan perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan**. Merumuskan definisi maupun kriteria yang tepat bagi desa yang akan mendapatkan alokasi dana. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan mengurangi kesenjangan. Masyarakat desa dapat memanfaatkan dana desa secara produktif. Memberikan pendampingan kepada aparat di desa dalam perumusan program, pembukuan, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan juga harus dibuat sederhana untuk mempermudah pengelola dana di desa yang secara umum terbatas secara kapasitas dan infrastruktur. Pemerintah daerah juga perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut di tingkat desa, agar potensi penyelewengan dan penyimpangan dapat dihindari.

9) **Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan perizinan dan nonperizinan**. Pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta meningkatnya kepuasanmasyarakat sangat terkait dengan inovasi dan kreativitas dan strategi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah dan transparan serta efisien. Sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai macam inovasi pelayanan publik.

10) **Sulitnya menjaga interaksi antara permintaan dan penawaran tetap harmonis terutama terhadap gejolak komponen harga bahan makanan (*volatile food*)**. Produksi barang dan jasa daerah sangat terbatas dan tingkat permintaan daerah semakin tinggi membuat ketergantungan pasokan dari luar daerah (impor) terutama bahan makanan semakin besar.

Upaya stabilisasi harga dengan cara mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan harus menjadi komitmen seluruh *stakeholders*. Beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakstabilan harga diantaranya (1) mahalnya bongkar muat barang di pelabuhan, (2) distributor yang melakukan pratek penimbunan barang, dan (3) infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas.

11) **Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar daerah** untuk mengurangi kesenjangan dalam kebijakan perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis. Peran penting pemerintah provinsi menjadi krusial dalam menjaga stabilitas regional. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi yang harmonis melalui kerjasama daerah baik pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kurangnya implementasi terhadap kesepakatan kebijakan yang diambil dalam forum koordinasi daerah menyebabkan permasalahan yang seharusnya dapat diatasi menjadi terulang kembali.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2021 baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dan berdasarkan *forecasting,* kondisi perekonomian mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 4,60%. Untuk melihat gambaran kondisi perekonomian untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Prediksi Kondisi Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Makro	Tahun 2021		Tahun 2022	
1	**LAPANGAN USAHA**	**PDRB HB (Milyar Rp)**	**PDRB HK (Milyar Rp)**	**PDRB HB (Milyar Rp)**	**PDRB HK (Milyar Rp)**
	a Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.728,26	2.051,10	2.765,33	2.108,27

No	Indikator Makro	Tahun 2021		Tahun 2022	
b	Pertambangan dan Penggalian	1.307,38	1.414,17	1.301,95	1.407,64
c	Industri Pengolahan	2.993,20	2.374,15	3.004,19	2.421,85
d	Pengadaan Listrik dan Gas	44,56	21,78	47,37	23,40
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	3,80	2,23	4,05	2,33
f	Kontruksi	1.653,03	978,90	1.718,86	1.018,01
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.203,21	1.286,48	2.389,16	1.325,23
h	Transportasi dan Pergudangan	398,61	238,90	424,74	260,65
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,93	260,93	499,20	282,63
j	Informasi dan Komunikasi	340,97	279,42	365,93	320,21
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	450,23	283,14	474,69	294,53
l	Real Estet	572,23	368,14	606,81	399,31
m	Jasa Perusahaan	42,81	22,93	45,71	24,25
n	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	836,01	529,90	907,03	586,02
o	Jasa Pendidikan	378,76	205,25	403,92	224,44
p	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,84	108,12	178,90	116,69
q	Jasa Lainnya	141,98	80,03	154,09	87,42
	PDRB	**14.727,81**	**10.505,55**	**15.291,90**	**10.902,86**
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	2,95		3,78	
3	Tingkat Inflasi	2,17		2,29	
4	Ketenagakerjaan				
a	Tk. Pengangguran Terbuka (%)	4,85		4,51	
5	Angka Kemiskinan (%)	5,11		4,89	
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	41,72		42,94	
7	IPM	72,67		73,19	

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2020

Dari sisi output/produksi PDRB harga berlaku untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diprediksi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,73 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 18,52% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka, sedangkan PDRB harga konstan untuk tahun yang sama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi 2,05 triliun rupiah. Dilihat dari tabel 3.9 diatas maka dapat diketahui bahwa sektor tersier merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi mencapai 40,72% dengan menempatkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai lapangan usaha kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 14,96%. Sektor tersier diharapkan dapat menjadi sektor unggulan Kabupaten

Bangka pada masa-masa mendatang dengan motor penggerak lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai representasi sektor pariwisata yang kontribusinya hanya sebesar 3,16% kemudian diikuti oleh sektor sekunder yang dipengaruhi *supply & demand* dalam kaitannya dengan perdagangan internasional yakni sebesar 31,88%. Peningkatan kontribusi lapangan usaha ini sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Selain itu, yang juga terus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yakni bagaimana untuk terus meningkatkan sektor sekunder terutama lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang karena hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,30% dan 0,03%. Hal ini dirasakan masih kurang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sektor ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan disamping sebagai pendorong perekonomian juga sebagai faktor pendorong laju investasi terutama berkaitan dengan energi listrik. Perlu diketahui bahwa PDRB harga konstan digunakan dalam mengukur perekonomian suatu daerah karena faktor inflasi sudah dieliminasi.

PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2021 diperkiraan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang kearah yang baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 41,72 juta rupiah, namun yang perlu diperhatikan apakah distribusi pendapatan berjalan sempurna atau persentasi dari total pendapatan berbanding lurus dengan persentasi jumlah penduduk dalam menikmati pendapatan daerah. Hal ini akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka memberantas kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi masyarakat.

Salah satu indikator ekonomi yang penting seperti inflasi tetap berada pada level aman yakni hanya sebesar 2,17%. Menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok dalam rangka menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berjalan stabil, walaupun tingkat

harga barang pada beberapa sub sektor terutama sektor sekunder dan tersier justru mengalami peningkatan. Inflasi di sektor tersebut dipengaruhi oleh biaya hidup (*life cost*) yang tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada khususnya terutama didominasi oleh naiknya harga bahan pokok karena memang sebagian besar bahan pokok tersebut dikirim dari luar Bangka yang memerlukan sarana transportasi yang mahal.

Mencermati kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2021 diarahkan pada 2 model intervensi kebijakan, yakni i) intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek; ii) intervensi kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID 19 sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3.
Intervensi Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2021

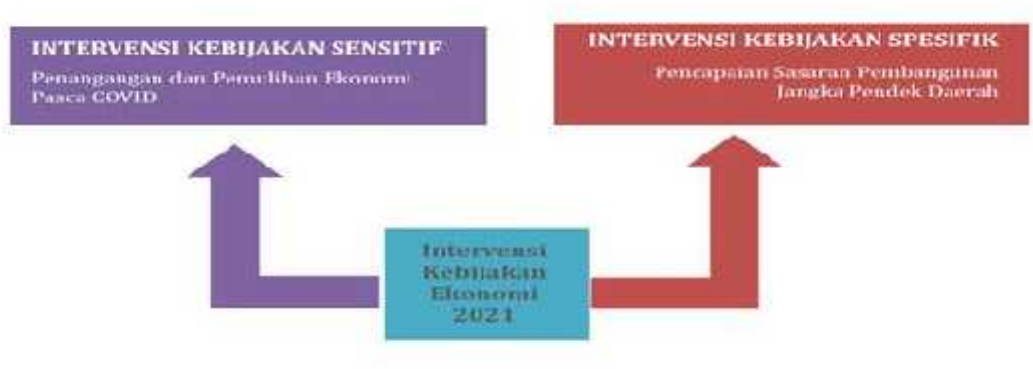

Adapun intervensi kebijakan spesifik dalam mendorong pencapaian target pembangunan jangka pendek daerah antara lain :

1) **Mendorong Laju Produksi Sektor Unggulan Daerah terutama Perkebunan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Industri dan Pariwisata**.

Pengembangan potensi sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama UMKM dilakukan melalui pemberian keterampilan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, bantuan pinjaman modal usaha, pengembangan wirausaha baru dan pemberian subsidi dan sarana dan prasarana produksi target-target usaha kecil dalam mendorong penguatan daya saing produk termasuk fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata.

Gambar 3.4.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus Melambat

2) **Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor.**

Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor untuk komoditas unggulan seperti lada, karet, *Crude Palm oil* (CPO) dan timahdiharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas unggulan sekaligus dalam rangka penguatan penguasaan pangsa pasar internasional, Kehadiran kantor perwakilan pemasaran akan menjembatani produsen dan konsumen secara lebih dekat, memangkas spekulan, mendorong sektor unggulan bergerak lebih cepat, meningkatkan posisi tawar, mempermudah akses informasi dan meningkatkan realisasi investasi sektor unggulan yang akan berdampak pada perbaikan kinerja perekonomian daerah.

3) **Perluasan Pasar Ekspor Komoditi Unggulan Daerah.** Kebijakan ini mutlak diperlukan mengingat adanya hambatan perdagangan terhadap komoditi minyak sawit *(palm oil)* dari Uni Eropa mengingat kawasan tersebut menjadi importir terbesar sehingga untuk menyelamatkan ekspor daerah perlu dilakukan perluasan akses pemasaran ke negara - negara potensial lainnya terutama dikawasan Afrika dan Asia agar porsi ekspor menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Fakta tersebut diperkuat dengan laporan analisis lembaga keuangan dan ekonomi dunia yang menyebutkan kawasan asia menjadi barometer perdagangan dunia *(emerging market)* dalam beberapa tahun mendatang, mengingat hampir 30 - 40 persen output dunia berasal dari kawasan tersebut dan potensi ini perlu segera disiasati melalui penguatan dan perluasan kerjasama perdagangan.

4) **Mendorong Investasi Berbasis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) kearah Sektor - Sektor Ekonomi yang Produktif dan Efisien.** Peranan investasi perekonomian daerah cukup signifikan dengan rataan tingkat pertumbuhan dan kontribusi selama kurun waktu 2015 – 2019 masing – masing mencapai 5,69 persen dan 23,74 persen. Investasi yang digelontorkan dalam perekonomian ibaratkan suplemen utama yang akan

men*drive* siklus bisnis berjalan lebih aktif dan ekonomis. Namun dalam banyak kasus seringkali investasi yang ditanamkan kadang memiliki hasil *(return)* yang tidak maksimal dibandingkan hasil yang seharusnya diterima. Oleh sebab itu, pendekatan ICOR sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kebocoran/inefektif sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)*. Tingkat kebocoran pembangunan daerah sendiri jika dibandingkan dengan nasional hampir sebesar 7,04 persen, sehingga nantinya investasi yang akan mendanai pembangunan daerah diprioritaskan pada sektor – sektor ekonomi yang ICOR-nya tergolong baik yakni berada dikisaran 3 – 4 seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

5) **Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**. Kewirausahaan dewasa ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Semakin besar jumlah wirausahawan menunjukkan semakin maju dan mapan suatu daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemuda sebagai pionir dan pelopor perubahan dapat diikutsertakan dalam menggerakkan sektor perekonomian daerah melalui pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang belum memulai usaha, pelatihan penguatan usaha bagi pemuda yang baru memiliki usaha dan pelatihan pengembangan usaha bagi pemuda yang usahanya telah berkembang.

6) **Mengurangi Ketergantungan terhadap Sektor Pertambangan**. Meskipun memberikan kontribusi besar, namun pertumbuhan sektor ini menunjukkan trend yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor ini tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Hal ini disebabkan karena tingkat produksi yang terus berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang *unrenewable* serta

degradasi lahan dan *landscape* yang sangat tinggi. Sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi dan real estate.

7) **Perluasan Kesempatan Kerja, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja**. Mengingat kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan masih terbatas, maka diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai efek penggandaan yang tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan seperti kebijakan padat karya (*labor intensive*).

8) **Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).** BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatan perekonomian daerah. Banyaknya kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan baik yang dapat memberikan pemasukan keuangan bagi daerah maupun memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu, perkembangan perekonomian global yang sarat dengan kompetensi menutut setiap BUMD untuk dapat mengelola bidang usahanya secara produktif, efisien, kompetitif dan berkelanjutan *(sustainable competitive advantage)*. Sehubungan dengan peningkatan daya saing tersebut, PD. Agro Lestari Mandiri dan PDAM Tirta Bangka harus memiliki *corporate plan* yang jelas baik dengan kemampuan SDM yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perusahaan yang pada akhirnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan jasa dan penyediaan kebutuhan tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.

9) **Mendorong Investasi Agro Industri dan Industri Hilir Pertanian yang akan Berdampak Signifikan terhadap Aktivitas Perekonomian Daerah.** Komoditi investasi yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi industri biogas, tapioka, karet dan CPO. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, investasi industri di sektor unggulan semakin meningkat, salah satunya akan dioperasikannya pabrik tapioka

Puding Besar, Pertumbuhan investasi inilah yang memiliki keterkaitan *backward linkage* dan *forward linkage* yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Peningkatan investasi pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha baru yang mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Gambar 3.5.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Minimnya Peran Investasi Agro Industri dan Industri Hilir

10) **Memperbaiki Tata Niaga Pertanian.** Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian. Kebijakan daerah terkait tata niaga lebih kearah penguatan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut terdiri dari tarif/pajak/regulasi terkait ekspor dan impor produk pertanian yang dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global yang mempengaruhi harga komoditas unggulan daerah.

11) **Menjaga Ketersediaan Bahan Baku.** Dukungan ketersedian bahan baku produk pertanian seperti sawit, karet, lada, ubi casesa yang menopang agro industri dan industri hilir dilakukan melalui perluasan lahan pertanian, dukungan riset teknologi dengan BPPT dan POLMAN dalam perbenihan dan pembibitan yang unggul, kemudahan perizinan terhadap pembukaan lahan-

lahan baru untuk pertanian, dan menerapkan sertifikasi mutu benih/bibit serta memperkuat kemitraan usaha dengan pengusaha atau lembaga ekonomi lainnya.

12) **Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian.** Peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah sangat vital dengan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka hingga sebesar 18,90 persen sehingga pemerintah daerah terus berusaha untuk menyediakan infrastuktur yang memadai mulai dari proses industri hingga pemasaran. Akses jalan yang memadai sangat mempermudah akses hasil usaha tani ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pelabuhan. Konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertambangan diarahkan pada perbaikan dampak dari kerusakan tanah yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian.

13) **Mempercepat Proses Investasi dan Hilirisasi Produk Pertanian.** Investasi sektor pertanian merupakan suplemen penting dalam menstimulan pembangunan sektor pertanian. Reformasi birokrasi di bidang perizinan menjadi salah satu prasyarat utama yang penting. Dimasa lalu, masyarakat mungkin tidak begitu mempersoalkan dengan proses pengurusan perizinan yang membutuhkan 15 – 30 hari. Namun dengan tingkat kesibukan masyarakat yang begitu tinggi, pengurusan perizinan dalam waktu 1 minggu seperti lazim sekarang ini dirasa masih lamban. Peran investasi sektor swasta terhadap sektor pertanian masih sangat kecil, namun peningkatan investasi swasta akan mencerminkan kondisi yang kondusif bagi sektor pertanian daerah sebagai tujuan investasi.

14) **Mempercepat *Groundbreaking* Zona Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Bangka.** Tahapan awal pembangunan di zona rencana KEK menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk mengembangkan potensi sektor pariwisata daerah yang mendunia. Keberadaan destinasi pariwisata bertaraf internasional yang bernuansa *sport tourism* dan *culture*

tourism yang terintegrasi dalam KEK menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

15) **Pemasaran Pariwisata Daerah.** *Tourism Marketing* identik dengan konsep yang ditawarkan baik *branding*, *advertising*, *selling*, *paid media*, *social media*, *endorsement* yang bertujuan untuk dapat menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk dapat meraup sebesar – besarnya pendapatan dari wisatawan tersebut. Disamping itu, pentingnya meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positip pariwisata daerah yang disertai identifikasi terhadap destinasi pariwisata melalui pendekatan segmen pasar personal, pasar bisnis dan pemerintah. Triatlon Sungailiat sebagai "wisata ciptaan" perlu dikemas secara khusus dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata Bangka yang mendunia. Sejatinya jumlah kunjungan wisatawan sebagai eksternalitas dari event tersebut telah menunjukkan *progress* yang cukup baik yakni dari 85 ribu orang di tahun 2018 menjadi 100 ribu orang di tahun 2019.

Gambar 3.6.
Arah Pembangunan dalam Mengatasi Rendahnya Akselerasi Sektor Pariwisata sebagai *Core Sector* Baru

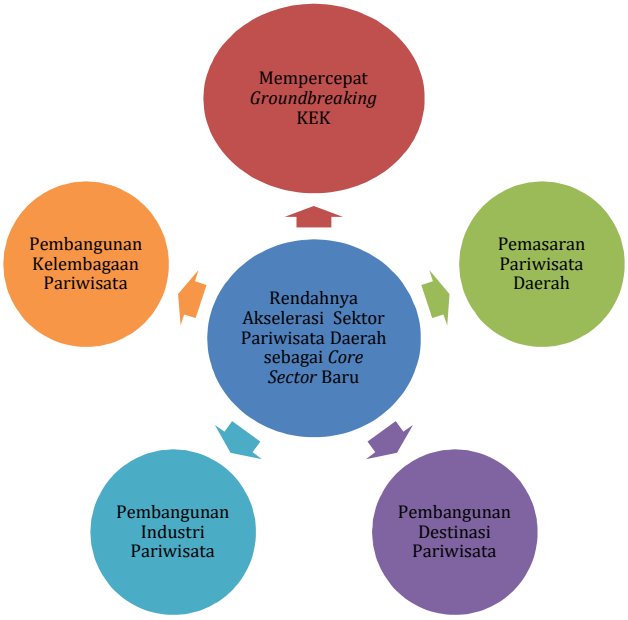

16) **Pembangunan Destinasi dan Industri Pariwisata** melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata dalam rangka menunjang daya saing pariwisata daerah. Pembangunan infrastruktur penunjang yang terintegrasi terutama terhadap destinasi wisata unggulan seperti Tanjung Pesona Beach, Parai Tenggiri Beach, Kebun Raya Rimbe Mambang dan Puri Tri Agung yang memiliki keunggulan komperatif terhadap daya dukung KEK Pantai Timur Sungailiat yang akan segera terealiasi pada tahun 2021. Pengembangan destinasi wisata seperti kuliner (nasi aruk), sejarah (situs kota kapur) dan religi (mandi belimau) dan wisata ekologi dan pertualangan (kebun raya mambang) melalui penguatan kelompok sadar wisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata dan menerapkan standar *green hotel* di zona pengembangan wisata bahari dan ekologi.

17) **Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.** Penguatan jaringan kelembagaan pariwisata yang telah ada terutama kelembagaan pariwisata di tingkat masyarakat menimbang embrio tersebut sudah lama terbentuk. Selain itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) akan mendorong pembangunan pariwisata ketitik yang lebih tinggi. BPPD yang terdiri dari elemen pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media *(pentahelix)* sangat mutlak diperlukan mengingat keberhasilan pariwisata tanpa adanya dukungan manajerial disisi kelembagaan akan sulit tercapai.

Pembangunan sektor pariwisata tentu saja harus dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan *spending of money* yang akan berdampak pada peningkatan kontribusi PDRB sektor pariwisata daerah. Apalagi ditengah ketidakpastian sekarang ini, sektor pariwisata dituntut untuk mampu beradaptasi di segala kondisi. Begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor ini. Penambahan jurusan pariwisata di jenjang sekolah menengah kejuruan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan dukungan beasiswa ke sekolah tinggi kepariwisataan menjadi bentuk komitmen daerah dalam menjawab tantangan dan permasalahan terkait sumber daya manusia.

Gambar 3.7.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi *Liberalisasi* Perdagangan Sektor Unggulan

18) **Merubah Struktur Pasar Oligopoli pada Komoditi Pertanian.** Munculnya fenomena pasar oligopoli pada komoditi pertanian terutama komiditas unggulan daerah (lada, karet, sawit, dan perikanan) menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) yang berdampak terhadap disparitas penguasaan sumber daya yang dapat menyebabkan pengaturan harga. *Price taker* seharusnya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (*supply* dan *demand*) bukan berdasarkan kesepakatan harga di tingkat penjual. Regulasi terkait perijinan usaha dan kemudahan investasi melalui PTSP akan mendorong partisipasi perusahan baru dan ikut dalam persaingan usaha yang berdampak pada perubahan struktur pasar menjadi lebih kompetetif (*clearing market*).

19) **Menghilangkan Fenomena *Principal Agent* pada Produk Pertanian.** Fenomena makelar, kartel dan pemilik modal menjadi penggerus utama tingkat pendapatan petani. Keterbatasan modal menyebabkan petani dan nelayan terpaksa melakukan pinjaman kepada kartel, makelar dan pemilik modal dengan perjanjian tertentu yang sangat merugikan petani dan nelayan. Harga penjualan produk pertanian dibawah harga normal kepada kreditur merupakan salah satu bentuk dampak perjanjian tertentu tersebut yang masih terjadi hingga sekarang. Pemberian sarana dan prasarana produksi, pemberian subsidi BBM pada nelayan dan pemberikan kredit usaha, pengutan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha secara linear akan mengurangi tingkat ketergantungan petani dan nelayan pada pihak-pihak tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Gambar 3.8.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Lemahnya Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan Usaha

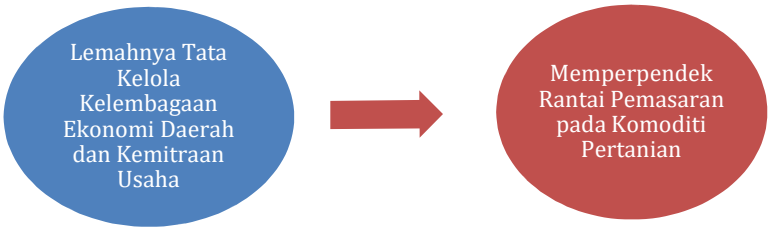

20) **Memperpendek rantai pemasaran pada komoditi pertanian.** Membangun kelembagaan ekonomi yang solid yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh petani melalui koperasi, BUMDes, Gapoktan dan lembaga keuangan mikro disertai dengan pengembangan usaha kemitraan guna memperlancar distribusi berbagai produk yang dihasilkan dalam rangka memperkuat posisi tawar sehingga rantai pemasaran nilai usaha sektor pertanian menjadi lebih maksimal yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani yang selama ini tingkat keuntungan kegiatan usaha tani lebih banyak dinikmati oleh pedagang dan pelaku usaha pertanian lainya. Panjang rantai pemasaran komoditas unggulan menyebabkan rendahnya margin harga yang diterima oleh petani yang dalam pemetaannya melalui 5 jalur distribusi barang hingga mencapai konsumen dan pasar.

21) **Memperkuat Kelembagaan Kelompok Petani.** Semakin ketatnya persaingan di bidang perekonomian dewasa ini menyebabkan pelaku usaha yang efisienlah yang akan memenangi persaingan. Perhimpunan antara kelompok petani dan pengusaha kecil yang sebagian besar mendominasi pelaku ekonomi di daerah diharapkan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar bagi tingkat kesejahteraan daerah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan kelompok petani, pengembangan jaringan kemitraan bisnis dan peningkatan daya saing.

22) **Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya, Penataan Ruang dan *Cluster*.** Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendorong

terjadinya pertumbuhan wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan pemetaan potensi wilayah berdasarkan sumber daya seperti karekteristik fisik, kependudukan dan ekonomi yang dapat dikembangkan di masing-masing wilayah. Identifikasi kedua dengan melakukan mapping sektok basis. Pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat dan Pemali difokuskan kepada pembangunan sektor industri, jasa-jasa, komunikasi dan administrasi pemerintahan, hiburan dan rekreasi. Sedangkan wilayah lainnya difokuskan kepada sektor air minum (Merawang), Kehutanan (Belinyu), Mendo Barat (Tanaman Pangan), Riau Silip (kehutanan), Bakam (Tanaman Pangan) dan Puding Besar (Perkebunan). Dalam dimensi spasial, kebijakan pengembangan daerah tersebut tetap memperhatikan pola tata ruang.

Gambar 3.9.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rapuhnya Keterkaitan antar Sektor Perekonomian

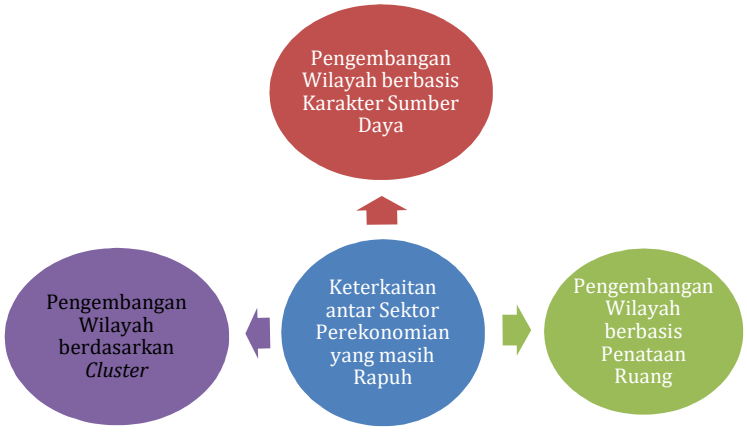

23) **Stimulus Fiskal untuk Sektor Pertanian dan UMKM**. Pengembangan kapasitas industri dan produksi sektor pertanian dan UMKM melalui penjaminan mikro kredit melalui JAMKRIDA, skema mikro kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan melalui BPRS Babel, subsidi pupuk untuk petani dan BBM untuk nelayan melalui APBD dan bantuan yang tidak dalam bentuk fiskal antara lain bantuan bibit tanaman, ikan dan bantuan sarana produksi untuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Gambar 3.10.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Keterbatasan Daya Dukung Pembiayaan Jangka Panjang

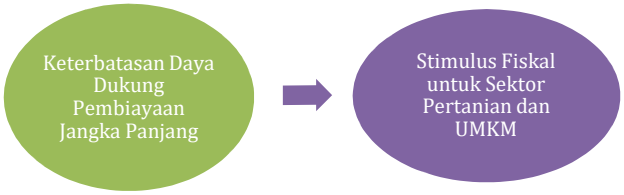

24) **Pemanfaatan Resi Gudang bagi Petani.** Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku produksi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pembangunan sektor komoditas pertanian dan perkebunan. Sistem pemberdayaan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik yang dihadapi oleh petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi sentral dan langsung bagi perkembangan perekonomian daerah. Kemampuan daya tawar petani yang tinggi terhadap hasil pertaniannya dan kemudahan akses permodalan akan mendorong transformasi petani menjadi petani mandiri.

25) **Mendorong Peran Pemerintah Desa dalam Perekonomian**. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.

Gambar 3.11.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rentannya Landasan Perekonomian Pedesaan

26) **Desentralisasi Kewenangan Perijinan Tertentu kepada Kecamatan**. Otorisasi tersebut melalui pelimpahan kewenangan perijinan skala kecil ke kecamatan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka meningkatkan kualitas dan dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan citra positip dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Gambar 3.12.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Kompleksitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

27) **Penguatan Lembaga Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Modal**. Menata kelembagaan pemerintah daerah bidang pelayanan perijinan dan pelayanan modal dari kantor menjadi badan termasuk pendelegasian seluruh urusan perijinan dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang

lebih baik, melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan penyederhanaan aturan (simplifikasi regulasi) yang menghambat akselerasi pembangunan terkait pelayanan perijinan dan pelayanan modal.

28) **Proteksi Input dan Ouput Produksi.** Proses transformasi input produksi menjadi output produksi menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas produksi dalam rangka menjaga momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk proteksi dilakukan melalui kestabilan harga bahan baku komoditas ungulan daerah (lada, karet, sawit, perikanan dan bijih timah), menjamin ketersediaan dan distribusi bahan baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, proteksi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (*value added*), penentuan harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, memperkuat regulasi perizinan, investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran produk melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Gambar 3.13.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Sulitnya Menjaga Permintaan dan Penawaran Barang

29) **Menjaga Inflasi Daerah.** Stabilitas harga dilakukanmelalui kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi sisi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) melalui kebijakan menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar kelompok bahan makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam koridor UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan efisiensi pengeluaran belanja

pemerintah terutama terhadap program dan kegiatan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan komperatif serta memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada UMKM yang bergerak sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, perikanan, industri dan pariwisata).

30) **Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Perekonomian antar Daerah.** Menimbang krusialnya peran pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang mensinergikan arah kebijakan ekonomi antar daerah dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait dengan perekonomian daerah sekaligus menghasilkan arah kebijakan yang bersifar strategis bagi kepentingan daerah. Diharapkan, koordinasi ini mampu mendorong wadah ini juga mampu mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi daerah, peningkatan ekspor, dan percepatan program hilirnisasi industri.

Gambar 3.14.
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Inkonsistensi Komitmen Kerjasama Antar Daerah

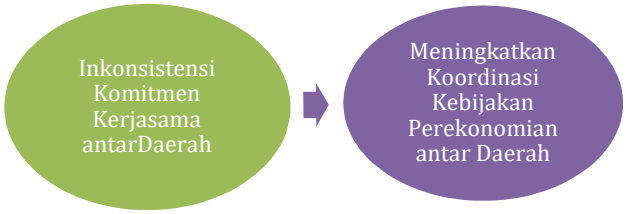

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID 19, Pemkab Bangka memformulasikan beberapa kebijakan strategis dalam ***frame* kebijakan sensitif** yakni :

Gambar 3.15.
***Frame* Kebijakan Sensitif Pasca COVID 19**

1) **Memperkuat sektor kesehatan mulai dari level pemerintahan terkecil.** Penguatan sektor kesehatan ini sangat urgen untuk dilaksanakan menimbang hingga saat ini vaksin COVID 19 belum ditemukan dan masih dalam proses uji coba. Kondisi ini diperkuat dengan penjelasan *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia yang memprediksi bahwa vaksin COVID 19 paling lambat ditemukan dan diproduksi secara massal pada bulan Agustus tahun 2021 atau 18 bulan. Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui : i) peningkatan perilaku sehat dan *physical* dan *social distancing* dengan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh lini masyarakat dari perkotaan sampai ke perdesaan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media; ii) pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan lab); dan iii) pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD), alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk penangangan pasien.

2) **Memperkuat Sistem Jaring Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi.** COVID 19 secara dalam waktu relatif singkat ternyata telah menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan sangat cepat dan dalam. Kebijakan Sistem Jaring Pengaman Sosial ini merupakan salah satu bentuk transformasi struktural akibat masifnya perubahan tatanan yang sedang terjadi saat ini. Sistem yang dibangun tersebut merupakan kompilasi dari berbagai macam bentuk varian produk kesejahteraan sosial baik dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan sebagainya, pemerintah daerah berupa SEMARI (Sedekah Lima Ratus Sehari), Bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun elemen pembangunan diluar pemerintah (BAZ, CSR maupun bantuan masyarakat/komunitas dan individu) yang dilakukan dengan pendekatan *"the-one stop integrated"* yang dikoordinir langsung oleh Bupati melalui Kelompok Kerja (Pokja) sehingga nantinya setiap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dapat betul - betul tepat sasaran dan tepat guna dengan berbasis web dan data yang valid dan *realible*.

Gambar 3.16.
Skenario Dampak Bantuan dan Jaminan Sosial Pasca COVID 19

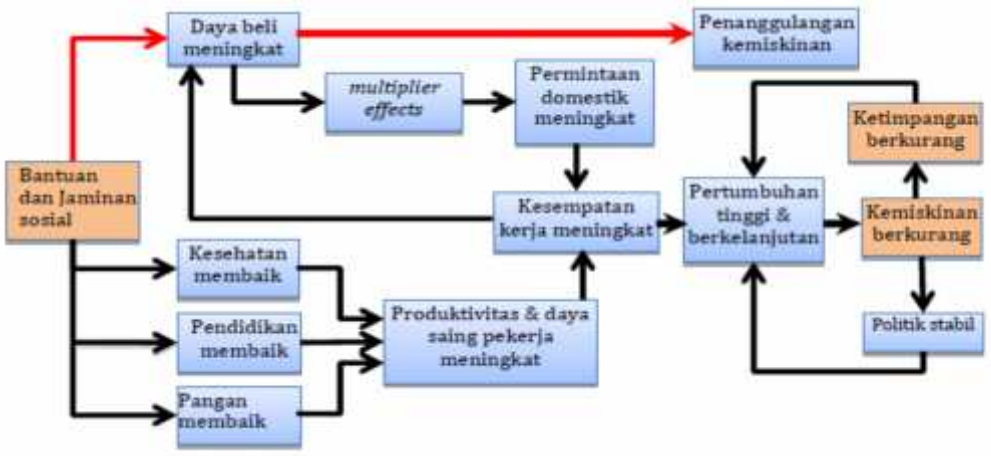

Sumber : Bappenas, 2014

3) **Membentuk Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah (KPPED)** yang langsung dibawah koordinasi Bupati dengan melalui pendekatan *pentahelic* dengan melibatkan pihak pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, akademisi dan media. KPPED ini akan menjadi *leading sector* dalam hal merumuskan kebijakan ekonomi daerah, stimulus fiskal, relaksasi, permodalan dan lainnya sehingga ego sektoral antar entitas daerah dapat diminalisir dan dapat diputuskan oleh secara langsung oleh Bupati.

4) **Mendorong pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19 melalui pemberian pinjaman daerah** dengan mekanisme tanpa bunga dan angunan terutama diperuntukkan bagi sektor usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian Kabupaten. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Daerah. Menurut data Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 81,99% dari jumlah pelaku usaha di Bangka. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 200 ribu pekerja atau 77% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah (PDRB) sebesar 60-70% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar.Dari data di atas, Kabupaten Bangka mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten

mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Pemberian Akses modal tanpa agunan dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh Pemkab Bangka. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan meminimalisir terjadinya kredit macet (*Non Performing Loan)* atas pinjaman daerah, baik aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan dan efektivitas pengendalian intern maka dalam kerjasama tersebut diatur mengenai prosedur pemberian kredit sampai dengan penagihan pinjaman akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank sedangkan Pemda hanya memfasilitasi data informasi terkait status perizinan usaha, omzet, produk dan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan IKM.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah)

URAIAN	REALISASI		PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah :	**154.706.004**	**144.668.129**	**150.001.535**	**156.766.612**	**162.604.943**
Pajak Daerah	58.038.326	59.371.242	60.439.804	62.661.794	65.794.884
Retribusi Daerah	12.204.811	10.378.099	10.897.004	11.614.854	13.195.597
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	5.597.008	5.078.295	5.332.210	5.589.820	6.869.311
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.865.859	69.840.493	73.332.518	76.900.144	76.745.151
Dana Perimbangan :	**840.716.171**	**853.236.403**	**868.898.223**	**1.241.969.462**	**1.276.515.291**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	82.069.017	137.316.932	144.182.779	134.391.918	139.111.513
Dana Alokasi Umum (DAU)	552.528.401	552.780.809	553.419.849	554.190.842	558.900.384
Dana Alokasi Khusus (DAK)	206.118.753	163.138.662	171.295.595	553.386.702	578.503.394

URAIAN	REALISASI		PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022
Lain-Lain Pendapatan DaerahYang Sah :	**259.714.369**	**260.953.844**	**209.380.588**	**235.665.284**	**244.208.381**
Pendapatan Hibah	-	38.781.855	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.579.927	72.958.179	74.606.088	78.336.392	81.253.212
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.736.077	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54.534.069	29.785.820	31.275.111	31.838.867	34.330.810
Dana Desa	57.109.027	59.701.593	62.686.673	62.686.673	65.821.006
Dana Insentif Daerah	23.755.270	59.726.397	40.812.717	62.803.353	62.803.353
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.255.136.544**	**1.258.858.376**	**1.228.280.347**	**1.634.401.358**	**1.683.328.615**

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2020

Berdasarkan pada proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka penerimaan pendapatan daerah diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 1,26 triliun rupiah,-, maka pada tahun 2020 diproyeksikan turun menjadi 1,23 triliun rupiah sebagai akibat menurunnya pendapatan negara yang dibagihasilkan yang berpengaruh terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, namun seiring dengan optimisme meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian global maka pada tahun 2021, diperkirakan pendapatan daerah justru mencapai 1,63 triliun rupiah dan pada tahun 2022 diperkirakan meningkat menjadi 1,68 triliun rupiah.

Kemampuan penerimaan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan sangat berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan cerminan dari penerimaan pendapatan daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut berasal dari beberapa komponen sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagaimana tabel 3.10. diatas.

1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 diproyeksikan sebesar 156,77 milyar rupiah, diperkirakan pada tahun 2022 meningkat

menjadi sebesar 162,61 milyar rupiah. PAD tahun 2021 diproyeksikan berasal dari :

- Pajak Daerah diperkirakan sebesar 62,7 milyar rupiah;
- Retribusi Daerah diperkirakan sebesar 11,6 milyar rupiah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan sebesar 5,6 milyar rupiah;
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar 76,9 milyar rupiah.

2) Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2021 diproyeksikan mengalami sedikit penurunan yang cukup signifikan yakni hanya sebesar 1,24 triliun rupiah atau turun sebesar 42,94 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang justru mencapai 868,9 milyar rupiah yang berasal dari :
   - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di perkirakan sebesar 134,4 milyar rupiah;
   - Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan sebesar 554,2 milyar rupiah;
   - Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan sebesar 553,4 milyar rupiah;
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 diproyeksikan mencapai 235,7 milyar rupiah yang terdiri dari :
   - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diperkirakan sebesar 78,3 milyar rupiah;
   - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperkirakan sebesar 31,8 milyar rupiah;
   - Dana Desa diperkirakan sama seperti tahun sebelumnya yakni sebesar 62,7 milyar rupiah;
   - Dana Insentif Daerah diperkirakan sebesar 62,8 milyar rupiah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2021 di fokuskan adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang Memiliki Keunggulan Komperatif dan Kompetitif.

Pilihan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melihat pendapatan daerah yang memang memiliki nilai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, memiliki efek pengganda yang besar bagi pendapatan daerah dan dipastikan memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi pendapatan daerah merupakan upaya peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: penyempurnaan administrasi pajak/retribusi, peningkatan mutu pegawai dan petugas pungut, serta penyempurnaan regulasi pajak/retribusi.

Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki administrasi pajak, mempermudah pembayaran pajak melalui e-banking, membuka payment point Bank Sumsel Babel di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka,

pembayaran pajak dan retribusi melalui mekanisme non tunai, pembayaran IMB melalui Kecamatan melalui program PATEN, memperbanyak dan meningkatkan kualitas petugas pungut, dan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Ekstensifikasi pendapatan merupakan upaya memperluassubyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara : perluasan wajib pajak/retribusi, penyempurnaan tarif, dan perluasan objek pajak/retribusi.

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang tarif PAD yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan PBB. Peninjauan ulang dan rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan PAD yang berasal pajak daerah. Selanjutnya untuk retribusi daerah dilakukan dengan cara penyesuaian tarif pada retribusi pelayanan kesehatan umum, retribusi pelayanan sampah, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi IMB dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu juga dengan memperluas wajib pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi.

Diversifikasi Pendapatan adalah upaya untuk memperbanyak sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan antara lain melalui peningkatan target dividen dari Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah Bangka, meningkatkan kontribusi asset yang dikerjasamakan dan penjualan asset lainnya. Selain itu juga dengan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah

secara terintegrasi berbasis elektronik (*e-mapping, smart-mapping, e-filling, e-registration, e-payment dan e-councelling,* sistem informasi zonasi harga tanah).

(3) Meningkatkan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah. Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan dana perimbangan dan Dana Bantuan dari Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten Bangka.

(4) Melakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap seluruh pemanfaatan asset daerah (Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) terutama terkait Kerjasama Pemanfaatan dan KSPI antara lain melalui kerjasama dengan PT. Eljhon Parai Indah Hotel, PT. Rambang Jaya Semesta, Yayasan Eljhon Indonesia, PT. Dreamland Prorety dan beberapa badan usaha yang kompeten.

(5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Bangka agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah antara lain melalui deviden dari Bank Sumsel Babel, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, PT. Jaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida), Bank Rakyat Indonesia dan PD. Agro Alam Lestari.

(6) Optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan aset-aset daerah, melalui kerjasama penggunaan aset Pemda dan penjualan aset lainnya.

(7) Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan memberikan *reward* kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target. Upaya ini dilakukan melalui pemasangan *banner* terhadap objek pajak/retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu untuk meningkatkan pembayaran IMB maka dilakukan program pemutihan IMB.

2) Mengakusisi Kepemilikan Saham PT. Timah Tbk untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Secara historis, Kepulauan Bangka Belitung telah dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di dunia yang telah dilakukan semenjak abad ke – 7 yang lampau. Eksplorasi pertambangan yang dilakukan secara masif tersebut, tentu saja menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai katalisator utama penggerak perekonomian daerah sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Namun tragisnya, sektor unggulan ini memiliki keterbatasan dan akan habis pada suatu waktu, sehingga perlu dilakukan transformasi ekonomi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata.

Kebijakan ini dilakukan dengan mengajukan permintaan atas kepemilikan saham PT. Timah Tbk terhadap komposisi saham yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selama ini daerah hanya mendapat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan royalti atas ekspor bijih timah. Kepemilikan saham ini diharapkan mampu mendorong penerimaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan Daerah.

Kebijakan ini dilakukan dengan menderegulasi perda-perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang kemandirian fiskal sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh objek

Pendapatan Asli Daerah diperoleh beberapa objek PAD yang memang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif dibandingkan objek PAD lainnya yakni (1) lain-lain PAD yang sah; dan (2) pajak daerah.

4) Relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah bagi Masyarakat yang terdampak COVID 19.

Beberapa upaya penting yang dilakukan dalam menjaga daya beli masyarakat antara lain :

1) Relaksasi pajak daerah antara lain pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan PBB perdesaan.
2) Relaksasi retribusi jasa usaha yang banyak melibatkan UMKM.
3) Relaksasi retribusi perizinan tertentu.

5) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer daerah adalah sebagai berikut:

1) Memperbaiki kinerja pemerintahan dibidang – bidang pemerintah yang menjadi formula pengalokasian Dana Insentif Daerah yang dibagi menjadi 4 kategori kinerja utama yaitu i) pengelolaan keuangan meliputi aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; ii) pelayanan pemerintahan umum meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi; iii) pelayanan dasar publik meliputi pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, dan iv) kesejahteraan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya formula pengalokasian Dana Insentif Daerah tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 3.17.
Formulasi Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)

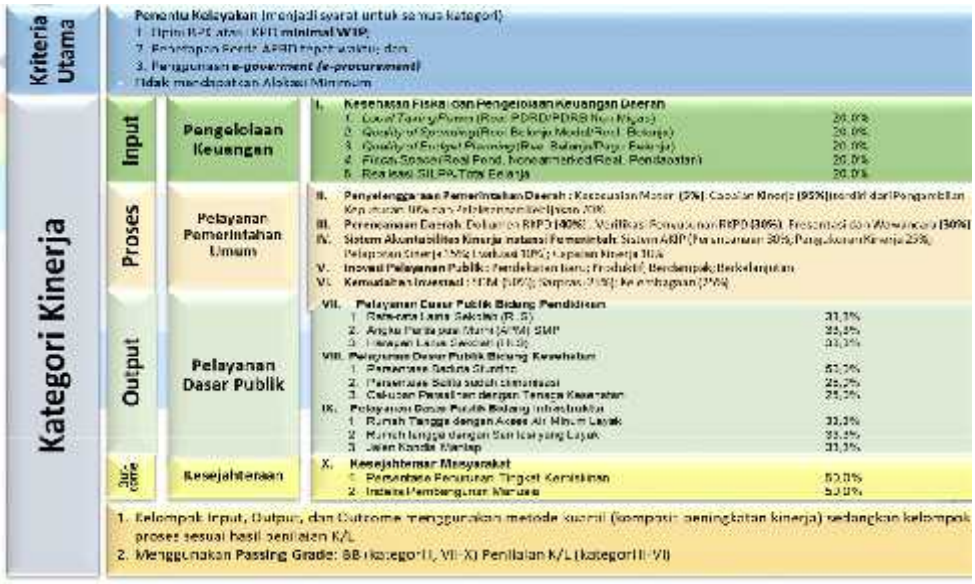

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2020

2) Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan DAU dan DAK.
3) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data wajib pajak baik orang pribadi maupun badan pasca amnesti pajak terutama adanya penambahan wajib pajak baru yang akan berimbas positip bagi daerah pada masa mendatang.
4) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan produksi perusahaan pertambangan dan migas.
5) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi pertambangan, *land rent* dan industri timah.
6) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi perikanan dan kehutanan.
7) Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu.
8) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan.
9) Mengingkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1) **Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta arahan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023 dan pasca COVID 19 melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menyasar pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yakni (1) pembangunan SDM; (2) pemulihan ekonomi, (3) pemerataan kesejahteraan; (4) pengembangan industri pariwisata; (5) infrastruktur; (6) lingkungan hidup; dan (7) reformasi birokrasi.
2) **Memprioritaskan alokasi dana hibah** terutama untuk mencapai sasaran pembangunan manusia khususnya kepada lembaga – lembaga yang secara langsung membantu capaian kinerja pemerinatah daerah seperti MUI, PMI, KONI, BAZNAS, Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, BOS tingkat SD/SMP swasta, insentif guru TK, guru PAUD serta beberapa lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
3) **Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.**

   Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

   Alokasi belanja pembangunan kesehatan dititikberatkan pada berbagai upaya perbaikan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi melalui penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup tahun 2021 dan pencapaian keseluruhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Gambar 3.18.
Arah Kebijakan Belanja Langsung
Dimensi Pembangunan Manusia

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan perumahan disamping berorientasi pada prioritas nasional, juga melaksanakan prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni. Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia tersaji pada Gambar 3.18.

4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.

Belanja pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana produksi.

Pembangunan pariwisata diarahkan kepada usaha lokal dalam industri pariwisata daerah disamping melalui event-event pariwisata dan budaya, yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata daerah hingga level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri diprioritaskan pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang memadai terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri daerah. Informasi arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pembangunan sektor unggulan tersaji pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19.
Arah Kebijakan Belanja Langsung
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

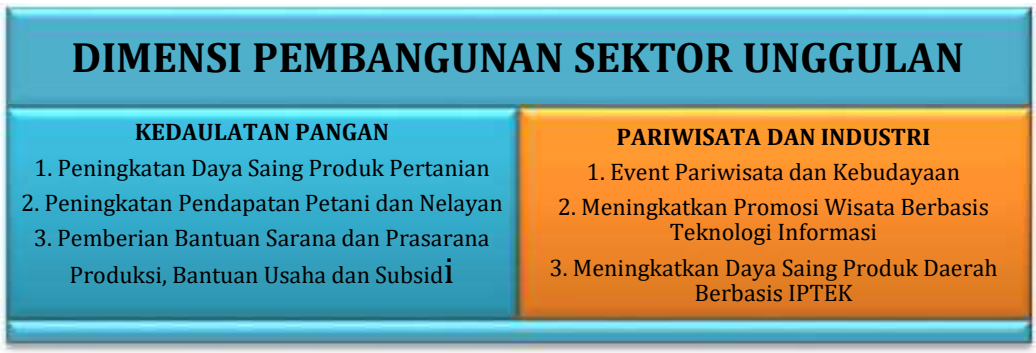

5) **Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan.** Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan klaster keempat program pro rakyat.

Gambar 3.20.
Arah Kebijakan Belanja Langsung

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan menjadi sangat penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada koridor-korodor utama perekonomian kecamatan.

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan tersaji pada Gambar 3.20.

4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi.

Belanja tata kelola dan reformasi birokrasi sendiri ditujukan pada 3 (tiga) klaster yakni: i) sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu menghasilkan menjadi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; ii) pengawasan yang difokuskan pada pemerintahan yang bersih (*clean*

government) dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan iii) kluster akuntabilitas yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, mendorong setiap entitas akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus mendukung *one agency one innovation.* Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang berkesinambungan meliputi pengembangan sistem informasi infrastruktur, sistem informasi kemiskinan terintegrasi Kabupaten Bangka, sistem pajak online, arisan jamban, kartu Bangka Cerdas, madjlis sabtu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), nasi aruk dalam APBD, kerjasama POLMAN mesin beras aruk, kebun kelapa sawit rakyat, kultur jaringan lada ex-vitro, enam pilar jambanisasi (Pemda, Pemdes, TNI, Perguruan Tinggi, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan masyarakat), kelas unggulan tiap tingkat sekolah per kecamatan, kebun karet rakyat, kebun singkong rakyat, Pelayanan Terpagu (PATEN) seluruh kecamatan, kerjasama Universitas Bangka Belitung terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar, Raskin gratis, SPGDT berbasis android, kebun raya Dalil dan kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam rangka pengembangan SDM bidang pertanahan.

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi tersaji pada Gambar 3.21.

Gambar 3.21.
Arah Kebijakan Belanja Langsung
Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

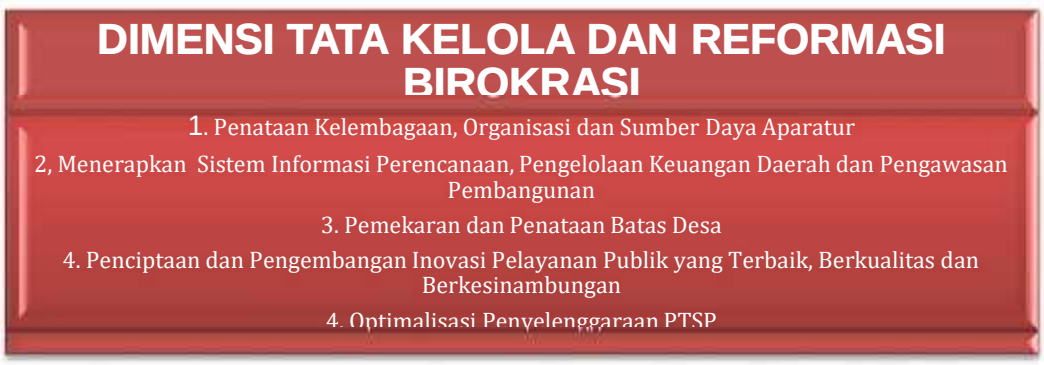

5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana lainnya.

Gambar 3.22.
Arah Kebijakan Belanja Langsung
Dimensi Berwawasan Lingkungan

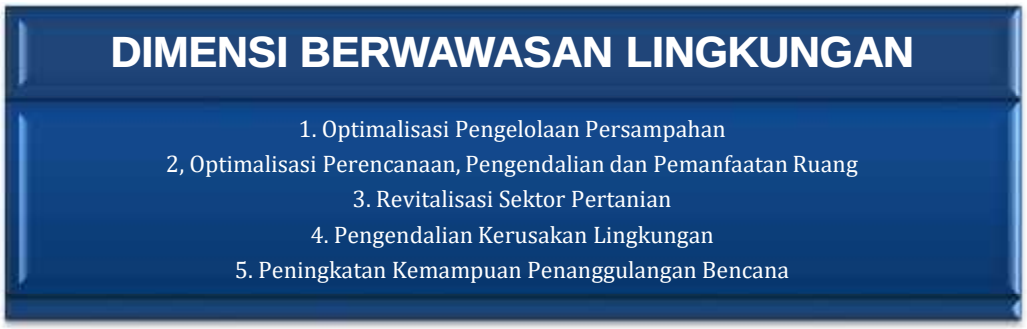

Oleh karena itu, substansi program aksi bidang ini mencakupi optimalisasi pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana. Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi berwawasan lingkungan tersaji pada Gambar 3.22.

6) Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

Kebijakan ini terkait dengan pembangunan yang *pro poor, pro job, pro growth,* dan *pro environment.* Tingginya proprosi belanja langsung tersebut diarahkan prioritas pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2021 yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

7) Mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.

8) **Memberikan Stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi akibat pandemi COVID 19.**

Memprioritaskan penggunaan anggaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan jaring pengaman sosial dengan skema *co sharing* APBN untuk masyarakat miskin dan APBD untuk mengintervensi masyarakat yang rentan miskin, memberikan insentif bagi keluarga miskin dan rentan miskin, mengaktifkan kembali Jaminan Kesehatan Daerah Sepintu Sedulang dan memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022 tersaji pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.

Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah)

BELANJA	REALISASI		PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tidak Langsung	**625.548.864**	**602.088.524**	**625.042.951**	**632.870.884**	**664.514.429**
Belanja Pegawai	445.854.866	432.395.470	448.015.244	451.009.292	473.559.757
Belanja Subsidi	350.700	-	350.000	350.000	367.500
Belanja Hibah	52.821.558	30.305.312	31.820.578	33.411.607	35.082.187
Belanja Bantuan Sosial	1.733.546	3.129.661	3.286.144	3.450.451	3.622.974
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	6.361.795	9.275.340	10.739.107	11.276.062	11.839.865
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	115.902.649	126.982.741	128.331.878	130.748.472	137.285.895
Belanja Tidak Terduga	2.523.750	-	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Belanja Langsung	**633.362.163**	**640.490.822**	**639.515.950**	**1.049.257.101**	**1.075.591.335**
Belanja Pegawai	125.963.107	126.115.369	127.421.724	128.792.810	129.232.451
Belanja Barang dan Jasa	289.576.105	324.709.441	306.944.913	396.818.486	415.406.767
Belanja Modal	217.822.951	189.666.012	205.149.313	523.645.805	530.952.118
Total	**1.258.911.027**	**1.242.579.346**	**1.264.558.901**	**1.682.127.985**	**1.740.105.763**

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2020

Kemampuan belanja daerah tahun 2021 akan mengalami peningkatan menjadi 1,68 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,27 triliun rupiah. Proyeksi belanja yang demikian apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan sebagaimana diatas maka terdapat defisit penyediaan dana (penerimaan kurang). Kondisi yang demikian diproyeksikan akan ditutup dari pos pembiayaan netto yakni sebesar 47,73 milyar rupiah,-.

Mengingat terbatasnya anggaran, maka diperlukan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 yang diproyeksikan membutuhkan dana belanja langsung sebesar 1,05 triliun rupiah,- dan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar 632,87 milyar rupiah.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2021 diarahkan pada :

1) Meningkatkan akses pembiayaan permodalan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) dan Bank Sumsel Babel.
2) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
3) Meningkatkan proporsi pinjaman daerah sebagai upaya pemerintah daerah untuk menggerakan perekonomian daerah melalui pengembangan usaha sektor unggulan seperti Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR), Kebun Singkong Rakyat (KSR), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE).
4) Meningkatkan proporsi pinjaman daerah tanpa bunga dan jaminan/angunan untuk Industi Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak akibat penyebaran COVID 19 .
5) Upaya untuk menutup difisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
6) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah;
7) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Selengkapnya pagu dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 – 2022 tersaji pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Pagu dan Proyeksi Pembiayaah Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2018 s/d 2022 (ribuan rupiah)

PEMBIAYAAN	REALISASI		PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Pembiayaan	**37.749.642**	**114.114.844**	**37.778.554**	**49.726.627**	**56.777.149**
SILPA TA. Tahun Sebelumnya	37.749.642	113.604.901	37.268.611	49.216.684	56.777.149

PEMBIAYAAN	REALISASI		PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Daerah	-	509.943	509.943	509.943	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**1.350.000**	**-**	**1.500.000**	**2.000.000**	**-**
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	1.500.000	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.350.000	-	-	2.000.000	-
Pembiayaan Netto	**36.399.642**	**114.114.844**	**36.278.554**	**47.726.627**	**56.777.149**

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2020

Pada Tabel 3.12, dari sisi penerimaan pembiayaan, untuk tahun anggaran 2021, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar 49,73 milyar rupiah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 37,27 milyar rupiah dengan penerimaan kembali pemberian daerah diprediksi sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 509,94 juta rupiah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 diarahkan dengan mensinkronkan dan mengintegrasikan seluruh dokumen strategis perencanaan daerah Kabupaten Bangka serta dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dokumen perencanaan nasional tahun 2021 serta isu-isu krusial pembangunan yang harus segera ditangani yang menjadi isu prioritas di tingkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan yang telah disusun dapat mewujudkan visi jangka panjang dan menengah yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Bangka serta RPJP Nasional 2005-2025. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tema, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021 sebagai berikut :

4.1 Tema Pembangunan Daerah

Pada tahun 2019-2020, kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka dibayangi oleh ketidakpastian. Penyebaran wabah Covid -19 telah melanda ke berbagai negara di dunia termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Terjadinya kasus Covid-19 pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi *(confirmed cases)* maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah dan pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian daerah dan berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Keseluruhan ini menuntut percepatan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah Kabupaten Bangka serta peningkatan ketahanan dan daya saing perekonomian baik di tingkat regional, global maupun di dalam negeri. Dalam pada itu, percepatan pemulihan pembangunan ekonomi diharapkan mendorong harapan yang besar terhadap

peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi.

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran untuk menentukan arah pembangunan pemerinah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka masih menghadapi persoalan dan tantangan pembangunan terkait isu-isu di tingkat daerah, provinsi, nasional bahkan internasional. Isu-isu yang bersifat strategis harus direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah.

Tema pembangunan dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka tahun 2021 disusun dengan menggunakan prinsip efisiensi, efektifitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Secara tematik, penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2021 didasarkan dengan memperhatikan beberapa sasaran pembangunan pada tingkat regional, nasional dan global yang tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan meliputi (lihat Gambar 4.1):

(1) Isu dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
(2) Ekonomi Hijau *(Green Economy)*
(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
(4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021
(5) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
(6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daaerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025
(7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
(8) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

(9) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2025

(10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

(11) Dokumen Ketataruangan Kabupaten Bangka

(12) Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka

Dengan demikian, tema pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021 didasarkan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sesuai dengan RPJPN 2005-2025 diketahui bahwa sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki tema:

" Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan "

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

Gambar 4.2
Empat Pilar Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 4.3
Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Kerangka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN ke-4 difokuskan pada pembangunan manusia sebagaimana Gambar 4.4 berikut:

Gambar 4.4
Kerangka Pembangunan Tahun 2021RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas (2019)

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Tema pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2021 mengacu pada tema yang akan dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan **tahun kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2020. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tema Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah:

"Percepatan Pembangunan dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh SDM Berkualitas dan Berdaya Saing".

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di berbagai negara dan melihat sangat besarnya dampak dan resiko akibat serangan Covid 19 tersebut secara sosial dan ekonomi maka pada Bulan Maret tahun 2020 Covid 19 telah ditetapkan sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Penetapan Pandemi dikarenakan penyakit ini menyebar ke banyak orang di berberapa negara dalam waktu yang bersamaan dengan pertambahan kasus penyebaran yang siginifikan dan berkelanjutan secara global.

Sebagai respon terkait hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang **Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem**

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam rangka mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, serta telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 tentang **Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid 19)* Sebagai Bencana Nasional**. Ketiga regulasi ini mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan dan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*) dan Pemulihan Perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam Sektor Keuangan. Karenanya arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2021 akan masih dititikberatkan untuk medukung pemulihan pasca pandemi Covid 19 sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang di atas. Dengan demikian Tema RKP Tahun 2021 mengalami pemutahiran menyesuaikan dengan kondisi menjadi :

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"

3. **RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022**.

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"**. Pada periode ini pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki

sasaran yaitu menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta mengupayakan pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Peningkatanperekonomian daerah dicapai melalui pemberian nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Sementara itu, pengembangan kapasitas dan kualitas SDM dilakukan dengan pendekatan perbaikan mental dan pemanfaatan pengembangan teknologi.

Perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dimana setiap tahun telah ditetapkan tema prioritas. Memasuki Tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berada pada tahap ke empat perencanaan lima tahunan. Dalam lima tahun ke 4 ini Provinsi menitikberatkan pada tema prioritas yaitu **"Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah"** (lihat Gambar 4.5).

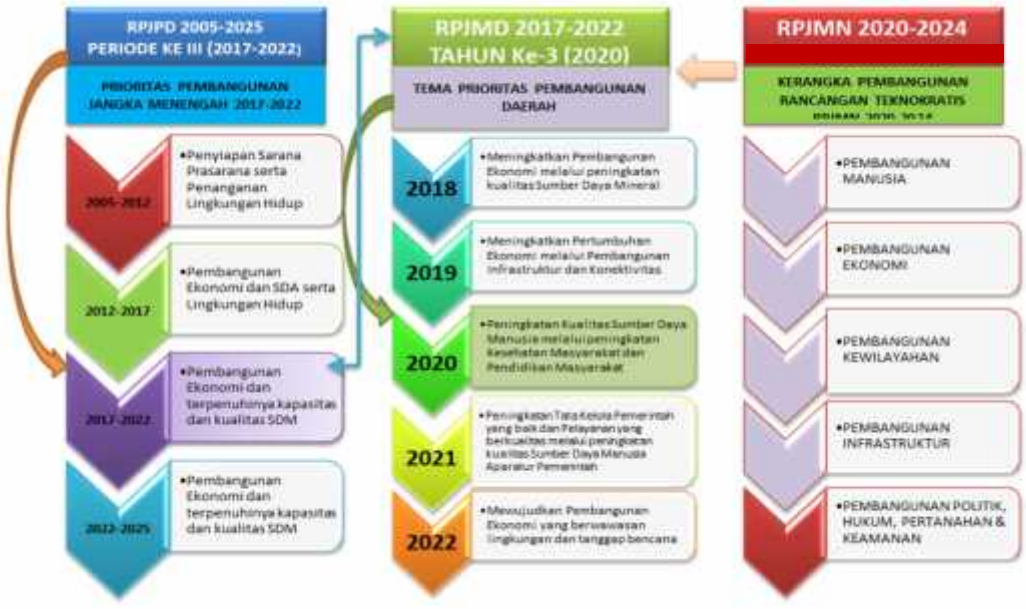

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah (2019)

Gambar 4.5
Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Namun, dalam perkembangannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang melakukan Perubahan atas Dokumen Perencanaan RPJMD yang sedang dalam proses. Berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 tema rencana pembangunan Provinsi adalah:

"PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH"

Sebagai respon kebijakan menghadapi Covid 19 di tahun 2021 selaras dengan RKP Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemutahiran tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021. Sehingga Tema RKPD Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

4. Posisi RKPD dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.

Sesuai dalam tahapan pembangunan jangka panjang, pada tahun 2021 Kabupaten Bangka memasuki tahun pertama periode tahun 2021-2025 (Tahap Pembangunan Lima Tahun Keempat). Tahap ke empat adalah tahap penguatan sektor ekonomi khususnya industri dan perdagangan yang telah dimulai sejak pembangunan lima tahun tahap pertama. Penguatan ini dilakukan denganmemperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional. Salah satu upaya memperluas akses tersebut adalah upaya memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka seperti pelabuhan laut, jalan antar kecamatan, listrik, dan air bersih.

Tabel 4.1
Urutan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Berdasarkan RPJPD 2015-2025

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN	PRIORITAS
Tahap Pembangunan Lima Tahun Pertama	1. Pengembangan SDM dan Lingkungan Hidup 2. Pengembangan Ekonomi 3. Prasarana dan Sarana 4. Kesejahteraan Sosial 5. Tata Pemerintahan
Tahap Pembangunan Lima Tahun Kedua	1. Pengembangan SDM dan Lingkungan Hidup 2. Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 3. Prasarana dan Sarana 4. Tata Pemerintahan
Tahap Pembangunan Lima Tahun Ketiga	1. Pengembangan SDM; Lingkungan Hidup; 2. Pengembangan Ekonomi 3. Kesejahteraan Sosial 4. Prasarana dan Sarana; 5. Tata – Pemerintahan
Tahap Pembangunan Lima Tahun **Keempat**	1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan Ekonomi 3. Kesejahteraan Sosial 4. Prasarana dan Sarana

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN	PRIORITAS
	5. Kesejahteraan Sosial 6. Tata Pemerintahan 7. Pengembangan Lingkungan Hidup

Sumber: Data primer, diolah dari RPJPD Kabupaten Bangka (2005-2025)

Gambar 4.6
Posisi RKPD 2021 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025

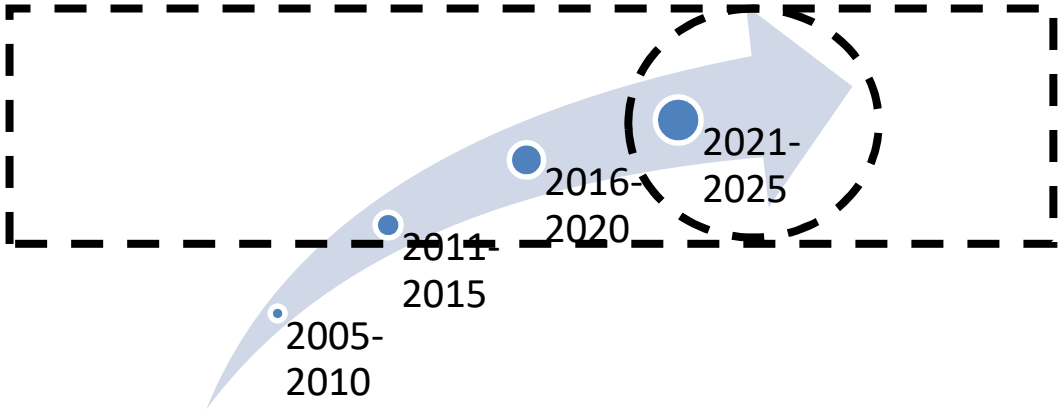

Di samping itu, keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang tertinggal sebagai dampak negatif dari pembangunan itu sendiri harus lebih dijadikan prioritas pembangunan pada pembangunan lima tahunan keempat ini. Pemberdayaan masyarakat dan desa tertinggal ini akan menjadi prioritas dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.2.
Urutan Prioritas Pembangunan Daerah, 2005-2025

BIDANG	TAHAP PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN			
	TAHAP I (2005-2010)	TAHAP II (2011-2015)	TAHAP III (2016-2020)	TAHAP IV (2021-2025)
SARANA & PRASARANA	3	2	5	5
LINGKUNGAN HIDUP	2	4	6	6
EKONOMI	1	1	1	1
KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	5	3	2
PEMERINTAHAN	6	6	4	4
PENGEMBANGAN SDM	4	3	2	3

Sumber: RPJPD Kabupaten Bangka 2015-2025

Pada tahap pembangunan lima tahun keempat (2021-2025), bidang perekonomian masih dijadikan prioritas. Proses transformasi ekonomi menuju pembangunan industri klaster yang mendukung strategi pengembangan industri nasional dan perdagangan berdasarkan konsep agropolitan serta pariwisata diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai motor pertumbuhan (*engine of growth*) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan akan mendorong terjadinya transformasi kesejahteraan sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera. Perhatian terhadap kesehatan, pendidikan dalam rangka peningkatan SDM masih tetap menjadi prioritas. Bidang pemerintahan ditekankan pada upaya melakukan reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi, meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan.

Di samping itu, keberpihakan pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur terhadap wilayah kecamatan yang tertinggal sebagai dampak negatif dari pembangunan itu sendiri harus lebih dijadikan prioritas pembangunan pada pembangunan lima tahunan keempat ini. Pemberdayaan masyarakat dan desa tertinggal akan menjadi prioritas dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Posisi RKPD dalam Tata Ruang

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan bagian dari periode tahan II (2016-2020) pembangunan spasial. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 2012-2032 menitikberatkan pada upaya mengimplementasikan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah,

Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis yang diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis kabupaten termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah.

Sebagai perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan serta penetapan beberapa Kawasan Strategis di Kabupaten sebagai kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yaitu Kawasan Industri Jelitik dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Teluk Kelabat. Dan sebagai perwujudan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap pembangunan perdesaan, telah disusun rencanaan pembangunan kawasan perdesaan.

6. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.**

   Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan periode 2019-2023. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 telah ditetapkan pentahapan tematik tahunan yang akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah tematik kebijakan tahunan.

   Visi pembangunan Kabupaten Bangka dalam RPJMD tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

   “BANGKA SETARA”

   Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di

Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

7. Isu strategis dan permasalahan Dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Beberapa isu yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 terus dilakukan melalui intervensi kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021. Beberapa isu tersebut yaitu:

1. **Bidang Perekonomian** : Kabupaten Bangka memiliki kekayaan Sumber daya Alam yang melimpah namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan industri pengolahan permasalahan yang dianggap tidak *sustainable* dan rentan terhadap volatilitas. Pembangunan industri pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat wisata pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan

penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah karena hampir seluruh komoditas pertanian berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Berbagai langkah dilakukan untuk melakukan transformasi ekonomi sudah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pembangunan sektor strategis namun masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat. Minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian tahun 2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat (*pro-growth*) disertai keberhasilan mengatasi kemiskinan (*pro poor*), pengangguran (*pro-job*), pemerataan distribusi pendapatan (*pro-equity*), dan kerusakan lingkungan (*pro-environment*).

2. **Bidang Pariwisata** : Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang strategis di Kabupaten Bangka sebagai mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Dalam tiga tahun terakhir berbagai peristiwa yang terjadi, seperti ancaman keamanan global maupun dalam negeri serta wabah penyakit telah berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada menurunnya kinerja industri pariwisata. Namun demikian, dengan berbagai upaya keras, secara perlahan tapi pasti industri pariwisata mulai bangkit dari keterpurukannya dan bersamaan dengan itu perannya sebagai salah satu industri yang memberikan andil cukup besar dalam mendorong peningkatan penghasilan pemerintah Kabupaten Bangka. Perkembangan jumlah arus wisatawan asing

(wisman) yang berkunjung ke Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan.

Permasalahan - permasalahan yang menghambat pembangunan pariwisata antara lain adalah: (1) belum optimal dan efektifnya pengelolaan pemasaran baik dalam maupun luar negeri, (3) belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata (4) sebagai daerah kepulauan, wisata bahari belum dikembangkan secara optimal; (5) belum efektifnya pengelolaan informasi pariwisata; (7) belum optimalnya pengembangan pariwisata daerah wisata baru dan lama; (8) masih lemahnya manajemen kemitraan dan jaringan kerja antarpelaku industri pariwisata dan antara pelaku industri pariwista dan pelaku ekonomi-sosial lainnya; (9) masih terbatasnya jumlah SDM profesional dalam industri pariwisata; dan (10) masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri pariwisata.

3. **Bidang Pendidikan** : Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Bangka. Ketimpangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Selain akibat perbedaan tingkat pendapatan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar kecamatan.
4. **Bidang kesehatan :** status kesehatan masyarakat, terutama, penduduk miskin masih rendah dan disparitas status kesehatan juga masih tinggi. Jenis penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun terdapat kecenderungan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih

terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal.

5. **Bidang Reformasi dan Tata Pemerintahan** : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penataan birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Bangka antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih terdapatnya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik. Disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meingkatkan kinerja pemerintahan secara efektif dan efisien belum berjalan dengan baik.
6. **Infrastruktur** : Pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan) belum maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sumber dana pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Sementara keterlibatan swasta sangat terbatas dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial.
7. **Kemiskinan** : Dalam penanggulangan kemiskinan, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin saat ini, yaitu: (1) kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin; (2) kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin; (3) kurangnya ketersediaan

data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat; (5) kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran bagi masyarakat miskin; (6) lemahnya koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingna dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan; (7) lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan; dan (8) lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

8. **Pengangguran** : Memasuki tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, dan ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, juga belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah. Di samping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja informal. Hal ini disebabkan karena masih melemahnya beberapa harga komoditas utama masyaraakat di Kabupaten Bangka yang menyebabkan menurunnya semangat masyarakat untuk bekerja. Di samping menggeliatnya roda perekonomian di Kabupaten Bangka, belum disertai dengan tingkat pendidikan, keterampilan/keahlian, dan kompetensi tenaga kerja yang layak. Di sisi lain tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil, ahli, dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan ekonomi.
9. **Pelestarian Lingkungan Hidup** : Belum optimalnya perbaikan pengelolaan SDA dan kualitas mutu lingkungan hidup. Kabupaten Bangka masih terdampak besar dalam lingkungan hidup akibta aktivitas pertambangan, penebangan hutan dan ekploitasi legal perikanan. Pelestarian lingkungan lingliungan hidup merupakan kebijakan yang harus dilakukan karena terkait dengan permaslahan ketahahan pangan, kesehatan, perubahan iklim, serta keselamatan generasi mendatang. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam prilaku menjaga alam,

rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.

10. **Ketahahan Pangan** : Ketahanan pangan Kabupaten Bangka dinilai masih rentan karena pertumbuhan produksi pangan khususnya beras masih belum stabil. Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipastikan juga masih sangat terbatas. Produksi padi masih rendah untuk memenuhi kebutuhan lokal sementara kebutuhan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi. Kebutuhan pangan dan pemenuhan pangan bagi rumah tangga miskin masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Sementara peningkatan masyarakat miskin dipredikasikan meningkat sebagai dampak covid-19. Beberapa permasalahan lain di bidang ketahanan pangan adalah belum tertatanya sistem distribusi dan tata niaga pangan; pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif produksi bahan pangan; serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan permasalahan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka.

    Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan ditingkatkan. Produksi bahan baku untuk bahan bakar nabati (BBN) sangat besar potensinya dan akan ditingkatkan pemanfaatannya. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Produksi hasil hutan tanaman industri dan non kayu perlu ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya industri hasil hutan. Masalah-masalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong

akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.

11. **Penataan Ruang** : Permasalahan mendasar dalam bidang ketataruangan adalah terkait (1) aspek perencanaan; belum disusunnya dokumen tata ruang di semua daerah kecamatan di Kabupaten Bangka (Belinyu, Riau Silip, Merawang, Bakam, Mendo Barat, Pemali). Dokumen tata ruang baru terdapat di Kecamatan Sungailiat. (2) Aspek pengendalian; terkait dengan belum adanya pelanggaran terhadap regulasi belum didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat, pemberian ijin, dan status ruang dan keserasian tata ruang. (3) aspek pemanfaatan; terkait dengan belum maksimalnya pemanfaatan tanah dan keruangan yang telah ditetapkan sesuai peruntukannya dan potensi kewilayahan serta memanfaatkan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
12. **Investasi** : Berdasarkan hasil analisis, data menunjukkan hampir 64,71 persen sektor dalam struktur perekonomian memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut menimbang sektor - sektor tersebut mempunyai keunggulan komperatif dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi dengan nilai LQ mencapai 1,13, kemudian sektor jasa lainnya 1,11, sektor penyediaan akomodasi dan air minum 1,06 dan sektor perekonomian lainnya dengan rentang 1,01 – 1,05. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan *progress* yang cukup baik dengan rataan diatas 4 persen, walaupun demikian mencermati ketidakpastian yang akan terjadi di tahun 2021 nanti *(the year of uncertainty*), maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksi berada dibawah rentang

tersebut yakni hanya sebesar 2,95 persen. Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dilakukan untuk mengetahui efektivitas tingkat produksi dan memperkirakan kebutuhan dana yang dapat diinvestasikan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah. Rataan ICOR tahun 2015 - 2017 sebesar 5,44 merupakan komposisi terbaik yang diperoleh dalam kondisi normal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sehingga diperkirakan kebutuhan pendanaan tahun 2021 mencapai 1,38 triliun rupiah dengan rincian sebesar 1,00 triliun rupiah untuk menggerakkan kurang lebih 11 sektor perekonomian potensial dan sisanya sebesar 377,29 milyar rupiah untuk 6 sektor perekonomian non potensial berdasarkan hasil analisis LQ. Sektor konstruksi diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 279,54 milyar rupiah, kemudian sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan membutuhkan dana masing – masing sebesar 234,22 milyar rupiah dan 156,06 milyar rupiah**.** Perkembangan investasi di Kabupaten Bangka masih rendah dan belum kompetitif untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri strategis daerah yang berorientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan nasional. Tantangan dan permasalahan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian dunia dan masih lemahnya daya dukung regulasi pendukung investasi. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi perlu dilakukan dengan mengurangi hambatan perijinan, kemudahan administrasi perpajakan dan insentif investasi, meningkatkan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka harus mendorong minat

investasi terutama untuk komoditi yang bernilai tambah tinggi serta diversifikasi pasar ekspor serta kebutuhan dalam negeri.

Adapun peningkatan investasi pariwisata perlu didorong dengan lebih mengembangkan pemasaran pariwisata, mengembangkan destinasi pariwisata baru, serta mendorong kemitraan pariwisata.

8. Isu Strategis Daerah

Beberapa **i**su strategis yang menjadi perhatian dan harus segera ditangani dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021, yaitu:

1) **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**. Ada 5 (lima) kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2021 yaitu: *Pertama*, pengelolaan sistem informasi dan komunikasi publik pada OPD yang belum terintegrasi, termasuk informasi terkait Covid 19, serta akses dan konten informasi belum merata; *Kedua*, belum optimalnya penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (*e-service*) terutama untuk pelayanan dasar dan perijinan; *Ketiga*, belum opitmalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN; *Keempat*, dalam upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas SDM aparatur dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kemampuan teknologi inovasi dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk merespons dampak pandemik Covid 19. *Kelima*, berbagai isu penting lainnya seperti peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan profesionalitas aparatur. Seiring dengan upaya melakukan percepatan reformasi birokrasi perlu peningkatan pemenuhan aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja pelayanan publik, peningkatan SDM aparatur.
2) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Pandemi Covid 19 menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap peningkatan SDM terutama menyangkut dampak terhadap aspek kesehatan dan pendidikan.

Ada 6 (enam) tantangan ke depan dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021. *Pertama*, perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terdampak Covid 19. *Kedua*, pemenuhan layanan dasar dihadapkan pada upaya untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah desa dan kecamatan. *Ketiga*, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. *Keempat*, pengentasan kemiskinan dihadapkan pada sumber pendanaan usaha yang eksklusif sulit dijangkau masyarakat miskin dan rentan miskin karena ketiadaan akses permodalan dan aset produktif akibat Covid 19. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin dan rentan baru yang membutuhkan akses terhadap aset produktif diperkirakan meningkat akibat bencana pandemi Covid 19. *Kelima*, peningkatan produktivitas dan daya saing dihadapkan pada rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga belum mampu merespon kebutuhan pasar kerja.

3) Pemerataan Infrastruktur. Ada 4 (empat) tantangan di bidang pembangunan infrastruktur 2021. *Pertama***,** infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 antara lain akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, terutama saat pandemi Covid19 dimana masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. *Kedua*, dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk mendukung pemulihan pembangunan ekonomi pasca pandemi Covid 19 percepatan peningkatan konektivitas transportasi jalan dan jembatan perlu terus ditingkatkan terutama untuk mendukung pemulihan sektor industri unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan dan pariwisata. Upaya terobosan diperlukan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah dengan berfokus pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah pertumbuhan perekonomian baru utnuk mempercepat pertumbuhan ekonomi akibat Covid 19 meliputi infrastruktur sektoral seperti pertanian dan pariwisata serta kawasan strategis lainnya. *Keempat*,

dalam pemenuhan kebutuhan air pada masa pandemi Covid 19 diantaranya adanya penggunaan air baku yang bersih, baik di perkotaan maupun pedesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis dengan adanya gerakan cuci tangan. Adanya pengurangan alokasi APBN untuk peningkatan kapasitas air baku akibat Covid 19, menuntut pemerintah Kabupaten Bangka lebih selektif terhadap lokasi pembangunan yang menjadi prioritas.

4) **Pariwisata sebagai Sektor Ekonomi Alternatif.** Pandemi Covid 19 telah berdampak sangat signifikan terhadap sektor pariwisata. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Isu di bidang pariwisata yang perlu mendapat intervensi penting pada tahun 2021 ada 4 (empat), yaitu: *Pertama*, peningkatan intensitas promosi wisata, *Kedua*, Penyediaan jaminan keamanan wisatawan dari penularan resiko pandemi Covid 19. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan pariwisata. *Keempat*, insentif bagi pelaku pariwisata dan wisatawan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan akibat dampak Covid 19.

5) **Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi.** Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Ada 5 (lima) isu strategis pemulihan ekonomi, yaitu: *Pertama*, Menurunnya kinerja produksi dan ekspor komoditas unggulan daerah seperti logam timah, karet, sawit, akibat permintaan pasar luar negeri yang melemah akibat dampak Covid 19. *Kedua*, menurunnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, industri pengolahan akibat Covid 19, *Ketiga*, menurunnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi akibat terganggunya beberapa investasi daerah karena dampak Covid 19. *Keempat*, menurunnya pendapatan daerah dari penerimaan pemerintah pusat.

6) **Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.** Covid 19 berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 (lima) isu peningkatan kesejahteraan rakyat harus mendapat perhatian penting. *Pertama*, pandemi Covid 19 dipastikan akan berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat miskin, peningkatan angka pengangguran, penurunan tingkat pendapatan masyarakat yang berakibat pada sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, isu pengembangan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan akibat Covid 19 juga perlu mendapat perhatian. *Ketiga*, isu penting dalam rangka pengembangan perlindungan sosial adalah penguatan sistem pendataan bantuan sosial dan penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat. *Keempat*, penyediaan alokasi bantuan sosial kapada masyarakat miskin dan rentan miskin akibat dampak Covid 19. *Kelima*, akses bangtuan modal kepada kelompok masyarakat terdampak Covid 19.

7) **Pelestarian Lingkungan Hidup.** Bencana munculnya penyakit menular termasuk Covid 19 karena faktor kerusakan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Ada 3 (*tiga*) Salah satu Isu utama yang akan dihadapi pada tahun 2021 terkait Pelestarian Lingkungan Hidup adalah: *Pertama,* membangun kesadaran kualitas lingkungan hidup untuk menjaga kebencanaan. *Kedua,* meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan upaya rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan akibat *illegal mining, illegal, logging* dan *illegal fishing*. *Ketiga*, isu rehabilitasi hutan dan lahan kritis perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan kritis agar bernilai ekonomis dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan akibat Covid 19.

9. **Bonus Demografi**,

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka telah menyusun dokumen perencanaan bidang kependudukan yaitu *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dokumen induk untuk merancang pembangunan kependudukan dalam merespon bonus demografi.

10. ***Green Economy*** **(Ekonomi Hijau).** Merupakan isu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis. Untuk mewujudkan pencapaian isu ini, Pemerintah Kabupaten Bangka telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai arah kebijakan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka.
11. ***Sustainable Development*** **Goals (SDG's).** Pandemi Covid 19 juga berdampak terhadap capaian pembangunan SDGs. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung pencapaian SDG's sebagai dampak Covid 19. Ada 7 (tujuh) isu yang termuat dan terakomodir dalam perencanaan tahun2021 yaitu: *Pertama*, isu bidang kesehatan. *Kedua*, isu bidang pendidikan. *Ketiga*, isu pelstarian lingkungan hidup. *Keempat*, isu kemiskinan. *Kelima*, isu perekonomian. *Keenam*, isu kesejahteraan sosial. *Ketujuh*, isu keamanan pangan. Beberapa capaian tujuan pembangunan SDG's di Kabupaten Bangka memerlukan perhatian diantara: percepatan penurunan angka kemiskinan, akses terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan, prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih relatif tinggi, masih terdapatnya angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi (AKB), kasus beberapa penyakit menular dan penyakit mamatikan yang masih tinggi, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk, pertumbuhan ekonomi masih rendah serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup.

12. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka

Untuk menampung aspirasi masyarakat secara komprehensif, Dokumen RKPD Kabupaaten Bangka tahun 2021 memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat mekanisme politik anggaran melalui aspirasi yang disalurkan melalui anggota DPRD Kabupaten Bangka. Proses ini dilakukan lewat kegiatan penjaringan permasalahan di lapangan yang kemudian aspirasi tersebut disampaikan dan dilakukan pembahasan dalam musyawarah perencanaan daerah untuk diusulkan sebagai program dan kegiatan dalam rangka memecahkan permaslahan di masyarakat dalam dokumen perencanaan daerah.

Sesuai dengan tema yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, maka RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bangka **sebelum perubahan** mengusung tema **"Percepatan Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat."** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tertera pada Gambar 4.8 dibawah ini.

Gambar 4.7
Fokus/Tema Rencana Pembangunan Tahunan
dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023

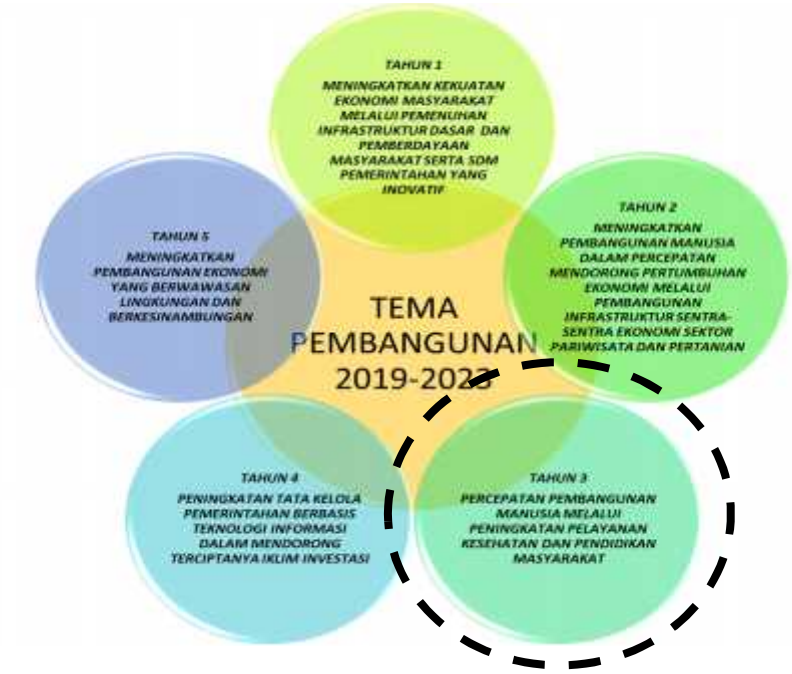

Namun dengan mempertimbangkan kondisi luar biasa yang terjadi dengan diterbitkannya **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020** pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020** tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, serta telah diterbitkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020** pada tanggal 13 April 2020 tentang **Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (Covid 19) sebagai Bencana Nasional** serta dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2019, serta isu, masalah dan tantangan yang akan dihadapi lainnya pada pelaksanaan RKPD Tahun 2021, maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Bangka sebagai pelaksanaan **tahun ketiga** RPJMD tahun 2019-2023 yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan sebagai berikut:

" Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Kesejahteraan Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing"

Berdasarkan penetapan tema tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka tahun 2021 dengan tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.8

Integrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka RKPD dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tema RKP Tahun 2021

Permasalahan dan isu sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan *(gap)* antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang dinilai penting dan patut dipertimbangkan. Berikut merupakan ilustrasi perumusan permasalahan dan isu strategis.

Gambar 4.9
Ilustrasi Perumusan Permasalahan, Isu Strategis dan Kaitannya terhadap Prioritas Pembangunan

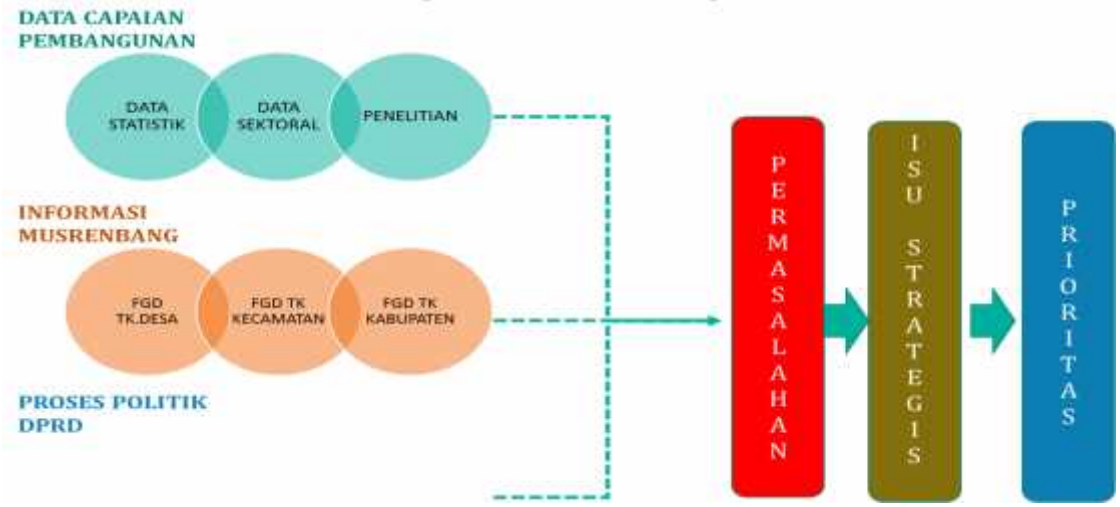

Berdasarkan data dan informasi yang telah di telaah dan di dalam permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi
4. Pariwisata sebagai sektor ekonomi alternatif
5. Pemerataan Infrastruktur
6. Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7. Kualitas Lingkungan Hidup
8. Bonus Demografi
9. *Green Economy*

Untuk melihat keterkaitan antara isu strategis dan penentuan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan dengan Permasalahan dan Isu Strategis

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar) Belum seluruh masyarakat miskin ter-cover layanan PBI-BPJS Kesehatan) Data masyarakat miskin yang belum up to date dan terintegrasi) Dampak COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin) Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender) Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender) Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional) Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik) Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak	Tingginya Angka Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan)	) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan SDM yg Berkualitas

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Belum idealnya distribusi dan ketersediaan guru antar wilayah Kecamatan) Masih rendahya tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada setiap jenjang pendidikan.) Masih terdapat disparitas nilai akreditasi pada beberapa lembaga pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen target seluruh jenjang pendidikan memiliki nilai akreditasi A.) Belum optimalnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 69,44 % pada tahun 2019.) Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 21,59 % pada tahun 2019) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu bersalin) Belum optimalnya pelayanan kesehatan balita) Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia produktif, antara lain terbatasnya logistik untuk skrining gula darah) Rendahnya kesadaran wanita usia produktif yang sudah menikah untuk melakukan pemeriksaan IVA) Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, antara lain belum semua desa memiliki posyandu lansia, mobilitas lansia yang terbatas serta kesiapan logistik untuk skrining kesehatan lansia yang belum mencukupi) Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tidak menular (penderita hipertensi dan penderita diabetes mellitus)) Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki sarana NICU untuk menangani kasus neonatal) Kurangnya tenaga dokter spesialis) Terbatasnya jumlah armada ambulance dan tenaga medis yang mendukung layanan SPGDT) Dampak COVID-19 menyebabkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan kesehatan menjadi sangat besar) Rendahnya minat baca dan budaya baca siswa maupun masyarakat) Belum optimalnya pemerataan kelembagaan perpustakaan/taman baca di tingkat desa/kelurahan) Terbatasnya jumlah tenaga pustakawan berdasarkan jurusan dan jenjang kependidikan) Pelayanan perpustakaan masih belum berbasis teknologi informasi dengan jaringan yang sangat terbatas	) Bonus Demografi	

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Jumlah koleksi perpustakaan yang masih belum memenuhi standar baik buku cetak ataupun buku berbasis *e-book*		
) Kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah) Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja) Daya serap tenaga kerja masih didominasi di perkotaan) Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM) Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik) Produktivitas koperasi dan UMKM masih rendah) Kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah) Belum optimalnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM) Minimnya akses pemasaran produk koperasi dan UMKM) Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB) Belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk lokal ke luar daerah) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas produk lokal) Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan) Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya.) Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan) Kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri) Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka.) Belum optimalnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM.) Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi) Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB) Masih rendahnya Nilai Tukar Petani akibat harga komoditas perkebunan rakyat (karet dan kelapa sawit) yang mengalami penurunan	) Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi) *Green Economy* (Ekonomi Hijau)	Pemulihan perekonomian yg berkualitas

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Tingginya ketergantungan terhadap produk hortikultura dari luar daerah akibat minat masyarakat menanam tanaman hortikultura masih rendah) Berkurangnya luas lahan pertanian akibat aktivitas pertambangan timah dan alih fungsi lahan) Belum optimalnya akses maupun penggunaan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian) Masih sedikitnya petani dan peternak yang memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian) Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai) Ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan) Masih adanya *illegal fishing* (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya) Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi		
) Masih rendahnya investasi di sektor pariwisata) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata) Belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya.) Minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait)) Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat) Produksi dan pengembangan cinderamata khas daerah masih sangat terbatas) Kondisi darurat COVID 19 mengakibatkan hal-hal sbb : ▪ adanya pembatasan bahkan pelarangan penerbangan dan perjalanan kapal penumpang sehingga akses keluar masuk terhambat ▪ aturan *social distancing* mengakibatkan event-event pariwisata tidak dapat dilaksanakan ▪ jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri menurun drastis ▪ banyak objek wisata yang tidak beroperasional ▪ kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu cukup lama	Pariwisata sebagai Sektor Ekonomi Alternatif	Pengembangan Industri Pariwisata

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik) Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah) Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya) Dampak COVID-19 salah satunya pembatalan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berasal dari DAK Fisik dan DID pada tahun 2020, sehingga kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten akan menurun) Akses penyediaan air bersih yang masih belum memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan) Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara) Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota) Keterbatasan APBD untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni) Dampak COVID 19 yaitu pembatalan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2020 termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum) Sebagian masyarakat tidak bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan sarana umum (pembangunan/ pelebaran jalan, siring, pasar, dll) jika tidak ada ganti rugi dari pemerintah) Masih ada aset lahan milik Pemkab Bangka yang belum memiliki sertifikat) Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki) Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada) Masih rendahnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya) Banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran terkait aturan lalu lintas) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi) Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi termasuk internet di daerah pedesaan, bahkan masih ada desa yang belum terlayani internet sama sekali) Belum optimalnya integrasi sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Bangka	Pemerataan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dokumen Kartu Identitas Anak) Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi, karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.) Belum optimalnya capaian evaluasi AKIP, walaupun tahun 2019 sudah mendapat predikat BB, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan) Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah) Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan) Distribusi pegawai belum proporsional sesuai dengan formasi dan kebutuhan.) Belum optimalnya penempatan pegawai dalam hal kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan dan tugas.) Belum optimalnya penerapan sistem e-kinerja ASN) Terbatasnya kemampuan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan ASN) Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi
) Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Bangka) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk sampah) Masih minimnya bank sampah dan TPS3R) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih terutama masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan) Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena aktivitas penambangan, perluasan pemukiman penduduk, dan kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang) Belum optimalnya penegakan aturan terkait tata ruang yang dampaknya merugikan usaha pelestarian lingkungan) Koordinasi antar instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal, karena BPBD sebagai instansi koordinator baru dibentuk pada tahun 2020) Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana) Belum tersedianya database identifikasi daerah rawan bencana	Kualitas Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti illegal loging, illegal mining, membuang sampah sembarangan, dsb.		

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, serta berbagai masalah, isu dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2021, maka **Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021** adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi.
2. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Pembangunan infrastruktur perekonomian.
4. Pengembangan industri pariwisata.
5. Pemulihan perekonomian yang berkualitas.
6. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Formulasi tema yang telah ditetapkan memiliki keterkaitan yang erat dengan penetapan prioritas pembangunan tahun 2021 Kabupaten Bangka.

Keterkaitan ini menunjukkan tema pembangunan dijadikan sebagai dasar struktur pembentuk prioritas pembangunan. Intergrasi tema dengan prioritas pembangunan dapat dilhat pada table berikut:

Gambar 4.10
Integrasi Tema dan Prioritas RKPD 2021

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Tahun 2021 merupakan program yang direncanakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2021 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 agar tetap terjaga kesinambungannya yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2023. Visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tersebut harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah :**"Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera"**.

Upaya-upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan, yaitu :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai penjabaran dari lima tahunan tahap ketiga (2016-2020) dan tahap keempat (2021-2025) RPJPD Kabupaten Bangka, maka arah pembangunan daerah berada pada tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Bangka. Arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 difokuskan pada upaya transformasi ekonomi menuju pembangunan industri klaster melalui penguatan peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

Pada 2 (dua) tahun pertama, arah pembangunan dititikberatkan pada penguatan peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor unggulan daerah (*leading sectors*) dan peningkatan kawasan agropolitan secara berkelanjutan melalui usaha industri pengolahan produk dari sektor perkebunan dan perikanan yang didukung secara kuat oleh sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sistem dan akses serta ketersediaan infrastruktur yang semakin baik.

Pada 3 (tiga) tahun terakhir, arah pembangunan ditekankan pada terbangunnya transformasi ekonomi menuju pembangunan industri klaster berbasis potensi lokal dan budaya sosial lokal yang memiliki keunggulan kompetitif dan berfungsi sebagai industri pendukung *(supporting industries)* dalam tataran pembangunan industri daerah dan nasional.

Memperhatikan pemikiran di atas, berbagai peluang dan tantangan yang akan muncul dan bersifat sangat mendasar harus diantisipasi adalah berkaitan peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya untuk mendukung terwujudnya paradigma pembangunan kemandirian lokal yang menempatkan faktor manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan SDM harus mengutamakan pembentukan karakter akhlak mulia, berintegritas, berbudaya kearifan lokal melalui pemerataan fasilitas pendidikan. Peningkatan kualitas kesehatan SDM dan masyarakat harus lebih diperkuat melalui peningkatan pelayanan kesehatan secara prima, pola hidup sehat, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskinan dan kurang mampu. Fokus pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya strategis mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar daerah (*backwash effect*).

Untuk mewujudkan paradigma ini, birokrasi daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan sekaligus penyelenggara pelayanan publik juga perlu melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang bersih dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum,

konsensus dan memiliki visi strategis. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut didukung oleh penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dalam rangka mendorong kualitas dan jangkauan pembangunan yang lebih baik.

RPJMD Kabupaten Bangka Periode 2019-2023 telah diselaraskan dengan RPJMN periode 2020-2024 yang memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tema RPJMN pada periode ini adalah : **"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".**

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 juga berupaya mendorong sinkronisasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 yang memiliki visi sebagai berikut **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".**

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; dan
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Berpedoman dan memperhatikan berbagai dokumen perancanaan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

"BANGKA SETARA"

Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi "Bangka Setara", maka diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yaitu:

1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
4) Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
5) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Mengacu pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 beserta indikator kinerjanya dijelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Matriks Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi	**Tujuan 1.1** : Meningkatkan Tata Keloa Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	**Tujuan 2.1** : Meningkatkan Kualiitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
	Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah	**Tujuan 3.1** : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Infrastruktur
Misi 4 : Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional	**Tujuan 4.1.** : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Misi 5 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	**Tujuan 5.1** : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Per Kapita
	Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

Berangkat dari tujuan serta indikator kinerja tujuan maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta indikatornya pada setiap tujuan sesuai dengan masing-masing misi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1.1 : Meningkatkan Tata Keloa Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	**Sasaran 1.1.1 :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
			Indeks SPBE
			Indeks Profesionalitas ASN
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
		Sasaran1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	**Sasaran 2.1.1 :** Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
			Angka Harapan Lama Sekolah
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Angka Stunting
		Sasaran 2.1.3: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	**Sasaran 2.2.1 :** Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	**Sasaran 2.2.2 :** Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Infrastruktur	**Sasaran 3.1.1 :** Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastuktur Ekonomi
		Sasaran 3.1.2 :	Indeks Infrastruktur Sosial

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	
Tujuan4.1: Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	**Sasaran 4.1.1:** Meningkatnya Jumlah Uang Yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money*
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Total Investasi Daerah (%)
Tujuan 5.1 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB per Kapita	**Sasaran 5.1.1 :** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Sasaran 5.1.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)
		Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Indeks Desa Membangun
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	**Sasaran 5.2.1:** Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah
			Ketaatan terhadap RTRW (%)

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Target Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target Indiantor Sasaran RPJMD terhadap RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Indikator Tujuan
RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 terhadap RKPD tahun 2021

VISI : BANGKA SETARA (SEJAHTERA DAN MULIA)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	BB
						Indeks SPBE	2,75
						Indeks Profesionalitas ASN	70,75
					1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP
					1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,79
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,67	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,25
						Angka Harapan Lama Sekolah	12,80
					2.2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,05
						Angka *Stunting*	3,25

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
					2.2.2 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	2,40
		2.2 Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	72,67	2.2.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	62,63
			Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	82,46	2.2.2 Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Madya
3	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah	3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Infrastruktur	80,20	3.1.1 Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Ekonomi	84,41
					3.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	65,48
4	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	4.1 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	8,21	4.1.1 Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wistawan	*Spending of Money*	20 Milyar
					4.1.2 Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Total Investasi Daerah (%)	26,5
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah	5.1 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Per Kapita	3,34	5.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,95

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
	yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan				5.1.2 Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)	5,11
					5.1.3 Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Indeks Desa Membangun	0,812
		5.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	65,04	5.2.1 Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	65,02
						Ketaatan terhadap RTRW (%)	100,00

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut terkait dengan instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja selanjutnya. Untuk lebih jelasnya IKU RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
				2021
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB
		Indeks SPBE	Angka	2,75
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	70,75
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,79
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,25
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,80
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	71,05
		Angka Stunting	Angka	3,25
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	%	2,40
7	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	62,63

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021
8	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
9	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Ekonomi	Indeks	84,41
10	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	Indeks	65,48
11	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan wisatawan	*Spending Of Money*	Milyar Rp	20,00
12	Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Total Investasi Daerah	%	2,95
13	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,95
14	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	5,11
15	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,812
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65,07
		Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023

Selanjutnya untuk memudahkan menentukan keberhasilan suatu urusan harus ditetapkan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator tersebut dinamakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk melihat lebih rinci IKK per urusan dengan lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Proyeksi Capaian

Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1.	Pertumbuhan PDRB	%	2,95
2.	Laju Inflasi	%	2,17
3.	PDRB per Kapita	Jutaan Rp	41.72
4.	Indeks Gini	Indeks	0,270
5.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	%	23,09
6.	Indeks Ketimpangan Willianson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,189
7.	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	%	94,89
8.	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	0,62
9.	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	%	5,11
10.	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,67
11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25
12.	Angka Melek Huruf	%	99,70
13.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,05
14.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,72
15.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4,95
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00
17.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,90
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,10
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,85
20.	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	0,9582
21.	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenga Kerja	%	0,22
22.	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	0,6790
23.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	%	51,42
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	2,73
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,79
26.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	12,37
27.	Opini BPK	Opini	WTP
28.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,64
29.	Penguatan Cadangan Pangan	%	35.30
30.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	20,25
31.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	18,52
32.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	15,94
33.	Produksi Sektor Pertanian	Ribu Ton	248,44
34.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	65,79
35.	Produksi Sektor Perkebunan	Ribu Ton	95
36.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	%	100
37.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2,29
38.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	9,04
39.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PRDB	%	4,27
40.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	9,18
41.	Kontribusi Setor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,32
42.	Kontribusi Setor Industri terhadap PDRB	%	21,94

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
43.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	%	30,78
44.	Pertumbuhan Industri	%	15,20
II.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rupiah	45,78
2.	Nilai Tukar Petani	%	89,20
3.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	%	54,22
4.	Produktivitas Total Daerah	%	33,19
5.	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	35,48
6.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	Rasio	0,8840
7.	Rasio Simpanan terhadap Simpanan di BPR	Rasio	0,875
8.	Angka Kriminalitas yang Ditangani	%	87,42
9.	Rasio Ketergantungan	%	42,71
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
A.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**		
1.	**Pendidikan**		
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	72,04
1.2.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun	105,98
1.3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun	11,00
1.4.	Angka Partisipasi Murni	Rasio	103,10
1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	108,95
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	97,25
1.7.	Angka Partisipasi Sekolah	Rasio	103,10
1.8.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Rasio	108,95
1.9.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Rasio	97,25
1.10.	Angka Putus Sekola (APS) SD/MI	%	0,044
1.11.	Angka Putus Sekola (APS) SMP/MTs	%	0,210
1.12.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
1.13.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
1.14.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,25
1.15.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	74,88
1.16.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	82,94
1.17.	Rasio Ketersedian Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,0017
1.18.	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,064
1.19.	Rasio Guru terhadap Murid Rata-Rata Sekolah Dasar	Rasio	25,30
1.20.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	100
1.21.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)	%	99,95
1.22.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,70
1.23.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	49,78
2.	**Kesehatan**		
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0,16
2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0,84
2.3.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	3,70

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
2.4.	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0,10
2.5.	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,256
2.6.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	14,3920
2.7.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	0,4840
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,0160
2.9.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio	0,4452
2.10.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	5,1765
2.11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100
2.12.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,60
2.13.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100
2.15.	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan di Indonesia 2.100 Kkal/kap/hari)	%	23,18
2.16.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Mendapatkan Imunisasi Campak	%	91,72
2.17.	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	0,0143
2.18.	Cakupan Balita Pnemunio yang Ditangani	%	100
2.19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	100,55
2.20.	Tingkat Pervalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Orang Per 100.000	1.080
2.21.	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Per 1.000 Penduduk	Orang Per 100.000	9,5130
2.22.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	%	101,26
2.23.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	100
2.24.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100
2.25.	Penderita Diare yang Ditangani	%	100
2.26.	Angka Kejadian Malaria	Orang Per 100.000	35,91
2.27.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Orang Per 1.000	0,1038
2.28.	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	%	1,50
2.29.	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	%	84,48
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,2894
2.31.	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	%	71,24
2.32.	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	95,75
2.33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	91,26
2.34.	Cakupan Kunjungan Bayi	%	90,75
2.35.	Cakupan Puskesmas	%	187,50
2.36.	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	61,73
2.37.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	82,55
2.38.	Cakupan Pelayanan Nifas	%	87,76

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
2.39.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100
2.40.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	89,93
2.41.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	88,75
2.42.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	92,98
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Rasio	78,82
3.2.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Rasio	2,92
3.3.	Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	12,00
3.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	78,82
3.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	72,00
3.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,00
3.7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	97,50
3.8.	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	0,00
3.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	94,95
3.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	15,50
3.11.	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	0,00
3.12.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	98,50
3.13.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0,0232
3.14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	88,30
3.15.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	88,30
3.16.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00
3.17.	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	42,25
3.18.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio	0,095
3.19.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Rasio	0,8950
3.20.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	Rasio	31,05
3.21.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan	%	29,15
3.22.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Rasio	20,00
3.23.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	%	2,00
3.24.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan	Rasio	0,6825
3.25.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
4.1.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,9770

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
4.2.	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	
4.3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	97,70
4.4.	Persentase Rumah Yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	%	77,75
4.5.	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	100
4.6.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,00
4.7.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	%	0,00
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0,00
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	5,00
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100
5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	90
5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	90
6.	**Sosial**		
6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	70
6.2.	Persentase PMKS yang Tertangani	%	100
6.3.	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100
6.4.	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	24,95
6.5.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	20,50
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	15,00
6.7.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100
6.8.	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100
6.9.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	84,50
B.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**		
1.	**Tenaga Kerja**		
1.1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Rasio	2,75
1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	75,00
1.3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	43,16
1.4.	Keselamatan dan Perlindungan	%	100
1.5.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	64,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
1.6.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	1,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	88,50
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	100
1.9.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	45,00
1.10.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	35,00
1.11.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	4,50
1.12.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Rasio	0,490
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2,42
2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,14
2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	37,82
2.4.	Rasio KDRT	%	12,00
2.5.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	%	2,00
2.6.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	14,50
2.7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100
2.8.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	1,50
2.9.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu.	%	5,00
2.10.	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	87,61
2.11.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100
2.12.	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100
2.13.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100
2.14.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	Rasio	0,915
2.15.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	Rasio	1,030
2.16.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	Rasio	1,300
2.17.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi	Rasio	1,225
2.18.	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Rasio	0,994
2.19.	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian	%	14,50
3.	**Pangan**		
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	135
3.2.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	157,25
3.3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	92,50
4.	**Pertanahan**		
4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	45,12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
4.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100
4.3.	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100
5.	**Lingkungan Hidup**		
5.1.	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada
5.2.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada
5.3.	KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten	Dokumen	Ada
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air	Indeks	52,48
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,84
5.6.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	68,25
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LHD yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100
5.8.	Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	7
5.9.	Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1
5.10.	MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverfikasi	Kelompok	2
5.11.	Hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Hak	1
5.12.	Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1
5.13.	Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan yang difasilitasi	%	100
5.14.	Penyediaan Sarana/Prasarana yang difasilitasi	%	100
5.15.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat yang di Laksanakan	Diklat	1
5.16.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup yang di Lakansakan	Kegiatan	Ada
5.17.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100
5.18.	Timbunan Sampah yang Ditangani	%	100
5.19.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	48,44
5.20.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	40,00
5.21.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	78,00
5.22.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/Kota	Nilai	79,00
5.23.	Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan	%	100
5.24.	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	45,00
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
6.1.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	1,0112
6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,9500
6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,96 : 1
6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Data	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Penerapan	Sudah
6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	101,125
6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	95,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100
7.2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	4
7.3.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	10
7.4.	Persentase LPM Aktif	%	100
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	16,12
7.6.	Persentase PKK Aktif	%	100
7.7.	Persentase Posyandu Aktif	%	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	49,62
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,52
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Kelahiran	2,90
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	76,47
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	82,35
8.5.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda/ Perkada	1
8.6.	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	2
8.7.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	15
8.8.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	2,20
8.9.	Ratio Akseptor KB	%	77,30
8.10.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	77,30
8.11.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	%	15,10
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	12,00
8.13.	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,35
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	11,78
8.15.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	81,25
8.16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	100
8.17.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	100
8.18.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	12,85
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100
8.22.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	40,00
8.23.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Rasio	1
8.24.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100
8.25.	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	%	100
8.26.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100
8.27.	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	
8.28.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100
8.29.	Cakupan Keluarga Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	100
8.30.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	21,56
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	0,781
9.	**Perhubungan**		
9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Juta Orang	2,175
9.3.	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0005
9.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	3.343
9.5.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2
9.6.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,20
9.7.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83,21
9.8.	Pemasangan Rambu-Rambu	%	79,81
9.9.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	2,88
9.10.	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Juta Orang	3,175
9.11.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Juta Orang	3,175
10.	**Komunikasi dan Informatika**		
10.1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Rasio	100
10.3.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	96,09
10.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Rasio	76,18
10.5.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Rasio	0,341
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
11.1.	Persentase Koperasi Aktif	%	85,48

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
11.2.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	82,32
11.3.	Persentase BPR/LKM Aktif	%	87,38
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,20
12.	**Penanaman Modal**		
12.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Badan Usaha	10
12.2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	2.992,910
12.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	32,96
12.4.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	34,82
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**		
13.1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100
13.2.	Persentase Wirausaha Muda	%	2,25
13.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100
13.4.	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	%	100
13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100
13.6.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	4
13.7.	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	4
14.	**Statistik**		
14.1.	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem	Ada
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Dokumen	Ada
14.3.	Buku ”PDRB”	Dokumen	Ada
15.	**Persandian**		
15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	11,74
16.	**Kebudayaan**		
16,1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	6
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	29,25
16.3.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya	14
16.4.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	2
17.	**Perpustakaan**		
17.1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Rasio	0,024
17.2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	22.751
17.3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	0,260
17.4.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	7.717
17.5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	13.043
17.6.	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	%	25,50
18.	**Kearsipan**		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	76,47
18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	1
C.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**		
1.	**Pariwisata**		
1.1.	Kunjungan Wisata	%	8,50
1.2.	Lama Kunjungan Wisata	Hari	3,00
1.3.	PAD Sektor Pariwisata	%	5,55
2.	**Pertanian**		
2.1.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	18,52
2.2.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	15,94

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
2.3.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	65,79
2.4.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	%	100
2.5.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	530
2.6.	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	2,50
3.	**Perdagangan**		
3.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	
3.2.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	
4.	**Perindustrian**		
4.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	17,12
5.	**Kelautan dan Perikanan**		
5.1.	Produksi Perikanan	%	107,92
5.2.	Konsumsi Ikan	%	133,78
5.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	18,31
5.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	66,50
5.5.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	90,20
5.6.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Rasio	0,6820
5.7.	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	107,54
D.	**Fokus Layanan Pendukung Urusan**		
1.	**Perencanaan**		
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada
1.4.	Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100
2.	**Keuangan**		
2.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,65
2.3.	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	2,15
2.4.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	25,45
2.5.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	12,50
2.6.	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Perbandingan	51,75 : 49,25
2.7.	Bagi Hasil Kabupaten dan Desa	%	7,08
2.8.	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian**		
3.1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	29
3.2.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	136
3.3.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2.436

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021
4.	**Pendidikan dan Pelatihan**		
4.1.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari	2,85
4.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	69,75
4.3.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	
5.	**Penelitian dan Pengembangan**		
5.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100
5.2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100
	Penerapan SIDa		
5.3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	41,62
5.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah	%	100
6.	**Pengawasan**		
6.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	87,50
6.2.	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	1,21
6.3.	Jumlah Temuan BPK	Temuan	692
7.	**Sekretariat Dewan**		
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	Ada
7.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada
7.3.	Terintegrasinya Program – Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	DOkumen	Ada

Sumber: Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2019 tahun 2020, sebab pembangunan tahun 2021 ini merupakan tahun ke tiga dari tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023. Adapun gambaran posisi RKPD tahun 2021 terhadap RPJPD dan RPJMD dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 4.11
Keterkaitan Tema Prioritas RKPD 2021
Terhadap Arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2019-2023

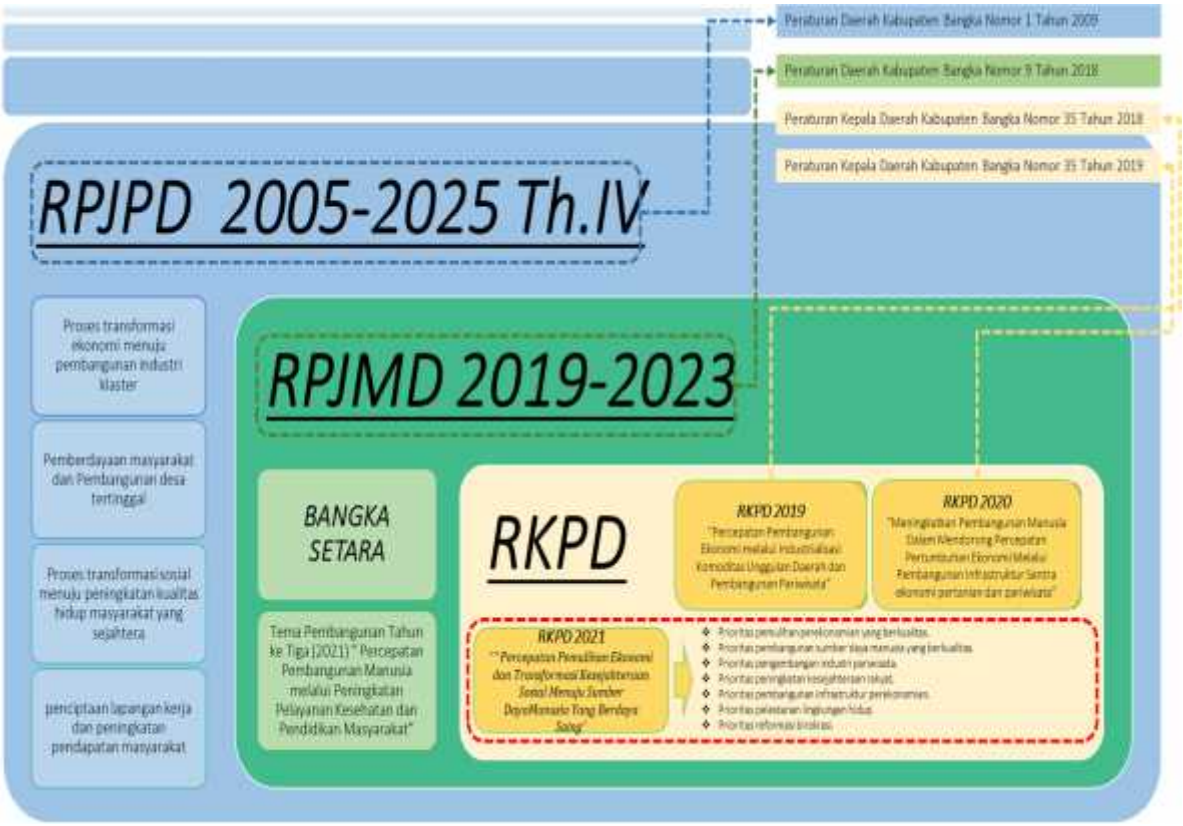

Prioritas pembangunan RKPD 2021 dirumuskan juga tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD 2019-2023. Bahwa dokumen tahunan RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan yaitu dokumen RPJMD. Dapat dilihat keterkaitan antara dokumen kebijakan RPJMD dengan Prioritas yang ditetapkan dalam RKPD 2021 Kabupaten Bangka pada Matrik dibawah ini.

Tabel 4.9

Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dengan Prioritas RKPD 2021

No	Visi Dan Misi	Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2021	Prioritas Pembangunan RKPD 2021
	Visi: Bangka SETARA		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	⟩ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan ⟩ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada Hasil	⟩ Reformasi Birokrasi
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	⟩ Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif Dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah ⟩ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan	⟩ Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah	⟩ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan ⟩ Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dalam Upaya Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat	⟩ Pembangunan infrastruktur perekonomian.
4	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	⟩ Penciptaan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata Dan Industrialisasi Pertanian Serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM	⟩ Pengembangan industri pariwisata.
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	⟩ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatansektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif ⟩ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensipariwisata dan pertanian ⟩ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahanusaha melalui regulasi yang afirmatif ⟩ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian	⟩ Pemulihan perekonomian yang berkualitas. ⟩ Peningkatan kesejahteraan rakyat. ⟩ Pelestarian lingkungan hidup

No	Visi Dan Misi	Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2021	Prioritas Pembangunan RKPD 2021
		) Melaksanakan Pembangunan Yang Berorientasi Pada *Pro Environment*	

Keselarasan pembangunan dengan pemerintah Pusat menjadi fokus agar perencanaan terintegratif sehingga akan dapat menyelesaikan tantangan pembangunan lebih tepat dan cepat. Pada gambar dan tabel dibawah ini dapat dilihat keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Bangka 2021 mengacu padaSasaran dan Prioritas Pembangunan dalam Rancangan RKP Pusat 2021.

Gambar 4.12
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas dalam RKPD 2021 dengan Sasaran dan Prioritas Nasional dalam RKP 2021

Selanjutnya keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dengan prioritas nasional yang tertuang dalam rancangan RKP 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL PADA RKP 2021
Tujuan 1.1 : Meningkatkan Tata Keloa Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	**Sasaran 1.1.1 :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik
			Indeks SPBE		
			IndeksProfesionalitas ASN		
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya		
		Sasaran1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	**Sasaran 2.1.1 :** Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Angka Harapan Lama Sekolah		
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		
			Angka Stunting		
		Sasaran 2.1.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total		

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL PADA RKP 2021
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	**Sasaran 2.2.1 :** Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender		
	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	**Sasaran 2.2.2 :** Meningkatnya Perlindungan Anak	Status Kabupaten Layak Anak		
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Infrastruktur	**Sasaran 3.1.1 :** Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastuktur Ekonomi	Pembangunan infrastruktur perekonomian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
					Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Tujuan4.1 : Meningkatkan Pembangunan SektorPariwisatadalam MendukungPertumbuhanEkonomi Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	**Sasaran 4.1.1 :** Meningkatnya Jumlah Uang Yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money*	Pengembangan industri pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Sasaran 4.1.2 : MeningkatnyaInvestasi di BidangPariwisata	KontribusiInvestasiBidangPariwisataterhadap Total Investasi Daerah (%)		
Tujuan 5.1 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB per Kapita	**Sasaran 5.1.1 :** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pemulihan perekonomian yang berkualitas	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL PADA RKP 2021
		Sasaran 5.1.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)	Peningkatan kesejahteraan rakyat	Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Indeks Desa Membangun		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	**Sasaran5.2.1 :** Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	Pelestarian lingkungan hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
			Ketaatan terhadap RTRW (%)		

Pandemi Covid 19 sangat memiliki dampak besar terhadap pembangunan Nasional khususnya pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2019-2023 mengalami perubahan signifikan. Pengusungan RPJMD dengan tematik sektor pariwisata dan beragam potensi pengembangan yang telah dilakukan dan trend pengembangan sektor pariwisata tersebut selalu mengalami peningkatan, maka dengan adanya Covid 19 ini sangat kuat menyentuh pelaku usaha sektor pariwisata. Kondisi hotel, restoran, objek wisata, dan industri-industri pendukung sektor pariwisata menjadi tertekan, yang dapat diperkirakan omzet atau pendapatan yang diperoleh pelaku usaha tersebut merosot, sehingga target penjualan tidak akan tercapai.

Berbagai regulasi mulai dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskla Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap orang melakukan social distancing sangat mempengaruhi perekonomian daerah.

Bayangkan seluruh sekolah dan Perguruan Tinggi meliburkan semua kegiatan belajar mengajarnya dan menggantikannya dengan proses belajar mengajar secara virtual yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang biasa melayani anak sekolah dan mahasiswa kehilangan pendapatannya. Kondisi tersebut baru dari satu komponen, belum lagi komponen-komponen lainnya, sehingga yang akan terjadi dalam kondisi pandemic Covid 19 ini adalah masyarakat akan kehilangan pekerjaannya yang berdampak kehilangan pendapatan dan berujung kepada peningkatan angka kemiskinan bagi daerah.

Di sektor primer ekonomi dampak dari covid 19 ini salah satunya adalah terhambatnya proses ekspor komoditi andalan Kabupaten Bangka yang juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan dari

permasalahan diatas adalah juga berdampaknya terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu sehingga diperkirakan pembiayaan pembangunan akan berkurang tahun 2020 dan 2021.

Dengan latar belakang poin-poin di atas dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai tahun 2019 serta permasalahan yang ada maka perlu suatu rekonstruksi besar dalam dalam rangka pemulihan kembali segala sektor pasca pandemi covid 19. Oleh karena itu tema pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021 adalah "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Kesejahteraan Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**". Adapun makna dari tema tersebut ialah bagaimana prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat di fokuskan dalam rangka memacu pemulihan ekonomi yang menurun sebagai dampak dari COVID 19 dan juga mengembalikan kemandirian sosial masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID 19 dengan mendorong kebijakan lintas sektoral yang berfokus pada pemulihan industri (baik kecil, menengah dan besar), pariwisata dan investasi.

Selain itu Pandemi COVID 19 juga mengevaluasi pembangunan kesehatan kita yang selama ini cenderung bersifat *business as usual*, reformasi sistem kesehatan daerah yang lebih progresif diperlukan dalam pembangunan kedepan.Pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, jangkauan layanan kesehatan yang lebih luas dan baik menjadi tuntutan kedepannya. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yang dapat dilihat pada ilustrasi keterkaitan Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berikut:

Gambar 4.13
Keterkaitan Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2021

4.3.1 Prioritas Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business prosess)* dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur daerah Kabupaten Bangka agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Gambar 4.14
Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2021

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu prioritas Pembangunan pada RKPD tahun 2021 Kabupaten Bangka. Upaya yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a) Terus meningkatkan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja;
b) Menciptakan mental aparatur yang berbudaya kerja positif melalui pendidikan pelatihan dan sistem reward and punishment;
c) Mereviu selalu kinerja organisasi agar tepat sasaran, tepat fungsi dan tepat ukuran

d) Mendorong terciptanya tata laksana pemerintahan yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan upaya membuat proses bisnis dalam pelaksanaan tata kerja kinerja yang ingin dicapai;

e) Pembuatan regulasi dimana tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dan kondusif dalam pelaksaannya;

f) Meningkatkan Kinerja Pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bebas KKN;

g) Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan

h) Meningkatkan Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi adalah dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.11
Konsistensi Prioritas Reformasi Birokrasi terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	⎩ Program Pengelolaan Arsip ⎩ Program Pembinaan Perpustakaan ⎩ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ⎩ Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ⎩ Program Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah ⎩ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ⎩ Program Pelayanan Penanaman Modal ⎩ Program Informasi Dan Komunikasi Publik ⎩ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Profesionalisme Pemerintahan	⎩ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ⎩ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ⎩ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ⎩ Program Kepegawaian Daerah ⎩ Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
			⁾ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ⁾ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ⁾ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Akuntabilitas Kinerja	⁾ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ⁾ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ⁾ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ⁾ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ⁾ Program Penyelenggaraan Pengawasan ⁾ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4.3.2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pembangunan Manusia tidak terlepas dari segitiga pembangunan dasar yaitu kemapanan ekonomi, tingkat pendidikan yang berkualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sedang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidilkan perlu adanya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat dengan rata-rata lama sekolah rendah dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2019 dan 2020, dimana khusus bidang kesehatan masih dipandang perlu untuk difokuskan guna menciptakan reformasi sistem kesehatan daerah sebagai evaluasi dari dampak Pandemi COVID 19.

Prioritas ini selaras dengan misi 2 RPJMD Bangka Setara Tahun 2019-2023 yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas dan juga selaras dengan Prioritas RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021 yakni Pembangunan Pendidikan dan Pembangunan Kesehatan. Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 juga masih menekankan pentingnya Pembangunan SDM yang dinamis, produktif trampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Gambar 4.15
Pelaksanaan Upaya Pencipataan Pembangunan Manusia Berkulaitas Melalui Mou di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan

Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas pembangunan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.12
Konsistensi Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan	) Program Pengelolaan Pendidikan) Program Pengembangan Kurikulum) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
		Peningkatan Kualitas Kesehatan	⁾ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ⁾ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ⁾ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ⁾ Program Pengawasan Keamanan Pangan ⁾ Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	⁾ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan(Enterpreneurship) ⁾ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) ⁾ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) ⁾ Program Penempatan Tenaga Kerja ⁾ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ⁾ Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

4.3.3. Pembangunan Infrastruktur Perekonomian

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur pengembangan pusat-pusat produksi wilayah, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sapras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan. Data menunjukkan bahwa Indeks Pemerataan Infrastruktur wilayah pada Tahun 2019 berada di angka 0,2088. Prioritas ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Bangka Belitung maupun Nasional yakni prioritas penyediaan sarana dan prasarana. Prioritas ini juga mendukung misi 3 RPJMD Kabupaten Bangka

tahun 2019–2023 yaitu "Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah" dan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam arah pembangunan 2020-2024 yang mana salah satunya menekankan ke pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi. Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas Pembangunan Infrastruktur adalah dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.13
Konsistensi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perekonomian terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian	Infrastruktur Sosial	⟩ Program Pengembangan Permukiman ⟩ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ⟩ Program Pengelolaan Pendidikan ⟩ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ⟩ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ⟩ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ⟩ Program Pengembangan Perumahan
		Infrastruktur Ekonomi	⟩ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) ⟩ Program Penyelenggaraan Jalan ⟩ Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

4.3.4. Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata

Sektor Pariwisata adalah sektor ekonomi potensial yang paling bisa dikembangkan dan bersifat *sustainable* di Kabupaten Bangka. Pembangunan pariwisata yang dimaksud adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka

diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka dilakukan melalui penetapan (KEK) Pariwisata dengan tujuan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Bangka. Kemungkinan hal ini sangat besar bisa terwujud karena KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan infrastruktur.

Peluang Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan sangat besar karena parawisata merupakan salah satu industri yang menarik dan menguntungkan bagi Kabupaten Bangka. Dengan begitu perkembangan pariwisata tiap tahunnya harus selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka. Saking menariknya industri ini, peluangnya pun di masa depan masih sangat menjanjikan. Bahkan kini tiap negara berusaha membuat pariwisata mereka semakin dikenal oleh banyak orang, dan orang Indonesia pun mempunyai peluang yang besar untuk menggaet wisatawan asing agar datang berkunjung. Selama ini pertumbuhan dunia pariwisata Kabupaten Bangka terus berkembang seiring dengan banyaknya objek wisata yang dibuat oleh masyarakat setempat ataupun investor.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti argowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi masyarakat sekitar, masyarakat dapat diikutsertakan dan keuntungan yang diperoleh pundapat dirasakan oleh masyarakat wilayahnya. Pengembangan Industri pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan;
2. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini penting karena pengalaman pada beberapa Daerah Tujuan Wisata (DTW), sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Contoh kasus : pengelolaan DTW di Pantai Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Pada DTW tersebut masyarakat tidak berkesempatan untuk terlibat, baik untuk menjual hasil-hasil pertanian, kerajinan maupun menjadi karyawan di tempat itu;
3. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program *Visit Indonesian Year* seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan membentuk sistem informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang potensial;
4. Perlu menentukan DTW-DTW utama yang memiliki keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami. Kebetulan saat ini obyek wisata yang alami dan tradisional menjadi sasaran utama para wisatawan asing.
5. Pemerintah daerah harus dapat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dengan sistem yang jujur, terbuka dan adil. Kerja sama ini penting untuk lancarnya pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerjasama di antara penyelenggara juga perlu dibangun. Kerjasama di antara agen biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi

dan komponen-komponen terkait lainya merupakan hal yang sangat penting bagi keamanan kelancaran dan kesuksesan pariwisata;

6. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua DTW, perhatian DTW yang sudah mandiri hendaknya dikurangi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap DTW yang memerlukan perhatian lebih;
7. Mengajak masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan;
8. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telepon, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain di sekitar lokasi DTW sangatdiperlukan.

Tabel 4.14
Konsistensi Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pengembangan Industri Pariwisata	Daya Tarik Dan Amenitas Pariwisata	) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Promosi Parisiwata	) Program Pemasaran Pariwisata) Program Informasi Dan Komunikasi Publik) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Kerjasama Masyarakat,Swasta Pelaku Wisata	) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
			)
		Regulasi	) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

4.3.5. Prioritas Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas

Tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Optimisme itu berlandaskan keyakinan pandemi virus corona (Covid-19) akan selesai tahun depan. Tahun 2021 adalah tahun *recovery*, tahun pemulihan, dan tahun *rebound* (kebangkitan). Oleh karena itu kecepatan tidak hanya dibutuhkan saat penanganan pandemi Covid-19 saja, tetapi juga untuk persiapan pemulihan akibat Covid-19. Mengidentifikasi secara detail sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi hal yang pertama harus dilakukan. Contohnya, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, konstruksi dan transportasi.

Selain sektor terdampak, identifikasi juga harus dilakukan terhadap sektor yang mampu bertahan, bahkan mampu mengambil peluang di tengah pandemi Covid-19. Misalnya sektor tekstil dan produk tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan jasa logistik. Situasi pandemi Covid-19 juga harus digunakan sebagai momentum melakukan reformasi. Di saat seperti inilah, pemerintah bisa melihat seberapa kuat ketahanan sosial, ekonomi dan pangan yang dimiliki. Beberapa kebijakan yang dapat diambil khususnya untuk sektor UMKM, perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Kebijakan *Refocussing* Sektor Perdagangan dan Jasa

No	Permasalahan UMKM Di Era COVID 19	Skenario Kebijakan Intervensi Program/Kegiatan
1	Ketidakmampuan Pembayaran Biaya Cicilan/Bunga Pinjaman Oleh UMKM	Relaksasi/Restrukturisasi Angsuran Pembayaran Kredit Oleh Nasabah di Bank Sumsel Babel, Jamkrida dst
		Relaksasi (Pemotongan Atau Pemangkasan) Pajak Dan Retribusi Bagi UMKM
		Penguatan Modal melalui Skema Pembiayaan tanpa bunga dan agunan ke UMKM dan IKM
2	Melemahnya Distribusi Barang/Produk UMKM Terhadap Pasar Karena Rendahnya Permintaan Pasar Dan Pemberlakuan Kerja di Rumah (*Work from Home)*	Fasilitasi Pembuatan Sistem Aplikasi Belanja *Online* Melalui Mekanisme Kerjasama Dengan Pihak *E Commers*
		Pemberdayaan dan Pemberian Subsidi UMKMsebagai upaya dalam memberikan proteksi input dan proteksi output usaha
		Membangun Pola Kemitraan Dengan *E Commers*
		Kebijakan Gerakan Bersama (*Collective Action*) Agar Masyarakat Mengkonsumsi Produk Lokal
3	Pemutusan Hubungan Kerja	Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah Kepada Karyawan UMKM
		Workshop (Pelatihan) Sistem Transaksi Jual Beli Online Bagi Karyawan Yang Terdampak PHK Untuk Mendapatkan Pekerjaan Baru Alternatif
		Pemberian Bantuan Mendorong Jenis Usaha Baru Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Covid 19
		Pelatihan Keterampilan Balai Latihan Kerja
4	Kemampuan SDM Dibidang *E Commers* Rendah	Pelatihan Penjualan *Online* Bagi Umkm
		Pelibatan Komunitas Dalam Pemberdayaan Umkm Market *Online*

Pemilihan Prioritas Pembangunan perkonomian yang berkualitas didukung beberapa kebijakan dan program prioritas yang mana telah dipetakan dan dikolaborasikan di beberapa perangkat daerah melalui pembahasan musrenbang RKPD tahun 2020. Berikut merupakan ilustrasi dukungan Program-program prioritas terhadap prioritas tersebut.

Tabel 4.16
Konsistensi Prioritas Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas

terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas	Stimulan Pengembalian Kemampuan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, Umkm Dan Koperasi	⎫ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) ⎫ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ⎫ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Insentif Perizinan Dan Perpajakan	⎫ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ⎫ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Moda ⎫ Program Pelayanan Penanaman Modal
		Identifikasi Sektor Terdampak	⎫ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ⎫ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ⎫ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Secara makro selain intervensi pemulihan ekonomi sektor yang terdampak oleh pandemi COVID 19 perlu dilakukan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan, dan daya saing produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan, optimalisasi pengelolaan hutan rakyat, pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, meningkatkan pelayanan kegiatan perdagangan skala mikro kecil dan menengah, peningkatan perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Bangka sebagai Daerah tujuan Investasi dan pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan

berkelanjutan yang mana Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata menjadi *trigger* dalam rangka memicu daya tarik tersebut.

Perekonomian Kabupaten Bangka tidak bisa dilepaskan dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan besar dan eceran dan lain-lain yang adalah merupakan sektor-sektor unggulan daerah. Fokus pembangunan industri dilaksanakan berbasiskan sektor unggulan pariwisata dan industri yang menggunakan bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Karenanya fokus industrialisasi harus beriringan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan seluruh sub sektornya untuk menjamin ketersediaan input industri. Berikurt merupakan grafik kontribusi 4 sektor unggulan ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bangka.

Gambar 4.16
Empat Sektor Unggulan Ekonomi Kabupaten Bangka
Berdasarkan Kontribusi Terhadap PDRB Tahun 2019

Khusus komoditas unggulan pertanian Kabupaten Bangka berupaKelapa Sawit, peningkatan produksi dan produktivitas akan dilakukan melalui program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR), kerjasama Pemerintah Kabupaten Bangka, Perkebunan Kelapa Sawit Swasta, Perbankan dan masyarakat. Program ini sudah berjalan sejak 2014-2019 dan sudah dirasakan peran dan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelompoknya. Karenanya program ini

akan dilanjutkan dengan jumlah petani binaan dan luasan perkebunan rakyat yang lebih besar.

Untuk komoditas Lada peningkatan produksi dan produktivitas akan dilaksanakan melalui Program Resi Gudang Lada (Regula) atau Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikerjasamakan melalui perbankan yang bertujuan untuk memberdayakan petani Lada Kabupaten Bangka mendukung Program Resi Gudang Provinsi. Dalam pelaksanaannya petani mendapatkan kemudahan dalam menitipkan lada, mendapatkan pembinaan terkait pasca panen lada agar lada yang dihasilkan memiliki standar kualitas eksport serta petanibisa mendapatkan pinjaman dari Lada yang disimpan/dititipkan. Selain itu dengan program ini menjamin harga lada sehingga petani bisa mendapatkan lada dengan harga yang tinggi.

Sedangkan untuk komoditas Karet dan Singkong, peningkatan produksi dan produktivitas dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan Karet dan Tapioka dengan sistem Kebun Karet Rakyat (KKR) dan Kebun Singkong Rakyat (KSR) yang menyadur program KKSR untuk Kelapa Sawit. Pembinaan dilakukan oleh perusahaan swasta terkait kerjasama dan penjaminan membeli karet dari masyarakat binaan dengan harga yang baik.

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian memiliki beberapa peranan yaitu mensejahterakan petani, menyediakan kebutuhan pangan, sebagai wahana pemerataan pembangunan, sebagai pasar input bagi pengembangan agroindustri, menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan nasional, dan mempertahankan kelestarian sumber daya. Selain itu secara statistik dapat dilihat besarmya kontribusi sektor pertanian dan pariwisata dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi yang terus meningkat dan pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 19,46% dari total PDRB Kabupaten Bangka. Produktivitas sektor ekonomi lainnya seperti industri

pengolahan mengalami peningkatan sehingga mendominasi di tataran kontribusi terhadap total PDRB. Industrialisasi pertanian merupakan perubahan dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu sub sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap sektor industri pengolahan.

Pada tahun 2019 sektor indusstri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 21,23% dari total PDRB. Aplikasi dari industrialisasi pertanian ini, menuntut perubahan yang signifikan dari modernisasi produksi manufaktur yang merupakan kegiatan untuk mentransformasikan produk dari petani ke tujuan akhir konsumen (yang meliputi kegiatan produksi dan *processing*) serta modernisasi distribusi dan koordinasi dalam rantai pasar pertanian. Pengembangan agroindustri akan berdampak pada penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus pemerataan pembangunan. Pengembangan agroindustri diarahkan untuk:

1. Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah;
2. Memacu peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan;
3. Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan;
4. Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis;
5. Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.

Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas pembangunan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.17
Konsistensi Prioritas Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas

secara Makro terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas	Pengembangan Agro Industri	⎩ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ⎩ Program Perizinan Usah Pertanian
		Pengembangan Produktivitas Komoditi Pertanian	⎩ Program Penyuluhan Pertanian ⎩ Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian ⎩ Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian
		Pengembangan UMKM dan Koperasi	⎩ Program Pemberdayaan UMKM ⎩ Program Stabilisasi Harga Barabg Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ⎩ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

4.3.6. Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata berkualita yang walaupun secara angka Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangka Memiliki angka yang cukup rendah yaitu ± 0,280. Walaupun secara statistik angka gini ratio tersebut dikategorikan rendah tapi jika dilihat komposit penghitungannya kesenjangan yang rendah itu terjadi karena pemerataan pengeluaran masyarakat masih di batas menengah ke bawah jika dibandingkan dengan daerah lain. Dapat disimpulkan secara teoritik bahwa Kabupaten Bangka merata di level bawah karena pengeluaran rata-rata masyarakat di Kabupaten Bangka sangatlah kecil. Perlu adanya upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan pemerataan infrastruktur untuk menciptakan pemerataan yang berkualitas. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda (sarjana pendidikan)

untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil. Meningkatkan upaya keterkaitan kegiatan ekonomi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, Pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Prioritas ini adalah salah satu prioritas yang menjadi *core* di antara prioritas lainnya karena pencapaian prioritas pembangunan pemerataan ini tergantung dari pencapaian prioritas pembangunan lainnya. Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas pemerataan kesejahteraan sosial adalah dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.18
Konsistensi Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pemulihan Perekonomian Yang Berkualitas	Bantuan Sosial	⎩ Program Pemberdayaan Sosial ⎩ Program Rehabilitasi Sosial ⎩ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pengembangan Tenaga Kerja Handal	⎩ Program Penempatan Tenaga Kerja ⎩ Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Kerja
		Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan	⎩ Program Pengelolaan Pendidikan ⎩ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kedehatan masyarakat

4.3.7. Prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya menciptakan Pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang menjadi kunci dalam pelaksanaannya yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan Selain pembangunan berkelanjutan, terdapat pula konsep pembangunan hijau yang sebenarnya berhubungan dengan

pembangunan berkelanjutan. Perbedaan antara pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan terletak pada fokus pembangunan hijau yang lebih mengutamakan aspek lingkungan dalam pembangunan diantara tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan dimana makna hijau sendiri dari istilah pembangunan hijau dapat dikatakan merujuk pada alam dan kelestariannya. Pembangunan hijau juga tidak hanya berbicara mengenai manajemen lingkungan saja, melainkan juga mengenai siapa yang akan memanajemen lingkungan tersebut dan bagaimana bentuk pengelolaannya. Meskipun memiliki perbedaan, pada intinya pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan adalah dua konsep pembangunan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka berada pada angka 65,10. Masih memerlukan upaya dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan hidup daerah dalam menciptakan tutupan lahan, kualitas udara dan kualitas air yang ada di Kabupaten Bangka. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menyeleraskan Pembangunan Sektoral dengan Perencanaan Spasial yang telah dirumuskan;
3. Memantapkan prosedur perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat Kabupaten Bangka secara aktif disertai pengembangan pemahaman mengenai pembangunan berwawasan lingkungan termasuk melalui LSM;
4. Menerapkan prosedur AMDAL dengan segala konsekuensinya dan secara konsisten untuk semua kegiatan pembangunan;
5. Menyelesaikan setiap permasalahan lingkungan hidup dengan cara-cara bijaksana;

6. Melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelanggar hukum/pencemar/perusak lingkungan;
7. Melengkapi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sampai ke tingkat desa.

Adapun program prioritas yang akan direncanakan untuk dapat menunjang keberhasilan prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup adalah dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Tabel 4.19
Konsistensi Prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup terhadap Program Prioritas

NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
1	Pengembangan Industri Pariwisata	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	⁾ Program Pengelolaan Persampahan
		Pembangunan Berbasis Lingkungan	⁾ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ⁾ Program Pengendalian Pendemaran dan/atas kerusakan lingkungan hidup ⁾ Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap ixin pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ⁾ Program Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Mitigasi Bencana	⁾ Program Penanggulangan Bencana ⁾ Program Penangulangan Kebakaran
		Penataan Ruang	⁾ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4.3.8. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDG's

Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya bersama dalam membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk masyarakat dan planet. Agar pembangunan tersebut dapat tercapai maka formula yang disusun haruslah menyelaraskan tiga elemen inti dari

pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan global, diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan merata, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pengembangan sosial yang inklusif dan setara, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya dan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan serta melindungi sumberdaya alam dan ekosistem yang sering diekspolitasi dan dirusak ketika pembagunan berlangsung.

5 (lima) prinsip dasar dalam pelaksanaan SGDs memuat 17 tujuan antara lain :

1. **Tanpa kemiskinan**, Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat;
2. **Tanpa kelaparan**, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
3. **Kehidupan sehat dan sejahtera**, Menjamin hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia;
4. **Pendidikan berkualitas**, Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. **Keseteraan gender**, Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. **Air bersih dan sanitasi layak**, Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. **Energi bersih dan terjangkau**, Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;

8. **Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang lapang dan produktif dan layak untuk semua;
9. **Industri**, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur yang kuat, menggalakkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. **Berkurangnya kesenjangan**, Mengurangi ketidaksamaan dalam negara dan di antara negara- negara;
11. **Kota dan pemukiman yang berkelanjutan**, Membuat kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab**, Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. **Penanganan perubahan iklim**, Mengambil langkah mendesak untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
14. **Ekosistem lautan**, Melindungi dan menggunakan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. **Ekosistem daratan**, Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem darat *(terrestrial)*, pengelolaan hutan-hutan yang berkelanjutan, melawan penggurunan, dan menghentikan dan merehabilitasi degradasi lahan serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
16. **Perdamaian**, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi- institusi yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan;
17. **Kemitraan untuk mencapai tujuan**. memperkuat cara implemenstasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan tersebut menjelaskan SDG's melibatkan negara-negara untuk saling berkerja sama dalam mempromosikan martabat, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan bagi semua orang serta melindungi lingkungan. Mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan SDG's merupakan tanggungjawab semua negara dan masyarakat dalam mendukung agenda tersebut. Partisipasi publik yang lebih luas dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Bangka, partisipasi publik dalam pelaksanaan tujuan SDG's tersebut diwujudkan dengan membentuk organisasi bersama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dengan hal seperti ini maka pemerintah dengan mudah melakukan pemetaan masalah dilapangan, membuat solusi dan melakukan monitoring serta evaluasi. Selain itu, pencapaian tujuan SDG's di Kabupaten Bangka diwujudkan dalam sejumlah program daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.20
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
dengan Program Daerah

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
1	Tanpa kemiskinan, Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,97	5,11	a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial b) Program Pemberdayaan Sosial
2	Tanpa kelaparan, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,97	5,11	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b) Program Penanganan Kerawanan Pangan c) Program Pengawasan Keamanan Pangan
3	Kehidupan sehat dan sejahtera, Menjamin hidup sehat dan menggalakkan kesej ahteraan untuk semua usia;	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,99	71,05	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
4	Pendidikan berkualitas, Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,25	a) Program Pengelolaan Pendidikan b) Program Pengembangan Kurikulum c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	12,80	
5	Keseteraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	62,56	62,63	a) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b) Program Perlindungan Perempuan c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6	Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	63,89	65,48	a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
						b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7	Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;					Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang lapang dan produktif dan layak untuk semua;	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,93	2,95	a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja b) Program Penempatan Tenaga Kerja c) Program Hubungan Industrial
9	Industri, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur yang kuat, menggalakkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Ekonomi	81,94	84,41	a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
10	Berkurangnya kesenjangan, Mengurangi ketidaksamaan dalam negara dan di antara negara- negara;	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	63,89	65,48	a) Program Pemberdayaan Sosial b) Program Rehabilitasi Sosial

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
						c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, Membuat kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan;	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	63,89	65,48	a) Program Pengembangan Perumahan b) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,07	a) Program Pengawasan Keamanan Pangan b) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
13	Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah mendesak untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,07	a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup b) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
						Lingkungan Hidup (PPLH) d) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat f) Program Pengelolaan Persampahan
14	Ekosistem lautan, Melindungi dan menggunakan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,07	a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
15	Ekosistem daratan, Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem darat (terrestrial), pengelolaan hutan- hutan yang berkelanjutan, melawan penggurunan, dan menghentikan dan merehabilitasi degradasi lahan serta menghentikan	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,07	c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) d) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	SDG'S	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Realisasi Sasaran Daerah 2019	Target Sasaran Daerah 2021	Program Daerah
	kepunahan keanekaragaman hayati;					
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,07	78,79	a) Program Pengembangan Kebudayaan b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan memperkuat cara implemenstasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Indeks Desa Membangun	0,723	0,812	a) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat b) Program Perekonomian dan Pembangunan c) Program Administrasi Umum

4.3.9. Kebijakan dan Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Pendidikan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut : 1) Pendidikan anak usia dini 2) Pendidikan Dasar 3) Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.21
Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	69,44 %	100%	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah WargaNegara Usia 7-15 Tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,19 %	100%	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
		(SD/ Mi, SMP /MTs /SLB)			
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WargaNegara Usia7-18 Tahun yang belum menyelesai-kan Pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.	21,59 %	100%	Program Pengembangan Kurikulum

b. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)Bidang Kesehatan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);

Tabel 4.22

Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Urusan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	95,13%	100 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	91,65%	100 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat layanan kesehatan	101,10%	100 %	
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	97,17%	100 %	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,04%	100 %	
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	68,09%	100 %	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	93,55%	100 %	
8.	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	86,80%	100 %	
9.	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	87,59%	100 %	
10.	Pelayanan Kesehatan orang Dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yan terlayani kesehatan	100%	100 %	
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan	100,36%	100 %	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
		layanan kesehatan			
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksivirus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	107,24%	100 %	

c. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

Tabel 4.23
Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87%	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,12%	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

d. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

Tabel 4.24
Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Penyediaan & rehabiiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %	Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang Memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	**100 %**	**100 %**	Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)

e. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Tabel 4.25
Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70,73 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	70,73 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100 %	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negarang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100 %	Program Penanggulangan Kebakaran

f. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten .

Tabel 4.26
Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja	Program Daerah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	70,73 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	70,73 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %	Program Penanganan Bencana

4.3.10. Kebijakan Dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Kabupaten, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Bangka, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa Kabupaten berhak menetapkan kebijakan Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Arah kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangka dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. mewujudkan penelolaan anggaran Kabupaten yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pengitegrasian gender dalam pembangunan di Kabupaten Bangka juga telah dituangkan dalam rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 yang disahkan melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 12A Tahun 2018 dengan strategi sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
b. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
c. Implementasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)
d. Peningkatan Sistem Data Dan Informasi Gender
e. Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
f. Penanganan Isu Strategi Gender

Pada Tahun 2021 Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam beberapa program sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.27
Program Daerah Mendukung Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET KINERJA TAHUN 2021

1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	79,41	100
		Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	NA	22,30
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	100	100
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kasus Konseling Keluarga yang terselesaikan	100	100
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Pemenuhan Profile Gender Yang Up To Date	100	100

4.3.11. Arah Kebijakan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Bangka lebih kepada pencegahan dan penanggulangan bencana. Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bangka adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya pencegahan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Di dalam perda tersebut, penanggulangan bencana memiliki tujuan antara lain :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. melaksanakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka dengan dasar hukum berupa peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait seperti TNI/Polri, masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga internasional.

Dalam RKPD Tahun 2021 sasaran dan program prioritas lintas bidang penanggulangan bencana ini berada pada pelaksanaan misi ke 5 "**Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas. Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan hidup daerah ini adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan target 76,76. Untuk memastikan kondisi aman bencana di Kabupaten Bangka maka ditetapkan Sasaran pembangunan lingkungan hidup ini adalah Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kinerja Lingkungan Hidup sebesar 76,76 pada tahun 2021 dan Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100%.

Pada tahun 2021, penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam beberapa program sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.28

Program Daerah Tahun 2021 Pendukung Penanggulangan Bencana

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET KINERJA TAHUN 2021
1	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100	100
2	Program Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK	100	100
3	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Alam Kabupaten/kota	100	100

4.3.12. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)** dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 diimplementasikan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

A. Aspek Tematik

Aspek tematis dalam penyusunan RKPD tahun 2021 Kabupaten Bangka menjelaskan perencanaan yang didetailkan sampai dengan program prioritas. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor perlindungan

sosial, kesehatan, pendidikan, UMKM, industri unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian serta peningkatan investasi. Selain itu, juga direncanakan untuk melakukan penguatan ketahanan pangan daerah, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem pelestarian lingkungan hidup untuk mengantisipasi peristiwa kebencanaan, baik bencana alam maupun bukan-alam. Upaya untuk merespons dampak Covid 19 juga dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui industri pertanian, industri UMKM dan pariwisata, dan jasa produktif lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKPD 2021 yaitu:

Tema RKPD 2021:
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Kesejahteraan Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Dokumen RKPD 2021 Kabupaten Bangka menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam prioritas daerah dan program prioritas daerah dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran Prioritas daerah secara efektif. Adapun prioritas daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD 2021 meliputi:

1. Reformasi birokrasi.
2. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Pembangunan infrastruktur perekonomian.

4. Pengembangan industri pariwisata.
5. Pemulihan perekonomian yang berkualitas.
6. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai prioritas daerah yang telah ditetapkan guna mencapai target yang telah ditetapkan telah disusun program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.29
Aspek Tematis dalam Prioritas dan Program Prioritas
Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
1.	Pemulihan Perekonomian yang berkualitas	Program Pemberdayaan UMKM
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannnya
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penataan Desa
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penanggulangan Kebakaran
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		Program Penatagunaan Tanah
4.	Pemulihan Ekonomi yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyuluh Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5.	Pemulihan Ekonomi yang berkualitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6.	Pengembangan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengelolaan Izin Lokasi
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
7.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, ALat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pengendalian Penduduk

B. Aspek Holistik

RKPD Kabupaten Bangka tahun 2021 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka pendek tahunan dan menengah yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Aspek holistik dalam dokumen perencanaan difokuskan dalam menangani prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka tahun 2021 dengan dukungan program yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansipemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang (*holistic*) meliputi:

1) **Reformasi Birokrasi.** Reformasi birokrasi juga masih menjadi permasalahan utama termasuk penegakkan hukum di bebagai tindak kejahatan. Isu strategis lainnya yang perlu diatasi adalah (1) Koordinasi, penegakkan hukum, dan konflik tata ruang, yaitu konflik mengenai lahan. (2) Tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan. (3) Masih tingginya konflik sosial di tengah masyarakat akibat faktor sosial dan ekonomi. (4) Rendahnya kesadaran dan pemahaman politik di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan reformasi perlu intervensi program lintas bidang dan kelembagaan.
2) **Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas**. Pembangunan SDM terkait dengan berbagai aspek sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Untuk itu, berbagai upaya berbagai upaya perlu dilakukan dengan melibatkan instansi dinas pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keluarga

berencana, pemudan dan olahraga dengan program dan kegiatan lintas bidang.

3) **Pembangunan infrastruktur perekonomian**. Infrastruktur memiliki dampak terhadap investasi, kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi regional dan secara sektoral, kesehatan, pendidikan, perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekspor dan sebagainya. Sarana dan prasarana lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur perekonomian juga menangkut ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrutur dilakukan perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta. Selain itu perlu dilakukan penyelarasan secara koordinasi dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dalam mendukung program dan kegiatan secara menyeluruh.
4) **Pengembangan industri pariwisata**. Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan lintas sektoral dan kelembagaan. Mengingat dampak pariwisata yang cukup besar dan *multyeffect* terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dinas yang perlu dilibatkan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perindagkop UMKM, Penanaman modal dan lain-lain.
5) **Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**. Pemulihan pertumbuhan perekonomian dilakukan melalui perkuatan ekonomi

daerah. Perkuatan ekonomi daerah diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, efektifitas pengeluaran pemerintah daerah serta ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata. Dari sisi produksi, peningkatan industri pengolahan dan industri unggulan daerah sektor pertanian dan logam timah dilakukan melalui revitalisasi industri sedangkan peningkatan produksi sektor pertanian dilakukan melalui revitalisasi pertanian. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kebijakan diarahkan untuk menggerakkan sektor UMKM, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh sektor dan kelembagaan secara holistik.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perkuatan lembaga keuangan. Di sisi kebijakan fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan. Di sisi kebijakan moneter, kebijakan diarahkan untuk menjaga laju inflasi dan nilai tukar rupiah. Perkuatan lembaga keuangan diarahkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan

6) **Penanggulangan Kemiskinan.** Kemiskinan bersifat **multidimensi** sehingga memerlukan pendekatan yang ***holistik*** dalam upaya pengentasannya. Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin

karena tidak pernah mendapat kesempatan kerja, dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping itu penaggulangan kemiskinan juga perlu didukung dengan kebijakan di ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta kebijakan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri. Upaya holistik yang bersifat sektoral dan kelembagaan dapat secara efektif menurunkan angka kemiskinan.

7) **Pengelolaan lingkungan hidup**. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan fenomena yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional bahkan global, karena berdampak signifikan terhadap hasil pembangunan dan keberlangsungan kehidupan. Fenomena yang terjadi seperti (1) kenaikan permukaan air laut, (2) perubahan dan pergeseran musim hujan dan musim kering yang berdampak pada produksi pertanian dan (3) peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan dan kebakaran hutan akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan apabila tidak ditangani secara tepat dan menyeluruh. Secara lokal, nasional dan global, kerusakan lingkungan juga telah berdampak pada gagalnya produksi komoditas pangan yang mengakibatkan naiknya harga

komoditas pangan pokok masyarakat. Berkaitan dengan itu, Kabupaten Bangka perlu menjadikan isu ini menjadi isu sentral untuk terus berperan aktif dalam upaya menurunkan laju kerusakan lingkungan melalui berbagai kerjasama baik dengan lembaga di tingkat daerah, provinsi dan nasional.

Aspek holistik juga diterapkan dalam dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Bangka menekankan pada pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir. Seluruh program yang tertuang dalam RKPD 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka dirumuskan dengan memperhatikan aspek perencanaan program yang terkait dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan output dan dampak kegitan yang saling berhubungan antara satu program dengan program lainnya.

Tabel 4.30
Aspek Holistik dalam Dokumen RKPD Kabupaten Bangka
Tahun 2021

HULU ke HILIR						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**ARAH PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH**
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Hubungan Industri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Perlindungan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Reformasi Birokrasi Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Program Pengembangan Perumahan	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Pembangunan infrastruktur perekonomian

HULU ke HILIR

1	2	3	4	5	6	ARAH PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penatagunaan Tanah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	Pemulihan perekonomian yang berkualitas.
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannnya	Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)	Program Penyelenggaraan Jalan		Pembangunan infrastruktur perekonomian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)		Pemulihan perekonomian yang berkualitas
Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengembangan UMKM		Pemulihan perekonomian yang berkualitas
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pemulihan perekonomian yang berkualitas
Program Pemasaran Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Pemulihan perekonomian yang berkualitas
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lignkungan Hidup (PPLH)	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakats	Pembangunan infrastruktur perekonomian Pengelolaan lingkungan hidup;
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Hubungan Industrial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja		Pemulihan perekonomian yang berkualitas Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Pembangunan Daerah		Reformasi Birokrasi Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur perekonomian

HULU ke HILIR						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**ARAH PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH**
						Pengembangan industri pariwisata. Pemulihan perekonomian yang berkualitas. Penanggulangan kemiskinan Pengelolaan lingkungan hidup

C. Aspek Integratif

Aspek integratif menekankan pada penjelasan perencanaan siapa berbuat apa dan integrasi sumber pendanaan. Prioritas Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebanyak 7 prioritas yang terdiri dari 122 Program dan dilaksanakan oleh 34 SKPD. Seluruh program dilaksanakan secara terintegratsi oleh beberapa SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program RKPD Kabupaten Bangka bersumber dari dana APBD Kabupaten Bangka tahun 2021, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Rincian program pendukung prioritas dan OPD pelaksana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 4.17
Aspek Integratif Program Prioritas 1 Reformasi Birokrasi

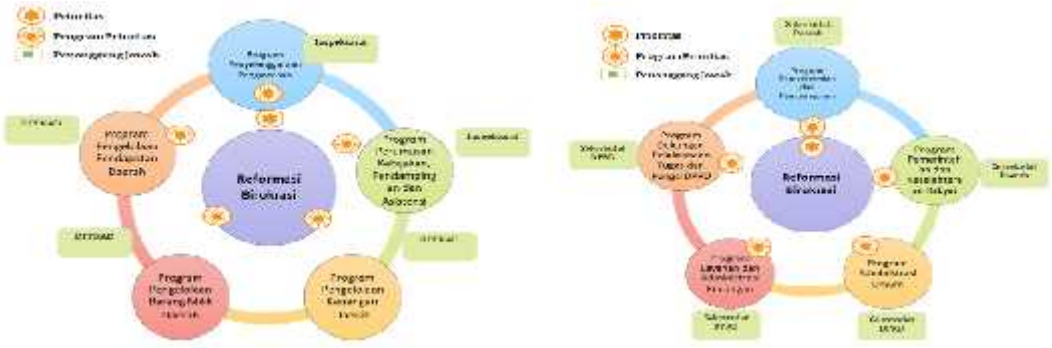

Gambar 4.18
Aspek Integratif Program Prioritas 2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

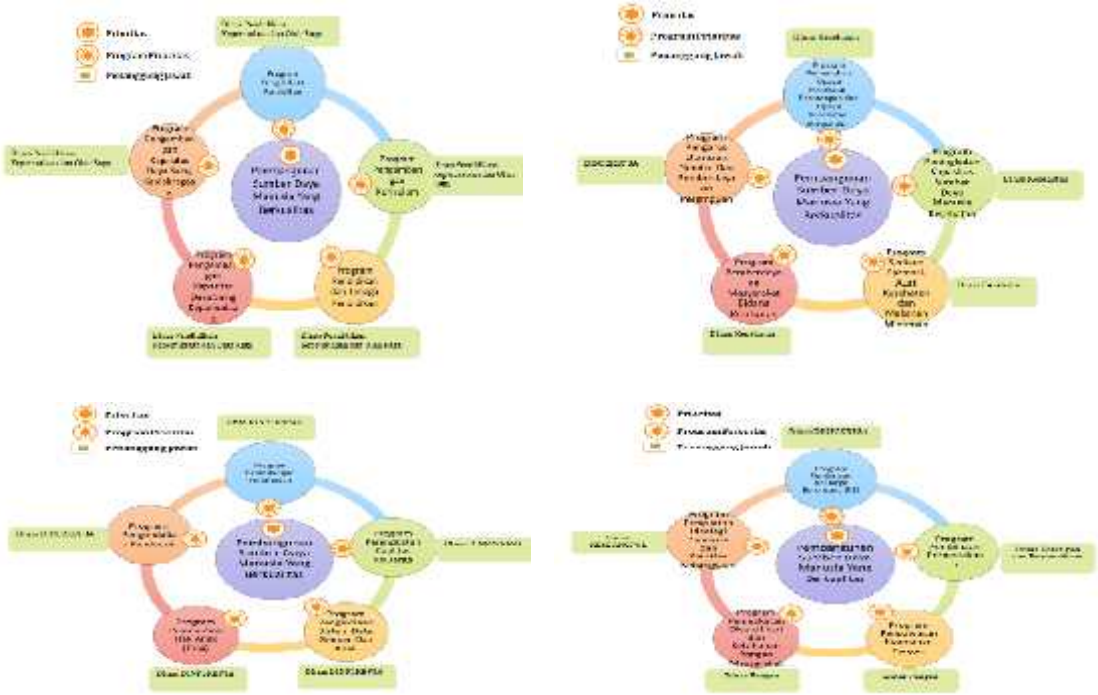

Gambar 4.19
Aspek Integratif Program Prioritas 3 Pembangunan Infrastruktur Perekonomian

Gambar 4.20
Aspek Integratif Program Prioritas 4 Pengembangan Industri Pariwisata

Gambar 4.21
Aspek Integratif Program Prioritas 5 Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas

Gambar 4.22
Aspek Integratif Program Prioritas 6 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

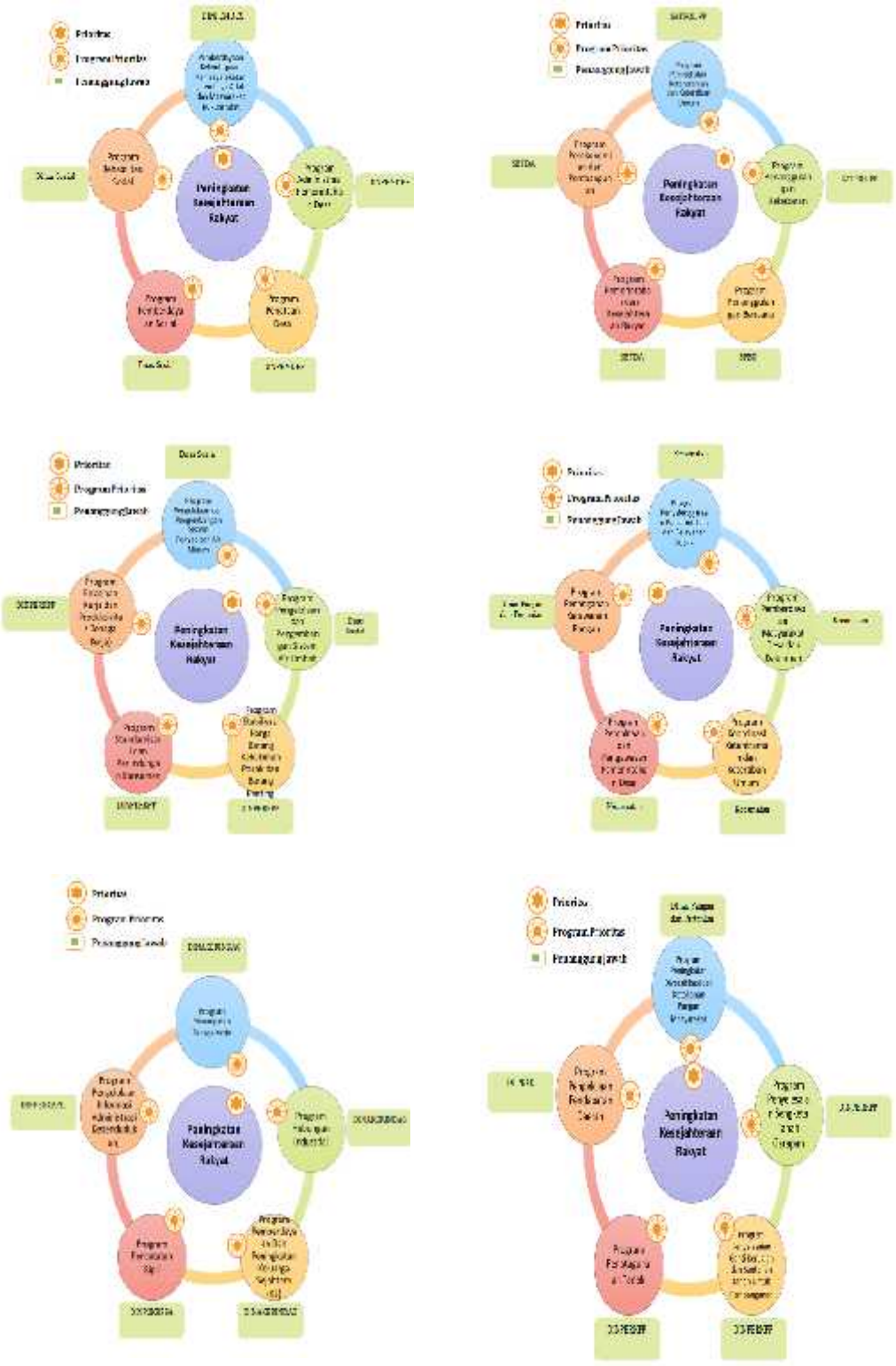

Gambar 4.23
Aspek Integratif Program Prioritas 7 Pelestarian Lingkungan Hidup

D. Aspek Spasial

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah kecamatan khususnya wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan dalam pencapaian indikator ekonomi dan indikator sosial dalam upaya tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah kecamatan dan meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan.

D.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka

Pengembangan wilayah kecamatan pada tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid 19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi pada wilayah kecamatan yang terdampak oleh Covid 19, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah ekonomi kecamatan dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah kecamatan serta memelihara konektivitas hubungan antar wilayah kecamatan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah kecamatan akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah kecamatan dan strategi pemerataan.

Strategi pengembangan wilayah kecamatan tersebut tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan ekonomi dan koridor pemerataan wilayah dan pemetaan risiko bencana pada masing-masing wilayah kecamatan.

Transformasi sosial ekonomi wilayah kecamatan dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan yang mengalami pelambatan yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan penataan kawasan perkotaan, penguatan konektivitas antarwilayah kecamatan, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah kecamatan. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Strategis Daerah, kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pengembangan kawasan strategis daerah di atas akan dilakukan dengan meningkatkan penerimaan Dana Insentif Daerah serta penerimaan insentif fiskal dan non fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Oleh karena itu, pembangunan strategis diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, serta perluasan kerja sama antardaerah melalui pengembangan transportasi, pengelolaan transportasi publik, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial,

potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Pemali.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur antar wilayah, menegaskan perbedaan strategi pertumbuhan, pemerataan, dan risiko bencana di setiap wilayah. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari ancaman bencana seperti wabah atau pandemi, banjir, tanah longsor dan kebakaran lahan dan hutan. Pandemi Covid 19 yang menyebar di seluruh wilayah menegaskan bahwa strategi pembangunan wilayah perlu memperhitungkan ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan serta kecepatan pemulihan social ekonomi masyarakat.

Sasaran pengembangan wilayah kecamatan tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah kecamatan dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah, dan meningkatkan pemerataan pembangunan kecamatan. Dengan memperhitungkan penanganan bencana pandemi Covid 19 secara tuntas pada tahun 2020, maka tahun 2021 memberikan peluang bagi perekonomian kecamatan untuk tumbuh lebih lambat ***(bounding)*** namun akan kembali pemulihan kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya jika target optimistis penanganan pandemik Covid 19 dapat tercapai sesuai dengan target. Dampak pandemi Covid 19 dapat dirasakan daerah dalam penurunan volume produksi beberapa komoditas unggulan daerah seperti **logam timah, sawit, lada, karet serta penurunan beberapa sektor unggulan lainnya seperti sektor pariwisata dan perdagangan**. Hal tersebut berdampak pada penurunan beberapa indikator pencapaian target pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan, tingkat kemiskinan,

dan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi sebagaimana dalam tabel 4.31.

Sasaran pembangunan kecamatan menyediakan gambaran ekonomi seluruh kecamatan yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan pada tahun 2019, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021. Secara detail, sasaran pembangunan perekonomian tersebut diindikasikan oleh; (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) Pendapatan Per Kapita; (3) Tingkat Kemiskinan; (4) Tingkat Pengangguran;(5) Pertumbuhan Ekonomi; dan (6) Tingkat Inflasi, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.31
Proyeksi Capaian Sasaran Pembangunan Perekonomian
Kabupaten Bangka Tahun 2021

Kecamatan	Sasaran					
	PDRB HK Juta Rp)	PDRB HB (Juta Rp)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Inflasi (%)
Sungailiat	32.96	49.99	3.96	5.69	2.47	2.17
Belinyu	31.79	37.92	5.35	4.51	3.08	2.24
Riau Silip	31.77	42.93	6.23	4.95	2.26	2.19
Pemali	31.38	34.94	2.68	4.86	2.19	2.26
Mendo Barat	31.29	37.78	6.41	4.73	3.84	2.13
Merawang	31.51	42.86	3.17	4.62	3.24	2.06
Bakam	30.74	47.75	6.11	4.89	3.66	2.14
Puding Besar	30.22	39.64	7.02	4.57	2.93	2.16
Kabupaten	**31,46**	**41,72**	**5,11**	**4,85**	**2,95**	**2,17**

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014-2018)

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan karakteristik potensi perekonomian yang ada.

Tabel di atas, menjelaskan bahwa di proyeksikan pada tahun 2021 Kota Sungailiat memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka (33,96) dan terendah Puding Besar (30,22).

Sementara dari capaian angka kemiskinan, terendah terdapat di Kecamatan Pemali (2.68%) dan kemiskinan tertinggi terdapat di Kecamatan Puding Besar (7,02%). Dilihat dari Angka pengangguran terendah terdapat di Kecamatan Puding Besar (4,57) dan tertinggi di Kecamatan Sungailiat (5,69).

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kecamatan tahun 2021 diarahkan pada pembangunan dengan fokus pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW Kabupaten Bangka. Dalam hirarki rencana system tata kota di Kabupaten Bangka, Sungailiat dan Belinyu menjadi Pusat Kegiatan Lokal, Puding Besar menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi, sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan Merawang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan. Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing, produktivitas dan *efek multiplier* yang tinggi dan *sustainable.* Perekonomian dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya.

Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor yang memiliki

tingkat keunggulan komparatif, kompetitif dan *sustainable.* Untuk memenuhi persyaratan *sustainable* ini, maka sektor-sektor dan komoditi yang berbasis *unrenewable resource* (pertambangan non migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan.

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka dapat dituntaskan dan keseimbangan antara pertumbuhah ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. Pentingnya pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik dan stabilitas politik daerah; dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah.

D.2. Pembangunan Wilayah Kecamatan

D.2.1. Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2021, yang *pro job*, *pro poor* dan *pro growth* dengan tanpa meninggalkan *pro sustainable*. Pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Sungailiat pada tahun 2021 adalah sebagai:

(1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;
(2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*;
(4) Pendorong perkembangan wilayah;
(5) Penyedia sarana dan prasarana kota;
(6) Pusat perdagangan & jasa;
(7) Kegiatan Wisata;

(8) Pusat perdagangan & jasa;

(9) Jasa Perusahaan

(10) Jasa Keuangan dan Asuransi

(11) Real Estate

(12) Kesehatan; dan

(13) Pendidikan.

Gambar 4.24
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat
Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Sungailiat diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.32
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Jasa Perusahaan
2	II	Industri Pengolahan

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3	III	Pengadaan Listrik dan Gas
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Transportasi dan Pergudangan

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.2. Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu

Pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Belinyu adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah:

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tanaman pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan;

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Belinyu pada tahun 2021 adalah sebagai:

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Laut Regional;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru;
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.

Gambar 4.25
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Belinyu
Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.33
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estat
		Jasa Perusahaan
3	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Konstruksi
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.3. Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat

Pembangunan kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,

berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangannya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkalpinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Mendo Barat pada tahun 2021 adalah sebagai:

(1) Pusat pemerintahan kecamatan;
(2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;
(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*
(4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
(5) Listrik dan Gas
(6) Agropolitan; dan
(7) Perkebunan.

Gambar 4.26

Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Mendo Barat diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.34
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1.	I	Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Konstruksi
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Perusahaan
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
3	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4	IV	Perikanan

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estat
		Jasa Pendidikan
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2..4. Pembangunan Wilayah Kecamatan Merawang

Pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Merawang adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangannya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkalpinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkalpinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Merawang pada tahun 2021 adalah sebagai;

(1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;

(2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;

(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*;

(4) Pendorong perkembangan wilayah;

(5) Penyedia sarana dan prasarana kota;

(6) Pusat perdagangan & jasa;

(7) Kegiatan Wisata;

(8) Kesehatan; dan

(9) Pendidikan.

Gambar 4.27
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Merawang
Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Industri Pengolahan
2	II	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Perusahaan
3	III	Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
		Transportasi dan Pergudangan
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.5. Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali

Pembangunan kecamatan Pemali, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Pemali adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkalpinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkalpinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL)

yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Pemali pada tahun 2021 adalah sebagai:

(1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;

(2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;

(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*;

(4) Pendorong perkembangan wilayah;

(5) Penyedia sarana dan prasarana kota;

(6) Pusat perdagangan & jasa;

(7) Kegiatan Wisata;

(8) Kesehatan;

(9) Pendidikan;

(10) Konstruksi

(11) Jasa Perusahaan

(13) Real Estate

Gambar 4.28
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Pemali
Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.36
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pertambangan dan Penggalian
		Konstruksi
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Real Estate
		Jasa Perusahaan
		Jasa Pendidikan
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3.	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4.	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Transportasi dan Pergudangan
		Informasi dan Komunikasi
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.6. Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip

Pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Riau Silip adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi yang berpotensi dan

diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah:

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan;
3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Riau Silip pada tahun 2021 adalah sebagai;

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan laut regional ;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu dan Pertanian serta perkebunan mendukung kegiatan lainnya.

Gambar 4.29
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Riau Silip Tahun 2021

WP II
Pusat Pemerintahan
Pelabuhan Regional
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Industri Perikanan
Industri Perkebunan

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Riau Silip diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.37
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	-
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
3	III	Industri Pengolahan
		Pengadaan Listrik dan Gas
		Jasa Lainnya
4	IV	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.7. Pembangunan Wilayah Kecamatan Bakam

Pembangunan kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Bakam adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di Barat, wilayah pengembangannya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa disepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Bakam pada tahun 2021 adalah sebagai;

(1) Pusat pemerintahan kecamatan;

(2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;

(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*

(4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;

(5) Agropolitan; dan

(6) Perkebunan.

(7) Penyediaan Akomodasi

Gambar 4.30
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Bakam
Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.38
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Industri Pengolahan
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3	III	Pengadaan Listrik dan Gas
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertambangan dan Penggalian

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Informasi dan Komunikasi
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estat
		Jasa Perusahaan
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan (2014 – 2018)

D.2.8. Pembangunan Wilayah Kecamatan Puding Besar

Pembangunan kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar adalah sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi dan berada dalam Wilayah Pengembangan III.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangannya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkalpinang.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Puding Besar pada tahun 2021 adalah sebagai;

(1) Pusat pemerintahan kecamatan;

(2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;

(3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*

(4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;

(5) Agropolitan;

(6) Perkebunan;

(7) Perdagangan; dan

(8) Pendidikan.

Gambar 4.31
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Puding Besar Tahun 2021

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan

Puding Besar diarahkan pada pengembangan sub sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	-
2.	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Pendidikan
3.	III	Industri Pengolahan
4.	IV	Jasa Lainnya

D.3. Strategi Pengembangan Wilayah Kecamatan

Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah kecamatan dilakukan dengan enam langkah, yaitu:

1. Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan strategis daerah khususnya kawasan pariwisata dan industri pertanian dan kelutan dan perikanan.
2. Memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di wilayah pantai timur Sungailiat.
3. Mengintegrasikan sistem transportasi penghubung antar wilayah untuk memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan wilayah.
4. Meningkatkan produktivitas budidaya dan industri pertanian, perkebunan dan perikanan, pariwisata dan UMKM.
5. Mengembangkan kawasan strategis sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan fokus peningkatan infrastruktur penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi dan pengelolaan

persampahan, pengembangan sistem drainase, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan.

6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

Sedangkan strategi pemerataan di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka akan dilakukan dengan 6 (enam) langkah.

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi. Simultan dengan arah kebijakan dan strategi percepatan industrialisasi wilayah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak serta pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kecamatan dengan fokus jalan penghubung antar kecamatan dan penghubung pada kawasan-kawasan stretgis daerah untuk memperlancar jasa transportasi perdagangan, moda transportasi publik serta infrastruktur publik bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pada desa dengan melakukan advokasi perencanaan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan desa.
5. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) pemerintah kecamatan dan desa dalam rangka mempercepat pembangunan pada tinbgkat kecamatan dan pedesaan.
6. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan melalui fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan sosial untuk mempercepat status pencapaian desa membangun.

Pelestarian lingkungan hidup juga menjadi perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Bangka karena dampak pengrusakan lingkungan dapat menimbulkan bencana alam. Dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi

kerawanan bencana seperti banjir, kebakran hutan, angin puting beliung, tanah longsor dan musibah penyakit di beberap wilayah kecamatan dan desa Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan mitigasi dan penguatan ketahanan bencana dengan memantapkan sistem dan deteksi dini bencana, dukungan pendanaan kerawanan bencana dalam penganggaran dan perencanaan, penguatan kelembagaan kebencanaan, peningkatan kapasitas tenaga kebencanaan, peningkatan kesadaran risiko bencana di masyarakat, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana juga dilakukan untuk mengeliminasi sejak dini resiko kebencanaan.

4.4 Program Spesifik Unggulan Daerah 2021

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID 19, Pemkab Bangka memformulasikan beberapa kebijakan strategis dalam ***frame* Program sensitif** yakni :

Gambar 3.15.
***Frame* Kebijakan Sensitif Pasca COVID 19**

1) **Program Penguatan sektor kesehatan.** Penguatan sektor kesehatan ini sangat urgen untuk dilaksanakan menimbang hingga saat ini vaksin COVID 19 belum ditemukan dan masih dalam proses uji coba. Kondisi ini diperkuat dengan penjelasan *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia yang memprediksi bahwa vaksin COVID 19 paling lambat ditemukan dan diproduksi secara massal pada bulan Agustus tahun 2021 atau 18 bulan. Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui : i) peningkatan perilaku sehat dan *physical* dan *social distancing* dengan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh lini masyarakat dari perkotaan sampai ke perdesaan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media; ii) pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan lab); dan iii) pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD), alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk penangangan pasien.

2) **Program Penguatam Sistem Jaring Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi.** COVID 19 secara dalam waktu relatif singkat ternyata telah menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan sangat cepat dan dalam. Kebijakan Sistem Jaring Pengaman Sosial ini merupakan salah satu bentuk transformasi struktural akibat masifnya perubahan tatanan yang sedang terjadi saat ini. Sistem yang dibangun tersebut merupakan kompilasi dari berbagai macam bentuk varian produk kesejahteraan sosial baik dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan sebagainya, pemerintah daerah berupa SEMARI (Sedekah Lima Ratus Sehari), Bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun elemen pembangunan diluar pemerintah (BAZ, CSR maupun bantuan masyarakat/komunitas dan individu) yang dilakukan dengan pendekatan *"the-one stop integrated"* yang dikoordinir langsung oleh Bupati melalui Kelompok Kerja (Pokja) sehingga nantinya setiap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dapat betul -

betul tepat sasaran dan tepat guna dengan berbasis web dan data yang valid dan *realible*.

Gambar 3.16.
Skenario Dampak Bantuan dan Jaminan Sosial Pasca COVID 19

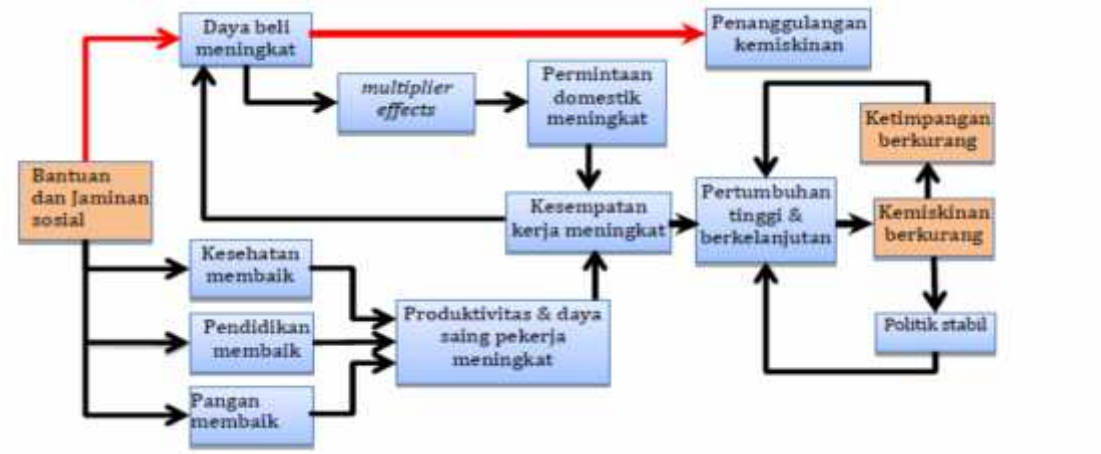

Sumber : Bappenas, 2014

3) **Program pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19.** Pemulihan sektor usaha yang terdampak akan dilaksanakan melalui pemberian pinjaman daerah dengan mekanisme tanpa bunga dan angunan terutama diperuntukkan bagi sektor usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian Kabupaten. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Daerah. Menurut data Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 81,99% dari jumlah pelaku usaha di Bangka. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak ±207 ribu pekerja atau 77% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah (PDRB) sebesar 60-70% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar.Dari data di atas, Kabupaten Bangka mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku

usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Pemberian Akses modal tanpa agunan dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh Pemkab Bangka. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan meminimalisir terjadinya kredit macet (*Non Performing Loan)* atas pinjaman daerah, baik aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan dan efektivitas pengendalian intern maka dalam kerjasama tersebut diatur mengenai prosedur pemberian kredit sampai dengan penagihan pinjaman akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank sedangkan Pemda hanya memfasilitasi data informasi terkait status perizinan usaha, omzet, produk dan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan IKM.

4.5 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka memasukkan aspek penting inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek perencanaan dalam arah pengembangan inovasi di berbagai bidang dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dan nasional. Komitmen untuk memperkuat inivosi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka tahun 2021 di tetapkan dalam kerangka landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Untuk melaksanakan dan mendukung implementasi kebijakan di bidang inovasi oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah menyusun kebijakan dalam upaya percepatan penerapan inovasi yaitu **Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Laboratorium Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.**

Arah pembangunan daerah Kabupaten Bangka sebagaimana yang telah ditetapkan strategi kebijakan pengembangan inovasi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDM yang tersedia, SDM yang berkualitas, dan kemampuan IPTEK.
2. Mendorong kemampuan inovasi dan kreativitas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Mendorong peningkatan inovasi dan kreatifitas OPD menuju kemandirian daerah.

Selain itu, untuk meningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan bahwa tahun 2021 sebagai tahun inovasi pelayanan publik.Dengan diadakannya program ***One Agency One Innovation*** diharapkan menimbulkan dampak luas bagi percepatan reformasi birokrasi. Disamping program ***One Agency One Innovation*** Pemerintah Kabupaten Bangka menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana diamanatkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan mempercepat peningkatan pelayanan publik demi mencapai target nasional menjadi peringkat ke 75 dunia dalam hal Kemudahan Berusaha.

Di dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diatur bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah melalui program Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi ***(One Agency One Innovation)***;

Peningkatan inovasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Berikut inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam berbagai bidang, yaitu:

Tabel 4.40
Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2020

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
1	Kurang terintergasinya sistem perencanaan pembangunan	**SI MAPAN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran)**	Bidang Perencanaan Pembangunan		**BAPPEDA**	**BAPPEDA**	APBD/APBN /SWASTA/PT/ MASYARAKAT	Tersedianya system perencanaan terintergratif	Jumlah program dan kegiatan yang selaras dan terintergasi	**Reflikasi**	**Belum**	**2019-2021**
2	Belum meningkatnya inovasi secara progresif	**LA REPUBLIKA (Laboratorium Inovasi Kabupaten Bangka)**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi pembentukan wadah bersifat kelembagaan dalam fungsi mengkoordinir, memfasilitasi, menumbukan gagasan dalam penciptaan inovasi yang tematik mendukung prioritas pembangunan.Laboratorium Inovasi diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melaksanakan fungsi itu. Laboratorium juga berfungsi dalam penataan regulasi untuk inovasi, pembinaan, penilaian dan verifikasi inovasi	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Bangka	Jumlah Inovasi yang diaplikasikan dalam kebijakan dan industri	Modifikasi	Belum	2018-2021
3	Penanganan stunting masih bersifat parsial	**SI TUMBUH CERDAS (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Tumbuh Cerdas dan Sehat)**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi penurunan stunting \"Si Tumbuh Cerdas\" dilakukan melalui intervensi terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, lembaga	Seluruh OPD dan Swasta	BAPPEDA	APBD/APBN/SWASTA	Sistem penangana Stunting terpadu dan terintegrasi	Persentase penurunan stunting	Asli	Sudah	2019-2021

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				swadaya masyarakat/filantropi serta masyarakat								
4	Belum optimalnya pengelolaan lahan bekas eks tambang	**GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup)**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi pengelolaan lahan kritis bekas pertambangan timah menjadi lahan produktif melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, perusahaan pertambangan Timah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, perguruan tinggi Austria, lembaga riset Negara Jerman Institut Federal untuk Geosains dan Sumber Daya Alam BGR **(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe**	BAPPEDA, LH, Dinas Pertanian dan Perkebunan	BAPPEDA	APBD/SWASTA/MASYARAKAT	2 Lokus model pelestarian lingkungan	Luasan lahan tambangyang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
5	Pendataan kemiskinan belum masih manual dan belum menggunakan sistem informasi	**KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi aplikasi sistem KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi). Sistem ini memiliki keunggulan: *by name*, karena memperoleh nama RumahTangga Sasaran (RTS) dengan tepat, *by address*, karena memperoleh alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) ANdengan tepat, *by photo*, karena menampilkan photo Individu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan tepat, *by coordinate*, karena menampilkan titik kordinat alamat Individu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan tepat, *by profile,* karena menampilkan profil	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data kemiskinan terpadu	Data masyarakat miskin yang tepat dan akurat			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				lengkap sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran, *by charity,* karena menampilkan semua program kemiskinan yang disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), *by navigation*, karena menampilkan navigasi yang mampu menuntun kita menuju arah alamat rumah tangga sasaran								
6	Pelacakan sisitem informasi air minum belum menggunakan sistem terintegrasi	**SIM DATA AMPL BANGKA**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi ini merupakan tatakelola air minum dan penyehatan lingkungan berbasis teknologi informasi di bidang pendataan, perencanaan, pendataan, kebijakan dan implementasi dalam tatakelola air minum dan penyehatan lingkungan.	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data terpadu AMPL	Peningkatan jumlah akses air minum bersih bagi masyarakat			
7	Masih tingginya angka putus sekolah	**BUNAKTUSLAH**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi BUNAKTUSLAH (Perburuan Anak Putus Sekolah) yaitu dengan konsep pemerintah memburu anak-anak yang putus sekolah untuk di sekolahkan melalui PKBM dan Beasiswa Pendidikan.Pola lama yang hanya menunggu orang yang mendaftar ke sekolah harus dihilangkan.	Pendidikan dan BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Data anak putus sekolah	Meingkatnya partisipasi anak sekolah			
8	Penataan ruang masih bersifat parsial dan belum sistemik	**Majelis Sabtu**	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi "MAJELIS SABTU!!"menciptakan tata kelola penataan ruang yang tadinya sektoral dan parsial, tidak memberikan titik temu rekomendasi pemanfaatan ruang	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tatakelola penataan ruang terpadu	Persentase konflik penataan ruang			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				jelas sehingga perizinan terhambat menjadi pendekatan koordinatif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.								
9	Pemberdayaan oraang tua belum dilakukan secara optimal	**BU RATU HIRI**	Bidang Tatakelola Pemerintahan	Inovasi pendataan seluruh orang tua di Kabuoaten Bangka yang hidup seorang diri (tanpa keluarga).Hasil pendataan tersebut akan digunakan sebagai bahan intervensi kebijakan pemberinan bantuan sosial dan pemberdayaan orang tua agar terbebas dari perangkap kemiskinan dan keterlantaran.	Sosial dan BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data orang tua hidup sendiri	Persentase orang tua hidup sendiri yang tertangani			
10	Pendataan sistem informasi di bidang perawatan kesehatan belum optimal	**SIMPANAN CANTIK**	Bidang Kesehatan	Inovasi "SIMPANAN CANTIK" RSUD berbasis android memberikan solusi dalam upaya menurunkan angka kematian pasien di rawat jalan, IGD, maupun rawat inap.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya data informasi kesehatan pasien	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan			
11	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penanganan pasien gawat darurat	**PSC SPGDT**	Bidang Kesehatan	Inovasi PSC SPGDT Kabupaten Bangka terdiri dari 1) Layanan informasi kesehatan,2) Layanan dukungan ambulans dan fasilitas gawat darurat lengkap,3) Pelayanan rujukan ke rumah sakit, 4)Layanan Be Smart Family yaitu program tentang konsultasi masyarakat tentang masalah kegawatdaruratan agar masyarakat bisa melakukan tindakan pertolongan pertama jika terjadi kegawatdaruratan di	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya system informasi penanganan pasien gawat darurat	Persentase penurunan pasien yang tertangani dan sembuh			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				rumah dan lingkungannya, 5) Layanan informasi ketersediaan fasilitas tempat tidur di rumah sakit, 6) Layanan aplikasi Android untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan dengan cepat dan mudah								
12	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam donor darah	**RANSEL SI DORA**		Aplikasi Donor Darah berbasis WEB (SI DORA) secara online yang dilaunching tanggal 26 Januari 2018. Dengan digagasnya SI DORA, masyarakat yang membutuhkan informasi donor darah di Kabupaten Bangka dapat mengakses informasi tersebut secara cepat dan real time, dengan mengakses web sidora.bangka.go.id. SI DORA menyajikan informasi data Stok Darah di UTDRS Depati Bahrin dan Unit Donor Darah PMI Sungailiat, data pendonor yang siap donor, identitas dan nomor kontak pendonor di wilayah Kabupaten Bangka, form registrasi calon pendonor dan informasi singkat seputar donor darah.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya aplikasi Web donor darah				
13	Rendahnya pengetahuan ibu hamil dalam bidang kesehatan	**SMS BUNDA CERDAS**		Bunda Cerdas ini dijalankan di masyarakat terkhusus untuk ibu hamil dan melahirkan yang bertujuan memberikan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya informasi sistem kesehatan ibu hamil	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				edukasi informasi kepada ibu hamil agar mengetahui informasi – informasi tentang kehamilannya serta dapat mengetahui cara perawatan bayi baru lahir.								
14	Masih tingginya kematian ibu melahirkan	**LADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB**		Strategi *all out* berupa pelayanan publik yang komprehensif guna percepatan penurunan kematian ibu dan bayi resiko tinggi. Inovasi pelayanan publik tersebut penggabungan antara Program kegiatan yaitu "Lada Putih" yang didukung dengan Aplikasi "SiLada Putih" berbasis android yang terkoneksi dengan Command Center Kebidanan 24 jam. Aplikasi "SiLada Putih" connecting dengan Command center kebidanan merupakan inovasi original yang belum pernah ada di Indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya aplikasi penurunan ibu dan bayi brereskо tinggi	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan			
15	Masih tingginya resiko kematian ibu melahirkan	**SI RESTI CIKAR**	Bidang Kesehatan	SI RESTI CIKAR membantu memastikan Ibu hamil dengan faktor risiko dan risiko tinggi mampu untuk merencanakan persalinan dengan aman dan selamat mulai dari identifikasi risiko kehamilan, keluhan selama kehamilan, rujukan jika diperlukan, pelayanan ANC yang berkualitas, USG, calon pendonor, pendamping persalinan dan penolong persalinan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya system persalinan terpadu	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
16	Masih rendahnya kepemilikan jamban	**NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN "IBU"**		Inovasi ini untuk mengatasi permasalahan jamban dengan menerapkan metode Community Lead Total Sanitations (CLTS) yaitu merupakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyeluruh dengan memfasilitasi masyarakat dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai status ODF (Open Defecations Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD/MASYARAKAT	Jumlah lokasi desa yang terbebas dari ODF	Persentase jumlah data bebas ODF			
17	Belum teridentifikasi jumlah lansia dan tingkat pemberdayaan yang masih rendah	**OJEG LANSIA**		Inovasi "Ojek Lansia " bertujuan untuk menjemput lansia di wilayah desa Penagan untuk datang ke Posyandu dan mengantarkan kembali pulang ke rumah setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Jumlah Lansia yang dilayani	Persentase jumlah lansia yang terlayani di bidang kesehatan			
18	Pelayanan public di bidang investasi masih belum berkualitas	**PINTU KITE**	BIdang Tata Kelola Pemeringtahan	Inovasi PINTU KITE terobosan dalam peningkatan pembuatan perizinan dan nilai investasi sehingga berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.	UPTSP	UPTSP	APBD	Tersedianya aplikasi kepengurusan investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi			
19	Rendahnya kualitas pelayanan public di bidang akte kependudukan	**PORTCATWIN**		Inovasi kemudahan dalam mendapatkan KTP, KK serta pindah jiwa bagi pasangan yang menikah di KUA melalui entry secara online.Warga tidak	UPTSP	Dinas DUKCAPIL	APBD	Tersediany aplikasi data kependudukan	Persentase peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan			

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCMES	KEASLIAN	REFLIKASI	KEBERLANJUTAN
				perlu lagi datang ke Dinas Dukpencapil untuk mengurus KTP dan KK nya dikarenakan perubahan status di KTP dan KK nya.								

Dengan adanya beberapa inovasi tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dapat lebih dipercepat dengan menggunakan sumber data yang lebih efisien sehingga menhasilkan sesuatu yang lebih tepat dan bermanfaat. Selain hal itu pemerintah juga memberikan kesempatan yang sangat terbuka bagi perangkat daerah maupun ASN untuk melakukan inovasi di lingkup tugas masing-masing.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Pusat dan tujuan global SDG's perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2021 agar terciptanya percepatan prioritas yang akan dicapai.

Tabel 4.41
Keterkaitan dan *Supporting* antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Prioritas Kabupaten Bangka, Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung dan RKP 2021

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
1	PORTCATWIN	Reformasi Birokrasi		Revoluasi Mentasl dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
2	LA REPUBLIKA (Laboratorium Inovasi Kabupaten Bangka)				
3	PINTU KITE				
4	OJEG LANSIA				
5	SI MAPAN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran)				
6	NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN "IBU"	Pembangunan Sumber daya Manusia yang Berkualitas	Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
7	SI RESTI CIKAR		Pembangunan Kesehatan		Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
8	LADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB				Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
9	SMS BUNDA CERDAS				Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
10	RANSEL SI DORA				
11	PSC SPGDT				
12	SIMPANAN CANTIK				
13	BU RATU HIRI				
14	Majelis Sabtu				
15	BUNAKTUSLAH				
16	SMART P-IRT				
17	SI TUMBUH CERDAS (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Tumbuh Cerdas dan Sehat)				
18	SIM DATA AMPL BANGKA	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
		Pengembangan Industri Pariwisata	Pengembangan Pariwisata		Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
					Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
19	Kebun Singkong Rakyat	Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
					pertanian berkelanjutan
20	Perkebunan Sawit Rakyat		Pembangunan Agropilitan		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
			Pembangunan bahari		
21	KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat			Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
22	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup)	Pelestarian Lingkungan Hidup		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
23	Aman Lapar				Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
					Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
					Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat

Sumber : diolah dari Dokumen Laboratorium Inovasi Kabupaten Bangka (2019)

Tabel di atas menjelaskan bahwa Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusun dokumen perencanaan daerah tahun 2021 memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yang mengacu pada agenda prioritas sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
3. Pemerintah Pusat
4. Dokumen *Sustainable Development Goals*

Selain itu, untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Bangka sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, arah inovasi Kabupaten Bangka juga di arahkan pada pencapaian misi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.42
Keterkaitan dan *Supporting* antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Misi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

NO	MISI KABUPATEN BANGKA	NAMA INOVASI
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	PORTCATWIN
		SI MAPAN (SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN)
		LA REPUBLIKA (LABORATORIUM INOVASI KABUPATEN BANGKA)
		PINTU KITE
		PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	OJEG LANSIA
		NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN "IBU"
		SI RESTI CIKAR
		LADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB
		SMS BUNDA CERDAS
		RANSEL SI DORA
		PSC SPGDT
		SIMPANAN CANTIK
		BU RATU HIRI
		BUNAKTUSLAH
		SI TUMBUH CERDAS (AKSI KOLABORASI PENURUNAN STUNTING AGAR BAYI TUMBUH CERDAS DAN SEHAT)

NO	MISI KABUPATEN BANGKA	NAMA INOVASI
		KEMBANG DESA (KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGKA DENGAN SISTEM DAN APLIKASI
		GERAKAN PERLINDUNGAN ODGJ
		MATRAS TBC
		SMART IN PIRT
		OPEN LINKS
		PAMOR KANCIL
3	Mewujudkan Pemeratan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah	
		MAJELIS SABTU
		SIM DATA AMPL BANGKA
4	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	GERAKAN DESA WISATA
		AMAN LAPAR
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	KEBUN SINGKONG RAKYAT
		GERBANG LESTARI (GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP)
		AMAN LAPAR
		ABANG TIMAH
		SMART P-IRT

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Reviu RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dikelompokkan atas program penunjang urusan Pemerintah Daerah, **program urusan pemerintahan wajib** baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, **program prioritas pada urusan pemerintahan pilihan** serta **program prioritas pada unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.**

Yang dimaksud dengan program-program prioritas urusan wajib adalah program-program prioritas yang dilaksanakan pada Urusan Pemerintahan Wajib, dimana sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** dan **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan

penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

Selanjutnya **Urusan Pemerintahan Pilihan** sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi; Ayat (2) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; Ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat; serta Ayat (4) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas maka RKPD Tahun 2021 ini hanya akan mengatur perencanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau yang urusannya dilaksanakan oleh kabupaten. Selanjutnya masing-

masing rencana program dan kegiatan prioritas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk setiap urusan pemerintahan dijabarkan dalam program sebagai berikut :

5.1.1. Program Prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD)

Yang dimaksud dengan program prioritas pada setiap PD adalah program penunjang yang terdapat pada semua PD yang ada di Kabupaten Bangka, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1.2. Program Prioritas pada Urusan Wajib

A. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

   Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan ini diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

   a) Program Pengelolaan Pendidikan
   b) Program Pengembangan Kurikulum
   c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

   Urusan wajib kesehatan ini diselenggarakan oleh **PD Dinas Kesehatan** mencakup pelaksanaan 4 (empat) program sebagai berikut :

   a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh **PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
d) Program Pengembangan Permukiman
e) Program Penataan Bangunan Gedung
f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
g) Program Penyelenggaraan Jalan
h) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh **PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perumahan
b) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

   Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu (1) **PD Satpol PP dan** (2) **PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah**.

   1) PD Satpol PP

   (1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   (2) Program Penanggulangan Kebakaran

   2) PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

   (1) Program Penanggulangan Bencana

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

   Urusan wajib Pemerintahan Bidang Sosial diselenggarakan oleh **PD Dinas Sosial** melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

   a) Program Pemberdayaan Sosial
   b) Program Rehabilitasi Sosial
   c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   d) Program Penanganan Bencana
   e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Program-Program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan**

   Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
b) Program Penempatan Tenaga Kerja
c) Program Hubungan Industrial

2. Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh **PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

a) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b) Program Perlindungan Perempuan
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan diselenggarakan oleh **PD Dinas Pangan dan Pertanian,** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b) Program Penanganan Kerawanan Pangan
c) Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh **PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Izin Lokasi
b) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
c) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
d) Program Penatagunaan Tanah

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh **PD Dinas Lingkungan Hidup** mencakup 7 (tujuh) program sebagai berikut :

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
e) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
f) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
g) Program Pengelolaan Persampahan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh **PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencakup 2 (dua) program yaitu:

1) Program Pencatatan Sipil
2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh **PD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

a) Program Penataan Desa
b) Program Administrasi Pemerintahan Desa
c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh **PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mencakup 3 (tiga) program yaitu :

a) Program Pengendalian Penduduk
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diselenggarakan oleh **PD Dinas Perhubungan** mencakup 1 (satu) program yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 2 (dua) program yaitu :

a) Program Informasi dan Komunikasi Publik
b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh **PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** mencakup 5 (lima) program yaitu :

a) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
b) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
e) Program Pengembangan UMKM

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh **PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** mencakup 5 (lima) program yaitu :

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b) Program Promosi Penanaman Modal
c) Program Pelayanan Penanaman Modal
d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
e) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga** mencakup 2 (dua) program yaitu :

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 1 (satu) program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 1 (satu) program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh **PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Kebudayaan
b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang **Perpustakaan** diselenggarakan oleh **PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** mencakup 1 (satu) program yaitu :

a) Program Pembinaan Perpustakaan

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang **Kearsipan** diselenggarakan oleh **PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** mencakup 1 (satu) program yaitu :

a) Program Pengelolaan Arsip

5.1.3. Program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Program prioritas untuk Urusan Pemerintahan Pilihan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka mencakup 5 (lima) urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Karenanya Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka hanya menyelenggarakan bidang perikanan yang diselenggarakan oleh **PD Dinas Perikanan** dengan program prioritas mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh **PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b) Program Pemasaran Pariwisata
c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh **PD Dinas Pangan dan Pertanian** dengan program prioritas mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
e) Program Perizinan Usaha Pertanian
f) Program Penyuluhan Pertanian

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
c) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

5. Urusan Pemerintahan Bidang Industri

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Industri diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

5.1.4. ProgramJprogram Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

   Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh PD Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

   a) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
   b) Program Perekonomian dan Pembangunan
   c) Program Administrasi Umum

2. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

   Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh PD Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

   a) Program Layanan dan Administrasi Keuangan
   b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

5.1.5. ProgramJprogram Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan diselenggarakan oleh **PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Keuangan** diselenggarakan oleh **PD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Kepegawaian** diselenggarakan oleh **PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Pendidikan dan Pelatihan** diselenggarakan oleh **PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Penelitian dan Pengembangan** diselenggarakan oleh PD **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

b) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.1.6. ProgramJProgram Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh PD Inspektorat mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

5.1.7. ProgramJProgram Prioritas pada Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh PD Kecamatan mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

c) Program Penyelenggaraan Pengawasan
d) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

5.1.8. ProgramJProgram Prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

5.2 Pendanaan Daerah

5.2.1. Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021

Pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2021 dialokasikan sesuai dengan urutan prioritas pembangunan daerah. Gambaran mengenai dukungan pendanaan terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	20.057.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			APS SD		
			APS SMP		
			Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin		
		Program Pengembangan Kurikulum	Nilai Standar Isi Pendidikan	513.693.465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Nilai Standar Proses Pendidikan		
			Nilai Standar Penilaian Pendidikan		
		Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Persentase Guru Bersertifikasi	15.634.800.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Penyadaran Pemuda	3.599.122.700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Indeks Pemberdayaan Pemuda		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan	4.982.402.450	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi		
			Indeks Kualitas Olahraga Prestasi		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat	125.948.467.869	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Meningkat Status Akreditasinya		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	361.117.500	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, ALat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	38.932.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan	Indeks Rumah Tangga yang Berperilaku	134.734.000	Dinas Kesehatan

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Masyarakat Bidang Kesehatan	Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	670.000.000	DINP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	249.605.000	DINP2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	157.105.000	DINP2KBP3A
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Profile Gender Kabupaten	35.000.000	DINP2KBP3A
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	504.470.000	DINP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata anak per keluarga	909.846.500	DINP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	453.973.500	DINP2KBP3A
			Cakupan Peserta KB Aktif		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Kelompok BKB ber KB		
			Cakupan Anggota Kelompok BKR ber KB		
			Cakupan Anggota Kelompok BKL ber KB		
			UPPKS di setiap Desa/ kelurahan		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jenis Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	276.188.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Jenis Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		
			Persentase Pustakawan yang Berkualifikasi Sesuai Standar Nasional		
			Persentase Pengelola Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		
			Persentase Prasarana dan Sarana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	340.568.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program	Persentase Kelancaran	768.330.000	Dinas Pangan

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distribusi Pangan		dan Pertanian
			Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah		
			Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian		
			Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	155.007.000	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100.000.000	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100.000.000	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	184.649.000	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	700.000.000	Badan Kesbangpol
JUMLAH PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS				**176.875.011.984**	
2	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	63.471.670.000	DINPUPR
		Program Pengelolan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	14.595.000.000	DINPUPR
			Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman kondisi baik	16.200.000.000	DINPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Layanan Publik dalam	1.065.000.000	DINPUPR

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Kondisi Baik		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannnya	Persentase Bangunan Gedung Publik yang Tertata	1.000.000.000	DINPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang Terlatih	600.000.000	DINPUPR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi	5.674.000.000	Dinas Perhubungan
			Persentase Kecamatan yang mendapatkan pelayanan angkutan bus sekolah		
			Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan		
			Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar		
			Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang representatif	2.387.155.000	DINAKERINDAG
JUMLAH PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN				**104.992.825.000**	
3	Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Elemen Peran dan Layanan APIP	1.780.000.000	Inspektorat
			Persentase OPD Dengan Predikat WBK		
			Level Elemen Pengelolaan SDM		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko	915.000.000	Inspektorat
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan Di PPAS dan RAPBD Terhadap RKPD	4.210.677.580	BPPKAD
			Persentase Pemenuhan Anggaran Kas Terhadap Belanja Daerah		
			Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu		
			Persentase Penerimaan Dana Transfer		

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Persentase Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu sesuai SAP		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	2.635.239.100	BPPKAD
			Persentase Pemanfaatan Aset yang dikerjasamakan Sesuai Aturan yang berlaku		
			Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang memiliki Status Kepemilikan Pemerintah Daerah		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN	2.787.242.000	BAPPEDA
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP		
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD		
			Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		
			Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD		
			Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan		
			Persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yg dimanfaatkan dalam perencanaan		
			Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target		
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	450.000.000	BAPPEDA
			Persentase rumusan kebijakan yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan		

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan Nasional		
		Program Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi	4.652.987.500	BKPSDMD
			Persentase ASN pemangku jabatan struktural yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan		
			Persentase ASN yang kualitas kinerja meningkat		
			Persentase menurunnya Tindak Indisipliner Aparatur		
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar layanan berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	3.683.443.500	BKPSDMD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengolahan Arsip Inaktif	444.371.952	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Nilai Aspek Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip		
			Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis		
			Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan		
			Persentase nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		
			Persentase nilai Aspek Program Kearsipan		
			Persentase nilai Aspek Kelembagaan		
			Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2.017.536.300	SEKRETARIAT DAERAH

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang dikelola		
			Capaian evaluasi pelaksanaan program pembangunan		
			Persentase rumusan kebijakan di bidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
			Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	1.353.547.500	SEKRETARIAT DAERAH
			Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah		
			Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesra & kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan		
			Persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan		
			Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan		
		Program Administrasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Yang Tepat Sasaran	6.712.526.455	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase layanan kegiatan pimpinan dan keprotokolan sesuai SOP		
		Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Layanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai SOP	1.626.553.000	SEKRETARIAT DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas	29.005.985.820	SEKRETARIAT DPRD

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Sekretariat DPRD sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD		
			Persentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan tepat waktu		
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang KOMINFOTIK	11.974.491.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika
			Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	466.811.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan Terstandarisasi	1.189.964.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika
JUMLAH PAGU PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI				**75.906.376.707**	
4	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	1.787.495.819	DINPEMDES
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	5.247.540.253	DINPEMDES
		Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi yang Baik	215.856.500	DINPEMDES
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	530.029.000	DINAS SOSIAL
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	615.223.750	DINAS SOSIAL
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	686.405.600	DINAS SOSIAL
		Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	689.671.050	DINAS SOSIAL
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Masyarakat	750.000.000	DINPERKPP

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memiliki Rumah yang Layak		
			Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi		
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	188.739.350	DINPERKPP
		Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	2.385.000.000	DINPERKPP
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Bersih	1.200.000.000	DINPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	350.000.000	DINPUPR
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	147.605.000	DINAKERINDAG
			Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	148.269.000	DINAKERINDAG
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	199.981.200	DINAKERINDAG
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	140.165.000	DINAKERINDAG
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	231.070.000	DINAKERINDAG
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	UPPKS di setiap Desa/ kelurahan	340.000.000	DINP2KBP3A
			Cakupan TRIBINA yang Berkinerja Baik (BKB, BKR, BKL)		
			PPKS yang aktif		
		Program Pencatatan	Persentase Cakupan	807.300.000	DINPENCAPIL

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Sipil	penerbitan KIA		
			Persentase Cakupan penerbitan KK		
			Persentase Cakupan penerbitan KTP-el		
			Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian		
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Kelahiran		
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Perkawinan		
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Perceraian		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah Standar Pelayanan	762.438.000	DINPENCAPIL
			Persentase Pemanfaatan Data		
			Persentase inovasi kependudukan yang dimanfaatkan		
			Persentase Pegawai yang telah Memiliki Kompetensi Pelayanan		
			Persentase Penurunan Jumlah Pengaduan		
			Persentase Pemenuhan Sarana/Prasarana		
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10.940.000.000	SATPOL PP
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak		
			Persentase Pengembangan Kapasitas Aparatur		
			Persentase Cakupan Satlinmas Inti		
		Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pencegahan Bahaya Kebakaran	3.560.000.000	SATPOL PP
			Persentase Penanggulangan Pemadam Kebakaran		
			Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang tertangani		
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	2.390.000.000	BPBD
		Program Pemerintahan dan	Cakupan perumusan dan pengendalian	6.628.549.900	SEKRETARIAT DAERAH

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Kesejahteraan Rakyat	kebijakan di bidang Kesra & kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku		
			Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	1.092.834.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	1.304.243.000	SEKRETARIAT DAERAH
			Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam		
			Capaian Evaluasi Kebijakan Pembangunan		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	10.073.711.620	KECAMATAN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	7.982.875.000	KECAMATAN
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	251.310.000	KECAMATAN
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	612.310.000	KECAMATAN
			Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Produsen Pangan Segar yang Mendapatkan Sertifikat Pangan	297.531.550	Dinas Pangan dan Pertanian
			Persentase Pasar yang dilakukan Pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar		
			Persentase Desa/Kelurahan yang dilakukan Pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan	289.205.000	Dinas Pangan dan Pertanian

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Keluarga		
			Persentase Kelompok Binaan Yang Memproduksi Olahan Pangan Lokal		
			Persentase Pendistribusian Bahan Pangan Pokok		
			Persentase Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang Dilakukan Pemantauan harga		
			Persentase Kecukupan Pangan Masyarakat (%)		
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan	100.000.000	DINPERKPP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Terselesaikan	1.500.000.000	DINPERKPP
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	2.600.000.000	DINPERKPP
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu sesuai SAP	158.866.029.875	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Konstribusi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah	4.104.415.051	BPPKAD
			Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah		
JUMLAH PAGU PRIORITAS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**230.015.804.518**	
5	Pemulihan Perekonomian yang Berkualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian	14.977.694.100	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul	1.407.418.100	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan		

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			Penggunaan Pupuk		
			Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prsarana Perkebunan		
			Persentase Penerapan Teknologi Peternakan		
			Persentase Peningkatan Bibit Ternak		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja Baik	1.654.495.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanggulangan Penyakit Ternak	2.122.182.500	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	236.535.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (%)	807.985.500	Dinas Perikanan
			Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Tangkap (%)		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (%)	1.605.068.000	Dinas Perikanan
			Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Budidaya (%)		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	455.763.000	DINPMP2KUKM
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	364.408.000	DINPMP2KUKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang	48.037.000	DINPMP2KUKM

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Koperasi	Berklasifikasi A		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	28.710.000	DINPMP2KUKM
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	227.987.000	DINPMP2KUKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor	141.100.000	DINPMP2KUKM
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor	139.700.000	DINPMP2KUKM
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu	590.890.000	DINPMP2KUKM
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM	181.230.000	DINPMP2KUKM
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	310.800.000	DINPMP2KUKM
			Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan		
JUMLAH PAGU PRIORITAS PEMULIHAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS				**25.315.003.200**	
6	Pengembangan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	2.836.832.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	2.962.365.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	587.931.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pemanfaatan Budaya	2.269.970.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Indeks Pengembangan Budaya		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	394.250.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	5.202.565.800	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penangan Sampah		
		Program Pengelolaan Izin	Persentase Usaha Yang Memiliki Izin	50.000.000	DINPERKPP

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
		Lokasi	Lokasi		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	154.500.000	DINAS SOSIAL
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Penjaminan Mutu & Perlindungan Produk IKM	571.181.000	DINAKERINDAG
			Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	124.614.000	DINAKERINDAG
JUMLAH PAGU PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA				**15.154.208.800**	
7	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pogram Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	694.610.400	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	1.232.029.950	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lignkungan Hidup (PPLH)	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	63.439.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	41.200.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	1.916.412.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penangan Sampah		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	2.500.250.000	DINPUPR
JUMLAH PAGU PRIORITAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP				***6.642.941.350***	

No	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS				634.902.171.559	

Selain dukungan anggaran terhadap masing-masing program prioritas pembangunan, disediakan juga dukungan anggaran terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada setiap yang dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2.
Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	PAGU INDIKATIF TAHUN 2021	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	536.915.786.273,00	Seluruh OPD
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		
		Persentase Hasil Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti		
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		
		Indeks Profesionalisme Aparatur		
TOTAL PAGU PROGRAM PADA SETIAP OPD			536.915.786.273,00	

5.2.2. Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3.
Dukungan Anggaran RKPD 2021 Kabupaten Bangka terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan Perekonomian yang berkualitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	455.763.000
			Program Pengembangan UMKM	364.408.000
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	48.037.000
			Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	28.710.000
			Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	227.987.000
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	141.100.000
			Program Promosi Penanaman Modal	139.700.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	590.890.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	181.230.000
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	310.800.000
		Pembangunan Infrastruktur Perekonomian	Program Penyelenggaraan Jalan	37.269.615.000
			Program Pengelolan Sumber Daya Air (SDA)	14.595.000.000
			Program Pengembangan Permukiman	16.200.000.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	1.065.000.000
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannnya	1.000.000.000
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	600.000.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5.674.000.000
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.387.155.000
		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.787.495.819
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.247.540.253
			Program Penataan Desa	215.856.500
			Program Pemberdayaan Sosial	530.029.000
			Program Rehabilitasi Sosial	615.223.750

NO	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	686.405.600
			Program Penanganan Bencana	689.671.050
			Program Pengembangan Perumahan	750.000.000
			Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	188.739.350
			Program Peningkatan Prasana Sarana dan Utilisasi Umum (PSU)	2.385.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.200.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	350.000.000
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	147.605.000
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	148.269.000
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.981.200
			Program Penempatan Tenaga Kerja	140.165.000
			Program Hubungan Industrial	231.070.000
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	340.000.000
			Program Pencatatan Sipil	807.300.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	762.438.000
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.940.000.000
			Program Penanggulangan Kebakaran	3.560.000.000
			Program Penanggulangan Bencana	2.390.000.000
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.397.921.000
				1.092.834.000
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1.304.243.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.073.711.620
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.982.875.000
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	251.310.000
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	612.310.000
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	297.531.550
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	289.205.000
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.500.000.000
			Program Penatagunaan Tanah	2.600.000.000
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT				**148.094.125.692**

NO	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
2.	Pembangunan Agropolitan	Pemulihan Ekonomi yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.861.605.600
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.407.418.100
			Program Perizinan Usaha Pertanian	15.000.000
			Program Penyuluh Pertanian	1.654.495.000
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	3.012.087.000
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	236.535.000
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN AGROPOLITAN				**21.187.140.700**
3.	Pembangunan Bahari	Pemulihan Ekonomi yang berkualitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	807.985.500
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.605.068.000
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN BAHARI				**2.413.053.500**
4.	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.836.832.000
			Program Pemasaran Pariwisata	2.962.365.000
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	587.931.000
			Program Pengembangan Kebudayaan	2.269.970.000
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	394.250.000
			Program Pengelolaan Persampahan	7.118.977.800
			Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	154.500.000
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	571.181.000
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	124.614.000
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PENGEMBANGAN PARIWISATA				**17.070.620.800**
5.	Pembangunan Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	20.057.000.000
			Program Pengembangan Kurikulum	513.693.465
			Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	15.634.800.000
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.599.122.700
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.982.402.450
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	157.105.000
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	504.470.000
			Program Pembinaan Perpustakaan	276.188.000
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	155.007.000
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN				**45.879.788.615**
6.	Pembangunan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125.948.467.869
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	361.117.500
			Program Sediaan Farmasi, ALat	38.932.000

NO	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
			Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	134.734.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.556.950.000
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	765.831.500
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	453.973.500
			Program Pengendalian Penduduk	889.846.500
JUMLAH PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN				**130.149.852.869**
TOTAL PAGU DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PROPINSI				**364.794.582.176**

5.2.3. Pendanaan Perangkat Daerah (PD) dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Pendanaan rencana program prioritas pembangunan pada RKPD 2021 ini mengacu pada Reviu RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 untuk tahun 2021. Pada sub bab ini disampaikan besaran pendanaan dalam bentuk pagu indikatif pada setiap Perangkat Daerah (PD) dan dukungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021.

Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan "*money follow function*", tetapi menggunakan pendekatan "*money follow priority programme*". Pagu indikatif masing-masing PD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.4 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Pagu Indikatif OPD (Belanja Langsung) Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG TH 2021 (Rp)	
		SUMBER APBD	SUMBER APBN/DAK/DID
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	216.590.811.363,00	87.833.422.775,00
2.	Dinas Kesehatan	201.604.743.119,00	295.103.287.349,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.081.014.100,00	673.936.281.690,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.746.790.550,00	1.911.138.211,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.142.966.800,00	-
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.562.106.800,00	-
7.	Dinas Sosial	7.678.508.800,00	330.000.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	12.101.820.300,00	10.674.934.000,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.846.034.000,00	3.672.544.000,00
10.	Dinas Pangan dan Pertanian	27.513.355.430,00	7.793.488.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	18.106.556.285,00	8.375.000.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.096.373.700,00	-
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	12.638.545.472,00	-
14.	Dinas Perhubungan	11.709.486.900,00	15.030.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika	19.864.928.900,00	-
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.458.493.400,00	857.611.000,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.591.680.952,00	-
18	Dinas Perikanan	8.545.162.900,00	2.052.785.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.384.961.280,00	300.000.000,00
20.	Sekretariat Daerah	57.048.409.580,00	-
21.	Sekretariat DPRD	78.537.260.270,00	
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.029.514.500,00	-
23.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	188.169.558.706,00	-
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.582.044.543,00	-
25.	Inspektorat	10.688.958.400,00	-
26.	Kecamatan Bakam	3.645.573.600,00	-
27.	Kecamatan Belinyu	13.740.581.310,00	-
28.	Kecamatan Merawang	4.990.539.000,00	-

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG TH 2021 (Rp)	
		SUMBER APBD	SUMBER APBN/DAK/DID
29.	Kecamatan Mendo Barat	4.769.746.800,00	-
30.	Kecamatan Pemali	3.601.401.900,00	-
31.	Kecamatan Puding Besar	4.742.694.400,00	-
32.	Kecamatan Riau Silip	3.552.542.700,00	-
33.	Kecamatan Sungailiat	25.026.220.850,00	-
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.428.570.222,00	-
TOTAL		**1.171.817.957.832,00**	**1.107.870.492.025,00**

Selanjutnya uraian program dan kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**17.151.205.000,00**				**18.008.765.250,00**
		APK PAUD		**59,00**	**17.151.205.000,00**			**61,00**	**18.008.765.250,00**
		APS SD		**109,00**				**109,50**	
		APS SMP		**97,00**				**97,50**	
		Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin		**100,00**				**100,00**	
1.01.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase ketersedian sarana SD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**8.524.205.000,00**	**APBD**	**P1**	**90%**	**8.950.415.250,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SD		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
1.01.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru*	*Jumlah ruang kelas baru yang dibangun*	*SDN 13 Belinyu, SDN Riau Silip, SDN 9 Riau Silip, SDN 4 Mendo Barat, SDN 15 Mendo Barat, SDN 27 Sungailiat*	*12 ruang*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 ruang*	*1.470.000.000,00*
1.01.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun*	*SDN 15 Mendo Barat, SDN 12 Pemali, SDN 9 Puding Besar, SDN 1 Pemali, SDN 19 Mendo Barat, SDN 20 Belinyu, SDN 3 Belinyu, SDN 13 Belinyu, SDN 10 Merawang, SDN 9 Riau Silip, SDN 5 Riau Silip*	*11 sekolah*	*1.003.631.000,00*	*APBD*	*P1*	*11 sekolah*	*1.053.812.550,00*
1.01.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun*	*SDN 8 Puding Besar, SDN 4 Mendo Barat*	*1 sekolah*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 sekolah*	*210.000.000,00*
1.01.02.2.01.06	*Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Jumlah sarana, prasarana dan ulitilas sekolah yang disediakan*	*SDN 14 Pemali, SDN 12 Pemali, SDN 6 Puding Besar, SDN 9 Puding Besar, SDN 7 Sungailiat, SDN 20 Belinyu, SDN 3 Sungailiat*	*8 sekolah*	*840.574.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 sekolah*	*882.602.700,00*
			Pagar sekolah : SDN 6 Bakam, SDN 9 Merawang, SDN 7 Bakam, SDN 33 Mendo Barat, SDN 14 Mendo Barat, SDN 9 Mendo Barat, SDN 17 Riau Silip, SDN 18 Riau Silip, SDN 14 Riau Silip, SDN 2 Riau Silip, SDN 13 Belinyu, SDN 12 Sungailiat, SDN 6 Sungailiat, SDN 20 Belinyu	*14 sekolah*	*-*	*APBD*	*P1*	*14 sekolah*	*-*
1.01.02.2.01.07	*Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah*	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolahnya yang dibangun*	*SDN 7 Riau Silip, SDN 8 Sungailliat, SDN 12 Riau Silip*	*3 sekolah*	*510.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 sekolah*	*535.500.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.01.08	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	*Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi*	*SDN 16 Belinyu, SDN 15 Mendo Barat (3), SDN 10 Bakam, SDN 10 Riau Silip (2), SDN 20 Belinyu (3), SDN 9 Puding Besar (2), SDN 8 Bakam (3)*	*14 paket*	*1.360.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*14 paket*	*1.428.000.000,00*
1.01.02.2.01.09	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi*	*SDN 15 Merawang, SDN 3 Mendo Barat*	*2 sekolah*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 sekolah*	*210.000.000,00*
1.01.02.2.01.12	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi*	*SDN 3 Sungailiat (3), SDN 4 Belinyu (3)*	*6 paket*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 paket*	*126.000.000,00*
1.01.02.2.01.14	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah*	*Jumlah Sekolah yang mendapat penyediaan meubelair sekolah*	*SDN 30 Sungailiat, SDN 2 Bakam, SDN 17 Belinyu, SDN 26 Mendo Barat, SDN 4 Merawang, SDN 14 Pemali, SDN 12 Pemali, SDN 2 Bakam, SDN 6 Bakam, SDN 10 Puding Besar, SDN 6 Puding Besar, SDN 2 Puding Besar, SDN 9 Puding Besar, SDN 8 Puding Besar, SDN 7 Puding Besar, SDN 1 Puding Besar, SDN 5 Puding Besar, SDN 3 Puding Besar, SDN 3 Mendo Barat, SDN 15 Merawang, SDN 9 Pemali, SDN 3 Pemali, SDN 9 Merawang, SDN 7 Bakam, SDN 33 Mendo Barat, SDN 14 Mendo Barat, SDN 9 Mendo Barat, SDN 17 Riau Silip, SDN 18 Riau Silip, SDN 14 Riau Silip, SDN 2 Riau Silip, SDN 13 Belinyu, SDN 12 Sungailiat, SDN 6 Sungailiat, SDN 20 Sungailiat, SDN 2 Pemali, SDN 14 Sungailiat, SDN 4 Puding Besar*	*38 paket*	*1.140.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*38 paket*	*1.197.000.000,00*
1.01.02.2.01.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	*Jumlah alat praktik dan peraga yang disediakan*	*Alat dan Kostum Drum Band : SDN 3 Sungailiat, SD Muhammadiyah Sungailiat, SDN 7 Sungailiat, SDN 7 Mendo Barat, SDN 8 Mendo Barat*	*5 paket*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 paket*	*105.000.000,00*
1.01.02.2.01.23	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik*	*Jumlah peserta didik yang mengikuti try out dan ujian*	*Se- Kabupaten Bangka*	*3200 Orang*	*900.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3200 Orang*	*945.000.000,00*
1.01.02.2.01.25	*Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	*Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Kegiatan FL2SN*	*750.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*787.500.000,00*
1.01.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase ketersedian sarana SMP**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**5.330.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**90%**	**5.596.500.000,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SMP		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
1.01.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru*	*Jumlah sekolah yang mendapat penambahkan ruang kelas baru*	*SMPN 2 Pemali, SMPN 3 Mendo Barat, SMPN 2 Mendo Barat*	*3 sekolah*	*600.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 sekolah*	*630.000.000,00*
1.01.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Jumlah sekolah yang dibangun ruang guru*	*SMPN 5 Mendo Barat, SMPN 2 Pemali*	*2 sekolah*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 sekolah*	*315.000.000,00*
1.01.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Jumlah sekolah yang dibangun ruang UKS*	*SMPN 3 Merawang*	*1 sekolah*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 sekolah*	*105.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.02.06	*Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium*	*Jumlah Laboratorium sekolah yang dibangun*	*SMPN 1 Pemali, SMPN 4 Pemali*	*3 sekolah*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 sekolah*	*735.000.000,00*
1.01.02.2.02.09	*Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah*	*Jumlah rumah dinas yang dibangun*	*SMPN 3 Puding Besar*	*1 sekolah*	*170.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 sekolah*	*178.500.000,00*
1.01.02.2.02.14	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	*Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi*	*SMPN 2 Pemali, SMPN 5 Belinyu*	*4 paket*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 paket*	*168.000.000,00*
1.01.02.2.02.18	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium*	*Jumlah laboratorium yang direhabilitasi*	*SMPN 1 Pemali, SMPN 4 Sungailiat*	*2 paket*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 paket*	*735.000.000,00*
1.01.02.2.02.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur Sekolah*	*Jumlah meubeluer yang disediakan*	*SMPN Bakam (2), SMPN 1 Puding Besar (3), SMPN 2 Puding Besar (2), SMPN 2 Pemali (3), SMPN 3 Sungailiat (3)*	*16 paket*	*390.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 paket*	*409.500.000,00*
1.01.02.2.02.27	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	*Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan*	*SMPN 1 Bakam, SMPN 2 Belinyu, SMPN 1 Pemali*	*3 sekolah*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 sekolah*	*315.000.000,00*
1.01.02.2.02.30	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Jumlah sekolah yang dipelihara*	*SMPN 2 Belinyu (3)*	*3 paket*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 paket*	*157.500.000,00*
1.01.02.2.02.36	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik*	*Jumlah peserta didik yang mengikuti try out dan ujian*	*Se- Kabupaten Bangka*	*4320 Orang*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4320 Orang*	*840.000.000,00*
1.01.02.2.02.38	*Sub Kegiatan Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa*		*Se- Kabupaten Bangka*	*12 Bulan*	*900.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*945.000.000,00*
1.01.02.2.02.41	*Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*		*Se- Kabupaten Bangka*	*12 Bulan*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*63.000.000,00*
1.01.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Prasarana PAUD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**100%**	**2.410.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**2.530.500.000,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana PAUD		**100%**				**100%**	
		Persentase Ketersediaan Lembaga Terhadap Anak Usia Dini		**1 : 20**				**1 : 20**	
1.01.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*	*Jumlah sarana, prasarana dan ulitilas PAUD yang disediakan*	*TKN Pembina Sungailiat, TKN Pembina Mendo Barat, TKN Pembina Belinyu, TKN Pembina Bakam, TKN Pembina Merawang, TKN Pembina Belinyu, TKN Pembina Pemali*	*13 paket*	*2.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*2.100.000.000,00*
1.01.02.2.03.07	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur PAUD*	*Jumlah meubeleur PAUD yang disediakan*	*TKN Pembina Belinyu, TKN Pembina Puding Besar, TKN Pembina Merawang, TKN Pembina Sungailiat, TKN Pembina Mendo Barat, TKN Pembina Pemali, TKN Pembina Bakam*	*7 paket*	*210.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*220.500.000,00*
1.01.02.2.03.12	*Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD*	*Jumlah alat praktik dan peraga yang disediakan*	*TKN Pembina Riau Silip, TKN Pembina Puding Besar*	*2 sekolah*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*210.000.000,00*
1.01.02.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase Lembaga PNF yang berizin**		**100%**	**887.000.000,00**			**100%**	**931.350.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.04.12	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan*	*Jumlah layanan Sanggar Kegiatan Belajar yang tertangani*	*Sungailat*	*12 Bulan*	*767.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*805.350.000,00*
1.01.02.2.04.16	*Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan*	*Jumlah PKBM yang menyelenggarakan USBN Paket A, Paket B dan Paket C*	*Kab. Bangka*	*10 PKBM*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 PKBM*	*126.000.000,00*
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**550.218.615,00**				**434.378.138,25**
		Nilai Standar Isi Pendidikan		**47,00**	**550.218.615,00**			**50,00**	**434.378.138,25**
		Nilai Standar Proses Pendidikan		**47,00**				**50,00**	
		Nilai Standar Penilaian Pendidikan		**47,00**				**50,00**	
1.01.03.2.01	**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase SD dan SMP yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal**		**100%**	**413.693.465,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**434.378.138,25**
		Persentase Lembaga PAUD yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal		**100%**				**100%**	
1.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	*Jumlah peserta penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar*	*Se- Kabupaten Bangka*	*100 Orang*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
1.01.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	*Jumlah peserta penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar*	*Se- Kabupaten Bangka*	*100 Orang*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
1.01.03.2.01.04	*Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	*Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	*Se- Kabupaten Bangka*	*100 Orang*	*113.693.465,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
1.01.03.2.02	**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usian Dini dan Pendidikan Nonformal**		**Se- Kabupaten Bangka**		**136.525.150,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	
1.01.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*	*Jumlah peserta penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan non formal*	*Se- Kabupaten Bangka*	*100 Orang*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
1.01.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*	*Jumlah peserta penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan non formal*	*Se- Kabupaten Bangka*	*100 Orang*	*61.525.150,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**17.291.126.000,00**				**18.155.682.300,00**
		Persentase Guru Bersertifikasi		**75,0**	**17.291.126.000,00**			**79,0**	**18.155.682.300,00**
		Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi		**55,0**				**60,0**	
1.01.04.2.01	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi**	**Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**45%**	**17.291.126.000,00**	**APBD**	**P1**	**10:48**	**18.155.682.300,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi							
		Persentasi ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan							
		persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi							
1.01.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	*Jumlah diklat pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*3 Jenis Diklat*	*1.656.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Jenis Diklat*	*1.738.800.000,00*
1.01.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*	*Jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Kependidikan yang didistribusikan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*717 GTT dan 418 PTT*	*15.635.126.000,00*	*APBD*	*P1*	*717 GTT dan 418 PTT*	*16.416.882.300,00*
2	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**								
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**4.945.000.000,00**				**5.192.250.000,00**
		Indeks Penyadaran Pemuda		**11,80**	**4.945.000.000,00**			**12,00**	**5.192.250.000,00**
		Indeks Pemberdayaan Pemuda		**66,50**				**67,00**	
		Indeks Pengembangan Pemuda		**0,67**				**1,57**	
2.19.02.2.01	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemuda yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya**	**Sungailiat**	**11%**	**4.825.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**12%**	**5.066.250.000,00**
		Persentase Pemuda yang bebas dari perilaku seks bebas							
		persentase pemuda yang bebas dari penyakit menular							
		persentase pemuda yang bebas dari tindak kekerasan							
		persentase pemuda yang bebas dari radikalisme dan terorisme							
		Persentase pemuda wirausaha							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pemuda pelopor							
		Persentase organisasi pemuda yang aktif							
		Persentase sarana dan prasarana kepemudaan yang dimanfaatkan							
2.19.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula*	*Jumlah data kewirausahaan yang disusun*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Dokumen*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*262.500.000,00*
		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan		*100 Orang*				*100 Orang*	
2.19.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	*Jumlah peserta Jambore Pemuda Indonesia*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Dokumen*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*262.500.000,00*
		Jumlah Pemuda yang mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara		*100 Orang*				*100 Orang*	
2.19.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan*	*Jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi bahaya narkoba, seks bebas dan penyakit menular*	*Se- Kabupaten Bangka*	*300 Orang*	*375.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*393.750.000,00*
2.19.02.2.01.07	*Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi*	*Jumlah Pemuda Berprestasi*	*Se- Kabupaten Bangka*	*12 Orang*	*2.950.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Orang*	*3.097.500.000,00*
		Jumlah Pemuda Penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD)		*79 Orang (Laki-laki : 33 org, Perempuan : 46 org)*				*79 Orang (Laki-laki : 33 org, Perempuan : 46 org)*	
2.19.02.2.01.08	*Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	*Jumlah pasukan pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yang dilatih*	*Se- Kabupaten Bangka*	*2 Pleton*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Pleton*	*1.050.000.000,00*
		Jumlah kegiatan Temu Bicara Kenal Medan yang dilaksanakan		*1 Kali*				*1 Kali*	
2.19.02.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten**	**Persentase pemuda wirausaha**	**Sungailiat**		**120.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**126.000.000,00**
		Persentase pemuda pelopor							
		Persentase organisasi pemuda yang aktif							
		Persentase sarana dan prasarana kepemudaan yang dimanfaatkan							
2.19.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan kursus mahir Pembina Pramuka yang dilaksanakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Kali*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**4.482.402.450,00**				**4.706.522.572,50**
		Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan		**29,77**	**4.482.402.450,00**			**30,27**	**4.706.522.572,50**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi		**8,54**				**8,79**	
		Indeks Kualitas Olahraga Prestasi		**8,71**				**8,91**	
2.19.03.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Medali Emas pada Event Tingkat Regional/Nasional**	**Sungailiat**	**30%**	**2.125.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**32%**	**2.231.250.000,00**
		Jumlah Kelompok/Klub Olah Raga yang Aktif		**20%**				**21%**	
2.19.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah kejuaraan Olah Raga Multi dan Single Event Tingkat Daerah*	*Se- Kabupaten Bangka*	*5 Event*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Event*	*420.000.000,00*
2.19.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota*	*Jumlah Kejuaraan/Pekan Olah Raga Tingkat Daerah yang dilaksanakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*5 Event*	*850.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Event*	*892.500.000,00*
2.19.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan*	*Jumlah pengiriman kontingen KOSN SD, KOSN SMP, LSP, GSI, POPDA/KEJURDA, Kejurnas, PLAPD*	*Se- Kabupaten Bangka*	*8 Event Regional/Nasional*	*875.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Event Regional/Nasional*	*918.750.000,00*
2.19.03.2.03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berbakat Usia Muda**	**Sungailiat**	**20%**	**850.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**22%**	**892.500.000,00**
2.19.03.2.03.01	*Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah*	*Jumlah atlet yang mengikuti seleksi atlet PLAPD*	*Se- Kabupaten Bangka*	*300 Orang*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*300 Orang*	*52.500.000,00*
2.19.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	*Jumlah peserta Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	*Se- Kabupaten Bangka*	*18 Orang*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*18 Orang*	*157.500.000,00*
2.19.03.2.03.03	*Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota*	*Jumlah peserta Training Center atlet KOSN SD, KOSN SMP, LSP, GSI, POPDA/KEJURDA*	*Se- Kabupaten Bangka*	*160 Orang*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*160 Orang*	*262.500.000,00*
2.19.03.2.03.04	*Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota*	*Jumlah bonus atlet berprestasi yang tersedia*	*Se- Kabupaten Bangka*	*500 Medali*	*350.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*500 Medali*	*367.500.000,00*
2.19.03.2.03.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga*	*Jumlah dokumen potensi keolahragaan, dokumen kajian Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga dan Rencana Aksi Pengembangan Keolah Ragaan yang disusun*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Dokumen*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*52.500.000,00*
2.19.03.2.05	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Masyarakat Gemar Berolah Raga**		**20%**	**1.507.402.450,00**			**22%**	**1.582.772.572,50**
		Rasio Sarana Olah Raga Per 1000 Penduduk							
2.19.03.2.05.01	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	*Jumlah olah raga masal dan rekreasi yang dilaksanakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*4 Event (Festival Olah Raga Tradisional, Jalan Santai, Sepeda Santai dan Senam Jumat)*	*357.402.450,00*	*APBD*	*P1*	*4 Event (Festival Olah Raga Tradisional, Jalan Santai, Sepeda Santai dan Senam Jumat)*	*375.272.572,50*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.03.2.05.02	*Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	*Jumlah perkumpulan olah raga rekreasi/tradisional yang dibina*	*Se- Kabupaten Bangka*	*2 Perkumpulan*	*-*	*APBD*	*P1*	*2 Perkumpulan*	*-*
2.19.03.2.05.04	*Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi*	*Jumlah sarana olah raga rekreasi yang dibangun dan dipelihara*	*Se- Kabupaten Bangka*	*4 Sarana Olah Raga*	*1.150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Sarana Olah Raga*	*1.207.500.000,00*
2.19.03.2.05.05	*Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*	*Jumlah event olah raga tantangan dan petualangan yang dilaksanakan*	*Se- Kabupaten Bangka*	*1 Event*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Event*	*-*
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**172.170.859.298,00**				**189.155.331.542,90**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**1.090.122.000,00**				**1.207.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
		Persentase Hasil Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti							
1.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**1.090.122.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.207.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*.....Dokumen*				*.....Dokumen*	*-*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
1.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	*-*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**166.261.147.600,00**			**0%**	**182.887.262.360,00**
1.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**166.261.147.600,00**			**100%**	**182.887.262.360,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*166.061.147.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*182.667.262.360,00*
1.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*220.000.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**4.643.789.698,00**				**4.875.979.182,90**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**4.643.789.698,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**4.875.979.182,90**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase penggunaan IT dalam Tata Laksana Organisasi							
		Persentase Data/Informasi yang dipublikasikan							
1.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	8 Kecamatan Kabupaten Bangka	12 Bulan	2.196.185.948,00	APBD	P1	12 Bulan	2.305.995.245,40
1.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	Sungailiat	12 Bulan	320.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	336.000.000,00
1.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	Sungailiat	12 Bulan	85.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	89.250.000,00
1.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	Sungailiat	12 Bulan	300.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	315.000.000,00
1.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	Sungailiat	12 Bulan	570.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	598.500.000,00
1.01.01.2.03.11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sungailiat	……	550.000.000,00	APBD	P1	……	577.500.000,00
1.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	Sungailiat	12 Bulan	20.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	21.000.000,00
1.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*		12 Bulan	282.603.750,00	APBD	P1	12 Bulan	296.733.937,50
1.01.01.2.03.22	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Sungailiat	12 Bulan	120.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	126.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.03.24	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Sungailiat	.....	100.000.000,00	APBD	P1	.....	105.000.000,00
1.01.01.2.03.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Sungailiat	12 Bulan	100.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	105.000.000,00
		Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah		**100%**	**175.800.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**184.590.000,00**
1.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**35%**	**175.800.000,00**	**APBD**	**P1**	**60%**	**184.590.000,00**
		Persentase aparatur Dindikpora yang bekerja tepat waktu		**75%**				**80%**	
		Persentase aparatur Dindikpora yang berkinerja baik		**75%**				**80%**	
1.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 stel*	*6.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 stel*	*7.140.000,00*
		Jumlah pakaian adat yang tersedia		*220 stel*	*66.000.000,00*			*220 stel*	*69.300.000,00*
1.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal*	*Sungailiat*	*1 paket*	*103.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*108.150.000,00*
JUMLAH					**216.590.811.363,00**				**235.652.929.803,65**

PRIORITAS II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**30.000.000,00**				**#REF!**
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**12.398.925.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD Prov**	**P2**	**100%**	**12.398.925.000,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase penggunaan IT dalam Tata Laksana Organisasi							
		Persentase Data/Informasi yang dipublikasikan							
1.01.01.2.03.22	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (Server Dapodik)	Sungailiat	1 unit	30.000.000,00	APBD Prov	P2	12 Bulan	31.500.000,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**38.910.886.000,00**				**12.398.925.000,00**
		APK PAUD		**59,00**	**38.910.886.000,00**			**61,00**	**12.398.925.000,00**
		APS SD		**109,00**				**109,50**	
		APS SMP		**97,00**				**97,50**	
		Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin		**100,00**				**100,00**	
1.01.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Prasarana PAUD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**100%**	**1.352.915.000,00**	**DAK**	**P2**	**100%**	**-**
		Persentase Ketersediaan Sarana PAUD		**100%**				**100%**	
		Persentase Ketersediaan Lembaga Terhadap Anak Usia Dini		**1 : 20**				**1 : 20**	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang kelas yang direhabiltasi*	*TKN Pembina Belinyu*	*3 ruang*	*363.654.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	*Jumlah toilet (jamban) yang direhabilitasi*	*TKN Pembina Belinyu*	*1 Ruang*	*24.464.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			TKN Pembina Sungailiat	*1 Ruang*				-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang guru dan kepala sekolah yang direhabilitasi*	*TKN Pembina Sungailiat*	*1 Ruang*	*35.072.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	*Jumlah toilet (jamban) yang dibangun*	*TKN Pembina Belinyu*	*1 Paket*	*543.665.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			TKN Pembina Bakam	*1 Paket*					
			TKN Pembina Riau Silip	*1 Paket*					
			TKN Pembina Merawang	*1 Paket*					
			TKN Pembina Pemali	*1 Paket*					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pembangunan	*Jumlah tuang guru dan kepala*	*TKN Pembina Belinyu*	*1 Ruang*	*386.060.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			TKN Pembina Bakam	*1 Ruang*					
			TKN Pembina Riau Silip	*1 Ruang*					
			TKN Pembina Merawang	*1 Ruang*					
			TKN Pembina Pemali	*1 Ruang*					
1.01.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase ketersedian sarana SMP**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**22.662.634.000,00**	**DAK**	**P2**	**90%**	**12.398.925.000,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SMP		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah layanan biaya personil peserta didik yang tertangani*	*Se - Kabupaten Bangka*	*12 bulan*	*11.808.500.000,00*	*DAK*	*P2*	*12 Bulan*	*12.398.925.000,00*
	Sub Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang kelas yang direhabiltasi beserta perabotnya*	*SMPN 5 Belinyu*	*2 ruang*	*2.890.395.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 2 Pemali	*2 ruang*					
			SMPN 4 Mendo Barat	*3 ruang*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*2 ruang*					
			SMPN 2 Bakam	*2 ruang*					
			SMP Harapan Sungailiat	*4 ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi beserta perabotnya*	*SMPN 4 Mendo Barat*	*1 Ruang*	*642.318.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 2 Bakam	*1 Ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhabilitasi*	*SMPN 5 Belinyu*	*1 Ruang*	*1.083.921.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 3 Sungailiat	*1 Ruang*					
			SMPN 4 Mendo Barat	*1 Ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhabilitasi*	*SMP Harapan Sungailiat*	*1 Ruang*	*45.880.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhabilitasi*	*SMPN 3 Sungailiat*	*1 Ruang*	*321.159.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhabilitasi*	*SMPN 4 Sungailiat*	*1 Ruang*	*993.123.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Ruang*					
			SMP Harapan Sungailiat	*1 Ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	*Jumlah toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya yang direhabilitasi*	*SMPN 5 Belinyu*	*1 Ruang*	*104.004.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya yang direhabilitasi*	*SMPN 4 Sungailiat*	*1 Ruang*	*361.307.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan toilet	*Jumlah toilet (jamban) beserta*	*SMPN 2 Pemali*	*1 Paket*	*866.375.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 3 Sungailiat	*1 Paket*					
			SMPN 4 Sungailiat	*1 Paket*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 2 Bakam	*1 Paket*					
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	*Jumlah ruang laboratorium komputer beserta perabotnya yang dibangun*	*SMPN 3 Mendo Barat*	*1 Ruang*	*1.204.366.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 2 Bakam	*1 Ruang*					
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	*Jumlah ruang UKS beserta perabotnya yang dibangun*	*SMPN 2 Pemali*	*1 Ruang*	*770.556.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 4 Mendo Barat	*1 Ruang*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Ruang*					
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) fisika	*Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) fisika yang tersedia*	*SMPN 5 Belinyu*	*1 Paket*	*178.640.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 3 Sungailiat	*1 Paket*					
			SMPN 4 Sungailiat	*1 Paket*					
			SMPN 4 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 2 Bakam	*1 Paket*					
			SMP Harapan Sungailiat	*1 Paket*					
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi	*Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi yang tersedia*	*SMPN 5 Belinyu*	*1 Paket*	*166.740.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 2 Pemali	*1 Paket*					
			SMPN 4 Sungailiat	*1 Paket*					
			SMPN 4 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 2 Bakam	*1 Paket*					
			SMP Harapan Sungailiat	*1 Paket*					
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	*Jumlah peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tersedia*	*SMPN 4 Sungailiat*	*1 Paket*	*1.000.350.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 2 Bakam	*1 Paket*					
	Sub Kegiatan Pengadaan media pendidikan	*Jumlah media pendidikan yang tersedia*	*SMPN 5 Belinyu*	*1 Paket*	*225.000.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SMPN 4 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 3 Mendo Barat	*1 Paket*					
			SMPN 2 Bakam	*1 Paket*					
			SMP Harapan Sungailiat	*1 Paket*					
1.01.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersedian sarana SD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**14.895.337.000,00**	**DAK**	**P2**	**90%**	**-**
		Persentase ketersediaan prasarana SD		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang	*Jumlah ruang kelas dengan*	*SDN 2 Sungailiat*	*6 ruang*	*7.617.005.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 1 Puding Besar	*3 ruang*					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SDN 30 Sungailiat	*6 ruang*					
			SDN 4 Belinyu	*6 ruang*					
			SD 7 Mendo Barat	*6 ruang*					
			SD 10 Puding Besar	*3 ruang*					
			SD N 3 Bakam	*6 ruang*					
			SDN 8 Bakam	*3 ruang*					
			SDN 21 Sungailiat	*3 ruang*					
			SD 14 Mendo Barat	*3 ruang*					
			SDN 7 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 2 Puding Besar	*3 ruang*					
			SDN 2 Bakam	*6 ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi dengan perabotnya*	*SDN 1 Puding Besar*	*1 ruang*	*1.138.203.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 30 Sungailiat	*1 ruang*					
			SDN 7 Mendo Barat	*1 ruang*					
			SDN 10 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 8 Bakam	*1 ruang*					
			SDN 21 Sungailiat	*1 ruang*					
			SDN 14 Mendo Barat	*1 ruang*					
			SDN 2 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 2 Bakam	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	*Jumlah toilet (jamban) yang direhabilitasi beserta sanitasinya*	*SDN 1 Puding Besar*	*2 ruang*	*392.028.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 4 Belinyu	*6 ruang*					
			SDN 14 Mendo Barat	*6 ruang*					
			SDN 7 Mendo Barat	*6 ruang*					
			SDN 3 Bakam	*8 ruang*					
			SDN 21 Sungailiat	*2 ruang*					
			SDN 2 Puding Besar	*2 ruang*					
			SDN 9 Riau Silip	*3 ruang*					
			SDN 2 Bakam	*4 ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang UKS yang direhabilitasinya beserta perabotnya*	*SDN 2 Sungailiat*	*1 ruang*	*242.420.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 30 Sungailiat	*1 ruang*					
			SDN 1 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 10 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 3 Bakam	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	*Jumlah ruang guru yang direhabilitasi beserta perabotnya*	*SDN 1 Puding Besar*	*1 ruang*	*132.491.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	*Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang tersedia*	*SDN 2 Sungailiat*	*1 ruang*	*670.175.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 30 Sungailiat	*1 ruang*					
			SDN 8 Bakam	*1 ruang*					
			SDN 7 Riau Silip	*1 ruang*					
			SDIT Jamalullail Belinyu	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	*Jumlah ruang UKS beserta perabotnya yang tersedia*	*SDN 7 Mendo Barat*	*1 ruang*	*323.228.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UKS beserta perabotnya	*perabotnya yang tersedia*	*SDN 14 Mendo Barat*	*1 ruang*					
			SDN 7 Riau Silip	*1 ruang*					
			SDN 2 Bakam	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	*Jumlah ruang perpustakaan beserta perabotnya yang tersedia*	*SDIT Jamalullail Belinyu*	*1 ruang*	*210.778.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	*Jumlah ruang guru beserta perabotnya yang tersedia*	*SDN 10 Puding Besar*	*1 ruang*	*1.104.095.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 7 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 7 Riau Silip	*1 ruang*					
			SDN 9 Riau Silip	*1 ruang*					
			SDIT Jamalullail Belinyu	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	*Jumlah ruang laboratorium komputer beserta perabotnya*	*SDN 2 Sungailiat*	*1 ruang*	*1.384.914.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 30 Sungailiat	*1 ruang*					
			SDN 10 Puding Besar	*1 ruang*					
			SDN 3 Bakam	*1 ruang*					
			SDN 8 Bakam	*1 ruang*					
			SDN 14 Mendo Barat	*1 ruang*					
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	*Jumlah peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tersedia*	*SDN 2 Sungailiat*	*1 Paket*	*1.320.000.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 30 Sungailiat	*1 Paket*					
			SDN 10 Puding Besar	*1 Paket*					
			SDN 3 Bakam	*1 Paket*					
			SDN 8 Bakam	*1 Paket*					
			SDN 14 Mendo Barat	*1 Paket*					
	Sub Kegiatan Pengadaan media pendidikan	*Jumlah media pendidikan yang tersedia*	*SDN 2 Sungailiat*	*1 Paket*	*360.000.000,00*	*DAK*	*P2*	-	-
			SDN 4 Belinyu	*1 Paket*					
			SDN 8 Bakam	*1 Paket*					
			SDN 21 Sungailiat	*1 Paket*					
			SDN 2 Puding Besar	*1 Paket*					
			SDN 7 Riau Silip	*1 Paket*					
			SDN 2 Bakam	*1 Paket*					
			SDIT Jamalullail Belinyu	*1 Paket*					
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**3.517.800.000,00**				**3.693.690.000,00**
		Persentase Guru Bersertifikasi		**75,0**	**3.517.800.000,00**			**79,0**	**3.693.690.000,00**
		Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi		**55,0**				**60,0**	
xx	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**45%**	**3.517.800.000,00**	**APBD Prov**	**P2**	**10:48**	**3.693.690.000,00**
		Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi							
		Persentasi ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi							
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	*Peningkatan Mutu TPA*	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*1169 orang*	*3.507.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*3.693.690.000,00*
		Bantuan Pendidik Peningkatan Kualifikasi Pendidik Guru	*Sungailiat*	*9 orang*	*10.800.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*100%*	*-*
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**20.110.064.000,00**				**1.767.150.000,00**
		APK PAUD		**59,00**	**20.110.064.000,00**			**61,00**	**1.767.150.000,00**
		APS SD		**109,00**				**109,50**	
		APS SMP		**97,00**				**97,50**	
		Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin		**100,00**				**100,00**	
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Prasarana PAUD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**100%**	**1.683.000.000,00**	**DABA**	**P2**	**100%**	**1.767.150.000,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana PAUD		**100%**				**100%**	
		Persentase Ketersediaan Lembaga Terhadap Anak Usia Dini		**1 : 20**				**1 : 20**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Tambahan Penghasilan Pendidikan PAUD TK/RA*	*Kabupaten Bangka*	*661 orang*	*1.683.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*1.767.150.000,00*
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersedian sarana SD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**8.498.744.000,00**	**DABA**	**P2**	**90%**	**66.660.178.220,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SD		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tambahan Penghasilan Guru Inklusi SD/MI*	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*304 orang*	*1.824.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*1.915.200.000,00*
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Bantuan Pendidikan Inklusi SD/MI (Siswa)*	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*474 orang*	*711.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*746.550.000,00*
		Bantuan Sekolah Inklusi SD/MI	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*74 sekolah*	*740.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*777.000.000,00*
		BOS SD/MI	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*36276 orang*	*5.223.744.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*5.484.931.200,00*
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama**	**Persentase ketersedian sarana SMP**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**9.928.320.000,00**	**APBD**	**P3**	**90%**	**10.424.736.000,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SMP		**80%**				**90%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tambahan Penghasilan Guru Inklusi SMP/MTs*	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*50 guru*	*300.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*315.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Bantuan Pendidikan Inklusi SMP/MTs(Siswa)*	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*360 orang*	*540.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*567.000.000,00*
		Bantuan Sekolah Inklusi SMP/MTs(Siswa)	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*30 sekolah*	*300.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*315.000.000,00*
		BOS SMP/MTs	*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*18309 siswa*	*8.788.320.000,00*	*DABA*	*P2*	*100%*	*9.227.736.000,00*
2	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**								
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**60.000.000,00**				**13.448.925.000,00**
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**60.000.000,00**				**13.049.925.010,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**60.000.000,00**	**APBD Prov**	**P2**	**100%**	**13.049.925.010,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase penggunaan IT dalam Tata Laksana Organisasi							
		Persentase Data/Informasi yang dipublikasikan							
1.01.01.2.03.24	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (Genset GOR)	Sungailiat	1 unit	60.000.000,00	APBD Prov	P2	.....	63.000.000,00
JUMLAH					**62.628.750.000,00**				**12.398.925.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PRIORITAS III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**620.000.000,00**				**651.000.000,00**
01		**Indeks Tata Laksana Organisasi Dindikpora**		**100%**	**420.000.000,00**			**100%**	**441.000.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**100%**				**100%**	
xx	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**420.000.000,00**	**APBD**	**P3**	**100%**	**441.000.000,00**
		Persentase pelaksanaan kegiatan utama sesuai SOP							
		Persentase Arsip Dindikpora yang dikelola sesuai peraturan							
		Persentase pelaksanaan kegiatan utama sesuai SOP							
		Persentase pelaksanaan kegiatan utama sesuai SOP							
		Persentase penggunaan IT dalam Tata Laksana Organisasi							
		Persentase Data/Informasi yang dipublikasikan							
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		*Sungailiat*	*1 unit*	*420.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*441.000.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**100%**	**200.000.000,00**			**100%**	**210.000.000,00**
xx	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**100%**	**200.000.000,00**	**APBD**	**P3**	**100%**	**210.000.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu							
		Persentase aparatur yang berkinerja baik							
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		*Sungailiat*	*100%*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*210.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**18.495.000.000,00**				**19.419.750.000,00**
		APK PAUD		**59,00**	**18.495.000.000,00**			**61,00**	**19.419.750.000,00**
		APS SD		**109,00**				**109,50**	
		APS SMP		**97,00**				**97,50**	
		Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin		**100,00**				**100,00**	
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Prasarana PAUD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**100%**	**400.000.000,00**	**APBD**	**P3**	**100%**	**420.000.000,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana PAUD		**100%**				**100%**	
		Persentase Ketersediaan Lembaga Terhadap Anak Usia Dini		**1 : 20**				**1 : 20**	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		*8 TKN*	*8 Sekolah*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*420.000.000,00*
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama**	**Persentase ketersedian sarana SMP**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**10.020.000.000,00**	**APBD**	**P3**	**90%**	**10.521.000.000,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SMP		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*4 paket*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*840.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*1 sekolah*	*900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*945.000.000,00*
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*5 paket*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.050.000.000,00*
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*2 paket*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*672.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*24 paket*	*4.080.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*4.284.000.000,00*
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*10 paket*	*1.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.260.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*14 paket*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.470.000.000,00*
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersedian sarana SD**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**80%**	**7.645.000.000,00**	**APBD**	**P3**	**90%**	**8.027.250.000,00**
		Persentase ketersediaan prasarana SD		**80%**				**90%**	
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan beasiswa		**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*12 sekolah*	*2.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*2.520.000.000,00*
	Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*SDN 6 Puding Besar, SDN 10 Puding Besar, SMPN 3 Puding Besar (Mushola), SDN 7 Puding Besar (Mushola), SDN 9 Puding Besar (Mushola), SDN 19 Puding Besar (Mushola), SDN 19 Belinyu (Mushola), SMPN 2 Sungailiat (PJOK), SMPN 2 Pemali (PJOK)*	*1.350.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.417.500.000,00*
				Sumur Bor : SDN 14 Merawang, SDN 15 Merawang, SDN 2 Merawang, SDN 5 Merawang, SDN 19 Merawang	*125.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*131.250.000,00*
				Conblock : SDN 7 Sungailiat, SDN 2 Riau Silip, SDN 3 Pemali	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*157.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*11 paket*	*1.870.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.963.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*SMPN 3 Sungailiat*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*157.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*SMPN 2 Sungailiat (Alkes)*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*105.000.000,00*
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*15 paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*1.575.000.000,00*
xx	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase Lembaga PNF yang berizin**		**100%**	**430.000.000,00**		**P3**	**100%**	**451.500.000,00**
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Tersebar di Kabupaten Bangka	100%	200.000.000,00	APBD	P3	1	210.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Tersebar di Kabupaten Bangka	100%	230.000.000,00	APBD	P3	1	241.500.000,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**11.152.800.000,00**				**11.710.440.000,00**
		Persentase Guru Bersertifikasi		**75,0**	**11.152.800.000,00**			**79,0**	**11.710.440.000,00**
		Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi		**55,0**				**60,0**	
xx	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**	**Tersebar di Kabupaten Bangka**	**45%**	**11.152.800.000,00**	**APBD**	**P3**	**10:48**	**11.710.440.000,00**
		Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi							
		Persentasi ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi							
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		*Tersebar di Kabupaten Bangka*	*GTT dan PTT Se- Kabupaten Bangka*	*11.152.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	*11.710.440.000,00*
JUMLAH					**30.267.800.000,00**				**31.781.190.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD **: DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**								
1.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**								
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**125.948.467.869,00**				**144.559.805.316,85**
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat		**0,44**	**125.948.467.869,00**			**0,45**	**144.559.805.316,85**
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		**0,48**				**0,50**	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Meningkat Status Akreditasinya		**100,00**				**100,00**	
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota**	**Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar**		**70%**	**15.042.014.799,00**			**70%**	**17.098.266.768,85**
		Persentase fasyankes yang memiliki prasarana dan penunjang medik sesuai standar		**70%**				**70%**	
		persentase pemenuhan obat sesuai fornas		**60%**				**60%**	
		persentase pemenuhan alkes elektromedik		**80%**				**80%**	
		persentase pemenuhan Bahan Habis Pakai sesuai dg kompodium alkes non elektromedik		**40%**				**40%**	
1.02.02.2.01.12	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Jumlah lokasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten tertangani*	*Kec. Sungailiat*	*2 lokasi (Rebo dan Balunijuk)*	*4.001.005.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*4.401.105.500,00*
1.02.02.2.01.16	*Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin*	*Jumlah dan jenis obat sesuai dengan standar formas RSUD Depati Bahrin*	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*3.001.140.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*3.451.311.000,00*
		Jumlah dan jenis obat sesuai dengan standar formas RSUD Eko Maulana Ali	*Kec.Belinyu*	*1 paket*	*63.918.500,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*73.506.275,00*
		jumlah dan jenis obat sesuai dengan standar formas RSUD Syafrie Rachman	*Kec. Puding Besar*	*1 paket*	*81.286.000,00*	*APBD*	*P1*	*60%*	*93.478.900,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dan jenis obat sesuai dengan standar formas Dinas Kesehatan	*Kabupaten Bangka*	*240 jenis*	*2.025.718.950,00*	*APBD*	*P1*	*240 jenis*	*2.329.576.792,50*
		Jumlah dan jenis obat yg sesuai dengan formularium kabupaten dinkes		*50 jenis*				*50 jneis*	
1.02.02.2.01.17	*Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai*	*Jumlah jenis bahan habis pakai sesuai dengan kompedium alat kesehatan non elektromedik RSUD Depati Bahrin*	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*4.201.140.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*4.831.311.000,00*
		Jumlah jenis bahan habis pakai sesuai dengan kompedium alat kesehatan non elektromedik RSUD Eko Maulana Ali	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*129.181.500,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*148.558.725,00*
		Jumlah jenis bahan habis pakai sesuai dengan kompedium alat kesehatan non elektromedik RSUD Syafrie Rachman	*Kec. Puding Besar*	*1 paket*	*194.915.549,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*224.152.881,35*
		Jumlah jenis bahan habis pakai sesuai dengan kompedium alat kesehatan non elektromedik dinkes	*Kabupaten Bangka*	*240 jenis*	*1.343.709.300,00*	*APBD*	*P1*	*240 jenis*	*1.545.265.695,00*
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Cakupan BUMIL yg mendapatkan yankes sesuai standar**		**100%**	**110.763.158.070,00**			**100%**	**127.300.827.298,00**
		cakupan BULIN yg mendapatkan yankes sesuai standar		**100%**				**100%**	
		cakupan BBL yg mendapatkan yankes sesuai standar		**100%**				**100%**	
		cakupan balita yg mendapatkan yankes		**100%**				**100%**	
		cakupan usia pendidikan dasar yang mendapatkan yankes sesuai standar		**100%**				**100%**	
		cakupan usia produktif yg mendapatkan yankes sesuai standar		**100%**				**100%**	
		cakupan usila yg mendapatkan yankes sesuai standar		**100%**				**100%**	
		cakupan pelayanan PTM dan P2MPL		**100%**				**100%**	
1.02.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil*	*Jumlah bumil yang mendapatkan stiker P4K*	*Kabupaten Bangka*	*6795 bumil*	*131.113.000,00*	*APBD*	*P1*	*6795 bumil*	*150.779.950,00*
		Jumlah bumil yang mengikuti kelas ibu hamil		*328 bumil*				*328 bumil*	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 10T		*6795 bumil*				*6795 bumil*	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah BUMIL RESTi yang mendapatkan pelayanan standar BUMIL RESTI		*1400 bumil*				*1400 bumil*	
		Jumlah Ibu Hamil yang terdata		*6795 bumil*				*6795 bumil*	
		Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT		*437 buumil*				*437 buumil*	
1.02.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	*Cakupan BULIN dengan ASI Ekslusif*	*Kabupaten Bangka*	*3.86%*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3.86%*	*23.000.000,00*
		Cakupan BULIN Dengan vitamin A		*6.49%*				*6.49%*	
1.02.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*	*Jumlah bayi yang mendapatkan perawatan tali pusat*	*Kabupaten Bangka*	*6300 bayi*	*146.535.000,00*	*APBD*	*P1*	*6300 bayi*	*161.188.500,00*
		Jumlah bayi yang mendapatkan salep mata		*6300 bayi*				*6300 bayi*	
		Jumlah bayi yang mendapatkan vitamin K		*6300 bayi*				*6300 bayi*	
		Jumlah bayi yang mendpaatkan imunisasi HB0		*6300 bayi*				*6300 bayi*	
		Jumlah bayi yang mendapatkan IMD		*5000 bayi*				*5000 bayi*	
		Jumlah anak usia 0-5 thn yang mendapatkan SDIDTK		*30470 balita*				*30470 balita*	
		Jumlah bayi yang mendapatkan skrining hipotiroid kongenital		*920 bayi*				*920 bayi*	
		cakupan desa UCI		*100%*				*100%*	
1.02.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita*	*cakupan balita yang mendapatkan PMT*	*Kabupaten Bangka*	*26.5%*	*87.125.000,00*	*APBD*	*P1*	*26.5%*	*100.193.750,00*
		cakupan PKM dengan panti rehabilitasi gizi		*16.7%*			*P1*	*16.7%*	
1.02.02.2.02.05	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar*	*jumlah anak yang mendapatkan pelayanan pusling gigi*	*Kabupaten Bangka*	*4250 siswa SD/MI*	*47.480.000,00*	*APBD*	*P1*	*4250 siswa SD/MI*	*54.602.000,00*
1.02.02.2.02.06	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif*	*jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan PKPR*	*Kabupaten Bangka*	*28377 org*	*30.184.800,00*	*APBD*	*P1*	*28377 org*	*34.712.520,00*
		jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan KESPRO		*506 org*				*506 org*	
		jumlah remaja yang mendapatkan konseling		*15059 org*				*15059 org*	
		jumlah konselor sebaya yang dibentuk		*575 org*				*575 org*	
		jumlah anak yang sangat kurus disekolah		*102org*				*102org*	
		jumlah anak yang mendapatkan imunisasi BIAS		*12,8%*				*12,8%*	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jumlah pemberian FE pada remaja putri SMP		*8546 org*				*8546 org*	
		jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut		*6300 siswa*				*6300 siswa*	
1.02.02.2.02.07	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjut*	*jumlah posyandu lansia*	*Kabupaten Bangka*	*105 pos*	*36.250.850,00*	*APBD*	*P1*	*105 pos*	*39.875.935,00*
		jumlah usila yang mendapatkan skrining hipertensi		*10300 org*				*10300 org*	
		jumlah usila yang mendapatkan skrining kolesterol		*4600 org*				*4600 org*	
		jumlah usila yang mendapatkan skrining gula darah		*2000 org*				*2000 org*	
		jumlah usila yang diukur BB dan TB		*10300 org*				*10300 org*	
1.02.02.2.02.11	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*	*cakupan pemeriksaan kontak serumah suspect TB*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*36.535.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*40.188.500,00*
1.02.02.2.02.12	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV*	*cakupan pemeriksaan serro survey*	*Kabupaten Bangka*	*200 kasus*	*127.645.000,00*	*APBD*	*P1*	*200 kasus*	*140.409.500,00*
		cakupan kelompok usia 15-24 thn yang mendpat pengetahuan komprehensif		*3000 org*				*3000 org*	
1.02.02.2.02.17	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	*Cakupan KK dengan CTPS*	*Kabupaten Bangka*	*67708 kk*	*166.211.750,00*	*APBD*	*P1*	*67708 kk*	*182.832.925,00*
		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak		*283072 og*				*283072 og*	
		cakupan Desa/Kelurahan STBM		*100,00%*				*100,00%*	
1.02.02.2.02.18	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	*Jumlah gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GPp2SP)*	*Kabupaten Bangka*	*1 kelompok*	*27.268.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 kelompok*	*29.994.800,00*
		Jumlah pos UKK		*11 pos*				*11 pos*	
1.02.02.2.02.19	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisioanl Lainnya*	*Jumlah implementasi toga komunitas*	*Kabupaten Bangka*	*36 klp*	*27.180.000,00*	*APBD*	*P1*	*36 klp*	*31.257.000,00*
		Jumlah pengelola batra puskesmas yang dibina		*12 PKM*				*12 PKM*	
		Jumlah kelompok penyehatan trasdional yang dibina		*36 klp*				*36 klp*	
1.02.02.2.02.20	*Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	*Cakupan KLB < 24 jam tertangani*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*71.285.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*78.413.500,00*
1.02.02.2.02.23	*Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (UPT SPGDT)*	*jumlah kasus kegawat daruratan yang ditangani*	*Kabupaten Bangka*	*1900 kasus*	*1.511.362.000,00*	*APBD*	*P1*	*1900 kasus*	*1.738.066.300,00*
1.02.02.2.02.25	*Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	*Jumlah pemeriksaan MBS*	*Kabupaten Bangka*	*4800 kasus*	*245.072.000,00*	*APBD*	*P1*	*4800 kasus*	*269.579.200,00*
		jumlah rumah yang diperiksa jentik		*23000 rumah*				*23000 rumah*	
		jumlah slide malaria yang di crosscek		*500 slide*				*500 slide*	
		jumlah mesin fogging		*5 unit*				*5 unit*	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jumlah posbindu		*90 Pos*				*90 Pos*	
		jumlah usia 30-50 tahun yang diperiksa iva		*21000 org*				*21000 org*	
		jumlah usia produktif yang mendapat skrining hipertensi		*22514 org*				*22514 org*	
		jumlah usia prodduktif yang mendapat pemeriksaan sadanis		*21000 org*				*21000 org*	
		jumlah usia produktif yang mendapat skrining penglihatan dan pendengaran		*207877 org*				*207877 org*	
		jumlah usia produktif yang diukur BB/TB		*207877 org*				*207877 org*	
		jumlah jemaah haji yang mendapatkan yankes termasuk kesor		*335 org*				*335 org*	
		jumlah penyelenggaraan kesehatan matra/krisis kesehatan		*20 kasus*				*20 kasus*	
		jumlah usia ≥ 15 tahun yang merokok		*104320 org*				*104320 org*	
1.02.02.2.02.26	*Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	*Jumlah masyarakat yang ada jaminan kesehatan*	*Kabupaten Bangka*	*21067 jiwa*	*21.269.102.100,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*24.459.467.415,00*
1.02.02.2.02.32	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah sakit*	*Jumlah operasional (APBD) RSUD Eko Maulana Ali*	*Kec. Belinyu*	*100%*	*3.800.156.900,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*4.370.180.435,00*
		Jumlah operasional (APBD) RSUD Sayrie Rachman	*Kec. Puding Besar*	*100%*	*1.152.182.200,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*1.325.009.530,00*
		Jumlah operasional (APBD) RSUD DB	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*13.636.854.400,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*15.682.382.560,00*
		Opini Kinerja BLUD RSUD Eko Maulana Ali	*Kec. Belinyu*	*100%*	*440.000.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*506.000.000,00*
		Opini Kinerja BLUD RSUD Syafrie Rachman	*Kec. Puding Besar*	*100%*	*212.870.900,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*244.801.535,00*
		Opini Kinerja BLUD RSUD DB	*Sungailiat*	*100%*	*48.000.000.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*55.200.000.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas*	*Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Kenanga*	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*418.665.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*481.465.325,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Belinyu	*Kec. Belinyu*	*100%*	*602.560.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*692.944.000,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Gunung Muda	*Kec. Belinyu*	*100%*	*350.270.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*402.810.500,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Sungailiat	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*398.812.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*458.634.375,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Baturusa	*Kec. Merawang*	*100%*	*403.310.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*463.806.500,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Pemali	*Kec. Pemali*	*100%*	*388.317.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*446.565.125,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Bakam	*Kec. Bakam*	*100%*	*720.442.120,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*828.508.438,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Riausilip	*Kec. Riau Silip*	*100%*	*586.154.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*674.077.675,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Puding Besar	*Kec. Puding Besar*	*100%*	*492.848.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*566.775.775,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas petaling	*Kec. Mendo Barat*	*100%*	*585.810.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*673.681.500,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Sinar Baru	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*414.120.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*476.238.000,00*
		Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas Penagan	*Kec. Mendo Barat*	*100%*	*898.736.500,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*1.033.546.975,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Kenanga	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*880.000.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.012.000.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Belinyu	*Kec. Belinyu*	*100%*	*1.550.450.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.783.017.500,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Gunung Muda	*Kec. Belinyu*	*100%*	*393.580.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*452.617.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Sungailiat	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*1.820.720.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*2.093.828.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Baturusa	*Kec. Merawang*	*100%*	*871.750.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.002.512.500,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Pemali	*Kec. Pemali*	*100%*	*1.115.180.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.282.457.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Bakam	*Kec. Bakam*	*100%*	*999.130.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.148.999.500,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Riausilip	*Kec. Riau Silip*	*100%*	*1.100.000.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.265.000.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Puding Besar	*Kec. Puding Besar*	*100%*	*1.100.000.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.265.000.000,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Petaling	*Kec. Mendo Barat*	*100%*	*1.449.030.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*1.666.384.500,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Sinar Baru	*Kec. Sungailiat*	*100%*	*443.190.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*509.668.500,00*
		Opini Kinerja BLUD Puskesmas Penagan	*Kec. Mendo Barat*	*100%*	*690.470.000,00*	*BLUD*	*P1*	*100%*	*794.040.500,00*
1.02.02.2.02.34	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Lab Kes)*	*jumlah sampel yang diperiksa*	*Kabupaten Bangka*	*302 sample*	*187.910.000,00*	*APBD*	*P1*		*216.096.500,00*
1.02.02.2.02.35	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	*Jumlah pendampingan pasca akreditasi FKTP*	*Kabupaten Bangka*	*12 PKM*	*679.287.050,00*	*APBD*	*P1*	*12 PKM*	*747.215.755,00*
		Jumlah dokumen pemantauan thd kepatuhan SOP pelayanan		*12 dokumen*				*12 dokumen*	
		Jumlah PKM yang melaksanakan penilaian kinerja pkm		*12 PKM*				*12 PKM*	
		Jumlah PKM yang melaksanakan PTP		*12 PKM*				*12 PKM*	
		Jumlah PKM yang melaksanakan lokmin		*12 PKM*				*12 PKM*	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pendampingan akreditasi klinik pratama dan pratek dokter umum	*Kabupaten Bangka*	*30 KLINIK PRATAMA*				*30 KLINIK PRATAMA*	
		Jumlah pendampingan akreditasi labkesda	*Sungailiat*	*1 LABKESDA*				*1 LABKESDA*	
		Jumlah pendampingan pasca akreditasi RS	*Kec.Riausilip, kec. Sungailiat, kec. Puding besar*	*3 RSUD*				*3 RSUD*	
		Jumlah dokumen pemantauan thd kepatuhan SOP pelayanan		*3 dokumnen*				*3 dokumnen*	
1.02.02.2.03.	**Kegiatan Penyelenggaraan sistem infomasi kesehatan secara terintegrasi**	**Presentase penggunaan IT dalam tata laksana organisasi**		**100%**	**129.475.000,00**			**100%**	**146.891.250,00**
		Persentase data/informasi yang dipublikasin		**100%**				**100%**	
1.02.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan*	*Jumlah fasyankes yang diimplementasikan sisute*	*Kabupaten Bangka*	*12 PKM, 7 RS*	*40.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 PKM, 7 RS*	*44.110.000,00*
		Jumlah fasyankes yang mengimplementasikan pembangunan program telemedicine		*6 PKM, 1 RS*				*6 PKM, 1 RS*	
		Jumlah PKM PONED yang dibina		*4 PKM*				*4 PKM*	
1.02.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Jumlah PKM yang memiliki sistem informasi kesehatan online*	*Kabupaten Bangka*	*12 PKM*	*89.375.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 PKM*	*102.781.250,00*
		Jumlah PKM yang memiliki jaringan intenet	*Kabupaten Bangka*	*12 PKM*				*12 PKM*	
		Jumlah PKM yang memiliki hardware	*Kabupaten Bangka*	*12 PKM*				*12 PKM*	
1.02.02.2.04.	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**100%**	**13.820.000,00**			**100%**	**13.820.000,00**
1.02.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	*Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan*	*Kabupaten Bangka*	*20 buku*	*13.820.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 buku*	*13.820.000,00*
		Jumlah dokumen hasil survey IKM		*1 dokumen*				*1 dokumen*	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN**				**361.117.500,00**				**415.285.125,00**
		Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar		**100,00**	**361.117.500,00**			**100,00**	**415.285.125,00**
1.02.03.2.01	**Kegiatan Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten / kota**	**Persentase nakes sesuai standar**		**90%**	**88.932.500,00**			**90%**	**102.272.375,00**
1.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	*Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi*	*Kabupaten Bangka*	*90%*	*88.932.500,00*	*APBD*	*P1*	*93%*	*102.272.375,00*
		Persentase Faskes dengan jenis tenaga sesuai standar		*100%*				*100%*	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Faskes dengan sumber daya kesehatan sesuai standar**		**90%**	**272.185.000,00**			**90%**	**313.012.750,00**
1.02.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*persentase nakes teladan*		*12 PKM*	*90.685.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 PKM*	*104.287.750,00*
1.02.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan*	*Persentase nakes yang mengikuti diklat*		*70 ORG*	*181.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*70 ORG*	*208.725.000,00*
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**38.932.000,00**				**44.771.800,00**
		Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar		**60,00**	**38.932.000,00**			**65,00**	**44.771.800,00**
1.02.04.2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Trasidional (UMOT)**		**Kabupaten Bangka**	**100%**	**25.187.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**28.965.050,00**
1.02.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)*	*Persentase apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisonal (UMOT) yang sesuai standar*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*25.187.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*28.965.050,00*
1.02.04.2.03	**Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga**		**Kabupaten Bangka**	**100%**	**13.745.000,00**			**100%**	**15.806.750,00**
1.02.04.2.03.01	*Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga*	*Jumlah PIRT yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan*	*Kabupaten Bangka*	*350 PIRT*	*13.745.000,00*	*APBD*	*P1*	*350 PIRT*	*15.806.750,00*
		Jumlah tempat kegiatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya		*125 tempat*				*125 tempat*	
		Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat penyuluhan pangan		*240 PIRT*				*240 PIRT*	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**134.734.000,00**				**151.073.400,00**
		Indeks Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		**0,75**	**134.734.000,00**			**0,78**	**151.073.400,00**
1.02.05.2.01	**Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota**				**57.320.000,00**				**65.918.000,00**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.01.01	*Subkegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat*	*Jumlah kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan*	*Kabupaten Bangka*	*1 dokumen*	*57.320.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*65.918.000,00*
		Jumlah desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM		*28 desa*				*28 desa*	
		Jumlah tema kampanye yang dipromosikan		*5 tema*				*5 tema*	
1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / kota**				**77.414.000,00**				**85.155.400,00**
1.02.05.2.03.01	*Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	*persentase posyandu aktif*	*Kabupaten Bangka*	*105 pos*	*77.414.000,00*	*APBD*	*P1*	*105 pos*	*85.155.400,00*
		persentse desa siaga aktif		*62 desa*				*62 desa*	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				***75.121.491.750,00***				***82.633.640.925,00***
		Nilai Aspek Perencanaan dalam AKIP		**26,00**	**177.978.250,00**			**26,00**	**195.776.075,00**
		Nilai Aspek Pelaporan dalam AKIP		**10,75**				**10,75**	
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar**		**100%**	**177.978.250,00**			**100%**	**195.776.075,00**
		persentse pelaporan kinerja sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan program kesehatan yang disusun*	*sungailiat*	*7 dokumen*	*131.323.250,00*	*APBD*	*P1*	*7 dokumen*	*144.455.575,00*
1.02.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja program kesehatan yang disusun*	*sungailiat*	*3 dokumen*	*46.655.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 dokumen*	*51.320.500,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**68.334.623.700,00**			**0%**	**75.168.086.070,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**68.334.623.700,00**			**100%**	**75.168.086.070,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*68.319.623.700,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*75.151.586.070,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi		**70**	**5.724.489.800,00**			**72**	**6.296.938.780,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**85**				**90**	
1.02.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase arsip dikelola sesuai aturan**		**100%**	**5.724.489.800,00**			**100%**	**6.296.938.780,00**
		persentase pelaksanaan kegiatan utama sesuai SOP		**100%**				**100%**	
		persentase sarpras kebersihan kondisi baik		**100%**				**100%**	
		persentase sarana kendaraan / oeprasional kondisi baik		**100%**				**100%**	
		persentse peralatan, perlengkapan, meubelair kondisi baik		**100%**				**100%**	
		persentase komunikasi, dan listrik kondisi baik		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*501.305.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*551.436.380,00*
1.02.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*347.114.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*381.825.400,00*
1.02.01.2.03.03	*Sub Kgiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*48.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*53.295.000,00*
1.02.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*238.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*262.724.000,00*
1.02.01.2.03.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	*Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*147.164.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*161.880.400,00*
1.02.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*117.064.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*128.770.400,00*
1.02.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*307.085.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*337.793.500,00*
1.02.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan*	*Sungailiat*	*1 paket*	*393.135.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*432.448.500,00*
1.02.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan*	*Sungailiat*	*1 paket*	*78.425.900,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*86.268.490,00*
1.02.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur*	*Jumlah meubeleur yang disediakan*	*Sungailiat*	*1 paket*	*25.326.100,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*27.858.710,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*16.830.000,00*
1.02.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitas*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*3.505.280.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*3.855.808.000,00*
		Indeks profesionalisme aparatur Lingkup Dinkes		**98%**	**884.400.000,00**			**98%**	**972.840.000,00**
1.02.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**persentase Aparatur Dinkes bekerja tepat waktu**		**98%**	**884.400.000,00**			**98%**	**972.840.000,00**
		persentase Aparartur Dinkes berkinerja baik		**98%**				**98%**	
1.02.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olahraga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 buah*	*9.900.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*10.890.000,00*
		Jumlah Pakaian Seragam Adat Melayu	*sungailiat*	*1166 buah*	*874.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*961.950.000,00*
		JUMLAH			***201.604.743.119,00***				***227.804.576.566,85***

PRIORITAS III

1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**30.993.787.100,00**				**34.509.090.750,00**
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat		**0,44**				**0,45**	
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		**0,48**				**0,50**	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Meningkat Status Akreditasinya		**100,00**				**100,00**	
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota**	**Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar**		**70%**	**30.993.787.100,00**	**APBD**		**70%**	**34.509.090.750,00**
		Persentase fasyankes yang memiliki prasarana dan penunjang medik sesuai standar		**70%**				**70%**	
		Persentase pemenuhan obat sesuai fornas		**60%**				**60%**	
		Persentase pemenuhan alkes elektromedik		**80%**				**80%**	
		Persentase pemenuhan BHP sesuai dg kompodium alkes non elektromedik		**40%**				**40%**	
1.02.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit*	*Pembangunan Gedung Gizi, Farmasi dan Selasar RSUD DB*	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*7.905.430.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*9.091.244.500,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Gudang Limbah B3 dan Selasar RS Eko Maulana Ali	*Kec. Belinyu*	*1 Paket*	*1.717.390.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.974.998.500,00*
1.02.02.2.01.06	*Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas*	*Pembangunan Gedung RMC PKM Sinar Baru (PKM Pariwisata)*	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*350.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*402.500.000,00*
		Pembangunan Gedung Mampu salin PKM Kenanga	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*345.000.000,00*
1.02.02.2.01.08	*Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit*	*Rehabilitasi sedang/berat RSUD DB*	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*790.585.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*909.172.750,00*
1.02.02.2.01.10	*Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya*	*Rehabilitasi sedang/ berat dan perluasan pustu*	*Kabupaten Bangka*	*15 paket*	*5.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*15 paket*	*6.037.500.000,00*
1.02.02.2.01.12	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Sarana RSUD Syafrie Rachman (IPAL, B3)*	*Kec. Puding Besar*	*1 paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 paket*	*1.725.000.000,00*
1.02.02.2.01.13	*Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Persentase Faskes Yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar*		*70%*			*P3*		
		prasarana RSUD Eko maulana Ali	*Kec.Riau Silip*	*1 Paket*	*2.000.690.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*2.300.793.500,00*
		prasarana RSUD Syarie Rachman	*Kec. Puding Besar*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.725.000.000,00*
		prasarana RSUD Depati Bahrin	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*1.954.850.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*2.248.077.500,00*
		Prasarana Puskesmas	*Kabupaten Bangka*	*1 Paket*	*600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*690.000,00*
1.02.02.2.01.14	*Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*alkes/penu jang medik fasyankes RSUD DB*	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*5.001.140.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 paket*	*5.751.311.000,00*
1.02.02.2.01.15	*Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi*	*jumlah PKM yang memiliki alkes seusai standar (alkes RMS PKM pariwisata)*	*Kabupaten Bangka*	*1 paket*	*1.737.220.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 paket*	*1.997.803.000,00*
1.02.02.2.01.19	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*persentase FKTP yang memiliki sarpas sesuai dengan standar (PKM)*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*65.762.100,00*	*APBD*	*P3*	*100%*	
		persentase RSUD yang memiliki sarpas sesuai dengan standar (RSUD DB)	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*200.840.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	
1.02.02.2.01.20	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*persentase RSUD yang memiliki alkes/ penunjang medik sesuai dengan standar (RSUD DB)*	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*719.280.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 paket*	
JUMLAH					**30.993.787.100,00**				**34.509.090.750,00**

PRIORITAS II

1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**234.318.267.447,00**				**11.986.734.620,00**
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat		**0,44**				**0,45**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Keluarga Sehat Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		**0,48**				**0,50**	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Meningkat Status Akreditasinya		**100,00**				**100,00**	
02.01.01.	***Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas***	***Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar***		**70%**	***48.264.272.000,00***				**-**
02.01.01.02	*Penambahan Ruang Puskesmas*	*Jumlah Ruang Puskesmas yang dibangun*	*Puskesmas Petaling*	*1 Paket*	*12.611.522.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			Puskesmas Penangan	*1 Paket*	*10.000.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			Puskesmas Sungailiat	*1 Paket*	*11.000.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			Puskesmas Bakam	*1 Paket*	*11.124.750.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.01.03	*Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas*	*Jumlah Rumah Dinas Puskesmas yang dibangun*	*Puskesmas Petaling*	*1 Paket*	*3.528.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			Puskesmas Penangan	*1 Paket*					
			Puskesmas Kenanga	*1 Paket*					
			Puskesmas Bakam	*1 Paket*					
02.01.02	***Kegiatan Penyediaan Prasarana Puskesmas***	***Persentase fasyankes yang memiliki prasarana dan penunjang medik sesuai standar***		**70%**	***21.283.684.265,00***				**-**
02.01.02.02	*Pusling Roda Empat*	*Jumlah puskesmas keliling roda empat yang tersedia*	*Puskesmas Petaling, Penagan, Baturusa, Puding Besar, Kenanga, Pemali, Bakam, Belinyu, Gunung Muda, Riau Silip*	*10 Unit*	*5.093.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.02.03	*Ambulans*	*Jumlah ambulas puskesmas yang tersedia*	*Puskesmas Petaling, Penagan, Baturusa, Puding Besar, Sungailiat, Kenanga, Sinar Baru, Pemali, Bakam, Belinyu, Gunung Muda, Riau Silip*	*12 Unit*	*12.691.800.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.02.05	*Instalasi Pengolah Limbah*	*Jumlah instalasi pengolah limbah yang dibangun*	*Puskesmas Kenanga*	*1 Paket*	*509.300.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.02.06	*Prasarana Listrik*	*Jumlah genset puskesmas yang tersedia*	*Puskesmas Petaling, Penagan, Baturusa, Puding Besar, Kenanga*	*5 Paket*	*1.689.584.265,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.02.07	*Prasarana Air Bersih*	*Jumlah sumur puskesmas yang tersedia*	*Puskesmas Petaling, Penagan, Baturusa, Puding Besar, Kenanga, Pemali, Bakam, Belinyu, Gunung Muda, Riau Silip*	*10 Paket*	*1.300.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.03	***Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas***	***Persentase fasyankes yang memiliki prasarana dan penunjang medik sesuai standar***			***1.170.870.900,00***				***-***
02.01.03.02	*Sarana Cold Chain*	*Jumlah sarana cold chain puskesmas yang tersedia*	*Puskesmas Baturusa, Pemali, Gunung Muda, Belinyu, Sinar Baru, Riau Silip*	*6 Paket*	*801.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.03.09	*Set Kesehatan Gigi dan Mulut*	*Jumlah set kesehatan gigi dan mulut yang tersedia*	*Puskesmas Gunung muda dan Baturusa*	*2 Paket*	*187.542.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.01.03.10	*Set Umum*	*Jumlah set umum yang tersedia*	*Puskesmas Pemali, Bakam dan Gunung Muda*	*3 Paket*	*182.328.900,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.01	***Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit***				***70.400.000.000,00***				***-***
02.02.01.02	*High Care Unit (HCU)*	*Jumlah gedung High Care Unit (HCU) yang dibangun*	*RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar*	*1 Paket*	*2.500.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.01.03	*UTD/BDRS*	*Jumlah UTDRS yang dibangun*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*2.200.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.01.05	*Rawat Inap*	*Jumlah gedung rawat inap yang dibangun*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*6.200.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.01.06	*Ruang Operasi*	*Jumlah ruang operasi (MOT) yang dibangun*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*39.000.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*5.500.000.000,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*15.000.000.000,00*				
02.02.02	***Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit***	**Persentase pemenuhan alkes elektromedik**			***39.800.383.779,00***				***-***

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.02	*UTD/BDRS*	*Jumlah alat kesehatan UTDRS yang diadakan*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*164.495.770,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*104.684.937,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.02.03	*HCU*	*Jumlah alat kesehatan ruang HCU yang diadakan*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*1.024.653.359,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*359.525.925,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*2.000.000.000,00*				
02.02.02.04	*Rawat Jalan*	*Jumlah alat kesehatan ruang rawat jalan yang diadakan*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*3.782.763.786,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*1.074.715.266,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*1.040.000.000,00*				
02.02.02.05	*Rawat Inap*	*Jumlah alat kesehatan ruang rawat inap yang diadakan*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*2.426.973.487,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*483.401.668,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*3.000.000.000,00*				
02.02.02.06	*Ruang Operasi*	*Jumlah alat kesehatan ruang operasi yang diadakan*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*14.564.892.715,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*1.684.276.866,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*8.090.000.000,00*				
02.02.03	***Kegiatan Penyediaan Prasarana Rumah Sakit***	***Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar***			***15.533.438.551,00***				***-***
02.02.03.01	*Prasarana Air Bersih*	*Jumlah prasarana air bersih Rumah Sakit yang tersedia*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*1.000.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.02.03.02	*Instalasi Pengolahan Limbah*	*Jumlah instalasi pengolahan limbah yang tersedia*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*5.854.748.100,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*156.357.000,00*				
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*1.200.000.000,00*				
02.02.03.04	*Prasarana Listrik*	*Jumlah prasarana listrik Rumah Sakit yang tersedia*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*3.722.333.451,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Dr. Eko Maulana Ali	*1 Paket*	*300.000.000,00*				
02.02.03.05	*Ambulans*	*Jumlah ambulans Rumah Sakit yang tersedia*	*RSUD Depati Bahrin*	*1 Paket*	*1.800.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
			RSUD Sjafrie Rachman Puding Besar	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.01	***Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi***	***Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar***			***329.110.334,00***				-
02.03.01.02	*Prasarana*	*Jumlah prasarana farmasi yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*1 Paket*	*329.110.334,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.03.02	***Kegiatan Penyediaan Obat***	**Persentase pemenuhan obat sesuai fornas**			***1.376.042.433,00***				-
02.03.02.01	*Obat*	*Jumlah perbekalan obat yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*1 Paket*	*1.376.042.433,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.03.03	***Kegiatan Penyediaan Bahan Habis Pakai***	**Persentase pemenuhan BHP sesuai dg kompodium alkes non elektromedik**			***3.094.362.385,00***				-
02.03.03.01	*BMHP*	*Jumlah BMHP yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*1 Paket*	*1.329.573.460,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.03.03.02	*Cartridge TCM*	*Jumlah cartdridge TCM yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*5115 Paket*	*1.325.680.125,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.03.03.03	*R0 dan BHP Skrining HIV*	*Jumlah R0 dan BHP Skrining HIV yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*7086 Paket*	*289.108.800,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.03.03.04	*BHP Malaria*	*Jumlah BHP Malaria yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*100 Paket*	*150.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.04.02	***Kegiatan Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular***	**Persentase pemenuhan alkes elektromedik**			***4.680.000.000,00***				-
02.04.02.01	*Heart Rate Variability (HRV) Test*	*Jumlah HRV Test yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*12 Unit*	*4.680.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.04.04	***Kegiatan Penyediaan Telemedicine***	**Persentase pemenuhan alkes elektromedik**			***62.007.600,00***				-
02.04.02.01	*Penyediaan Telemedicine di Puskesmas (Alkes dan Perangkat Keras)*	*Jumlah telemedicibe puskesmas yang tersedia*	*Puskesmas Petaling*	*1 Paket*	*62.007.600,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
02.05.02	***Kegiatan Penguatan promosi, surveillans dan tata laksana gizi***				***650.000.000,00***				-
02.05.02.05	*Mobil Promkes*	*Jumlah mobil promkes yang tersedia*	*Dinas Kesehatan*	*1 Unit*	*650.000.000,00*	*DAK Fisik*	*P2*	-	-
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota**	**Persentase fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar**		**70%**	**16.116.472.200,00**			**70%**	**348.119.420,00**
		Persentase fasyankes yang memiliki prasarana dan penunjang medik sesuai standar		**70%**				**70%**	
		Persentase pemenuhan obat sesuai fornas		**60%**				**60%**	
		Persentase pemenuhan alkes elektromedik		**80%**				**80%**	
		Persentase pemenuhan BHP sesuai dg kompodium alkes non elektromedik		**40%**				**40%**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.13	*Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Jumlah Incenerator yang dibangun*	*RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan RSUD Syafrie Rachman*	*2 unit*	*2.000.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*-*	*-*
		Jumlah mobil kegiatan IVA yang disediakan	*Kabupaten Bangka*	*1 unit*	*1.000.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*0%*	*-*
		Jumlah Mobil Operasional Kegiatan Fogging yang disediakan	*Kabupaten Bangka*	*1 unit*	*800.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*0%*	*-*
		Jumlah Mobil Puskesmas Keliling yang diadakan	*12 PKM*	*12 unit*	*6.000.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*0%*	*-*
		Jumlah Ambulance Transport yang diadakan	*12 PKM*	*12 unit*	*6.000.000.000,00*	*DABA*	*P2*	*0%*	*-*
1.02.02.2.01.16	*Subkegiatan pengadaan obat, vaksin (Manajemen E-Logistik)*	*Prosentase pemenuhan obat sesuai pronas*	*Dinas Kesehatan Kab. Bangka*	*60%*	*158.236.100,00*	*DAK Nonfisik*	*P2*	*60%*	*166.147.905,00*
1.02.02.2.01.16	*SubKegiatan Pengadaan obat, vaksin (manajemen E-logistik)*	*Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas*	*Kabupaten Bangka*	*60%*	*158.236.100,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*60%*	*181.971.515,00*
		Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik		*80%*				*80%*	
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**11.557.623.000,00**				**11.638.615.200,00**
1.02.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Jaminan Persalinan)*	*jumlah ibu hamil yang mendapatkan stiker P4K*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*1.168.175.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*100%*	*1.343.401.250,00*
		jumlah kelas ibu hamil		*70%*				*70%*	
		jumlah ibu hamil yang mendapatkan 10 T		*100%*				*100%*	
		jumlah ibu hamil yang terdata		*100%*				*100%*	
		jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT		*100%*				*100%*	
		jumlah ibu hamil yag melahirkan di faskes		*100%*				*100%*	
		jumlah bulin yg mendapat Kb pasca salin		*85%*				*85%*	
		jumlah bulin yg memberi Asi eksluasif		*68%*				*68%*	
		jumlah bulin yang mendapatkan vitamin A		*80%*				*80%*	
1.02.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK Stunting)*	*Status gizi Balita*	*Kabupaten Bangka*	*10%*	*825.000.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*9%*	*948.750.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Pada Puskesmas Kenanga)*	*Layanan operasional pada Puskesmas Kenanga*	*Kec. Sungailiat*	*12 Bulan*	*682.938.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*12 Bulan*	*785.378.700,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Belinyu)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Belinyu*	*75%*	*775.400.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*891.710.000,00*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas gunung muda)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Belinyu*	*75%*	*522.110.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*600.426.500,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Sungailiat)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Sungailiat*	*75%*	*668.700.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*769.005.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Baturusa)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Merawang*	*75%*	*728.500.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*837.775.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Pemali)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Pemali*	*75%*	*654.500.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*752.675.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Bakam)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Bakam*	*75%*	*768.300.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*883.545.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Riau Silip)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Riau Silip*	*75%*	*768.300.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*883.545.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Puding Besar)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Puding Besar*	*75%*	*621.800.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*715.070.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Petaling)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Mendo Barat*	*75%*	*754.000.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*867.100.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Sinar Baru)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Sungailiat*	*75%*	*508.000.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*584.200.000,00*
1.02.02.2.02.33	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (pada Puskesmas Penagan)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kec. Mendo Barat*	*75%*	*479.500.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*551.425.000,00*
1.02.02.2.02.34	*Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UKM Sekunder)*	*Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat*	*Kabupaten Bangka*	*75%*	*1.027.400.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*77%*	*1.181.510.000,00*
1.02.02.2.02.35	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Faskes di Kabupaten Kota*	*Cakupan faskes yang memenuhi Standar pelayanan kesehatan puskesmas*	*Dinas Kesehatan Kab. Bangka*	*0%*	*-*	*DAK Nonfisik*	*P2*	*100%*	*700.000.000,00*
1.02.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar (dukungan manajemen DAK)*	*Kabupaten Bangka*	*100%*	*605.000.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*100%*	*635.250.000,00*
1.02.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah,*	*Persentase Pelaporan Kinerja sesuai standar (dukam dak)*							
JUMLAH					***234.318.267.447,00***				***11.986.734.620,00***

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
01.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**14.595.000.000,00**				**12.795.900.000,00**
		Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik		**65,00**	**14.595.000.000,00**			**66,00**	**12.795.900.000,00**
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		**58,72**				**60,50**	
1.03.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik**	**Kab. Bangka**	**70%**	**12.040.000.000,00**	APBD	P1		**10.189.800.000,00**
1.03.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya*	*Jumlah layanan penyusunan Dokumen Perencanaan Tekhnis Sarana dan Prasarana Pemerintah Kab. Bangka yang tertangani*	*Kab. Bangka*	*.... Dokumen*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*255.000.000,00*
1.03.02.2.01.06	*Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya*	*Jumlah Embung yang terbangun*			*880.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*897.600.000,00*
		- Embung Desa Jada Bahrin	*Kec. Merawang*	*1 paket*	*180.000.000,00*				
		- Embung Desa Tiang Tarah	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Embung Desa Bakam	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*500.000.000,00*				
1.03.02.2.01.09	*Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai*	*Jumlah Tanggul Sungai yang dibangun*			*1.120.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*1.142.400.000,00*
		- Tanggul Sungai Air Mabat	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*100.000.000,00*				
		- Tanggul DAS Sungai Gud	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*120.000.000,00*				
		- Saluran air Desa Kapuk	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*300.000.000,00*				
		- Talud penahan Kolam Retensi Desa Kapuk	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*500.000.000,00*				
		- Talud Situ Pelipes Desa Maras Senang	*Kec. Bakam*	*1 paket*	*100.000.000,00*				
1.03.02.2.01.18	*Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya*	*Luas Talud Pengaman Pantai Desa Penagan yang dibangun*	*Kec. Mendo Barat*	*200 m2*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*306.000.000,00*
1.03.02.2.01.24	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai*	*Jumlah tanggul sungai yang direhabilitasi*			*1.640.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*1.672.800.000,00*
		- Drainase Primer di Lingkungan Cendrawasih	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*100.000.000,00*				
		- Drainase Primer di Kelurahan Srimenanti	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*120.000.000,00*				

		- Drainase Primer di Lingkungan Sripemandang	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*300.000.000,00*				
		- Drainase Primer Gang Raja Basa	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*100.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Semujur - Masjid An-nur	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*120.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Pom Bensin - Gang Namak	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*300.000.000,00*				
		- Drainase di Kecamatan Pemali	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*500.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Air Ruay	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*100.000.000,00*				
1.03.02.2.01.34	*Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai*	*Jumlah tanggul sungai yang ditingkatkan*	*Sungailiat*		*6.050.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*6.171.000.000,00*
		- Saluran/Drainase Primer Lingk. Nangnung Tengah (Belakang Masjid At Taqwa)	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*140.000.000,00*				
		- Saluran/ Drainase Primer Kp. Keladi Kelapa	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*150.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase di Pantai Matras	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*120.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Primer Gg. Muria	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*120.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Primer Lingk. Bedeng Ake	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Primer Belakang Kantor Dinas Kelautan Perikanan/Kolam Renang - Gg. Raya IV	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Primer Kawasan Taman Pesona Bangka	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase di Kelurahan Bukit Betung	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Saluran/Drainase Primer di Kelurahan Srimenanti	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Gg. Lepar	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*120.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Jalan Kenangan Desa Pemali	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Penyamun	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Dusun Mentabak	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Gg. Nias	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Air Pengabis	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Bukit Sekip	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Dusun Pohin	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer Aek Kembelen Desa Sempan	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Balunijuk	*Kec. Merawang*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kace Timur	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kace Barat	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				

		- Drainase Primer/Sungai Desa Cengkong Abang	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Zed	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kemuja	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Air Kacip	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Bukit Ketok	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Gunung Muda	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Air Kp. Saber Kelurahan Bukit Ketok	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Desa Riding Panjang	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Air Jukung	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Belinyu	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*				
1.03.02.2.01.46	*Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai*	*Pengerukan Alur Sungai Desa Jurung*	*Kec. Merawang*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*204.000.000,00*
		Normalisasi alur primer jalan sungailiat-pangkal pinang dusun sinkai kec. Merawang		*1 Paket*					
1.03.02.2.01.53	*Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai*	*Jumlah tanggul dan tebing sungai yang dipelihara*			*1.600.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*1.632.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai di Kecamatan Sungailiat (Swakelola)	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*750.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai di Kecamatan Pemali (Swakelola)	*Kec. Pemali*	*1 Paket*	*350.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai di Kecamatan Merawang - Mendo Barat (Swakelola)	*Kec. Merawang - Mendo Barat*	*1 Paket*	*200.000.000,00*				
		- Drainase Primer/Sungai di Kecamatan Belinyu (Swakelola)	*Kec. Belinyu*	*1 Paket*	*300.000.000,00*				
1.03.02.2.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**		**60%**	**2.555.000.000,00**	APBD	P1		**2.606.100.000,00**
1.03.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa*	*Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi yang disusun*	*Kab. Bangka*		*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*306.000.000,00*
		- Data Base Teknis DI Kab. Bangka		*3 DI*					
1.03.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Luas Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun*	*Kec. Mendo Barat*		*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*510.000.000,00*
		- Jaringan Irigasi Desa Rukam		*40 Ha*					
1.03.02.2.02.14	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi*			*355.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*362.100.000,00*
		- Jaringan Daerah Irigasi Desa Paya Benua	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*180.000.000,00*				
		- Jaringan Daerah Irigasi Desa Pangkal Niur	*Kec. Riau Silip*	*1 paket*	*175.000.000,00*				

1.03.02.2.02.21	*Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara*	*Kec. Puding Besar, Kec. Mendo Barat, Kec. Riau Silip*	*3 DI*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*306.000.000,00*
		Jumlah Pembangunan Jalan Inspeksi dan Sarana Penunjang Jaringan Irigasi	*Kec. Mendo Barat*	*4 DI*	*800.000.000,00*				*816.000.000,00*
		- Jalan Inspeksi dan Sarana Penunjang Jaringan Irigasi DI Paya Benua	*Kec. Mendo Barat*						
		- Jalan Inspeksi dan Sarana Penunjang Jaringan Irigasi DI ZED	*Kec. Mendo Barat*						
		- Jalan Inspeksi dan Sarana Penunjang Jaringan Irigasi DI Penagan	*Kec. Mendo Barat*						
		- Jalan Inspeksi dan Sarana Penunjang Jaringan Irigasi DI Labu	*Kec. Puding Besar*						
1.03.02.2.02.27	*Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi*	*Unit Pengelola Irigasi yang dioperasionalkan*		*10 DI*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*306.000.000,00*
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Penagan	*Kec. Mendo Barat*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Paya Benua	*Kec. Mendo Barat*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI ZED	*Kec. Mendo Barat*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Banyuasin	*Kec. Riau Silip*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Pangkal Niur	*Kec. Riau Silip*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Kemuja	*Kec. Puding Besar*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Nibung	*Kec. Puding Besar*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Tanah Bawah	*Kec. Puding Besar*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Labu	*Kec. Puding Besar*						
		- P2A (Penjaga Pintu Air) DI Saing	*Kec. Puding Besar*						
1:03:03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**1.200.000.000,00**				**1.224.000.000,00**
		Cakupan Layanan Air Bersih		**55,00**	**1.200.000.000,00**			**65,00**	**1.224.000.000,00**
1.03.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik**			**1.200.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**1.224.000.000,00**
1.03.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM*	*Jumlah dokumen identifikasi dan pendataan SPAM Kabupaten Bangka*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*153.000.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM Kabupaten Bangka		*1 Dokumen*	*250.000.000,00*			*1 Dokumen*	*255.000.000,00*
1.03.03.2.01.06	*Sub Kegiatan Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan*	*Jumlah SPAM Perdesaan yang teroptimalisasi*	*Desa Tiang Tara Kec. Bakam, Desa Maras Senang Kec. Bakam*	*2 unit*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*408.000.000,00*

1.03.03.2.01.08	*Sub Kegiatan Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan*	*Jumlah SPAM Perdesaan yang direhabilitasi*	*Desa Pangkal Niur Kec. Riau Silip, Desa Kota Kapur Kec. Mendo Barat*	*2 unit*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*408.000.000,00*
1:03:05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**350.000.000,00**				**357.000.000,00**
		Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL		**50,00**	**350.000.000,00**			**67,00**	**357.000.000,00**
01.03.05.2.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sistem jaringan air Limbah domestik dalam kondisi baik**			**350.000.000,00**				**357.000.000,00**
01.03.05.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*153.000.000,00*
01.03.05.2.01.10	*Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*	*Jumlah layanan operasional sistem pengelolaan air limbah yang terlaksana*	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*204.000.000,00*
1:03:07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**				**16.200.000.000,00**				**16.524.000.000,00**
		Persentase Infrastruktur Permukiman kondisi baik		**56,00**	**16.200.000.000,00**			**65,00**	**16.524.000.000,00**
01.03.07.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota**	***terselenggaranya insfatruktur pada pemukiman daerah***			**16.200.000.000,00**				**16.524.000.000,00**
01.03.07.2.01.01	*Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota*	*Panjang jalan setapak yang direhabilitasi dan dipelihara*	*Kab.Bangka*	*1 paket*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*306.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Sungailiat dan Pemali yang terbangun	*Lingk. Senang Hati Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Hos Cokroaminoto Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Gang. Kaka Tua RT.06 Parit Pekir Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Gang. Sedulur RT.04 Parit Pekir Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Nusantara RT.01 Parit Pekir Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Yos Sudarso RT.01 Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*

			Jalan samping SDN 06 RT.03 Lingkungan Nelayan II Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Sambu RT.01 Desa Karya Makmur Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Harapan RT.04 Desa Air Duren Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Melati-Lubuk Kelik Desa Air Duren Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Sumatera Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lapangan voli Desa Penyamun Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Desa Sempan Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Mendo Barat dan Merawang yang terbangun	*Jalan menuju kuburan Dusun III Desa Balunijuk di Kec. Merawang*	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan PPIP Dusun III Desa Balunijuk di Kec. Merawang	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan sport center Dusun III Desa Balunijuk di Kec. Merawang	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Mualaf Desa Balunijuk di Kec. Merawang	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Kelapa Hibrida Desa Merawang	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Tebing Tinggi Desa Riding Panjang	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*

			Jalan Dusun Limbung Desa Jada Bahrin	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan lingkungan Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan lingkungan Cengkong Abang di Kecamatan Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan lingkungan Kace Timur di Kecamatan Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan lingkungan Perumnas Timah Kace Timur di Kecamatan Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan Suka Makmur Desa Petaling di Kecamatan Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan Labuh Air Pandan di Kec. Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip yang terbangun	Jl. Komplek PGRI Kelurahan Kuto Panji di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	204.000.000,00
			Jl. Air Cempedak Kelurahan Kuto Panji di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Gg. Melati RT. 001 Lk. VIII Kelurahan Kuto Panji di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan Gang depan Masjid RT. 002 Lk. II Kelurahan Bukit Ketok di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan Gang SMP N 3 Belinyu RT. 001 Lk. IV Kelurahan Kuto Panji di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jl. Parit XI RT. 002 Lk. VI Kelurahan Bukit Ketok di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00
			Jalan SMKN 1 Belinyu RT. 001 LK. V Kelurahan Bukit Ketok di Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	204.000.000,00

			Jalan SD N 1 Belinyu Kelurahan Belinyu di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Kp. Parit 5 Bubus Kelurahan Romodong Indah di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan RT. 006 Kelurahan Romodong Indah di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan RT. 001 LK. I Kelurahan Mantung di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Tembus Jl. Pahlawan 12 Kelurahan Air Jukung di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Dusun Gedong Desa Lumut di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Dusun Lepang Desa Bintet di Kec. Belinyu	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan lingkungan Kantor Camat Riau Silip di Kec. Riau Silip	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan lingkungan Desa Riau di Kec. Riau Silip	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			jalan Gang Madrasah RT 12 Dusun Bukit Tebok di Kec. Riau Silip	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Puding Besar dan Bakam yang terbangun	*Jalan Lingkungan Lingkar Desa Mangka di Kec. Bakam*	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Lingkar Desa Bakam di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Lingkar Desa Neknang di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Lapangan Bola Desa Maras Senang di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Gang Desa Bukit Layang di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Balai Desa Mabat di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*

			Jalan Lingkungan Desa Mangka di Kec. Bakam	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Desa Nibung	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Kotawaringin	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang saluran permukiman yang direhabilitasi dan dipelihara	*Kab.Bangka*	*1 paket*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*306.000.000,00*
		Panjang saluran permukiman di Kecamatan Sungailiat dan Pemali yang terbangun	*Jl. Nusantara RT 01 Parit Pekir Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			JL. Tenggiri RT 03 Yos Sudarso Kec. Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Muntabak Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Tutut Kec. Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Mendo Barat dan Merawang yang terbangun	*Dusun III Desa Balunijuk Kec. Merawang*	1 Paket	200.000.000,00	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Jurung Kec. Merawang	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Air Anyir Kec. Merawang	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Air Dayung Desa Riding Panjang Kec. Merawang	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Limbung Desa Jada Bahrin Kec. Merawang	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Kimak Kec. Merawang	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Air Duren Kec. Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Penagan Kec. Mendo Barat	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip yang terbangun	*RT. 002 Lk. II, Lk. III Kelurahan Bukit Ketok Kec. Belinyu*	1 Paket	200.000.000,00	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*

			Kp. Parit 3 Bubus Kelurahan Romodong Indah Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			RT. 006 Kelurahan Air Asam Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			RT. 002 Lk. I Kelurahan Mantung Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jl. Cut Nyak Dien RT. 002 Lk. I Kelurahan Air Jukung Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan Kenangan Kelurahan Kutopanji Kec. Belinyu	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Jalan lingkungan Desa Riau Kec. Riau Silip	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Panjang jalan lingkungan permukiman di Kecamatan Puding Besar dan Bakam yang terbangun	*Desa Mangka Kec. Bakam*	1 Paket	200.000.000,00	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Kapuk Kec. Bakam	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa neknang Kec. Bakam	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Kotawaringin Kec. Puding Besar	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
			Desa Tanah Bawah Kec. Puding Besar	1 Paket	200.000.000,00			*1 Paket*	*204.000.000,00*
1:03:08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**1.065.000.000,00**				**1.086.300.000,00**
		Persentase Bangunan Layanan Publik dalam Kondisi Baik		**45,00**	**1.065.000.000,00**			**56,00**	**1.086.300.000,00**
1.03.09.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksana pengawasan bangunan Gedung**			**1.065.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**1.086.300.000,00**

1.03.09.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota*	*Jumlah layanan penyusunan Dokumen Perencanaan Tekhnis Sarana dan Prasarana Pemerintah Kab. Bangka yang tertangani*	*Kab Bangka*	*1 paket*	*900.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*918.000.000,00*
1.03.09.2.01.02	*Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan*	*Pengawasan Menara*	*Kab Bangka*	*1 paket*	*165.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*168.300.000,00*
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				**1.000.000.000,00**				**1.020.000.000,00**
		Persentase Bangunan Gedung Publik yang Tertata		**61,20**	**1.000.000.000,00**			**67,50**	**1.020.000.000,00**
1.03.08.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah IMB yang di keluarkan**			**1.000.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**1.020.000.000,00**
		Jumlah gedung kantor Kel. Bukit Ketok yang dibangun	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*1.020.000.000,00*
1:03:10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**63.471.670.000,00**				**169.668.291.760,00**
		Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap		**64,50**	**63.471.670.000,00**			**66,90**	**169.668.291.760,00**
1.03.10.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**		**63,72%**	**63.471.670.000,00**	**APBD**	**P1**		**169.668.291.760,00**
1.03.10.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan*	*Jumlah layanan penyusunan Dokumen Perencanaan Tekhnis Sarana dan Prasarana Pemerintah Kab. Bangka yang tertangani*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*309.000.000,00*
		Jumlah DED jalan dan jembatan yang disusun		*18 Dokumen*				*-*	
		Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan UPT Workshop dan Bidang Laboratorium Yang Tertangani	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*361.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*371.830.000,00*
1.03.10.2.01.02	*Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan*	*Jumlah dokumen appraisal pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Sungailiat - Pangkalpinang*	*Kab. Bangka*	*1 Paket*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*515.000.000,00*
		Pembebasan lahan jalan lingkar UBB		*1 Paket*	*1.800.000.000,00*				
1.03.10.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan*	*Jumlah bangunan pelengkap jalan (saluran) yang terbangun*	*Jalan Karang Panjang di Sungailiat*	*1 Paket*	*190.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*195.700.000,00*
			Jalan Kenangan - Tanjung Ratu di Sungailiat	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*202.910.000,00*
			Jalan di Kelurahan Surya Timur Sungailiat	*1 Paket*	*190.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*195.700.000,00*
			Jalan di Kelurahan Bukit Betung Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*

			Jalan Kelurahan Lubuk Kelik Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Matras Lama Bedeng Ake Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan di Rebo Lama Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Samratulangi Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan Lubuk Kelik Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Rebo Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan rawabangun Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan Pemuda Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan Kuday Utara Sungailiat	*0,50 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*0,00*
			Jalan di Kelurahan Sri Menanti Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Bintang Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan ST 12 Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Kenanga Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Dufan Sungailiat	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Galunggung Sungailiat	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*206.000.000,00*
			Jalan Jelutung Matras Sungailiat	*0,50 Km*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*206.000.000,00*
			Jalan Padat Karya Desa Rebo Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan menuju posyandu RT.02 Lingkungan Air Kenanga Permai Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*

			Jalan Sisingamangaraja RT.01 dan RT 0.4 Lingkungan Kuda Selatan Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Matras Lama Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Hakok Kelurahan Matras Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Desa Tanjung Ratu Sungailiat	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Desa Sempan Pemali	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*202.910.000,00*
			Dusun 1 Desa Sempan Pemali	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Dusun 2 Desa Sempan Pemali	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Dusun Sumbawa Pemali	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan S.Liat- Bakam Desa Penyamun Pemali	*1 Paket*	*3.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*3.090.000.000,00*
			Jalan Teuku Umar Pemali	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Jalan Sisingamangaraja Pemali	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*206.000.000,00*
			Jalan Depati Bahrin Desa Sempan Pemali	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*203.940.000,00*
			Desa Mendo	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Kesehatan Dusun II RT 005 Desa Kota Kapur Mendo Barat	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Desa Air Anyir Merawang	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan di Kecamatan Merawang	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*198.000.000,00*
			Jalan di Desa Pagarawan Merawang	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*

			Jalan di Desa Balun Ijuk Merawang	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*197.000.000,00*
			Jalan di Desa Jade Bahrain Merawang	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*197.000.000,00*
			Jalan di Desa Air Anyir Merawang	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*198.000.000,00*
			Dusun 004 Desa Kimak Merawang	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*197.000.000,00*
			Jalan Gg. Sinar Mulia Rt 001 Dusun 1 Balun Ijuk Merawang	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*197.000.000,00*
			jalan Air Tiung Dusun Limbung Merawang	*1 Paket*	*198.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*198.000.000,00*
			Jl. Pha Kak Liang-Kumpai Kelurahan Kutopanji Kel. Kuto Panji	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Batu Dinding Kel. Mantung	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Dusun Parit Kelapa Desa Lumut	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Dusun Kumpai Desa Riding Panjang	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Air Kacip Kel. Kuto Panji	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Air Cempedak Kel. Kuto Panji	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Sungai Bolo (Terusan Air Kacip ke Air Asam) Kel. Air Asam	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Desa Riding Panjang ke Kampung Jawa Kelurahan Belinyu Kel. Belinyu	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*

			Jalan Perkuburan Desa Pugul Riau Silip	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Di Desa Bukit Layang Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Desa Mabat Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Sungailiat Bakam Desa Bakam Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Desa Neknang Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Desa Kapuk Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan lingkar selatan desa bakam Bakam	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan RSUD Sjafrie Rachman Desa Puding Besar Puding Besar	*1 Paket*	*196.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*196.000.000,00*
			Jalan Gg. Manggis Desa Tanah Bawah Puding Besar	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Perkuburan Desa Tanah Bawah Puding Besar	*1 Paket*	*197.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*197.000.000,00*
			Jalan di Kecamatan Puding Besar Puding Besar	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Kampung Panjang Kotawaringin Puding Besar	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Pustu Desa Nibung Puding Besar	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			jalan Lingkar Desa Tanah Bawah Puding Besar	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Dusun 3 Desa Tanah Bawah Puding Besar	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*

			Jalan Kotawaringin Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
			Jalan Raya Sungai Dua Desa Kotawaringin Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
			Jalan Desa Puding Besar Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
			Jalan S.Liat- Bakam Desa Tutut	1 Paket	198.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	198.000.000,00
			Jalan S.Liat- Bakam Desa Mentabak	1 Paket	198.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	198.000.000,00
			Jalan S.impang Jadda	1 Paket	198.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	198.000.000,00
			Jalan Desa Air Anyir	1 Paket	198.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	198.000.000,00
			Jalan Laut Desa Penagan	1 Paket	198.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	198.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (saluran dan talud) yang terbangun	Jalan Cendrawasih Parit IV Sungailiat	0,50 Km	-	APBD	P1	2 Paket	0,00
			Mendo Barat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	200.000.000,00
			Jalan Air Duyung Dwi Makmur Merawang	1 Paket	200.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	200.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (saluran air/drainase kanan dan kiri) yang terbangun	Jalan Cendrawasih III di RT 02 & RT 03 Sungailiat	0,50 Km	-	APBD	P1	2 Paket	0,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (drainase) yang terbangun	RT 03 Jl. Kampung Baru Lingk. Limbang Jaya Sungailiat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (saluran/siring air dan jembatan (plat deuker)) yang terbangun	Mendo Barat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	150.000.000,00
			Mendo Barat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	200.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (plat deuker) yang terbangun	Jalan Simpang Air Duren Dusun 3 dan Dusun 4 Petaling Banjar Kec. Mendo Barat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	98.500.000,00
			Merawang	3m	-	APBD	P1	3m	-

			Jalan PMD, Adidas Menuju Padang Siput Kelurahan Air Jukung	1 paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (talud dan siring) yang terbangun	Jalan Perpat Permai Kelurahan Air Jukung Ke. Air Jukung	0,80 Km	200.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	206.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (Plat Duicker) yang terbangun	Plat Duicker Desa Air Anyir	1 Paket	150.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	150.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (Plat Duicker) yang terbangun	Plat Duicker Dusun I Desa Penangan	1 Paket	150.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	150.000.000,00
		Jumlah bangunan pelengkap jalan (siring) yang terbangun	Jalan Raya Kampung Simpang Tiga Kel. Bukit Ketok	1 paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
1.03.10.2.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan yang disusun	Sungailiat	1 dokumen	-	APBD	P1	1 dokumen	0,00
1.03.10.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun	Kelurahan Kuday Sungailiat	1 Paket	-	APBD	P1		0,00
			Jalan Holy dan Jalan Grace Uber Kelurahan Jelitik Sungailiat	1 Paket	-	APBD	P1		0,00
			Jalan Samping Kantor Lurah Sinar Baru Sungailiat	2,50 Km	-	APBD	P1		0,00
			Sinar Jaya Jelutung Sungailiat	0,800 Km	-	APBD	P1		0,00
			Dusun Rebo Sungailiat	2,50 Km	-	APBD	P1		0,00
			Jalan Cendana Dusun Rebo Sungailiat	2,50 Km	-	APBD	P1		0,00
			Kelurahan Kenanga Sungailiat	0,800 Km	200.000.000,00	APBD	P1		200.000.000,00
			Jalan Air Saba Lingkungan Kuday Utara (Sinar Jaya Jelutung)	0,800 Km	200.000.000,00	APBD	P1		200.000.000,00
			Jalan Bahagia Sungailiat	0,800 Km	200.000.000,00	APBD	P1		200.000.000,00
			Jalan Gaya Baru Sungailiat	0,800 Km	200.000.000,00	APBD	P1		200.000.000,00

			Kelurahan Surya Timur lingk. Limbung Jaya Rt. 02 Sungailiat	*0,800 Km*	-	*APBD*	*P1*		*0,00*
			Jalan Gang Yakub Parit Padang	*0,800 Km*	200.000.000	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Gang H. Nur	*0,800 Km*	200.000.000	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
			Jalan Gang Air Mangkuk	*0,800 Km*	200.000.000	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
		Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	*Jalan Suak Pelawan Mendo Barat*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan dari RT 5 menuju RT 6 Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Desa Kota Kapur Dusun 3 Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Siding Panjang Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Jalan Desa Kota Kapur - Batu Lesung	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Desa Kota KapurMendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
			Desa Petaling Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*150.000.000,00*
		Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang dibangun	*Jalan Tembus R. Boni - R. Sulan Jurung Merawang*	*0,6 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,6 Km*	-
			Jalan Madrasah Desa Riding Panjang Merawang	*1 Paket*	*638.826.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*638.826.000,00*
			Jalan Lingkar Selatan RT 004 Dusun III Balun Ijuk Merawang	*0,6 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,5 Km*	-
		Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	*Jalan Lingkar Pemukiman Penduduk Kel. Romodng Indah*	*0,8 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2,0 Km*	*192.332.800,00*
			Jalan Dari Pantai Menuju Dermaga Nelayan Kel. Romodng Indah	*0,50 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*120.208.000,00*

			Jalan Cangkum Desa Riding Panjang Belinyu	1 Paket	200.000.000,00	APBD	P1	200.000.000,00	200.000.000,00
			Kel. Mantung	0,50 Km	-	APBD	P1	0,50 Km	120.208.000,00
		Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	Riau Silip	1 Paket	200.000.000,00	APBD	P1	20 orang	204.000.000,00
		Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang dibangun	Jalan Baru JUP Desa Dalil Bakam	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
		Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	Puding Besar	2 Paket	-	APBD	P1	2 Paket	0,00
			Desa Kayu Besi Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
			Desa Labu Dusun 1,2,3 Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Kotawaringin - Buyan - Kelumbi Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
1.03.10.2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan di Kecamatan Sungailiat yang ditingkatkan	Jalan Lingkungan Sinar Baru Sungailiat	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	1.000.000.000,00
			Jalan Kelinci Simpalet Sungailiat	1 Paket	800.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	800.000.000,00
			Jalan lapangan bola parit padang Sungailiat	1 Paket	800.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	800.000.000,00
			Jalan Muria Kelurahan Bukit Betung Sungailiat	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	1.000.000.000,00
			Jalan Cendrawasih I SD Harapan Sungailiat	1 Paket	200.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	200.000.000,00
			Jalan Melati Kelurahan Lubuk Kelik Sungailiat	1 Paket	1.550.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	1.550.000.000,00
			Jalan Baru Kecamatan Sungailiat	1 Paket	750.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	750.000.000,00
			Jalan Sriemenanti IV, V Sungailiat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
			Jalan Lingkungan Tunas Kelapa Sungailiat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	0,00

			Jalan Lapangan Bola Lingkungan rambak Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Kelurahan Parit Pekir Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Camar Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Karang Panjang Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan SD Harapan Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Aneka Jalan Zoehri Rambak Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Dewi Kuan Yin Sungailiat	*1,00 Km*	*1.859.717.000,00*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*1.859.717.000,00*
			Jalan Uber Pesona Dalam Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Kp. Baru Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Indah Jaya Lingkungan Limbang Jaya Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Srimenanti dan Jalan H. Habibah Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Bukit Intan Kenanga dan Kenanga Indah Sungailiat	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Kimhin - Kp. Baru	*1,00 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Brunai Rt. 06 Dsn Rebo Sungailiat	*1,3 Km*	*3.120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1,3 Km*	*3.120.000.000,00*
			Jalan Bintang (Rt.003 Lingkungan Rambak dan RT.06 Lingkungan Jelitik) Sungailiat	*1 Km*	*2.400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1,3 Km*	*2.400.000.000,00*

			Jalan Gg. Merpati, Parit IV Kuday Sungailiat	*0,476 Km*	*1.142.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*0,476 Km*	*1.142.400.000,00*
			Jl. Nursalim Gg. Wisnu RT. 004, RT. 005 dan RT. 007 Lingk. Kampung Jawa Sungailiat	*0,8 Km*	*1.920.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*0,8 Km*	*1.920.000.000,00*
			Jl. Imam Banjol Gg. Krakatau Sungailiat	*0,45 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,45 Km*	-
			Jalan Menumbing Gg. Krakatau Lingk. Air Merapin RT 05 Kelurahan Parit Padang Sungailiat	*0,2 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,2 Km*	-
			RT 08 Sinar Jaya Jelutung Sungailiat	*1 Km*	*2.400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*2.400.000.000,00*
			Jalan Lingkungan Sri Pemandang Kelurahan Srimenanti Sungailiat	*0,2 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Bima I Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti Sungailiat	*0,2 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Sungailiat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*2.500.000.000,00*
			- Halaman. Gedung Sepintu Sedulang						
			- Halaman Kantor DPUPRP						
			- Halaman Kantor BLH						
			- Halaman Kantor KORAMIL						
			- Halaman Kantor Kapolres						
			- Halaman GOR Tb. 23						

			Jalan A.Yani gang Merak 1 lingkungan Samratulangi Kelurahan Srimenanti Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jl. Natuna RT 01 Lingk Lubuk Kelik Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			jalan di Rt. 03 Lingkungan Srimenanti Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Batu Merah Hakok Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Samping Kantor Camat Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Kubur Jelutung Kelurahan Jelutung - Sinar Jaya Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Sd Budi Utomo ke Simplet Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Samping Kuburan Cina Parit Tujuh Kelurahan Kudai Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Kulong Buaya Kelurahan Kudai Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Gg. Seribu Sungailiat	*0,4 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,4 Km*	-
			Jalan Gg. Sinar Baru Menuju Tutut Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Sambungan Kuburan Lubuk Kelik Sungailiat	*0,5 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,5 Km*	-
			Jalan Singa Yudha I Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Kel. Kuday Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*0,00*

			Jalan Harapan IV Kel Kenanga Sungailiat	*0.5 Km*	-	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Kel Sinar Baru Kec. Sungailiat	*5.32 Km*	-	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			jalan Bukit Aren kel. Bukit betung Sungailiat	*1 Km*	*1.356.672.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*1.397.372.160,00*
			Jalan Kampung Jawa Atas	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Jelutung	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Musholla Azzikro Kelurahan Lubuk Kelik	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Kel Sinar Jaya Jelutung Sungailiat	*3.5 Km*	-	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Desa Rebo Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			Jalan Bukit Kuala Kel. Matras Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*12 Paket*	*0,00*
			jalan Lubuk Kelik-Parit 10 Sungailiat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2 Km*	*3.500.000.000,00*
			Jalan Maria Goretti Sungailiat	*1,386 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*0,00*
			Jalan Komplek RSS (Pucuk Merah) Sungailiat	*1,000 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,386 Km*	*0,00*
			Jalan Diponegoro Sungailiat	*0,880 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,000 Km*	*0,00*
			Jalan Singayuda Sungailiat	*1,00 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,880 Km*	*0,00*
			Jalan Stiper-Bappeda Sungailiat	*0,276 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,00 Km*	*0,00*
			Jalan Pantai Batu Bedaun Sungailiat	*0,723 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,276 Km*	*0,00*
		Panjang Jalan di Kecamatan Pemali yang ditingkatkan	*Jalan Sumatra - Ktr. Camat Pemali*	*1,000 Km*	-	*APBD*	*P1*	-	*0,00*

			Jalan Perumnas BTN Pemali	1,00 Km	-	APBD	P1	1,000 Km	0,00
			Pemali	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD	P1	1,00 Km	1.000.000.000,00
			Jalan Enggano II - Jalan Enggano I Pemali						
			Jalan Enggano I - Jalan Bali Pemali						
			Jalan Desa Air Ruai Pemali	1 Paket	600.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	600.000.000,00
			Jalan Cengel - Bokor Pemali	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	1.000.000.000,00
			Jalan Bali Pemali	0,750 Km	-	APBD	P1	0,750 Km	0,00
			Jalan Bangka Pemali	1,300 Km	-	APBD	P1	1 Paket	0,00
			Jalan Sumatera Desa Air Ruai Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan seribu rt.001 Karya Makmur Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan RT04 sampai dengan RT 08 Desa Penyamun Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan RT Sinar Panca dari Simpang Sampai Lapangan Bola Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan lingkar RT 07, 05 sampai 06 Sempan Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan lingkar RT 01 - RT 03 Sempan Pemali	2 Km	-	APBD	P1	2 Km	-
			Jalan Arung Mentik Dusun Penyamun sampai Dusun Muntabak Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan PAM Desa Air Ruai Pemali	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-

			Jalan Karya Makmur	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	-	*0,00*
			Jalan Desa Tutut	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	-	*0,00*
			Jalan Gg. Sekolah Desa Mentabak	*1 Paket*	*800.000.000*	*APBD*	*P1*	-	*0,00*
		Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang ditingkatkan	*jalan SMK Negeri Mendo Barat RT 4 Dusun 3 Desa Petaling Banjar Mendo Barat*	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
			Jalan Madrasah, Jalan Desa, Jalan Arah SD 2 Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
			Jalan Samping Mesjid, dan jalan menuju Tua Tunu Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
			Jalan SMKN 1 Petaling Banjar Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
			Jalan Lingkar Desa Zed Kec. Mendo Barat	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
			jalan Kace Timur (Dusun 1 - 4) Mendo Barat	*2 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2 Km*	-
			Jalan Menuju Jembatan Kota Kapur - Labuh Air Pandan Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			jalan desa dari pesantren sampai desa air buluh Kace Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Lingkar Desa Zed (Dusun 1, 2, 3, 4) Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			jalan desa Paya Benua Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Mendo Barat	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Desa Cengkong Abang	*1 Paket*	*1.000.000.000*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.000.000.000,00*
			Jalan Palas			*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
			Jalan Air Karet			*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
			Jalan Air Alok			*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-

			Jalan Lingkar Desa Penangan	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	800.000.000,00
		Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang ditingkatkan	Jalan Kp. Sinli Jurung Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Bedasir Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Gambir - Jl. Masjid - Jl. Simpang 5 RT 07-09 Dusun V - VI Km 9 Desa Pagarawan Merawang	1,5 Km	-	APBD	P1	1,5 Km	-
			Jalan Lingkar Pantai Dusun Temberan, Dusun Mudel Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jl. Kamboja Dusun I - Dusun II Desa Pagarawan Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			l. Depan Poskesdes-SDN 2 Merawang Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Perkuburan RT 004 Dusun III Desa Balun Ijuk Merawang	0,2 Km	-	APBD	P1	0,2 Km	-
			Jalan PNPM Dusun I - Dusun III Desa Balun Ijuk Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Ledeng Tebing Tinggi Riding Panjang Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Dusun Batu Tunggal Riding Panjang Merawang	0,7 Km	-	APBD	P1	0,7 Km	-
			Jalan Lingkar Desa Kawasan Lapang Bola ke Jl. Said Desa Kimak Merawang	1 km	-	APBD	P1	1,5 Km	-
			Jalan Jurusan Kimak - Limbung Merawang	8 Km	-	APBD	P1	8 Km	-
			Jalan Desa Jada Bahrin Merawang	1 km	-	APBD	P1	1,5 Km	-
			Jalan Merawang 39 Desa Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jl. Damai Desa Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-

			Jalan Merawang Sinkai atas dan Bawah Desa Merawang Merawang	2 Km	-	APBD	P1	2 Km	-
			Jalan Samping Tepekong Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Pantai Pukan Air Anyir Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			Jalan Karet Merawang	1 Paket	700.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	700.000.000,00
			Gg. Puyuh s/d Gg. Tower Desa Balun Ijuk Merawang	1 Paket	700.000.000,00	APBD	P1	1 Paket	700.000.000,00
			Jalan Air Dayung	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Desa Pagarawan	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan SD 2 Dusun Km.9	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Desa Baturusa	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Batu Tunggal	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Pagrawan - Balunijuk	1 Paket	1.000.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Gang PNPM	1 Paket	800.000.000	APBD	P1	1 Paket	-
			Jalan Pondok Duren Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	-
			jalan Desa Pagarawan Merawang	1 Km	-	APBD	P1	1 Km	0,00
			jalan Desa Riding Panjang Merawang	3 Km	-	APBD	P1	3 Km	0,00
		Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang dibangun	jalan Desa Riding Panjang Belinyu	6 Km	-	APBD	P1	6 Km	0,00
			jalan Desa Gunung Muda Belinyu	3 Km	-	APBD	P1	3 Km	0,00
			Jalan Aspal Bantam Belinyu	2,50 Km	-	APBD	P1	2,50 Km	0,00

			Jalan Menuju TPA / PAUD Nurhasanah Belinyu	*1,0 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1,0 Km*	*0,00*
			Jalan Tanah Merah Jalan Sungai Wak Ba Belinyu	*2,0 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*2,0 Km*	*0,00*
			Jalan RT. 009 Dusun Mengkubung Belinyu	*5,0 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*5,0 Km*	*0,00*
			Jalan KD Belinyu	*0,60 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,60 Km*	*0,00*
			Jalan SMP 3 Sampai TPA Nur Padila Belinyu	*0,40 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,40 Km*	*0,00*
			Jalan Damai Sampai Dengan Jalan Bhakti Belinyu	*1 Paket*	*650.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*650.000.000,00*
			Jalan Cut Nyak Dien Belinyu	*1 Paket*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*700.000.000,00*
			Jalan Pahlawan 12 Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Masuk Lingkungan SMKN 1 Belinyu	*0,40 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*0,40 Km*	*0,00*
			Dusun Mula Karya RT. 007 Menuju Dusun Air Pon RT. 006 Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Harapan Damai Desa Gunung Muda Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Dusun Parit 14 & Dusun Air Baung Desa Pelawan Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Sincong Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Padang Labu Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Parit 19 Ke Dusun Air Baung Belinyu	*1 Km*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*-*
			Jalan Flamboyan	*1 Paket*	*700.000.000*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*-*
			Adidas	*1 Paket*	*700.000.000*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*-*
			Jalan SMP 5		*800.000.000*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*-*
			Desa Riding Panjang	*1 Paket*	*1.000.000.000*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*-*
			Jalan Umpai					*1 Paket*	*-*
			Bukit Tulang					*1 Paket*	*-*

			Bukit Mang Kadir					*1 Paket*	-
		Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang dibangun	*Jalan Lebak Desa Deniang Riau Silip*	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*0,00*
			Jalan Dharma Bakti Desa Deniang Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*0,00*
			Jalan Ke Arah Biio / Pelabuhan Nelayan Riau Silip	*1,0 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,0 Km*	*2.069.484.000,00*
			Jalan Komplek Kd Mentok Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Kantor Desa Cit Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Lebak Dusun Deniang Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Desa Dusun I Pangkalniur Riau Silip	*4 Km*	-	*APBD*	*P3*	*4 Km*	-
			Jalan Dusun Bedukang Riau Silip	*1,5 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,5 Km*	*2.069.484.000,00*
			Jalan Lingkar Deniang Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*
			Jalan Tepekong Desa Deniang Riau Silip	*0,50 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,50 Km*	*678.336.000,00*
			Jalan Gang - Gang Desa Riau Riau Silip	*2,0 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2,0 Km*	*678.336.000,00*
			Jalan Perkuburan Riau Silip	*0.100 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0.100 Km*	*135.667.200,00*
			Jalan SMAN 1 Riau Silip Riau Silip	*0,5 KM*	-	*APBD*	*P1*	*0,5 KM*	*5.152.308.000,00*
			Jalan Mushola Air Jek Riau Silip	*0,150 Km*	-	*APBD*	*P1*	*0,150 Km*	*310.422.600,00*
			Jalan Gang Lapangan Bola Riau Silip	*2,0 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2,0 Km*	*4.138.968.000,00*
			Jalan Lingkar Dusun Rambang Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-

			Jalan Pangkal Niur Lama Ke Desa Pangkal Niur Riau Silip	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan Tb. 23 Sp. Lumut Riau Silip	*1,5Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,5Km*	*4.138.968.000,00*
			Pugul - Rimba Beras	*1 Paket*	2.510.055.000	*APBD*	*P1*		
		Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang dibangun	*Jalan Desa Bukit Layang Kec. Bakam*	*3,521 Km*	-	*APBD*	*P1*	*3,521 Km*	*0,00*
			Jalan Madrasah Desa Dalil Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
			JalanLingkar Desa Neknang RT.03 dan RT.04 Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
			Jalan Lingkar Mabat Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
			Jalan Lingkar Desa Desa Mangka Bakam	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			JalanLingkar Utara Desa Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	*0,00*
			Gang Sidomulyo Desa Bukit Layang Bakam	*1,5 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1,5 Km*	-
			Jalan Dalam Desa Bakam Bakam	*1.500m*	-	*APBD*	*P1*	*1.500m*	*0,00*
			Jalan Rinjani Bukit Layang Bakam	*500 m*	-	*APBD*	*P1*	*500 m*	*0,00*
			Jalan Pasiran Bukit Layang Bakam	*380 m*	-	*APBD*	*P1*	*380 m*	*0,00*
			Jalan Air Upat Desa Kapuk Bakam	*400m*	-	*APBD*	*P1*	*400m*	*0,00*
			Jalan Lingkar Selatan Desa Dalil Bakam	*2 Km*	-	*APBD*	*P1*	*2 Km*	-
			Jalan Keluar Masuk SMAN1 Bakam Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
			Jalan ke Makam Kramat Jati Desa Tiang Tarah Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
			Jalan Lingkar Desa Kapuk Bakam	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
			Jalan Tiang Tara-Bayuasin Bakam	*830 m*	-	*APBD*	*P1*	*1.000m*	*0,00*

			Jalan Paket III Desa Tiang Tara Bakam	1 km	-	APBD	P1	1 km	-
			Rt 01 sampai Rt 07 Desa Mabat Bakam	1 km	-	APBD	P1	1 km	-
		Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang dibangun	Jalan Tembus Desa Kotawaringin - Desa Buyan Kelumbi Desa Kotawaringin Puding Besar	1.500 m	-	APBD	P1	1,5 Km	0,00
			Jalan Gang Harapan Maju Desa Kotawaringin Puding Besar	0,2 Km	-	APBD	P1	0,2 Km	0,00
			Jalan Lorong Tengah Desa Kotawaringin Puding Besar	0,45 Km	-	APBD	P1	0,45 Km	0,00
			Jalan Desa Kayu Besi Puding Besar	0,45 Km	-	APBD	P1	0,6 Km	0,00
			Jalan SD 06 Puding Besar	1 km	-	APBD	P1	1 km	0,00
			Jalan di Desa Puding Besar Puding Besar	1 km	-	APBD	P1	1 km	0,00
			Jalan Nibung Puding Besar	1 km	-	APBD	P1	1 km	0,00
			Jalan Dusun III Dusun II Saing Puding Besar	5,3 Km	-	APBD	P1	5,3 Km	-
			jalan menuju Sungai Upang Puding Besar	1 km	-	APBD	P1	1 km	-
		Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang ditingkatkan	Jalan Lingkar Tanah Bawah	1 Paket	800.000.000	APBD	P1		
			Jalan Desa Labu	1 Paket	800.000.000	APBD	P1		
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Sungailiat	5 km	-	APBD	P1	5 km	-
1.03.10.2.01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara secara berkala	Jalan Surya Timur Sungailiat	1 km	-	APBD	P1	1 km	-
		Panjang jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara secara berkala	Jalan Panji Pasir	1 km	-	APBD	P1	1 km	-
			Jalan terusan Panji Pasir dan Kompleks Perumnas Belinyu	1,150 km	-	APBD	P1	1,150 km	-
		Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara secara berkala	Merawang	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
		Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara secara berkala	Mendo Barat	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
		Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara secara berkala	Puding Besar	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-
		Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara secara berkala	Pemali	1 Paket	-	APBD	P1	1 Paket	-

		Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara secara berkala	*Jalan Rimba Barat Desa Neknang*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
1.03.10.2.01.11	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan*	*Panjang jalan dalam Kecamatan Sungailiat yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Km*	-	*APBD*	*P1*	*1 Km*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Belinyu yang dipelihara	*Belinyu*	*1 km*	-	*APBD*	*P1*	*1 km*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Riau Silip yang dipelihara	*Riau Silip*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Mendo Barat yang dipelihara	*Mendo Barat*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Merawang yang dipelihara	*Merawang*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Bakam yang dipelihara	*Bakam*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
		Panjang jalan dalam Kecamatan Puding Besar yang dipelihara	*Puding Besar*	*1 Paket*	-	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	-
1.03.10.2.01.12	*Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan*	*Panjang Jembatan di Kecamatan Belinyu yang dibangun*	*Air Asam*	*8 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
			Sungai Pejem Gunung Pelawan	*70 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*70 meter*	*15.050.000.000,00*
			Jembatan Perbatasan Dusun Parit 14 dan Dusun Air Baung Gunung Pelawan	*20 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*20 meter*	*4.300.000.000,00*
			Jembatan Air Bekam Bukit Ketok	*8 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
			Jembatan Penghubung Dusun Pejem Utara Dengan Desa Bintet Gunung Pelawan	*40 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*40 meter*	*8.600.000.000,00*
			Jembatan Beton Dusun Bintet Bintet	*30 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*30 meter*	*6.450.000.000,00*
			Jembatan Pantai Panjang Riding Panjang	*50 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*50 meter*	*10.750.000.000,00*
			Jembatan Permanen Bukit Mang Kadir Riding Panjang	*14 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*14 meter*	*3.010.000.000,00*
			Jembatan Pasir Putih Gunung Muda	*8 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
			Jembatan Kampung Reget Gunung Muda	*8 Meter*	-	*APBD*	*P1*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*

		Panjang jembatan di Kecamatan Mendo Barat yang dibangun	*jembatan penyebrangan antara Desa Labuh dan Desa Kota Kapur Mendo Barat*	*1 paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*35.000.000.000,00*
		Panjang jembatan di Kecamatan Merawang yang dibangun	*Jembatan jurung - Cengel*	*12 m*	*-*	*APBD*	*P1*	*12 m*	*-*
		Panjang jembatan di Kecamatan Sungailiat yang dibangun	*Sungailiat*	*2 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*2 Paket*	*-*
			Box Culvert Samratulangi Sungailiat	*w = 4 m*	*-*	*APBD*	*P1*	*w = 4 m*	*-*
		Panjang jembatan di Kecamatan Pemali yang dibangun	*Parit 7 DAM Pemali*	*w = 4 m*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*w = 4 m*	*1.500.000.000,00*
		Panjang jembatan di Kecamatan Bakam yang dibangun	*Jembatan Sungai Gadung Bakam*	15 Meter	*-*	*APBD*	*P1*	*15 Meter*	*-*
1.03.10.2.01.16	*Sub Kegiatan Penggantian Jembatan*	*Panjang jembatan yang diganti (plat deuker)*	*Desa Petaling Banjar*	*10x2.5 Meter dan 7x2 Meter*	*-*	*APBD*	*P1*	*10x2.5 Meter dan 7x2 Meter*	*0,00*
1.03.10.2.01.18	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan*	*Jumlah Jembatan yang direhabilitasi*	*Jembatan DAM 1 Pemali*	*1 Unit*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*-*
1.03.10.2.01.19	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan*	*Jumlah jembatan yang dipelihara*	*Kab Bangka*	*1 Paket*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*0,00*
1:03:11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**600.000.000,00**				**612.000.000,00**
		Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih		**60,00**	**600.000.000,00**			**65,00**	**612.000.000,00**
1.03.11.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	***Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih***		**100,00%**	**500.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**510.000.000,00**
1.03.11.2.01.04	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	*Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih*	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*510.000.000,00*
1.03.11.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya sistem informasi jasa konstruksi**			**100.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**102.000.000,00**
1.03.11.2.02.03	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI*	*Jumlah tenaga Administrator SIPJAKI yang terlatih*	*Kab. Bangka*	*20 orang*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 orang*	*102.000.000,00*
1:03:12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**2.500.250.000,00**				**2.550.255.000,00**
		Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)		**100,00**	**2.500.250.000,00**			**100,00**	**2.550.255.000,00**
1.03.12.2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten Bangka**	Kab.Bangka	**3 dokumen**	**424.000.000,00**	APBD	P1	**3 dokumen**	**432.480.000,00**

1.03.12.2.01.03	*Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang*	*Jumlah Kebijakan dalam Penataan Ruang (Dokumen)*	Kab.Bangka	*3 dokumen*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 dokumen*	*408.000.000,00*
1.03.12.2.01.04	*Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang*	*Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi*	Kab.Bangka	*100*	*24.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100*	*24.480.000,00*
1.03.12.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Perencanaan Ruang yang Tersusun sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-Undangan**	Kab.Bangka	**100%**	**850.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**867.000.000,00**
1.03.12.2.02.02	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten*	*Kab.Bangka*	*2 dokumen*	*850.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 dokumen*	*867.000.000,00*
1.03.12.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang**	Kab.Bangka	**7 hari**	**976.250.000,00**	APBD	P1	**7 hari**	**995.775.000,00**
1.03.12.2.03.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang*	*Kab.Bangka*	*2 dokumen*	*976.250.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 dokumen*	*995.775.000,00*
1.03.12.2.03.02	*Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang*	*Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang*	*Kab.Bangka*	*0*		*APBD*	*P1*	*0*	-
1.03.12.2.04	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten**	Kab.Bangka	**100%**	**250.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**255.000.000,00**
1.03.12.2.04.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang*	*Jumlah Laporan Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang*	*Kab.Bangka*	*0,00%*	-	*APBD*	*P1*	*.....*	-
1.03.12.2.04.04	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Ruang*	*Kab.Bangka*	*1 dokumen*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*.....*	*255.000.000,00*
1:03:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**15.099.094.100,00**				**6.720.168.400,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**88.362.000,00**				**97.198.200,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI							
		Persentase Hasil Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti							
1.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**88.362.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**97.198.200,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
		Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.03.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*41.056.000,00*			*.....Dokumen*	*45.161.600,00*

		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*2 dokumen*				*..... Dokumen*	
1.03.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*14 Dokumen*	*47.306.000,00*			*..... Dokumen*	*52.036.600,00*
		Jumlah laporan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*..... Dokumen*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**7.989.850.100,00**			**0%**	**8.788.835.110,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**7.989.850.100,00**			**100%**	**8.788.835.110,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*7.974.850.100,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*8.772.335.110,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**6.629.872.000,00**				**6.192.859.200,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.03.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**6.629.872.000,00**	**APBD**	**P1**		**6.192.859.200,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
1.03.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*728.220.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	801.042.000,00
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*Kab Bangka*	*12 Bulan*	*325.140.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	357.654.000,00
1.03.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*233.856.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	257.241.600,00
1.03.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*80.940.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	89.034.000,00
1.03.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*150.456.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	165.501.600,00

1.03.01.2.03.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	*Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*267.228.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	293.950.800,00
1.03.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*141.384.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	155.522.400,00
1.03.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*432.648.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	475.912.800,00
1.03.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional*	*Sungailiat*	*2 unit*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*		-
1.03.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah meja rapat*	*Sungailiat*	*10 unit*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	55.000.000,00
		Jumlah kursi rapat		*10 unit*	*15.000.000,00*			*1 paket*	16.500.000,00
		Jumlah Kulkas		*2 unit*	*4.000.000,00*				4.400.000,00
		Jumlah Lemari Arsip		*4 unit*	*21.000.000,00*				23.100.000,00
		Jumlah Printer A3		*5 unit*	*30.000.000,00*				33.000.000,00
		Jumlah Drone		*2 unit*	*250.000.000,00*			*1 paket*	275.000.000,00
1.03.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah Gedung yang direhab*	*Sungailiat*	*1 paket*	*2.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	2.750.000.000,00
		Luas lahan yang diaspal		*1 paket*	*200.000.000,00*			*1 paket*	220.000.000,00
		Luas taman dinas		*1 paket*	*200.000.000,00*			*1 paket*	220.000.000,00
		Indeks Profesionalisme Aparatur			**391.010.000,00**				**430.111.000,00**
1.03.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**		**391.010.000,00**	**APBD**	**P1**		**430.111.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu							
		Persentase aparatur yang berkinerja baik							
1.03.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	Sungailiat	*174 Stel*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
1.03.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*20 Stel*	*41.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*45.111.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 Stel*				*20 Stel*	
1.03.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*28 orang*	*350.000.000,00*	APBD	P1		*385.000.000,00*
		JUMLAH			**116.081.014.100,00**				**212.557.915.160,00**
PRIORITAS II									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1:03:02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**269.720.000.000,00**				**45.512.400.000,00**
		Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik		**65,00**	**269.720.000.000,00**			**66,00**	**45.512.400.000,00**
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		**58,72**				**60,50**	

1.03.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik**	**Kab. Bangka**		**262.000.000.000,00**	APBD Prov	P1		**37.638.000.000,00**
1.03.02.2.01.14	*Sub Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi*	*Pembangunan Kolam Retensi Semujur*	*Kec. Sungailiat*	*1 paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*1.530.000.000,00*
1.03.02.2.01.18	*Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya*	*- Penyusunan SID dan Pembangunan Fisik Pembangunan Talud, Jetty, Break Water Pelabuhan Jelitik*	*Kec. Sungailiat*	*3,0 KM'*	*80.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*81.600.000.000,00*
		- Penyusunan SID dan Pembangunan Fisik Sheet Pile, Talud Pengaman Pantai Muara Kualo	*Kec. Sungailiat*	*1,0 KM'*	*45.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*45.900.000.000,00*
		- Pembangunan SID dan Pembangunan Fisik Pengaman Pantai dan Pemecah Gelombang Pantai Pesaren Desa Bintet	*Kec. Belinyu*	*1,0 KM'*	*35.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*35.700.000.000,00*
		- Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Pulau Putri	*Kec. Belinyu*	*10,0 KM'*	*15.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*15.300.000.000,00*
		- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Tanjung Putat	*Kec. Belinyu*	*2,0 KM'*	*3.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*3.060.000.000,00*
		- Penyusunan SID dan Pembangunan Fisik Penanganan Abrasi di wilayah Pantai Air Anyir (Jembatan Emas)	*Kec. Merawang*	*1,0 KM'*	*35.000.000.000,00*	*APBN*	*P1*		*35.700.000.000,00*
1.03.02.2.01.34	*Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai*	*Jumlah tanggul sungai yang ditingkatkan*	*Sungailiat*						-
		- Peningkatan Drainase Primer Desa Kimak	*Kec. Merawang*	*1 Paket*	*2.500.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*2.550.000.000,00*
		- Peningkatan Drainase Primer Desa Pagarawan	*Kec. Merawang*	*1 Paket*	*2.000.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*2.040.000.000,00*
		- Peningkatan Drainase Primer Desa Riding Panjang	*Kec. Merawang*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*1.530.000.000,00*
		- Penataan dan Peninggian Jaringan Drainase Kawasan Pasar Inpres - Kp. Jawa - Parit Pekir - Rawa Bangun	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*5.000.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*5.100.000.000,00*
		- Peningkatan Drainase Primer Parit I - Air Hanyut	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*1.530.000.000,00*
		- Peningkatan Drainase Primer Aek Kembelen Desa Sempan	*Kec. Pemali*	*1 Paket*	*1.000.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*1.020.000.000,00*
		- Peningkatan Drainase Primer Jembatan Desa Kayu Besi	*Kec. Puding Besar*	*1 Paket*	*1.200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*1.224.000.000,00*
		- Pemasangan Talud Sungai Kusam (Jembatan Bandung)	*Kec. Belinyu*	*1 Paket*	*7.000.000.000,00*	*APBN*	*P2*		*7.140.000.000,00*
		- Penyusunan SID dan Penataan Kawasan Pengendalian Banjir dalam Kota Sungailiat	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*7.500.000.000,00*	*APBN*	*P2*		*7.650.000.000,00*
1.03.02.2.01.46	*Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai*	*- Pengerukan Kolam Retensi Kolong Pancing (TB.36) Gerasi*	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*1.530.000.000,00*
		- Pengerukan Alur Air Hanyut - Muara Nelayan	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*5.000.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*5.100.000.000,00*
		- Pengerukan Alur Muara Nelayan I di Kelurahan Sungailiat	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*1.200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*1.224.000.000,00*
		- Normalisasi Tanggul Kolam Retensi Air Ledeng Kuday	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*4.500.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*4.590.000.000,00*

		- Normalisasi Kolam Retensi Lingkungan Air Merapin - Jelitik	*Kec. Sungailiat*	*1 Paket*	*2.500.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*2.550.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Gg. Nias	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Air Pengabis	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Bukit Sekip	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Dusun Pohin	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer Aek Kembelen Desa Sempan	*Kec. Pemali*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Balunijuk	*Kec. Merawang*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kace Timur	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kace Barat	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Cengkong Abang	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Zed	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Kemuja	*Kec. Mendo Barat*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Air Kacip	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Bukit Ketok	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Gunung Muda	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Air Kp. Saber Kelurahan Bukit Ketok	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Desa Riding Panjang	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Air Jukung	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
		- Drainase Primer/Sungai Kelurahan Belinyu	*Kec. Belinyu*	*1 paket*	*200.000.000,00*	*APBD1*	*P2*		*204.000.000,00*
1.03.02.2.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**7.720.000.000,00**	APBD	P1		**7.874.400.000,00**
1.03.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Luas Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun*	*Kec. Mendo Barat*						*-*
		- Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kota Kapur		*1 paket*	7.720.000.000,00	APBN	P2		*7.874.400.000,00*
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**28.700.000.000,00**				**29.274.000.000,00**
		Cakupan Layanan Air Bersih		**55,00**	**28.700.000.000,00**			**65,00**	**29.274.000.000,00**

1.03.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik**		**350 SR**	**28.700.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**29.274.000.000,00**
1.03.03.2.01.04	*Sub Kegiatan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan*	*Jumlah SPAM yang terbangun*	*Desa Maras Senang di Kecamatan Bakam*		*8.000.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Dokumen*	*8.160.000.000,00*
			Dusun Cungfo Desa Bukit Layang di Kecamatan Bakam	*1 unit*	*6.000.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*6.120.000.000,00*
			Desa deniang di Kecamatan Riau Silip	*1 unit*	*5.000.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*5.100.000.000,00*
			Desa Gunung Muda di Kecamatan Riau Silip	*1 unit*	*8.500.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Dokumen*	*8.670.000.000,00*
1.03.03.2.01.06	*Sub Kegiatan Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan*	*Jumlah SPAM Perdesaan yang teroptimalisasi*	*Desa Kapuk di Kec. Bakam*	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*2 unit*	*204.000.000,00*
			Desa Tiang Tara di Kec. Bakam	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*204.000.000,00*
			Desa Kayu Besi di Kec. Puding Besar	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*204.000.000,00*
			Desa Kotawaringin Kec. Puding Besar	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*		*204.000.000,00*
			Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Dokumen*	*204.000.000,00*
			SPAM Desa Riau Silip di Kec. Riau Silip	*1 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*2 unit*	*204.000.000,00*
1:03:10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**333.155.570.795,00**				**311.867.017.195,00**
		Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap		**64,50**	**333.155.570.795,00**			**66,90**	**311.867.017.195,00**
1.03.10.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**		**75,64%**	**333.155.570.795,00**	**APBD**	**P1**		**311.867.017.195,00**
1.03.10.2.01.08	*Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan*	*Peningkatan Jalan Kabupaten di Kec. Pemali*	*Pemali*		*7.517.238.600,00*	*DAK*	*P2*	*0*	*7.517.238.600,00*
		Jalan Panjang		*0,549 Km*				*0,549 Km*	*0,00*
		Jalan Teritis		*1 Km*				*1 Km*	*0,00*
		Peningkatan Jalan Air Duren - Melati - Lubuk Kelik di Kec. Pemali	*Pemali*	*4 Km*	*7.530.165.000,00*	*DAK*	*P2*	*4 Km*	*7.530.165.000,00*
		Peningkatan Jalan Jurusan Parit VII - PDAM di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*1,5 Km*	*3.970.372.500,00*	*DAK*	*P2*	*1,5 Km*	*3.970.372.500,00*
		Peningkatan Jalan Pasar Kenanga - Kp. Madura - Lubuk Kelik di Kecamatan Sungailiat	*sungailiat*	*3,362 km*	*6.375.539.700,00*	*DAK*	*P2*	*3,362 km*	*6.375.539.700,00*
		Peningkatan Jalan Jurusan Pasar Kenanga - Lubuk Kelik di Kecamatan Sungailiat	*Sungailiat*	*1,67 Km*	*4.191.791.850,00*	*DAK*	*P2*	*1,67 Km*	*4.191.791.850,00*
		Peningkatan Jalan Kabupaten di Kec. Sungailiat	*Sungailiat*		*6.609.346.755,00*	*DAK*	*P2*	*0*	*6.609.346.755,00*
		- Jalan Muhidin		*0,483 Km*				*0,483 Km*	*0,00*
		- Jalan Sidodadi 1		*0,124 Km*				*0,124 Km*	*0,00*
		- Jalan Maria Goretti		*0,674 Km*				*0,674 Km*	*0,00*
		- Jalan Pantai Batu Bedaun		*0,723 Km*				*0,723 Km*	*0,00*
		- Jalan Baru - Lubuk Kelik		*0,493 Km*				*0,493 Km*	*0,00*

Peningkatan Jalan TB. 23 - Kimhin di Kecamatan Sungailiat	*sungailiat*	*3,872 Km*	*10.248.854.880,00*	*DAK*	*P2*	*3,872 Km*	*10.248.854.880,00*
Peningkatan Jalan Kenanga - TPA di Kecamatan Sungailiat	*sungailiat*	*3,5 Km*	*9.264.202.500,00*	*DAK*	*P2*	*3,5 Km*	*9.264.202.500,00*
Peningkatan Jalan Dalam Kota Sungailiat (Jalan Muhidin - Jalan S.Parman - Jalan Depati Amir)	*sungailiat*	*1,85 Km*	*3.500.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*1,85 Km*	*3.500.000.000,00*
Peningkatan Jalan Depati Amir Rambutan, Jeruk Kecamatan Sungailiat	*sungailiat*	*0,5 Km*	*2.000.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*0,5 Km*	*2.000.000.000,00*
Peningkatan Jalan Baru Lingk. Bukit Betung	*sungailiat*	*0,48 Km*	*1.100.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*0,48 Km*	*1.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Bata Merah I, II,III di Kecamatan Sungailiat	*sungailiat*	*0,5 Km*	*1.100.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*0,5 Km*	*1.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Sungailiat - Pangkal Pinang	*sungailiat*	*1 Paket*	*10.000.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*1 Paket*	*10.000.000.000,00*
Peningkatan Jalan Jurusan Koramil Merawang di Kec. Merawang	*Merawang*	*1,28 km*	*3.212.870.400,00*	*DAK*	*P2*	*1,28 km*	*3.212.870.400,00*
Peningkatan Jalan Jurusan Balun Ijuk - Jade Limbung di Kec. Merawang	*Balun ijuk*	*9,825 km*	*6.754.179.250,00*	*DAK*	*P2*	*9,825 km*	*6.754.179.250,00*
Peningkatan Jalan Jurung - Cengel di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*4,6 Km*	*12.175.809.000,00*	*DAK*	*P2*	*1,3 Km*	*12.175.809.000,00*
Peningkatan Jalan Penegang - Petaling di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*7,75 Km*	*6.194.916.000,00*	*DAK*	*P2*	*1,3 Km*	*6.194.916.000,00*
Peningkatan Jalan Alhayati Kace di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*1,278 Km*	*3.382.757.370,00*	*DAK*	*P2*	*0,476 Km*	*3.382.757.370,00*
Peningkatan Jalan Air Duren - Tua Tunu di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*3,5 Km*	*9.264.202.500,00*	*DAK*	*P2*	*0,8 Km*	*9.264.202.500,00*
Peningkatan Jalan Jurusan Air Duren - Kemuja Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*3,63 Km*	*9.608.301.450,00*	*DAK*	*P2*	*3,63 Km*	*9.608.301.450,00*
Peningkatan Jalan Pon Pasir Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*1 Km*	*1.300.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*1 Km*	*1.300.000.000,00*
Peningkatan Jalan Kumpai- Telang Riding Panjang di Kec. Belinyu	*Riding Panjang*	*3,5 Km*	*8.785.192.500,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*8.785.192.500,00*
Peningkatan Ruas Jalan PMD - Sekip di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*1,25 Km*	*3.308.643.750,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*3.308.643.750,00*
Peningkatan Jalan Dalam Kota Belinyu (Paket I)	*Belinyu*		*8.441.011.935,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*8.441.011.935,00*
- Jalan Sekip - Perkuburan		*0,7 Km*				*1 Paket*	
- Jalan Sekip - Bukit Tani		*2,489 Km*					
Peningkatan Jalan Dalam Kota Belinyu (Paket II)	*Belinyu*		*3.048.553.600,00*	*DAK*	*P2*	-	*0,00*
- Jalan Panji Pasir		*1,6 Km*					
Peningkatan Jalan Jurusan Kumpai - Bukit Tambun Tulang di Kecamatan Belinyu	*belinyu*	*7,6 km*	*18.240.000.000,00*	*DAK*	*P2*		
Peningkatan Jalan PMD - Teluk Kelabat di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*4 Km*	*10.587.660.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*10.587.660.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Kota Belinyu	*Belinyu*	*2 Km*	*3.000.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*1 Km*	*3.000.000.000,00*

		Peningkatan Jalan Sp. Tanjung Antu - Kuala Mapur di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*7,15 km*	*18.925.442.250,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*18.925.442.250,00*
		Peningkatan Ruas Jalan Puntik-Mapur di Kec. Riau Silip	*Mapur*	*2 km*	*5.293.830.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*5.293.830.000,00*
		Peningkatan Jalan Jurusan Air Jek-Pasar Silip di Kec. Riau Silip	*Riau*	*0,876 km*	*2.318.697.540,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*2.318.697.540,00*
		Peningkatan Ruas Jalan Pugul- Rimba Beras di Kec. Riau Silip	*Pugul*	*7,425 km*	*19.653.343.875,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*19.653.343.875,00*
		Peningkatan Jalan TB.17 - TB.23 di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*6,488 Km*	*17.173.184.520,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*17.173.184.520,00*
		Peningkatan Jalan Jalan Sp. Sinkai - Sp. Lumut di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*3,5 Km*	*9.264.202.500,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*9.264.202.500,00*
		Peningkatan Jalan Tuing Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*1,8 Km*	*2.500.000.000,00*	*DABA Provinsi*	*P2*	*1 Km*	*2.500.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Tiang Tara- Banyu Asin di Kec. Bakam	*Bakam*	*9,35 km*	*24.748.655.250,00*	*DAK*	*P2*	*9,35 km*	*24.748.655.250,00*
		Peningkatan Jalan Lingkar Tanah Bawah di Kecamatan Puding Besar	*Tanah Bawah*	*2,65 Km*	*7.014.324.750,00*	*DAK*	*P2*	*1 Km*	*7.014.324.750,00*
		Peningkatan Jalan Lingkar RS M. Syafri Rahman	*Puding Besar*	*2 Km*	*3.500.000.000,00*	*DABA Provinsi*	*P2*	*2 Km*	*3.500.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Dalam Desa Saing	*Saing*	*1,5 Km*	*1.500.000.000,00*	*DABA Provinsi*	*P2*	*1 Km*	*1.500.000.000,00*
1.03.10.2.01.09	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan*	*1234-Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Sungailiat - Bakam di Kec. Pemali dan Kec. Bakam*	*Pemali - Bakam*	*12,293 Km*	*17.656.558.830,00*	*DAK*	*P2*	*5 km*	*17.656.558.830,00*
		Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Sungailiat - Bakam di Kec. Pemali dan Kec. Bakam	*Pemali - Bakam*	*3 Km*	*4.000.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*1 km*	*4.000.000.000,00*
		1235-Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Batu Tunu - Air Asem di Kec. Belinyu	*Air Asam*	*3,7 km*	*2.290.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*3,7 km*	*2.290.000.000,00*
		12345-Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Menduk - Air Pandan di Kec. Mendo Barat	*Mendo Barat*	*3,254 Km*	*4.673.752.740,00*	*DAK*	*P2*	*3,254 Km*	*4.673.752.740,00*
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Jurung - Sempan	*Kecamatan Merawang*	*7,173 Km*	*8.431.969.000,00*	*DAK*	*P2*	*7,173 Km*	*8.431.969.000,00*
1.03.10.2.01.12	*Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan*	*Pembangunan Jembatan Air Mapur*	*Mapur*	*20 Meter*	*3.500.000.000,00*	*DABA Propinsi*	*P2*	*20 Meter*	*3.500.000.000,00*
JUMLAH					**631.575.570.795,00**				**386.653.417.195,00**
PRIORITAS III									
1:03:10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**2.385.170.919.028,00**				**2.497.741.428.204,00**
		Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap		**64,50**	**2.385.170.919.028,00**			**66,90**	**2.497.741.428.204,00**
1.03.10.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**		**75,64%**	**2.385.170.919.028,00**	**APBD**			**2.497.741.428.204,00**
1.03.10.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan*	*Jumlah bangunan pelengkap jalan (saluran) yang terbangun*							
		Pembangunan Plat Duikers Lingk.Sinar Baru Timur RT.02	*Sungailiat*	*3 M x 4 M*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 M x 4 M*	*107.120.000,00*
		Pembangunan Plat Duikers Lingk.Kinhin RT.02	*Sungailiat*	*4 M x 7 M*	*123.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 M x 7 M*	*126.690.000,00*

Pembangunan Plat Duikers RT. 001Lingkungan Hakok (Kolong Bijur)	*Sungailiat*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*107.120.000,00*
Pembangunan Plat Duikers RT 003 Lingkungan Bukit Kuala	*Sungailiat*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*107.120.000,00*
Pembangunan Plat Duikers RT. 005, RT. 007 Lingk. Kampung Jawa	*Sungailiat*	*2m*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2m*	*70.040.000,00*
Pembangunan Plat Duikers Jl. Cendrawasih III depan Mesjid RT. 003 dan RT. 002	*Sungailiat*	*2m*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2m*	*70.040.000,00*
Pembangunan Plat Duikers Jl. Rawasari Rt.07	*Sungailiat*	*2m*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2m*	*70.040.000,00*
Pelebaran Jembatan/Plat Deker RT 01 dan RT 02 Lingkungan Air Kantung	*Sungailiat*	*2m*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2m*	*70.040.000,00*
Pembuatan Plat Deker Jln Raya RT.05 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*2 x 8 M*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 x 8 M*	*70.040.000,00*
Pembuatan Plat Deker Jalan Gang Damai 1 Rt. 01 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*4 x 7 M*	*123.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 x 7 M*	*126.690.000,00*
Pembuatan Plat Deker Jalan Air Merawang Rt.03 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*107.120.000,00*
Pembuatan Plat Deker + Siring Rt.03 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*107.120.000,00*
Pembuatan Plat Deker Jalan Padang Rt. 02 Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*4 x 7 M*	*123.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 x 7 M*	*126.690.000,00*
Panjang Plaat Duikers Aliran Sungai Deniang RT 06 Dusun Deniang	*Riau Silip*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Pembangunan Jembatan pangkalniur lama - tiang tara Desa Banyuasin	*Riau Silip*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Pembangunan Box Cluiver Jalan Lapang Bola Dusun Rambang	*Riau Silip*	*4X2 Meter*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4X2 Meter*	*309.000.000,00*
Pembangunan Plat Duieker RT 02 Dusun Riau	*Riau Silip*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Pembuatan Plat Deucker Jalan Len s/d Lintas Timur Dusun Cit	*Riau Silip*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Plat Deucker jalan Gang Pasir Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Plat Deucker Pekul Suka Damai II Dusun Deniang	*Riau Silip*	*3 M*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 M*	*107.120.000,00*
Jembatan Plat Dumker 2 x 6 M RT. 03 Kuyang Kel. Bukit Ketok	*Belinyu*	*2m*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2m*	*70.040.000,00*
Pembangunan Plat Decker Jalan Bakti Lk. III	*Belinyu*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Pembangunan Plat Decker Masjid Lepang Dusun Lepang	*Belinyu*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Pemasangan Gorong-gorong Dusun Bukit Beting	*Belinyu*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Meter*	*107.120.000,00*
Panjang Plaat Duikers Dusun Temberan Depan TPA Baitul Islam Desa Air Anyir	*Merawang*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*107.120.000,00*
Pembangunan plat deuker jl. SMKN 1 Petaling Banjar (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*2 M*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 M*	*70.040.000,00*

Pembangunan Plat Duicker Sawah I Desa Labu	*Puding Besar*	*1 Meter*	*43.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Meter*	*44.290.000,00*
Pembangunan plat Penyeberangan 4 Unit Sawah II Desa Labu	*Puding Besar*	*4m*	*123.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4m*	*126.690.000,00*
PEMBANGUNAN SIRING /DRAINASE RT.002,003,004,006 JELITIK	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*408.910.000,00*
RT.01 Lingk.Surya Timur (depan bengkel)	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*613.365.000,00*
RT.03 Lingk.Surya Timur	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*408.910.000,00*
RT.03 Jl.Kampung Baru Lingk.Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*204.455.000,00*
RT.01 Jl.RA.Kartini Limbang Jaya	*Sungailiat*	*3 Km*	*1.191.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*1.226.730.000,00*
RT.01 Jl.RA.Kartini Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*613.365.000,00*
RT.02 Jl.Indah Jaya (dari rumah Ho Joni s/d Ho Kim Fong) Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,8 Km*	*327.128.000,00*
RT.02 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*408.910.000,00*
RT.03 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,5km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
RT.04 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
RT.05 Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
RT.06 Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT.01 Jl.Tb.23-s/d kolong tunas kelapa	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT.01 Jl.Tb.23-s/d kolong tunas kelapa	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT.02 Gg.Kelapa Tunas Kelapa	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT.03 Tunas Kelapa	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT.03 Tunas Kelapa	*Sungailiat*	*2 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jalan Samping Kelenteng RT.02 Lingk.Kinhin Sinar Baru	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*158.800.000,00*
Jalan Lintas Selatan Sinar Baru	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*992.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*992.500.000,00*
Lingk.Sinar Baru Gang Kelapa RT.02 Sinar Baru	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*158.800.000,00*
Samping Rumah Jumaini RT.05 Sinar Baru	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jalan RT.06-RT.08 Sinar Baru	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jalan Rumah Suryanto s.d. Dani A Idris Lingk.Sinar Baru RT.06 Sinar Baru	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jalan Raya Lingk.Sinar Baru RT.01	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jalan Raya Lingk.Sinar Baru RT.06	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*317.600.000,00*
Jalan Raya Lingk.Kinhin RT.01	*Sungailiat*	*0,5km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
Jalan Raya Lingk.Kinhin RT.02	*Sungailiat*	*0,9 Km*	*357.300.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*357.300.000,00*
RT 001, RT 003, RT 004, RT 006 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*317.600.000,00*
Jalan Raya RT. 003 Lingkungan Jalan Laut	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Jalan Kelenteng RT. 001 (Kiri dan Kanan Jalan) Kelurahan Matras	*Sungailiat*	*1,2 Km*	*476.400.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*

Jalan Lestari Lingkungan Bukit Kuala	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Jalan Raya Lingkungan Bukit Kuala	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Pembangunan Siring (Bandar) Jalan Raya Hakok RT. 001, RT. 002, RT. 003 Lingkungan Hakok	*Sungailiat*	*1,8 Km*	*714.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Pengaspalan dan Pembuatan siring jalan perkuburan Lingk Jelutung RT 006	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Pembangunan Boxxculvert Ruas Jl. Cendrawasi Parit IV Lingkungan Parit I	*Sungailiat*		*714.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Pembangunan Siring dan Plat Dekker jalan Sahim RT. 002 Lingkungan Jalan Laut	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
Jl. Cendrawasih II, III dan IV (RT. 002 dan RT. 003)	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
Jl. Depati Amir RT. 004 Lingk. Srimenanti (Drainase Besar/Irigasi)	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
Jl. Merak I tembus ke bandar besar RT. 003 Lingkungan Samratulangi	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*277.900.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*277.900.000,00*
- RT.09 Sripemandang	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
RT.08 Perumnas Pemda, RT. 09 Perumnas Pemda, RT.07 Perumnas Pemda, Rt. 11 Perumnas Pemda, Rt. 07 Perumnas Pemda RT.10 Bukit Betung, RT.05 Perumnas Pemda, RT.07 Komplek Pemda, RT.02 Bukit Betung, RT.04 Bukit Betung, RT.06 Bukit Betung, RT.05 Bukit Betung, RT.01 Bukit Betung	*Sungailiat*	*3,72 Km*	*1.476.840.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.476.840.000,00*
RT 01 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
RT 02 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT 03 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
RT 06 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*317.600.000,00*
RT. 01, 04, 05, Jl. Batin Tikal	*Sungailiat*	*0,6km*	*238.200.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*238.200.000,00*
RT 03 dan RT 06 Kelurahan Sungailiat	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Paket*	*408.910.000,00*
Rt. 02, Rt.06 Kelurahan Sungailiat	*Sungailiat*	*0,375 Km*	*148.875.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
Jl. Muhidin (depan wartel anggrek)	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*397.000.000,00*
Jl. Cendrawasih Rt.06	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Paket*	*204.455.000,00*
Gang Elang Rt.06	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*204.455.000,00*
Gang Kakak Tua Rt.06	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*150.000.000,00*
Jl. Camar Rt.08	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*200.000.000,00*
RT 08 Kelurahan Sungailiat	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*98.500.000,00*
Jl. Maria Goretti RT 02	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*3m*	*198.500.000,00*
RT 01 s.d RT 04 Kelurahan Sungailiat	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*198.500.000,00*
Jl. Yos Sudarso RT.01	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*327.128.000,00*
Jl. Timah Raya RT.02	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*277.900.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*277.900.000,00*
JL. Tenggiri RT 03	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Rt. 01 Dsn. Tj. Ratu	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jalan RT.04 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Jalan RT.04 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*

Pembuatan Siring Jalan RT.05 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Gang Bedeng RT.06 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Raya Dsn Tj. Ratu	*Sungailiat*	*4 Km*	*1.588.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.588.000.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Rt.02 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Air Merawang Rt.03 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*595.500.000,00*
Pembuatan Siring Jl Kp. Seru RT. 04 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*4,4 Km*	*1.746.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.746.800.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Kr Panjang Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Pemasangan talud RT 13 Parit padang	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pemasangan talud di Kelurahan Sinar Baru	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan /Pengalian Bandar Jl.Umum Gg. Dieng I Air Merapin	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
pembuatan renase / siring RT.01, 03, 04, 05 dan 06 Lubuk kelik	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jl. Lingkar Barat	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jl. Lingkar Barat RT 01 Kenanga	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring Jl. Karang Panjang RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,26 Km*	*103.220.000,00*	*APBD*	*P3*		*103.220.000,00*
Pembuatan siring Jl. Masjid RT 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*238.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*238.200.000,00*
Pembuatan Siring Jl. Lingkar Barat RT 06 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembuatan Talut Jl. Lingkar Barat RT 06 Kenanga	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembuatan Siring Jl. Lingkar Barat RT 04 Kenanga	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*238.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*238.200.000,00*
Pembuatan Siring jalan menuju Posyandu RT. 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,2 Km*	*79.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*79.400.000,00*
Pembuatan siring di Jl. Kenanga Permai Atas RT. 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,2 Km*	*79.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*79.400.000,00*
Pembuatan siring Jl. Raden Wijaya RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan siring Jl. Harapan I Lingk. Air Kenanga RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan siring Jl. Harapan I Lingk. Air Kenanga RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembangunan saluran drainase Jl. Harapan I Lingk. Air Kenanga (dari rumah Feng Muk Fo s/d Kelekak Bunda) RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*

Pembangunan saluran drainase Jl. Harapan I Lingk. Air Kenanga (di samping rumah Bpk. Karyono s/d rumah Ivan Lai) RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembangunan salauran drainase Jl. Harapan I (Samping Rumah Efendi dan Rumah Fen Kian) RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembangunan salauran drainase Jl. Harapan I (Samping Rumah Fen Hau) RT. 03 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembangunan siring Jl. Harapan II Lingk. Air Kenanga RT. 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembangunan Drainase Jalan Bukit Ubi RT. 01 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Pembangunan Siring jalan Jl. Lingk. Kampung Pasir	*Sungailiat*	*1km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
siring jalan jl. Kijang, jl. Sisingamangaraja, rt 04, kuday selatan	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
siring jalan jl. Angsa II, jl. Sisingamangaraja,	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Siring Jalan Samratulangi (Rm Raja Laut	*Sungailiat*	*0,5 km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
RT 01 Lingk. A. yani dan Perumahan Areta	*Sungailiat*	*0,15 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Sungailiat	*Sungailiat*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
lanjutan Pembuatan Pemasangan Siring Jalan Pugul Ke Rimba Beras Dusun Pugul	*Riau Silip*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Lanjutan Siring Jalan BatamDusun Simpang Mapur	*Riau Silip*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Siring Tembus Jalan Bubung 7 Ke Pugul Dusun Bubung 8	*Riau Silip*	*1 km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring depan SDN 10 Mapur Melintang	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembangunan Saluran Banyuasin Jl. Raya Mentok	*Riau Silip*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Pembangunan Sering Batu Gunung Dusun I (RT. 01,02, 03, 07)	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembangunan Sering Batu Gunung Dusun II (RT. 09, 10, 12)	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pemasangan Sering jalan + Talut Tanah Puru Gang Serpak Dusun Cit	*Riau Silip*	*1km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Sering Pasangan Jalan Pemakaman Abadi Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Sering Aliran Air Arung Tedung Depan Rumah Ucok Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,5km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembangunan Sering Jalan di Tiang Pulut Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*

Pengadaan Sering Batako SPMN 4 Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pengadaan Sering Jalan Desa Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Sering Jalan dari Rumah Udin Sampai jalan kuburan Celepan Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jalan Benteng Kuto Panji dan Jalan Baru Dalam Gang Dinamo Lingkungan III	*Belinyu*	*0,65 Km*	*258.050.000,00*	*APBD*	*P3*		*258.050.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jalan Kenangan RT. 01 Lingkungan IV	*Belinyu*	*0,65 Km*	*258.050.000,00*	*APBD*	*P3*		*258.050.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jalan Panji Pasir, Jalan Kusam dan jalan Panji Pasir sampai Jalan Kusam RT. 01, RT. 02 Lingkungan VI	*Belinyu*	*1,35 Km*	*535.950.000,00*	*APBD*	*P3*		*535.950.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jalan Air Kacip RT. 01 Lingkungan VII	*Belinyu*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jalan Akasia I ke Air Kacip dan Jalan Belakang Komplek Perumnas RT. 01, RT. 02 Lingkungan VII	*Belinyu*	*0,46 Km*	*182.620.000,00*	*APBD*	*P3*		*182.620.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Kapten Tendean dan Jalan Trem Lama RT. 01, RT. 02 Lingkungan VIII	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jl. Panji Pasir dan Jalan Panji Pasir sampai Gang Akhiauw Lingkungan V	*Belinyu*	*0,75 Km*	*297.750.000,00*	*APBD*	*P3*		*297.750.000,00*
Drainase Jalan Akasia II ke Jalan Air Kacip RT. 01 Lingkungan VII	*Belinyu*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Gang Mahrup dan Jalan Aliran Sungai depan SMK N 1 RT. 01 Lingkungan IV dan Lingkungan V	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring aliran sungai depan SMK N 1 Lingkungan V	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring berpasangan Jalan Bukit Dempo Lingkungan IV, Jalan Tikungan Bukit Dempo Lingkungan IV, RT. 01 Lingkungan VI	*Belinyu*	*1,35 Km*	*535.950.000,00*	*APBD*	*P3*		*535.950.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Lingkungan V	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Raya Kampung Simpang Tiga Lingkungan VI	*Belinyu*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*595.500.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Jl. Muhidin Lk. I, Jl. Suraiman Lk. II, Jl. Singayudha, Kp. Sekip Lk. III, Jl. Bukit Tani Lk. IV, Jl. H. Agus Salim, Jl. Sumur Laut dan Jl. Kenanga Lk. V, Jl. Damai-Gang Binjai Lk. VI, Jl. Budiman, Jl. Bahari, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kp. Gudang, Jl. Berok Lk. VII	*Belinyu*	*6 Km*	*2.382.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.382.000.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Kl. Letnan Ismail Lk. I, Jl. Bhakti Lk. III, Jl. Cokroaminoto dan Jl. H. Agus Salim Lk. V	*Belinyu*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*

Pembangunan Siring/Drainase Stasiun 2	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring Pasangan Jalan Lingkar Pemukiman Penduduk Parit III dan Parit V	*Belinyu*	*3,5 Km*	*1.389.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.389.500.000,00*
Pembangunan Siring Jalan Lapangan Bola Jalan Remodong	*Belinyu*	*1km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring Jalan utama RT. 01 s/d RT. 06, Jalan Sungai Buluh, Jalan Gang RT. 04, Jalan Pesantren, Jalan Kenangan	*Belinyu*	*7 Km*	*2.779.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.779.000.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Pulau Punai dan Jalan Simpang Kapitan RT. 001 dan RT. 002 Lingkungan I	*Belinyu*	*0,55 Km*	*218.350.000,00*	*APBD*	*P3*		*218.350.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Batu Dinding RT. 003 Lingkungan I	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Jalan Kantor Kelurahan Mantung dan Jalan Simping Kp. Kapitan Lingkungan I dan RT. 006 Lingkungan II	*Belinyu*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembuatan Siring RT. 009, RT. 011, RT. 012 Lingkungan III dan RT. 005 Lingkungan I Mantung	*Belinyu*	*1,15 Km*	*456.550.000,00*	*APBD*	*P3*		*456.550.000,00*
Pembuatan Siring Pasangan RT. 005, RT. 007 Lk. I, RT. 009 Lk. II, RT. 001 Air Jukung	*Belinyu*	*1,11 Km*	*440.670.000,00*	*APBD*	*P3*		*440.670.000,00*
Pelebaran Siring Jl. Cut Nyak Dien	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Penyambungan Siring PasanganRT. 002 Lk. I Air Jukung	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Pasangan RT. 006 Lk. II, RT. 009 Lk. II, RT. 010 Lk. II, RT. 013 Lk. III, RT. 012 Lk. III, RT. 010 dan RT. 011 Lk. III Air Jukung	*Belinyu*	*2,65 Km*	*1.052.050.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.052.050.000,00*
Pembuatan Siring Pasangan RT. 012 dan RT. 015, RT. 017 Lk. II dan Rt. 017 Lk. II Air Jukung	*Belinyu*	*1,6 Km*	*635.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*635.200.000,00*
Lanjutan Siring Pasangan Jl. PMD RT. 017 LK. II Air Jukung	*Belinyu*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
Siring RT. 012 Air Jukung	*Belinyu*	*0,7 Km*	*277.900.000,00*	*APBD*	*P3*		*277.900.000,00*
Pembuatan Talud RT. 05 Lk. I, RT. 013 Lk. IV Air Jukung	*Belinyu*	*1,2 Km*	*476.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*476.400.000,00*
Peningkatan Pembuatan Siring Pasang Dusun Riding Panjang, RT. 012 Dusun Bunaikong	*Belinyu*	*1,3 Km*	*516.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*516.100.000,00*
Peningkatan Pembuatan Siring Pasang RT. 011 Dusun Kumpai	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Peningkatan Pembuatan Siring Pasang dan Talud RT. 009 Dusun Mengkubung	*Belinyu*	*6 Km*	*2.382.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.382.000.000,00*
Peningkatan Pembuatan Siring Pasang RT. 010 Dusun Padang Labu	*Belinyu*	*4 Km*	*1.588.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.588.000.000,00*
Pembangunan Drainase dan Siring berpasangan Dusun Gedong	*Belinyu*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Pembuatan Siring Berpasangan Dusun Parit Kelapa	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*

Pembangunan Siring JalanDusun Air Anget - Dusun Parit 14 RT. 01,02 dan 03 Desa Gunung Pelawan	*Belinyu*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Pembangunan Siring Jalan Dusun Pejem RT. 07, RT. 08,Dusun Lubuk Lesung RT. 09 Desa Gunung Pelawan	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembuatan Siring Pasangan Dusun Bukit Beting	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring Pasangan Depan SD dan SMP Dusun Bintet	*Belinyu*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring Pasangan Dusun Lepang	*Belinyu*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pembangunan Siring Pasangan RT. 01, RT. 02 Dusun Sungai Pasir dan RT. 05 Dusun Bintet	*Belinyu*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pemasangan Talud Dusun Pesaren Pantai	*Belinyu*	*0,26 Km*	*103.220.000,00*	*APBD*	*P3*		*103.220.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
Pembangunan Saluran Jalan Kuburan Cina/Jl. RT 03 Desa Merawang	*Merawang*	*3 Km*	*1.191.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.191.000.000,00*
Pembangunan Saluran Jalan Kelapa Hibrida Desa Merawang	*Merawang*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pembangunan Saluran Batu Belah Jalan Lintas Dwi Makmur-Jurung	*Merawang*	*0,55 Km*	*218.350.000,00*	*APBD*	*P3*		*218.350.000,00*
Pembangunan Saluran Air Dayung Dwi Makmur	*Merawang*	*0,48 Km*	*190.560.000,00*	*APBD*	*P3*		*190.560.000,00*
Pembangunan Saluran Jl. SDN 02 RT 2 Dusun 1 dan Depan Poskesdes RT 11 Dusun 3 Baturusa	*Merawang*	*0,6 Km*	*238.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*238.200.000,00*
Pembangunan Saluran Jl. Gang Dul Ketem - Gg. Penyep RT 6 Dusun 2 Baturusa	*Merawang*	*0,2 Km*	*79.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*79.400.000,00*
Pembangunan Saluran Jalan Gg. Sinar Mulia Rt 001 Dusun 1 Balun Ijuk	*Merawang*	*1,3 Km*	*516.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*516.100.000,00*
Pembangunan Saluran Jalan PNPM RT 002 dan RT 003 Balun Ijuk	*Merawang*	*2 Km*	*794.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*794.000.000,00*
Pembangunan Saluran dan Talud Jalan Talud Jalan Air Dayung Riding Panjang	*Merawang*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*595.500.000,00*
Pembangunan Talud Jalan Talud Dusun Batu Tunggal Riding Panjang	*Merawang*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Saluran Batu Belah RT 01-RT03-RT 04 Jurung	*Merawang*	*4 Km*	*1.588.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.588.000.000,00*
Pembangunan Saluran Batu Belah Jalan Kabupaten Depan Masjid Fathurrahman Desa Kimak	*Merawang*	*0,2 Km*	*79.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*79.400.000,00*
Pembangunan Saluran Batu Belah Jalan Kabupaten Dusun 004 Desa Kimak	*Merawang*	*0,25 Km*	*99.250.000,00*	*APBD*	*P3*		*99.250.000,00*
Pembangunan Saluran Batu Belah Jalan Kabupaten Dusun 001 Desa Kimak	*Merawang*	*0,5 Km*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*

Pembangunan Siring Batu Belah R. Wandi - R. Wawan Jurung	*Merawang*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan Siring Batu Belah RT. 03 Jurung	*Merawang*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong jalan Air Tiung Dusun Limbung	*Merawang*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembangunan Siring jalan Gang Galam menuju Jl. Ansori menuju Jl. Palot Dusun Tebing Tinggi		*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
Pembangunan siring pasangan batu belah jalan paya benua Petaling (Dusun 1)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
pembangunan siring pasangan baatu belah jl. Pengan (rehab) Petaling (Dusun 1)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembangunan siring pasangan batu belah jl. simpang tukak - kebun ustad bujoi Petaling (RT 3 Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembangunan siring pasangabn batu belah Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,75 Km*	*297.750.000,00*	*APBD*	*P3*		*297.750.000,00*
Pembangunan siring pasangan batu belah dari rumah ustad bujoi - pendem Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembangunan siring pasangan batu belah dari rumah yuk ani - amang bul Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,35 Km*	*138.950.000,00*	*APBD*	*P3*		*138.950.000,00*
Pembangunan saluran / siring sepanjang pemandian umum aek tanyit - aek kerabuk kiri kanan Kemuja	*Mendo Barat*	*1KM*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan siring jalan desa Paya Benua	*Mendo Barat*	*0,8 Km*	*317.600.000,00*	*APBD*	*P3*		*317.600.000,00*
Pembangunan talud siring Cengkong Abang (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Saluran air/siring sepanjang tepi jalan raya kampung air buluh dan kampung air pelempang Air Buluh (Dusun 1, 2, 3 4)	*Mendo Barat*	*Ikm*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
siring jalan sepanjang jalan desa/kabupaten Mendo	*Mendo Barat*	*1Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pembangunan talud Penagan (RT 004 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*500 M*	*198.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*198.500.000,00*
Pembangunan talud Petaling Banjar (Dusun 1, 2,3, 4)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*1.191.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.191.000.000,00*
Pembangunan siring jalan pahlawan 12 Petaling Banjar (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
Pemasangan siring pasangan jalan air duren Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*3 Km*	*1.191.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.191.000.000,00*
Pembangunan talud (lanjutan) Petaling (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*158.800.000,00*	*APBD*	*P3*		*158.800.000,00*
Pembangunan talud darii rumah AR sampai air tebet Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*

		Pembangunan talud jalan lapangan bola Kemuja (RT 12 Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1KM*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Pembuatan talud jembatan kayu Kace Timur (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
		Pembangunan Sering Jalan Raya Dusun I, II, III Kayu Besi	*Puding Besar*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Pemb. Siring dan talud Jalan Kab Dusun 1,2,3 Desa Labu	*Puding Besar*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sering Jalan Pustu dari Rumah Abukri RT.013 Nibung	*Puding Besar*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Pembangunan Siring Jl Lingkar Desa Dusun 1,2,3 Tanah Bawah	*Puding Besar*	*4 Km*	*1.588.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.588.000.000,00*
		Pembangunan Siring Jl Paket II Dusun 3 Tanah Bawah	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*595.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*595.500.000,00*
		Pembangunan Siring Jalan Raya Kotawaringin	*Puding Besar*	*5 Km*	*1.985.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.985.000.000,00*
		Pembangunan Siring Jalan Raya Sungai Dua	*Puding Besar*	*3 Km*	*1.191.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.191.000.000,00*
		Pembangunan Siring Jalan Raya Kampung Panjang Kotawaringin	*Puding Besar*	*1 Km*	*397.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*397.000.000,00*
		Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Puding Besar	*Puding Besar*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
		Pembangunan Siring Pasangan Jalan Kabupaten Desa Mabat	*Bakam*	*1,2 Km*	*476.400.000,00*	*APBD*	*P3*		*476.400.000,00*
		Pembangunan Siring Pasangan Jalan Sungailiat Bakam Desa Bakam	*Bakam*	*2,6 Km*	*1.032.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.032.200.000,00*
		Pembangunan Siring Pasangan Jalan Lingkar Desa Neknang	*Bakam*	*0,3 Km*	*119.100.000,00*	*APBD*	*P3*		*119.100.000,00*
		Pembangunan Saluran Air dari RT 05-02 Desa Kapuk	*Bakam*	*0,6 Km*	*238.200.000,00*	*APBD*	*P3*		*238.200.000,00*
		Panjang Saluran dan Gorong - gorong di Kecamatan Bakam	*Bakam*	*10 Km*	*3.970.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.970.000.000,00*
1.03.10.2.01.05	*Sub Kegiatan Pembangunan Jalan*	*Panjang Jalan Tanah Puru Kelurahan Lubuk Kelik*	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*
		PEMBAGUNAN JLN L JLN. DUFAN KE JLN. BINTANG TEMBUS KANTOR KELURAHAN	*Sungailiat*	*1Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*160.000.000,00*
		PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI	*Sungailiat*	*1Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*320.000.000,00*
		TANAH PURUH JLN. HOLY RT. 001 DAN JLN. GRACE UBER TELUK UBER	*Sungailiat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
		Jalan Lintas Utara (Samping Kantor Lurah Sinar Baru) RT.01 Lingk.Sinar Baru Timur s.d. RT.06 Lingk.Sinar Baru	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*
		Jalan Puskesmas Sinar Baru RT.06 Lingk.Sinar Baru s.d. RT.02 Lingk.Kinhin	*Sungailiat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
		RT. 003 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*0,153 Km*	*48.960.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,153 Km*	*48.960.000,00*

Jalan Bahagia RT 001 (Samping Mushola), Jalan Gaya Baru RT 003 dan Jalan Bata Merah III RT. 002 Lingkungan Hakok	*Sungailiat*	*3,4 Km*	*1.088.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3,4 Km*	*1.088.000.000,00*
Pembukaan Jalan dan Penimbunan Jalan RT 01 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*192.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*192.000.000,00*
Pembangunan Jalan Dari Rt. 01 tembus Ke RT. 02 (jl. Kongpoi) Rt. 01 ke Rt. 02 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*
Pembangunan Jalan Cendana Rt.04 - Rt. 05 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*
Tanah Puru di Jl. Lingkar Barat RT 01 Kenanga	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*96.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*200.000.000,00*
Pembangunan Jl. Baru RT 05 Kenanga	*Sungailiat*	*0,24 Km*	*76.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,24 Km*	*200.000.000,00*
Pembuatan Jalan Baru Jl. Lingkar Timur RT 07 Kenanga	*Sungailiat*	*0,2 Km*	*64.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*200.000.000,00*
Pembukaan jalan/ penyambungan Jl. Harapan Air Kenanga tembus ke RT. 02 Parit Tujuh RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*224.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,7 Km*	*200.000.000,00*
Pembanguna Jalan Gg. Naga, Parit IV	*Sungailiat*	*0,39 Km*	*12.480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,39 Km*	*200.000.000,00*
Pembukaan Jalan Baru Jl. Bhakti air hanyut, tembus lingk. Sri menanti	*Sungailiat*	*0,25 Km*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,25 Km*	*200.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Sungiliat	*Sungailiat*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*150.000.000,00*
Pengerasan jalan JUT /JUP	*Pemali*	*4,5 Km*	*1.440.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4,5 Km*	*1.440.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Panjang Jalan Dari Depan H. Zainal Abidin sampai Tempat Pak Jun Desa Baturusa	*Merawang*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Panjang Jalan Dari Sungai menuju Pengkal Tenggeris Dusun 01 Jada Bahrin	*Merawang*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*192.332.800,00*
Panjang Jalan Lingkar Balun ijuk Pangkal pinang RT 003 Dusun III Balun Ijuk	*Merawang*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*120.208.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Pantai Emas Air Anyir sampai Pantai Kuala Dusun Mudel sepadan 50 m dari Bibir Pantai Air Anyir	*Merawang*	*7 Km*	*2.240.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*7 Km*	*2.240.000.000,00*
Panjang Jalan R. Sarjono - Kebun H. Roki Jurung	*Merawang*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*120.208.000,00*
Panjang Jalan RT 03 - RT 04 Jurung	*Merawang*	*1,3 Km*	*416.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,3 Km*	*424.320.000,00*
Pembuatan Jalan Lokasi Pesantren Dusun 02 Jada Bahrin	*Merawang*	*0,8 Km*	*256.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,8 Km*	*256.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	***3.296.000.000,00***
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru jalan suak pelawan Kota Kapur (RT 5 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru darii rt 5 menuju rt 6 Kota Kapur (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*

Pembukaan jalan baru dan peninmbunan jalan tanah puru Kota Kapur (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru ke areal persawahan Kota Kapur (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru jl. Siding panjang Kota Kapur (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*160.000.000,00*
Penimbunan jalan tanah puru jalan irigasi persawahan Kota Kapur	*Mendo Barat*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru ke batu lesung Kota Kapur (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*160.000.000,00*
Pembukaan jalan baru & penimbunan jalan tanah puru ke air kepoh Kota Kapur (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan jalan baru Kota Kapur	*Mendo Barat*	*1 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*160.000.000,00*
Pembangunan jalan lintas desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembangunan tanah puru, plat deuker dan gorong-gorong baru jl. Air aman Petaling (RT 3 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembangunan tanah puru jl. Lingkar barat dari pendem - jl. Penagan Petaling (RT 3 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembangunan tanah puru, plat deuker dan 3 unit gorong-gorong Petaling (RT 3 Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,525 Km*	*168.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,525 Km*	*168.000.000,00*
Pembangunan jalan tanah puru, plat deuker dan gorong-gorong (lanjutan) Petaling (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,1 Km*	*32.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,1 Km*	*32.000.000,00*
Pembangunan jalan tanah puru jalan sirem menuju ke bungin Kemuja	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan jalan aek cundong Kemuja (RT 3 Dusun 1)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan jalan chien Kemuja (RT 3 Dusun 1)	*Mendo Barat*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pembangunan jalan labuh air pandan - kota waringin Labuh Air Pandan (RT 2 Dusun 3 Balau)	*Mendo Barat*	*18 Km*	*5.760.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*18 Km*	*5.760.000.000,00*
Pembuatan jalan baru Kace Timur (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Penimbunan tanah puru jalan menuju tanah bawah Paya Benua	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan jalan usaha tani Paya Benua	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan jalan baru dari pesantren ke desa konghin Kace	*Mendo Barat*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
pembukaan jalan baru dari kace permai ke kuburan Kace	*Mendo Barat*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan jalan baru dari dusun 4 ke kuburan Kace	*Mendo Barat*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*

Pembangunan jalan lingkar perkuburan Mendo	*Mendo Barat*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan jalan lingkar desa lanjutan dan plat deuker Mendo	*Mendo Barat*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Pembuatan Jalan Gang Line RT. 02 Lingkungan II	*Belinyu*	*0,35 Km*	*112.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,35 Km*	*112.000.000,00*
Pembuatan Jalan Tembus Jalan Komplek Perumnas RT. 02 Lingkungan VII	*Belinyu*	*0,07 Km*	*224.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,07 Km*	*224.000.000,00*
Pembangunan Jalan Trem Lama Gang Harapan ke Jalan akasia RT. 02 Lingkungan VIII	*Belinyu*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*
Pengadaan Jalan Tanah Puru RT. 03 dan RT. 05 Lingkungan II	*Belinyu*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pengadaan Jalan Usaha Tani Jalan Baru Perbatasan Jalan Gunung Asam dan Gunung Tampok Ijo Rt 07	*Belinyu*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Jalan Perbatasan RT. 002 dengan RT. 004, RT. 010 Lingkungan III, RT. 011 Lingkungan III Mantung	*Belinyu*	*0,75 Km*	*240.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,75 Km*	*240.000.000,00*
Pembuatan Jalan Baru Jl. Sudirman-Jl. Adidas RT. 012	*Belinyu*	*0,7 Km*	*224.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,7 Km*	*224.000.000,00*
Pembuatan Jalan Baru Jl. Sudirman-Jl. Bhakti RT. 009	*Belinyu*	*0,7 Km*	*224.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,7 Km*	*224.000.000,00*
Pembuatan Jalan Baru Jl. Sadar- Jl. Air Demang RT. 010	*Belinyu*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*
Pembuatan Jalan Tembus RT. 001, RT. 003 RT. 004 Kelurahan Air Jukung	*Belinyu*	*0,587 Km*	*187.840.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,587 Km*	*187.840.000,00*
Pembangunan Jalan Tembus Dusun Tanjung Batu s/d Dusun KD Belinyu	*Belinyu*	*0,9 Km*	*288.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,9 Km*	*288.000.000,00*
Pengerasan Jalan Tanah Puru Dusun Lepang	*Belinyu*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Pemuruan Jalan Tembusan Rimba Beras Ke Bukit Layang Dusun Rimba Beras	*Riau Silip*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Pemuruan Lanjut Jalan Lingkar LEN dan Pelat Deker dan Talud Dusun Pugul	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pembukaan dan Pemuruan Jalan Usaha Tani Pugul Ke Simpang Mapur Dusun Pugul	*Riau Silip*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembangunan Jalan Pariwisata Geopark Dusun Tuing	*Riau Silip*	*5 Km*	*1.600.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*5 Km*	*1.600.000.000,00*
Pembangunan Jalan Pariwisata Pulau Punggur Dusun Tuing	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru Nyambang	*Riau Silip*	*0,4 Km*	*128.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*128.000.000,00*
Pembangunan Jalan Masuk Pasiran	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*

Pembangunan Jalan Puru Makam Air Nungkat	*Riau Silip*	*0,53 Km*	*169.600.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,53 Km*	*169.600.000,00*
Pembangunan Jalan Puru RT 07 Dusun Silip	*Riau Silip*	*0,6 Km*	*192.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,6 Km*	*192.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru RT 06-08 Dusun Silip - Dusun Sumedang	*Riau Silip*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru Air Tanjet Ke RT 11 Dusun Bukit Tebok	*Riau Silip*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru Eks TK 6 RT 06 Dusun Silip	*Riau Silip*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru Poskamling RT 07 - Balai Dusun Silip	*Riau Silip*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru RT 05 Ke RT 06 Dusun Silip	*Riau Silip*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru RT 10 Dusun Sumedang	*Riau Silip*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Puru RT 02 Ke RT 07 Dusun Silip	*Riau Silip*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembukaan Jalan Tanah Puru RT 03 Dusun Sp. Lumut	*Riau Silip*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembukaan Jalan Tanah Puru RT 05 Dusun Riau	*Riau Silip*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Usaha Tani & Nelayan Dusun I (Kawasan Air Beber s/d Lelap Selan dan Air Jelutung)	*Riau Silip*	*5 Km*	*1.600.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*5 Km*	*1.600.000.000,00*
Pembangunan Jalan Wisata Kolong Biru Dusun Cit	*Riau Silip*	*8,5Km*	*2.720.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8,5Km*	*2.720.000.000,00*
Pengadaan Jalan Tembus Tanah Puru Gang Pasir Air Kura-Kura Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Lanjutan Tanah Puru Bayur Dusun Sidorejo	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pembuatan Jalan Tanah Puru Samping Rumah Yunizar Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,13 Km*	*48.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,13 Km*	*48.000.000,00*
Pembangunan Jalan Tanah Puru Bong Jang Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,2 Km*	*64.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*64.000.000,00*
Pembuatan Jalan Baru Samping Rumah Yashan Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,5km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5km*	*160.000.000,00*
Lanjutan Pembangunan jalan Tanah Puru Tiang Pulut Menuju Deniang Dusun Cit	*Riau Silip*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Pembuatan Jalan Tanah Puruh Samping Rumah Punarwi Dusun Cit	*Riau Silip*	*0,5 km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 km*	*160.000.000,00*
Pengadaan Jalan Masuk kubur Air Tenggiling Dusun Sidorejo	*Riau Silip*	*0,5 km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 km*	*160.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Desa RT 16 Dsusun 7 Desa Bukit Layang	*Bakam*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*
Panjang Jalan Usaha Tani Desa Tiang Tarah	*Bakam*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*

Pembangunan Jalan Lingkar Desa Mangka	*Bakam*	*2,6 Km*	*832.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,6 Km*	*832.000.000,00*
Pembangunan Jalan Tanah Puru Desa Bakam	*Bakam*	*8,5 Km*	*2.720.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8,5 Km*	*2.720.000.000,00*
Pembukaan Jalan Baru IUP Desa Dalil	*Bakam*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Usaha Tani Rimba Barat Desa Neknang	*Bakam*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*800.000.000,00*
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Maras Senang	*Bakam*	*1,8 Km*	*576.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,8 Km*	*576.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Bakam	*Bakam*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Pembangunan Jl. Tanah Puru Jl. Kebun Randu Ke Jl. Kebun Mesundei RT 01 Dusun III Kayu Besi	*Puding Besar*	*3,5 Km*	*1.120.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3,5 Km*	*1.120.000.000,00*
Pembangunan Jl. Tanah Puru Jl. Kebun Las-Rawamangun (Kebun Kawi s.d. Kebun Jabi) RT 01 Dusun III Kayu Besi	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Jalan Tanah Puru Perkebunan Las (Kebun Jabi s.d Kebun Joni Trisna) RT 01 Kayu Besi	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Jalan Tanah Puru Perkebunan Las (Kebun Sawit Sarkawi sd Ruslan) RT 01 Kayu Besi	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Jalan Tanah Puru (Randu - Kelekak Balai) RT 01 Dusun III Kayu Besi	*Puding Besar*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Penyambungan Tanah Puru Tembus Samping Kantor Desa Ke Jalan Raya Dusun I Kayu Besi	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan JUP Dusun 1,2,3 Labu	*Puding Besar*	*6 Km*	*1.920.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*6 Km*	*1.920.000.000,00*
Pembangunan JUT Dusun 2,3 Labu	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan Tanah Puru jalan Desa Dusun 1,2,3 Labu	*Puding Besar*	*0,5km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5km*	*160.000.000,00*
Pembangunan jalan Inspeksi Sawah I Desa Labu	*Puding Besar*	*2 Km*	*640.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*640.000.000,00*
Pembangunan Jalan Inspeksi untuk 2 Lokasi Sawah II Desa Labu	*Puding Besar*	*4 Km*	*1.280.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 Km*	*1.280.000.000,00*
Pembangunan Jalan Jalur Dua Desa Labu	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan Dari RT.02 S/D RT.014 Desa Labu	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembukaan Jalan Baru (JUP/JUT) Dusun 1,2 Tanah Bawah	*Puding Besar*	*4 Km*	*1.280.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 Km*	*1.280.000.000,00*
Pembukaan Jalan Tembus Tanah Bawah Mendo Barat	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan JUT ke Bembeng Dusun II Saing	*Puding Besar*	*1 Km*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*320.000.000,00*
Pembangunan JUT ke Belatok ke Ramunjung Dusun II Saing	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*480.000.000,00*
Pembangunan JUT Kelekak Adui Dusun II Saing	*Puding Besar*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*160.000.000,00*

Pembukaan Jalan Baru Kotawaringin - Labuh Air Pandan	*Puding Besar*	*15 Km*	*480.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*15 Km*	*480.000.000,00*
Pembangunan Jalan Tanah Puru dari Parit 2 sampai Parit 4 RT 013 Kotawaringin	*Puding Besar*	*3 Km*	*960.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*960.000.000,00*
Panjang Jalan Tanah Puru di Kecamatan Puding Besar	*Puding Besar*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*3.200.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Kace	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Kace Timur	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan SD.02 Dusun I Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*220m*	*330.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*220m*	*330.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lapangan Bola Dusun I Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*500m*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*500m*	*700.000.000,00*
Peningkatan Jalan SMKN I Dusun 03 Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*800m*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*800m*	*1.000.000.000,00*
Peningkatan Jalan KTR Desa Dusun 04 Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*800m*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*800m*	*1.000.000.000,00*
Peninngkatan Jalan Lingkar Desa Desa Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Petaling	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan TPA Desa Petaling	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Powdes Desa Petaling	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Baru Desa Petaling	*Mendo Barat*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Air Sulen Desa Petaling	*Mendo Barat*	*2.000m*	*2.800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2.000m*	*2.800.000.000,00*
Peningkatan Jalan Sejahtera Desa Petaling	*Mendo Barat*	*400m*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*400m*	*500.000.000,00*
Peningkatan Jalan Sepakat Desa Petaling	*Mendo Barat*	*200m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*200m*	*250.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Baner Desa Petaling	*Mendo Barat*	*2.000m*	*2.800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2.000m*	*2.800.000.000,00*
Peningkatan Jalan Pendem Desa Petaling	*Mendo Barat*	*3.000m*	*4.200.000.000m*	*APBD*	*P3*	*3.000m*	*4.200.000.000m*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jaln Sinar Bula I Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Aek Kulop Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*450m*	*680.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*450m*	*680.000.000,00*
Peningkatan Jalan Masjid Husnul Muhibbin Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*225m*	*340.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*225m*	*340.000.000,00*
Peningkatan Jalan Bukit Ngasoh Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*400m*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*400m*	*500.000.000,00*
Peningkatan Jlan Aek Indang Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*350m*	*465.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*350m*	*465.000.000,00*
Peningkatan JalanPelita Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*325m*	*430.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*325m*	*430.000.000,00*

		Peningkatan Jalan Keramat Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*400m*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*400m*	*500.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Kuburan Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan LKD Desa Kemuje	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Dalam Desa Zed	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Paro Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Mhdin Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Stimules Desa Zed	*Mendo Barat*	*200m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*200m*	*250.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Swakelola Timur Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Puter Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Muger Desa Zed	*Mendo Barat*	*650m*	*900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*650m*	*900.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Kebon Desa Zed	*Mendo Barat*	*800m*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*800m*	*1.000.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Shincong Desa Zed	*Mendo Barat*	*200m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*200m*	*250.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Swakelola Barat Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Sawah Desa Zed	*Mendo Barat*	*400m*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*400m*	*500.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Kuburan Desa Zed	*Mendo Barat*	*200m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*200m*	*250.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Ruzi Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Lapangan Bola Desa Zed	*Mendo Barat*	*1.300m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.300m*	*1.400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Balai Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Carak Desa Zed	*Mendo Barat*	*150m*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*150m*	*200.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Nugon Dalem Desa Zed	*Mendo Barat*	*100m*	*125.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*100m*	*125.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Air Baru Desa Zed	*Mendo Barat*	*300m*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*300m*	*400.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Lapangan Bola Dusun IV Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*375m*	*550.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*375m*	*550.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Sekolah Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*450m*	*680.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*450m*	*680.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Aem Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*630m*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*630m*	*800.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Tungkup Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*1.125m*	*1.550.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.125m*	*1.550.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Baru Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*345m*	*525.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*345m*	*525.000.000,00*
		Peningkatan Jalan KTR Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*1.100m*	*1.550.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.100m*	*1.550.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Sawah Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*2.400m*	*3.150.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2.400m*	*3.150.000.000,00*
		Peningkatan Jalan Lapangan Bola Desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*500m*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*500m*	*700.000.000,00*
1.03.10.2.01.08	*Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan*	*Panjang Jalan PDAM Tirta Bangka No. 01 Ling. PDAM Tirta Bangka*	*Sungailiat*	*0,385 Km*	*997.150.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,385 Km*	*997.150.000,00*
		Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan sungailiat	*Sungailiat*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*

Panjang Jalan RT. 01, Lingk. Sinar Baru RT. 01,RT.03, RT.05 dan RT.06	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*
Panjang Jalan Lestari RT 01 & 03 Lingk. Kuala - Permukiman Masyarakat Kelurahan Matras	*Sungailiat*	*1,3 Km*	*3.367.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,3 Km*	*3.367.000.000,00*
Panjang Jalan Bhineka Lingkungan Kenanga Permai	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
PENGASPALAN JALAN ANEKA JALAN ZOEHRI RT. 005 LINGK. RAMBAK	*Sungailiat*	*1 Paket*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*2.590.000.000,00*
PENGASPALAN RT.002,003,004,006 JELITIK	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
PENGASPALAN JALAN BULAN RT.002 DAN RT. 003 RAMBAK	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*
PENGERASAN JALAN RT. 004 LINGK. RAMBAK	*Sungailiat*	*1Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*2.590.000.000,00*
PEMBANGUNAN HOTMIX DAN DRANASE SIMPANG JLN KAMP. BARU JELITIK	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*
PENGASPALAN JALAN KELURAHAN JELITIK	*Sungailiat*	*0,35 Km*	*906.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,35 Km*	*906.500.000,00*
PENGASPALAN JLN. UBER PESONA DALAM RT. 002 TELUK UBER	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
RT.01 Lingk.Surya Timur (depan bengkel)	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*
RT.04 Jl.Kampung Baru Lingk.Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*
RT.03 Jl.Kampung Baru Lingk.Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*
RT.02 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*2.590.000.000,00*
RT.03 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*
RT.04 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
RT.06 Lingk .Limbang Jaya (tembus ke RT.04 dan RT.02)	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*
RT.06 Jl.Gg Ketuyut Lingk Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*
RT.03 Gg.Kubur Tunas Kelapa	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
RT.02 Gg.Kelapa Tunas Kelapa	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*
RT.06 Jl.Kuburan Lingk Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,3 Km*	*2.590.000.000,00*
RT.05 Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,3 Km*	*1.295.000.000,00*
Jalan Lap.Bola RT.03 s.d. Jalan Blok M RT.05 Lingk.Sinar Baru	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,476 Km*	*2.590.000.000,00*
Jalan Perkuburan RT.06 s.d. RT.04 Lingk.Sinar Baru	*Sungailiat*	*0,32 Km*	*828.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,8 Km*	*828.800.000,00*
Jalan Lintas Selatan RT.01 Lingk.Sinar Baru Timur s.d. RT.04 Lingk.Sinar Baru	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*

Jalan Danau Ranau RT. 006 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*
Jalan Pantai Teluk Pikat Gg. Ranau RT. 004 dan RT 005 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*1,2 Km*	*3.108.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.108.000.000,00*
Gg. Pendidikan RT. 006 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.885.000.000,00*
Gg. Perkebunan RT. 004 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*5.180.000.000,00*
Jalan Bata Merah II RT 002 dan Jalan Kolong Bijur Lingkungan Hakok	*Sungailiat*	*0,65 Km*	*1.683.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*2.500.000.000,00*
Jalan Lestari Lingkungan Bukit Kuala	*Sungailiat*	*1,3 Km*	*3.367.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.367.000.000,00*
Jalan Sahim RT 002 Lingkungan Jalan Laut	*Sungailiat*	*0,75 Km*	*1.942.500.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.942.500.000,00*
- Jl. Merak II RT. 001, RT. 002 dan RT. 003 Lingk. Samratulangi	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*1.813.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.813.000.000,00*
- Jl. Merak I RT. 003 Lingk. Samratulangi	*Sungailiat*	*1,7 Km*	*4.403.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.403.000.000,00*
RT. 004 Lingk. Srimenanti	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.072.000.000,00*
- Rt.04 Komplek Grasi Srimenanti	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.590.000.000,00*
- RT. 008 Lingk. Sripemandang	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*3.367.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.367.000.000,00*
- RT. 004 Lingk. Srimenanti	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
RT.06 Komplek Pemda, RT.02 Komplek Pemda, RT. 04 Komplek Pemda, RT.07 Komplek Pemda, RT. 08 Komplek Pemda, RT.10 Komplek Pemda, RT.01 Komplek Pemda, SMP N 2 Sungailiat, Komplek RSS dan Jl. SMA Yapensu	*Sungailiat*	*4,1 Km*	*10.619.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*10.619.000.000,00*
RT 01 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*777.000.000,00*
RT 02 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.295.000.000,00*
RT 03 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.295.000.000,00*
RT 0u5 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.885.000.000,00*
RT 06 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.036.000.000,00*
RT 07 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*0,2 Km*	*518.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*518.000.000,00*
RT 01& 4 Sinar Jaya Jelutung	*Sungailiat*	*1,2 Km*	*3.108.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,2 Km*	*3.108.000.000,00*
Rt.02 Kelurahan Sugailiat	*Sungailiat*	*0,15 Km*	*388.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*388.500.000,00*
Rt. 04 Kelurahan Sugailiat	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*
Kampung baru Rt.05	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*1.554.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.554.000.000,00*
Jl. Camar Rt.08	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***0,3 Km***	***800.310.000,00***
Pelebaran jalan Jl. Maria Goretti RT 02	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***2.134.160.000,00***
Pengasapalan Jalan Pemakaman Umum Tj. Ratu RT.01 Dusun Tj. Ratu	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***1.333.850.000,00***
Peningkatan Jalan Gang Damai 1 Rt. 01 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***4.001.550.000,00***

Peningkatan Jalan Jati II Sampai Jati III Rt. 01 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*1.813.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***1.867.390.000,00***
Peningkatan Jalan Gang Damai 4 Rt. 01 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***2.667.700.000,00***
Peningkatan Jalan Rebo Lama Rt.03 Dsn Rebo	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***12 Paket***	***5.335.400.000,00***
Pengaspalan Jalan Kp. Seru RT. 04 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	***2 Km***	***3.500.000.000,00***
Peningkatan Jalan Air Kebon RT. 04 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*5.180.000.000,00*
Pengaspalan Halaman Kelenteng Jaya Bakhti Rebo RT. 04 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*240 M2*	*259.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*259.000.000,00*
Pengaspalan Jalan Pemakaman Yayasan Damai Abadi RT. 07 Dsn. Rebo	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*240 M2*	*1.295.000.000,00*
Peningkatan Jalan Naga Rt. 01 Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*0,65 Km*	*1.683.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*1.683.500.000,00*
Peningkatan Jalan Pantai Takari Rt. 02 Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,65 Km*	*2.072.000.000,00*
Peningkatan Jalan Karang Panjang Menuju Batu amper Rt. 02 Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,8 Km*	*2.590.000.000,00*
Pengerasan dan pengaspalan Jalan Gang Lawit RT.05 Parit padang	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*777.000.000,00*	*777.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lapen Ke Aspal Hotmix RT 13 Parit padang	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*1.295.000.000,00*
Pengerasan Jalan Galunggung ke Cendrawasih RT 07 Air Merapin	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*2.590.000.000,00*
Pengerasan Jalan Gg. Semeru ke Galunggung RT.02 Air Merapin	*Sungailiat*	*0,3 Km*	*777.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*777.000.000,00*
Pengaspalan Jalan Bukit Intan Lubuk kelik	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*1.554.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.554.000.000,00*
Pengaspalan Jalan Jl. Natuna RT 01 Lingk Lubuk Kelik	*Sungailiat*	*±1,7 Km, L= ±3 M*		*APBD*	*P3*	*±1,7 Km, L= ±3 M*	*0,00*
Pengaspalan Jalan Raden Wijaya Gang. I RT. 01 Lubuk kelik	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*
Pengaspalan Jalan Jl. Damai Lubuk Kelik	*Sungailiat*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.590.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Perumahan Kenanga Indah RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.295.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Masjid RT 05Kenanga	*Sungailiat*	*0,12 Km*	*310.800.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*310.800.000,00*
Pengaspalan Jl. Bina Anaprasa RT 06 Kenanga	*Sungailiat*	*0,15 Km*	*388.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*388.500.000,00*
Pengaspalan Jl. TPA RT 01 Kenanga	*Sungailiat*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*6.475.000.000,00*
Pengaspalan jalan, Jl. Bhineka RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.885.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Perkuburan Kenanga Permai RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.295.000.000,00*

Pengerasan jalan di Jl. Garuda RT 03 Kenanga	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*
Pengerasan, pengaspalan dan siring Jl. Kenanga Baru RT 01 Kenanga	*Sungailiat*	*0,25 Km*	*647.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*647.500.000,00*
Pengerasan, pengaspalan dan siring Jl. Bukit Intan RT 03 Kenanga	*Sungailiat*	*1,2 Km*	*3.108.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.108.000.000,00*
Pengerasan, pengaspalan dan siring Jl. Kenanga Indah	*Sungailiat*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
Pengaspalan dan siring , Jl. Bukit Lingk. Air Kenanga RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,35 Km*	*906.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
Pengaspalan dan siring , Jl. Harapan IV Lingk. Air Kenanga RT 01 Kenanga	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.500.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Harapan III Lingk. Air Kenanga RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*1.554.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.554.000.000,00*
Pengerasan jalan, Pengaspalan dan siring Jl. Harapan V Lingk. Air Kenanga (dari rumah Erik s/d Paisol/samping Puskesmas) RT 02 Kenanga	*Sungailiat*	*0,7 Km*	*1.813.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*1.813.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Harapan V RT 003 Lingk. Air Kenanga	*Sungailiat*	*0,7 km*	*1.813.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*1.813.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Harapan VI RT 001 Lingk. Air Kenanga	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.554.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.554.000.000,00*
Panjang Jalan Banteng 2 dan 3 RT 01 Lingk Parit 7 Kuday	*Sungailiat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*5.180.000.000,00*
Panjang Jalan Gang Buaya, Parit IV Kuday	*Sungailiat*	*0,39 Km*	*1.010.100.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.010.100.000,00*
Panjang Jalan Gang Kelinci II, Parit IV Kuday	*Sungailiat*	*0,735 Km*	*1.903.650.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.903.650.000,00*
Panjang Jalan Gg. Rajawali, Parit IV Kuday	*Sungailiat*	*0,382 Km*	*989.380.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*989.380.000,00*
Panjang Jalan Gg. Kelinci I, Parit IV Kuday	*Sungailiat*	*0,31 Km*	*802.900.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*802.900.000,00*
Panjang Jalan jl. Sisingamangaraja dalam RT 01, Lingk. Kuday Selatan	*Sungailiat*	*0,2 Km*	*518.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*518.000.000,00*
Panjang Jalan jl. Sisingamangaraja RT 03 Kuday	*Sungailiat*	*0,6 Km*	*1.554.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.554.000.000,00*
Panjang Jalan Jl. Srigala II RT 04, Lingk. Kuday Selatan	*Sungailiat*	*0,4 Km*	*1.036.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*1.036.000.000,00*
Panjang Jalan Jl. Duyung 2, Parit 1 Kuday	*Sungailiat*	*0,5 Km*	*1.295.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.295.000.000,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan sungailiat	*Sungailiat*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*25.900.000.000,00*
Pengaspalan Jl. Semujur 1, II, III, dan IV rt. 004	*Pemali*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.072.000.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Masuk ke Instalansi Sumber Air Baku DAM I Pemali	*Pemali*	*1,75 Km*	*3.621.597.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.621.597.000,00*
Panjang Jalan Enggano I Gg. Mandiri RT 05 Dusun Air Pengabis	*Pemali*	*1,2 Km*	*2.483.380.800,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.483.380.800,00*

Panjang Jalan Desa Penyamun	*Pemali*	*5,728 Km*	*11.854.004.352,00*	*APBD*	*P3*	*0,7 Km*	*11.854.004.352,00*
Pengaspalan jalan betung 1 Dusun Air Bakung	*Pemali*	*1 KM*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Gatot Subroto	*Pemali*	*0,05 Km*	*103.474.200,00*	*APBD*	*P3*	*8 Km*	*103.474.200,00*
Pengaspalan Jalan Pesantren	*Pemali*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan RT 02 Damkeramat	*Pemali*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*413.896.800,00*
Pengaspalan RT 06 TS Jl. Batu, Jl. Beringin	*Pemali*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.655.587.200,00*
Pengkatan jalan lingkar belakang kantor desa Penyamun tembus lapangan bola dan rt 08	*Pemali*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*
Peningkatan jalan dusun dari depan masjid Amaliah s/d SDN 08 Dusun Muntabak Desa Penyamun	*Pemali*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.241.690.400,00*
Pengaspalan jalan rantau dusun Tutut	*Pemali*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.655.587.200,00*
Pengaspalan Jl. Dusun Muntabak	*Pemali*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jl. Dusun Tutut	*Pemali*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jl. Dusun Kceper	*Pemali*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan di Parit 10 rt 1 Air Duren	*Pemali*	*1,8 Km*	*3.725.071.200,00*	*APBD*	*P3*	***1,8 Km***	***3.836.823.336,00***
Pebgaspalan jalan kelapa rt. 001 Karya Makmur	*Pemali*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*	***0,5 Km***	***1.065.784.260,00***
Pengaspalan jalan batu tulis rt. 002 Karya Makmur	*Pemali*	*0,35 Km*	*724.319.400,00*	*APBD*	*P3*	***0,35 Km***	***746.048.982,00***
Pengaspalan Jl. Bougenville rt 002 Karya Makmur	*Pemali*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*	***0,8 Km***	***1.705.254.816,00***
Pengaspalan Jl. Skip I rt 002 Karya Makmur	*Pemali*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*
Pengaspalan Jl. Anggrek rt 002 Karya Makmur	*Pemali*	*0,3 Km*	*620.845.200,00*	*APBD*	*P3*	*0,3 Km*	*620.845.200,00*
Pengaspalan Jl. Angsana rt 002 Karya Makmur	*Pemali*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*
Pengaspalan jalan gang H Lani RT 003 Karya Makmur	*Pemali*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*
Pengaspalan Jalan, Siring Berpasangan dan Plat Deuker Jalan Komplek PGRI tembus Kantor Kelurahan Kuto Panji RT. 01 s/d RT. 03 Lingkungan II	*Belinyu*	*10 Km*	*1.165.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*1.165.500.000,00*
Peningkatan Jalan Sincong - mengkubung	*Belinyu*	*4,0 km*	*10.360.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4,0 km*	*10.360.000.000,00*
Peningkatan Jalan Aspal Bantam RT. 01 RT. 02 Bantam	*Belinyu*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*
Jl. Pahlawan 12 s/d Jl. Sungai Pasir, Jalan Masuk Kantor Lurah Belinyu Lk. VI	*Belinyu*	*1,5 Km*	*3.885.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.885.000.000,00*
Peningkatan kualitas Jalan Raya Utama Kel. Air AsamRT. 01 s.d RT. 02	*Belinyu*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2,5 Km*	*6.475.000.000,00*

Peningkatan Jalan Pulau Punai RT. 001, RT. 002 Lingkungan I	*Belinyu*	*0,25 Km*	*647.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*647.500.000,00*
Jalan Kantor Kelurahan Mantung, jalan Pantai Lepar RT. 007 Lingkungan II	*Belinyu*	*0,8 Km*	*2.072.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.072.000.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Dusun Parit 14 & Dusun Air Baung Desa Pelawan	*Belinyu*	*6 Km*	*12.416.904.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*12.416.904.000,00*
Panjang Jalan Bukit Pasir Merah Belinyu	*Belinyu*	*1,7 Km*	*3.518.122.800,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*3.518.122.800,00*
Panjang Jalan Desa Gunung Muda	*Belinyu*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang	*Belinyu*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*	***4 Km***	***8.526.274.080,00***
Perngaspalan Jalan tembus Jalan Kenangan ke Jalan Panji Baru Lingkungan III	*Belinyu*	*0,35 Km*	*724.319.400,00*	*APBD*	*P3*	***0,35 Km***	***746.048.982,00***
Pengaspalan Jalan Kenangan Indah tembus ke samping Terminal Baru Belinyu RT. 01 Lingkungan IV	*Belinyu*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Kp. Jawa Bawah RT. 01 Lingkungan VIII	*Belinyu*	*0,25 Km*	*517.371.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*517.371.000,00*
Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Siring Jalan Akasia I RT. 02 Lingkungan VIII	*Belinyu*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.241.690.400,00*
Pengaspalan Jalan Tembus Kuyang RT. 07 dari Jl. Lurus (Lapangan Bola) RT. 03 Kuyang LK. III	*Belinyu*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.034.742.000,00*
Pengerasan Jalan Ledeng Lama RT. 03 Kuyang LK. III	*Belinyu*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 Km*	*1.034.742.000,00*
Penembokan dan pengaspalan Jalan Gang Bubung Enam RT. 01 LK. IV	*Belinyu*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Gang SMP 3 sampai TPA Nur Padila Lingkungan V	*Belinyu*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jalan masuk lingkungan SMK N 1 SMK N 1 Lingkungan V	*Belinyu*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*	*0,50 Km*	*678.336.000,00*
Jalan Tembus dari Jl. Lurus sampai RT. 02 LK. III Kp. Saber Jalan Tembus dari Jalan Lurus sampai Jalan Trem Lama Rt. 02 LK. III	*Belinyu*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*678.336.000,00*
Pengaspalan Jalan Tembus dari Jalan Ahmad Yani RT. 01 ke Jalan Tembus Bukit Tani Jalan Ahmad Yani RT. 01 LK. III	*Belinyu*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*135.667.200,00*
Pengaspalan Jalan Gang Lapangan Bola Simpang Tiga LK. V Jalan Simpang Tiga LK. V	*Belinyu*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*5.152.308.000,00*
Pengaspalan Jalan SMK N 1 Belinyu Lingkungan V	*Belinyu*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*310.422.600,00*
Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Gang Parit XI RT. 02 RT. 01 Lingkungan VI	*Belinyu*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Pemukiman Gg. Lapangan Bola Kp. Simpang Tiga RT. 01 Lingkungan VI	*Belinyu*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*

Pengaspalan dan Pengerasan Jalan TPA Kp. Simpang Tiga Lingkungan VI	*Belinyu*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*
Jalan Bathin Tikal Lk. III	*Belinyu*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,5 Km*	*4.138.968.000,00*
Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Jalan Remodong	*Belinyu*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	***1 Km***	***2.131.568.520,00***
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Pemukiman Penduduk Parit 3 Bubus	*Belinyu*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*4.138.968.000,00*
Peningkatan Jalan menuju TPA/PAUD Nurhasanah Stasiun 2	*Belinyu*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Setapak Stasiun 2 s/d Jl. Raya	*Belinyu*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*1.241.690.400,00*
Pengaspalan Jalan Lurus, Jalan Sungai Buluh, Jalan Gang, Kampung Bukit RT. 01, RT 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05 dan RT. 07	*Belinyu*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*8.277.936.000,00*
Jalan Simping RT. 008, RT. 009, Rt. 012 Lingkungan II Mantung	*Belinyu*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*1.655.587.200,00*
Pengaspalan Jalan Tanah Merah Jalan Sungai Wak Ba RT. 001, RT. 004 Lk. I	*Belinyu*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Menuju Sungai Bunting RT. 001, RT. 004 Lk. I	*Belinyu*	*1,5 Km*	*3.269.784.720,00*	*APBD*	*P3*	*1.500m*	*3.269.784.720,00*
Pengaspalan Jalan Kelekak Taru s/d PMD RT. 12 Lk. III	*Belinyu*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*	*500 m*	*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan Sarian menuju PMD	*Belinyu*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*	*380 m*	*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan RT. 014 s/d Jalan Rumit RT. 012 dan Jalan Padang Siput Lk. III, IV	*Belinyu*	*1,45 Km*	*3.000.751.800,00*	*APBD*	*P3*	*400m*	*3.000.751.800,00*
Pengaspalan Jalan Adidas dan Jalan Sarian Jaya Lk. III	*Belinyu*	*1,45 Km*	*3.000.751.800,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*3.000.751.800,00*
Pengaspalan Jalan Kelekak Taru dan Jalan menuju Sungai Bunting Lk. I dan Lk. III	*Belinyu*	*0,75 Km*	*1.552.113.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*1.552.113.000,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 007 Dusun Bukit Tulang	*Belinyu*	*8 Km*	*16.555.872.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*16.555.872.000,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 013 Dusun Bukit Bang Kadir	*Belinyu*	*0,75 Km*	*1.552.113.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*1.552.113.000,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 006 Dusun Kelapo	*Belinyu*	*7 Km*	*14.486.388.000,00*	*APBD*	*P3*	*1.000m*	*14.486.388.000,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 003 Dusun Riding Panjang	*Belinyu*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*4.138.968.000,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 011 Dusun Kumpai	*Belinyu*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*1.655.587.200,00*
Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT. 013 Dusun Bukit Bang Kadir	*Belinyu*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	*2.069.484.000,00*
Pembuatan Jalan Hot Mix RT. 009 Dusun Mengkubung	*Belinyu*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,2 Km*	*10.347.420.000,00*
Pengaspalan Jalan Dusun KD Belinyu	*Belinyu*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*	*0,45 Km*	*1.241.690.400,00*
Pengaspalan Jalan Wisata Dusun Gedong	*Belinyu*	*0,75 Km*	*1.552.113.000,00*	*APBD*	*P3*	*0,6 Km*	*1.552.113.000,00*

Pengaspalan Jalan Dusun Parit 14-Dusun Air Baung Desa Gunung Pelawan	*Belinyu*	*6 Km*	*12.416.904.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*12.416.904.000,00*
Peningkatan Jalan (Aspal) dari kp. Karang Lintang RT. 017 Menuju Phak Kak Liang RT. 018	*Belinyu*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*6.208.452.000,00*
Peningkatan Jalan (Aspal) dari Dusun Sinar Harapan RT. 004 Menuju Dusun Karang Lintang RT. 017	*Belinyu*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*8.277.936.000,00*
Peningkatan Jalan (Aspal) dari Dusun Mula Karya dan Telang Dalam (RT. 011,012,013)	*Belinyu*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*6.208.452.000,00*
Peningkatan Jalan (Aspal) dari Dusun Mula Karya RT. 007 Menuju Dusun Air Pon RT. 006	*Belinyu*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*	*5,3 Km*	*6.208.452.000,00*
Pengaspalan Jalan TPI/Kastroid Dusun Pesaren Pantai	*Belinyu*	*0,35 Km*	*724.319.400,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*724.319.400,00*
Pengaspalan Jalan RT. 05 Dusun Bintet	*Belinyu*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan RT. 07 Dusun Bukit Beting	*Belinyu*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan RT. 06 Dusun Bukit Beting	*Belinyu*	*0,7 Km*	*1.448.638.800,00*	*APBD*	*P3*		*1.448.638.800,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Aspal Desa Pangkal Niur Dusun 1,2 dan 3	*Riau Silip*	*10,5 Km*	*21.729.582.000,00*	*APBD*	*P3*		*21.729.582.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Air Pelawan Dusun Pugul	*Riau Silip*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Lanjutan Rimba Beras	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Lanjutan Jalan Batam Dusun Pugul	*Riau Silip*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar LEN Dusun Pugul	*Riau Silip*	*1,2 Km*	*2.483.380.800,00*	*APBD*	*P3*		*2.483.380.800,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Bubung 7 Ke Pugul Dusun Bubung 7	*Riau Silip*	*1,8 Km*	*3.725.071.200,00*	*APBD*	*P3*		*3.725.071.200,00*
Peningkatan Jalan Melintang-Puntik	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan Dusun Puntik	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Peningkatan Jalan Gang Air Nyungat Melintang	*Riau Silip*	*0,54 Km*	*1.117.521.360,00*	*APBD*	*P3*		*1.117.521.360,00*
Pengaspalan Jalan / Peningkatan Gang Air Melandut RT 01 Dusun Silip	*Riau Silip*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.347.420.000,00*
Pengaspalan Jalan / Peningkatan Gang Pelawan RT 01-05 Dusun Silip	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan / Peningkatan Gang Percon RT 02 Dusun Silip	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan / Peningkatan Rimba Beras RT 12 Dusun Silip	*Riau Silip*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.347.420.000,00*

Pengaspalan Jalan Gang Madrasah RT 12 Dusun Bukit Tebok	*Riau Silip*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.347.420.000,00*
Pengaspalan Jalan Dari RT 06 Desa Silip Ke Dusun Air Abik Desa Gunung Muda	*Riau Silip*	*7 Km*	*14.486.388.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.486.388.000,00*
Pengaspalan Jalan Poros Desa / Peningkatan Dusun Banyuasin	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Gang / Lanjutan Dusun Banyuasin	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengasapalan Jalan Gang-Gang Desa (Lingkup Desa) Desa Riau	*Riau Silip*	*6 Km*	*12.416.904.000,00*	*APBD*	*P3*		*12.416.904.000,00*
Pengasapalan Jalan Perkuburan RT 01 Dusun Sp. Lumut	*Riau Silip*	*0,1 Km*	*206.948.400,00*	*APBD*	*P3*		*206.948.400,00*
Pengasapalan Jalan SMA Negeri Riau Silip RT 05 Dusun Riau	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan dan Siring Jalan di Air Tenggiling Dusun Sidorejo	*Riau Silip*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Kayu Arang	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Gang Damai Dusun Cit	*Riau Silip*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Samping Rumah Romadoni Air Kura-Kura Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*0,15 Km*	*310.422.600,00*	*APBD*	*P3*		*310.422.600,00*
Pengaspalan Jalan Samping Rumah Sawadi Air Kura-Kura Dusun Kayu Arang	*Riau Silip*	*0,15 Km*	*310.422.600,00*	*APBD*	*P3*		*310.422.600,00*
Pengaspalan Jalan Darma Bakti Dusun Deniang	*Riau Silip*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Pekul Suka Damai II Dusun Deniang	*Riau Silip*	*1,25 Km*	*2.586.855.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.586.855.000,00*
Pengaspalan Jalan Pekul Suka Damai I Dusun Deniang	*Riau Silip*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan Mawar Dusun Deniang	*Riau Silip*	*0,45 Km*	*931.267.800,00*	*APBD*	*P3*		*931.267.800,00*
Pengaspalan Jalan ke Pantai Bedukang Dusun Bedukang	*Riau Silip*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan Jalan Sumadi Dusun Bedukang	*Riau Silip*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
Pengaspalan Jalan Air Juang Dusun Bedukang	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Air Antu Dusun Air Antu	*Riau Silip*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan Jurusan Kimak - Limbung	*Merawang*	*8 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Jl. TK. Lama - Jl. Kongpoi - Jl. Damai Desa Merawang	*Merawang*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*

Panjang Jalan Menuju Makam Depati Bahrin	*Merawang*	*4,5 Km*	*9.312.678.000,00*	*APBD*	*P3*		*9.312.678.000,00*
Panjang Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Gg.Puyuh s/d Gg. Tower RT 004 Dusun I Desa Balun Ijuk	*Merawang*	*0,7 Km*	*1.448.638.800,00*	*APBD*	*P3*		*1.448.638.800,00*
Panjang Jalan Perkuburan RT 004 Dusun III Desa Balun Ijuk	*Merawang*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Panjang Jalan TMMD (Lubuk Lesung) RT 004 Dusun III Desa Balun Ijuk	*Merawang*	*2,5 Km*	*5.173.710.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.173.710.000,00*
Panjang Jalan Gang PPIP RT 004 Dusun III Desa Balun Ijuk	*Merawang*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*		*1.655.587.200,00*
Panjang Jalan Gang Senang Hati Air Dayung Desa Riding Panjang	*Merawang*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*		*827.793.600,00*
Panjang Jalan Kelenteng Air Dayung-Batu Amper Desa Riding Panjang	*Merawang*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Panjang Jalan Cengel Desa Jurung	*Merawang*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Panjang Jalan Perkantoran ke Jalan Perkuburan + jembatan w5 Desa Kimak	*Merawang*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Panjang Jalan Perkuburan ke Jalan Dusun Limbung Desa Kimak	*Merawang*	*6 Km*	*12.416.904.000,00*	*APBD*	*P3*		*12.416.904.000,00*
Panjang Jalan Karet - Jl. Duren RT 04-06 Dusun III - IV Desa Pagarawan	*Merawang*	*1,7 Km*	*3.518.122.800,00*	*APBD*	*P3*		*3.518.122.800,00*
Panjang Jalan TK Mekar Sari menuju Jalan Usaha Tani Dusun Mudel Desa Air Anyir	*Merawang*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Panjang Jalan Komplek Plaben RT 12 Dusun 3 Baturusa	*Merawang*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Panjang Jalan Gang Bali Garden Rt 001 Dusun 1 Balun Ijuk	*Merawang*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
Panjang Jalan Gang Bambu Kuning s/d gang manggis tembus UBB Rt 001 Dusun 1 Balun Ijuk	*Merawang*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
Panjang Jalan Madrasah Tebing Tinggi Riding Panjang	*Merawang*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*		*1.655.587.200,00*
Panjang Jalan Tanah Puru Kebun Ajum Air Anyir	*Merawang*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Dusun Temberan Air Anyir	*Merawang*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Panjang Jalan Ujung Dusun Mudel menuju Jalan PLTU Air Anyir	*Merawang*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Panjang Jalan Lingkar dari simpang PLTU Jalan Lintas Timur menuju PT. Hokari dan Polair Air Anyir	*Merawang*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Dusun Mudel Air Anyir	*Merawang*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Panjang Jalan Rimba, Dusun IV Pagarawan	*Merawang*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Panjang Jalan Kerkai, Dusun V Pagarawan	*Merawang*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Panjang Jalan Balai - Jl. Baru Jurung	*Merawang*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*

Panjang Jalan Madura RT 05 Jurung	*Merawang*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Air Tendup 2 Dusun 01 Jada Bahrin	*Merawang*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*		*1.241.690.400,00*
Pengaspalan Jalan Gg. Sukiman menuju Gg. Lapangan Bola Dusun 01 Jada Bahrin	*Merawang*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan SD 20 Merawang dan Jalan Celebung Dusun Limbung Jada Bahrin	*Merawang*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan kemuja - air duren	*Mendo Barat*	*4 Km*	*10.360.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.360.000.000,00*
Panjang Jalan Air Duren-Tua Tunu	*Mendo Barat*	*2 Km*	*5.180.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.180.000.000,00*
Panjang Jalan Pkl menduk - labu Air Pandan	*Mendo Barat*	*5 Km*	*12.950.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*12.950.000.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Desa Paya Benua	*Mendo Barat*	*3,25 Km*	*6.725.823.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.725.823.000,00*
Panjang Jalan di Air Petaling Desa Penagan	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jalan komplek SDN 27 Penagan (RT 11 Dusun 6)	*Mendo Barat*	*0,532 Km*	*1.100.965.488,00*	*APBD*	*P3*		*1.100.965.488,00*
Pengaspalan jalan boen sin loen Penagan (RT 9 Dusun 5)	*Mendo Barat*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Pengaspalan jalan pon pasir Penagan (Dusun 7-8)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan jalan dusun 1 menuju dusun 4 Kota Kapur	*Mendo Barat*	*1,2 Km*	*2.483.380.800,00*	*APBD*	*P3*		*2.483.380.800,00*
Pengaspalan jalan batu lesong Kota Kapur (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jalan menuju dermaga Kota Kapur	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jalan menuju jembatan kota kapur - labuh air pandan Kota Kapur	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan jalan SMKN 1 Petaling Banjar (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
jalan balai desa (pengaspalan / hotmik) Petaling Banjar (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
jalan dalam desa (pengaspalan / hotmik) Petaling Banjar	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan dari rumah nor isa - rumah ustad bujoi Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,3 Km*	*620.845.200,00*	*APBD*	*P3*		*620.845.200,00*
Pengaspalan jl. lingkar barat Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jalan sawah Petaling (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jl. air sulen - air jamu Petaling (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*

Pengaspalan jalan polindes Petaling (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*0,3 Km*	*620.845.200,00*	*APBD*	*P3*		*620.845.200,00*
Pengaspalan jl.pendem Petaling (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jl. Sejahtera Petaling (RT 2 Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,4 Km*	*827.793.600,00*	*APBD*	*P3*		*827.793.600,00*
Pengaspalan jl. SDN 3 Petaling (Dusun 1)	*Mendo Barat*	*0,3 Km*	*620.845.200,00*	*APBD*	*P3*		*620.845.200,00*
Pengaspalan jl. Sepalat Petaling (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Pengaspalan jl. Gembung Petaling (Dusun 4)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*620845200000%*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jl. suka makmur Petaling (RT 2 Dusun 4)	*Mendo Barat*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Pengaspalan jalan lingkar desa Kemuja (RT 18 Dusun 6)	*Mendo Barat*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan jalan desa menuju ke sawah desa (jalan kudung) Kemuja	*Mendo Barat*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan jalan bukit ngasoh Kemuja (RT. 9 Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
Pengaspalan jalan beri menuju aek kindang Kemuja (Dusun 5)	*Mendo Barat*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan jl. Atok kulop Kemuja (RT 18 Dusun 6)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jl kubur keramat menuju jalan pelita Kemuja (RT 14 Dusun 5)	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan jalan ke TPI Labuh Air Pandan (RT 1 Dusun 1 Air Pandan)	*Mendo Barat*	*0,5 Km*	*1.034.742.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.034.742.000,00*
Pengaspalan jalan ke jembatan labuh air pandan - kota kapur Labuh Air Pandan (RT 1 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*2,5 Km*	*5.173.710.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.173.710.000,00*
Pengaspalan jalan lingkar dusun air pandan Labuh Air Pandan (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*0,7 Km*	*1.448.638.800,00*	*APBD*	*P3*		*1.448.638.800,00*
Peningkatan jalan labuh air pandan	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jalan ke SPAM Labuh Air Pandan (RT 1 Dusun 3 Balau)	*Mendo Barat*	*0,8 Km*	*1.655.587.200,00*	*APBD*	*P3*		*1.655.587.200,00*
Aspal jalan dalam desa Air Duren (Dusun 1, 2, 3)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Peningkatan jalan aspal komplek perumnas timah Kace Timur (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Peningkatan jalan, pembangunan siring, paltduicker dan jembatan Kace Timur (dari tampuk pinang pura menuju jalan raya mentok, rt 06 dusun 3)	*Mendo Barat*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Peningkatan jalan Kace Timur (Dusun 1 - 4)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Peningkatan jalan tembus menuju kemuja Paya Benua	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*

Peningkatan jalan menuju petaling ke mendo Paya Benua	*Mendo Barat*	*2,5 Km*	*5.173.710.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.173.710.000,00*
Pengaspalan jalan lingkungan desa Cengkong Abang	*Mendo Barat*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Pengaspalan jalan lingkar desa Air Buluh (Dusun 1 RT 1, Dusun 3 RT 6, Dusun 2 RT 3, Dusun 4 RT 7)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan jalan penghubung desa air buluh & kace desa Air Buluh	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jalan desa menuju sawah desa (Jl. Sungai rukam) Rukam (Dusun 2)	*Mendo Barat*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan jalan desa menujuu sawah desa (Jl. Murong) Rukam (Dusun 1)	*Mendo Barat*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Pengaspalan jalan dalam desa (Lokasi rencana pembangunan SMAN/SMKN) Rukam (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan jalan kebun desa jl.. Samak bayang Rukam (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan jalan air kubur menuju lapangan bola Rukam (Dusun 3)	*Mendo Barat*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Pengaspalan jalan desa / PPIP Mendo	*Mendo Barat*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Desa Zed (Dusun 1, 2, 3, 4)	*Mendo Barat*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.347.420.000,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Puding Besar	*Puding Besar*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Tembus Desa Kotawaringin - Desa Buyan Kelumbi Desa Kotawaringin	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Panjang Jalan Menuju Kaw. Sekolah, Polindes, Poskesdes dan Pemukiman Masyarakat Desa Tanah Bawah	*Puding Besar*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Panjang Jalan Desa Nibung	*Puding Besar*	*3,5 Km*	*7.243.194.000,00*	*APBD*	*P3*		*7.243.194.000,00*
Panjang Jalan PISEW RT 02 Kayu Besi	*Puding Besar*	*1,975 Km*	*4.087.230.900,00*	*APBD*	*P3*		*4.087.230.900,00*
Jalan Desa Ds. Kayu Besi	*Puding Besar*	*0,6 Km*	*1.241.690.400,00*	*APBD*	*P3*		*1.241.690.400,00*
Jalan Jalur Dua Jalan Lingkar Desa RS Safri Rahman RT 05 Dusun III RT 07 Dusun IV	*Puding Besar*	*4 Km*	*8.277.936.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.277.936.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Desa Samping KUD Desa Puding Besar	*Puding Besar*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Desa dari Rmh Dani Gani RT 002 RT 02 Dusun II Desa Puding Besar	*Puding Besar*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Desa RT 05 RT 05 Dusun III Desa Puding Besar	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Pengaspalan Jalan Lingkar Barat Dusun I sd Dusun II RT.003 Polsek Dusun II Desa Puding Besar	*Puding Besar*	*1Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Peningkatan Jalan Air Cambai Desa Puding Besar	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*

Pengaspalan Jalan Desa Dusun 1,2,3 Labu	*Puding Besar*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Kegiatan Pengaspalan jln Lingkar Utara dan selatan Desa Nibung Desa Labu	*Puding Besar*	*8 Km*	*16.555.872.000,00*	*APBD*	*P3*		*16.555.872.000,00*
Pengaspalan Jalan Sekolah SD 06 RT.11,12	*Puding Besar*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Pengaspalan Jalan SMPN 03 Puding Besar (L=5, T=15, P=1,5 km) Desa Nibung	*Puding Besar*	*1,5 Km*	*3.104.226.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.104.226.000,00*
Peningkatan JUP Bukit Rimpa (L=6, T=15, P= 3 km) Desa Nibung	*Puding Besar*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Desa (Aspal Hotmix) Dusun 1, dan 2 Tanah Bawah	*Puding Besar*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pek. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Dusun III Dusun II Saing	*Puding Besar*	*5,3 Km*	*10.968.265.200,00*	*APBD*	*P3*		*10.968.265.200,00*
Pengaspalan Jalan Masuk Ke Halaman SMAN 2 Puding Besar Dusun II Saing	*Puding Besar*	*5 Km*	*10.347.420.000,00*	*APBD*	*P3*		*10.347.420.000,00*
Pek. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Dusun III Dusun II Saing	*Puding Besar*	*5,3 Km*	*10.968.265.200,00*	*APBD*	*P3*		*10.968.265.200,00*
Pengaspalan Jalan Desa Kotawaringin - Simpang Empat RT 008	*Puding Besar*	*1,8 Km*	*3.725.071.200,00*	*APBD*	*P3*		*3.725.071.200,00*
Pengaspalan Jalan Desa Kotawaringin	*Puding Besar*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Peningkatan/Pengaspalan Jalan Olah Raga (Sekolah) RT 006 Desa Kotawaringin	*Puding Besar*	*0,1 Km*	*206.948.400,00*	*APBD*	*P3*		*206.948.400,00*
Pengaspalan Jalan Gang Harapan Maju I RT 012 Desa Kotawaringin	*Puding Besar*	*0,2 Km*	*413.896.800,00*	*APBD*	*P3*		*413.896.800,00*
Peningkatan / Pengaspalan Jalan Lorong Tengah RT 002 Desa Kotawaringin	*Puding Besar*	*0,45 Km*	*931.267.800,00*	*APBD*	*P3*		*931.267.800,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Puding Besar	*Puding Besar*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*
Panjang Jalan Sungailiat Bakam Desa Bukit Layang	*Bakam*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Kabupaten Di Kecamatan Bakam	*Bakam*	*10 Km*	*25.900.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*25.900.000.000,00*
Panjang Jalan Lingkar Desa Mabat	*Bakam*	*3,312 Km*	*6.854.131.008,00*	*APBD*	*P3*		*6.854.131.008,00*
Pengaspalan Jalan Mangkol, Jalan Maras dan Jalan Lapangan Bola Desa Bukit Layang	*Bakam*	*2 Km*	*4.138.968.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.138.968.000,00*
Pengaspaan Jalan Lingkar Desa Bakam	*Bakam*	*2,6 Km*	*5.380.658.400,00*	*APBD*	*P3*		*5.380.658.400,00*
Pengaspalan Jalan Hotmik Jalan Rimbe' Mambang Desa Dalil	*Bakam*	*3 Km*	*6.208.452.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.208.452.000,00*
Pengaspalan Jalan SD, Jalan Lingkar Bukit Pret dan Jalan Paket 3 Desa Tiang Tarah	*Bakam*	*6,5 Km*	*13.451.646.000,00*	*APBD*	*P3*		*13.451.646.000,00*
Pengaspalan Jalan Hotmik Lapangan Bola Desa Maras Senang	*Bakam*	*1 Km*	*2.069.484.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.069.484.000,00*
Panjang Jalan Desa Di Kecamatan Bakam	*Bakam*	*10 Km*	*20.694.840.000,00*	*APBD*	*P3*		*20.694.840.000,00*

Peningkatan Jalan Dalam Desa Bukit Layang	*Bakam*	*1,5 km*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Cung fo Bulit Layang	*Bakam*	*450 m*	*600.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*600.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dempo Bukit Layang	*Bakam*	*1,145 km*	*1.375.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.375.000.000,00*
Peningkatan Jalan Rinjani Bukit Layang	*Bakam*	*500 m*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*700.000.000,00*
Peningkatan Jalan Kerinci Bukit Layang	*Bakam*	*650 m*	*865.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*865.000.000,00*
Peningkatan Jalan Pasiran Bukit Layang	*Bakam*	*380 m*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*500.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Mabat	*Bakam*	*1,5 km*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Desa Mabat	*Bakam*	*1,3 km*	*1.700.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.700.000.000,00*
Peningkatan Jalan Gg.Balai Desa Mabat	*Bakam*	*300 m*	*420.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*420.000.000,00*
Peningkatan Jalan Baru Desa Mabat	*Bakam*	*500 m*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*700.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Mangka	*Bakam*	*1,5km*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Gg.Wahi Desa Mangka	*Bakam*	*1 km*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Mangka	*Bakam*	*500m*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*700.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Kapuk	*Bakam*	*1,5km*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Air Metos Desa Kapuk	*Bakam*	*420m*	*1.150.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.150.000.000,00*
Peningkatan Jalan Remaja Desa Kapuk	*Bakam*	*160m*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*200.000.000,00*
Peningkatan Jalan Air Upat Desa Kapuk	*Bakam*	*400m*	*535.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*535.000.000,00*
Peningkatan Jalan Kuper Desa Kapuk	*Bakam*	*475m*	*650.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*650.000.000,00*
Peningkatan Jalan Desa Kapuk	*Bakam*	*200m*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*300.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Dalil	*Bakam*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Toduh Desa Dalil	*Bakam*	*400m*	*535.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*535.000.000,00*
Peningkatan Jalan Sekolah Desa Dalil	*Bakam*	*760m*	*1.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.000.000.000,00*
Peningkatan Jalan Baru Desa Dalil	*Bakam*	*180m*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*200.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Desa Dalil	*Bakam*	*1.400m*	*1.800.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.800.000.000,00*
Peningkatan Jalan Dalam Desa Tiang Tara	*Bakam*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan Lingkar Deret Desa Tiang Tara	*Bakam*	*1.500m*	*2.100.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.100.000.000,00*
Peningkatan Jalan SD No.06 Desa Tiang Tara	*Bakam*	*1.000m*	*1.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.400.000.000,00*
Peningkatan Jalan Paket III Desa Tiang Tara	*Bakam*	*5.000m*	*6.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*6.500.000.000,00*

		Peningkatann Jalan Air Merapin Desa Tiang Tara	Bakam	500m	700.000.000,00	APBD	P3		700.000.000,00
		Peningkatan Jalan Dalam Desa Marah Senang	Bakam	1.500m	2.100.000.000,00	APBD	P3		2.100.000.000,00
		Peningkatan Jalan Kusunan Desa Marah Senang	Bakam	1.000m	1.400.000.000,00	APBD	P3		1.400.000.000,00
		Peningkatan Jalan Lapangan Bola Desa Marah Senang	Bakam	2.000m	2.800.000.000,00	APBD	P3		2.800.000.000,00
		Peingkatan Jalan Dalam Desa Bakam	Bakam	1.500m	2.100.000.000,00	APBD	P3		2.100.000.000,00
		Peningkatan Jalan Aek Carak	Bakam	3.000m	4.200.000.000,00	APBD	P3		4.200.000.000,00
		Peningkatan Jalan Dalam Desa Neknang	Bakam	1.500m	2.100.000.000,00	APBD	P3		2.100.000.000,00
		Peningkatan Jalan Gang Madrasah Desa Neknang	Bakam	1.000m	1.400.000.000,00	APBD	P3		1.400.000.000,00
		Peningkatan Jalan Gang TPU Desa Neknang	Bakam	750m	1.100.000.000,00	APBD	P3		1.100.000.000,00
		Peningkatan Jalan Gang Ewok I,II	Bakam	1.450m	1.900.000.000,00	APBD	P3		1.900.000.000,00
		Peningkatan Jalan Gang SD.07	Bakam	1.000m	1.400.000.000,00	APBD	P3		1.400.000.000,00
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan Kenanga Permai Gg. Garuda RT. 02 & Lingk. Kenanga Permai ke Permukiman Warga	Sungailiat	1Km	240.416.000,00	APBD	P3	5 km	240.416.000,00
		Panjang jalan RT.01 Jl.Tb.23 Tunas Kelapa	Sungailiat	0,2 Km		APBD	P3	1 km	-
		Panjang jalan RT.02 Tunas Kelapa	Sungailiat	1 Paket		APBD	P3	1 Paket	-
		Panjang jalan RT.01 Gg.Slamet Tunas Kelapa	Sungailiat	0,4 Km		APBD	P3	0,4 Km	-
		Jl. Pahlawan 12 RT 01	Sungailiat	0,07 Km		APBD	P3	0,07 Km	-
		Jl. Sekolah SD Harapan RT 06	Sungailiat	0,1 Km		APBD	P3	0,1 Km	-
		RT 01 Lingkungan Air Kantung	Sungailiat	1 Paket		APBD	P3	1 Paket	-
		RT 05 Lingkungan Air Kantung	Sungailiat	1 Paket		APBD	P3	1 Paket	-
		Rehabilitasi Jalan aspal Gg. Malabar RT 02 Sudi Mampir	Sungailiat	0,1 Km		APBD	P3	0,1 Km	-
		Panjang Jalan Gang Kelinci III, Parit IV Kuday	Sungailiat	0,823 Km		APBD	P3	1 Km	-
		Panjang jalan di Kecamatan Sungailiat yang Direhabilitasi	Sungailiat	10 Km		APBD	P3	10 Km	-
		Panjang jalan rt 01 dan 16 Komplek Jawa 1 Air Duren	Pemali	2 Km	400.000.000,00	APBD	P3	2 Km	400.000.000,00
		Panjang jalan di Kecamatan Pemali yang Direhabilitasi	Pemali	10 Km		APBD	P3	10 Km	-
		Rehabilitasi Jalan Lingkar Dusun Rambang	Riau Silip	1 Paket	800.000.000,00	APBD	P3	1 Paket	800.000.000,00
		Rehap Jalan Raya Pangkal Niur Lama ke Tiang Tara Desa Banyuasin	Riau Silip	1 Paket		APBD	P3	1 Paket	-
		Perbaikan Jalan Bio Air Antu	Riau Silip	1 Paket		APBD	P3	1 Paket	-
		Panjang jalan di Kecamatan Riau Silip yang Direhabilitasi	Riau Silip	1 Paket		APBD	P3	8 meter	1.720.000.000,00

Rehab Aspal Jalan Terusan Panji Pasir dan Jalan Komplek Perumnas RT. 01 Lingkungan VI, RT. 02 Lingkungan VII	*Belinyu*	*1,15 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*70 meter*	*15.050.000.000,00*
Rehab Aspal Jalan Kampung Jawa RT. 01 Lingkungan VIII	*Belinyu*	*0,35 Km*		*APBD*	*P3*	*20 meter*	*4.300.000.000,00*
Rehab Aspal Jalan SMPN 2 sampai belakang Kantor Camat Lingkungan V	*Belinyu*	*3 Km*		*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
Rehab Aspal Jalan Panji Pasir sampai Kusam Lingkungan VI	*Belinyu*	*1 Km*		*APBD*	*P3*	*40 meter*	*8.600.000.000,00*
Rehab dan Hot Mix Aspal Jalan Swadaya RT. 01 Lingkungan VI	*Belinyu*	*0,3 Km*		*APBD*	*P3*	*30 meter*	*6.450.000.000,00*
Panjang jalan di Kecamatan Belinyu yang Direhabilitasi	*Belinyu*	*10 Km*		*APBD*	*P3*	*50 meter*	*10.750.000.000,00*
Panjang jalan Cengel - Jurung	*Merawang*	*1 Km*	*10.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*14 meter*	*3.010.000.000,00*
Panjang jalan R. Wawan -Kebun Sawit Jurung	*Merawang*	*1 Km*		*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
Panjang jalan Belakang R. Sarjono - R. Kandar RT 01 Jurung	*Merawang*	*0,5 Km*		*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
Rehab berat jalan tembus Kp. Sinli - Kp. Prepat Jurung	*Merawang*	*1,5 Km*		*APBD*	*P3*	*1 paket*	*35.000.000.000,00*
Rehab Jalan JUT Lahan Beni menuju Sawit Rudi Dusun 02 Jada Bahrin	*Merawang*	*1,5 Km*		*APBD*	*P3*	*1,5 Km*	-
Panjang jalan di Kecamatan Merawang yang Direhabilitasi	*Merawang*	*10 Km*		*APBD*	*P3*	*10 Km*	-
Panjang jalan Puru Kota Kapur (Dusun 1, 2, 3, 4)	*Mendo Barat*	*10 Km*		*APBD*	*P3*		-
Rehab jalan bireah Kemuja (RT 6 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*2 Km*		*APBD*	*P3*		-
Rehab menuju jalan stain Paya Benua	*Mendo Barat*	*1 Paket*		*APBD*	*P3*		-
Rehab pengaspalan jalan PNPM Desa Mendo dan plat deuker	*Mendo Barat*	*1 Km*		*APBD*	*P3*		-
Rehab jalan air penik Mendo	*Mendo Barat*	*0,15 Km*		*APBD*	*P3*		-
Panjang jalan di Kecamatan Mendo Barat yang Direhabilitasi	*Mendo Barat*	*10 Km*		*APBD*	*P3*		-
Panjang jalan Tanah Puru Desa Nibung	*Puding Besar*	*4 Km*	*961.664.000,00*	*APBD*	*P3*		*961.664.000,00*
Rehab Berat Jalan TTMD ke Balun Ijuk RT 07 Dusun IV Puding Besar	*Puding Besar*	*17 Km*		*APBD*	*P3*		-
Rehab Berat Jalan TTMD Ds. Puding Besar	*Puding Besar*	*1 Paket*		*APBD*	*P3*		-
Rehab Aspal Gang Desa Dusun 1,2,3 Labu	*Puding Besar*	*1,5 Km*		*APBD*	*P3*		-
Kegiatan Rehap Aspal Baru dan Pengaspalan Jalan Sekolah SD 06 Desa Labu	*Puding Besar*	*1 Paket*		*APBD*	*P3*		-
Rehab Berat Jalan Sawah JUT Dusun 1 Tanah Bawah	*Puding Besar*	*1,5 Km*		*APBD*	*P3*		-
Rehab Jalan Lingkar Desa Dusun II Saing	*Puding Besar*	*1 Paket*		*APBD*	*P3*		-

		Panjang jalan di Kecamatan Puding Besar yang Direhabilitasi	*Puding Besar*	*10 Km*		*APBD*	*P3*		-
		Rehab Jalan Hotmik Samping Masjid Baru RT 01 Desa Kapuk	*Bakam*	*0,6 Km*		*APBD*	*P3*		-
		Panjang jalan di Kecamatan Bakam yang Direhabilitasi	*Bakam*	*10 Km*		*APBD*	*P3*		-
1.03.10.2.01.10	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan*	*Panjang jalan dalam kecamatan sungailiat yang dipelihara*	*Sungailiat*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 km*	*15.000.000.000,00*
		Perbaikan jalan enggano 1 dan 2	*Pemali*	*1Km*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1Km*	*1.500.000.000,00*
		Renovasi dan pengaspalan jalan raya pangkal layang serta pembangunan siring jalan raya dari tutut s/d Penyamun	*Pemali*	*5 Km*	*7.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*5 Km*	*7.500.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara	*Pemali*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang jalan Serandang RT 11 Dusun 3 - Jl. Peruang RT 10 Dusun 3 Desa Baturusa	*Merawang*	*2 Km*	*3.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Km*	*3.000.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara	*Merawang*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara	*Mendo Barat*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang Jalan Bedukang	*Riau Silip*	*3 Km*	*4.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3 Km*	*4.500.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara	*Riau Silip*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang jalan Klenteng Kuto Panji Lingk. VII A	*Belinyu*	*2Km*	*3.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2Km*	*3.000.000.000,00*
		Pemeliharaan/Rehab Jalan Aspal Jl. Jenderal Sudirman Gg. MTs Al-Istiqomah, Jl. Cut Nyak Dien Lk. III, Jl. Bukit Tani Lk. IV, Jl. Kenanga/Kelenteng Lk. V, Jl. Damai, Jl. Pahlawan 12 Lk. VI dan Jl. Berok Lk. VII	*Belinyu*	*3,5 Km*	*5.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*3,5 Km*	*5.250.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Belinyu yang dipelihara	*Belinyu*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara	*Puding Besar*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara	*Bakam*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*10 Km*	*15.000.000.000,00*
1.03.10.2.01.11	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan*	*Panjang jalan dalam kecamatan Sungailiat yang dipelihara (Swakelola)*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara (Swakelola)	*Pemali*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Riau Silip yang dipelihara (Swakelola)	*Riau Silip*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Pemali yang dipelihara (Swakelola)	*Pemali*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Merawang yang dipelihara (Swakelola)	*Merawang*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*

		Panjang jalan dalam kecamatan Mendo Barat yang dipelihara (Swakelola)	*Mendo Barat*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Puding Besar yang dipelihara (Swakelola)	*Puding Besar*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
		Panjang jalan dalam kecamatan Bakam yang dipelihara (Swakelola)	*Bakam*	*1 Paket*	*677.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*677.000.000,00*
1.03.10.2.01.12	*Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan*	*Panjang Box Culvert Depan Koramil Riding Panjang*	*Merawang*	*3m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
		Panjang Jembatan Jalan Kelekak Desa Kimak	*Merawang*	*12m*	*3.300.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*70 meter*	*15.050.000.000,00*
		Panjang Box Culvert Gg. Attoybah RT 004 Dusun 3 Balun Ijuk	*Merawang*	*3m*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*20 meter*	*4.300.000.000,00*
		Panjang Box Culvert Raya Jurung (depan Kantor Desa) RT 02 Jurung	*Merawang*	*2 M*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
		Panjang Jembatan Jalan Kelekak Air Titi Tinggi P 14 M L 4 m Desa Kimak	*Merawang*	*14 M*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*40 meter*	*8.600.000.000,00*
		Panjang Jembatan Air Sani P 14 M L 4 m Desa Kimak	*Merawang*	*14 M*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*30 meter*	*6.450.000.000,00*
		Panjang Box Culvert Air Apung Desa Kimak	*Merawang*	*3m*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*50 meter*	*10.750.000.000,00*
		Pembuatan Jembatan Jl. TPU Dusun II RT 03 Dwi Makmur	*Merawang*	*7 M*	*1.925.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*14 meter*	*3.010.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Penghubung Jada Bahrin dan Kimak Dusun 01	*Merawang*	*100 M*	*27.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Merawang	*Merawang*	*30m*	*8.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8 meter*	*1.720.000.000,00*
		Pembangunan jembatan air bendung Zed (Dusun II)	*Mendo Barat*	*14m*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 paket*	*35.000.000.000,00*
		Pembangunan jembatan beton jalan TMD jalan penghubung puding besar - balunijuk (sawit desa) Kemuja	*Mendo Barat*	*6X5 M*	*1.650.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*6X5 M*	*1.650.000.000,00*
		Pembangunan permanen labuh air pandan - kota kapur Labuh Air Pandan	*Mendo Barat*	*6X80 M*	*1.650.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*6X80 M*	*1.650.000.000,00*
		Pembangunan platdeuker Jalan Simpang Air Duren Dusun 3 dan Dusun 4 Petaing Banjar		*10 x 2,5 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Pembangunan platdeuker Kace Timur (Dusun 1, 2, 4)	*Mendo Barat*	*2 M*	*68.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*70.040.000,00*
		Pembangunan jembatan Kace Timur (jalan bahagia rt 6 dusun 3 kawasan jalan pesantren al kahfi)	*Mendo Barat*	*16 m*	*4.400.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.532.000.000,00*
		Jembatan antara desa air buluh dan kace	*Mendo Barat*	*20m*	*5.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.665.000.000,00*
		Jembatan jalan usaha tani/sungai kajang air buluh	*Mendo Barat*	*12m*	*3.300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.399.000.000,00*
		Pembangunan jembatan Kace	*Mendo Barat*	*14m*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.965.500.000,00*
		Pembangunan jembatan Mendo	*Mendo Barat*	*60 M*	*22.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*23.175.000.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Mendo Barat	*Mendo Barat*	*50 M*	*13.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.162.500.000,00*

		Pembangunan Plat Penyeberangan Sawah I Desa Labu	*Puding Besar*	*6m*	*1.650.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.699.500.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Puding Besar	*Puding Besar*	*50 M*	*13.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.162.500.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Bakam	*Bakam*	*50 M*	*13.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.162.500.000,00*
1.03.10.2.01.16	*Sub Kegiatan Penggantian Jembatan*	*PEMBANGUNAN Jembatan DAN TALUT KELURAHAN JELITIK*	*Sungailiat*	*6 Meter*	*1.650.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*6 Meter*	*1.699.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan RT.04 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*15m*	*4.125.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*4.248.750.000,00*
		Pembangunan Jembatan Jalan Raya Lingk.Sinar Baru RT. 01	*Sungailiat*	*12 M x 4 M*	*3.300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.399.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Jalan Raya Lingk.Sinar Baru RT.06	*Sungailiat*	*12 M x 4 M*	*3.300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.399.000.000,00*
		Pembangunan jembatan RT. 001 dan RT. 006 Lingkungan Matras	*Sungailiat*	*9 M*	*2.475.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.549.250.000,00*
		Pembangunan Jembatan RT. 01 Komplek Pemda, RT. 05 Komplek Pemda, Jl. Swadaya Gang Raya	*Sungailiat*	*25 M*	*6.875.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*7.081.250.000,00*
		pembangunan Box Culvert/Perbaikan Gorong-gorong RT 7	*Sungailiat*	*4M*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*309.000.000,00*
		pembangunan Box Culvert/Perbaikan Gorong-gorong RT 1	*Sungailiat*	*4M*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*309.000.000,00*
		pembangunan Box Culvert/Perbaikan Gorong-gorong RT 8	*Sungailiat*	*2m*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*154.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan Plat Duiker Lingk. Air Kenanga	*Sungailiat*	*W : 5 M, L : 4 M, H : 5,55 M*	*1.375.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.416.250.000,00*
		Pembuatan Jembatan SD 24 Sungailiat Jl. Patimura	*Sungailiat*	*20 M*	*5.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.665.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Jl. Bhakti air hanyut, tembus lingk. Sri menanti	*Sungailiat*	*7 M*	*1.925.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.982.750.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Sungailiat	*Sungailiat*	*30m*	*8.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.497.500.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Pemali	*Pemali*	*30m*	*8.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.497.500.000,00*
		Peningkatan Jembatan Menjadi Jembatan Permanen Dusun Mapur	*Riau Silip*	*14m*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.965.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan TMMD / Tungkep RT 06 Dusun Riau	*Riau Silip*	*2 Unit (6m, 6m)*	*3.300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.399.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Dusun I (kawasan Air Beber)	*Riau Silip*	*10 M*	*2.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.832.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan Air Tenggiling Dusun Sidorejo	*Riau Silip*	*6X4 M*	*1.650.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*1.699.500.000,00*
		Jembatan Jalan Pantai Bedukang Dusun Bedukang	*Riau Silip*	*10m*	*2.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.832.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Riau Silip	*Riau Silip*	*30m*	*8.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.497.500.000,00*
		Peningkatan Jembatan Air Bekam Lingkungan IV Kel. Bukit Ketok	*Belinyu*	*3 Meter*	*104.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*107.120.000,00*

		Peningkatan Jembatan Pasir Putih Parit 26 Lama Desa Gunung Muda	*Belinyu*	*8X4 Meter*	*2.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.266.000.000,00*
		Peningkatan Jembatan Kampung Reget Desa Gunung Muda	*Belinyu*	*8X4 Meter*	*2.200.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*2.266.000.000,00*
		Pengadaan Jembatan Baru 4 x 8 M RT. 07 LK. III Kel. Air Asam	*Belinyu*	*4m*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*309.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Permanen Sungai Pejem Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan	*Belinyu*	*70 M*	*19.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*19.827.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan Permanen Perbatasan Dusun Pairt 14 dengan Dusun Air Baung Dusun Air Anget, Dusun Parit 14-Dsn. Air Baung	*Belinyu*	*20 M*	*5.500.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*5.665.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Pejem Utara dengan Desa Bintet Dusun Pejem Utara	*Belinyu*	*40 M*	*11.000.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*11.330.000.000,00*
		Pembangunan Jembatan Betong Dusun Bintet	*Belinyu*	*30 M*	*8.250.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*8.497.500.000,00*
		Pembangunan Jembatan Pantai Panjang RT. 009 Dusun Mengkubung	*Belinyu*	*50 M*	*13.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.162.500.000,00*
		Pembuatan Jembatan Permanen RT. 013 Bukit Bang Kadir	*Belinyu*	*14 M*	*3.850.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*3.965.500.000,00*
		Panjang Jembatan dan Plaat Duikers di Kecamatan Belinyu	*Belinyu*	*50 M*	*13.750.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*14.162.500.000,00*
1.03.10.2.01.18	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan*	*Perbaikan Jembatan RT.02 Lingk.Surya Timur*	*Sungailiat*	*1 Unit*		*APBD*	*P3*	*1 Unit*	*0,00*
		Perbaikan Jembatan Masjid Al-falah RT.03 Jl.Indah Jaya Lingk .Limbang Jaya	*Sungailiat*	*1 Unit*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Rehab Plat Deker Jalan Raya Kr Panjang Rt. 02 Dsn Kr. Panjang	*Sungailiat*	*6 X 3 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Sungailiat yg Direhabilitasi	*Sungailiat*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Pemali yg Direhabilitasi	*Pemali*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Riau Silip yg Direhabilitasi	*Riau Silip*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Perbaikan Jembatan Parit II Lingkungan V Kel. Bukit Ketok	*Belinyu*	*1 Unit*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Belinyu yg Direhabilitasi	*Belinyu*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Merawang yg Direhabilitasi	*Merawang*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Rehab jembatan air telajan Petaling (RT 02 Dusun 2)	*Mendo Barat*	*1 Paket*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Rehab platdeuker jalan kabupaten (banjir) Paya Benua	*Mendo Barat*	*3 Unit*		*APBD*	*P3*		*0,00*

		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Mendo Barat yg Direhabilitasi	*Mendo Barat*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Puding Besar yg Direhabilitasi	*Puding Besar*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Bakam yg Direhabilitasi	*Bakam*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
1.03.10.2.01.19	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan*	*Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Sungailiat yg Terpelihara (Swakelola)*	*Sungailiat*	*10 M*		*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Pemali yg Terpelihara (Swakelola)	*Pemali*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Riau Silip yg Terpelihara (Swakelola)	*Riau Silip*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Belinyu yg Terpelihara (Swakelola)	*Belinyu*	*1 Unit*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Merawang yg Terpelihara (Swakelola)	*Merawang*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Mendo Barat yg Terpelihara (Swakelola)	*Mendo Barat*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Puding Besar yg Terpelihara (Swakelola)	*Puding Besar*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Bakam yg Terpelihara (Swakelola)	*Bakam*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
1.03.10.2.01.20	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan*	*Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Sungailiat yg Terpelihara*	*Sungailiat*	*10 M*		*APBD*	*P3*	*1 Paket*	*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Pemali yg Terpelihara	*Pemali*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Riau Silip yg Terpelihara	*Riau Silip*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Pemeliharaan Jembatan Jalan Kapten Tendean Lingkungan VIII Kel. Kuto Panji	*Belinyu*	*1 Unit*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Pemeliharaan Jembatan Kecil, Berem RT. 02 Lingkungan VIII Kel. Kuto Panji	*Belinyu*	*2 Km*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Belinyu yg Terpelihara	*Belinyu*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Merawang yg Terpelihara	*Merawang*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Mendo Barat yg Terpelihara	*Mendo Barat*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Puding Besar yg Terpelihara	*Puding Besar*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
		Panjang Jembatan, Plaat Duikers & Box Culvert di Kecamatan Bakam yg Terpelihara	*Bakam*	*10 M*		*APBD*	*P3*		*0,00*
JUMLAH					**2.385.170.919.028,00**				**2.497.741.428.204,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1:04:02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**750.000.000,00**				**825.000.000,00**
		Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi		**80,25%**	**750.000.000,00**			**100,00%**	**825.000.000,00**
01.04.02.2.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**Persentase rumah yang diperbaiki**	**Kab. Bangka**	**100%**	**750.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**825.000.000,00**
01.04.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana*	*Persentase rumah yang diperbaiki*	*Kab. Bangka*	*100%*	*750.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 unit*	*825.000.000,00*
1:04:03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH**				**188.739.350,00**				**204.113.285,00**
		Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani		**50,00%**	**188.739.350,00**			**65,00%**	**204.113.285,00**
01.04.03.2.02	**Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase rumah yang memiliki akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang layak**	**Kab. Bangka**		**188.739.350,00**	APBD	P1		**204.113.285,00**
01.04.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman*	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*103.739.350,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*114.113.285,00*
01.04.03.2.02.04	*Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh*	*Persentase Rumah Tangga yang Peduli Pencegahan Kumuh*	*Kab. Bangka*	*100,00%*	*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*90.000.000,00*
1:04:04	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILISASI UMUM (PSU)**				**2.385.000.000,00**				**2.155.516.600,00**
		Persentase rumah yang memiliki akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang layak		**100,00%**	**2.385.000.000,00**			**100,00%**	**2.155.516.600,00**
01.04.04.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase rumah yang memiliki akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang layak**	**Kab. Bangka**		**2.385.000.000,00**	APBD	P1		**2.155.516.600,00**
01.04.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi*	*Jumlah Sambungan Rumah*	*Kab. Bangka*	*500 SR*	*1.150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*500 SR*	*1.150.000.000,00*
		Jumlah Jamban		*115 unit*	*685.000.000,00*			*90 unit*	*455.516.600,00*

	Hunian	*Jumlah Perumahan yang memiliki PSU yang Layak*		*1 kawasan*	*550.000.000,00*			*1 kawasan*	*550.000.000,00*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
2:10:02	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**				**50.000.000,00**				**51.250.000,00**
		Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lokasi		**100,00%**	**50.000.000,00**			**100%**	**51.250.000,00**
2.10.02.2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Lokasi Yang Sesuai**	**Kab. Bangka**		**50.000.000,00**	APBD	P1		**51.250.000,00**
2.10.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha*	*Persentase Izin Lokasi Yang Sesuai*	*Kab. Bangka*	*100%*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*51.250.000,00*
2:10:04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				**100.000.000,00**				**102.500.000,00**
		Persentase Penurunan Konflik Pertanahan		**100,00%**	**100.000.000,00**			**100,00%**	**102.500.000,00**
02.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan**	**Kab. Bangka**	**100%**	**100.000.000,00**	APBD	P1		**102.500.000,00**
02.10.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah mediasi Konflik Pertanahan*	*Kab. Bangka*	*5 kasus*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 kasus*	*102.500.000,00*
2:10:05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**1.500.000.000,00**				**1.537.500.000,00**
		Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Terselesaikan		**100,00%**	**1.500.000.000,00**			**100,00%**	**1.537.500.000,00**
02.10.05.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum**	**Kab. Bangka**		**1.500.000.000,00**	APBD	P1		**1.537.500.000,00**
02.10.05.2.01.02	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Luas Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum*	*Kab. Bangka*	*10 Ha*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Ha*	*1.537.500.000,00*
2:10:10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**2.600.000.000,00**				**2.665.000.000,00**
		Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan		**28,50%**	**2.600.000.000,00**			**28,75%**	**2.665.000.000,00**

2.10.10.2.01	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas Tanah Pemda yang telah disertifikasi**			**2.600.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**2.665.000.000,00**
2.10.10.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*	*Jumlah bidang tanah Pemda yang didaftarkan*	*Kab. Bangka*	*5 Bidang Tanah*	*2.600.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Bidang Tanah*	*2.665.000.000,00*
1:04:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**5.173.051.200,00**				**5.682.681.345,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
1.04.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.04.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*8 Dokumen*	*15.000.000,00*			*8 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		**0%**	***3.986.901.600,00***			**0%**	***4.385.591.760,00***
1.04.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.986.901.600,00**			**100%**	**4.385.591.760,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.04.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.971.901.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.369.091.760,00*
1.04.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**999.847.200,00**				**1.099.831.920,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.04.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**999.847.200,00**	**APBD**	**P1**		**1.099.831.920,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							

		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
1.04.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*538.837.200,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*592.720.920,00*
1.04.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*61.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*67.881.000,00*
1.04.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*36.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*39.930.000,00*
1.04.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*106.480.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*117.128.000,00*
1.04.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*73.810.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*81.191.000,00*
1.04.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*182.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*200.981.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**171.302.400,00**			**73**	**180.757.665,00**
1.04.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**171.302.400,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**180.757.665,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
1.04.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*54 stel*	*41.863.500,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*38.374.875,00*
1.,04.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*54 stel*	*50.579.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*55.636.900,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 stel*				*20 Stel*	
1.04.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*7 orang (4 laki-laki, 3 perempuan)*	*78.859.900,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*86.745.890,00*
		JUMLAH			**12.746.790.550,00**				**13.223.561.230,00**
PRIORITAS II									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1:04:02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**1.911.138.211,00**				**2.102.252.033,00**
		Persentase Peningkatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah		**95,26%**	**1.911.138.211,00**			**96,80%**	**2.102.252.033,00**
	Kegiatan Pembangunan Rumah	**Persentase Fasilitasi Pendampingan Program BSPS**			**1.911.138.211,00**				**2.102.252.033,00**

	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR)	*Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni yang dibangun untuk MBR*	*Kab. Bangka*	*90 unit*	*1.911.138.211,00*	*DAK*	*P2*	*92 unit*	*2.102.252.033,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan/Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	*Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani*	*Kab. Bangka*	*30 unit*	*2.362.910.990,00*	*APBD Prov*	*P2*	*30 unit*	*2.102.252.033,00*
JUMLAH					**1.911.138.211,00**				**2.102.252.033,00**
PRIORITAS III									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1:04:02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**2.321.100.900,00**				**2.537.910.990,00**
		Persentase Peningkatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah		**95,26%**	**2.321.100.900,00**			**96,80%**	**2.537.910.990,00**
	Kegiatan Pembangunan Rumah	**Persentase Fasilitasi Pendampingan Program BSPS**			**2.321.100.900,00**				**2.537.910.990,00**
	Sub Kegiatan Pembangunan/Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	*Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani*		*30 unit*	*2.148.100.900,00*	*APBD*	*P3*	*30 unit*	*2.362.910.990,00*
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni yang dibangun untuk MBR*				*APBD*	*P3*		-
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	*Persentase Kepatuhan Pengembang terhadap Site Plan*		*1 dokumen*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*1 dokumen*	*25.000.000,00*
		Jumlah Database yang up to date dan Akuntabel		*1 dokumen*	*148.000.000,00*			*1 dokumen*	*150.000.000,00*
JUMLAH					**2.321.100.900,00**				**2.362.910.990,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**10.940.000.000,00**				**12.854.500.000,00**
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada		**13,00**	**10.940.000.000,00**			**7,40**	**12.854.500.000,00**
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak		**83,30**				**93,60**	
		Persentase Pengembangan Kapasitas Aparatur Satpol PP		**82,00**				**87,00**	
		Persentase Cakupan Satlinmas Inti		**85,19**				**90,12**	
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Kab. Bangka**		**1.235.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**2.829.500.000,00**
1.05.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Layanan Pengawalan, Pengamanan dan Penertiban di Kab. Bangka*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*450.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*450.000.000,00*
		Jumlah Mou dengan instansi Terkait	*Kab. Bangka*	*2 kali*				*2 kali*	
1.05.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Peserta Satlinmas dalam Penyelenggaraan Kantrantibmas*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.650.000.000,00*
		Jumlah Peserta Satlinmas dalam mengamankan Pemilu	*Kab. Bangka*	*1754 Orang*				*1754 Orang*	
1.05.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia*	*Jumlah Diklat Fungsional Satpol PP*	*Sungailiat*	*6 kali*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 kali*	*185.000.000,00*
		Jumlah senjata layak dipakai yang terpelihara	*Sungailiat*	*2 Unit*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*26.500.000,00*
		jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	*Sungailiat*	*1 paket*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*18.000.000,00*
		Jumlah Anggotoa Satpol PP yang memiliki sertifikat pelatihan teknis	*Sungailiat*	*15 Orang*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Orang*	*265.000.000,00*
		Jumlah personel Satpol PP yang memiliki sertifikat pelatihan	*Sungailiat*	*100 Orang*	*150.000.000,00*		*P1*	*100 Orang*	*150.000.000,00*
		Jumlah Kegiatan Kesamaptaan	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*50.000.000,00*		*P1*	*12 Bulan*	*85.000.000,00*

1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Jumlah Aktivitas Penegakkan Perda dan Perkada**			**9.555.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**9.875.000.000,00**
1.05.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota*	*Jumlah peserta sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Kab. Bangka*	*60 orang*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*60 orang*	*175.000.000,00*
1.05.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/walikota*	*Jumlah Pengawasan Perda/Perkada*	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*9.255.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*9.500.000.000,00*
		Laporan Satpol PP Peduli Pelajar	*Kab. Bangka*	*12 Laporan*				*12 Laporan*	
		Jumlah Razia ASN	*Kab. Bangka*	*12 bulan*				*12 bulan*	
		Jumlah Patroli	*Kab. Bangka*	*19710 Kali*				*19710 Kali*	
1.05.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/walikota*	*Jumlah Penyelidikan pelanggar Perda/Perkada*	*Kab. Bangka*		*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*200.000.000,00*
		Jumlah Penyidikan pelanggar Perda/Perkada	*Kab. Bangka*						
1.05.02.2.03	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota**	**Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan**		**6 orang**	**150.000.000,00**	**APBD**		**6 orang**	**150.000.000,00**
1.05.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	*Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan*	*Sungailiat*	*6 Orang*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 Orang*	*150.000.000,00*
		Jumlah rapat koordinasi sekretariat PPNS	*Sungailiat*	*12 kali*				*12 kali*	
1.05.04	**PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**			**100%**	**3.560.000.000,00**			**100%**	**4.165.000.000,00**
		Persentase Pencegahan Bahaya Kebakaran		**69,18**				**71,58**	
		Persentase Penanggulangan Pemadam Kebakaran		**100,00**				**100,00**	
		Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang tertangani		**78,00**				**86,00**	
1.05.04.2.01	**Kegiatan Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cakupan Pelayanan Bahaya Kebakaran**	**Kab. Bangka**	**12 Bulan**	**3.350.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**12 Bulan**	**3.930.000.000,00**
1.05.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Laporan edukasi Penanggulangan kebakaran pada sekolah di Kab. Bangka*	*Kab. Bangka*	*12 Laporan*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Laporan*	*275.000.000,00*
		Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dalam Penanggulangan Kebakaran	*Kab. Bangka*	*60 Orang*				*60 Orang*	
1.05.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pemadaman yang tertangani*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*1.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.750.000.000,00*
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam kebakaran yangtersedia		*1 Unit*	*450.000.000,00*			*1 Unit*	*520.000.000,00*
		Jumlah Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang diadakan		*21 Unit*	*150.000.000,00*			*21 Unit*	*125.000.000,00*
		Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran yang diadakan		*137 Unit*	*600.000.000,00*			*137 Unit*	*650.000.000,00*

		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran yang dipelihara		*12 Bulan*	*300.000.000,00*			*12 Bulan*	*425.000.000,00*
1.05.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*	*Jumlah Layanan penyelamatan evakuasi Non Kebakaran*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 laporan*	*185.000.000,00*
1.05.04.2.03	**Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi**		**100%**	**210.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**235.000.000,00**
1.05.04.2.03.01	*Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran*	*Jumlah layanan investigasi penyebab kejadian kebakaran*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*210.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*235.000.000,00*
		Jumlah Layanan Pendataan dan pemeriksaan sarana prasarana Proteksi Kebakaran di Instansi/Perusahaan Kab. Bangka	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*				*12 Bulan*	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**7.642.966.800,00**				**7.694.048.480,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.05.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*	*15.000.000,00*			*.....Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
1.05.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*	*15.000.000,00*			*..... Dokumen*	*16.500.000,00*
				..... Dokumen				*..... Dokumen*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**5.552.966.800,00**			**0%**	**6.108.263.480,00**
1.05.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**5.552.966.800,00**			**100%**	**6.108.263.480,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.05.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*5.537.966.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*6.091.763.480,00*
1.05.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.654.500.000,00**				**1.106.735.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							

1.05.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**1.654.500.000,00**	**APBD**	**P1**		**1.106.735.000,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	**Sungailiat**			**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik	**Sungailiat**			**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik	**Sungailiat**			**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik	**Sungailiat**			**APBD**	**P1**		
1.05.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*140.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*144.200.000,00*
1.05.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*132.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*135.960.000,00*
1.05.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*28.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*29.355.000,00*
1.05.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*206.000.000,00*
1.05.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*77.250.000,00*
1.05.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*36.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*37.080.000,00*
1.05.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*255.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*263.165.000,00*
1.05.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Sungailiat*	*7 Unit*	*580.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
1.05.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia*	*Sungailiat*	*37 Unit*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*37 Unit*	*82.400.000,00*
1.05.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia*	*Sungailiat*	*21 Unit*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*21 Unit*	*82.400.000,00*
1.05.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*47.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*48.925.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**405.500.000,00**			**73**	**446.050.000,00**
1.05.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**405.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**446.050.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
1.05.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*360.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*396.550.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*350 Stel*				*20 Stel*	
1.05.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*2 Orang*	*45.000.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*49.500.000,00*
JUMLAH					**22.142.966.800,00**				**24.713.548.480,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2.390.000.000,00**				**2.437.800.000,00**
		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah		**30,00**	**2.390.000.000,00**			**40,00**	**2.437.800.000,00**
1.05.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mendapat informasi rawan bencana**	**Sungailiat**	**30%**	**125.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**127.500.000,00**
1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana kabupaten/kota yang disusun	Sungailiat	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	P1	1 Dokumen	51.000.000,00
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana}	Jumlah peserta sosialisasi dan simulasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sungailiat	800 Orang (L/P), 8 Kecamatan	75.000.000,00	APBD	P1	800 Orang (L/P), 8 Kecamatan	76.500.000,00
1.05.03.2.02	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase kejadian bencana yang tertangani**	**Sungailiat**	**100%**	**1.915.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.953.300.000,00**
1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Peserta Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sungailiat	100 orang (80 Laki-laki dan 20 Perempuan)	150.000.000,00	APBD	P1	100 orang (80 Laki-laki dan 20 Perempuan)	153.000.000,00
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana sesuai standar yang tersedia	Sungailiat	Mobil Operasional Rescue BPBD dan Kelengkapannya, Motor Trail 1 Unit, Rubber Boat 2 unit, Tenda Pengungsi 2 Unit dan Kelengkapannya,Perlengkapan Diving, Perlengkapan Climbing,	965.000.000,00	APBD	P1	Mobil Operasional Rescue BPBD dan Kelengkapannya, Motor Trail 1 Unit, Rubber Boat 2 unit, Tenda Pengungsi 2 Unit dan Kelengkapannya,Perlengkapan Diving, Perlengkapan Climbing,	984.300.000,00
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel yang kualified	Sungailiat	24 Personel TRC	800.000.000,00	APBD	P1	24 Personel TRC	816.000.000,00
1.05.03.2.03	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana**	**Sungailiat**	**100,00%**	**350.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**357.000.000,00**

1.05.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengerahan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan		100 Kali	200.000.000,00	APBD	P1	100 Kali	204.000.000,00
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sungailiat	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	P1	12 Bulan	153.000.000,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.172.106.800,00**				**4.462.479.580,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*15.000.000,00*			*.....Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*..... Dokumen*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*14 Dokumen*	*15.000.000,00*			*..... Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*..... Dokumen*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.190.436.800,00**			**0%**	**2.409.480.480,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.190.436.800,00**			**100%**	**2.409.480.480,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*2.175.436.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.392.980.480,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.811.970.000,00**				**1.866.329.100,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.05.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.811.970.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.866.329.100,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	

		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
1.05.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*311.970.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*321.329.100,00*
1.05.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*55.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*56.650.000,00*
1.05.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*30.900.000,00*
1.05.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*272.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*280.160.000,00*
1.05.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*86.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*88.580.000,00*
1.05.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*74.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*76.220.000,00*
1.05.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*201.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*207.030.000,00*
1.05.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia*	*Sungailiat*		*570.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*587.100.000,00*
		- Mobil Double Cabin		*1 Unit*				*1 Unit*	
		- Motor		*5 Unit*				*5 Unit*	
1.05.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*30 Unit*	*105.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*30 Unit*	*108.150.000,00*
1.05.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*17 Unit*	*92.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*17 Unit*	*94.760.000,00*
1.05.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*15.450.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**139.700.000,00**			**73**	**153.670.000,00**
1.05.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**139.700.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**153.670.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
1.05.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*50 Stel*	*37.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 Stel*	*41.250.000,00*
1.05.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan*	*Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia*	*Sungailiat*	*100 Stel*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 Stel*	*16.500.000,00*
1.05.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*37.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*40.920.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*50 Stel*				*50 Stel*	
1.05.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 Orang (3 Laki-laki dan 2 perempuan)*	*50.000.000,00*	APBD	P1	*5 Orang*	*55.000.000,00*
JUMLAH					**6.562.106.800,00**				**6.900.279.580,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL**				**Rp 530.029.000,00**				**Rp 545.929.870,00**
		Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial		**80,00**	**Rp 530.029.000,00**			**85,00**	**Rp 545.929.870,00**
1.06.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) Skala kabupaten**	**Kab. Bangka**	**100%**	**Rp 530.029.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**Rp 545.929.870,00**
1.06.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Bangka*	*Sungailiat*	*100%*	*Rp 347.630.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 358.058.900,00*
1.06.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)*	*Sungailiat*	*100%*	*Rp 52.805.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 54.389.150,00*
1.06.02.2.03.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah KUBE yang mandiri. (KUBE yang mendapatkan pelatihan)*	*Sungailiat*		*Rp 41.409.000,00*	*APBD*	*P1*		*Rp 42.651.270,00*
1.06.02.2.03.04	*Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 62.435.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 64.308.050,00*
		Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yg mengikuti Bimtek	*Sungailiat*	*30 LKS*				*30 LKS*	
		Jumlah Karang taruna yang mendapatkan bimbingan teknis	*Sungailiat*	*89 Karang Taruna*				*89 Karang Taruna*	
1.06.02.2.03.05	*Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*	*Persentase layanan jasa LK3 yang tertangani*	*Sungailiat*		*Rp 25.750.000,00*	*APBD*	*P1*		*Rp 26.522.500,00*
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**Rp 615.223.750,00**				**Rp 633.680.462,50**
		Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial		**50,00**	**Rp 615.223.750,00**			**55,00**	**Rp 633.680.462,50**

1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar**	**Kab. Bangka**	**100%**	**Rp 259.930.000,00**			**100%**	**Rp 267.727.900,00**
1.06.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan*	*Lansia yang menerima tambahan kebutuhan makanan*	*Kab. Bangka*		*Rp 93.710.000,00*				*Rp 96.521.300,00*
1.06.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu*	*Persentase alat bantu yang tersedia*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 72.700.000,00*			*100%*	*Rp 74.881.000,00*
1.06.04.2.01.05	*Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	*Persentase kader RBM dan Penyandang disabiltas yang di tingkatkan ketrampilannnya*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 93.520.000,00*				*Rp 96.325.600,00*
1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial**	**Kab. Bangka**		**Rp 355.293.750,00**	**APBD**	**P1**		**Rp 365.952.562,50**
1.06.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan*	*Persentase disabilitas yang menerima tambahan kebutuhan*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 120.298.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 123.906.940,00*
1.06.04.2.02.07	*Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	*Layanan anak yang berhadapan dengan hukum*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 54.178.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 55.803.340,00*
1.06.04.2.02.17	*Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan*	*Persentase Pemberian Layanan Rujukan*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 180.817.750,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 186.242.282,50*
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rujukan pendidikan		*10 orang*				*10 orang*	
		SLRT:(Layanan sosial dan rujukan yang di tindak lanjuti)		*1 dokumen*				*1 dokumen*	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**				**Rp 686.405.600,00**				**Rp 706.997.768,00**
		Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	**Kab. Bangka**	**60,00**	**Rp 686.405.600,00**			**65,00**	**Rp 706.997.768,00**
1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**				**Rp 52.745.000,00**				**Rp 54.327.350,00**
1.06.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan anak terlantar*	*Jumlah Rekomendasi Adopsi Anak*	*Kab. Bangka*	*5 orang*	*Rp 52.745.000,00*	*APBD*	*P1*		*Rp 54.327.350,00*
1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang di kelola**			**Rp 633.660.600,00**				**Rp 652.670.418,00**
1.06.05.2.02.01	*Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di data*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 196.850.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp 202.755.500,00*
		Jumlah dokumen data fakir miskin yang disusun		*1 dokumen*					
1.06.05.2.02.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Layanan Operasiaonal Pendampingan Program Keluarga Harapan yang tertangani*	*Kab. Bangka*	*28 orang*	*Rp 155.078.000,00*	*APBD*	*P1*	*28 orang*	*Rp 159.730.340,00*

		Persentase keluarga miskin penerima Bantuan Pangan Non Tunai	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp*	*85.000.000,00*			*100%*	*Rp* *87.550.000,00*
		Jumlah penerima bantuan kesejahteraan sosial Kube Pedesaan,Perkotaan,Rutilahu,dan E warong	*Kab. Bangka*		*Rp*	*58.935.000,00*				*Rp* *60.703.050,00*
		Jumlah bantuan usaha bagi fakir miskin	*Kab. Bangka*	*15 orang*	*Rp*	*137.797.600,00*			*15 orang*	*Rp* *141.931.528,00*
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**Rp**	**689.671.050,00**				**Rp** **710.361.181,50**
		Persentase Penanganan Bencana		**100%**	**Rp**	**689.671.050,00**			**100%**	**Rp** **710.361.181,50**
1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Kab. Bangka**	**100%**	**Rp**	**689.671.050,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**Rp** **710.361.181,50**
1.06.06.2.02.02	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	*Persentase layanan siaga bencana yang tertangani*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp*	*689.671.050,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp* *710.361.181,50*
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**Rp**	**154.500.000,00**				**Rp** **159.135.000,00**
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	**Sungailiat**	**100%**	**Rp**	**154.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**Rp** **159.135.000,00**
1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**	**Persentase Taman makam Pahlawan Nasional yang terpelihara**	**Sungailiat**	**100%**	**Rp**	**154.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**Rp** **159.135.000,00**
1.06.07.2.01.02	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota*	*Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik*	*Sungailiat*	*100%*	*Rp*	*154.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*Rp* *159.135.000,00*
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**5.002.679.400,00**				**5.415.094.498,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah								
1.06.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**		**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**					**100%**	
1.06.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*		*7.500.000,00*			*.....Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*					*..... Dokumen*	
1.06.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*		*7.500.000,00*			*..... Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah laporan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*					*..... Dokumen*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**		**3.678.508.800,00**			**0%**	**4.046.359.680,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**		**3.678.508.800,00**			**100%**	**4.046.359.680,00**

		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.663.508.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.029.859.680,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.255.040.600,00**				**1.292.691.818,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.06.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**1.255.040.600,00**	**APBD**	**P1**		**1.292.691.818,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
1.06.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*369.242.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*380.320.084,00*
1.06.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*97.545.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*100.471.350,00*
1.06.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*20.900.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*21.527.000,00*
1.06.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*236.413.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*243.505.390,00*
1.06.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*64.297.300,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*66.226.219,00*
1.06.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*14.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*14.626.000,00*
1.06.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*348.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*359.161.000,00*
1.06.01.1.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*35.792.500,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*36.866.275,00*
1.06.01.1.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*52.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*54.075.000,00*

1.06.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*15.913.500,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**54.130.000,00**			**73**	**59.543.000,00**
1.06.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**54.130.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**59.543.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
1.06.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*28.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*30.800.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*32 Stel*				*20 Stel*	
1.06.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*2 Orang*	*26.130.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*28.743.000,00*
JUMLAH					**7.678.508.800,00**				**8.171.198.780,00**
PRIORITAS II									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**Rp 100.000.000,00**				**Rp 110.000.000,00**
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	**Sungailiat**	**100%**	**Rp 100.000.000,00**	**APBD Prov**	**P1**	**100%**	**Rp 110.000.000,00**
1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**	**Persentase Taman makam Pahlawan Nasional yang terpelihara**	**Sungailiat**	**100%**	**Rp 100.000.000,00**	**APBD Prov**	**P1**	**100%**	**Rp 110.000.000,00**
1.06.07.2.01.01	*Sub Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota*	*Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang di Rehab*	*Sungailiat*	*100%*	*Rp 100.000.000,00*	*APBD Prov*	*P1*	*100%*	*110.000.000,00*
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**Rp 180.000.000,00**				**Rp 620.500.000,00**
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial			**Rp 180.000.000,00**	**APBD Prov**			**Rp 620.500.000,00**
1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS yang menerima bantuan**	**Kab. Bangka**		**Rp 180.000.000,00**	**APBD Prov**		**100%**	**Rp 620.500.000,00**
1.06.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu*	*Persentase alat bantu yang tersedia*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 180.000.000,00*	*APBD Prov*		*100%*	*198.000.000,00*
1.06.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga*	*Persentase Layanan Reunifikasi Keluarga yang diberikan*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp 50.000.000,00*	*APBD Prov*		*100%*	*55.000.000,00*

1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**Rp**	**50.000.000,00**				**Rp** **51.500.000,00**
		Persentase Penanganan Bencana		**100%**	**Rp**	**50.000.000,00**			**100%**	**Rp** **51.500.000,00**
1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat perlindungan sosial**	**Kab. Bangka**	**100%**	**Rp**	**50.000.000,00**	**APBD Prov**	**P1**	**100%**	**Rp** **51.500.000,00**
1.06.06.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan*	*Persentase makanan yang tersedia*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P1*	*100%*	*Rp* *51.500.000,00*
1.06.06.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Sandang*	*Persentase sandang yang tersedia*	*Kab. Bangka*	*100%*	*Rp*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P1*	*100%*	*Rp* *51.500.000,00*
JUMLAH						**330.000.000,00**				**110.000.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**199.981.200,00**				**205.980.636,00**
		Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		**8,60**	**199.981.200,00**			**8,72**	**205.980.636,00**
2.07.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**8 Kecamatan**		**199.981.200,00**	**APBD**			**205.980.636,00**
2.07.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*	*Jumlah calon tenaga kerja terlatih dengan kualifikasi terlatih /bersertifikasi*	*8 Kecamatan*		*199.981.200,00*				*205.980.636,00*
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**140.165.000,00**				**144.369.950,00**
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		**32,65**	**140.165.000,00**			**32,90**	**144.369.950,00**
2.07.04.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**8 Kecamatan**		**115.890.000,00**	**APBD**			**119.366.700,00**
2.07.04.2.03.01	*Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*	*Info lowongan pekerjaan yang diakses masyarakat*	*8 Kecamatan*		*49.515.000,00*	*APBD*			*51.000.450,00*
2.07.04.2.03.03	*Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja*	*Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan*	*8 Kecamatan*		*66.375.000,00*	*APBD*			*68.366.250,00*
2.07.04.2.05	**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**24.275.000,00**				**25.003.250,00**
2.07.04.2.05.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjanan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota*	*Jumlah TKA terdaftar*		*17 TKA*	*24.275.000,00*				*25.003.250,00*
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**231.070.000,00**				**238.002.100,00**
		Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan		**50,70**	**231.070.000,00**			**52,11**	**238.002.100,00**

2.07.05.2.01	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota**			**4 Dokumen**	**39.799.000,00**	**APBD**		**4 Dokumen**	**40.992.970,00**
2.07.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*	*Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan sarana-saran HI (PK, PP/PKB, fasilitas kesejahteraan pekerja, jamsos/BPJS, LKS Bipartit & aturan-aturan ketenagakerjaan*	SeKecamatan Kab. Bangka	16 Kasus	39.799.000,00	APBD		16 Kasus	*40.992.970,00*
2.07.05.2.02	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			**1 Laporan (15 Perusahaan)**	**191.271.000,00**			**1 Laporan (15 Perusahaan)**	**197.009.130,00**
2.07.05.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka*	*Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama melalui mediasi*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*66.238.000,00*				*68.225.140,00*
2.07.05.2.02.03	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non afiliasi*	*Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan sarana-sarana HI (PK, PP/PKB, fasilitas kesejahteraan pekerja, jamsos/BPJS, LKS Bipartit & aturan-aturan ketenagakerjaan*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*41.534.000,00*				*42.780.020,00*
2.07.05.2.02.04	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah saran dan masukan terhadap permasalahan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan sidang LKS Tripartit*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*83.499.000,00*				*86.003.970,00*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**571.181.000,00**				**588.316.430,00**
		Persentase Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk IKM		**15,63**	**571.181.000,00**			**15,83**	**588.316.430,00**
		Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM		**25,33**				**26,84**	
3.31.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**571.181.000,00**				**588.316.430,00**
3.31.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	*Jumlah IKM yang mendapat sertifikat SNI, GMP, HACCP, halal, desain kemasan dan merek, uji nutrisi, kadaluarsa serta Produk IKM yang diawasi BTP-nya*	*Kab. Bangka*		*571.181.000,00*				*588.316.430,00*
		Jumlah Sarana dan prasarana yang difasilitasi kepada IKM	*Kab. Bangka*						

		Jumlah IKM yang dilatih & mengikuti magang	*Kab. Bangka*						
		Jumlah Nilai Produksi IKM	*Kab. Bangka*						
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				**124.614.000,00**				**128.352.420,00**
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM		**15,63**	***124.614.000,00***			**15,83**	***128.352.420,00***
3.31.04.2.01	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**SeKecamatan Kab. Bangka**		**124.614.000,00**	**APBD**			**128.352.420,00**
3.31.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Infromasi Industri Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sentra dan Unit Usaha IKM*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		124.614.000,00	APBD			*128.352.420,00*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**2.387.155.000,00**				**2.458.769.650,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang representatif		**60,00**	**2.387.155.000,00**			**80,00**	**2.458.769.650,00**
3.30.03.2.01	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**2.387.155.000,00**				**2.458.769.650,00**
3.30.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*% Ketersediaan Radioland, tempat Parkir, Toilet, Pengelolaan sampah pasar yang memenuhi standar*	*Sungailliat*		*2.387.155.000,00*				*2.458.769.650,00*
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**147.605.000,00**				**152.033.150,00**
		Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting		**95,00**	**147.605.000,00**			**95,00**	**152.033.150,00**
		Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting		**95,00**				**95,00**	
3.30.04.2.02	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**147.605.000,00**				**152.033.150,00**
3.30.04.2.02.01	*Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*Jumlah bapokting yang terdistribusi*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*60.545.000,00*				*62.361.350,00*

3.30.04.2.02.02	*Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan*	*Jenis barang yang diawasi*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*46.690.000,00*				*48.090.700,00*
3.30.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	*Jumlah bapokting yang terdistribusi*	*SeKecamatan Kab. Bangka*		*40.370.000,00*				*41.581.100,00*
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**148.269.000,00**				
		Persentase Alat standar tera/tera ulang		**65,00**	**120.810.000,00**			**75,00**	
3.30.06.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**148.269.000,00**				
3.30.06.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang*	*Tersedianya Peralatan dan sarana penunjang tera/tera ulang*	SeKecamatan Kab. Bangka		120.810.000,00				*124.434.300,00*
3.30.06.2.01.02	*Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal*	*Tersedianya SDM penera dan pengawas tera*	SeKecamatan Kab. Bangka		27.459.000,00				*28.282.770,00*
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**8.151.780.100,00**				**8.824.979.840,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.07.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*	*15.000.000,00*			*.....Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*	*15.000.000,00*			*..... Dokumen*	*16.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**5.864.019.100,00**			**0%**	**6.450.421.010,00**
2.07.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**5.864.019.100,00**			**100%**	**6.450.421.010,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.07.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*5.849.019.100,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*6.433.921.010,00*
2.07.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*

		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.028.261.000,00**				**2.089.108.830,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.07.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**2.028.261.000,00**	**APBD**	**P1**		**2.089.108.830,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
2.07.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*1.003.792.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.033.906.275,00*
2.07.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*102.870.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*105.956.615,00*
2.07.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*17.950.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*18.488.500,00*
2.07.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*123.320.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*127.019.600,00*
2.07.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*151.133.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*155.666.990,00*
2.07.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*45.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*46.762.000,00*
2.07.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*383.855.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*395.370.650,00*
2.07.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit Gedung Dekranasda*	*199.940.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*205.938.200,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**229.500.000,00**			**73**	**252.450.000,00**
2.07.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**229.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**252.450.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	

2.07.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*132 Stel*	*99.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 Stel*	*109.340.000,00*
2.07.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*49.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*54.450.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 Stel*				*50 Stel*	
2.07.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*7 Orang*	*80.600.000,00*	APBD	P1	*5 Orang*	*88.660.000,00*
JUMLAH					**12.101.820.300,00**				**12.740.804.176,00**
PRIORITAS II									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**55.000.000,00**				**56.650.000,00**
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**55.000.000,00**				**56.650.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.07.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**55.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**56.650.000,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
2.07.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*		*55.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*.... Unit*	*56.650.000,00*
		Laptop		*5 unit*					*-*
		Printer		*4 unit*					*-*
		Kamera Online		*4 unit*					*-*
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**1.118.420.000,00**				**1.151.972.600,00**
		Persentase Tenaga Kerja yang kompeten		**27,22%**				**28,62%**	
2.07.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**8 Kecamatan**		**1.118.420.000,00**	**APBD Prov**	**P2**		**1.151.972.600,00**

2.07.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*	*Jumlah calon tenaga kerja terlatih dengan kualifikasi terlatih /bersertifikasi*	*8 Kecamatan*						-
		Seleksi dan Pembekalan Tingkat Kabupaten ASEAN Skill Competition (ASC) Utusan Pemerintah Kabupaten Bangka			*395.850.000,00*				*407.725.500,00*
		Pelatihan Kegiatan Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri			*300.000.000,00*				*309.000.000,00*
		Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)			*422.570.000,00*				*435.247.100,00*
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**27,22%**		**98.000.000,00**				**100.940.000,00**
		Persentase Pencari Kerja dan TKA yang ditempatkan	**27,22%**	**27,22%**	**10.674.934.000,00**			**28,62%**	**6.608.515.020,00**
2.07.04.2.05	**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**98.000.000,00**	**APBD Prov**	**P2**		**100.940.000,00**
2.07.04.2.05.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjanan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota*	*Jumlah TKA terdaftar (Sosialisasi dan Penerapan Peraturan Pemerintah tentang TKA)*			*98.000.000,00*				*100.940.000,00*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**1.300.000.000,00**				**1.184.500.000,00**
		Persentase Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk IKM		**29,12%**	**1.300.000.000,00**			**31,,62%**	**1.184.500.000,00**
		Persentase Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM							
3.31.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**1.300.000.000,00**		**P2**		**1.184.500.000,00**
3.31.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	*Jumlah IKM yang dilatih & mengikuti magang*	*Kab. Bangka*		*1.150.000.000,00*				*1.184.500.000,00*
		- Bimbingan Penerapan dan Sertifikat GMP	*Kab. Bangka*		*350.000.000,00*	*APBN*			
		- Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Baku Jamur	*Kab. Bangka*		*50.000.000,00*	*APBD Prov*			
		- Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Baku Lada	*Kab. Bangka*		*150.000.000,00*	***APBD Prov***			
		- Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Baku Ikan	*Kab. Bangka*		*100.000.000,00*	*APBD Prov*			
		- Pelatihan dari Daun (serat) Nanas	*Kab. Bangka*		*400.000.000,00*	*APBN*			

		- Pelatihan Kerajinan Tenun dari Lidi Kelapa Sawit	*Kab. Bangka*		*100.000.000,00*	*APBN*			
		Jumlah Nilai Produksi IKM (Pembinaan dan Pengembangan Produk OVOP)	*Kab. Bangka*		*150.000.000,00*	***APBD Prov***			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**4.153.514.000,00**				**45.952.420,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang representatif		**75,37%**	**4.153.514.000,00**			**82,60%**	**45.952.420,00**
3.30.03.2.01	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**4.153.514.000,00**				**45.952.420,00**
3.30.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*% Ketersediaan Radioland, tempat Parkir, Toilet, Pengelolaan sampah pasar yang memenuhi standar*	*Kab. Bangka*		*4.153.514.000,00*		***P2***		*4.278.119.420,00*
		- Revitalisasi Pasar Lama Belinyu			*4.000.000.000,00*	***DAK***			*4.120.000.000,00*
		- Pengadaan BPSK			*108.900.000,00*	***APBD Prov***			*112.167.000,00*
		- Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen			*44.614.000,00*	***APBD Prov***			*45.952.420,00*
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**3.950.000.000,00**				**4.068.500.000,00**
		Persentase Penurunan Penyelenggaraan Alat UTTP		**19,61%**	**3.950.000.000,00**			**17,32%**	**4.068.500.000,00**
3.30.06.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**3.950.000.000,00**				**4.068.500.000,00**
3.30.06.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang*	*Tersedianya Peralatan dan sarana penunjang tera/tera ulang*	Se Kecamatan Kab. Bangka		3.950.000.000,00	**DAK**	**P2**		*4.068.500.000,00*
		- Pembelian Peralatan Standar Kemetrologian			1.000.000.000,00				*1.030.000.000,00*
		- Pembelian Kendaraan Operasional Kemetrologian Roda Empat (Pelayanan Tipe I)			800.000.000,00				*824.000.000,00*
		- Pembelian Kendaraan Operasional Kemetrologian (Roda Dua)			150.000.000,00				*154.500.000,00*
		- Pembangunan Gedung Laboratorium Metrologi Legal			2.000.000.000,00				*2.060.000.000,00*
JUMLAH					**10.674.934.000,00**				**6.608.515.020,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.616.180.000,00**				**1.696.989.000,00**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**670.000.000,00**				**703.500.000,00**
		Persentase OPD yang menerapkan PPRG		**100**	**670.000.000,00**			**100**	**703.500.000,00**
2.08.02.2.01	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Hidup Perempuan**		**100,00%**	**100.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**105.000.000,00**
2.08.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	*Jumlah Peserta Bimtek Tentang Penguatan PUG*	*Sungailiat*	*80 Orang 60 Laki-laki 20 Perempuan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*80 Orang 60 Laki-laki 20 Perempuan*	*105.000.000,00*
		Jumlah Peserta Workshop PPRG	*Sungailiat*	*80 Orang 60 Laki-laki 20 Perempuan*				*80 Orang 60 Laki-laki 20 Perempuan*	
		Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
2.08.02.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam Kelembagaan**		**100,00%**	**540.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**567.000.000,00**
2.08.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*1. Cakupan Anggota Organisasi Wanita Yang Aktif*	*Kab.Bangka*	*15 Organisasi Wanita*	*520.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Organisasi Wanita*	*546.000.000,00*
		2. Jumlah Kesertaan Perempuan Dalam Lomba Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia		*70,00%*				*70,00%*	
		3. Jumlah Peserta Sosialisasi Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Publik		*50 Orang 10 Laki-laki 40 Perempuan*				*50 Orang 10 Laki-laki 40 Perempuan*	
2.08.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*Jumlah kelompok masyarakat yang dibina Tk. Kec, Desa/Kel*	*Kab.Bangka*		*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*21.000.000,00*
2.08.02.2.03	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta anak yang terlaksana**		**100,00%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**31.500.000,00**
2.08.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Forum Puspa Yang Dibentuk*	*8 Kecamatan*	*8*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8*	*31.500.000,00*
		Jumlah Frekuensi Pembinaan Forum Puspa	*8 Kecamatan*	*2 Kali*				*2 Kali*	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**100%**	**249.605.000,00**				**262.085.250,00**
		Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan		**100%**	**202.500.000,00**				**212.625.000,00**
2.08.03.2.01	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kesetaraan dan Kualitas Hidup Perempuan**		**100,00%**	**92.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**97.125.000,00**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Peningkatan pemberdayaan Perempuan*	*8 Kec*	*100,00%*	*65.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*68.250.000,00*
2.08.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Peserta Pembinaan FPKDRT*	*8 Kec*	*20*	*27.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*20*	*28.875.000,00*
2.08.03.2.03	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**		**100%**	**110.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**115.500.000,00**
2.08.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Tim Gusus Tugas Pemberantasan TPPO*	*8 Kec*	*20,00*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20,00*	*84.000.000,00*
		Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan & Pendampingan Kasus KDRT	*8 Kec*	*50 Orang 25 Laki-laki 25 Perempuan*				*50 Orang 25 Laki-laki 25 Perempuan*	
		Jumlah Peserta Workshop Pencatatan & Pelaporan Data Kekerasan Perempuan Dan Anak Yg Dilaksanakan	*8 Kec*	*80 Orang 40 Laki-laki 40 Perempuan*				*80 Orang 40 Laki-laki 40 Perempuan*	
		Jumlah Peserta Sosialisasi & Advokasi Aplikasi Siparasdara	*8 Kec*	*50 Orang 25 Laki-laki 25 Perempuan*				*50 Orang 25 Laki-laki 25 Perempuan*	
2.08.03.2.03.04	*Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Cakupan Data Kekerasan Thdp Perempuan Dan Anak Yang Dilayani*	*Sungailiat*	*100,00%*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*31.500.000,00*
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**157.105.000,00**				**164.960.250,00**
		Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan		**32,71**	**157.105.000,00**			**34,10**	**164.960.250,00**
2.08.04.2.01	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**130.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**136.500.000,00**
2.08.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Konseling Yang Dilakukan*	*8 Kecamatan*	*8 Kali*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Kali*	*31.500.000,00*
2.08.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Industri Rumahan Yang Aktif*	*8 Kecamatan*	*100 Pelaku Usaha*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 Pelaku Usaha*	*105.000.000,00*
2.08.04.2.03	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**27.105.000,00**	**APBD**	**P1**		**28.460.250,00**
2.08.04.2.03.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Konseling Yang Dilakukan*	*8 Kecamatan*	*8 Kali*	*27.105.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Kali*	*28.460.250,00*
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**35.000.000,00**				**36.750.000,00**
		Profile Gender Kabupaten		**100%**				**100%**	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.05.2.01	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**				**35.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**36.750.000,00**
2.08.05.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Buku Profil Gender*	*Sungailiat*	*5 Buku*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*36.750.000,00*
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**504.470.000,00**				**529.693.500,00**
		Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan		**100**	**504.470.000,00**			**100**	
2.08.06.2.01	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**162.630.000,00**	**APBD**	**P1**		**170.761.500,00**
2.08.06.2.01.02	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sosialisasi Kla Yang Dilaksanakan*	*Sungailiat*	*40 Orang 20 Laki laki 20 Perempuan*	*162.630.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Orang 20 Laki laki 20 Perempuan*	*170.761.500,00*
2.08.06.2.02	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan Pembentukan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak**		**100,00%**	**341.840.000,00**	**APBD**	**P1**		**358.932.000,00**
2.08.06.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah PATBM Desa Yang Terbentuk*	*Kab. Bangka*	*2 Desa/ Kecamatan*	*125.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Desa/ Kecamatan*	*131.250.000,00*
		Jumlah DEKELA Yang Terbentuk		*20 Desa*				*20 Desa*	
		Jumlah KELANA Yang Terbentuk		*2 Kecamatan*				*2 Kecamatan*	
		Jumlah Fasilitas Media Informasi Pemberdayaan Gender & Anak		*100,00%*				*100,00%*	
2.08.06.2.02.02	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Peserta Sosialisasi Konvensi Hak Anak*	*Sungailiat*	*100 Orang 55 Laki-laki 45 Perempuan*	*216.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 Orang 55 Laki-laki 45 Perempuan*	*227.682.000,00*
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.703.820.000,00**				
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**909.846.500,00**				**955.338.825,00**
		Rata-rata anak per keluarga		**1,62**	**909.846.500,00**			**1,58**	**955.338.825,00**
2.14.02.2.01	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**50.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**52.500.000,00**
2.14.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal*	*Jumlah Sekolah Kependudukan*	*Kab. Bangka*	*10 Sekolah*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*26.250.000,00*
2.14.02.2.01.13	*Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan*	*Jumlah Sosialisasi GDPK 5 aspek*	*Kab. Bangka*	*100,00%*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*26.250.000,00*
2.14.02.2.02	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**				**859.846.500,00**	**APBD**	**P1**		**902.838.825,00**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*	*Jumlah Buku Proyeksi Kependudukan*	*Kab. Bangka*	*8 Buah*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*31.500.000,00*
		Jumlah rumah data di kampung KB	*Sungailiat*	*2 Buah*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*21.000.000,00*
2.14.02.2.02.11	*Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*	*Tersedianya Data Keluarga*	*Kab. Bangka*	*100,00%*	*9.846.500,00*	*APBD*	*P1*		*10.338.825,00*
2.14.02.2.02.12	*Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	*Pendataan Keluarga*	*Kab. Bangka*	*100,00%*	*775.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*813.750.000,00*
2.14.02.2.02.13	*Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*		*8 Kecamatan*	*100,00%*	*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*10.500.000,00*
2.14.02.2.02.14	*Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK*		*8 Kecamatan*	*100,00%*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*15.750.000,00*
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**453.973.500,00**				**476.672.175,00**
		Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP		**17,88**	**453.973.500,00**			**18,22**	**476.672.175,00**
		Cakupan Peserta KB Aktif		**71,46**				**72,12**	
2.14.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**165.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**173.250.000,00**
2.14.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	*Persentase Terlaksananya Advokasi dan KIE ttg Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)*	*8 Kecamatan*	*100,00% 40 Laki-laki 40 Perempuan*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00% 40 Laki-laki 40 Perempuan*	*36.750.000,00*
2.14.03.2.01.04	*Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang*	*Cakupan Penyelenggaran KIE Program KB Melalui Pemutaran Film Keliling*	*8 Kecamatan*	*100,00%*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*31.500.000,00*
2.14.03.2.01.05	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional*	*Jumlah kategori lomba dalam peringatan harganas (8 Kategori)*	*Kab. Bangka*	*8 Kategori*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Kategori*	*105.000.000,00*
2.14.03.2.03	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PUS Akseptor KB MKJP**	**8 Kecamatan**		**238.973.500,00**	**APBD**	**P1**		**250.922.175,00**
		Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Terhadap Pasangan Usia Subur	**8 Kecamatan**						
2.14.03.2.03.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*1. Cakupan PUS Peserta KB MKJP*	*8 Kecamatan*	*14,50%*	*18.973.500,00*	*APBD*	*P1*	*14,50%*	*19.922.175,00*
		2. Cakupan Peserta KB Modern Aktif	*8 Kecamatan*	*70,00%*				*70,00%*	
		3. Cakupan PUS Peserta KB Medis Operasi Yang Dilayani	*8 Kecamatan*	*3,50%*				*3,50%*	
2.14.03.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	*Cakupan Pendistribusian Alokon Ke Faskes Pelayanan KB*			*-*	*APBD*	*P1*		*-*
2.14.03.2.03.08	*Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	*Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Akseptor KB Aktif*	*8 Kecamatan*	*100,00%*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*26.250.000,00*
2.14.03.2.03.09	*Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan*	*Terlaksananya Sosialisasi Pemilihan Metode Kontrasepsi Bagi PUS Muda*	*8 Kecamatan*	*100,00%*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*21.000.000,00*
2.14.03.2.03.11	*Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*	*1. Jumlah Pelayanan TKBK*	*8 Kecamatan*	*24 Kali*	*175.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*24 Kali*	*183.750.000,00*
		2. Jumlah Akseptor Baru dan Ulangan	*8 Kecamatan*	*38.015 Akseptor*				*38.015 Akseptor*	
		3. Cakupan Data Pasangan Usia Subur	*8 Kecamatan*	*90,00%*				*90,00%*	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Balai Penyuluh KB yang Aktif**	**8 Kecamatan**	**100,00%**	**50.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**52.500.000,00**
2.14.03.2.04.02	*Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	*Persentase Kampung KB Yang Terbentuk*		*100,00%*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*26.250.000,00*
2.14.03.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB*	*Persentase Penyuluhan KKBPK*	*8 Balai*	*100,00%*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100,00%*	*26.250.000,00*
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**340.000.000,00**				**357.000.000,00**
		Cakupan Anggota Kelompok BKB ber KB		**75,67**	**340.000.000,00**			**77,75**	**357.000.000,00**
		Cakupan Anggota Kelompok BKR ber KB		**87,38**				**89,50**	
		Cakupan Anggota Kelompok BKL ber KB		**75,27**				**79,25**	
		UPPKS di setiap Desa/ kelurahan		**70,77**				**80,24**	
2.14.04.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui UPPKS**		**100,00%**	**310.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**325.500.000,00**
		Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan PIK-Remaja		**100,00%**				**100,00%**	
2.14.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)*	*1. Jumlah Pembentukan Kelompok UPPKS Di Desa/Kelurahan*	*8 Kecamatan*	*55,55%*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*55,55%*	*105.000.000,00*
		2. Jumlah Terbentuknya PIK-Remaja	*8 Kecamatan*	*30,00%*				*30,00%*	
		3. Jumlah Terbentuknya Kelompok Keg. Bina Keluarga Balita,Remaja & Lansia	*8 Kecamatan*	*2 BKB 2 BKR 2 BKL*				*2 BKB 2 BKR 2 BKL*	
2.14.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	*Jumlah Ketersediaan Alat Peraga Edukasi Kelompok Keg. Bina Keluarga Balita,Remaja & Lansia*			*-*	*APBD*	*P1*		*-*
2.14.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	*Status Kualitas PIK-Remaja*	*8 Kecamatan*	*100,00%*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*42.000.000,00*
2.14.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	*Persentase Konselor Sebaya Kesehatan reproduksi (KRR) Yang Terlatih*	*8 Kecamatan*	*40 Orang 20 Laki laki 20 Perempuan*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Orang 20 Laki laki 20 Perempuan*	*26.250.000,00*
2.14.04.2.01.07	*Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	*1. Cakupan PUS Anggota UPPKS Berstatus KB Aktif*	*8 Kecamatan*	*40,85%*	*45.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*40,85%*	*47.250.000,00*
		2. Cakupan PUS Anggota Kelompok Keg. Bina Keluarga Balita,Remaja & Lansia yg Ber-KB	*8 Kecamatan*	*37,00%*				*37,00%*	
2.14.04.2.01.08	*Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)*	*Persentase Peran Remaja yg Aktif Memajukan GenRe (Generasi Berencana)*	*8 Kecamatan*	*30,00%*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*30,00%*	*105.000.000,00*

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga**		**100,00%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**31.500.000,00**
2.14.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	*Status Pengembangan Kel. Kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif*	*8 Kecamatan*	*Aktif*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*31.500.000,00*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**5.526.034.000,00**				**5.801.835.700,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**30**	**20.000.000,00**			**30**	**20.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12,22**				**13,00**	
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**		**100%**	**20.000.000,00**			**100%**	**20.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Dokumen*	*10.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*14 Dokumen*	*10.000.000,00*			*14 Dokumen*	*10.000.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**4.021.034.000,00**			**0%**	**4.222.085.700,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**4.021.034.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**4.222.085.700,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*		*12 Bulan*	*4.006.034.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.206.335.700,00*
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*		*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*15.750.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**70**	**1.460.400.000,00**			**70**	**1.533.420.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**75**				**75**	
	Kegiatan Administrasi Umum	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**1.460.400.000,00**			**100%**	**1.533.420.000,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*569.320.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*597.786.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*36.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*37.800.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*15.750.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*122.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*128.100.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*83.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*87.990.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*14.280.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*14.994.000,00*
	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*84.000.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	*Tersedianya ATK Kantor*	*Sungailiat*	*1 Tahun*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Tahun*	*21.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*Printer Epson 1 Unit Leptop 1 Unit*	*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*Printer Epson 1 Unit Leptop 1 Unit*	*10.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	*Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*262.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	*Jumlah mebeulair yang diadakan*	*Sungailiat*	*Meja 1/2 Biro 3 Unit Kursi Kerja 3 Buah*	*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*Meja 1/2 Biro 3 Unit Kursi Kerja 3 Buah*	*10.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	*Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*262.500.000,00*
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	*Jumlah gedung Kantor yang direhab*	*Sungailiat*	*1 Unit*	-	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	-
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**24.600.000,00**				**25.830.000,00**
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**		**40%**	**24.600.000,00**			**40%**	**25.830.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**80%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**80%**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*62 Stel*	-				-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	*1. Jumlah pakaian olah raga yang tersedia 2. Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia*	*Sungailiat*	*62 Stel 20 Stel*	*9.600.000,00*			*62 Stel 20 Stel*	*10.080.000,00*
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 Orang*	*15.000.000,00*			*5 Orang*	*15.750.000,00*
	JUMLAH				**8.846.034.000,00**				**9.287.835.700,00**

PRIORITAS II

08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**140.000.000,00**				**-**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**76,48**	**140.000.000,00**				**0**
		Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan		**100**					**0**
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				**60.000.000,00**				**0**
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Sosialisasi Puspaga, Desa Layak Anak, Kelurahan Layak Anak*	*Kab. Bangka*	*3 kali*	*60.000.000,00*	APBD Prov	*P2*	-	0
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				**80.000.000,00**				**0**
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah peserta Pelatihan Duta Anak*	*Kab. Bangka*	*40 anak*	*40.000.000,00*	APBD Prov	*P2*	-	0
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peserta Bimtek Konvensi Hak Anak*	*Kab. Bangka*	*40 anak*	*40.000.000,00*	APBD Prov	*P2*	-	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**3.532.544.000,00**				**3.709.171.200,00**
		Cakupan Anggota Kelompok BKB ber KB		**75,67**	**3.532.544.000,00**			**77,75**	**3.709.171.200,00**
		Cakupan Anggota Kelompok BKR ber KB		**87,38**				**89,50**	
		Cakupan Anggota Kelompok BKL ber KB		**75,27**				**79,25**	
		UPPKS di setiap Desa/ kelurahan		**70,77**				**80,24**	
2.14.03.2.02	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**3.532.544.000,00**				**3.709.171.200,00**
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Ratio PKB/PLKB Di Setiap Desa/Kelurahan			2.399.544.000,00		P2		2.519.521.200,00
2.14.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Kader KB Terampil Di Setiap Desa/Kelurahan			1.133.000.000,00		P2		1.189.650.000,00
	JUMLAH				**3.672.544.000,00**				**3.709.171.200,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : **DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PANGAN				**1.510.360.000,00**				**1.747.287.800,00**
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**768.330.000,00**				**845.163.000,00**
		Persentase Kelancaran Distribusi Pangan		**76,92**	**768.330.000,00**			**84,62**	**845.163.000,00**
		Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah		**14,65**				**16,6**	
		Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian		**1,12**				**1,45**	
		Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah		**3,25**				**3,50**	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah Data Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok (data)**		**12 dok**	**609.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**669.900.000,00**
	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	*Jumlah Data Informasi Harga pangan yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	*12 dok*	*180.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 dok*	*198.000.000,00*
		Jumlah Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan yang dilaksanakan		*4 kali*				*4 kali*	
		Jumlah Monitoring Kelembaga Penyedia Bahan Pangan yang dilaksanakan		*4 kali*				*4 kali*	
		Jumlah Data Neraca Bahan Makanan yang disusun		*1 dok*				*1 dok*	
		Jumlah Data Ketersediaan Beras yang disusun		*12 data*				*12 data*	
		Jumlah Data Prognosa Ketersediaan Pangan menjelangan HBKN yang disusun		*12 data*				*12 data*	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Bebasis Sumber Daya lokal	*Jumlah Sosialisasi konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang yang dilaksanakan*	*8 kecamatan*	*8 kali*	*59.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 kali*	*64.900.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sosialisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga yang dilaksanakan		*62 kali*				*62 kali*	
		Jumlah Kelompok yang dilatih menyusun menu beragam dan bergizi seimbang		*62 kelompok*				*62 kelompok*	
		Jumlah kegiatan Promosi olahan pangan lokal yang dilaksanakan		*8 kali*				*8 kali*	
	Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Data distribusi bahan pangan pokok yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	*1 dok*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dok*	*66.000.000,00*
		Jumlah Data toko/warung penyedia bahan pangan pokok yang disusun		*1 dok*				*1 dok*	
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Lainnya	*Jumlah Data pematantauan harga pangan pokok yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	*12 data*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 data*	*38.500.000,00*
		Jumlah Data analisis stabilitas harga pangan pokok yang disusun		*4 data*				*4 data*	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	*Jumlah Data analisis rantai distribusi pangan pokok yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	*1 dok*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dok*	*27.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masayarakat dan Toko Tani Indonesia	*Jumlah Toko Tani Indonesia yang dikembangkan*	*Kabupaten Bangka*	*1 toko tani*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 toko tani*	*275.000.000,00*
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Rasio Tingkat Konsumsi Energi**		**1:0,92**	**159.330.000,00**	**APBD**	**P1**	**1:0,94**	**172.763.000,00**
		Rasio Tingkat Konsumsi Protein		**1:1,44**				**1:1,39**	
		Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)		**105 gr/kap/hari**				**110 gr/kap/hari**	
		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga (%)		**1,84%**				**2.04%**	
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun	*Jumlah dokumen Skor pola Pangan Harapan yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	1 dok	75.000.000,00	APBD	P1	1 dok	82.500.000,00
		Jumlah Kebun Bibit Aktif		10 klp				20klp	
		Jumlah Kebun demplot aktif		10 klp				20 klp	
		Jumlah Anggota Kelompok Binaan yang memanfaatkan Pekarangan sebagai sumber pangan keliarga		62 klp				70 klp	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga (kali)		375 RT				500 RT	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	*Jumlah Sosialisasai Konsumsi Pangan Bergama , Bergizi dan Seimbang dengan Pangan Lokal*	*Kabupaten Bangka*	52 kali	59.330.000,00	APBD	P1	52 kali	65.263.000,00
		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga		50 kali				50 kali	
		Jumlah Promosi Olahan Pangan Lokal yang dilaksanakan		5 kali				5 kali	
		Jumlah Kelompok yang dilatih menyusun menu Beragam dan Bergizi seimbang berbahan pangan lokal		15 klp				15 klp	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi per Kapita Per Tahun	*Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi ke propinsi dan pusat*	*Kabupaten Bangka*	*4 kali*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 kaili*	*25.000.000,00*
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**151.462.000,00**				**252.500.000,00**
		Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi		***1 data***	***151.462.000,00***	***APBD***	***P1***	***1 data***	***252.500.000,00***
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		***1 peta***		***APBD***	***P1***	***1 peta***	
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Peta FSVA**		**1 peta**	**25.000.000,00**			**1 peta**	**27.500.000,00**
	Sub Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Jumlah Dokumen Peta FSVA yang disusun*	*Kabupaten Bangka*	*1 peta*		*APBD*	*P1*	*1 peta*	
		Jumlah Dokumen SKPG yang disusun		*1 dok*				*1 dok*	
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/ Kota	**Jumlah daerah rawan pangan di kabupaten bangka**		**1 dok**	**126.462.000,00**	**APBD**	**P1**		**225.000.000,00**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penaganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Bantuan Rawan Pangan Bagi Keluarga Miskin*	*Kabupaten Bangka*	*450 kk*	*104.634.000,00*	*APBD*	*P1*	*500 KK*	*200.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencangkup dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan yang terdistribusi ke masyarakat*	*Kabupaten Bangka*	*4 ton*	*21.828.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 ton*	*25.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				**340.568.000,00**				**374.624.800,00**
		Persentase Keamanan Pangan Segar		**94%**	**340.568.000,00**	**APBD**	**P1**	**95%**	**374.624.800,00**
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	**dokumen mutu dan keamanan pangan**		**1 dok**	**340.568.000,00**				**374.624.800,00**
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan segar yang aman*	*Kabupaten Bangka*	*12 kali*	*159.088.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 kali*	*174.996.800,00*
		Jumlah peserta sosialisasi penerapan GAP							
		Jumlah sampel yang diuji mengunakan Rapt Tes Kit		*300 sampel*		*APBD*	*P1*	*300 sampel*	
	Sub Kegiatan Sertifikasi keamanan pangan segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen yang diajukan untuk sertifikat prima*	*Kabupaten Bangka*	*5 dokumen*	*51.480.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 dokumen*	*56.628.000,00*
		Jumlah dokumen yang diajukan untuk sertifikat halal		*5 dokumen*		*APBD*	*P1*	*5 dokumen*	
	Sub Kegiatan registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen yang terregistrasi dari PSAT*	*Kabupaten Bangka*	*1 Dokumen*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*27.500.000,00*
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel yang diuji di laboratorium yang terakreditasi*	*Kabupaten Bangka*	*25 sampel*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*25 sampel*	*88.000.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pasar yang dilakukan pengambilan sampel*	*Kabupaten Bangka*	*6 pasar*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 pasar*	*27.500.000,00*
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				**250.000.000,00**		**P1**		**275.000.000,00**
		Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Cadangan Pangan		**6,17%**				**8,64%**	
	Kegiatan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah(tersedianya) lumbung pangan yang ada Di Desa**			**250.000.000,00**	**APBD**	**P1**		**275.000.000,00**
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	*Jumlah Lumbung Pangan Desa yang dibangun*	*Desa Labu, Berbura, Riding Panjang, Sungailiat, Kota Kapur*	*4 lumbung*	*175.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 lumbung*	*192.500.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur	*Jumlah Lantai Jemur yang dibangun*	*Desa Labu, Berbura, Riding Panjang, Sungailiat, Kota Kapur*	*4 lantai jemur*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 lantai jemur*	*82.500.000,00*
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Kab. Bangka**		**14.977.694.100,00**	**APBD**		**100%**	**15.427.024.923,00**
		Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian		**75%**	**14.977.694.100,00**			**100%**	**15.427.024.923,00**
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	**jumlah Alsintan yang dimanfaatkan**	**Kab. Bangka**	**100%**	**10.816.535.700,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**11.141.031.771,00**
		jumlah Alat Pasca Panen yang dimanfaatkan							
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	*Peta pertanian*	*Kab. Bangka*	*1 00 %*	*46.704.900,00*	*APBD*	*P1*	*1 00 %*	*48.106.047,00*
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	*Jumlah alat pasca panen yang diberikan kepada kelompok tani (Power Thresser)*	*(Rukam, Labu, Tiang Tara)*	*24 unit*	*297.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*24 unit*	*305.910.000,00*
		Jumlah sarana prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna yang tersedia (RMU)	*(Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Petaling, Zed)*	*20 unit*	*275.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 unit*	*283.250.000,00*
		Jumlah alat pengolahan lahan yang tersedia (Kultivator)	*(Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Petaling, Zed)*	*20 unit*	*268.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 unit*	*276.452.000,00*
		Jumlah unit peralatan POH (Pupuk Organik Hayati)	*Kab. Bangka*	*4 BPP*	*159.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 BPP*	*164.285.000,00*
		Jumlah rumah tempat pembuatan POH (Rumah POH)	*Kab. Bangka*	*4 BPP*	*88.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 BPP*	*90.640.000,00*
		Jumlah pompa air dan instalasi penunjang yang diberikan kepada kelompok tani (Pompa Air dan Instalasi Penunjangnya)	*(Zed, Jelitik, Merawang, Belinyu, Bakam, Riau Silip)*	*45 unit*	*286.623.700,00*	*APBD*	*P1*	*45 unit*	*295.222.411,00*
		Jumlah Sprayer pangan yang diberikan kepada kelompok tani	*Kab. Bangka*	*403 unit*	*1.150.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*403 unit*	*1.184.500.000,00*
		Jumlah Sprayer Hortikultura yang diberikan kepada kelompok tani	*Kab. Bangka*	*200 unit*	*750.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*200 unit*	*772.500.000,00*
		Jumlah Traktor Roda 4	*Kab. Bangka*	*16 unit*	*3.150.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*16 unit*	*3.244.500.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Traktor Roda 2/Pangan	*Kab. Bangka*	*70 unit*	*750.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*70 unit*	*772.500.000,00*
		Jumlah Traktor Roda 2/Hortikultura	*Kab. Bangka*	*20 unit*	*450.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*20 unit*	*463.500.000,00*
		Jumlah Excavator yang diberikan kepada kelompok tani	*Petaling Banjar, Mabat, Kemuja, Paya Benua, Zed, Kota Kapur, Rukam, Labu, Puding Besar, Balunijuk*	*32 unit*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*32 unit*	*824.000.000,00*
		Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan RMU/Beras Non Organik	*Labuh Air Pandan, Kemuja , Petaling, Zed,*	*5 unit*	*125.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*5 unit*	*128.750.000,00*
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Persentase Produksi yang mengunakan UPH (Usaha Pengolahan Hasil) Perkebunan*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*10.569.900,00*	*APBD*		*12 bulan*	*10.886.997,00*
		Pendampingan UPSUS	*8 Kecamatan*	*12 bulan*	*283.624.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*292.132.720,00*
		Persentase pemenuhan Dokumen SID JUP/JUT	*Kab. Bangka*	*100%*	*73.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*75.911.000,00*
		Kebun Induk Lengkeng yang terpelihara	*Mendo Barat*	*2 Ha*	*51.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Ha*	*53.148.000,00*
		Tersedianya data statistik pertanian	*Sungailiat*	*10 Buku*	*49.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Buku*	*50.985.000,00*
		Jumlah dokumen data dukung usaha pertanian peternakan	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*73.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*75.911.000,00*
	Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	*Jumlah kelompok KKSR yang dibina (dengan luas kebun 1,392 Ha)*	*Kab. Bangka*	*26 kelompok*	*148.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*26 kelompok*	*152.955.000,00*
		Jumlah perusahaan yang menghasilkan produksi pertanian	*Kab. Bangka*	*8 perusahaan*	*66.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 perusahaan*	*67.980.000,00*
		Jumlah bibit kapuk randu yang diberikan kepada kelompok tani	*Kab. Bangka*	*500 Kg*	*121.473.000,00*	*APBD*	*P1*	*500 Kg*	*125.117.190,00*
		Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan bak perendam	*Kab. Bangka*	*2 unit*	*341.640.200,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*351.889.406,00*
		Intensifikasi Tanaman Lada	*Kab. Bangka*	*400 Ha*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*400 Ha*	*515.000.000,00*
		Penyediaan Benih Lada Siap Tanam	*Kab. Bangka*	*100.000 bibit*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*100.000 bibit*	*515.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase peningkatan JUT/JUP yang dibangun**	**Kab. Bangka**	**100%**	**4.045.069.900,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**4.166.421.997,00**
		Persentase jumlah long storage yang di bangun							
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Persentase Peningkatan Panjang Jalan Produksi*	*Kab. Bangka*	*5 Km*	*800.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Km*	*824.000.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	*Jumlah long storage yang dibangun*	*Kab. Bangka*	*2 unit*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*257.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	*Persentase pemenuhan Listrik BPP*	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*77.250.000,00*
		Persentase Gedung Balai Penyuluh Pertanian yang dibangun	*Kab. Bangka*	*1 BPP*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 BPP*	*329.600.000,00*
		Persentase Alat Praktek Penyuluhan Balai yang tersedia	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*49.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	*50.985.000,00*
		Jumlah layanan Operasional UPTD Balai Benih Utama (BBU) yang tertangani	*Mendo Barat*	*12 bulan*	*10.569.900,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*10.886.997,00*
		Penyediaan Sarana Kendaraan Dinas Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS)	*Dinas Pertanian*	*20 Unit*	*385.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*20 Unit*	*396.550.000,00*
		Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baru di Kecamatan	*BPP Merawang*	*1 unit*	*825.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 unit*	*849.750.000,00*
		Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baru di Kecamatan	*BPP Mendo Barat , BPP Belinyu, BPP Riau Silip*	*3 unit*	*495.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*3 unit*	*509.850.000,00*
		Penyediaan Sarana Kendaraan Dinas Roda 2	*Dinas Pertanian*	*20 unit*	*385.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*20 unit*	*396.550.000,00*
		Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (Kendaraan Roda Tiga)	*Dinas Pertanian*	*3 unit*	*300.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*3 unit*	*309.000.000,00*
		Penyediaan sarana pendukung Pusat Kesehatan Hewan(Peralatan Medis)	*Puskeswan Merawang*	*1 paket*	*150.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 paket*	*154.500.000,00*
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah layanan operasional UPTD Balai Pembibitan Ternak yang tertangani**	**Pemali**	**12 bulan**	**116.088.500,00**	**APBD**	**P1**	**12 bulan**	***119.571.155,00***
	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	*Jumlah Penjaminan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang terselenggara*	*Kab. Bangka*	*10 Sample*	*116.088.500,00*	*APBD*	*P1*	*10 Sample*	*119.571.155,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				**236.535.000,00**				**243.631.050,00**
		Persentase Penurunan Serangan OPT		**15%**				**15%**	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase lahan yang mendapat perlindungan dari serangan OPT**	**Kab. Bangka**	**100%**	**236.535.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	***243.631.050,00***
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura	*Pengendalian hama penyakit tanaman pangan dan pestisida*	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*236.535.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*243.631.050,00*
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				**15.000.000,00**				**15.450.000,00**
		Persentase Izin Usaha yang memiliki sertifikat		**100%**				**100%**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya Dalam Daerah	**Persentase Peningkatan Usaha Perkebunan**	**Kab. Bangka**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**15.450.000,00**
		Persentase Perkebunan yang memiliki STDB Perkebunan		**10%**				**12%**	
		Persentase Perusahaan Perkebunan yang memiliki Sertifikat ISPO/RSPO		**20%**				**25%**	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	*Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian*	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*15.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*1 paket*	*15.450.000,00*
	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN				**1.654.495.000,00**				**1.704.129.850,00**
		Persentase Penyuluh Pertanian Yang Difasilitasi		**75%**				**75%**	
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	**Persentase Penyuluh pertanian yang dinilai kinerjanya**	**Kab. Bangka**	**100%**	**1.654.495.000,00**	**APBD**	**P1**	***100%***	**1.704.129.850,00**
		Persentase Poktan dan Gapoktan yang naik kelas		**15%**				***15%***	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Persentase Penyuluh Pertanian yang dinilai kinerjanya*	*Kab. Bangka*	*61 orang*	*154.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*61 orang*	158.620.000,00
		Jumlah dokumen program programa yang disusun	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*440.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	453.200.000,00
		Alat untuk penyampaian informasi	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*49.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	50.985.000,00
		Jumlah pembangunan BPP	*Kab. Bangka*	*1 BPP*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 BPP*	329.600.000,00
		PENAS		*1 Paket*	*385.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	396.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Persentase yang mengikuti Rembuk KTNA*	*Kab. Bangka*	*1 paket*	*88.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 paket*	90.640.000,00
		Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN	*Kab. Bangka*	*65 Poktan dan Gapoktan*	*217.995.000,00*	*APBD*	*P1*	*65 Poktan dan Gapoktan*	224.534.850,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT				**2.122.182.500,00**				**2.334.400.750,00**
		Persentase Penanggulangan Penyakit Ternak		**40%**				**100%**	
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kelompok Ternak yang terdaftar dan ternak yang di asuransikan	Kab. Bangka	75%	278.300.000,00	*APBD*	*P1*	75%	306.130.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	*Terlaksananya unit usaha Pangan Asal Hewan bersertifikat halal*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*278.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	306.130.000,00
	Kegiatan Penjamin Kesehatan hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah Peternak yang Mengolah Limbah Ternak/ Pengolahan Limbah	Kab. Bangka	50%	671.078.000,00	APBD	P1	50%	738.185.800,00
		Peningkatan Jumlah Ternak yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100%				100%	
	Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*Jumlah pelaksanaan pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis*	*Tersebar di Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*394.856.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	434.341.600,00
		jumlah penyakit hewan menular (Survailance)	*Tersebar di Kab. Bangka*	*12 bulan*	*141.287.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	155.415.700,00
		Monitoring Penyakit Flu Burung (A1) dan Flu Babi (H1N1)	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*134.935.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	148.428.500,00
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peternak yang Mengikuti Program Siskasi	Pemali	12 bulan	580.428.500,00	APBD	P1	12 bulan	638.471.350,00
	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	*Jumlah Penjaminan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang terselenggara*	*Kab. Bangka*	*10 Sample*	*116.088.500,00*	*APBD*	*P1*	*10 Sample*	127.697.350,00
		Kelompok yang mengelola integrasi sapi sawit	*Kab. Bangka*	*3 Kelompok*	*200.455.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Kelompok*	220.500.500,00
		jumlah anak sapi hasil inseminasi	*Kab. Bangka*	*75 Ekor*	*263.885.000,00*	*APBD*	*P1*	*75 Ekor*	290.273.500,00
		Observasi, pengawasann lalu lintas dan obat-obatan, vaksin dan peralatan keswan	*Tersebar di Kab. Bangka*	*12 bulan*	*378.960.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	416.856.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Jumlah layanan operasional yang tertangani		12 bulan	592.376.000,00	APBD	P1	12 bulan	651.613.600,00
	Sub Kegiatan Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	*Dokumen penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan*	*Kab. Bangka*	*1 ASF*	*106.463.500,00*	*APBD*	*P1*	*1 ASF*	117.109.850,00
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*485.912.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	534.503.750,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Kab. Bangka**	**100%**	**1.407.418.100,00**	**APBD**	**P1**		**1.468.951.165,00**
		Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul		**75,00**				**80,00**	
		Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Pupuk		**60,00**				**65,00**	
		Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prsarana Perkebunan		**60,00**				**70,00**	
		Persentase Penerapan Teknologi Peternakan		**70,00**				**75,00**	
		Persentase Peningkatan Bibit Ternak		**50,00**				**65,00**	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Benih Unggul yang ditanam	Kab. Bangka		1.131.553.500,00	APBD	P1		1.165.500.105,00
		Persentase Poktan yang memanfaatkan pupuk							
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Benih Jagung Komposit dan pestisida*	*Kec. Mendo Barat*	*15 Kg*	*10.774.500,00*	*APBD*	*P1*	*15 Kg*	11.097.735,00
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	*8 Kecamatan*	*12 bulan*	*73.579.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	75.786.370,00
		Jumlah benih padi dan pestisida yang diberikan kepada kelompok tani	*(Air Duren, Banyu Asin, Saing, Mangka, Rukam, Kota Kapur, Paya Benua, Zed)*	*13.200 Kg*	*528.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*13.200 Kg*	543.840.000,00
		Jumlah bibit Hortikultura yang diberikan kepada Poktan	*Sempan, Pemali, Air Duren, Pugul, Mapur, Labu, Jelitik, Bukit Betung, Matras, Dwi Makmur, Gunung Pelawan, Romodong, Air Asem, Mangka,*	*6.500 btg*	*266.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*6.500 btg*	274.186.000,00
		Luas lahan tidur yang ditanami bibit Hortikultura	*Pemali*	*20 Ha*	*253.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Ha*	260.590.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit PAH (Pangan Asal Hewan) Bersertifikasi Halal		50%	275.864.600,00	APBD	P1	50%	303.451.060,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Peternak yang Mengikuti Program Siskasi		50%				50%	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak/Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Persentase Peningkatan Jumlah Anakan Sapi yang berasal dari IB dan INKA*	*Kab. Bangka*	*75 ekor*	*275.864.600,00*	*APBD*	*P1*	*75 ekor*	284.140.538,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**6.306.700.730,00**	**APBD**	**P1**		**6.766.747.571,90**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.12.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.12.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*2 Dokumen*	*15.000.000,00*			*2 Dokumen*	*16.500.000,00*
2.12.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*5 Dokumen*	*15.000.000,00*			*5 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.839.226.000,00**			**0%**	**4.223.148.600,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.839.226.000,00**			**100%**	**4.223.148.600,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.824.226.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.206.648.600,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.162.599.730,00**				**2.227.477.721,90**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Kegiatan Administrasi Umum	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**2.162.599.730,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**2.227.477.721,90**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*839.592.380,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	864.780.151,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*108.711.900,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	111.973.257,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*25.587.500,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	26.355.125,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	*Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*249.618.600,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	257.107.158,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	*Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*98.258.600,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	101.206.358,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	*Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*56.000.000,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	57.680.000,00
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	*Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*234.830.750,00*	APBD	P1	*12 Bulan*	241.875.672,50
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 paket*	*550.000.000,00*	APBD	P1	*1 paket*	566.500.000,00
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**274.875.000,00**			**73**	**283.121.250,00**
	Kegiatan peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**25%**	**274.875.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**283.121.250,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**100%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**100%**				**85%**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*245 stell*	*150.000.000,00*	APBD	P1	*245 stell*	154.500.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	*Jumlah pakaian olahraga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 stell*	*30.000.000,00*	APBD	P1	*16 stell*	30.900.000,00
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia	*Sungailiat*	*20 orang*				*20 orang*	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*6 orang*	*94.875.000,00*	APBD	P1	*6 orang*	97.721.250,00
JUMLAH					**27.513.355.430,00**				**28.832.998.309,90**
PRIORITAS II									
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
3:27:02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**2.668.488.000,00**				**2.748.542.640,00**
3.27.02.1.01	**Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**		**Kab. Bangka**		**938.488.000,00**				**966.642.640,00**
3.27.02.1.01.01	*Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung*	*Jumlah Pupuk Subsidi (Ton)*	*Kab. Bangka*	*59.248*	*373.488.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*65.172,8*	384.692.640,00
		Laporan Peredaran Pestisida	*Kab. Bangka*	*1*	*150.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	154.500.000,00
		Jumlah Alat Mesin Pertanian	*Kab. Bangka*	*98*	*350.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*108*	360.500.000,00
3.27.02.1.01.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*	*Jumlah Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida / KP3*	*Kab. Bangka*	*1*	*65.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	66.950.000,00
03.27.02.1.02	**Kegiatan Pengawas Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit**	**Jumlah Luas Bantuan Bibit dan /atau Saprodi Tanaman Semusim dan Rempah (Lada)**	**Kab. Bangka**	**200**	**450.000.000,00**	**APBD Prov**	**P2**	**220**	463.500.000,00
03.27.02.1.02.02	*Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura*	*Jumlah Luar Benih/ Bibit Hortikultura yang Tersedia*	*Kab. Bangka*		*475.000.000,00*				489.250.000,00
		- Cabai	*Belinyu, Merawang*	*10*	*160.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*11*	164.800.000,00
		- Mulasa Cabai (Roll)	*Belinyu, Merawang, Puding Besar dan Mendo Barat*	*400*	*140.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*440*	144.200.000,00
		- Durian	*Belinyu, Puding Besar, dan Sungailiat*	*15*	*175.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*17*	180.250.000,00
03.27.02.1.02.03	*Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan*	*Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan Tersedia*	*Kab. Bangka*						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Padi	*Labu*	*10*		*APBD Prov*	*P2*	*11*	
3.27.02.1.05	**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dn Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi**		**Kab. Bangka**		**700.000.000,00**				721.000.000,00
3.27.02.1.05.01	*Pengendalian Penyediaan dan Prodksi Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak*	*Jumlah Pengadaan Ternak Dalam Daerah*	*Kab. Bangka*	*350*	*300.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*385*	309.000.000,00
3.27.02.1.05.02	*Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan*	*Jumlah Penjaminan Benih/bibit Ternak dan Pakan Ternak yang Terselenggra*	*Kab. Bangka*	*10*	*250.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*11*	257.500.000,00
3.27.02.1.05.03	*Pengawasan Peredaran dan Sartifikasi Benih/Bibit Ternak*	*Jumlah Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang dilakukan*	*Kab. Bangka*	*30*	*150.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*33*	154.500.000,00
3.27.02.1.06	**Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distribusi**		**Kab. Bangka**		**150.000.000,00**				154.500.000,00
3.27.02.1.06.01	*Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Kemanan Peredaran Obat Hewan*	*Jumlah Obat Hewan yang diperiksa Mutu , Khasiat dan Keamanan Peredarannya*	*Kab. Bangka*	*1*	*150.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	154.500.000,00
3.27.02.1.07	**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**		**Kab. Bangka**		**430.000.000,00**				442.900.000,00
3.27.02.1.07.01	*Pengadaan Benoh/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*	*Jumlah Pengadaan Bibit Ternak*	*Kab. Bangka*	*80*	*280.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*88*	288.400.000,00
3.27.02.1.07.02	*Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*	*Jumlah Pengadaan HPT*	*Kab. Bangka*	*5*	*150.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*6*	154.500.000,00
3:27:03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Kab. Bangka**		**3.600.000.000,00**				**3.708.000.000,00**
3.27.03.1.01	**Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**	**Rasio Pemanfaatan Prasarana Pertanian**	**Kab. Bangka**			**APBD Prov**	**P2**	**2**	
		Dokumen Penataan Prasarana Pertanian	**Kab. Bangka**		**3.500.000.000,00**				**3.605.000.000,00**
03.27.03.1.01.01	*Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian*	*Jumlah Sarana Prasarana Pasca Panen Komoditi Perkebunan*	*Kab. Bangka*	*2*	*250.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*3*	257.500.000,00
		- Jagung (Hammer Mill dan Corn Sheller)	*Kab. Bangka*	*4*	*300.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*5*	309.000.000,00
		- Moisture Tester	*Kab. Bangka*	*2*	*55.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*3*	56.650.000,00
		Indikator Optimas Lahan (Ha)	*Kab. Bangka*	*450*	*900.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*495*	927.000.000,00
		Indikator Pemetaan Lahan Pertanian Pangan	*Kab. Bangka*	*2.440,2*	*375.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2.684,3*	386.250.000,00
03.27.03.1.01.02	*Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Momoditi Pertanian*	*Pupuk anorganik yang tersedia*	*Kab. Bangka*	*30.000*	*450.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*30.300*	463.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.1.01.03	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani*	*Indikator Jalan Usaha Tani*	*Kab. Bangka*	*26*	*550.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*29*	566.500.000,00
3.27.03.1.01.04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*	*Indikator Jaringan Irigasi (Ha)*	*Kab. Bangka*	*375*	*250.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*413*	257.500.000,00
03.27.03.1.01.09	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	*Jumlah Pertemuan Terkait Koordinasi, Singkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung*	*Kab. Bangka*	*3*	*180.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*4*	185.400.000,00
		Jumlah Alat-alat Peternakan Mendukung Produksi Benih/Bibit Pakan Ternak Bagi Kelompok/Pelaku Usaha yang tersedia	*Kab. Bangka*	*3 Shreeder*	*110.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*4 shereeder*	113.300.000,00
		Pupuk Organik yang Tersedia	*Kab. Bangka*	*80*	*80.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*88*	82.400.000,00
3.27.06.1.03	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**		**Kab. Bangka**		**100.000.000,00**				**103.000.000,00**
3.27.06.1.03.02	*Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan*		*Kab. Bangka*	*1*	*100.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	103.000.000,00
3:27:07	**PROGRAM PENYULUH PERTANIAN**		**Kab. Bangka**		**15.000.000,00**				15.450.000,00
3.27.07.1.03	**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonom Petani Berbasis Kawasan**		***Kab. Bangka***		***15.000.000,00***	**APBD Prov**	**P2**	***2***	15.450.000,00
3.27.07.1.03.04	*Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani*	*Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sekolah Lapang*	*Kab. Bangka*	*4*	*15.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*5*	15.450.000,00
3:27:04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Kab. Bangka**		**635.000.000,00**				654.050.000,00
3.27.04.1.01	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten /Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**Kab. Bangka**		**265.000.000,00**				**272.950.000,00**
3.27.04.1.01.01	*Pengendalian Resiko dan Penglangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*Jumlah pelaksana Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*Kab. Bangka*	*Rabies 2500, ID 1000, Al 1000 dan ASF*	*165.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*Rabies 2750, ID 1100, Al 1100 dan ASF*	169.950.000,00
3.27.04.1.01.02	*Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	*Kab. Bangka*	*1*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	51.500.000,00
3.27.04.1.01.03	*Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular*	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditangglangi*	*Kab. Bangka*	*1*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	51.500.000,00
3.27.04.1.02	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**		**Kab. Bangka**		**120.000.000,00**				123.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.1.02.01	*Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan*	*Pelaksanaan Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan*	*Kab. Bangka*	*1*	*45.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	46.350.000,00
3.27.04.1.02.02	*Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untyk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan*	*Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan*	*Kab. Bangka*	*1*	*25.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*2*	25.750.000,00
3.27.04.1.02.03	*Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi*	*Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dn Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi*	*Kab. Bangka*	*2*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*3*	51.500.000,00
3.27.04.1.03	**Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha**		**Kab. Bangka**		**250.000.000,00**				**257.500.000,00**
3.27.04.1.03.03	*Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit Lab Keswan dan Kesmavet yang Terpelihara*	*Kab. Bangka*	*110*	*250.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*121*	257.500.000,00
3:27:05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Kab. Bangka**		**875.000.000,00**				901.250.000,00
3.27.05.1.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		**Kab. Bangka**		**125.000.000,00**				128.750.000,00
3.27.05.1.01.02	*Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), (Ha)*	*Kab. Bangka*	*250*	*75.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*275*	77.250.000,00
3.27.05.1.01.04	*Penaggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan*	*Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), (ekor)*	*Kab. Bangka*	*250*	*50.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*275*	51.500.000,00
	Kegiatan Pengadaan Traktor Roda 4	Traktor Roda 4	Bakam	1 paket	400.000.000,00	DAK	P2	1 paket	412.000.000,00
	Kegiatan Pembuatan Kandang Ternak Sapi	Kandang Ternak Sapi	Kab. Bangka	1 paket	350.000.000,00	DAK	P2	1 paket	360.500.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA

Prioritas 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**8.761.299.135,00**				**9.307.232.109,05**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)		**30**	**24.000.000,00**			**30**	**24.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)		**12**				**12**	
01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**24.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**24.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*1 Dokumen*	*6.010.000,00*	*APBD*		*1 Dokumen*	*6.010.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*5 Dokumen*	*17.990.000,00*	*APBD*		*5 Dokumen*	*17.990.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	***6.759.100.000,00***			**0%**	***7.435.010.000,00***
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	***6.759.100.000,00***			**100%**	***7.435.010.000,00***
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*		*12 Bulan*	*6.744.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*7.418.510.000,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*		*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**2**	**1.787.199.135,00**			**2**	**1.660.565.109,05**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**80**				**85**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**1.787.199.135,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.660.565.109,05**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*993.109.135,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.022.902.409,05*
01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*86.560.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*89.156.800,00*
01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*36.050.000,00*
01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*107.820.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*111.054.600,00*
01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*87.656.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*90.285.680,00*
01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*36.054.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*37.135.620,00*
01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*206.000.000,00*
01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*		*66.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*67.980.000,00*
		Printer		*2 unit*	*4.000.000,00*			*1 unit*	*5.000.000,00*
		Komputer/PC		*1 set*	*7.000.000,00*			*1 set*	*7.000.000,00*
		Laptop		*1 unit*	*5.000.000,00*			*1 unit*	*5.000.000,00*
		Drone		*1 unit*	*50.000.000,00*				
01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur*	*Jumlah Mebeleur yang diadakan*	*Sungailiat*		*65.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*2.000.000,00*
		Meja Kerja Ess IV		*3 unit*	*3.000.000,00*				
		Meja Kerja Non Ess		*3 bh*	*3.000.000,00*			*1 bh*	*1.000.000,00*
		Kursi Kerja Ess IV		*3 unit*	*3.000.000,00*				
		Kursi Kerja Non Ess		*3 bh*	*3.000.000,00*			*1 bh*	*1.000.000,00*
		Lemari Arsip		*2 bh*	*10.000.000,00*				
		Lemari Arsip Alba		*1 bh*	*28.000.000,00*				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Filling Cabinet		*2 bh*	*7.000.000,00*				
		Sofa		*1 Set*	*8.000.000,00*				
01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*4 Gedung*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Gedung*	*60.000.000,00*
01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*		*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Gedung*	*60.000.000,00*
		Pengadaan Sekat ruangan sekretariat		*1 Paket*	*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*		
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**191.000.000,00**			**73**	**187.657.000,00**
01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**191.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**187.657.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
01.2.04.03	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan*	*Jumlah pakaian kerja lapangan pasukan kuning*	*Sungailiat*	*207 Stel*	*62.100.000,00*			*207 Stel*	*62.100.000,00*
01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*9.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*9.600.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 Stel*	*3.300.000,00*			*20 Stel*	*3.300.000,00*
		Jumlah Pakaian adat yang tersedia		*85 stel*	*51.000.000,00*				
01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 Orang*	*65.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Orang*	*112.657.000,00*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**150.000.000,00**				**50.000.000,00**
		Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi		**27,43 Ha**	**150.000.000,00**			**31,95 Ha**	**100.000.000,00**
2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**Kab. Bangka**	**100%**	**75.000.000,00**				**50.000.000,00**
2.11.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*	*Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*50.000.000,00*
2.11.02.2.02	**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase tersusunnya dokumen KLHS**		**100%**	***75.000.000,00***				**50.000.000,00**
2.11.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup*	*Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR*	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*50.000.000,00*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**694.610.400,00**				**443.711.570,00**
		Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	**Kab. Bangka**	**27,43 Ha**	**694.610.400,00**			**31,95 Ha**	**443.711.570,00**
2.11.03.2.01	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase titik lokasi kualitas udara dan air permukaan yang dimonitoring**		**100,00%**	**405.610.400,00**				**373.711.570,00**
2.11.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut*	*Jumlah air permukaan yang dipantau*	*Kab.Bangka*	*8 Sungai*	*130.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Sungai*	*140.000.000,00*
		Jumlah Laporan pemantauan kualitas air		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara		*4 Lokasi*				*4 Lokasi*	
		Jumlah Laporan pemantauan kualitas udara		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah tanah perkebunan/pertanian yang dipantau		*8 titik*				*8 titik*	
		Jumlah Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup	*Sungailiat*	*42 sample*	*195.610.400,00*			*12 bulan*	*170.124.570,00*
		Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang Terakreditasi		*6 parameter*	*50.000.000,00*			*12 bulan*	*33.587.000,00*
2.11.03.2.01.02	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*	*Jumlah Calon Lokasi Program Kampung Iklim*	Kab. Bangka	*2 lokasi*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 lokasi*	*30.000.000,00*
		Jumlah peserta identifikasi program kampung iklim		*40 orang (25 laki-laki, 15 pr)*				*40 orang (25 laki-laki, 15 pr)*	
2.11.03.2.02	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya informasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup**		**100,00%**	**59.000.000,00**				**50.000.000,00**
2.11.03.2.02.01	*Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	*Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup*	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*49.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*50.000.000,00*
		Dokumen informasi status Kerusakan Lahan		*1 dokumen*	*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*10.000.000,00*
2.11.03.2.03	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase luas lahan yang direhabilitasi**	**Kab.Bangka**	**60,00%**	**230.000.000,00**			**80,00%**	**70.000.000,00**
2.11.03.2.03.04	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi*	*Luas lahan berdasarkan lokasi izin pinjam pakai yang direhabilitasi*	*Kenanga*	*5,46 Ha*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5,46 Ha*	*40.000.000,00*
		Jumlah rancangan teknis penanaman yang disahkan	*4 lokasi di Kab. Bangka*	*4 rantek*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*		
		Luas lahan rehabilitasi yang di nilai	*Penagan*	*17 Ha*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*		
		Jumlah sumber air yang dikonservasi	*Kab. Bangka*	*1 lokasi*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 lokasi*	*30.000.000,00*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**1.232.029.950,00**				**1.331.779.950,00**
		Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	**Kab. Bangka**	**20%**	**1.232.029.950,00**			**20%**	**1.331.779.950,00**
2.11.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	***Kab. Bangka***	**12,50%**	**1.232.029.950,00**				**1.331.779.950,00**
2.11.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	*Jumlah lokasi identifikasi potensi kehati*	*Kab. Bangka*	*1 lokasi*	*20.250.000,00*	*APBD*	*P1*		
2.11.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya*	*Jumlah kebun raya yang dikelola*	*Desa Dalil*	*55,8 Ha*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*		
2.11.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	*Luas RTH Yang dikelola*	*Kecamatan Sungailiat*	*30,95 Ha*	*1.021.779.950,00*	*APBD*	*P1*	*0,5 Ha*	*1.271.779.950,00*
		Jumlah DED yang disusun	*Kelekak Batu, Kec. Belinyu*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*		
2.11.04.2.01.07	*Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Kehati yang dikelola*	*Kab.Bangka*	*1 Paket*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*60.000.000,00*
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**45.000.000,00**				**50.000.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup		**66,67%**	**45.000.000,00**			**83,33%**	
2.11.06,2,01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang taat secara administrasi maupun teknis**			**45.000.000,00**				**50.000.000,00**
2.11.03.2.02.01	*Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	*Jumlah Perusahaan yang taat secara administrasi maupun teknis*	*Kab. Bangka*	*80 Perusahaan*	*45.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*90 Perusahaan*	*50.000.000,00*
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**63.439.000,00**				**63.439.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	**Kab. Bangka**	**66,67%**	**63.439.000,00**			**83,33%**	**63.439.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.08.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Sekolah Adiwiyata Kab. Bangka**	**100,00%**	**63.439.000,00**			**62,07%**	**63.439.000,00**
2.11.08.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah sekolah binaan sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional/Mandiri*	*Sekolah Adiwiyata Kab. Bangka*	*1 Sekolah*	*63.439.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Sekolah*	*63.439.000,00*
		Jumlah sekolah binaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten		*4 Sekolah*				*4 Sekolah*	
		Jumlah sekolah binaan sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi		*2 Sekolah*				*2 Sekolah*	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah Adiwiyata		*50 orang (30 wanita, 20 pria)*				*50 orang*	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**41.200.000,00**				**65.000.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	**Kab. Bangka**	**66,67%**	**41.200.000,00**			**83,33%**	**65.000.000,00**
2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerima Penghargaan Peduli Lingkungan**	**Kab. Bangka**	**40%**	**41.200.000,00**				**65.000.000,00**
2.11.09.2.01.01	*Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	*Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional/Mandiri*	*Kab. Bangka*	*1 Sekolah*	*41.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Sekolah*	*65.000.000,00*
		Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten	*Kab. Bangka*	*4 Sekolah*				*4 Sekolah*	
		Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi	*Kab. Bangka*	*2 Sekolah*				*2 Sekolah*	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**7.118.977.800,00**				**16.573.382.870,00**
		Persentase pengurangan sampah		**24,00%**	**7.118.977.800,00**			**26,00%**	**16.573.382.870,00**
		Persentase penanganan sampah		**74,00%**				**73,00%**	
2.11.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik**		**84,97%**	**7.118.977.800,00**				**16.573.382.870,00**
2.11.11.2.01.02	*Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali*	*Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Tiga Bulan Bersih Sampah*	*Sungailiat*	*2 Kegiatan*	*246.500.000,00*			*2 Kegiatan*	
		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	*Sungailiat*	*12 bulan*	*4.108.565.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*12.280.000.000,00*
2.11.11.2.01.03	*Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	*Operasional dan pemeliharaan UPT TPA Kec. Sungailiat*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*886.103.900,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*1.159.469.770,00*
		Operasional dan pemeliharaan UPT Persampahanan dan Pertamanan Belinyu	*Belinyu*	*12 bulan*	*1.030.308.100,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*1.086.808.100,00*
2.11.11.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan*	*Persentase sarana dan prasarana persampahan yang disediakan :*	*Kab. Bangka*		*847.500.000,00*	***APBD***	***P1***		***2.047.105.000,00***
		Alat -alat Kebersihan	*Sungailiat*	*1 Paket*	*165.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*195.000.000,00*
		Tong/drum sampah	*Sungailiat*	*250 unit*	*87.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*800 unit*	*280.000.000,00*
		Tong Sampah beroda	*Sungailiat*	*100 unit*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*175 unit*	*131.250.000,00*
		Mesin Pencacah	*Sungailiat*	*2 unit*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 unit*	*140.855.000,00*
		Dump Truck	*Sungailiat*	*1 unit*	*450.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*1.300.000.000,00*
TOTAL					**Rp 18.106.556.285,00**				**Rp 27.884.545.499,05**

Prioritas 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**8.375.000.000,00**				**3.570.000.000,00**
		Persentase pengurangan sampah		**24,00%**	**8.375.000.000,00**			**26,00%**	**3.570.000.000,00**
		Persentase penanganan sampah		**74,00%**				**73,00%**	
2.11.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik**		**84,97%**	**8.375.000.000,00**				**3.570.000.000,00**
2.11.11.2.01.04	*Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan*	*Persentase Bank sampah beserta sarana pendukung yang dibangun*	*Kab. Bangka*	*3 paket*	*2.100.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 paket*	*350.000.000,00*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan dan Pengadaan P / S Sampah Terpadu 3 R	*Sungailiat*	*1 paket*	*1.050.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 paket*	*500.000.000,00*
2.11.11.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan*	*Persentase sarana dan prasarana persampahan yang disediakan :*	*Kab. Bangka*		***5.225.000.000,00***				***2.720.000.000,00***
		Dump Truck	*Sungailiat*	*3 unit*	*1.350.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*2 unit*	*1.300.000.000,00*
		Kontainer	*Kab. Bangka*	*4 unit*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*6 unit*	*300.000.000,00*
		Motor Roda Tiga	*kel. Bukit betung , kel. Kuday ,kel. Kenanga, kel jelitik dan teluk uber Sungailiat*	*5 unit*	*175.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*32 unit*	*1.120.000.000,00*
		Pembangunan TPA	*Mendobarat*	*1 Paket*	*3.500.000.000,00*	*APBN*	*P2*		
TOTAL					**Rp 8.375.000.000,00**				**Rp 3.570.000.000,00**

Prioritas 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**978.120.000,00**				**110.235.000,00**
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**908.570.000,00**				**40.685.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik**			**908.570.000,00**	**APBD**	**P1**		**40.685.000,00**
01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*		*34.000.000,00*	*APBD*	*P3*		*35.020.000,00*
		Gordyn / Tirai		*1 paket*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Tangga Pemangkas		*2 unit*	*14.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*		*5.500.000,00*	*APBD*	*P1*		*5.665.000,00*
		AC		*1 unit*	*5.500.000,00*	*APBD*	*P3*		
01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*		*869.070.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Gedung*	*60.000.000,00*
		Garasi Alat Berat TPA UPT Kec. Belinyu		*1 paket*	*472.320.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Rumah penjaga TPA Belinyu		*1 paket*	*168.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Patok tanda batas TPA Belinyu		*50 Buah*	*3.750.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Tempat parkir (Dinas)		*15 X 6 m2*	*225.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**69.550.000,00**			**73**	**69.550.000,00**
01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**69.550.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**69.550.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*107 Stel*	*69.550.000,00*	*APBD*	*P3*	*107 Stel*	*69.550.000,00*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**50.000.000,00**				**50.000.000,00**
		Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	**Kab. Bangka**	**27,43 Ha**	**50.000.000,00**			**31,95 Ha**	**50.000.000,00**
2.11.03.2.03	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase luas lahan yang direhabilitasi**	**Kab.Bangka**	**60,00%**	**50.000.000,00**			**80,00%**	**50.000.000,00**
2.11.03.2.03.04	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi*	*Luas lahan APL yang direhabilitasi*	*Kab. Bangka*	*2 Ha*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*2 Ha*	*50.000.000,00*
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**2.000.000.000,00**				**-**
		Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	**Kab. Bangka**	**20**	**2.000.000.000,00**			**20**	**-**
2.11.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	***Kab. Bangka***	**12,50%**	**2.000.000.000,00**				**-**
2.11.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	*Luas RTH Yang dibangun*	*Desa Bukit Layang, Kec. Bakam*	*2 Ha*	*1.000.000.000,00*		*P3*		
		Luas RTH Yang dibangun	*Desa Tiang Tarah, Kec. Bakam*	*18 Ha*	*1.000.000.000,00*		*P3*		
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**				**65.000.000,00**				**63.439.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	**Kab. Bangka**	**66,67%**	**65.000.000,00**			**83,33%**	**63.439.000,00**
2.11.07.2.01	**Kegiatan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Persentase tersusunnya data dan informasi pengakuan keberadaan MHA**	**Kab. Bangka**	**100%**	**65.000.000,00**			**100%**	**63.439.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.07.2.01.01	*Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA		1 Dokumen	*65.000.000,00*	APBD	p3	1 dokumen	63.439.000,00
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**65.000.000,00**				**65.000.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	**Kab. Bangka**	**66,67%**	**65.000.000,00**			**83,33%**	**65.000.000,00**
2.11.08.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Sekolah Adiwiyata Kab. Bangka**	**100,00%**	**65.000.000,00**			**62,07%**	**65.000.000,00**
2.11.08.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah individu / kelompok masyarakat Peduli Lingkungan yang dibina*	*Kab. Bangka*	*8 kelompok dan 4 individu*	*65.000.000,00*	*APBD*	*p3*	*8 kelompok dan 4 individu*	*65.000.000,00*
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**46.000.000,00**				**46.000.000,00**
		Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	**Kab. Bangka**	**66,67%**	**46.000.000,00**			**83,33%**	**46.000.000,00**
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Kab. Bangka	40%	46.000.000,00				46.000.000,00
2.11.09.2.01.01	*Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan*	*Jumlah penerima Penghargaan Peduli Lingkungan (Kalpataru)*	*Kab. Bangka*	*1 penerima penghargaan*	*23.000.000,00*	*APBD*	*p3*	*1 penerima penghargaan*	*23.000.000,00*
		Jumlah perusahaan/pelaku usaha peduli lingkungan	*Kab. Bangka*	*3 perusahaan*	*23.000.000,00*	*APBD*	*p3*	*3 perusahaan*	*23.000.000,00*
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**8.766.000.000,00**				**1.701.315.000,00**
		Persentase pengurangan sampah		**24,00%**	**8.766.000.000,00**			**26,00%**	**1.701.315.000,00**
		Persentase penanganan sampah		**74,00%**				**73,00%**	
2.11.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik**		**84,97%**	**8.686.000.000,00**				**1.621.315.000,00**
2.11.11.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana*	*Persentase sarana dan prasarana persampahan yang disediakan :*	*Kab. Bangka*		***8.686.000.000,00***	***APBD***	***P1***		***1.621.315.000,00***

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Persampahan	*Tong/drum sampah*	*Sungailiat*	*550 unit*	*280.000.000,00*			*800 unit*	*280.000.000,00*
		Tempat Sampah Pemilahan 5 Jenis	*kel. Bukit betung Sungailiat*	*12 unit*	*36.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Tempat Sampah Pemilahan 5 Jenis	*Desa Karya Makmur Pemali*	*50 unit*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Tong Sampah beroda	*Sungailiat*	*50 unit*	*37.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*175 unit*	*131.250.000,00*
		Mesin Pencacah	*Sungailiat*	*2 unit*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 unit*	*140.855.000,00*
		Mesin Pencacah	*Lingk jelutung, tps3r srimenanti, kel. Kuday kec. Sungailiat*	*3 unit*	*105.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 unit*	*140.855.000,00*
		Mesin Pencacah	*Desa Kace, kec. Mendo Barat dan Desa Batu rusa, Kec. Merawang*	*2 unit*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*4 unit*	*140.855.000,00*
		Landasan Kontainer	*Sungailiat*	*9 unit*	*225.000.000,00*	*APBD*	*P3*	-	-
		Mobil Roda 4 Pemilahan	*Sungailiat*	*3 unit*	*675.000.000,00*	*APBD*	*P3*	-	-
		Paket Penanganan Persampahan Skala Kawasan Kumuh Kab.Bangka	*Sungailiat*	*1 Paket*	*5.902.000.000,00*	*APBD*	*P3*	-	-
		Lubang Biopori	*Sungailiat*	*7500*	*787.500.000,00*	*APBD*	*P3*	*7500*	*787.500.000,00*
		Mesin Potong Rumput	*Lingk senang hati*	*3 unit*	*9.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Bak Sampah	*jl. Rawa bangun RT.03 Lingkungan Yos Sudarso, Lingk Nelayan II*	*5 unit*	*32.500.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Bak Sampah	*Desa Bukit Layang Kec. Bakam*	*1 unit*	*6.500.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Mesin Pencacah Sampah Organik	*Desa Kapuk Kec. Bakam*	*1 unit*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
		Mesin Pencacah Plastik	*Desa Kapuk Kec. Bakam*	*1 unit*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P3*		
2.11.11.2.03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah lingkungan dan dunia usaha yang dibina**	**Kab. Bangka**	**100%**	**80.000.000,00**				**80.000.000,00**
2.11.11.2.03.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah*	*Jumlah lingkungan dan dunia usaha yang mengikuti pembinaan pengelolaan persampahan*	*Sungailiat*	*8 kecamatan*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P3*	*8 kecamatan*	*80.000.000,00*
TOTAL					**Rp 11.970.120.000,00**				**Rp 2.035.989.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**807.300.000,00**				**823.446.000,00**
		Persentase Cakupan penerbitan KIA		**40,00**	**807.300.000,00**			**40,00**	**823.446.000,00**
		Persentase Cakupan penerbitan KK		**100,00**				**100,00**	
		Persentase Cakupan penerbitan KTP-el		**100,00**				**100,00**	
		Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian		**40,00**				**40,00**	
		Persentase Cakupan penerbitan Akta Kelahiran		**70,00**				**70,00**	
		Persentase Cakupan penerbitan Akta Perkawinan		**40,00**				**40,00**	
		Persentase Cakupan penerbitan Akta Perceraian		**40,00**				**40,00**	
2.12.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**% jumlah Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan**	**Sungailiat**	**100%**	**807.300.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**823.446.000,00**
2.12.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah blanko KIA, Kertas A4 80 gsm dan buku register, formulir2 adminduk	Sungailiat	blanko KIA : 50.000 keping, Kertas A4 80 gsm : ..... Dus, buku register : ..... Buku , formulir2 adminduk : ..... Lembar	607.300.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	blanko KIA : 50.000 keping, Kertas A4 80 gsm : ..... Dus, buku register : ..... Buku , formulir2 adminduk : ..... Lembar	619.446.000,00
2.12.03.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri yang tersedia	Sungailiat	1 Unit	200.000.000,00	APBD	P1	1 Unit	204.000.000,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**762.438.000,00**				**777.686.760,00**
		Persentase jumlah Standar Pelayanan		**100,00**	**762.438.000,00**			**100,00**	**777.686.760,00**
		Persentase Pemanfaatan Data		**100,00**				**100,00**	
		Persentase inovasi kependudukan yang dimanfaatkan		**100,00**				**100,00**	
		Persentase Pegawai yang telah Memiliki Kompetensi Pelayanan		**60,00**				**60,00**	

		Persentase Penurunan Jumlah Pengaduan		**100,00**				**100,00**	
		Persentase Pemenuhan Sarana/Prasarana		**80,00**				**80,00**	
2.12.04.2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajikan Database Kependudukan**	**Persentase jaringan dan SIAK dalam kondisi baik**	**Sungailiat**	**100%**	**15.970.000,00**	APBD	P1	**100%**	**16.289.400,00**
2.12.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku agregat kependudukan yang disusun	Sungailiat	1 Dokumen	15.970.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	1 Dokumen	16.289.400,00
		Jumlah operasional layanan Media On line pelayanan kependudukan pelayanan On line melalui media Whatapp, face book, web dinas, email dinas yang dilaksanakan		12 Bulan				12 Bulan	
2.12.04.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**Persentase Jenis pelayanan kependudukan yang menggunakan IT**	Sungailiat	**100,00%**	**746.468.000,00**	APBN DAK PELAYANAN	P2	**100,00%**	**761.397.360,00**
2.12.04.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah rakornas, rakortek, rakornis, bimtek yang terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terlaksana		12 Bulan	242.338.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	100 Kali	247.184.760,00
2.12.04.2.03.04	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah operasional pelayanan keliling terpadu 8 kecamatan		12 Bulan	196.180.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	100 Kali	200.103.600,00
2.12.04.2.03.08	Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasasi		400 orang (200 laki-laki dan 200 perempuan)	129.980.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	100 Kali	132.579.600,00
2.12.04.2.03.12	Sub Kegiatan Layanan Mobile Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (seluruh Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas)	Jumlah berkas persyaratan Akte kelahiran yang diverifikasi dan divalidasi		70.000 Berkas	177.970.000,00	APBN DAK PELAYANAN	P2	100 Kali	181.529.400,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.526.635.700,00**				**6.998.887.591,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.12.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.12.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*15.000.000,00*			*4 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
2.12.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*14 Dokumen*	*15.000.000,00*			*14 Dokumen*	*16.500.000,00*

		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.839.226.000,00**			**0%**	**4.223.148.600,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.839.226.000,00**			**100%**	**4.223.148.600,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.824.226.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.206.648.600,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.577.309.700,00**				**2.654.628.991,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.12.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**2.577.309.700,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**2.654.628.991,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**				**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
2.12.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*1.385.668.700,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.427.238.761,00*
2.12.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*204.570.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*210.707.100,00*
2.12.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*44.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*45.938.000,00*
2.12.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*143.170.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*147.465.100,00*
2.12.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*82.583.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*85.060.490,00*
2.12.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*33.048.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*34.039.440,00*
2.12.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*235.870.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*242.946.100,00*
2.12.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*30 Unit*	*206.000.000,00*

2.12.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*17 Unit*	*77.250.000,00*
2.12.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*22.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*23.484.000,00*
2.12.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*154.500.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**80.100.000,00**			**73**	**88.110.000,00**
2.12.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**80.100.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**88.110.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
2.12.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*54.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*60.280.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*90 Stel*				*90 Stel*	
2.12.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 Orang (3 Laki-laki dan 2 perempuan)*	*25.300.000,00*	APBD	P1	*5 Orang*	*27.830.000,00*
JUMLAH					**8.096.373.700,00**				**8.600.020.351,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**				**215.856.500,00**				**220.173.630,00**
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi yang Baik		**100,00%**	**215.856.500,00**			**100,00%**	**220.173.630,00**
2.13.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**	**Kab. Bangka**	**30%**	**215.856.500,00**	APBD	P1	**45%**	**220.173.630,00**
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan	Kab. Bangka	10 Desa	77.205.500,00	APBD	P1	10 Desa	78.749.610,00
		Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan		4 Desa/Lingkungan				4 Desa/Lingkungan	
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase Desa yang Tertata Wilayahnya	Kab. Bangka	100%	138.651.000,00	APBD	P1	100%	141.424.020,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**5.247.540.253,00**				**5.352.491.058,06**
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel		**31,00%**	**5.247.540.253,00**			**100,00%**	**5.352.491.058,06**
2.13.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Aparatur Desa yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan**	**Kab. Bangka**		**5.247.540.253,00**	**APBD**	**P1**		**5.352.491.058,06**
		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa							
		Persentase Kepala Desa/BPD yang dilantik tepat waktu							
		Persentase Laporan Administrasi Desa yang baik							
		Persentase Laporan Keuangan Desa yang sesuai Juklak dan Juknis							
		Persentase Desa yang didampingi Sarjana Membangun Desa							
		Persentase Desa yang menerapkan Profil Desa Online							
		Persentase Rata-Rata Kontribusi Bumdesa terhadap pendapatan desa							

		Persentase Bumdesa yang menjadi Bumdesa Bersama							
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan asetnya difasilitasi	Kab. Bangka	31 Desa	1.144.198.000,00	APBD	P1	31 Desa	1.167.081.960,00
		Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya difasilitasi		62 Desa				62 Desa	
		Persentase Jumlah Juklak dan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang tersusun		62 Desa				62 Desa	
		Jumlah Desa yang mendapat Dana ADD (APBD)		62 Desa				62 Desa	
		Jumlah desa yang mendapat Dana Desa (APBN)		62 Desa				62 Desa	
		Jumlah desa yang menyampaikan database SISKEUDES tepat waktu		62 Desa				62 Desa	
		Desa yang menyampaikan data aset Desa tepat waktu		62 Desa				62 Desa	
		Jumlah Desa yang menyampaikan database SIPADES tepat waktu		62 Desa				62 Desa	
		Jumlah Desa yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa secara swakelola		62 Desa				62 Desa	
		Aparatur pemerintah desa yang hadir							
		Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan tepat waktu		62 Desa				62 Desa	
		Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu		62 Desa				62 Desa	
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Peserta Bimbingan dan Pelatihan Aparatur Desa	Kab. Bangka	44 Orang	2.145.220.900,00	APBD	P1	44 Orang	2.188.125.318,00
		Jumlah Sarjana Membangun Desa		62 Orang				62 Orang	
		Rakor Kades dan BPD dengan Bupati Bangka		2 Kali				2 Kali	
2.13.04.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	Kab. Bangka	31 Desa	-	APBD	P1	1 Dokumen	-
2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang dibina	Kab. Bangka	62 Bumdesa	175.769.603,00	APBD	P1	1 Dokumen	179.284.995,06
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Sosialisasi Pilkades	Kab. Bangka	62 Desa	1.726.140.000,00	APBD	P1	62 Desa	1.760.662.800,00
		Kades yang dilantik		44 Orang				44 Orang	
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa	Kab. Bangka	81 Desa	56.211.750,00	APBD	P1	81 Desa	57.335.985,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**1.787.495.819,00**				**1.823.245.735,38**
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif		**100,00%**	**1.787.495.819,00**			**100,00%**	**1.823.245.735,38**

2.13.05.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelompok PKK yang memiliki Keterampilan**	**Kab. Bangka**		**1.787.495.819,00**	**APBD**	**P1**		**1.823.245.735,38**
		Persentase Kecamatan dan Desa yang berpartisipasi dalam BBGRM							
		Persentase Posyandu Yang Aktif							
		Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan Masyarakat							
		Persentase Desa yang mengelola SDA Desa							
		Prestasi Lomba Desa Tingkat Propinsi							
		Persentase Kelompok UPK-SPP yang sehat keuangannya							
2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK Desa yang terbina	Kab. Bangka	62 PKK Desa	1.310.325.900,00	APBD	P1	62 PKK Desa	1.336.532.418,00
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Desa/Kelurahan terbaik	Kab. Bangka	6 Desa dan 2 Kelurahan	344.475.200,00	APBD	P1	6 Desa dan 2 Kelurahan	351.364.704,00
		Jumlah BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) yang diselenggarakan		1 Kali				1 Kali	
		Jumlah Posyandu yang aktif		81 Posyandu				81 Posyandu	
		Jumah Lembaga Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) yang dibina		1 Unit				1 Unit	
2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UPK-SPP yang dibina	Kab. Bangka	5 UPK-SPP	-	APBD	P1	5 UPK-SPP	-
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan	Kab. Bangka	3 Kali	132.694.719,00	APBD	P1	3 Kali	135.348.613,38
		Jumlah Desa yang mengikuti gelar teknologi tepat guna		... Desa				... Desa	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**5.387.652.900,00**				**5.815.236.938,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**30.000.000,00**				**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.13.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.13.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*3 Dokumen*	*15.000.000,00*			*3 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
2.13.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*7 Dokumen*	*15.000.000,00*			*7 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.585.869.300,00**			**0%**	**3.944.456.230,00**

2.13.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.585.869.300,00**			**100%**	**3.944.456.230,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.13.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.570.869.300,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*3.927.956.230,00*
2.13.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.588.303.600,00**				**1.635.952.708,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.13.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.588.303.600,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.635.952.708,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
2.13.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*434.265.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*447.293.568,00*
2.13.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*80.330.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*82.739.900,00*
2.13.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*42.750.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*44.032.500,00*
2.13.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*159.690.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*164.480.700,00*
2.13.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*33.468.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*34.472.040,00*
2.13.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*15.450.000,00*
2.13.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*297.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*306.528.000,00*
2.13.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia*	*Sungailiat*		*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*309.000.000,00*
		- Mobil		*1 Unit*				*1 Unit*	

2.13.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*131 Unit*	*98.900.000,00*	*APBD*	*P1*	*30 Unit*	*101.867.000,00*
2.13.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*18 Unit*	*111.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*17 Unit*	*114.536.000,00*
2.13.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*15.553.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**183.480.000,00**			**73**	**201.828.000,00**
2.13.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**183.480.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**201.828.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
2.13.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*55 Stel*	*51.050.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 Stel*	*56.155.000,00*
2.13.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*51.050.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*56.155.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*55 Stel*				*50 Stel*	
2.13.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 Orang*	*81.380.000,00*	APBD	P1	*5 Orang*	*89.518.000,00*
JUMLAH					**12.638.545.472,00**				**6.035.410.568,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
2:15:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**5.674.000.000,00**				**6.241.400.000,00**
		Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi		**3**	**5.674.000.000,00**			**5**	**6.241.400.000,00**
		Persentase Kecamatan yang mendapatkan pelayanan angkutan bus sekolah		**38**				**50**	
		Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan		**100**				**100**	
		Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar		**80**				**85**	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		**15**				**10**	
2.15.02.2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pengembangan Teknologi Perhubungan**		**1 Dokumen**	**350.000.000,00**			**1 Dokumen**	**385.000.000,00**
2.15.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*Jumlah Master plan dan Detail Engginerиing Design (DED) Penerangan Jalan Umum*	*Kab Bangka*	*1 Dokumen*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*110.000.000,00*
		Jumlah Master plan dan Detail Engginerиing Design (DED) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	*Kab Bangka*	*1 Dokumen*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*165.000.000,00*
		Jumlah koordinasi forum LLAJ	*Kab Bangka*	*2 kali*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*110.000.000,00*
2.15.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan jumlah prasarana jalan**		**64**	**4.720.000.000,00**			**64**	**5.192.000.000,00**
		Persentase perlengkapan jalan penunjang keselamatan lalu lintas		**70**				**70**	
		Persentase perlengkapan jalan yang terpelihara		**70**				**70**	
2.15.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	*Persentase Sarana Jalan yang Tersedia*	*Kab Bangka*			*APBD*			
		Lampu Jalan		*1 Paket*	*700.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*770.000.000,00*
2.15.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	*Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi*	*Kab Bangka*			*APBD*	*P1*		*-*
		Zona Keselamatan Sekolah		*3 Lokasi*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Lokasi*	*165.000.000,00*
		Warning Light		*1 Lokasi*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Lokasi*	*165.000.000,00*
		Marka Jalan		*2 Lokasi*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*275.000.000,00*
		Rambu Lalu Lintas		*1 Paket*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*110.000.000,00*
		Traffic Cone		*1 Paket*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*55.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan*	*Persentase prasarana dan PJU yang terpelihara*	*Kab Bangka*				*P1*		*-*
		Pembayaran Token Lampu Jalan		*12 Bulan*	*2.500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.750.000.000,00*
		Lampu Jalan (PPJ)		*1 Paket*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*550.000.000,00*
2.15.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	*Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpelihara*	*Kab Bangka*						*-*
		Traffic Light, Warning Light ,Rambu Rambu dan Halte		*1 Paket*	*320.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*352.000.000,00*
2.15.02.2.05	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**		**100**	**149.000.000,00**			**100**	**163.900.000,00**
2.15.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Kab Bangka*	*1 Paket*	*60.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*APBD*	*66.000.000,00*
2.15.02.2.02.07	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Persentase Sarana dan Persarana Pengujian Berkala Kendaraan yang Terpelihara*	*Kab Bangka*	*1 Paket*	*89.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*APBD*	*97.900.000,00*
2.15.02.2.07	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun**		**1 Dokumen**	**80.000.000,00**			**1 Dokumen**	**88.000.000,00**
2.15.02.2.07.02	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin*	*Jumlah Pegawai yang Mengikuti Andalalin*	*Kab Bangka*	*4 Orang*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*APBD*	*88.000.000,00*
2.15.02.2.08	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**100**	**195.000.000,00**			**100**	**214.500.000,00**
2.15.02.2.08.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ*	*Jumlah Pegawai yang Menjadi Auditor*	*Kab Bangka*	*1 Orang*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*APBD*	*44.000.000,00*
2.15.02.2.08.04	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi*	*Kab Bangka*	*12 Bulan*	*155.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*APBD*	*170.500.000,00*
2.15.02.2.11	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten**		**1 Dokumen**	**180.000.000,00**			**1 Dokumen**	**198.000.000,00**
2.15.02.2.11.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen tatanan transportasi lokal*	*Kab Bangka*	*1 Dokumen*	*180.000.000,00*		*P1*	*APBD*	*198.000.000,00*
2:15:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.035.486.900,00**				**6.505.209.583,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)			**67.631.000,00**				**74.394.100,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**67.631.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**74.394.100,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.15.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*3 Dokumen*	*26.826.000,00*			*3 Dokumen*	*29.508.600,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
2.15.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*7 Dokumen*	*40.805.000,00*			*7 Dokumen*	*44.885.500,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.914.055.800,00**			**0%**	**4.305.461.380,00**
2.15.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.914.055.800,00**			**100%**	**4.305.461.380,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.15.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.899.055.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.288.961.380,00*
2.15.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.911.800.100,00**				**1.969.154.103,00**
2.15.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.911.800.100,00**			**100%**	**1.969.154.103,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
2.15.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*468.371.300,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*482.422.439,00*
2.15.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*112.131.200,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*115.495.136,00*
2.15.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*20.600.000,00*
2.15.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*357.820.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*368.554.600,00*
2.15.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*143.816.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*148.131.098,00*
2.15.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*39.060.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*40.231.800,00*
2.15.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*170.266.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*175.373.980,00*
2.15.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Unit*	*82.400.000,00*
2.15.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*.... Unit*	*65.279.600,00*	*APBD*	*P1*	*.... Unit*	*67.237.988,00*
2.15.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*.... Unit*	*180.472.200,00*	*APBD*	*P1*	*.... Unit*	*185.886.366,00*
2.15.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur*	*Jumlah Perlengkapan Mebeleur yang tersedia*	*Sungailiat*	*.... Unit*	*74.183.200,00*	*APBD*	*P1*	*.... Unit*	*76.408.696,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor*	*Terpeliharanya Gedung Kantor*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*100.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*103.412.000,00*
2.15.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Terpeliharanya Gedung Kantor*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*.... Unit*	*103.000.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**142.000.000,00**			**73**	**156.200.000,00**
2.15.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**142.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**156.200.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
2.15.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*9.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*10.560.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya/adat yang tersedia	*Sungailiat*	*54 Stel*	*32.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*54 Stel*	*35.640.000,00*
2.15.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 Orang*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Orang*	*110.000.000,00*
		JUMLAH			**11.709.486.900,00**				**12.746.609.583,00**
PRIORITAS II									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
2:15:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**15.030.000.000,00**				**-**
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			**15.030.000.000,00**			**100,00%**	**-**
2.15.02.1.02	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**			**15.030.000.000,00**				
2.15.02.1.02.01	*Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi*	*Jumlah Prasarana Jalan yang Tersedia*	*Kab Bangka*			*APBD Prov*	*P2*		
		Lampu Penerangan Jalan di Jalan Lingkar Timur	*Desa Air Anyir, Desa Rebo, Kel.*	***435 unit***	***4.350.000.000,00***				
		Lampu Penerangan Jalan di Jalan Rebo - Tanjung Pesona - Jelitik Simpang Perahu	*Desa Rebo, Kel. Jelitik, Kel.*	***86 unit***	***860.000.000,00***				
		Lampu Penerangan Jalan di Jalan Sungailiat - Puding Besar	*Kec. Sungailiat, Kec. Pemali, Kec.*	***537 unit***	***5.370.000.000,00***				
		Lampu Penerangan Jalan di Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin	*Kec. Puding Besar*	***445unit***	***4.450.000.000,00***				
		JUMLAH			**15.030.000.000,00**				**-**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Prioritas 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.233.662.900,00**				**6.857.029.190,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**70.000.000,00**				**77.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.16.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**70.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**77.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.16.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*	*20.000.000,00*			*1 dokumen*	*22.000.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
2.16.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*	*50.000.000,00*	*APBD*		*7 dokumen*	*55.000.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.940.151.300,00**			**0%**	**4.334.166.430,00**
2.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.940.151.300,00**			**100%**	**4.334.166.430,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.16.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.925.151.300,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.317.666.430,00*
2.16.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.064.411.600,00**				**2.270.852.760,00**

		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.16.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**2.064.411.600,00**	**APBD**		**80%**	**2.270.852.760,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
2.16.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Pelayanan Jasa Surat Menyurat*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*499.891.600,00*	*APBD*		*1 tahun*	*549.880.760,00*
2.16.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*400.000.000,00*	*APBD*		*1 tahun*	*440.000.000,00*
2.16.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Paralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*33.750.000,00*	*APBD*		*1 tahun*	*37.125.000,00*
2.16.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*98.390.000,00*	*APBD*		*1 tahun*	*108.229.000,00*
2.16.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*89.780.000,00*	*APBD*		*1 tahun*	*98.758.000,00*
2.16.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi*	*Sungailiat*	*1 tahun*	*297.600.000,00*	*APBD*		*1 tahun*	*327.360.000,00*
2.16.01.2.03.21	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Mobil Operasional 4 Kabin*	*Sungailiat*	*1 unit*	*500.000.000,00*	*APBD*		*1 unit*	*550.000.000,00*
2.16.01.2.03.23	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Meja (6 unit) + Kursi Esel 2 dan 3 (6 unit) + AC (4 unit utk bid. egov dan ikp) + Alat Pemotong Kertas (1 unit)*	*Sungailiat*	*17 unit*	*50.000.000,00*	*APBD*		*17 unit*	*55.000.000,00*
2.16.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Laptop (5 unit) + Printer (5 unit) + Printer KIP (1 unit)*	*Sungailiat*	*11 unit*	*80.000.000,00*	*APBD*		*11 unit*	*88.000.000,00*
2.16.01.2.03.29	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor*	*Gedung Kantor yang refresentatif*	*Sungailiat*	*1 unit*	*15.000.000,00*	*APBD*		*1 unit*	*16.500.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**159.100.000,00**			**73**	**175.010.000,00**
2.16.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani**		**60%**	**159.100.000,00**	**APBD**		**80%**	**175.010.000,00**
2.16.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*67 stel*	*49.500.000,00*	*APBD*		*67 stel*	*54.450.000,00*
2.16.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 stel*	*9.600.000,00*	*APBD*		*16 stel*	*10.560.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*67 stel*				*67 stel*	
2.16.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 orang*	*100.000.000,00*	*APBD*		*5 orang*	*110.000.000,00*

2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**11.974.491.000,00**			**100%**	**12.659.727.300,00**
		Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi		**92,30%**	**4.700.478.000,00**			**100%**	**5.170.525.800,00**
2.16.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan**		**100%**	**4.700.478.000,00**	**APBD**		**100%**	**5.170.525.800,00**
2.16.02.1.06	*Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik*	*Persentase Sosialisasi Program-program Pemda*	*Sungailiat*	*100%*	*3.449.060.000,00*	*APBD*		*100%*	*3.793.966.000,00*
		Persentase Pelayanan Informasi kepada Masyarakat		*100%*				*100%*	
		Persentase Akses Web2SMS Corporate dan Aplikasi SEPERADIK		*100%*				*100%*	
2.16.02.1.10	*Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	*Jumlah Peralatan Studio yang diadakan*	*Sungailiat*	*19 unit*	*521.735.000,00*	*APBD*		*19 unit*	*573.908.500,00*
		Operasional Pemancar TV		*1 tahun*				*1 tahun*	
2.16.02.1.12	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	*KIM yang terbina*	*Sungailiat*	*20 KIM*	*729.683.000,00*	*APBD*		*20 KIM*	*802.651.300,00*
		Majalah Bakohumas		*200 eksp*				*200 eksp*	
		Pengadaan Cendramata/Plakat		*1 paket*				*1 paket*	
		Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang KOMINFOTIK		**83,87%**	**7.274.013.000,00**			**100%**	**7.489.201.500,00**
2.16.03.1.02	**Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase OPD yang Memanfaatkan Aplikasi**		**100%**	**7.274.013.000,00**	**APBD**		**100%**	**8.001.414.300,00**
2.16.03.1.02.01	*Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten*	*Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan TIK*	*Sungailiat*	*58,82%*	*6.808.365.000,00*	*APBD*		*58,82%*	*7.489.201.500,00*
2.16.03.1.02.07	*Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan*	*Sungailiat*	*1 aplikasi*	*465.648.000,00*	*APBD*		*4 aplikasi*	*512.212.800,00*
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**466.811.000,00**				**513.492.100,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**466.811.000,00**			**100%**	**513.492.100,00**
		Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu		**100,00%**	**466.811.000,00**				**458.492.100,00**
2.20.02.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia**		**100%**	**466.811.000,00**	**APBD**		**100%**	**513.492.100,00**
2.20.02.1.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	*Buku Bangka Dalam Angka*	*Sungailiat*	*1 dokumen*	*416.811.000,00*	*APBD*		*1 dokumen*	*458.492.100,00*
		Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat		*1 dokumen*				*1 dokumen*	

	Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Buku Studi PDRB Triwulanan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2021*		*1 dokumen*				*1 dokumen*	
		Buku Inflasi Kota Sungailiat		*1 dokumen*				*1 dokumen*	
		Buku Kecamatan Dalam Angka		*1 dokumen*				*1 dokumen*	
2.20.02.1.01.02	*Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	*ASN yang mengikuti Diklat*	*Sungailiat*	*5 orang*	*50.000.000,00*	*APBD*		*5 orang*	*55.000.000,00*
2.21.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
2.21.02.1.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**1.189.964.000,00**			**100%**	**1.308.960.400,00**
		Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan Terstandarisasi		**35,00%**	**1.189.964.000,00**			**40%**	**1.308.960.400,00**
2.21.02.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase PD yang menggunakan sistem persandian**		**100%**	**1.189.964.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.308.960.400,00**
2.21.02.1.01.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Penguatan Jarkomsanda*	*Sungailiat*	*75 ASN*	*1.189.964.000,00*	*APBD*		*75 ASN*	*1.308.960.400,00*
		Sosialisasi Keamanan Siber		*100 siswa*				*100 siswa*	
		Sosialisasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi		*100 ASN*				*100 ASN*	
		Pengamanan Ruang Objek Vital		*3 ruang*				*3 ruang*	
		Pengamanan Informasi melalui Dokumen secara Elektronik		*2 OPD*				*2 OPD*	
		IT Security Assesment		*4 Aplikasi*				*4 Aplikasi*	
JUMLAH					**19.864.928.900,00**				**21.339.208.990,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PRIORITAS I, II dan III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				48.037.000,00				52.840.700,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A		71,20%	48.037.000,00			76,10%	52.840.700,00
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Di Monev	Kabupaten Bangka	100 Koperasi	48.037.000,00	APBD 1	P1	100 Koperasi	52.840.700,00
2.17.03.2.01.01.	*Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan*	*Kabupaten Bangka*	*205 Koperasi*	*48.037.000,00*	*APBD*	*P1*	*205 Koperasi*	*52.840.700,00*
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				28.710.000,00				31.581.000,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A		71,20%	28.710.000,00			76,10%	31.581.000,00
2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian	Kab. Bangka	100%	28.710.000,00	APBD	P1	100%	31.581.000,00
2.17.04.2.01.01.	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinilai*	*Sungailiat*	*100 Koperasi*	*28.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 Koperasi*	*31.581.000,00*
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				227.987.000,00				250.785.700,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A		71,20%	227.987.000,00			76,10%	250.785.700,00
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Kab. Bangka	40 Koperasi	227.987.000,00	DAK Non Fisik	P1	40 Koperasi	250.785.700,00
2.17.05.2.01.01.	*Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi*	*Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Diklat*	*Sungailiat*	*40 Orang*	*227.987.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Orang*	*250.785.700,00*

02.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**455.763.000,00**	APBD	P1		**501.339.300,00**
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro		**50,00%**	**455.763.000,00**			**66,67%**	**501.339.300,00**
2.17.07.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Yang Mandiri**	**Sungailiat**	**8,00%**	**455.763.000,00**	**APBD**	**P1**	**9,00%**	**501.339.300,00**
2.17.07.2.01.01	*Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro*	*Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Berlegalitas*	*Kabupaten Bangka*	*100 UMKM*	*51.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 UMKM*	*56.881.000,00*
2.17.07.2.01.04	*Sub KegiatanPemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	*Jumlah UMKM Mikro yang Mengikuti Pelatihan*	*Kab.Bangka*	*35 UMKM*	*327.364.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P1*	*35 UMKM*	*125.000.000,00*
2.17.07.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*	*Jumlah UMKM Mikro yang Mengikuti Pelatihan Forum Diskusi*	*Kab.Bangka*	*40 UMKM*	*76.689.000,00*	*APBD 1*	*P2*	*50 UMKM*	*75.000.000,00*
02.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**364.408.000,00**	APBD	P1		**450.000.000,00**
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro		**50,00%**	**364.408.000,00**			**66,67%**	**450.000.000,00**
02.17.08.2.01	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil**	**Kab. Bangka**	**20 UMKM**	**364.408.000,00**	**Dak Non Fisik**	**P1**	**30 UMKM**	**450.000.000,00**
2.17.08.2.01.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi*	*Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil*	*Kab. Bangka*	*2 Kali*	*364.408.000,00*	*APBD 1*	*P1*	*2 Kali*	*450.000.000,00*
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN PENANAMAN MODAL**								
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**141.100.000,00**				**155.210.000,00**
		Persentase Jumlah Investor		**34,00%**	**141.100.000,00**			**35,00%**	**155.210.000,00**
2.18.02.2.02	**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Peta Potensi Investasi Yang Dapat Disusun Sesuai aturan**	**Sungailiat**	**100 %**	**141.100.000,00**	**APBD**	**P1**	**100 %**	**155.210.000,00**
02.18.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Yang Disusun Sesuai Aturan*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*122.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*134.750.000,00*
02.18.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Dan peluang Usaha*	*Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Usaha Yang Disusun Sesuai Aturan*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*18.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 dokumen*	*20.460.000,00*
2:18:03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**139.700.000,00**				**153.670.000,00**
		Persentase Jumlah Investor		**34,00%**	**139.700.000,00**			**35,00%**	**153.670.000,00**
02.18.03.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan**	**Dalam dan Luar Daerah**	**4 Kali**	**139.700.000,00**	**APBD**	**P1**	**4 Kali**	**153.670.000,00**

2.18.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal*	*Promosi Peluang Investasi Melalui Media Elektronik*	*Dalam dan Luar Daerah*	*1 Tahun*	*35.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Tahun*	*39.160.000,00*
2.18.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah*	*Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan*	*Dalam dan Luar Daerah*	*4 Kali*	*104.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Kali*	*114.510.000,00*
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**590.890.000,00**				**649.979.000,00**
		Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu		**100,00%**	**590.890.000,00**			**100,00%**	**649.979.000,00**
2.18.04.2.01	**Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan SecaraTerpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewqenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Dokumen Perizinan Usaha Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu**	**Sungailiat**	**3.200 Izin Usaha**	**590.890.000,00**	**APBD**	**P1**	**3.200 Izin Usaha**	**649.979.000,00**
2.18.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Layanan Perizinan Yang Diselesaikan Secara Online*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*3.200 Izin*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3.200 Izin*	*55.000.000,00*
2.18.04.2.01.02	*Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal*	*Jumlah Pelaksanaan Survey Lapangan*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*178 Survey*	*370.890.000,00*	*APBD*	*P1*	*178 Survey*	*407.979.000,00*
2.18.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan*	*Jumlah Pengaduan Yang Dapat Diselesaikan*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*20 Pengaduan*	*170.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Pengaduan*	*187.000.000,00*
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**181.230.000,00**				**199.353.000,00**
		Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM		**34,00%**	**181.230.000,00**			**35,00%**	**199.353.000,00**
2.18.05.2.01	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Realisasi Investasi**	**Dlm Dan Luar Kab Bangka**	***10 Milyar***	**181.230.000,00**	**APBD**	**P1**	***12 Milyar***	**199.353.000,00**
2.18.05.2.01.01.	*Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Investor Yang menanamkan modal*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*80 PMDN 10 PMA*	*57.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*80 PMDN 10 PMA*	*63.030.000,00*
2.18.05.2.01.02	*Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Investor Yang menanamkan modal*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*80 PMDN 10 PMA*	*73.930.000,00*	*APBD*	*P1*	*80 PMDN 15 PMA*	*81.323.000,00*
2.18.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penannaman Modal*	*Jumlah Investor Yang menanamkan modal*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*80 PMDN 10 PMA*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*80 PMDN 15 PMA*	*55.000.000,00*
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**310.800.000,00**				**341.880.000,00**
		Persentase Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar		**100,00%**	**310.800.000,00**			**100,00%**	**341.880.000,00**

		Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan		**100,00%**				**100,00%**	
2.18.06.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Layanan Sistem Informasi Secara Online**	**Dlm Dan Luar Kab Bangka**	***2 Aplikasi***	**310.800.000,00**	**APBD**	**P1**	***2 Aplikasi***	**341.880.000,00**
2.18.06.2.01.01.	*Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik*	*Pemanfaatan Pelayanan Sistem SICANTIK dan OSS*	*Dlm Dan Luar Kab Bangka*	*2 Aplikasi*	*310.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Aplikasi*	*341.880.000,00*
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.969.868.400,00**				**7.666.855.240,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**23**	**30.000.000,00**			**24**	**33.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12**				**13**	
02.18.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**30.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**33.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.18.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*5 Dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Renstra		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Rarenja		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Renja		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		RKA		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		DPA		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
2.18.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*8 Dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Dokumen*	*16.500.000,00*
		LAKIN		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		LPPD & LKPJ		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Laporan Tahunan		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Laporan Evaluasi Renja		*4 Laporan*				*4 Laporan*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**5.392.998.400,00**			**0%**	**5.932.298.240,00**
2.18.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**5.392.998.400,00**			**100%**	**5.932.298.240,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.18.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*5.377.998.400,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*5.915.798.240,00*
2.18.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	

		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**70**	**1.373.060.000,00**			**70**	**1.510.366.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**80**				**80**	
2.18.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**1.373.060.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.510.366.000,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**100%**				**100%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
2.18.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*638.440.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*702.284.000,00*
2.18.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*107.950.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*118.745.000,00*
2.18.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*24.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*27.170.000,00*
		Komputer 10 unit						*Komputer 10 unit*	
		Laptop 4 unit						*Laptop 4 unit*	
		AC 12 unit						*AC 12 unit*	
		Genset 1 unit						*Genset 1 unit*	
2.18.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*150.590.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*165.649.000,00*
		Roda Empat (Mobil) 5 Unit							
		Roda Dua (Motor) 1 Unit							
2.18.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*59.120.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*65.032.000,00*
2.18.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*100%*	*34.510.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*37.961.000,00*
2.18.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Kabupaten Bangka dan Luar Daerah*	*100%*	*120.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*132.495.000,00*
2.18.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*100%*	*203.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*223.850.000,00*
				Infocus 2 Unit	*30.000.000,00*			*Infocus 2 Unit*	*33.000.000,00*
				- Papan Neon Box 1 unit	*10.000.000,00*			*- Papan Neon Box 1 unit*	*11.000.000,00*
				- Komputer/PC 5 unit	*50.000.000,00*			*- Komputer/PC 5 unit*	*55.000.000,00*
				- Notebook 5 Unit	*50.000.000,00*			*- Notebook 5 Unit*	*55.000.000,00*
				- Printer Scanner 5 unit	*17.500.000,00*			*- Printer Scanner 5 unit*	*19.250.000,00*
				- AC 6 unit	*42.000.000,00*			*- AC 6 unit*	*46.200.000,00*
				- UPS/Stabilizer 2 unit	*4.000.000,00*			*- UPS/Stabilizer 2 unit*	*4.400.000,00*
2.18.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur*	*Jumlah meubeuleur gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*- Meja Kerja 1 biro 5 unit*	*23.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*- Meja Kerja 1 biro 5 unit*	*25.850.000,00*

				- Meja Kerja 1 biro 5 unit	*7.500.000,00*			*- Meja Kerja 1 biro 5 unit*	*8.250.000,00*
				- Meja Kerja 1/2 biro 10 unit	*7.500.000,00*			*- Meja Kerja 1/2 biro 10 un*	*8.250.000,00*
				- Kursi Kerja 15 unit	*7.500.000,00*			*- Kursi Kerja 15 unit*	*8.250.000,00*
				- Dispenser 2 unit	*1.000.000,00*			*- Dispenser 2 unit*	*1.100.000,00*
2.18.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Persentase Prasarana Gedung Kantor yang tersedia Dalam Kondisi Baik*	*Sungailiat*	*100%*	*10.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*11.330.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**70**	**173.810.000,00**			**73**	**191.191.000,00**
02.18.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**		**40%**	**173.810.000,00**			**40%**	**191.191.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**80%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**80%**	
02.18.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*64 Stel*	*48.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*64 Stel*	*52.910.000,00*
02.18.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*9.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*10.670.000,00*
		Jumlah Pakaian pawai Budaya Yang tersedia	*Sungailiat*	*20 Stel*	*41.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Stel*	*45.111.000,00*
02.18.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*5 orang*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Orang*	*82.500.000,00*
JUMLAH PRIORITAS I					**9.458.493.400,00**				**10.453.493.940,00**
PRIORITAS II									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2:17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
02.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**184.591.000,00**		P2		**250.000.000,00**
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro		**50,00**	**184.591.000,00**			**66,67**	**250.000.000,00**
2.17.07.2.01.01	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Yang Mandiri**	**Kab.Bangka**	**100 UMKM**	**184.591.000,00**	**APBD 1**	**P2**	**100 UMKM**	**250.000.000,00**
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Berlegalitas*	*Kab.Bangka*	*100 UMKM*	*38.885.000,00*	*APBD1*	*P2*	*100 UMKM*	*50.000.000,00*
2.17.07.2.01.04	*Sub KegiatanPemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	*Jumlah UMKM Mikro yang Mengikuti Pelatihan*	*Kab.Bangka*	*35 UMKM*	*92.508.500,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*35 UMKM*	*125.000.000,00*
2.17.07.2.01.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*	*Jumlah UMKM Mikro yang Mengikuti Pelatihan Forum Diskusi*	*Kab.Bangka*	*40 UMKM*	*53.197.500,00*	*APBD 1*	*P2*	*50 UMKM*	*75.000.000,00*
02.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**463.275.000,00**		P2		**450.000.000,00**

		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro		**50,00**	**463.275.000,00**			**66,67**	**450.000.000,00**
2.17.08.2.01	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil**	**Kab.Bangka**	**20 UMKM**	**463.275.000,00**	**Dak Non Fisik**	**P2**	**30 UMKM**	**450.000.000,00**
2.17.08.2.01.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi*	*Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil*	*Kab.Bangka*	*2 Kali Kegiatan*	*463.275.000,00*	*APBD 1*	*P2*	*2 Kali Kegiatan*	*450.000.000,00*
02.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**21.785.000,00**				**50.000.000,00**
		Persentase Koperasi Aktif		**100,00%**	**21.785.000,00**			**100,00%**	**50.000.000,00**
2.17.03.2.01	**Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Yang Di Monev**	**Kab.Bangka**	**50 Koperasi**	**21.785.000,00**	**APBD1**	**P2**	**50 Koperasi**	**50.000.000,00**
2:17:04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**37.960.000,00**				**75.000.000,00**
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A		**71,20%**	**37.960.000,00**			**76,10%**	**75.000.000,00**
2.17.04.2.01	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian**	**Kab.Bangka**	**55 Koperasi**	**37.960.000,00**		**P2**	**65 Koperasi**	**75.000.000,00**
2.17.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinilai*	*Kab.Bangka*	*50 Koperasi*	*37.960.000,00*	*APBD 1*	*P2*	*50 Koperasi*	*75.000.000,00*
2:17:05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**150.000.000,00**				**300.000.000,00**
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A		**71,20%**	**150.000.000,00**			**76,10%**	**150.000.000,00**
2.17.05.2.01	**Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kaupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Yang Memiliki Kompetensi**	**Kab.Bangka**	**35 Koperasi**	**150.000.000,00**	**DAK Non Fisik**	**P2**	**35 Koperasi**	**150.000.000,00**
2.17.05.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi*	*Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Diklat*	*Kab.Bangka*	*35 Koperasi*	*150.000.000,00*	*DAK Non Fisik*	*P2*	*35 Koperasi*	*150.000.000,00*
JUMLAH PRIORITAS II					**857.611.000,00**				**1.125.000.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**276.188.000,00**				**351.457.500,00**
		Persentase Jenis Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		**100,00%**	**276.188.000,00**			**100,00%**	**351.457.500,00**
		Persentase Jenis Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		**83,33%**				**83,33%**	
		Persentase Pustakawan yang Berkualifikasi Sesuai Standar Nasional		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Pengelola Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		**13,41%**				**26,82%**	
		Persentase Prasarana dan Sarana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		**96,25%**				**96,25%**	
2.23.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Koleksi Per Kapita Bahan Pustaka Terkelola Baik**		**0,052**	**118.315.000,00**			**0,053**	**128.981.500,00**
		Persentase Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan/Kecamatan dan Sekolah yang berkompetensi		**13,41**				**26,82**	
2.23.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan*	*Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah (SD dan SMP) yang dibina*	*Kabupaten Bangka*	*20 Perpustakaan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Perpustakaan*	*16.500.000,00*
2.23.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan/Kecamatan dan TBM yang dibina*	*Kabupaten Bangka*	*10 Perpustakaan*	*7.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Perpustakaan*	*8.250.000,00*
2.23.02.2.01.06	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan/Kecamatan dan Sekolah yang mengikuti bimtek perpustakaan*	*Sungailiat*	*40 Orang*	*28.150.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Orang*	*30.965.000,00*
		Jumlah Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan/Kecamatan dan Sekolah yang berprestasi	*Kabupaten Bangka*	*6 Orang (Perpustakaan Desa/Kelurahan)*	*51.240.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 Orang*	*56.364.000,00*
				6 Orang (Perpustakaan SD)				*6 Orang*	

				6 Orang (Perpustakaan SMP)				*6 Orang*	
		Jumlah Pengelola Pojok Baca dan TBM yang berprestasi		*6 Orang*				*6 Orang*	
2.23.02.2.01.09	*Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*	*Persentase koleksi buku yang terpelihara baik*	*Sungailiat*	*100%*	*16.425.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*16.902.500,00*
		Persentase Koleksi Buku yang diolah (diinput)		*35,55%*				*36,26%*	
2.23.02.2.02	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Literasi Dasar Baca Tulis**		**53,87%**	**157.873.000,00**			**54,06%**	**222.476.000,00**
2.23.02.2.02.01.	*Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat*	*Jumlah Titik Perpustakaan keliling*	*Kabupaten Bangka*	*40 Titik*	*52.930.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Titik*	*58.223.000,00*
		Jumlah Kunjungan story telling		*20 kunjungan*				*20 kunjungan*	
		Jumlah Pengunjung Pameran Perpustakaan	*Luar Daerah*	*100 pengunjung*				*100 pengunjung*	
2.23.02.2.02.03.	*Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca*	*Jumlah Peserta Lomba Bercerita Antar Siswa SD/MI*	*Sungailiat*	*40 peserta*	*94.013.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 peserta*	*152.230.000,00*
		Jumlah Peserta Lomba Bercerita Bahasa Daerah dan Sastra	*Sungailiat*	*70 peserta*				*20 peserta*	
2.23.02.2.02.04.	*Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	*Jumlah Peserta Pelatihan/ Workshop/ Seminar/Bimtek Transformasi Berbasis Inklusi Sosial*	*Sungailiat*	*50 peserta*	*10.930.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 peserta*	*12.023.000,00*
2	**URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**444.371.952,00**				**415.780.697,20**
		Persentase Nilai Aspek Pengolahan Arsip Inaktif		**92%**	**138.878.500,00**			**92%**	**79.737.900,00**
		Persentase Nilai Aspek Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip		**59%**				**61%**	
2.24.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip dinamis aktif dan inaktif di bawah 10 tahun yang terdata dan tertata baik**		**30%**	**138.878.500,00**			**40%**	**79.737.900,00**
		Persentase Arsip Dinamis Daerah yang terpelihara baik		**100%**				**100%**	
2.24.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis daerah yang didata dan ditata	Sungailiat	300 Boks	22.179.000,00	APBD	P1	300 Boks	24.396.900,00
		Jumlah Pangkalan Data Arsip OPD		1 Database	66.389.500,00			0 Database	0,00
2.24.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Daerah yang dipelihara	Sungailiat	4000 Boks	9.750.000,00	APBD	P1	4300 Boks	10.725.000,00
		Jumlah Arsip dinamis daerah yang disusutkan		150 boks	40.560.000,00			150 boks	44.616.000,00
		Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis		***55%***	**92.531.000,00**			***60%***	**101.784.100,00**
2.24.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis daerah yang diakuisisi**		**11,76%**	**92.531.000,00**			**17,65%**	**101.784.100,00**

		Persentase Arsip Statis Daerah yang terpelihara baik		**100%**				**100%**	
2.24.02.2.02.02	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase OPD yang arsip statisnya didata dan ditata	Kabupaten Bangka	32,35%	82.531.000,00	APBD	P1	41,18%	90.784.100,00
		Persentase lembaga pemda yang ditelusuri	Kabupaten Bangka dan Luar Daerah	12,35%	10.000.000,00	APBD	P1	18,52%	11.000.000,00
		Persentase nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		**65%**	**212.962.452,00**			**69%**	**234.258.697,20**
		Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan		**93,50%**				**94%**	
		Persentase nilai Aspek Program Kearsipan		**75%**				**80%**	
2.24.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SIKD**		**2,94%**	**212.962.452,00**				**234.258.697,20**
2.24.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN*	*Persentase Pedoman Pengelolaan Arsip yang disusun*	*Dalam dan Luar Daerah*	*71,43%*	*85.884.750,00*	*APBD*	*P1*	*85,71%*	*94.473.225,00*
		Persentase Data Monev Kearsipan OPD, Kelurahan dan Desa yang akurat		*43,48%*				*60,87%*	
		Persentase Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Internal OPD, Kelurahan dan Desa (LAKI)		*8,70%*				*13,04%*	
2.24.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota*	*Jumlah arsiparis dan pengelola arsip OPD yang berprestasi*	*Kabupaten Bangka*	*6 Orang*	*127.077.702,00*	*APBD*	*P1*	*6 Orang*	*139.785.472,20*
		Jumlah pengelola arsip Kelurahan/Desa yang berprestasi		*6 Orang*				*6 Orang*	
		Persentase arsiparis dan pengelola arsip OPD, Kelurahan dan Desa yang mengikuti bimtek arsip		*52,17%*				*69,57%*	
		Persentase arsiparis dan pengelola arsip OPD, Kelurahan dan Desa yang dibina		*40%*				*60%*	
		Jumlah wilayah Pemerintah Daerah yang disosialisasi		*2 Kecamatan*				*2 Kecamatan*	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.871.121.000,00**				**5.277.895.430,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
2.23.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.23.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*7.500.000,00*			*4 Dokumen*	*8.250.000,00*

		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
2.23.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*14 Dokumen*	*7.500.000,00*			*14 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.610.450.000,00**			**0%**	**3.971.495.000,00**
2.23.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.610.450.000,00**			**100%**	**3.971.495.000,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.23.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.595.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*3.954.995.000,00*
2.23.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.147.681.000,00**				**1.182.111.430,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
2.23.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.147.681.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.182.111.430,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**1**				**1**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
2.23.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*563.542.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*580.448.260,00*
2.23.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*86.760.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*89.362.800,00*
2.23.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*21.900.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*22.557.000,00*
2.23.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*115.350.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*118.810.500,00*
2.23.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*163.698.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*168.608.940,00*
2.23.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*33.027.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*34.018.325,00*

2.23.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*115.703.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*119.174.605,00*
2.23.01.1.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*4 Unit*	*12.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*12.875.000,00*
2.23.01.1.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Meubeleur*	*Jumlah meubeleur yang diadakan*	*Sungailiat*	*25 Unit*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Unit*	*20.600.000,00*
2.23.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*15.656.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**97.990.000,00**			**73**	**107.789.000,00**
2.23.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**97.990.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**107.789.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
2.23.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*39.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*43.780.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*59 Stel*				*20 Stel*	
2.23.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 Orang*	*58.190.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*64.009.000,00*
JUMLAH					**5.591.680.952,00**				**6.045.133.627,20**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**2.725.000.000,00**				**0,00**
		Persentase Prasarana dan Sarana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		**96,25%**	**2.725.000.000,00**			**96,25%**	**0,00**
01.08.02	***Kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan***		*Kabupaten Bangka*	*20 Perpustakaan*	***2.000.000.000,00***				*0,00*
01.08.02.02	*Sub Kegiatan Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota*	*Jumlah gedung perpustakaan yang direnovasi*	*Kabupaten Bangka*	*1 Unit*	*2.000.000.000,00*	*DAK Reguler*	*P2*	*-*	*0,00*
01.08.03	***Kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan***				***725.000.000,00***				
01.08.03.01	*Sub Kegiatan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota*	*Jumlah perabotan layanan perpusatakaan yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*475.000.000,00*	*DAK Reguler*	*P2*	*-*	*0,00*
01.08.03.02	*Sub Kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota*	*Jumlah komputer pemustaka yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*250.000.000,00*	*DAK Reguler*	*P2*	*-*	*0,00*
JUMLAH					**2.725.000.000,00**				**58.223.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.25	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**807.985.500,00**				**824.145.210,00**
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (%)		**19,00%**	**807.985.500,00**			**21,50%**	**824.145.210,00**
		Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Tangkap (%)		**80,00%**				**85,00%**	
3.25.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase perahu tanpa motor yang memiliki mesin kapal penangkapan ikan (%)**	**Kab.Bangka**	**3,06%**	**518.158.000,00**	APBD	P1	**3,57%**	**528.521.160,00**
		Persentase nelayan yang menjadi peserta asuransi (%)		**17,12%**				**17,12%**	
		IKM Perikanan		**3,5**				**3,6**	
3.25.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	*Jumlah data Produksi ikan dan harga ikan yang disusun*	*Sungailiat*	*1*	*86.305.000,00*	*APBD*	*P1*	*1*	*88.031.100,00*
		Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun		*10*				*10*	
3.25.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Jumlah bantuan Mesin Tempel 8 - 10 PK untuk nelayan*	*Sungailiat*	*8*	*291.960.000,00*	*APBD*	*P1*	*15*	*297.799.200,00*
3.25.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Jumlah nelayan yang mendapat Premi Asuransi nelayan*	*Sungailiat*	*514*	*139.893.000,00*	*APBD*	*P1*	*750*	*142.690.860,00*
3.25.02.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase nelayan yang memiliki sertifikat pelatihan (%)**	**Kab.Bangka**	**10,2%**	**134.317.500,00**	APBD	P1	**14,3%**	**137.003.850,00**
		Persentase peningkatan KUB (%)		**10,0%**				**10,0%**	
3.25.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*	*Jumlah nelayan kecil yang terlatih*	*Kab.Bangka*	*25*	*69.850.000,00*	*APBD*	*P1*	*50*	*71.247.000,00*
3.25.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil*	*Jumlah KUB yang dibina/didampingi*	*Kab.Bangka*	*15*	*64.467.500,00*	*APBD*	*P1*	*15*	*65.756.850,00*
3.25.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepada nelayan**	**Sungailiat**	**100,00%**	**107.924.500,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**110.082.990,00**
3.25.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	*Jumlah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan TPI yang disusun*		*10 Buku*	*40.239.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Buku*	*41.043.780,00*

3.25.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	*Jumlah layanan operasional TPI yang diselenggarakan*		*12 Bulan*	*67.685.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*69.039.210,00*
3.25.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase nelayan kecil yang memiliki tanda daftar kapal perikanan (%)**	**Kab.Bangka**	**3,30%**	**22.345.000,00**	**APBD**	**P1**	**3,30%**	**22.791.900,00**
3.25.02.2.04.02	*Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT*	*Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan sesuai standar*		*1*	*22.345.000,00*	*APBD*	*P1*	*1*	*22.791.900,00*
3.25.02.2.06	**Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kapal perikanan yang memiliki buku kapal perikanan (%)**	**Kab.Bangka**	**3,14%**	**25.240.500,00**	**APBD**	**P1**	**3,14%**	**25.745.310,00**
3.25.02.2.06.02	*Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	*Jumlah Buku Kapal Perikanan yang diterbitkan sesuai standar*		*1 Dokumen*	*25.240.500,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*25.745.310,00*
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**1.605.068.000,00**				**1.637.169.360,00**
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (%)		**9,62%**	**1.605.068.000,00**			**9,62%**	**1.637.169.360,00**
		Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Budidaya (%)		**80,00%**				**85,00%**	
3.25.03.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan (%)**	**Kab.Bangka**	**4,81%**	**20.358.500,00**			**4,81%**	**20.765.670,00**
5.25.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing*	*Tersedianya data hasil survei dan Indentifikasi izin usaha perikanan*		*10 Buku*	*20.358.500,00*	*APBD*	*P1*	*10 Buku*	*20.765.670,00*
3.25.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Kelompok Sasaran Pembudidaya Ikan Terhadap Teknis Budidaya Ikan Air Tawar/Payau**	**Kab.Bangka**	**85,00%**	**280.670.000,00**			**90,00%**	**286.283.400,00**
		Prosentase POKDAKAN yang naik kelas (%)		**3,85%**				**3,85%**	

		Persentase pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mendapat akses permodalan melalui lembaga keuangan/non lembaga keuangan (%)		**0,30%**				**0,30%**	
3.25.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Jumlah POKDAKAN yang dibentuk*		*1*	*97.520.000,00*	*APBD*	*P1*	*1*	*99.470.400,00*
		Jumlah POKDAKAN yang dibina		*1*				*1*	
3.25.03.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*	*Jumlah pembudidaya yang mendapat bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha*		*25*	*46.765.000,00*	*APBD*	*P1*	*25*	*47.700.300,00*
3.25.03.2.02.04	*Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan teknis pembudidayaan ikan*		*5*	*136.385.000,00*	*APBD*	*P1*	*5*	*139.112.700,00*
3.25.03.2.03	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki tanda daftar pembudidayaan ikan kecil (%)**	**Kab.Bangka**	**4,81%**	**21.893.500,00**			**4,81%**	**22.331.370,00**
3.25.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Laporan Hasil Survei dan Identifikasi Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil*		*10 Buku*	*21.893.500,00*	*APBD*	*P1*	*10 Buku*	*22.331.370,00*
3.25.03.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki tanda daftar pembudidayaan ikan kecil (%)**	**Kab.Bangka**	**4,81%**	**1.282.146.000,00**			**4,81%**	**1.307.788.920,00**
3.25.03.2.04.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen NTPI yang disusun*		*1 Dokumen*	*217.795.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*222.150.900,00*
		Jumlah data potensi perikanan budidaya yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
3.25.03.2.04.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah paket percontohan budidaya ikan air payau yang tersedia*		*1 Paket*	*872.928.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*890.386.560,00*
		Jumlah layanan operasional UPTD BBI yang diselenggarakan		*12 Bulan*				*12 Bulan*	
		Jumlah sarana dan prasarana Balai Benih Ikan yang diadakan		*Gudang Pakan, Tandon Air, Sumur dan Pagar Kolam Balai Benih Ikan*				*1 Paket*	
3.25.03.2.04.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kesehatan yang disusun*		*1 Laporan*	*52.754.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Laporan*	*53.809.080,00*
3.25.03.2.04.05	*Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*	*Jumlah kelompok sasaran pembudidaya ikan yang dilatih teknis usaha budidaya ikan air payau/air tawar (%)*		*30*	*138.669.000,00*	*APBD*	*P1*	*30*	*141.442.380,00*
		Jumlah Peserta Sosialisasi CPIB dan CBIB		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.132.109.400,00**				**6.639.850.570,00**

		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**25**	**15.000.000,00**			**26**	**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**13**				**14**	
3.25.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
3.25.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*5*	*7.500.000,00*			*5*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*15*				*15*	
3.25.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*25*	*7.500.000,00*			*25*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**4.522.058.400,00**			**0%**	**4.974.264.240,00**
3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**4.522.058.400,00**			**100%**	**4.974.264.240,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
3.25.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*4.507.058.400,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.957.764.240,00*
3.25.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**72**	**1.506.711.000,00**			**74**	**1.551.912.330,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**95**				**96**	
3.25.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.506.711.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.551.912.330,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
3.25.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*811.905.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*836.262.150,00*

3.25.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*127.075.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*130.887.250,00*
3.25.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*29.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*29.870.000,00*
3.25.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*110.750.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*114.072.500,00*
3.25.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*69.451.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*71.534.530,00*
3.25.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*36.690.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*37.790.700,00*
3.25.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*170.020.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*175.120.600,00*
3.25.01.1.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*18.520.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*19.075.600,00*
3.25.01.1.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*108.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*111.549.000,00*
3.25.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*25.750.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**88.340.000,00**			**73**	**97.174.000,00**
3.25.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**88.340.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**97.174.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
3.25.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*47.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*52.580.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*170 Stel*				*20 Stel*	
3.25.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*(2 Laki-Laki dan 2 Perempuan)*	*40.540.000,00*	APBD	P1	*(2 Laki-Laki dan 2 Perempuan)*	*44.594.000,00*
JUMLAH					**8.545.162.900,00**				**9.101.165.140,00**

Prioritas : II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.25	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**1.751.597.000,00**				**1.758.597.000,00**
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)		**19,00%**	**1.751.597.000,00**			**21,50%**	**1.758.597.000,00**

3.25.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase KUB yang mendapatkan bantuan bantuan kapal, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (%)**	**Kab.Bangka**	**3,06%**	**1.401.597.000,00**	DAK Penugasan	P2	**3,57%**	**1.401.597.000,00**
10.02.02	*Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil*	*Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan bantuan kapal, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (%)*		*10 KUB*	*1.401.597.000,00*	*DAK Penugasan*	*P2*	*10 KUB*	**1.401.597.000,00**
	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	*Jumlah perahu/kapal penangkap ikan yang tersedia*	*Puding Besar, Sungailiat, Belinyu, Riau Silip*	*10 Paket*	*1.401.597.000,00*	*DAK Penugasan*	*P2*	*10 Paket*	**1.401.597.000,00**
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil**	**Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap (unit)**	**Kab.Bangka**		**350.000.000,00**	*APBD Prov*	P2		**357.000.000,00**
3.25.03.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Jumlah mesin tempel 18 PK (Unit/Tahun)*	*Desa Baturusa, Desa Rebu, Kel. Matras, Kel. Mantung, Desa Riding Panjang(Belinyu), Desa Penagan, Desa Kota waringin*	*10*	*350.000.000,00*	*APBD Prov*	*P2*	*15*	*357.000.000,00*
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**200.000.000,00**				**204.000.000,00**
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)		**2,70%**	**200.000.000,00**			**2,75%**	**204.000.000,00**
3.25.03.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Kab.Bangka**	**4,81%**	**200.000.000,00**			**4,81%**	**204.000.000,00**
3.25.03.2.04.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Benih Lele yang Dibantu*		*1 Paket*	*200.000.000,00*	*DAK*	*P2*	*1 Paket*	*204.000.000,00*
		Jumlah Percontohan Nila di Kolam/Tambak		*1 Paket*				*1 Paket*	
		Jumlah Bioflock yang diberikan		*5 Paket*		*APBN*	*P2*	*5 Paket*	
		Jumlah Induk Ikan yang diberikan kepada POKDAKAN							
		- Ikan Lele		*1 Paket*				*1 Paket*	
		- Ikan Gurame		*1 Paket*				*1 Paket*	
		Jumlah Restocking (Kakap Putih, Bandeng) yang disalurkan		*2 Paket*				*2 Paket*	
		Jumlah Asuransi Pembudidaya Ikan		*25*				*25*	
		Jumlah Cold Storage Portable yang tersedia		*1 Paket*				*1 Paket*	
JUMLAH					**1.951.597.000,00**				**1.962.597.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KABUPATEN BANGKA

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**2.269.970.000,00**				**2.331.967.000,00**
		Indeks Pengembangan Budaya	**Kab. Bangka**	**66,86**	**1.547.270.000,00**	APBD	P1	**75,70**	**1.536.997.000,00**
2.22.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**% Objek Budaya yang dinventarisir**	**Kab. Bangka**	**70.56%**	**1.327.270.000,00**	**APBD**	**P1**	**73.89%**	**1.459.997.000,00**
		% Objek Budaya yang direstorasi		**70.24%**				**74.05%**	
		% Budaya yang dilestarikan		**50.18%**				**80.00%**	
2.22.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Event Budaya yang diselenggarakan*	*Kab. Bangka*	*18 Event*	*1.147.270.000,00*	*APBD*	*P1*	*18 Event*	*1.261.997.000,00*
		Jumlah Pawai Budaya yang deselenggarakan	*Kab. Bangka*	*1 kali*	*180.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*198.000.000,00*
2.22.02.2.02	**Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**% Seni yang dilestarikan**	**Kab. Bangka**	**50.18%**	**220.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**80.00%**	**77.000.000,00**
2.22.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Pertunjukan Kesenian daerah*	*Luar daerah*	*1 Kali Pertunjukan*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali Pertunjukan*	*77.000.000,00*
		Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan	*Kab. Bangka, luar daerah (pangkalpinang)*	*2 Festival*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Festival*	*165.000.000,00*
		Indeks Pengembangan Budaya		**66,86**	**80.000.000,00**	APBD	P1	**75,70**	**88.000.000,00**
2.22.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**% Pelaku Tradisi yang Memahami Nilai Tradisi dan Karakter Bangsa**	**Kab. Bangka**	**70.83%**	**80.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**75.43%**	**88.000.000,00**
		% Objek Budaya yang direvitalisasi		**62.90%**				**75.98%**	
2.22.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah layanan penyelengaraan operasional Dewan Kesenian*	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*44.000.000,00*
		Jumlah Layanan penyelenggaraan operasional Lembaga Adat	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*44.000.000,00*
		Indeks Pemanfaatan Budaya		**76,43**	**642.700.000,00**	APBD	P1	**84,80**	**706.970.000,00**
2.22.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**% Responden yang Puas dengan Fasilitas Budaya**	**Kab. Bangka**	**74.67%**	**20.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**84.72%**	**22.000.000,00**
		% Kerjasama Budaya yang ditindaklanjuti		**81.90%**				**88.13%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Objek Budaya dan Seni*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen/ 12 Bulan*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen/ 12 Bulan*	*22.000.000,00*
2.22.02.2.02	**Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**% Kelompok Seni yang Berprestasi**	**Kab. Bangka**	**72.80%**	**622.700.000,00**	**APBD**	**P1**	**81.57%**	**684.970.000,00**
2.22.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya alam Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah layanan jasa pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya*	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*137.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*151.470.000,00*
		Jumlah Pemberian dukungan terhadap Keikutsertaan Pawai Budaya Tk Provinsi	*Luar daerah*	*1 Kali*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*27.500.000,00*
		Jumlah Pemberian dukungan kepada pelaku seni (ATRAKSI SENI)	*Kab. Bangka*	*60 kali*	*180.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*60 kali*	*198.000.000,00*
		Jumlah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya ke masyarakat	*Kab. Bangka*	*8 Grup Seni*	*80.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 Grup Seni*	*88.000.000,00*
		Jumlah Pemberian dukungan kepada TIM Marching Band pada kejuaraan nasional	*Luar daerah*	*1 kali*	*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 kali*	*220.000.000,00*
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**394.250.000,00**				**433.675.000,00**
		Indeks Perlindungan Budaya	**Kab. Bangka**	**68,67**	**394.250.000,00**	APBD	P1	**66,09**	**433.675.000,00**
2.22.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**Kab. Bangka**	**50.18%**	**394.250.000,00**	**APBD**	**P1**	**62.41%**	**433.675.000,00**
2.22.05.2.02.02	*Sub Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya*	*Jumlah layanan Situs dan Cagar Budaya dalam kondisi baik*	*Kab. Bangka*	*12 bulan/11 Lokasi*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan/11 Lokasi*	*132.000.000,00*
		jumlah layanan kebersihan museum budaya	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*26.550.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*29.205.000,00*
		Jumlah Kompensasi pencegahan dan penanggulangan kehancuran cagar budaya	*Kab. Bangka*	*12 bulan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*110.000.000,00*
2.22.05.2.02.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya*	*Jumlah Bangunan Museum Budaya yang direnovasi*	*Kab. Bangka*	*1 unit*	*147.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 unit*	*162.470.000,00*
		Jumlah Master Plan Kota Kapur yang dilaksanakan	*Kab. Bangka*	*1 dokumen*	*0,00*	*APBD*	*P1*	*0*	*0,00*
		Jumlah Pembuatan Replika Situs cagar budaya sebagai informasi budaya yang dilaksanakan	*Kab. Bangka*	*1 unit*	*0,00*	*APBD*	*P1*	*2 unit*	*0,00*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**2.836.832.000,00**				**3.120.515.200,00**
		Indeks Destinasi Pariwisata	**Kab. Bangka**	**70,11%**	**2.836.832.000,00**			**73,56%**	**3.120.515.200,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar**	**Kab. Bangka**	**72.36%**	**100.000.000,00**	**APBD, DAK**	**P1,P2**	**77.12%**	**110.000.000,00**
		Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	**Kab. Bangka**	**53.09%**				**54.11%**	
3.26.02.2.04.04	*Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar*	*Kab. Bangka*	*100%*	*100.000.000,00*	*APBD- DAK*	*P1,P2*	*100%*	*110.000.000,00*
3.26.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar**	**Kab. Bangka**	**53.09%**	**871.700.000,00**	**APBD**	**P1**	**77.12%**	**958.870.000,00**
		Persentase Sarana yang Memenuhi Standar		**53.09%**				**77.12%**	
		Persentase Desa Wisata yang Atraktif	**Kab. Bangka**	**70.36%**	**20.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**80.00%**	**22.000.000,00**
		Persentase Kelompok Sadar Wisata yang Aktif		**70.00%**				**79.93%**	
3.26.02.2.03.04	*Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata yang memenuhi Standar*	*Kab. Bangka*	*100%*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*330.000.000,00*
		layanan jasa pemeliharaan destinasi Pariwisata	*Kab. Bangka*	*12 Bulan*	*571.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*628.870.000,00*
3.26.02.2.03.06	*Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembinaan Desa Wisata*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen/12 bulan*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen/12 bulan*	*22.000.000,00*
3.26.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	**Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata**	**Kab. Bangka**	**72.00%**	**1.845.132.000,00**	**APBD**	**P1**	**77.00%**	**2.029.645.200,00**
		Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan		**83.00%**				**86.00%**	
3.26.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota*	*Jumlah Wisatawan yang ikut kegiatan Sungailiat Triathlon*	*Kab. Bangka*	*500 Wisatawan*	*759.087.000,00*	*APBD*	*P1*	*550 Wisatawan*	*834.995.700,00*
		Jumlah Wisatawan yang ikut kegiatan Sungailiat Adventure Trail	*Kab. Bangka*	*300 Wisatawan*	*576.966.000,00*	*APBD*	*P1*	*350 Wisatawan*	*634.662.600,00*
		Jumlah Wisatawan yang ikut kegiatan Trail Run	*Kab. Bangka*	*150 Wisatawan*	*389.079.000,00*	*APBD*	*P1*	*200 Wisatawan*	*427.986.900,00*
		Jumlah Wisatawan yang ikut Wonderful Sail	*Kab. Bangka*	*100 Wisatawan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 Wisatawan*	*110.000.000,00*
3.26.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota*	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen / 12 Bulan*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen / 12 Bulan*	*22.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**2.962.365.000,00**				**3.258.601.500,00**
		Indeks Pemasaran Pariwisata	**Kab. Bangka**	**63.51**	**2.962.365.000,00**	**APBD**	**P1**	**71.93**	**3.258.601.500,00**
3.26.03.2.01	**Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Ketertarikan atas Produk Wisata**	**Kab. Bangka**	**70.04%**	**2.962.365.000,00**	**APBD**	**P1**	**74.77%**	**3.258.601.500,00**
		Tindakan atas Produk Wisata		**60.11%**				**70.89%**	
		Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif		**60.37%**				**70.12%**	
3.26.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri*	*Layanan pengadaan media publikasi*	*Sungailiat*	*10 kali event/4kali maskapai*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 kali event/4kali maskapai*	*440.000.000,00*
		Jumlah pengadaan cetak bahan informasi pariwisata yang dilaksanakan	*Sungailiat*		*457.500.000,00*	*APBD*	*P1*		*503.250.000,00*
		Jumlah pameran luar daerah yang dilaksanakan	*Luar daerah*	*3 kali*	*892.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*981.200.000,00*
3.26.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pelaksanaan Bangka Expo*	*Kab. Bangka*	*1 kali*	*534.179.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 kali*	*587.596.900,00*
		Jumlah Pelaksanaan FAMTRIP dan Press Tour	*Kab. Bangka*	*1 kali Press Tour*	*178.686.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali Press tour dan FAM TRIP*	*196.554.600,00*
3.26.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Branding Pariwisata bangka*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*550.000.000,00*
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**587.931.000,00**				**646.724.100,00**
		Indeks Kemitraan Pariwisata	**Kab. Bangka**	**68,14**	**587.931.000,00**	APBD	P1	**78,36**	**646.724.100,00**
3.26.05.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Sertifikasi Usaha Pariwisata**	**Kab. Bangka**	**60.85%**	**587.931.000,00**	**APBD**	**P1**	**80.00%**	**646.724.100,00**
		Persentase Peningkatan Serifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata		**74.67%**		**APBD**	**P1**	**79.77%**	
		Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi		**64.83%**		**APBD**	**P1**	**72.12%**	
3.26.05.2.01.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	*Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Wisata (Bujang Miak)*	*Kab. Bangka*	*1 kali*	*247.931.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 kali*	*272.724.100,00*
		Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata	*Kab. Bangka*	*2 kali*	*180.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 kali*	*198.000.000,00*
		Jumlah Data Base Kepariwisataan	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen/12 bulan*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen/12 bulan*	*55.000.000,00*
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Rapat koordinasi dengan sektor pariwisata	Kab. Bangka	1 kali	100.000.000,00	APBD	P1	1 kali	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.05.2.01.06	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif*	*Kab. Bangka*	*2 Kali*	*240.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Kali*	*264.000.000,00*
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.333.613.280,00**				**6.966.974.608,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**25**	**15.000.000,00**			**25**	**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12,5**				**13**	
2.22.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.22.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*4 Dokumen*	*7.500.000,00*			*4 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
2.22.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*14 Dokumen*	*7.500.000,00*			*14 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**4.330.536.800,00**			**0%**	**4.763.590.480,00**
2.22.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**4.330.536.800,00**			**100%**	**4.763.590.480,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.22.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*4.315.536.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.747.090.480,00*
2.22.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	**Sungailiat**	**72,00**	**1.818.076.480,00**	**APBD**	**P1**	**72,00**	**1.999.884.128,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**Sungailiat**	**90,00**				**90,00**	
2.22.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100,00%**	**1.818.076.480,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**1.999.884.128,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**1,00**				**1,00**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100,00%**				**100,00%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100,00%**				**100,00%**	
2.22.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*1.032.383.935,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.135.622.328,50*
2.22.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*90.873.845,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*99.961.229,50*
2.22.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*30.970.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*34.067.000,00*
2.22.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*163.658.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*180.023.800,00*
2.22.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*62.612.700,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*68.873.970,00*
2.22.01.2.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*Jumlah layanan penyediaan Alat tulis kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*77.000.000,00*
2.22.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Makanan dan Minuman Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*12.570.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*13.827.000,00*
2.22.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar daerah*	*12 Bulan*	*230.518.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*253.569.800,00*
2.22.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*5 Unit*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Unit*	*55.000.000,00*
2.22.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*5 Unit*	*57.990.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Unit*	*63.789.000,00*
2.22.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah Layanan Pemeliharaan Gedung Kantor*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*18.150.000,00*
		Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	**Sungailiat**	**70,00**	**170.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**73,00**	**187.000.000,00**
2.22.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**100,00%**	**170.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**187.000.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**100,00%**		**APBD**	**P1**	**100,00%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**100,00%**		**APBD**	**P1**	**100,00%**	
2.22.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*100 stel*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 stel*	*55.000.000,00*
2.22.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*32 stel*	*16.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*30 stel*	*17.600.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia	*Sungailiat*	*20 stel*	*4.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 stel*	*4.400.000,00*
		Jumlah Pakaian Adat yang tersedia	*Sungailiat*	*100 stel*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100 stel*	*33.000.000,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 pegawai*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 pegawai*	*110.000.000,00*
JUMLAH					**15.384.961.280,00**				**16.758.457.408,00**

PRIORITAS II

3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				**1.939.500.040,00**				**0,00**
		Indeks Destinasi Pariwisata	**Kab. Bangka**	**70,11%**	**1.939.500.040,00**			**73,56%**	**-**
13.01.02	*Kegiatan Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata*	*Jumlah sarana dan prasarana kawasan pariwisata yang dibangun*	*Sungailiat*	*1 Lokasi*	*1.939.500.040,00*	*DAK Penugasan*	*P2*	-	-
		Tempat Parkir		*100 Meter Persegi*	*173.000.000,00*				-
		Gazebo (Tidak Sederhana)		*10 Unit*	*1.110.000.000,00*				-
		Pembangunan TIC (Tidak Sederhana)		*1 Paket*	*453.500.000,00*				-
		Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) (Tidak Sederhana)		*270 Meter*	*203.000.040,00*				-
JUMLAH					**1.939.500.040,00**				**-**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

SKPD : **Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**8.844.302.500,00**				**9.728.732.750,00**
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan		**100%**	**1.092.834.000,00**			**100%**	**1.202.117.400,00**
		Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah		**100%**				**100%**	
4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**100%**	**1.092.834.000,00**			**100%**	**1.202.117.400,00**
		Capaian rancangan rumusan kebijakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		**100%**				**100%**	
		Capaian dokumen evaluasi kebijakan pemerintahan yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**	
		Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku		**100%**				**100%**	
		Capaian kecamatan dengan kinerja baik		**100%**				**100%**	
4.01.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan*	*Jumlah Dokumen LPPD yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*115.834.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*127.417.400,00*
		Jumlah Dokumen SPM yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
4.01.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	*Jumlah dokumen usulan perubahan batas wilayah kabupaten yang disusun*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*470.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*517.000.000,00*
		Jumlah peta segmen batas antar kecamatan dan kelurahan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
		Jumlah dokumen batas antar kecamatan dan kelurahan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
4.01.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	*Jumlah dokumen monitoring penyelenggaraan PATEN yang dimonev*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*507.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*557.700.000,00*
		Jumlah dokumen penilaian kinerja kecamatan yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen pendukung pemekaran wilayah	*Kecamatan*	*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesra & kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan	**Kab. Bangka**	**100%**	**6.304.729.000,00**			**100%**	**6.935.201.900,00**
4.01.02.2.02	**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Qori & Qori'ah yang berprestasi**		**67%**	**6.304.729.000,00**			**68%**	**6.935.201.900,00**
		Peningkatan Prestasi Masjid percontohan tingkat Nasional (ranking)		**Peringkat 6**				**Peringkat 6**	
		Sekolah dengan UKS yang berprestasi minimal ditingkat propinsi		**1 Sekolah**				**2 Sekolah**	
		IKM terhadap fasilitasi Peringatan Hari Besar		**82**				**82,5**	
		IKM terhadap fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah dan bantuan Sosial		**82**				**82,5**	
4.01.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	*Capaian qori dan qoriah yang di intensifkan*	*Kab. Bangka*	*36 peserta*	*6.222.396.000,00*	*APBD*	*P1*	*36 peserta*	*6.844.635.600,00*
		Capaian hafidz Hafidzah yang dididik		*12 Orang*				*12 Orang*	
		Capaia Desa/kel yang diberikan pembinaan mental spiritual masyarakat		*16 Desa*				*16 Desa*	
		Capaian generasi muda(anak dan remaja) yang terbina dikecamatan		*200 orang*				*200 orang*	
		Capaian Layanan pengelolaan Masjid Agung		*12 bulan*				*12 bulan*	
		Capaian peserta pelatihan kajian ilmu keagamaan yang terlatih		*50 orang*				*50 orang*	
		Capaian pembinaan mental anggota Korpri		*2000 orang*				*2000 orang*	
		Capaian Layanan pengelolaan TP UKS		*12 bulan*				*12 bulan*	
		Capaian pelaksanaan event perayaan hari besar dan nasional		*2 Dok Event*				*2 Dok Event*	
4.01.02.2.02.02	*Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial*	*Capaian draft NPHD yang disusun*	*Kab. Bangka*	*65 lap*	*82.333.000,00*	*APBD*	*P1*	*65 lap*	*90.566.300,00*
		Jumlah Fakta integritas bansos yang valid		*76 lap*				*76 lap*	
		Capaian laporan dana hibah		*65 lap*				*65 lap*	
		Capaian laporan bansos		*76 lap*				*76 lap*	
		Capaian rekomendasi calon penerima bantuan dana hibah		*65 lap*				*65 lap*	
		Capaian rekomendasi calon penerima bantuan dana bansos		*76 lap*				*76 lap*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan	**Sungailiat**	**100%**	**1.353.547.500,00**			**100%**	**1.488.902.250,00**
		Persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan	**Sungailiat**	**100%**				**100%**	
4.01.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah**	**Persentase draf produk hukum daerah yang siap untuk proses penetapan**	**Kab. Bangka**	**100%**	**1.353.547.500,00**			**100%**	**1.488.902.250,00**
		Persentase Kasus/ permasalahan hukum yang didampingi dan memenangkan perkara		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa Sadar Hukum		**100%**				**100%**	
		Jumlah laporan tahunan RANHAM Kabupaten		**1 Dokumen**				**1 Dokumen**	
		Persentase produk hukum daerah yang terkodefikasi dan terdokumentasi dengan baik		**100%**				**100%**	
4.01.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	*Jumlah permasalahan produk hukum yang terselesaikan*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*640.977.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*705.074.700,00*
		Jumlah draft raperda dan raperbub		*10 Raperda, 5 Raperbup*				*10 Raperda, 5 Raperbup*	
		Jumlah Perda dan Perbub		*10 Raperda, 5 Raperbup*				*10 Raperda, 5 Raperbup*	
4.01.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum*	*Jumlah kasus hukum yang difasilitasi advokasi dan bantuan hukum*	*Kab. Bangka*	*3 Kasus*	*463.583.500,00*	*APBD*	*P1*	*3 Kasus*	*509.941.850,00*
		Jumlah Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum yang dibina	*Kab. Bangka*	*2 Desa*				*2 Desa*	
		Jumlah Laporan Tahunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
4.01.02.2.03.03	*Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	*Frekuensi sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*280 Kali*	*248.987.000,00*	*APBD*	*P1*	*280 Kali*	*273.885.700,00*
		Jumlah produk hukum (Perda dan Perbub) yang telah dientry dalam JDIH		*90 Perda, 45 Perbup*				*90 Perda, 45 Perbup*	
		Jumlah Buku Himpunan Perda dan Perbub terkodifikasi		*90 Perda, 45 Perbup*				*90 Perda, 45 Perbup*	
		Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	**Sungailiat**	**100%**	**93.192.000,00**			**100%**	**102.511.200,00**
4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi sesuai SOP**		**100%**	**93.192.000,00**	**APBD**		**100%**	**102.511.200,00**
4.01.02.2.04.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Negeri*	*Jumlah laporan kerjasama daerah yang diselesaikan*	*Sungailiat*	*1 Laporan*	*93.192.000,00*	*APBD*		*1 Laporan*	*102.511.200,00*
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**3.321.779.300,00**				**3.653.957.230,00**
		Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		**100%**	**630.000.000,00**			**100%**	**583.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang dikelola		**100%**				**100%**	
4.01.03.2.01	**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD dengan kinerja baik**		**50%**	**630.000.000,00**			**50%**	**583.000.000,00**
		Persentase rekomendasi / kebijakan terhadap inflasi daerah yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**	
		Kebijakan penyetaraan harga produk umkm		**4 produk**				**4 produk**	
		Persentase Perusahaan melaksanakan CSR		**75%**				**80%**	
4.01.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	*Jumlah laporan TPID yang disusun*	*Kab. Bangka*	*5 Dokumen*	*400.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Dokumen*	*330.000.000,00*
		Jumlah dokumen kebijakan pembinaan UMKM dan Koperasi		*15 Dokumen*				*15 Dokumen*	
		Jumlah data perusahaan yang melaksanakan TJSL		*10 Dokumen*				*10 Dokumen*	
4.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	*Jumlah Pembinaan BUMD*	*Sungailiat*	*10 Kali*	*230.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*50%*	*253.000.000,00*
		Capaian evaluasi pelaksanaan program pembangunan	**Kecamatan**	**100%**	**560.000.000,00**			**100%**	**616.000.000,00**
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		**100%**				**100%**	
4.01.03.2.02	**Kegiatan Administrasi Pembangunan**	**Persentase temuan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan yg ditindaklanjuti**		**100%**	**560.000.000,00**			**100%**	**616.000.000,00**
		Capaian pekerjaan fisik yang sesuai dengan target		**100%**				**100%**	
4.01.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	*Jumlah dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang disusun*	*Sungailiat*	*5 Dokumen*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Dokumen*	*38.500.000,00*
		Jumlah Dokumen SPIP yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah SK PA & KPA, PPK & PPTK, SK PPHP & PJPHP		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
		Jumlah dokumen penilaian resiko lingkup Setda		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
4.01.03.2.02.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	*Jumlah Laporan Monev yang disusun*	*Kecamatan*	*9 Lap*	*525.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Lap*	*577.500.000,00*
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik yang disusun		*12 Dok*				*12 Dok*	
		Jumlah Laporan Sismontepra yang disusun		*12 Lap*				*12 Lap*	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Tahunan yang disusun		*1 Dok*				*1 Dok*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan penyerapan anggaran pertriwulan yang disusun		*4 Dok*				*4 Dok*	
		Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	**Sungailiat**	**90%**	**2.017.536.300,00**			**90%**	**2.219.289.930,00**
4.01.03.2.03	**Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP**		**90%**	**2.017.536.300,00**			**90%**	**2.219.289.930,00**
		Persentase tata kelola LPSE yang memenuhi standarisasi		**100%**				**100%**	
		Persentase pemenuhan jabatan fungsional pengelolaan BJ		**67%**				**67%**	
4.01.03.2.03.01	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan dengan metode tender*	*Sungailiat*	*71 Paket*	*1.274.694.000,00*	*APBD*	*P1*	*71 Paket*	*1.402.163.400,00*
		Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung		*950 Paket*				*950 Paket*	
4.01.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	*Jumlah SDA Peserta Bimtek Sirup,SPSE,Ekatalog,Emonev dari OPD dilingkungan Pemkab Bangka*	*Sungailiat*	*120 Orang*	*478.115.000,00*	*APBD*	*P1*	*120 Orang*	*525.926.500,00*
		Proses pengadaan barang dan jasa		*71 Paket*				*71 Paket*	
		Jumlah Standarisasi yang dipenuhi dan dilaksanakan oleh LPSE		*17 Standarisasi*				*17 Standarisasi*	
		Jumlah Registrasi dan verifikasi pengguna SPSE		*20 Kali*				*20 Kali*	
		Jumlah Pelayanan Teknis Peroperasian Aplikasi SPSE		*30 Kali*				*30 Kali*	
4.01.03.2.03.03	*Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah personil UKPBJ yang dikirim mengikuti Diklat/Bimtek dibidang Pengadaan Barang Jasa*	*Sungailiat*	*15 Kali*	*264.727.300,00*	*APBD*	*P1*	*15 Kali*	*291.200.030,00*
		Jumlah peserta Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi PA/KPA,PPK,Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan PjPHP/PPHP		*120 Orang*				*120 Orang*	
		Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang dikelola	Sungailiat	**100%**	**114.243.000,00**			**100%**	**235.667.300,00**
4.01.03.2.04	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**	**Persentase potensi sumber daya alam yang terinventarisasi**		**100%**	**114.243.000,00**			**100%**	**235.667.300,00**
4.01.03.2.04.01	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan*	*Jumlah laporan evaluasi kebijakan Kepala Daerah*	*Sungailiat*	*5 Laporan*	*114.243.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Laporan*	*235.667.300,00*
		Jumlah dokumen data potensi yang disusun		*5 Dokumen*				*5 Dokumen*	
		Jumlah laporan kajian warisan geologi yang disusun		*5 Dokumen*				*5 Dokumen*	
4.01.04	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**				**6.712.526.455,00**				**7.132.743.151,00**
		Persentase layanan kegiatan pimpinan dan keprotokolan sesuai SOP	**Sungailiat**	**100%**	**3.991.660.000,00**			**100%**	**4.390.826.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum**				**3.991.660.000,00**				**4.390.826.000,00**
4.01.04.2.01.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian*	*Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*	*Sungailiat*	*100%*	*1.910.380.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*2.101.418.000,00*
4.01.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga*	*Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*	*Sungailiat*	*100%*	*2.081.280.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*2.289.408.000,00*
		Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Yang Tepat Sasaran	**Sungailiat**	**70**	**1.283.029.655,00**			**72**	**1.411.332.621,00**
4.01.04.2.02	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan organisasi minimal bernilai sedang**		**60%**	**1.283.029.655,00**			**70%**	**1.411.332.621,00**
		Persentase perangkat daerah dengan IKM minimal 80		**70%**				**80%**	
		Persentase perangkat daerah dengan nilai rata-rata komponen pengungkit minimal 14		**50%**				**60%**	
4.01.04.2.02.01	*Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	*Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Perangkat Daerah*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*511.354.155,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*562.489.571,00*
		Jumlah dokumen monev kelas jabatan		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
4.01.04.2.02.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	*Jumlah Dokumen SOP AP yang tersusun*	*Sungailiat*	*30 Dokumen*	*615.171.500,00*	*APBD*	*P1*	*30 Dokumen*	*676.688.650,00*
		Jumlah Aparatur yang mampu menyusun peta proses bisnis sesuai peraturan perundang-undangan		*50 orang*				*50 orang*	
		Jumlah Proposal yang diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		*5 Proposal*				*5 Proposal*	
		Jumlah Aparatur yang mampu melaksanakan SKM dan menyusun Laporan SKM sesuai aturan perundang-undangan		*50 orang*				*50 orang*	
		Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
4.01.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	*Jumlah Dokumen laporan monev rencana aksi reformasi birokrasi dan laporan pelaksanaan penilaian mandiri RB*	*Sungailiat*	*2 Dokumen*	*156.504.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Dokumen*	*172.154.400,00*
		Persentase layanan kegiatan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sungailiat	100%	**1.437.836.800,00**			100%	**1.330.584.530,00**
4.01.04.2.03	**Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**1.437.836.800,00**			**100%**	**1.330.584.530,00**
		Persentase data/informasi yang dipublikasikan		**100%**				**100%**	
4.01.04.2.03.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan*	*Jumlah layanan acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar*	*Jakarta/Provinsi lainnya*	*12 bulan*	*450.626.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*495.688.600,00*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah cinderamata/plakat yang diadakan untuk acara kedinasan		*100 Unit*				*100 Unit*	
		Jumlah laporan koordinasi yang terlaksana		*20 Dokumen*				*20 Dokumen*	
4.01.04.2.03.02	*Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	*Jumlah pelayanan administrasi pimpinan*	*Jakarta/Provinsi lainnya*	*100%*	*758.996.300,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*834.895.930,00*
4.01.04.2.03.03	*Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	*Jumlah naskah pidato pimpinan yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*228.214.500,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*251.035.950,00*
		Jumlah arsip dan dokumentasi kegiatan pimpinan		*12 Dokumen*				*12 Dokumen*	
0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**38.169.801.325,00**				**41.986.781.457,50**
		Cakupan Perumusan Perencanaan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Setda	**Sungailiat**	**100%**	**155.000.000,00**			**100%**	**170.500.000,00**
0.00.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar**		**100%**	**155.000.000,00**			**100%**	**170.500.000,00**
		persentse pelaporan kinerja sesuai standar		**100%**				**100%**	
0.00.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan yang disusun*	*Sungailiat*		*155.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*170.500.000,00*
		Renstra Setda		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Rarenja Setda		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Renja Setda		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Sakip Setda / E-Sakip		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Laporan triwulan renja		*4 Laporan*				*4 Laporan*	
		Lakin Setda		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Kebijakan penanggulangan fisik darurat bencana alam		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**18.056.641.544,00**			**0%**	**19.862.305.698,40**
0.00.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**18.056.641.544,00**			**100%**	**19.862.305.698,40**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
0.00.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*17.321.047.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*19.053.152.360,00*
0.00.01.2.02.06	*Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Persentase pelaporan perencanaan anggaran dan laporan keuangan setda yang disusun sesuai standar*	*Sungailiat*	*100%*	*735.593.944,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*809.153.338,40*
		Persentase pelaporan aset setda yang disusun sesuai standar		*100%*				*100%*	
		Persentase BMD Setda yang terkelola dengan baik		*98%*				*98%*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Setda		**100%**	**19.424.389.781,00**			**100%**	**21.366.828.759,10**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**75**				**75**	
0.00.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**19.424.389.781,00**			**100%**	**21.366.828.759,10**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**100%**				**100%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
4.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*2.584.945.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*2.843.439.500,00*
4.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*2.843.734.781,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*3.128.108.259,10*
4.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*132.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*145.211.000,00*
4.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*2.283.780.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*2.512.158.000,00*
4.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*1.841.490.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*2.025.639.000,00*
4.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*551.920.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*607.112.000,00*
4.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 bulan*	*2.701.680.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 bulan*	*2.971.848.000,00*
4.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*1.600.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.760.924.000,00*
4.01.01.2.03.23	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas*	*Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*300.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*330.924.000,00*
4.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*264.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*291.324.000,00*
4.01.01.2.03.26	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan*	*Jumlah rumah jabatan yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*1.541.530.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*1.695.683.000,00*
4.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*857.280.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*943.008.000,00*
4.01.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*1.919.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*2.111.450.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Setda		**63**	**533.770.000,00**			**75**	**587.147.000,00**
4.01.01.2.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**		**100%**	**533.770.000,00**			**100%**	**587.147.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**100%**				**100%**	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		**100%**				**100%**	
4.01.01.2.04.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya*	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*....Stel*	*58.190.000,00*	*APBD*	*P1*	*....Stel*	*64.009.000,00*
4.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu*	*Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia*	*Sungailiat*	*....Stel*	*194.890.000,00*	*APBD*	*P1*	*....Stel*	*214.379.000,00*
4.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*....Stel*	*280.690.000,00*	*APBD*	*P1*	*....Stel*	*308.759.000,00*
JUMLAH					**57.048.409.580,00**				**62.502.214.588,50**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02.02	**PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN**				**1.626.553.000,00**				**1.659.084.060,00**
		Persentase Layanan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sesuai SOP		**100,00%**	**1.626.553.000,00**			**100,00%**	**1.659.084.060,00**
5.02.02.2.01	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Rapat-Rapat DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan**	**Sungailiat**	**100%**	**973.838.000,00**	APBD	P1	**100%**	**993.314.760,00**
5.02.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat DPRD*	*Jumlah Rapat rapat Alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*77 Rapat Alat Kelengkapan Dewan*	*973.838.000,00*	*APBD*	*P1*	*77 Rapat Alat Kelengkapan Dewan*	*993.314.760,00*
		Jumlah rapat rapat Paripurna yang dilaksanakan		*22 Rapat Paripurna*				*22 Rapat Paripurna*	
5.02.02.2.01	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP**	**Sungailiat**	**100%**	**652.715.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**665.769.300,00**
		Persentase Layanan Kesejahteraan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP		**100%**				**100%**	
5.02.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD*	*Jumlah pakaian sipil harian (PSH), (PDH), (PAD) Anggota DPRD yang tersedia*	*Sungailiat*	*35 Stel PSH, 35 Stel PDH dan 35 Stel PAD*	*372.715.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Dokumen yang digandakan dalam 210 Buku*	*380.169.300,00*
5.02.02.2.01.08	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang dijaminkan pemeliharaan Kesehatannya*	*Sungailiat*	*35 Orang selama 12 Bulan*	*280.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen SBM berikut perubahannya yang digandakan dalam bentuk*	*285.600.000,00*
5.02.03	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**29.005.985.820,00**				**85.375.969.946,40**
		Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD		**100,00%**	**29.005.985.820,00**			**100,00%**	**85.375.969.946,40**
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan tepat waktu		**100,00%**				**100,00%**	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase Rapat-Rapat Pembahasan Raperda yang Dilakukan Tepat Waktu**	**Sungailiat**	**100,00%**	**5.126.269.320,00**			**100,00%**	**85.375.969.946,40**
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda*	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas*	Sungailiat	*18 Raperda*	*5.126.269.320,00*	*APBD*	*P1*	*18 Raperda*	*5.228.794.706,40*
5.02.03.2.01	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**100,00%**	**6.357.614.500,00**			**100,00%**	**73.662.408.450,00**

		Persentase pelaporan rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan kerja DPRD		**100,00%**				**100,00%**	
		Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD*	*Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mengikuti Bimtek/Seminar*	*Luar Daerah*	*Pimpinan 18 Kali, Anggota Dewan 192 Kali*	*5.613.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 Kali untuk 35 Orang*	*5.725.260.000,00*
5.02.03.2.01.07	*Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Layanan publikasi Informasi kegiatan DPRD di media cetak dan Elektronik yang ditangani*	*Sungailiat*	*53 Kali*	*420.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*300 Kali*	*428.400.000,00*
5.02.03.2.01.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang dilaksanakan*	*Dalam Daerah*	*5 Kali*	*324.614.500,00*	*APBD*	*P1*	*5 Kali*	*331.106.790,00*
5.02.03.2.01	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti**		**100,00%**	**2.113.987.500,00**			**100,00%**	**33.588.820.830,00**
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah*	*Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam Daerah yang dilaksanakan*	*Luar Daerah*	*36 Kali 35 Orang*	*528.497.500,00*	*APBD*	*P1*	*36 Kali 35 Orang*	*539.067.450,00*
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses*	*Jumlah Reses yang dilaksanakan Anggota DPRD*	*Dalam Daerah*	*210 Kali*	*1.585.490.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Kali Dalam Setahun 35 Orang*	*1.617.199.800,00*
		Jumlah dokumen Reses Anggota DPRD yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**Persentase Rekomendasi yang dihasilkan dari Kunjungan Kerja DPRD**		**100,00%**	**15.408.114.500,00**			**100,00%**	**15.716.276.790,00**
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mengikuti Munas/Rakernas*	*Luar Daerah*	*Pimpinan 15 Kali, Anggota Dewan 160 Kali*	*15.408.114.500,00*	*APBD*	*P1*	*Pimpinan 15 Kali, Anggota Dewan 160 Kali*	*15.716.276.790,00*
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mengikuti Konsultasi/ Undangan/Koordinasi AKD		*Pimpinan 48 Kali*				*Pimpinan 48 Kali*	
		Jumlah Pimpinan dan Anggota Dewan yang mengikuti study banding/kunjungan kerja		*Pimpinan 48 Kali, Anggota Dewan 512 Kali*				*Pimpinan 48 Kali, Anggota Dewan 512 Kali*	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**47.904.721.450,00**				**50.297.183.516,50**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**22**	**55.000.000,00**			**23**	**60.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12**				**13**	
5.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**55.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**60.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.01.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*27.500.000,00*			*4 Dokumen*	*30.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
5.01.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*1 4 Dokumen*	*27.500.000,00*			*1 4 Dokumen*	*30.250.000,00*

		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**23.794.048.900,00**			**0%**	**26.173.453.790,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**23.794.048.900,00**			**100%**	**26.173.453.790,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*23.779.048.900,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*26.156.953.790,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**70**	**23.221.572.550,00**			**72**	**23.145.719.726,50**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**95**				**98**	
8.01.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**23.221.572.550,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**23.145.719.726,50**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2**				**2**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
8.01.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*2.162.345.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.227.215.968,00*
8.01.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*985.335.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*1.014.895.565,00*
8.01.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*264.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*272.332.000,00*
8.01.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*26.340.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*27.130.200,00*
8.01.01.1.03.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	*Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*56.134.200,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*57.818.226,00*
8.01.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*147.028.750,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*151.439.612,50*
8.01.01.1.03.10	*Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*Jumlah layanan alat tulis kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*134.406.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*138.438.695,00*
8.01.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*101.956.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*105.014.680,00*

8.01.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*883.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*909.490.000,00*
8.01.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*5.100.370.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*5.253.381.100,00*
8.01.01.1.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Bakam*		*750.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Mobil		*3 unit*					
8.01.01.1.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*2.161.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*2.226.345.000,00*
8.01.01.1.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*9 Unit*	*77.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*79.310.000,00*
8.01.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*225.060.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*231.811.800,00*
8.01.01.1.03.30	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan operasional roda empat yang dipelihara*	*Sungailiat*	*6 Unit*	*146.696.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*151.096.880,00*
8.01.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*10.000.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*10.300.000.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**834.100.000,00**			**73**	**917.510.000,00**
8.01.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**834.100.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**917.510.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
8.01.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*116.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*127.710.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*142 Stel*				*20 Stel*	
8.01.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 orang (5 laki-5 perempuan)*	*718.000.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*789.800.000,00*
JUMLAH					**78.537.260.270,00**				**137.332.237.522,90**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN								
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.787.242.000,00				3.065.966.200,00
		Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN		75,00%	1.714.635.000,00			75,00%	1.886.098.500,00
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RKP		75,00%				80,00%	
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD		100,00%				100,00%	
		Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		100,00%				100,00%	
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD		100,00%				100,00%	
5.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspek dalam Rancangan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang disusun sesuai standar	Sungailiat	100%	1.714.635.000,00	APBD	P1	100%	1.886.098.500,00
		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan lima tahunan daerah		100%				100%	
		Persentase aspek dalam perencanaan tahunan daerah per urusan yang sesuai dengan perencanaan tahunan nasional		75%				75%	
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Lima Tahunan Daerah		100%				100%	
		Persentase aspek dalam Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah per urusan yang ditetapkan sesuai Perencanaan Tahunan Nasional		100%				100%	
		Persentase aspek dalam Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai standar		100%				100%	

		Persentase aspek perencanaan lima tahun daerah per urusan yang ditetapkan sesuai perencanaan lima tahunan nasional		**75%**				**75%**	
		Persentase aspek dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah per urusan yang disusun sesuai perencanaan lima tahunan daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase OPD yang ditetapkan perjanjian kinerjanya sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.01.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun*		*1 Dokumen*	*389.146.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*428.060.600,00*
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.01.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*	*Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan*		*1 Kali*	*362.358.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*398.593.800,00*
		Jumlah Musrenbang Propinsi yang diikuti		*1 Kali*				*1 Kali*	
		Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti		*1 Kali*				*1 Kali*	
		Jumlah Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diikuti		*8 Kali*				*8 Kali*	
5.01.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	*Jumlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*		*1 Kali*	*53.020.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*58.322.000,00*
		Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan		*1 Kali*				*1 Kali*	
5.01.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya*	*Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi*		*34 Dokumen*	*191.072.000,00*	*APBD*	*P1*	*34 Dokumen*	*210.179.200,00*
		Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan		**100%**	**719.039.000,00**			**100%**	**790.942.900,00**
		Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yg dimanfaatkan dalam perencanaan		**100%**				**100%**	
		Persentase Urusan Penyelenggaran Pemerintah yang dinilai persepsinya oleh masyarakat		**100%**				**100%**	

		Persentase aspek data Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kabupaten Bangka yang tersedia		**100%**				**100%**	
		Persentase Data Potensi Daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan yang tersedia		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Sosial dan Ekonomi		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Ekonomi		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sosial		**100%**				**100%**	
		Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD		**100%**				**100%**	
		Persentase Pembaharuan Data rencana kerja tahunan pada aplikasi Sistem Perencanaan		**100%**				**100%**	
		Persentase Keterisian data capaian kinerja OPD secara berkala pada sistem		**100%**				**100%**	
5.01.02.2.01.07	*Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah*	*Jumlah aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang dioperasionalisasikan*		*2 Aplikasi*	*111.204.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Aplikasi*	*122.324.400,00*
5.01.02.2.01.09	*Sub Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah dokumen Analisis Data Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun*		*1 Dokumen*	*607.835.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*668.618.500,00*
		Jumlah dokumen Analisis Data Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat (Kemiskinan) yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah dokumen Analisis Data Perencanaan Pembangunan Manusia yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah dokumen Analisis Data Perencanaan Pemerintahan yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah dokumen Analisis Data Perencanaan Sanitasi dan Lingk. Hidup yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Kabupaten yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Daerah yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target		**85%**	**353.568.000,00**			**88%**	**388.924.800,00**

5.01.02.2.03	**Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja berkala tepat waktu**	**Sungailiat**	**88%**	**353.568.000,00**	**APBD**	**P1**	**95%**	**388.924.800,00**
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi capaian kinerjanya secara berkala		**100%**				**100%**	
		Persentase Kinerja Tahunan yang ditetapkan sesuai Perencanaan		**100%**				**100%**	
		Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		**100%**				**100%**	
5.01.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*62.419.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*68.660.900,00*
		Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring		*34 OPD*				*34 OPD*	
		Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Perjanjian Kinerjanya		*34 OPD*				*34 OPD*	
		Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.01.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Terkait SPM*	*Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Terkait SPM yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*53.447.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*58.791.700,00*
5.01.02.2.03.03	*Sub Kegiatan Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*21.732.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*23.905.200,00*
5.01.02.2.03.04	*Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah yang disusun*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*215.970.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*237.567.000,00*
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**450.000.000,00**				**495.000.000,00**
		Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan		**100%**	**450.000.000,00**			**100%**	**495.000.000,00**
		Persentase rumusan kebijakan yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan		**100%**				**100%**	
		Jumlah inovasi daerah yang mendapat pengakuan Nasional		**1**				**1**	
5.05.02.2.01	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase pemenuhan kajian naskah akademis draft Rancangan Peraturan Daerah**	**Sungailiat**	**100%**	**450.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**495.000.000,00**

		Persentase pemenuhan kajian pendukung perencanaan pembangunan daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase rumusan kebijakan (policy Brief) yang dihasilkan dari hasil penelitian		**3 Policy Brief**				**3 Policy Brief**	
		Jumlah inovasi daerah yang diikutkan dalam kompetisi nasional		**3 Inovasi**				**3 Inovasi**	
5.05.02.2.01.12	*Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*	*Jumlah dokumen kajian naskah akademis draft Rancangan Peraturan Daerah yang disusun*		*1 Dokumen*	*450.000.000,00*			*1 Dokumen*	*495.000.000,00*
		Jumlah kajian lingkup pemerintah daerah yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah policy brief kebijakan pemerintah daerah yang disusun		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Inovasi Daerah yang disusun		*3 Inovasi*				*3 Inovasi*	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.792.272.500,00**				**7.375.541.545,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**30,00**	**978.762.000,00**			**30,00**	**1.076.638.200,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12,22**				**13,00**	
5.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**978.762.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.076.638.200,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*		*2 Dokumen*	*41.056.000,00*			*2 Dokumen*	*45.161.600,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*6 Dokumen*				*6 Dokumen*	
5.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*		*6 Dokumen*	*937.706.000,00*			*6 Dokumen*	*1.031.476.600,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**4.287.862.000,00**			**0%**	**4.716.648.200,00**
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**4.287.862.000,00**			**100%**	**4.716.648.200,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	

5.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*4.152.862.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.568.148.200,00*
5.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*135.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*148.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**2**	**1.370.831.500,00**			**2**	**1.411.956.445,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**68**				**70**	
5.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**1.370.831.500,00**			**100%**	**1.411.956.445,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**3**				**3**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
5.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*376.137.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*387.421.110,00*
5.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*150.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*154.510.300,00*
5.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*41.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*42.240.300,00*
5.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*129.110.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*132.983.300,00*
5.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*44.258.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*45.586.255,00*
5.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*68.012.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*70.052.360,00*
5.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*433.284.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*446.282.520,00*
5.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*8 Unit*	*79.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*81.380.300,00*
5.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*51.500.000,00*

		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**154.817.000,00**			**73**	**170.298.700,00**
5.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**25%**	**154.817.000,00**	**APBD**	**P1**	**25%**	**170.298.700,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
5.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*42.160.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*46.376.000,00*
		Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia		*45 Stel*				*20 Stel*	
5.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*10 Orang*	*112.657.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*123.922.700,00*
JUMLAH					**10.029.514.500,00**				**10.936.507.745,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEUANGAN								
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**163.076.707.455,00**				**166.338.241.604,10**
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan Di PPAS dan RAPBD Terhadap RKPD		**100,00%**	**1.558.807.630,00**			**100,00%**	**1.589.983.782,60**
5.02.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun tepat waktu berbasis Sistem IT**	**Sungailiat**	**100%**	**1.558.807.630,00**	APBD	P1	**100%**	**1.589.983.782,60**
5.02.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Draft KUA selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*195.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*198.900.000,00*
		Jumlah Dokumen Draft PPAS selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku KUA selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku PPAS APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.02.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Draft KUA Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*195.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*198.900.000,00*
		Jumlah Dokumen Draft PPAS Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku KUA Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku PPAS APBD Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.02.02.2.01.05	*Sub Kegiatan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD*	*Jumlah Dokumen Draft APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*533.804.640,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*544.480.732,80*
		Jumlah Dokumen/Buku Nota keuangan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku Perda APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen Rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	

		Jumlah Dokumen PERKADA tentang Penjabaran APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.02.02.2.01.06	*Sub Kegiatan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD*	*Jumlah Dokumen Draft APBD Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*533.804.640,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*544.480.732,80*
		Jumlah Dokumen/Buku Nota keuangan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen/Buku Perda APBD Perubahan selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen Rancangan PERKADA tentang Penjabaran Perubahan APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen PERKADA tentang Penjabaran Perubahan APBD selesai Tepat Waktu berbasis sistem TI		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Dokumen PERKADA tentang Perubahan-Pergeseran Anggaran		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
5.02.02.2.01.08	*Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran*	*Jumlah Dokumen/Buku Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Masukan (SBM) berikut Revisinya*	*Sungailiat*	*1 Dokumen SBM berikut perubahannya yang digandakan dalam bentuk 90 Buku*	*101.198.350,00*	*APBD*	*P1*	*Jumlah Dokumen/Buku Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Masukan (SBM) berikut Revisinya*	*103.222.317,00*
		Persentase Pemenuhan Anggaran Kas Terhadap Belanja Daerah		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu		**100,00%**	**1.112.709.950,00**			**100,00%**	**1.134.964.149,00**
		Persentase Penerimaan Dana Transfer		**95,00%**				**95,00%**	
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah layanan perbendaharaan daerah sesuai SOP**	**Sungailiat**	**12 Bulan**	**1.112.709.950,00**	APBD	P1	**12 Bulan**	**1.134.964.149,00**
		Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) Kas Daerah yang tersusun Tepat Waktu		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
		Berita Acara Rekonsiliasi Bank		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
		Laporan Penerimaan dan Pembentukan Deposito		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
		SP2D Belanja Daerah yang diterbitkan sesuai SOP melalui Aplikasi SIMDA Keuangan		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
		Laporan penerimaan pendapatan dan Penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat dan propinsi		**12 Bulan**				**12 Bulan**	
5.02.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*Jumlah dokumen Laporan Posisi kas harian (LPKH)/ Laporan Posisi kas Bulanan yang disusun*	*Sungailiat*	*12 Dokumen dalam (12 bulan)*	*309.650.945,00*	*APBD*	*P1*	*12 Dokumen dalam (12 bulan)*	*315.843.963,90*
		Jumlah Laporan DTH dan RTH yang disusun		*12 Laporan (12 bulan)*				*12 Laporan (12 bulan)*	
		Jumlah Laporan berita acara (BA. Rekonsiliasi Bank atas pengeluaran dan penerimaan KAS Daerah		*12 Laporan (BA.Rekon) dalam 12 Bulan*				*12 Laporan (BA.Rekon) dalam 12 Bulan*	
		Jumlah Laporan pembentukan dan Penerimaan Bunga deposito		*12 Laporan (12 bulan)*				*12 Laporan (12 bulan)*	

5.02.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*Jumlah Laporan penerimaan pendapatan dan penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Pemerintah Pusat dan Provinsi)*	*Sungailiat*	*12 Laporan dalam 12 bulan*	*395.133.520,00*	*APBD*	*P1*	*12 Laporan dalam 12 bulan*	*403.036.190,40*
5.02.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D*	*Jumlah SP2D Belanja Daerah Yang diterbitkan melalui Aplikasi SIMDA Keuangan*	*Sungailiat*	*15,000 Dokumen SP2D*	*278.693.250,00*	*APBD*	*P1*	*15,000 Dokumen SP2D*	*284.267.115,00*
		Jumlah SK Bupati Tentang Penunjukan PA,KPA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan dan Penerimaan Pembantu pada OPD di lingkungan Pemda Bangka,		*34 Dokumen SK dari 34 OPD*				*34 Dokumen SK dari 34 OPD*	
		Jumlah SK Bupati tentang Besaran Uang Persediaan (UP) OPD		*1 Dokumen SK*				*1 Dokumen SK*	
5.02.02.2.02.05	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP*	*Jumlah dokumen Daftar gaji PNSD Bulan yang tersusun (termasuk gaji 13)*		*3,744 Dokumen*	*129.232.235,00*	*APBD*	*P1*	*3,744 Dokumen*	*131.816.879,70*
		Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PFK dan PPh pasal 21		*3,744 Dokumen*				*3,744 Dokumen*	
		Jumlah BA Rekon dengan PT. Taspen		*3 Laporan (BA)*				*3 Laporan (BA)*	
		Jumlah BA Rekon dengan BPJS		*4 Laporan (BA)*				*4 Laporan (BA)*	
		Jumlah BA Rekon DAU		*1 Laporan (BA)*				*1 Laporan (BA)*	
		Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan		*124 Dokumen*				*124 Dokumen*	
		Persentase Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu sesuai SAP		**100,00%**	**160.405.189.875,00**			**100,00%**	**163.613.293.672,50**
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Buku Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Pemda yang disusun Tepat Waktu**		**100,00%**	**1.539.160.000,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**1.569.943.200,00**
		Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) sesuai SAP dan tepat waktu		**100,00%**				**100,00%**	
5.02.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	*Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pemda (Buku) yang disusun*		*1 Dokumen*	*112.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*114.240.000,00*
5.02.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*Jumlah Buku/ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Pemda) yang disusun*		*1 Dokumen*	*770.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*785.400.000,00*
		Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semesteran yang disusun (buku)		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	
		Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akhir tahun yang disusun (buku)		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
		Jumlah Laporan/BA rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
5.02.02.2.03.10	*Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Dokumen Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berikut Perubahannya yang disusun*		*1 Dokumen*	*462.160.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*471.403.200,00*
		Jumlah layanan Sistem Aplikasi Keuangan yang tertangani		*12 Bulan*				*12 Bulan*	

5.02.02.2.03.12	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*	*Jumlah Workshop Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan*		*5 Kali*	*195.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Kali*	*198.900.000,00*
5.02.02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan**	**Alokasi Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia**		**100,00%**	**158.866.029.875,00**	**APBD**	**P1**	**100,00%**	**162.043.350.472,50**
5.02.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus*	*Persentase pemenuhan bantuan khusus keuangan yang dilaksanakan tepat waktu*		*1 Dokumen*	*158.866.029.875,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*162.043.350.472,50*
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**2.635.239.100,00**				**2.687.943.882,00**
		Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu		**100,00%**	**2.635.239.100,00**			**100,00%**	**2.687.943.882,00**
		Persentase Pemanfaatan Aset yang dikerjasamakan Sesuai Aturan yang berlaku		**75,00%**				**78,00%**	
		Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang memiliki Status Kepemilikan Pemerintah Daerah		**27,00%**				**29,00%**	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Buku Standar Satuan Harga Barang Kab. Bangka yang disusun tepat waktu**		**100,00%**	**2.635.239.100,00**	**P1**	**APBD**	**100,00%**	**2.687.943.882,00**
		Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun Tepat Waktu		**100,00%**				**100,00%**	
		Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun Tepat Waktu		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang diamankan		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Aset dan Barang Daerah yang dapat dinilai sesuai aturan		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah yang dapat dimusnakan dan dihapuskan sesuai aturan		**100,00%**				**100,00%**	
		Persentase Aset dan Barang Daerah yang dimanfaatkan dengan tepat sesuai aturan		**100,00%**				**100,00%**	
		Buku Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan akhir tahun Tepat Waktu melalui Aplikasi SIMDA BMD		**100,00%**				**100,00%**	
5.02.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang*	*Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kab. Bangka yang disusun*		*1 Dokumen*	*145.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*147.900.000,00*
5.02.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Buku Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun*		*1 Dokumen*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*76.500.000,00*

5.02.03.2.01.04	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Buku Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun*		*1 Dokumen*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*76.500.000,00*
5.02.03.2.01.07	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah*	*Jumlah Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara*		*....Unit*	*219.882.500,00*	*APBD*	*P1*	*....Unit*	*224.280.150,00*
		Jumlah Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang diamankan		*....Unit*				*....Unit*	
5.02.03.2.01.09	*Sub Kegiatan Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Aset dan Barang Milik Daerah yang dapat dimusnakan dan dihapuskan sesuai aturan*		*....Unit*	*1.670.356.600,00*	*APBD*	*P1*	*....Unit*	*1.703.763.732,00*
		Jumlah Aset dan Barang Daerah yang dimanfaatkan dengan tepat sesuai aturan		*....Unit*				*....Unit*	
		Jumlah Aset dan Barang Daerah yang dapat dinilai sesuai aturan		*....Unit*				*....Unit*	
5.02.03.2.01.12	*Sub Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD*	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan akhir tahun yang disusun*		*2 Dokumen*	*450.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Dokumen*	*459.000.000,00*
		BA.Rekon Data BMD OPD		*2 BA.rekon untuk tiap-tiap OPD*				*2 BA.rekon untuk tiap-tiap OPD*	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**4.104.415.051,00**				**4.186.503.352,02**
		Persentase Konstribusi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah		**100,00%**	**4.104.415.051,00**			**100,00%**	**4.186.503.352,02**
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah		**7,13%**				**7,13%**	
5.02.04.2.02	**Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak**	Kab.Bangka	**100,00%**	**4.104.415.051,00**	APBD	P1	**100,00%**	**4.186.503.352,02**
		IKM Pelayanan Pajak Daerah							
5.02.04.2.02.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah peraturan baru tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah*	*Sungailiat*	*1 Dokumen*	*33.780.175,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*34.455.778,50*
		Jumlah Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah yang disusun		*1 SOP*				*1 SOP*	
5.02.04.2.02.04	*Sub Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah pelayanan administrasi Pajak Daerah*	*Kab.Bangka*	*12 Bulan, 8 Kecamatan*	*3.354.239.956,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan, 8 Kecamatan*	*3.421.324.755,12*
		IKM Pelayanan Pajak Daerah							
5.02.04.2.02.08	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah masyarakat peserta sosialisasi pajak daerah*	*Kab.Bangka*	*....Orang*	*174.225.390,00*	*APBD*	*P1*	*....Orang*	*177.709.897,80*
		Jumlah Laporan target dan realisasi Penerimaan PAD tiap bulan		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
		Laporan Evaluasi pencapaian target dalam satu tahun		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Laporan rekonsiliasi pemungutan pajak retribusi daerah dengan OPD		*12 Laporan*				*12 Laporan*	
		Data subjek dan objek pajak yang diverifikasi dan ter validasi		*1 Dokumen*				*1 Dokumen*	

5.02.04.2.02.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah Data Wajib Pajak (termasuk Wajib Pajak Baru)non PBB P2*	*Kab.Bangka*	*.....*	*240.619.530,00*	*APBD*	*P1*	*.....*	*245.431.920,60*
		Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang ditetapkan		*.....*				*.....*	
		Data Subjek dan objek Pajak Daerah		*.....*				*.....*	
		Jumlah Pendataan PBB P2		*....*				*....*	
		Jumlah Daftar hasil Rekam (DRH)		*.....*				*.....*	
5.02.04.2.02.10	*Sub Kegiatan Pemeriksanaan Pajak Daerah*	*Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*	*Kab.Bangka*	*...%*	*76.550.000,00*	*APBD*	*P1*	*...%*	*78.081.000,00*
		Laporan pemeriksaan wajib pajak		*... Laporan*				*... Laporan*	
		Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah		*.... Dokumen*				*.... Dokumen*	
5.02.04.2.02.11	*Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah Intensifikasi PBB P2 di 8 Kecamatan*	*Kab.Bangka*	*.....*	*225.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*.....*	*229.500.000,00*
		Laporan Data Piutang Pajak daerah		*... Laporan*				*... Laporan*	
		Laporan Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah		*... Laporan*				*... Laporan*	
		Laporan Pajak Daerah yang tertagih		*... Laporan*				*... Laporan*	
		SK Bupati alokasi dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah		*...SK*				*...SK*	
		Laporan Rekonsiliasi data penerimaan Pajak daerah		*... Laporan*				*... Laporan*	
		Laporan Evaluasi PAD		*... Laporan*				*... Laporan*	
		Dokumen kajian potensi pajak daerah		*... Dokumen*				*... Dokumen*	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**18.353.197.100,00**				**19.915.155.176,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**55.000.000,00**				**60.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
5.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**55.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**60.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.01.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*	*27.500.000,00*			*.....Dokumen*	*30.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
5.01.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*	*27.500.000,00*			*..... Dokumen*	*30.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**14.242.230.900,00**			**0%**	**15.666.453.990,00**
5.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**14.242.230.900,00**			**100%**	**15.666.453.990,00**

		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*14.227.230.900,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*15.649.953.990,00*
5.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**3.905.166.200,00**				**4.022.321.186,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
5.01.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**3.905.166.200,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**4.022.321.186,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**				**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
5.01.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*883.486.200,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*909.990.786,00*
5.01.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*621.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*639.630.000,00*
5.01.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*182.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*187.460.000,00*
5.01.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*335.310.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*345.369.300,00*
5.01.01.1.03.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	*Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*941.530.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*969.775.900,00*
5.01.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*137.840.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*141.975.200,00*
5.01.01.1.03.13	*Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*40 Unit dan 1 Paket*	*374.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*385.220.000,00*
5.01.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*103.000.000,00*
5.01.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*309.000.000,00*

5.01.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*30.900.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**150.800.000,00**			**73**	**165.880.000,00**
5.01.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**		**40%**	**150.800.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**165.880.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
5.01.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*96.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*106.480.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*170 Stel*				*20 Stel*	
5.01.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Dalam Daerah dan Luar Daerah*	*6 orang (3 laki-3 perempuan)*	*54.000.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*59.400.000,00*
JUMLAH					**188.169.558.706,00**				**193.127.844.014,12**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.03	**KEPEGAWAIAN**								
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**4.652.987.500,00**				**3.666.297.820,00**
		Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi		**60%**	**1.466.143.000,00**			**65,00%**	**757.900.000,00**
5.03.02	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**Persentase penyelenggaraan pengembangan kompetensi**		**100%**	**1.466.143.000,00**	APBD	P1	**100%**	**757.900.000,00**
5.03.02.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN*	*-Jumlah CPNS Golongan II dan III yang direkrut*	*Sungailiat*	*179 orang*	*1.466.143.000,00*	*APBD*	*P1*	*150 orang*	*757.900.000,00*
		-Jumlah PPPK yang direkrut		*150 orang*				*50 orang*	
		-Persentase CPNSD yang ditempatkan		*100%*				*100%*	
		-Jumlah pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah pejabat struktural/fungsional		*6 kali*				*6 kali*	
		-Jumlah PNS yang ditempatkan		*179 orang*				*200 orang*	
		-Jumlah PPPK yang ditempatkan		*150 orang*				*150 orang*	
		Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional		**60,00%**	**1.836.054.000,00**			**62,00%**	**1.582.653.400,00**
5.03.02.2.02	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya**	**Sungailiat**	**50%**	**1.370.247.000,00**	APBD	P1	**50%**	**1.123.100.000,00**
5.03.02.2.02.03	*Sub Kegiatan Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan*	*-Jumlah Pegawai ASN yang mengkuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*		*35 orang*	*1.370.247.000,00*	*APBD*	*P1*	*18 orang*	*1.123.100.000,00*
		-Jumlah potensial review PNS jabatan pengawas		*75 orang*				*75 orang*	
5.03.02.2.03	**Kegiatan Peningkatan Kapastitas ASN**	**Persentase peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, diklat teknis dan fungsional yang memiliki sertifikat kelulusan**	**Luar dan Dalam Daerah**	**60%**	**465.807.000,00**	**APBD**	**P1**	**60%**	**459.553.400,00**
5.03.02.2.03.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN*	*-Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaian pangkat penyesuaian ijazah*	*Luar dan Dalam Daerah*	*100 orang*	*144.467.000,00*	*APBD*	*P1*	*98 orang*	*135.000.000,00*

5.03.02.2.03.07	*Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*	*'-Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan lanjutan (Pendidikan Dokter)*	*Luar dan Dalam Daerah*	*2 Orang*	*321.340.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Orang*	*324.553.400,00*
		Persentase ASN yang kualitas kinerjanya meningkat		**99,82%**	**91.056.000,00**	APBD	P1	**99,86%**	**100.161.000,00**
5.03.02.2.03	**Kegiatan Peningkatan Kapastitas ASN**	**Persentase Aparatur yang Bernilai Baik pada P2KP**		**80%**	**91.056.000,00**	**APBD**	**P1**	**85%**	**100.161.000,00**
5.03.02.2.03.02	*Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN*	*Frekuensi bimbingan kerja ASN*		*100%*	*91.056.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*100.161.000,00*
		Persentase ASN yang dinilai dalam penyusunan Indeks Profesionalitas ASN		*100%*				*100%*	
		Persentase ASN yang dinilai capaian kinerjanya		*100%*				*100%*	
		Prosentase PNS yang memanfaatkan Sistem Informasi E-Kinerja		*100%*				*100%*	
5.03.02		**Persentase menurunnya Tindak Indisipliner Aparatur**		**0,18%**	**385.820.500,00**	APBD	**P1**	**0,14%**	**297.990.000,00**
5.03.02.2.05	**Kegiatan Pembinaan ASN**	**Persentase ASN yang diberikan pembinaan**		**80%**	**385.820.500,00**	**APBD**	P1	**85%**	**297.990.000,00**
5.03.02.2.05.03	*Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan*	*-Jumlah Peraturan kepegawaian yang diterbitkan*	*Sungailiat*	*2 Laporan*	*385.820.500,00*	*APBD*	*P1*	*2 Laporan*	*297.990.000,00*
		-Persentase ASN yang paham terhadap materi sosialisasi		*1000 orang*				*1000 orang*	
		-Persentase aparatur yang terkena hukuman indisipliner		*5 kasus*				*7 kasus*	
		-Jumlah aparatur pelanggar disiplin yang dibina		*100%*				*100%*	
		-Jumlah aparatur yang diberi reward dan punishment		*150 orang*				*200 orang*	
		Persentase aparatur yang menyampaikan LHKPN		*100%*				*100%*	
5.03.02		**Persentase pelayanan administrasi dan data base kepegawaian yang sesuai Standar layanan**		**100,00%**	**873.914.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**927.593.420,00**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**	**Persentase Profil Aparatur yang up to date**		**100%**	**798.914.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**849.593.420,00**
5.03.02.2.01.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN*	*Data Profil yang ter up date*	*Sungailiat*	*100%*	*417.314.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*429.833.420,00*
		Data Profil kepegawaian yang masih aktif		*100%*				*100%*	
		Data profil penilaian kinerja aparatur yang di up date		*100%*				*100%*	
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar layanan berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang		*75%*				*76%*	
5.03.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	*Persentase data yang dikelola dalam sistem informasi kepegawaian*	*Sungailiat*	*100%*	*127.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*139.920.000,00*

5.03.02.2.02.04	*Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun*	*Jumlah SK Pensiun yang dikelola*	*Sungailiat*	*200 orang*	*127.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*200 orang*	*139.920.000,00*
5.03.02.2.02.10	*Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	*Jumlah usulan kenaikan pangkat*	*Sungailiat*	*250 orang*	*127.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*250 orang*	*139.920.000,00*
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**	**Jumlah Dokumen Arsip yang dikelola**		**2500 berkas**	**75.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**3000 berkas**	**78.000.000,00**
5.03.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian*	*Jumlah dokumen arsip kepegawaian yang dilakukan pendataan, pencatatan.*		*2000 berkas*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3000 berkas*	*78.000.000,00*
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**3.683.443.500,00**				**4.880.669.980,00**
		Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional		**80,00%**	**3.683.443.500,00**	**APBD**	**-**	**80,00%**	**4.880.669.980,00**
5.04.02.2.01	**Kegiatan Pengembangan kompetensi teknsi**	**Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan teknis**		**100%**	**239.292.500,00**	**APBD**		**100%**	**1.333.194.450,00**
5.04.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan pemerintahan umum*	*Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan non formal*	*Sungailiat*	*6 orang*	*109.977.500,00*	*APBD*	*P1*	*43 orang*	*1.200.000.000,00*
		PNS BKPSDMD		*5 orang*					
		PNS Fungsioanl Tertentu		*1 orang*					
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi dasar pengadaan barang jasa pemerintah		*40 orang*	*129.315.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 orang*	*133.194.450,00*
5.04.02.2.02.07	**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mendapatkan sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**60%**	**3.444.151.000,00**	**APBD**	**P1**	**62%**	**3.547.475.530,00**
5.04.02.2.02.07	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan*	*Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabatan Administrasi*		*2 orang*	*343.050.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 orang*	*353.341.500,00*
		PKN Tk.II (Pendidikan Keemimpinan Tk. II)		*2 orang*					
		PKA (Pendidikan Kepemimpinan Administrator)		*0 orang*					
		PKP (Pendidikan Kepemimpinan Pengawasan)		*0 orang*					
		Jumlah CPNSD yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan prajabatan CPNS Daerah		*220 orang*	*3.093.271.000,00*	*APBD*	*P1*	*250 orang*	*3.186.069.130,00*
5.04.02.2.02.08	*Sub Kegiatan Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Penmgembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan*	*Jumlah PNS yang di evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi kepemimpinan*		*142 orang*	*7.830.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 orang*	*8.064.900,00*

5.03.01.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**6.745.613.543,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**6.854.824.459,29**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)							
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**		**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.03.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*8 dokumen*	*7.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*8 dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*2 dokumen*				*2 dokumen*	
5.03.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*2 laporan*	*7.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 laporan*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**4.710.374.500,00**			**0%**	**4.757.478.245,00**
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**4.710.374.500,00**			**100%**	**4.757.478.245,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
5.03.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*4.695.374.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*4.742.328.245,00*
5.03.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*15.150.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.859.729.043,00**				**1.915.520.914,29**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Kegiatan Administrasi Umum	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**1.859.729.043,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.915.520.914,29**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**100%**				**100%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**				**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	

		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*217.950.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*239.745.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*136.425.555,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*140.518.321,65*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*28.775.250,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*29.638.507,50*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*127.910.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*131.747.300,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*98.668.238,00*	*APBD*	*P2*	*12 Bulan*	*101.628.285,14*
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*257.500.000,00*
	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*321.750.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*150 Unit*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*150 unit*	*321.750.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**160.510.000,00**	**APBD**		**73**	**165.325.300,00**
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**		**40%**	**160.510.000,00**			**30%**	**165.325.300,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**80%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**80%**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*51 stel*	*31.010.000,00*	*APBD*	*P1*	*51 stell*	*31.940.300,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*79.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*81.885.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*22 Stel*				*22 Stel*	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*5 Orang*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 orang*	*51.500.000,00*
JUMLAH					**15.082.044.543,00**				**15.401.792.259,29**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**								
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**1.780.000.000,00**				**1.815.600.000,00**
		Level Elemen Peran dan Layanan APIP		**Level 3**	**1.780.000.000,00**			**Level 3**	**1.815.600.000,00**
		Persentase OPD Dengan Predikat WBK		**33,33**				**66,67**	
		Level Elemen Pengelolaan SDM		**Level 3**				**Level 3**	
6.01.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penurunan jumlah temuan yang material**	**Kab. Bangka**	**85%**	**1.190.000.000,00**	APBD	P1	**85%**	**1.213.800.000,00**
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuuti		**100%**				**100%**	
		Jumlah rekomendasi perbaikan 3E Program yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**	
		Persentase APIP bersertifikat profesi, teknis dan penjenjangan		**100%**				**100%**	
6.01.02.2.01.01	*Sub. Kegiatan Audit Kinerja dan Keuangan*	*Jumlah LHP Audit Kinerja OPD*	*Sungailiat*	*4 LHP*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 LHP*	*51.000.000,00*
		Jumlah LHP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	*Sungailiat*	*LHP*	*500.000.000,00*	*APBD*	*P2*	*LHP*	*510.000.000,00*
6.01.02.2.01.02	*Sub. Kegiatan Reviu Kinerja dan Keuangan*	*Jumlah Laporan Reviu LKPD*	*Sungailiat*	*2 Laporan*	*450.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Laporan*	*459.000.000,00*
		Jumlah Laporan Reviu RKA		*2 Laporan*				*2 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir RKPD		*2 Laporan*				*2 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu Rancangan Akhir Renja		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu Rancangan KUA dan PPAS		*2 Laporan*				*2 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu LPPD		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu RPJMD		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah Laporan Reviu Lakin Kabupaten		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
6.01.02.2.01.03	*Sub. Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan*	*Persentase Tindaklanjut Temuan Dalam Katagori Selesai*	*Sungailiat*	*85%*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*85%*	*122.400.000,00*

6.01.02.2.01.04	*Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan*	*Persentase OPD Yang Pemenuhan Kinerjanya Baik*	*Sungailiat*	*100%*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*71.400.000,00*
		Persentase OPD Yang Kualitas Pengukuran Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Implementasi Pengukuran Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Pemenuhan Pelaporan Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Penyajian Informasi Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Pemanfaatan Informasi Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Pemenuhan Evaluasi Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Kualitas Evaluasi Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Pemanfaatan Evaluasi Kinerjanya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD yang Capaian Kinerja Outputnya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD yang Capaian Kinerja Outcome nya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Perencanaan Strategisnya Baik		*100%*				*100%*	
		Persentase OPD Yang Perencanaan Kinerja Tahunannya Baik		*100%*				*100%*	
6.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara**	**Sungailiat**	**80%**	**590.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**66,67**	**601.800.000,00**
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti		**100%**				**100%**	
6.01.02.2.02.01	*Sub. Kegiatan Audit Kinerja dan Keuangan*	*Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Dilakukan Pemeriksaan*	*Sungailiat*	*100%*	*435.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*443.700.000,00*
		Persentase Pengelolaan APBDes Desa yang dilakukan pemeriksaan	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
		Persentase dana kelurahan yang dilakukan pemeriksaan	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa sekretariat daerah yang dilakukan pemeriksaan	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
		Persentase Barang/Jasa Dinas yang dilakukan pemeriksaan	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
		Persentase Aset/Barang Inventaris yang dilakukan pemeriksaan	*Sungailiat*	*100%*				*100%*	
6.01.02.2.02.02	*Sub. Kegiatan Reviu Kinerja dan Keuangan*	*Jumlah Laporan Reviu DAK*	*Sungailiat*	*..... Laporan*	*155.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*..... Laporan*	*158.100.000,00*
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**915.000.000,00**				**933.300.000,00**

		Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko		**100,00%**	**915.000.000,00**			**100,00%**	**933.300.000,00**
6.01.03.2.02	**Kegiatan Asistensi dan Pendampingan**	**Persentase OPD Yang Memiliki Penilaian Risiko**	Sungailiat	**100,00%**	**915.000.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**933.300.000,00**
	Sub. Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait pungutan liar		100,00%	235.000.000,00	APBD	P1	100,00%	239.700.000,00
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait gratifikasi		100,00%				100,00%	
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang masuk pada SPAN LAPOR		100,00%				100,00%	
		Persentase tindaklanjut terkait TPTGR		100,00%				100,00%	
	Sub. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Asistensi dan Pendampingan	Sungailiat	100,00%	340.000.000,00	APBD	P1	100,00%	346.800.000,00
		Persentase Target Rencana Aksi Korsupgah KPK yang terpenuhi		100,00%	340.000.000,00	APBD	P1	100,00%	346.800.000,00
		Jumlah OPD Yang Menyusun Penilaian Resiko		34 OPD				34 OPD	
		Penilaian Enam Komponen Pengungkit		70				70	
		Persentase Pemenuhan Elemen Peran dan Layanan		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Elemen Pengelolaan SDM		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Elemen Praktik Profesional		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi		100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Elemen Struktur Tata Kelola		100%				100%	
		Persentase penilaian survey integritas		100%				100%	
		Persentase aparatur yang menyampaikan LHKASN		100%				100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**7.993.958.400,00**				**8.684.049.240,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**85.000.000,00**				**93.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**85.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**93.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	

	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*4 Dokumen*	*40.000.000,00*			*4 Dokumen*	*44.000.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*14 Dokumen*	*45.000.000,00*			*14 Dokumen*	*49.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**6.483.708.400,00**			**0%**	**7.132.079.240,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**6.483.708.400,00**			**100%**	**7.132.079.240,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*6.468.708.400,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*7.115.579.240,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.011.500.000,00**				**1.041.845.000,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Kegiatan Administrasi Umum	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**	**100%**	**1.011.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.041.845.000,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*154.500.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*87.550.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*25.750.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*140.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*144.200.000,00*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*77.250.000,00*

	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*136.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*140.595.000,00*
	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*257.500.000,00*
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*50 Unit*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*50 Unit*	*154.500.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**413.750.000,00**			**73**	**416.625.000,00**
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**413.750.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**416.625.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	*Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia*	*Sungailiat*	*42 Stel*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*45.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*49.500.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*42 Stel*				*20 Stel*	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*35 Orang*	*333.750.000,00*	APBD	P1	*37 orang*	*367.125.000,00*
JUMLAH					**10.688.958.400,00**				**11.432.949.240,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**155.007.000,00**				**158.107.140,00**
		Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**80,00%**	**155.007.000,00**			**90,00%**	**158.107.140,00**
8.01.02.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Sungailiat**	**100%**	**155.007.000,00**	APBD	P1	**100%**	**158.107.140,00**
8.01.02.2.01.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah peserta yang mengikuti Seminar Wawasan Kebangsaan*	*Sungailiat*	*60 Orang*	*84.152.000,00*	*APBD*	*P1*	*60 Orang*	*85.835.040,00*
		Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pembauran		*50 Orang*				*50 Orang*	
8.01.02.2.01.04	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah Laporan Monitoring Gerakan Revolusi Mental di Kab. Bangka yang disusun*	*Sungailiat*	*20 Laporan*	*70.855.000,00*	*APBD*	*P1*	*20 Laporan*	*72.272.100,00*
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**100.000.000,00**				**102.000.000,00**
		Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat		**80,00%**	**100.000.000,00**			**90,00%**	**102.000.000,00**

8.01.03.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Sungailiat	**100,00%**	**100.000.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**102.000.000,00**
8.01.03.2.01.03	*Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*	*Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan*		*12 Parpol*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Parpol*	*102.000.000,00*
		Jumlah Partai politik yang terverifikasi bantuan keuangannya		*12 Parpol (72 Orang)*				*12 Parpol (72 Orang)*	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**100.000.000,00**				**102.000.000,00**
		Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		**50,00%**	**100.000.000,00**			**60,00%**	**102.000.000,00**
8.01.04.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Sungailiat	**100,00%**	**100.000.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**102.000.000,00**
8.01.04.2.01.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina*		*60 Orang*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*60 Orang*	*102.000.000,00*
		Jumlah Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diverifikasi		*60 LNL*				*60 LNL*	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**184.649.000,00**				**188.341.980,00**
		Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya		**80,00%**	**184.649.000,00**			**90,00%**	**188.341.980,00**
8.01.05.2.01.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	Sungailiat	**100,00%**	**184.649.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**188.341.980,00**
8.01.05.2.01.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Satgas Anti Narkotika Kabupaten Bangka yang mengikuti Bimbingan Teknis*		*81 Orang*	*184.649.000,00*	*APBD*	*P1*	*81 Orang*	*188.341.980,00*
		Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama		*60 Orang*				*60 Orang*	

8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**700.000.000,00**				**714.000.000,00**
		Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial		**80,00%**	**700.000.000,00**			**90,00%**	**714.000.000,00**
8.01.06.2.01.	**Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Sungailiat	**100,00%**	**700.000.000,00**	APBD	P1	**100,00%**	**714.000.000,00**
8.01.06.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan oleh TIM Kewaspadaan Dini Daerah yang disusun*		*1Dokumen*	*150.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*153.000.000,00*
8.01.06.2.01.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PEKAT*		*60 Orang*	*190.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*60 Orang*	*193.800.000,00*
		Jumlah Aparatur Kecamatan dan Desa yang mengikuti BIMTEK Intelejen		*100 Orang*				*100 Orang*	
		Jumlah FKDM tingkat Kecamatan yang dibentuk		*8 Kecamatan*				*8 Kecamatan*	
8.01.06.2.01.04	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan Forkopimda yang disusun*		*1 Laporan*	*250.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Laporan*	*255.000.000,00*
		Jumlah Laporan penanganan konflik sosial yang disusun		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
		Jumlah Laporan FKPT yang disusun		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
8.01.06.2.01.05	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing yang disusun*		*1 Laporan*	*110.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Laporan*	*112.200.000,00*
		Jumlah Laporan data Keamanan dan Ketertiban yang disusun		*1 Laporan*				*1 Laporan*	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.188.914.222,00**				**4.213.055.883,66**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**

		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
8.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
8.01.01.1.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*.....Dokumen*	*7.500.000,00*			*.....Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
8.01.01.1.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Sungailiat*	*..... Dokumen*	*7.500.000,00*			*..... Dokumen*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**3.265.345.500,00**			**0%**	**3.591.880.050,00**
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**3.265.345.500,00**			**100%**	**3.591.880.050,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*3.250.345.500,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*3.575.380.050,00*
1.02.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**526.403.722,00**				**542.195.833,66**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
8.01.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Sungailiat**		**526.403.722,00**	**APBD**	**P1**		**542.195.833,66**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik							
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik							
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik							
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik							
8.01.01.1.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*217.369.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*223.890.070,00*
8.01.01.1.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*39.935.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*41.133.874,00*

8.01.01.1.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*10.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*10.506.000,00*
8.01.01.1.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*46.445.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*47.838.350,00*
8.01.01.1.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*66.130.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*68.113.900,00*
8.01.01.1.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*-*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*-*
8.01.01.1.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*103.000.000,00*
8.01.01.1.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*4.830.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*4.974.900,00*
8.01.01.1.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*	*2 Unit*	*18.044.422,00*	*APBD*	*P1*	*2 Unit*	*18.585.754,66*
8.01.01.1.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Meubeleur*	*Jumlah meubeleur yang diadakan*	*Sungailiat*	*9 Unit*	*8.449.500,00*	*APBD*	*P1*	*9 Unit*	*8.702.985,00*
8.01.01.1.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang dipelihara*	*Sungailiat*	*1 Unit*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*15.450.000,00*
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**382.165.000,00**			**73**	**62.480.000,00**
8.01.01.1.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Sungailiat**	**40%**	**382.165.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**62.480.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
8.01.01.1.04.03	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan*	*Jumlah Pakaian PDU Paskibra dan Perlengkapannya serta pakaian kerja lapangan Kecamatan yang tersedia*	*Sungailiat*	*Baju PDU paskibra 175 stell , pakaian kerja lapangan 175 stell, Pakaian kerja lapangan pelatih 28 stell*	*325.365.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
8.01.01.1.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 Stel*	*26.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*40 Stel*	*29.480.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*32 Stel*				*20 Stel*	
8.01.01.1.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Sungailiat*	*2 Orang*	*30.000.000,00*	APBD	P1	*2 Orang*	*33.000.000,00*
JUMLAH					**5.428.570.222,00**				**5.477.505.003,66**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN BAKAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01.	**KECAMATAN**								
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**39.325.000,00**				**40.111.500,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100%**	**39.325.000,00**			**100%**	**40.111.500,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Bakam**	**100%**	**39.325.000,00**	APBD	P1	**100%**	**40.111.500,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Bakam*	*15 Dokumen*	*39.325.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Dokumen*	*40.111.500,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**113.550.000,00**				**115.821.000,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**113.550.000,00**			**100%**	**115.821.000,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang**	**Bakam**	**100%**	**113.550.000,00**	APBD	P1	**100%**	**115.821.000,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Bakam*	*1 Kali*	*17.895.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*18.252.900,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*9 Desa*				*9 Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Bakam*	*9 Desa*	*95.655.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Desa*	*97.568.100,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*5 Lembaga*				*5 Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**38.350.000,00**				**39.117.000,00**

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50%**	**38.350.000,00**			**66,67%**	**39.117.000,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum**	**Bakam**	**82%**	**38.350.000,00**	APBD	P1	**86%**	**39.117.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Bakam*	*2 Kali*	*38.350.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Kali*	*39.117.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**82.500.000,00**				**84.150.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100%**	**82.500.000,00**			**100%**	**84.150.000,00**
		Persentase Desa/Kel yang Mengelola keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar**	**Bakam**	**100%**	**82.500.000,00**	APBD	P1	**100%**	**84.150.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Bakam*	*9 Desa*	*82.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Desa*	*84.150.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*9 Desa*				*9 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**3.371.848.600,00**				**3.063.148.240,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**30**	**50.000.000,00**			**30**	**55.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12,22**				**15,00**	
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Bakam**	**100%**	**50.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**55.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Bakam*	*3 Dokumen*	*25.000.000,00*			*3 Dokumen*	*27.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Bakam*	*7 Dokumen*	*25.000.000,00*			*7 Dokumen*	*27.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**1.996.847.600,00**			**0%**	**2.196.532.360,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**1.996.847.600,00**			**100%**	**2.196.532.360,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	

7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*1.981.847.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.180.032.360,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		**70**	**1.185.696.000,00**			**72**	**664.860.880,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		**75**				**78**	
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Bakam**	**100%**	**1.185.696.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**664.860.880,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*300.839.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*309.864.170,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*43.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*44.599.000,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*17.600.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*18.128.000,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*78.850.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*81.215.500,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*59.354.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*61.134.620,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Bakam*	*12 Bulan*	*95.650.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*98.519.500,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*49.903.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*51.400.090,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Bakam*	*2 Unit*	*275.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Mobil		*1 unit*	*250.000.000,00*				
		- Motor		*1 unit*	*25.000.000,00*				
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Bakam*	*5 unit*	*34.500.000,00*	*APBD*	*P1*		*35.535.000,00*
		- Laptop		*2 unit*				*2 unit*	
		- Printer		*2 unit*				*2 unit*	

		- Mesin Rumput		*1 unit*				*1 unit*	
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Bakam*		*65.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Sound System		*1 unit*					
		- Hordeng		*1 paket*					
		- Sofa		*2 unit*					
7.01.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur*	*Jumlah meubeulair kantor yang tersedia*	*Bakam*		*40.700.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Kursi Kerja		*5 buah*					
		- Kursi Rapat		*50 buah*					
		- Meja Kerja		*5 buah*					
		- Meja Rapat		*4 buah*					
7.01.01.2.03.27	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas*	*jumlah Rumah Dinas yang terpelihara*	*Bakam*		*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Rumah Dinas Camat		*1 unit*					
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Bakam*		*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Gedung Kantor		*1 unit*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**139.305.000,00**			**73**	**146.755.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab Bangka**	**40%**	**139.305.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**146.755.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Bakam*	*16 stel*	*10.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*10.400.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*25 Stel*	*6.250.000,00*			*25 Stel*	*6.250.000,00*
		Jumlah Pakaian Peserta MTQ ke Kabupaten		*35 stel*	*18.000.000,00*			*35 stel*	*22.200.000,00*
		Jumlah Pakaian Panitia MTQ Tk.Kecamatan		*30 stel*	*6.000.000,00*			*30 stel*	*6.000.000,00*
		Jumlah Pakaian Latihan Paskibra Tk.Kecamatan		*30 stel*	*19.500.000,00*			*35 stel*	*22.750.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*7 Orang*	*79.155.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*79.155.000,00*
JUMLAH					**3.645.573.600,00**				**3.342.347.740,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN BELINYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.173.551.870,00**				**3.237.022.907,40**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**3.173.551.870,00**			**100,00%**	**3.237.022.907,40**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Belinyu**	**100%**	**42.525.000,00**	APBD	P1	**100%**	**43.375.500,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Belinyu*	*15 Dokumen*	*42.525.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Dokumen*	*43.375.500,00*
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	**Persentase Layanan Pemerintah Umum pada Kelurahan yang tertangani**	**Belinyu**	**100%**	**3.131.026.870,00**	APBD	P1	**100%**	**3.193.647.407,40**
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah operasional layanan pemerintahan ditingkat kelurahan yang dilaksanakan*	*Belinyu*	*12 Bulan, 7 Kelurahan*	*3.131.026.870,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan, 7 Kelurahan*	*3.193.647.407,40*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.729.280.000,00**				**2.783.865.600,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**2.729.280.000,00**			**100,00%**	**2.783.865.600,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**Belinyu**	**100%**	**150.350.000,00**	APBD	P1	**100%**	**153.357.000,00**
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Belinyu*	*1 Kali*	*22.825.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*23.281.500,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*5 Kali*				*5 Kali*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Belinyu*	*12 Desa/Kelurahan*	*127.525.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Desa/Kelurahan*	*130.075.500,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*5 Lembaga*				*5 Lembaga*	
	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang**		**100%**	**2.578.930.000,00**			**100%**	**2.630.508.600,00**

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong		**100%**				**100%**	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan*	*Belinyu*	*7 kali*	*16.930.000,00*	*APBD*	*P1*	*7 kali*	*17.268.600,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	*Jumlah sarana dan prasarana di kelurahan yang dibangun*	*Belinyu*	*7 Paket di 7 Kelurahan*	*2.562.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*7 Paket di 7 Kelurahan*	*2.613.240.000,00*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**27.900.000,00**				**28.458.000,00**
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**27.900.000,00**			**66,67%**	**28.458.000,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum**	**Belinyu**	**82%**	**27.900.000,00**	APBD	P1	**86%**	**28.458.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Belinyu*	*4 Kali*	*27.900.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Kali*	*28.458.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**66.050.000,00**				**67.371.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100%**	**66.050.000,00**			**100,00%**	**67.371.000,00**
		Persentase Desa/Kel yang Mengelola keuangan sesuai standar		**100%**				**100,00%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan aset sesuai standar**	**Belinyu**	**100%**	**66.050.000,00**	APBD	P1	**100%**	**67.371.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Belinyu*	*5 Desa*	*66.050.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Desa*	*67.371.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*5 Desa*				*5 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**7.743.799.440,00**				**7.149.433.225,20**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**30**	**80.100.000,00**			**30**	**88.110.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		**12**				**15**	
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Belinyu**	**100%**	**80.100.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**88.110.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	

7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Belinyu*	*3 Dokumen*	*35.050.000,00*			*3 Dokumen*	*38.555.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Belinyu*	*7 Dokumen*	*45.050.000,00*			*7 Dokumen*	*49.555.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**5.381.970.600,00**			**0%**	**5.920.167.660,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**5.381.970.600,00**			**100%**	**5.920.167.660,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*5.366.970.600,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*5.903.667.660,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Belinyu*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.115.870.840,00**				**975.297.565,20**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Belinyu**	**100%**	**2.115.870.840,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**975.297.565,20**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*488.233.780,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*502.880.793,40*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*47.763.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*49.195.890,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*22.350.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*23.020.500,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*71.340.412,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*73.480.624,36*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*114.851.648,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*118.297.197,44*

7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Belinyu*	*12 Bulan*	*152.352.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*156.922.560,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*51.500.000,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Belinyu*		*316.300.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Mobil		*1unit*	*250.000.000,00*				
		- Motor		*3 unit*	*66.300.000,00*				
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Belinyu*		*276.460.000,00*	*APBD*	*P1*		*284.753.800,00*
		- Printer KTR Camat		*2 unit*				*2 unit*	
		- Printer 7 kel		*7 unit*				*7 unit*	
		- Komputer kec		*2 unit*				*2 unit*	
		- Komputer aj		*2 unit*				*2 unit*	
		- Komputer 6 kelurahan		*6 unit*				*6 unit*	
		- GPS (MTG, KP, BK)		*4 unit*				*4 unit*	
		- APAR KEC dan kel		*8 unit*				*8 unit*	
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Belinyu*		*105.100.000,00*	*APBD*	*P1*	-	*105.100.000,00*
		- kipas angin		*3 unit*				*3 unit*	
		- papan informasi		*3 paket*				*3 paket*	
		- gordain(kuto panji, air jukung, air asam, riemodong indah)		*4 kel*				*4 kel*	
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*jumlah Gedung Kantor yang terpelihara*	*Belinyu*		*105.460.000,00*	*APBD*	*P1*	-	*105.460.000,00*
		- Gedung Kantor kec Belinyu, kp, aj, as, mantung, remodong indah		*6 Unit*				*6 Unit*	
7.01.01.2.03.37	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas*	*Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi*	*Belinyu*		*365.660.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Rumah Dinas Pegawai		*1 unit*					
		- Rumah Dinas Sekcam		*1 unit*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**165.858.000,00**			**73**	**165.858.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab Bangka**	**40%**	**165.858.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**165.858.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Belinyu*	*16 stel*	*68.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*68.500.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*30 Stel*				*25 Stel*	
		Jumlah pakaian batik yang tersedia		*116 Stel*				*35 stel*	
		Jumlah latihan paskibraka yang tersedia		*55 Stel*				*30 stel*	
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*10 Orang*	*97.358.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*97.358.000,00*
JUMLAH					**13.740.581.310,00**				**13.266.150.732,60**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN PUDING BESAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7-1.0-0.0-0.xx									
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**46.535.000,00**				**47.465.700,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**46.535.000,00**			**100,00%**	**47.465.700,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan**	**Puding Besar**	**100%**	**46.535.000,00**	APBD	P1	**100%**	**47.465.700,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Puding Besar*	*100%*	*46.535.000,00*	*APBD*	*P1*	*100%*	*47.465.700,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**117.350.000,00**				**119.697.000,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**117.350.000,00**			**100,00%**	**119.697.000,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Masyarakat yang aktif dalam menyampaikan usulan dalam Musrenbang**	**Puding Besar**	**100%**	**117.350.000,00**	APBD	P1	**100%**	**119.697.000,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif bergotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Puding Besar*	*1 Kali*	*17.895.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*18.252.900,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*... Desa*				*... Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Puding Besar*	*... Desa*	*99.455.000,00*	*APBD*	*P1*	*... Desa*	*101.444.100,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*.... Lembaga*				*.... Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**17.280.000,00**				**17.625.600,00**
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**17.280.000,00**			**66,67%**	**17.625.600,00**

7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif dalam menjaga keamanan secara swadaya**	**Puding Besar**	**100%**	**17.280.000,00**	APBD	P1	**100%**	**17.625.600,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Puding Besar*	*.... Kali*	*17.280.000,00*	*APBD*	*P1*	*.... Kali*	*17.625.600,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**105.000.000,00**				**107.100.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100,00%**	**105.000.000,00**			**100,00%**	**107.100.000,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100,00%**				**100,00%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan aset sesuai standar**	**Puding Besar**	**100%**	**105.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**107.100.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Puding Besar*	*...Desa*	*105.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*...Desa*	*107.100.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*...Desa*				*...Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.456.529.400,00**				**3.696.222.600,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**50.000.000,00**				**55.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Puding Besar**	**100%**	**50.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**55.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Puding Besar*	*.....Dokumen*	*25.000.000,00*			*.....Dokumen*	*27.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*..... Dokumen*				*..... Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Puding Besar*	*..... Dokumen*	*25.000.000,00*			*..... Dokumen*	*27.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.258.692.400,00**			**0%**	**2.484.561.640,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.258.692.400,00**			**100%**	**2.484.561.640,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*2.243.692.400,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.468.061.640,00*

7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Puding Besar*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.968.782.000,00**				**977.605.960,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Puding Besar**		**1.968.782.000,00**	**APBD**	**P1**		**977.605.960,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*458.551.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*472.307.530,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*46.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*47.895.000,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*22.950.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*23.638.500,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*105.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*108.974.000,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*64.363.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*66.293.890,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Puding Besar*	*12 Bulan*	*98.360.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*101.310.800,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*105.908.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*109.085.240,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Puding Besar*	*.... Unit*	*560.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Mobil Double Cabin		*1unit*					
		- Motor		*2 unit*					
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Puding Besar*		*46.700.000,00*	*APBD*	*P1*		*48.101.000,00*
		- Almari Etalase		*3 unit*				*3 unit*	
		- Filling Cabinet		*3 unit*				*3 unit*	
		- Laptop		*2 unit*				*2 unit*	

		- Printer		*2 unit*				*2 unit*	
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Puding Besar*		*65.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Sound System		*1 unit*					
		- Hordeng		*1 paket*					
		- Sofa		*2 unit*					
7.01.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur*	*Jumlah meubeulair kantor yang tersedia*	*Puding Besar*		*74.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Kursi Kerja		*5 buah*					
		- Kursi Rapat		*100 buah*					
		- Kursi Tunggu		*2 Unit*					
		- Meja Kerja		*5 buah*					
		- Meja Rapat		*4 buah*					
7.01.01.2.03.27	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas*	*jumlah Rumah Dinas yang terpelihara*	*Puding Besar*		*225.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Rumah Dinas Sekcam		*1 unit*					
		- Rumah Dinas Pegawai		*2 kopel*					
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Puding Besar*		*95.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Pagar Kantor		*1 paket*					
		- Gedung Kantor		*1 unit*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**179.055.000,00**			**73**	**179.055.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Puding Besar**	**40%**	**179.055.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**179.055.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Puding Besar*	*16 stel*	*10.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 stel*	*10.400.000,00*
		Jumlah Pakaian Batik Tradisional		*36 Lembar*	*9.000.000,00*			*36 Lembar*	*9.000.000,00*
		Jumlah Seragam PDU Paskibra		*30 Stel*	*30.000.000,00*			*30 Stel*	*30.000.000,00*
		Jumlah Seragam peserta MTQ ke Kabupaten		*30 Stel*	*18.000.000,00*			*30 Stel*	*18.000.000,00*
		Jumlah Pakaian panitia MTQ Tk.Kecamatan		*30 Lembar*	*6.000.000,00*			*30 Lembar*	*6.000.000,00*
		Jumlah Pakaian Olah Raga Paskibra Tk.Kecamatan		*30 Stel*	*19.500.000,00*			*30 Stel*	*19.500.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 Stel*	*7.000.000,00*			*20 Stel*	*7.000.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar dan Dlm Daerah*	*7 Orang*	*79.155.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*79.155.000,00*
JUMLAH					**4.742.694.400,00**				**3.988.110.900,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN PEMALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7-1.0-0.0-0.xx									
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**47.800.000,00**				**48.756.000,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**47.800.000,00**			**100,00%**	**48.756.000,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Pemali**	**100%**	**47.800.000,00**	APBD	P1	**100%**	**48.756.000,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Pemali*	*15 dokumen*	*47.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*48.756.000,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**59.225.000,00**				**60.409.500,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**59.225.000,00**			**100,00%**	**60.409.500,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang**	**Pemali**	**100%**	**59.225.000,00**	APBD	P1	**100%**	**60.409.500,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Pemali*	*1 Kali*	*9.795.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*9.990.900,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*6 Desa*				*6 Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Pemali*	*6 Desa*	*49.430.000,00*	*APBD*	*P1*	*6 Desa*	*50.418.600,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*3 Lembaga*				*4 Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**16.680.000,00**				**17.013.600,00**

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**16.680.000,00**			**66,67%**	**17.013.600,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum**	**Pemali**	**82%**	**16.680.000,00**	APBD	P1	**86%**	**17.013.600,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Pemali*	*4 Kali*	*16.680.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Kali*	*17.013.600,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**29.760.000,00**				**30.355.200,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100%**	**29.760.000,00**			**100%**	**30.355.200,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar**	**Pemali**	**100%**	**29.760.000,00**	APBD	P1	**100%**	**30.355.200,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah Desa/Kel yang mengelola administrasi desa sesuai standar*	*Pemali*	*4 Desa*	*29.760.000,00*	*APBD*	*P1*	*5 Desa*	*30.355.200,00*
		Jumlah Desa/Kel yang mengelola keuangan desa sesuai standar		*4 Desa*				*5 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**3.447.936.900,00**				**3.749.469.583,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**23.900.000,00**				**26.290.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Pemali**	**100%**	**23.900.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**26.290.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Pemali*	*3 Dokumen*	*11.950.000,00*			*3 Dokumen*	*13.145.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Pemali*	*7 Dokumen*	*11.950.000,00*			*7 Dokumen*	*13.145.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.408.736.800,00**			**0%**	**2.649.610.480,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.408.736.800,00**			**100%**	**2.649.610.480,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	

7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*2.393.736.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.633.110.480,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Pemali*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 dokumen*				*2 dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 dokumen*				*2 dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**885.000.100,00**				**939.360.103,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Pemali**	**100%**	**885.000.100,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**939.360.103,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*573.996.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*591.215.880,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*28.006.100,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*28.846.283,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*10.750.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*11.072.500,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*52.050.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*53.611.500,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*87.595.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*90.222.850,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Pemali*	*12 Bulan*	*46.703.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*48.104.090,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*42.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*43.569.000,00*
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Pemali*		*28.300.000,00*	*APBD*	*P1*		*29.149.000,00*
		- Filling Kabinet		*2 unit*				*2 unit*	
		- Kursi Rapat		*50 Unit*				*50 unit*	
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Pemali*		*15.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Unit*	*43.569.000,00*
		- Gedung Kantor		*1 unit*					

		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**130.300.000,00**			**73**	**134.209.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab Bangka**	**40%**	**130.300.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**134.209.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olahraga yang tersedia*	*Pemali*	*16 stel*	*10.550.000*	*APBD*	*P1*	*16 stel*	*10.866.500,00*
		Jumlah pakaian batik tradisional		*41 stel*	*12.300.000*			*41 stel*	*12.669.000,00*
		Seragam PDU Paskibra		*20 stel*	*20.000.000*			*20 stel*	*20.600.000,00*
		Jumlah Pakaian Olahraga Pelatih dan Anggota Paskibra Kecamatan		*30 stel*	*11.550.000*			*30 stel*	*11.896.500,00*
		Jumlah Pakaian Olahraga Panitia HUT RI Kecamatan		*40 stel*	*12.000.000*			*40 stel*	*12.360.000,00*
		Jumlah Pakaian Olahraga Juri HUT RI Kecamatan		*12 stel*	*3.600.000*			*12 stel*	*3.708.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*1 paket*	*5.000.000*			*1 paket*	*5.150.000,00*
		Jumlah pakaian peserta STQ/MTQ yang tersedia		*40 stel*	*12.000.000*			*40 stel*	*12.360.000,00*
		Jumlah pakaian Panitia STQ/MTQ yang tersedia		*10 stel*	*3.000.000*			*10 stel*	*3.090.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar dan Dlm Daerah*	*4 Orang*	*40.300.000,00*	APBD	P1	*4 Orang*	*41.509.000,00*
JUMLAH					**3.601.401.900,00**				**3.906.003.883,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN RIAU SILIP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7-1.0-0.0-0.xx									
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**140.000.000,00**				**142.800.000,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**140.000.000,00**			**100,00%**	**142.800.000,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan**	**Riau Silip**	**100%**	**140.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**142.800.000,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Riau Silip*	*15 dokumen*	*140.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*142.800.000,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**162.000.000,00**				**165.240.000,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**162.000.000,00**			**100,00%**	**165.240.000,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Masyarakat yang aktif dalam menyampaikan usulan dalam Musrenbang**	**Riau Silip**	**100%**	**162.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**165.240.000,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif bergotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Riau Silip*	*1 Kali*	*25.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*25.500.000,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*9 Desa*				*9 Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Riau Silip*	*9 Desa*	*137.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Desa*	*139.740.000,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*5 Lembaga*				*5 Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**50.000.000,00**				**51.000.000,00**
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**50.000.000,00**			**66,67%**	**51.000.000,00**

7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif dalam menjaga keamanan secara swadaya**	**Riau Silip**	**100%**	**50.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**51.000.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Riau Silip*	*3 Kali*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Kali*	*51.000.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**90.000.000,00**				**91.800.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100,00%**	**90.000.000,00**			**100,00%**	**91.800.000,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100,00%**				**100,00%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan aset sesuai standar**	**Riau Silip**	**100%**	**90.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**91.800.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Riau Silip*	*9 Desa*	*90.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*9 Desa*	*91.800.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*9 Desa*				*9 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**3.110.542.700,00**				**3.301.256.270,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**35.000.000,00**				**38.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Riau Silip**	**100%**	**35.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**38.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Riau Silip*	*3 Dokumen*	*20.000.000,00*			*3 Dokumen*	*22.000.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Riau Silip*	*14 Dokumen*	*15.000.000,00*			*14 Dokumen*	*16.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.018.532.700,00**			**0%**	**2.220.385.970,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.018.532.700,00**			**100%**	**2.220.385.970,00**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*2.003.532.700,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.203.885.970,00*

7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Riau Silip*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**927.110.000,00**				**908.573.300,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Riau Silip**	**100%**	**927.110.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**908.573.300,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*489.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*503.670.000,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*21.930.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*22.587.900,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*10.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*10.506.000,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*52.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*53.560.000,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*50.980.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*52.509.400,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Riau Silip*	*12 Bulan*	*95.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*97.850.000,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*63.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*64.890.000,00*
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Riau Silip*		*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*103.000.000,00*
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Riau Silip*		*10.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
7.01.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeulair*	*Jumlah meubeulair kantor yang tersedia*	*Riau Silip*	*1 Paket*	*35.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**129.900.000,00**			**73**	**133.797.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab Bangka**	**40%**	**129.900.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**133.797.000,00**

		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Riau Silip*	*16 stel*	*10.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 stel*	*10.712.000,00*
		Jumlah Pakaian Batik Tradisional		*36 Lembar*	*9.000.000,00*			*36 Lembar*	*9.270.000,00*
		Jumlah Seragam PDU Paskibra		*30 Stel*	*30.000.000,00*			*30 Stel*	*30.900.000,00*
		Jumlah Seragam peserta MTQ ke Kabupaten		*30 Stel*	*18.000.000,00*			*30 Stel*	*18.540.000,00*
		Jumlah Pakaian panitia MTQ Tk.Kecamatan		*30 Lembar*	*6.000.000,00*			*30 Lembar*	*6.180.000,00*
		Jumlah Pakaian Olah Raga Paskibra Tk.Kecamatan		*30 Stel*	*19.500.000,00*			*30 Stel*	*20.085.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*20 Stel*	*7.000.000,00*			*20 Stel*	*7.210.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar dan Dlm Daerah*	*7 Orang*	*30.000.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*30.900.000,00*
JUMLAH					**3.552.542.700,00**				**3.752.096.270,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN MERAWANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7-1.0-0.0-0.xx									
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**85.000.000,00**				**86.700.000,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**85.000.000,00**			**100,00%**	**86.700.000,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan**	**Merawang**	**100%**	**85.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**86.700.000,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Merawang*	*1 Dokumen*	*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Dokumen*	*86.700.000,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**204.395.000,00**				**208.482.900,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**204.395.000,00**			**100,00%**	**208.482.900,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang**	**Merawang**	**100%**	**204.395.000,00**	APBD	P1	**100%**	**208.482.900,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		**100%**				**100%**	
		Persentase Desayg masyarakatnya aktif dalam gotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Merawang*	*1 Kali*	*39.395.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*40.182.900,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*10 Desa*				*10 Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Merawang*	*10 Desa*	*165.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Desa*	*168.300.000,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*3 Lembaga*				*3 Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**50.000.000,00**				**51.000.000,00**

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**50.000.000,00**			**66,67%**	**51.000.000,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum**	**Merawang**	**82%**	**50.000.000,00**	APBD	P1	**86%**	**51.000.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Merawang*	*2 Kali*	*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*2 Kali*	*51.000.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100.000.000,00**				**102.000.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100,00%**	**100.000.000,00**			**100,00%**	**102.000.000,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100,00%**				**100,00%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan aset sesuai standar**	**Merawang**	**100%**	**100.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**102.000.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Merawang*	*10 Desa*	*100.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*10 Desa*	*102.000.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*10 Desa*				*10 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.551.144.000,00**				**4.202.731.150,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Merawang**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Merawang*	*4 Dokumen*	*7.500.000,00*			*4 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Merawang*	*14 Dokumen*	*7.500.000,00*			*14 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.480.744.000,00**			**0%**	**2.728.818.400,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.480.744.000,00**			**100%**	**2.728.818.400,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	

7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*2.465.744.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.712.318.400,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Merawang*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.925.500.000,00**				**1.324.914.750,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Merawang**	**100%**	**1.925.500.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.324.914.750,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*766.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*789.701.000,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*55.125.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*56.778.750,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*20.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*20.600.000,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*70.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*72.100.000,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*85.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*87.550.000,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Merawang*	*12 Bulan*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*123.600.000,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*75.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*77.250.000,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Merawang*	*.... Unit*	*300.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Mobil		*1unit*	*250.000.000,00*				
		- Motor		*2 unit*	*50.000.000,00*				
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Merawang*		*94.500.000,00*	*APBD*	*P1*		*97.335.000,00*
		- Laptop		*3 unit*	*30.000.000,00*			*2 unit*	*30.900.000,00*

		- Printer		*3 unit*	*4.500.000,00*			*2 unit*	*4.635.000,00*
		- Komputer/PC		*3 unit*	*60.000.000,00*			*1 unit*	*61.800.000,00*
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Merawang*		*87.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Filling Cabinet		*5 unit*	*10.000.000,00*				
		- Lemari Arsip Kaca		*4 Unit*	*12.000.000,00*				
		- Sofa		*1 Unit*	*15.000.000,00*				
		- Sound Sistem		*1 unit*	*50.000.000,00*				
7.01.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur*	*Jumlah meubeulair kantor yang tersedia*	*Merawang*		*37.175.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Kursi Kerja		*5 buah*	*7.500.000,00*				
		- Kursi Rapat		*50 buah*	*22.925.000,00*				
		- Meja Kerja		*5 buah*	*3.750.000,00*				
		- Meja Rapat		*2 buah*	*3.000.000,00*				
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Merawang*		*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Gedung Kantor		*1 unit*					
7.01.01.2.03.38	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Merawang*		*200.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Gedung Serba Guna		*1 unit*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**129.900.000,00**			**73**	**132.498.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**40%**	**129.900.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**132.498.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Merawang*	*16 stel*	*10.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*10.608.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*43 Stel*	*22.500.000,00*			*25 Stel*	*22.950.000,00*
		Jumlah Pakaian Ibadah Oficial Peserta STQ/MTQ Ke Tingkat Kabupaten		*40 Pcs*	*7.000.000,00*			*35 stel*	*7.140.000,00*
		Jumlah Pakaian Olahraga Paskibraka		*40 stel*	*30.000.000,00*			*30 stel*	*30.600.000,00*
		Jumlah Pakaian Upacara (PDU)		*35 Stel*	*35.000.000,00*				*35.700.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*6 Orang*	*25.000.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*25.500.000,00*
JUMLAH					**4.990.539.000,00**				**4.650.914.050,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN MENDO BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7-1.0-0.0-0.xx									
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**30.000.000,00**				**30.600.000,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**30.000.000,00**			**100,00%**	**30.600.000,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan yang diselesaikan**	**Mendo Barat**	**100%**	**30.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**30.600.000,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Mendo Barat*	*15 Dokumen*	*30.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Dokumen*	*30.600.000,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**84.115.000,00**				**85.797.300,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**84.115.000,00**			**100,00%**	**85.797.300,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang**	**Mendo Barat**	**100%**	**84.115.000,00**	APBD	P1	**100%**	**85.797.300,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		**100%**				**100%**	
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Mendo Barat*	*1 Kali*	*23.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*24.184.200,00*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*15 Desa*				*15 Desa*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Mendo Barat*	*15 Desa*	*60.405.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Desa*	*61.613.100,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*3 Lembaga*				*3 Lembaga*	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**40.000.000,00**				**40.800.000,00**
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50,00%**	**40.000.000,00**			**66,67%**	**40.800.000,00**

7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum**	**Mendo Barat**	**82%**	**40.000.000,00**	APBD	P1	**86%**	**40.800.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Mendo Barat*	*12 Kali*	*40.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Kali*	*40.800.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**120.000.000,00**				**122.400.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100,00%**	**120.000.000,00**			**100,00%**	**122.400.000,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100,00%**				**100,00%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar**	**Mendo Barat**	**100%**	**120.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**122.400.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Mendo Barat*	*15 Desa*	*120.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Desa*	*122.400.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*15 Desa*				*15 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4.495.631.800,00**				**3.986.571.660,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**50.000.000,00**				**55.000.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Mendo Barat**	**100%**	**50.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**55.000.000,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Mendo Barat*	*3 Dokumen*	*25.000.000,00*			*3 Dokumen*	*27.500.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*3 Dokumen*				*3 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Mendo Barat*	*7 Dokumen*	*25.000.000,00*			*7 Dokumen*	*27.500.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**2.445.180.800,00**			**0%**	**2.689.698.880,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**2.445.180.800,00**			**100%**	**2.689.698.880,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*2.430.180.800,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*2.673.198.880,00*

7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun		*4 Dokumen*				*4 Dokumen*	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**1.915.551.000,00**				**1.155.274.780,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**100%**	**1.915.551.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**1.155.274.780,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**2%**		**APBD**	**P1**	**2%**	
		Persentase BMD dalam kondisi baik		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		**100%**		**APBD**	**P1**	**100%**	
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*592.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*610.584.000,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*25.597.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*26.364.910,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*13.300.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*13.699.000,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*71.260.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*73.397.800,00*
7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*56.759.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*58.461.770,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Mendo Barat*	*12 Bulan*	*196.710.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*202.611.300,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*40.200.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*41.406.000,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Mendo Barat*		*350.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*-*	*-*
		- Mobil		*1unit*	*250.000.000,00*				
		- Motor		*4 unit*	*100.000.000,00*				
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Mendo Barat*		*125.000.000,00*	*APBD*	*P1*		*128.750.000,00*
		- Laptop		*5 unit*				*2 unit*	
		- Printer		*5 unit*				*2 unit*	
		- Komputer/PC		*5 unit*				*1 unit*	

7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Mendo Barat*		*72.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Genset		*1 unit*					
		- Hordeng		*1 paket*					
		- Sofa		*2 unit*					
		- Kursi Tunggu		*2 unit*					
		- GPS		*1 unit*					
		- Filling Kabinet		*3 unit*					
7.01.01.2.03.25	*Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur*	*Jumlah meubeulair kantor yang tersedia*	*Mendo Barat*		*46.925.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Kursi Kerja Eselon		*7 buah*					
		- Kursi Rapat		*50 buah*					
		- Meja Kerja		*5 buah*					
		- Meja Rapat		*4 buah*					
7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Mendo Barat*		*50.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Gedung Kantor		*1 unit*					
		- Pagar Kantor		*1 unit*					
7.01.01.2.03.27	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas*	*jumlah rumah dinas yang dipelihara*	*Mendo Barat*		*275.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Rumah Dinas Camat		*1 unit*					
		- Rumah Dinas Pegawai		*4 kopel*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**84.900.000,00**			**73**	**86.598.000,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**40%**	**84.900.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**86.598.000,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Mendo Barat*	*16 stel*	*10.400.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*10.608.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*47 Stel*	*24.500.000,00*			*25 Stel*	*24.990.000,00*
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*4 Orang*	*50.000.000,00*	APBD	P1	*7 Orang*	*51.000.000,00*
JUMLAH					**4.769.746.800,00**				**4.266.168.960,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN SUNGAILIAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN								
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**6.511.499.750,00**				**6.641.729.745,00**
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		**100,00%**	**6.511.499.750,00**			**100,00%**	**6.641.729.745,00**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan**	**Sungailiat**	**100%**	**44.250.000,00**	APBD	P1	**100%**	**45.135.000,00**
7.01.02.2.04.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*	*Sungailiat*	*15 Dokumen*	*44.250.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 Dokumen*	*45.135.000,00*
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Pemerintah Umum pada Kelurahan yang tertangani**	**Sungailiat**	**100%**	**6.467.249.750,00**	APBD	P1	**100%**	**6.596.594.745,00**
7.01.02.2.01.02	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah operasional layanan pemerintahan ditingkat kelurahan yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*12 Bulan, 12 Kelurahan*	*6.467.249.750,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan, 12 Kelurahan*	*6.596.594.745,00*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**4.512.960.000,00**				**4.603.219.200,00**
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif		**100,00%**	**4.512.960.000,00**			**100,00%**	**4.603.219.200,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Masyarakat yang aktif dalam menyampaikan usulan dalam Musrenbang**	**Sungailiat**	**100%**	**102.260.000,00**	APBD	P1	**100%**	**104.305.200,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		**100%**				**100%**	
		Persentase Masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif bergotong royong		**100%**				**100%**	
7.01.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*1 Kali*	*-*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*-*
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti		*1 Desa/12 Kelurahan*				*1 Desa/12 Kelurahan*	
7.01.03.2.01.03	*Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa*	*Sungailiat*	*1 Desa*	*102.260.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Desa*	*104.305.200,00*
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		*1 Lembaga*				*1 Lembaga*	

	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Masyarakat yang aktif dalam menyampaikan usulan dalam Musrenbang**			**4.410.700.000,00**				**4.498.914.000,00**
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina							
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*1 Kali*	*18.700.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*19.074.000,00*
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	*Jumlah sarana dan prasarana di kelurahan yang dibangun*	*Sungailiat*	*1 Paket*	*4.392.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Paket*	*4.479.840.000,00*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**11.100.000,00**				**11.322.000,00**
		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya		**50%**	**11.100.000,00**			**66,67%**	**11.322.000,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif dalam menjaga keamanan secara swadaya**	**Sungailiat**	**100%**	**11.100.000,00**	APBD	P1	**100%**	**11.322.000,00**
7.01.04.2.01.04	*Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan*	*Sungailiat*	*1 Kali*	*11.100.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Kali*	*11.322.000,00*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**19.000.000,00**				**19.380.000,00**
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		**100%**	**19.000.000,00**			**100%**	**19.380.000,00**
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan aset sesuai standar**	**Sungailiat**	**100%**	**19.000.000,00**	APBD	P1	**100%**	**19.380.000,00**
		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		**100%**				**100%**	
7.01.06.2.01.03	*Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya*	*Sungailiat*	*1 Desa*	*19.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*1 Desa*	*19.380.000,00*
		Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya		*1 Desa*				*1 Desa*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**13.971.661.100,00**				**13.112.142.697,00**
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			**15.000.000,00**				**16.500.000,00**
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**100%**	**15.000.000,00**	**APBD**	**P1**	**100%**	**16.500.000,00**

		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Dalam Daerah dan Luar Daerah*	*3 Dokumen*	*7.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*3 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun		*2 Dokumen*				*2 Dokumen*	
7.01.01.2.01.03	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Dalam Daerah dan Luar Daerah*	*4 Dokumen*	*7.500.000,00*	*APBD*	*P1*	*4 Dokumen*	*8.250.000,00*
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI		**0%**	**10.979.875.200,00**			**0%**	**12.077.862.720,00**
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**		**100%**	**10.979.875.200,00**			**100%**	**12.077.862.720,00**
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
7.01.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*10.964.875.200,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*12.061.362.720,00*
7.01.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang tertangani*	*Sungailiat*	*15 dokumen*	*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*15 dokumen*	*16.500.000,00*
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun							
		Jumlah laporan aset Perangkat Daerah yang disusun							
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah			**2.842.635.900,00**				**879.605.477,00**
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur							
7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**		**2.842.635.900,00**	**APBD**	**P1**		**879.605.477,00**
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik				**APBD**	**P1**		
7.01.01.2.03.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*529.643.900,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*545.533.217,00*
7.01.01.2.03.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*46.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*47.843.500,00*
7.01.01.2.03.03	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*10.950.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*11.278.500,00*
7.01.01.2.03.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional*	*Jumlah layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*70.052.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*72.153.560,00*

7.01.01.2.03.08	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*65.800.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*67.774.000,00*
7.01.01.2.03.17	*Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani*	*Sungailiat*	*12 Bulan*	*60.640.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*62.459.200,00*
7.01.01.2.03.18	*Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani*	*Luar Daerah*	*12 Bulan*	*70.450.000,00*	*APBD*	*P1*	*12 Bulan*	*72.563.500,00*
7.01.01.2.03.20	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional*	*Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia*	*Sungailiat*	*9 Unit*	*600.150.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Mobil		*2 unit*					
		- Motor		*7 unit*					
7.01.01.2.03.24	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	*Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan*	*Sungailiat*		*468.450.000,00*	*APBD*	*P1*		*482.503.500,00*
		- Wireless		*2 unit*				*2 unit*	
		- Komputer		*12 unit*				*12 unit*	
		- Laptop		*5 unit*				*5 unit*	
		- Printer		*15 unit*				*15 unit*	
		- AC		*9 unit*				*9 unit*	
		- Proyektor		*5 Unit*				*5 Unit*	
		- Mesin Potong Rumput		*2 Unit*				*2 Unit*	
		- Genset		*2 unit*				*2 unit*	
		- UPS		*3 unit*				*3 unit*	
7.01.01.2.03.22	*Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	*jumlah perlengkapan kantor yang tersedia*	*Sungailiat*		*409.750.000,00*	*APBD*	*P1*	-	*422.042.500,00*
		-Kursi Kerja		*40 unit*				*40 unit*	
		- Kursi 1/2 Biro		*18 unit*				*18 unit*	
		- Kursi Plastik		*100 unit*				*100 unit*	
		- Kipas Angin		*14 unit*				*14 unit*	
		- Lemari Kaca		*23 unit*				*23 unit*	
		- Meja Kerja		*7 unit*				*7 unit*	
		- Meja Kerja 1/2 Biro		*9 unit*				*9 unit*	
		- Meja Komputer		*2 unit*				*2 unit*	
		- Meja Front Office		*2 unit*				*2 unit*	
		- GPS		*4 unit*				*4 unit*	
		- Tirai Jendela Vertikal		*3 paket*				*3 paket*	
		- Teralis Pintu		*1 paket*				*1 paket*	
		- Kamera		*6 unit*				*6 unit*	
		- Sofa Tamu		*3 unit*				*3 unit*	
		- Alat Pemadam Kebakaran		*1 unit*				*1 unit*	
		- Tangga Alumunium Lipat		*1 unit*				*1 unit*	
		- Papan Informasi		*11 unit*				*11 unit*	
		- CCTV		*1 unit*				*1 unit*	

7.01.01.2.03.28	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor*	*jumlah Gedung Kantor yang terpelihara*	*Sungailiat*		*15.000.000,00*	*APBD*	*P1*	-	*15.450.000,00*
		- Gedung Kantor kec Sungailiat		*1 Unit*				*6 Unit*	
7.01.01.2.03.37	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor*	*Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi*	*Sungailiat*		*495.300.000,00*	*APBD*	*P1*	-	-
		- Ruang Pelayanan (Kec. Sungailiat)		*1 paket*					
		- Gedung Kantor (Kel. Sungailiat, Kel. Kuday, Kel. Lubuk Kelik, Kel. Surya Timur)		*4 paket*					
		Indeks Profesionalisme Aparatur		**73**	**134.150.000,00**			**73**	**138.174.500,00**
7.01.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi**	**Dalam Daerah dan Luar Daerah**	**40%**	**134.150.000,00**	**APBD**	**P1**	**45%**	**138.174.500,00**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**80%**				**85%**	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		**80%**				**85%**	
7.01.01.2.04.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*Jumlah pakaian olah raga yang tersedia*	*Sungailiat*	*16 stel*	*92.000.000,00*	*APBD*	*P1*	*16 Stel*	*94.760.000,00*
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia		*30 Stel*				*25 Stel*	
		Jumlah pakaian kontingen yang tersedia		*116 Stel*				*35 stel*	
7.01.01.2.04.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*	*Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	*Luar Daerah*	*4 Orang*	*42.150.000,00*	APBD	P1	*4 Orang*	*43.414.500,00*
JUMLAH					**25.026.220.850,00**				**24.387.793.642,00**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah.Indikator kinerja daerah ini merupakan target Kepala Daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama 5 (lima) tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bangka 2019–2023. Target kinerja daerah tersebut ditetapkandan dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019– 2023 disajikan pada Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2021. Sedangkan IKK Kabupaten Bangka disajikan pada Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2021.

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023 menyajikan penetapan IKU dan IKK Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk urusan pemerintahan daerah yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayananumum dan aspek daya saing daerah.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan

bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap Perangkat Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaanyang pada tahun 2021 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bangka 2019–2023.

Rencana Pembangunan Tahun 2021 merupakan Program tahun ketigaRPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2021 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023 yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Setiap Perangkat Daerah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka 2019–2023 adalah "**Bangka Setara (Bangka Sejahtera dan Mulia)".**Untuk mewujudkan visi ini dapat dicapai melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah;
4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional; dan
5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana disajikan pad Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
PenetapanIndikatorKinerjaUtamaKabupaten BangkaTahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019	PREDIKSI TAHUN 2020	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD	RUMUS INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	B	BB	BB	BB	A	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka oleh Kemenpan RB
		Indeks SPBE	Indeks	2,33	2,47	2,60	2,75	3,00	Rata-Rata Nilai Komponen Indeks Domaian Kebijakan, Indeks Domaian Tata Kelola dan Indeks Domain Layanan
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58,80	67,26	65,97	70,75	75,01	Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja
2.	Meningkatnya Pengelolaan KeuanganDaerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67,51	74,07	74,77	78,79	85,40	Nilai Hasil Survey Kepuasana Masyarakat
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,23	8,53	8,25	9,04	Jumlah Tahun yang digunakan oleh Penduduk dalam MenjalaniPendidikan Formal (Data dikeluarkan oleh BPS)
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,76	12,73	12,80	12,95	Lamanya Sekolah (dalam tahun) yang Diharapkan akan Dirasakan oleh Anak pada Umur TertentuDimasa Mendatang (Data dikeluarkan oleh BPS)
5.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,58	70,99	71,00	71,05	71,10	Rata – Rata Tahun Hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil Mencapai Umur x, Pada Suatu Tahun tertentu, dalam Situasi Mortalitas yang berlaku di Lingkungan Masyarakatnya (Data dikeluarkan oleh BPS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019	PREDIKSI TAHUN 2020	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD	RUMUS INDIKATOR
		Angka Stunting	%	18,20	3,82	3,64	3,25	0,00	Penilaian Hasil Pengukuran Antropometri terhadap Tinggi Badan (Usia 2 Tahun atau Lebih)
6.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	%	2,57	2,50	2,45	2,40	2,30	Jumlah Anak yang akan dipunyai Seorang Wanita Selama Masa Reproduksinya per 1000 Wanita
7.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,20	62,56	62,31	62,63	62,94	Indeks Kompositdari Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Pengambilan Keputusandan Distribusi Pendapatan
8.	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Utama	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Ekonomi	Indeks	80,60	81,94	83,31	84,41	87,06	IIE = $\frac{IE1 + IE2 + IE3 + IE4 + IE5 + IE6}{6}$ Dimana : IE 1 = Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik IE 2 = Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik IE 3 = Persentase Drainase dalam Kondisi Baik IE 4 = Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik IE5 = Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas IE 6 = Persentase Kecamatan yang Memiliki Jaringan FO
10.	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Sosial	Indeks	63,09	63,89	64,48	65,48	66,48	IIS = $\frac{IS1 + IS2 + IS3 + IS4 + IS5 + IS6}{6}$ Dimana : IS 1 = Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar IS 2 = Persentase Masyarakat yang Memiliki

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019	PREDIKSI TAHUN 2020	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD	RUMUS INDIKATOR
									Akses Air Bersih IS 3 = Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik IS 4 = Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh IS 5 = Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni
11.	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money*	Miliar Rupiah	11,37	13,20	15,80	20,00	25,00	Domestik = Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik x Rata – Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara Mancanegara = Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara x Rata – Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara *Spending Of Money* = Rata – Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara
12.	Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Total Investasi Daerah	%	n.a.	24,38	25,79	26,50	28,62	Jumlah Investasi Bidang Pariwisata dibagi Total Investasi Daerah dikali 100 persen
13.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	2,93	1,41	2,95	5,65	$G = \frac{(P \quad - P \quad - 1)}{P \quad - 1} x\ 100\%$ Dimana : Gt = Pertumbuhan Ekonomi PDRB HK t = PDRB Tahun t PDRB HK t-1 = PDRB Tahun Sebelumnya
14.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	5,47	4,97	4,98	5,11	4,82	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen (Data Dikeluarkan oleh BPS)
15.	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,671	0,723	0,772	0,812	0,961	$IDM = \frac{1}{3} + (IKL + IKE + IKS)$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2019	PREDIKSI TAHUN 2020	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD	RUMUS INDIKATOR
	Mendorong Perekonomian Daerah								Dimana : IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial
16.	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	65,27	63,07	65,02	65,07	65,10	(30% x IPU) + (30% x IPA) + (40% x ITH) Dimana : IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITP = Indeks Tutupan Hutan
		Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Advice Planning yang disetujui dibagi Jumlah Usulan Advice Planning dikali 100 persen

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

PengelompokanPerangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiriatas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah *(middle line)*, Dinas Daerah *(operating core)*, Badan/fungsi penunjang *(technostructure)*, dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang *(technostructure)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti *(operating core)*.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan tersebut harus memberikan manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari indikator hasil (*outcome*) yang akan terasasetelah beberapa waktu kemudian dan indikator kinerja juga dapat memberikan dampat (*impact*) atau adanya perubahan dari hasil

pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penggunaan indikator kinerja yang memberikan *benefit* dan *impact* dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini berdasarkan 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: *aspek kesejahteraan masyarakat*, *aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum*. Aspek-aspek kinerja tersebut akan menggambarkan keadaan sesungguhnya kondisi daerah apakah berhasil dalam membangun daerah, memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan berdasarkan urusan serta unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahanyaitu :

1. **UrusanPemerintahanWajib,** terdiriatas:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaanumum dan penataan ruang;
   d. perumahandankawasanpermukiman;
   e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
   f. sosial;
   g. tenaga kerja;
   h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   i. pangan;
   j. pertanahan;
   k. lingkungan hidup;
   l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   o. perhubungan;
   p. komunikasi dan informatika;
   q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   r. penanaman modal;
   s. kepemudaan dan olah raga;
   t. statistik;
   u. persandian;

v. kebudayaan;
w. perpustakaan; dan
x. kearsipan.

2. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, terdiri atas :
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. perdagangan; dan
   e. perindustrian.
3. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiriatas:
   a. sekretariat Daerah; dan
   b. sekretariat DPRD.
4. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiriatas:
   a. perencanaan;
   b. keuangan;
   c. kepegawaian;
   d. pendidikan dan pelatihan; dan
   e. penelitian dan pengembangan.
5. **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiriatas:
   a. inspektorat daerah.
6. **Urusan Kewilayahan**, terdiri atas:
   a. kecamatan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci(IKI) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana disajikan pad Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2021

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1.	Pertumbuhan PDRB	%	4,51	2,39	1,41	2,95	5,65	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+l =tahunpengamatanPDRB t =tahunpengamatanPDRBsebelumnya
2.	Laju Inflasi	%	(0,51)	0,64	1,09	2,17	3,05	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...
3.	PDRB per Kapita	Ribu Rp	40.260	40.891	40.374	41.722	42.874	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
4.	Indeks Gini	Indeks	0,278	0,269	0,271	0,270	0,265	$G = 1 - \sum_{i=1}^{n} P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
5.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	%	23,12	23,15	23,06	23,09	23,56	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$ Dimana: YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah Qi -1 = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi = Persentase kumulatif penduduk ke i qi = Persentase pendapatan ke
6.	Indeks Ketimpangan Willianson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,192	0,189	0,190	0,189	0,180	$IW - \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \mid n}}{Y}$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota
7.	Persentase Penduduk di atas	%	94,53	95,08	94,40	94,89	95,18	100 – Angka Kemiskinan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	Garis Kemiskinan							
8.	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	0,66	0,64	0,63	0,62	0,60	$Po = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{Z - Yi}{Z}\right]$ dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (*proverty gap*) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y1 = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk
9.	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	%	5,47	4,92	5,60	5,11	4,82	$\text{Po (dolar PPP)} = \frac{\text{Jumlah pddk miskin dengan pendptn di bawah \$ 1 PPP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
10.	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,80	72,39	72,27	72,67	73,31	IPM = $^1/_3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)} - X_{(i)min} / [X_{(i)maks} - X_{(i)min}]$ Dimana: $X_{(i)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(i)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(i)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
								Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM (=X(i)) / Nilai maksimum / Nilai Minimum / Catatan Angka Harapan Hidup / 85 / 25 / Sesuai standar global (UNDP) Angka Melek Huruf / 100 / 0 / Sesuai standar global (UNDP) Rata-rata lama sekolah / 15 / 0 / Sesuai standar global (UNDP) Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 / 732.720 * / 300.000 * / UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	8,23	8,24	8,25	9,04	Kombinasiantarapartisipasisekolah,jenjang pendidikanyangsedangdijalani,kelasyangdidudukidanpendidikanyang ditamatkan
12.	Angka Melek Huruf	%	99,65	99,66	99,68	99,70	99,74	$LIT^t_{15+} = \frac{L^t_{15+}}{P^t_{15+}} \times 100$ Dimana: LIT^t_{15+} = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t L^t_{15+} = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t. P^t_{15+} = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.
13.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	70,99	71,01	71,05	71,10	Angka perkiraanlamahiduprata-ratapendudukdenganasumsitidakadaperubahanpolamortalitasmenurutumur
14.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,79	0,76	0,74	0,72	0,68	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
15.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	5,39	5,31	5,10	4,95	4,80	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$
17.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,10	65,60	66,40	67,90	69,60	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,20	67,70	68,90	70,10	72,30	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	3,80	5,43	4,85	4,14	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
20.	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	0,9571	0,9576	0,9579	0,9582	0,9586	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$
21.	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenga Kerja	%	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
22.	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	0,6410	0,6560	0,6640	0,6790	0,6960	$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$
23.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	%	44,18	45,91	48,66	51,42	55,27	$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \times 100\%$
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	4,11	2,79	2,76	2,73	2,68	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67,51	74,07	74,77	78,79	85,40	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana :

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
								Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah Unsur = 1/14 = 0,071 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 NILAI PERSEPSI / NILAI INTERVAL IKM / NILAI INTERVAL KONVERSI IKM / MUTU PELAYANAN / KINERJA UNIT PELAYANAN 1 / 1,00 – 1,75 / 25 – 43,75 / D / Tidak baik 2 / 1,76 – 2,50 / 43,76 – 62,50 / C / Kurang baik 3 / 2,51 – 3,25 / 62,51 – 81,25 / B / Baik 4 / 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 / A / Sangat baik
26.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,31	11,49	11,82	12,37	12,98	PAD / Jumlah pendapatan daerah x100%
27.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penialian Opini yang Dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
28.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,00	90,12	92,45	93,64	95,00	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
29.	Penguatan Cadangan Pangan	%	7,80	17,80	25,30	35.30	55,30	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota / 100 ton x100%
30.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	8,12	12,50	17,75	20,25	25,00	Menjumlahkan 3 indikator: 1. Pertanian:ketersediaan pangan - ketersediaan : kebutuhan beras 2. Kesehatan:preferensi energi = (n gizi < 2 SD) / (n balita yang ditimbang BB/U) x100% 3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera • Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. • Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
31.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	19,48	19,46	18,97	18,52	19,10	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan / Jumlah PDRB x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
32.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	10,66	12,15	14,32	15,94	17,58	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x100%
33.	Produksi Sektor Pertanian	Ribu Ton	162,39	189,71	201,42	248,44	291,81	Jumlah Produksi Sekor Pertanian / Ton
34.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	62,19	61,58	63,26	65,79	68,24	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x100%
35.	Produksi Sektor Perkebunan	Ribu Ton	90	51	75	95	110	Jumlah Produksi Sekor Perkebunan / Ton
36.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n / Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n x100%
37.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,66	1,78	2,04	2,29	2,51	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan / Jumlah PDRB x100%
38.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	11,17	9,94	9,28	9,04	8,86	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan / Jumlah PDRB x100%
39.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PRDB	%	3,61	3,82	4,08	4,27	4,61	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata / Jumlah PDRB x100%
40.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	7,81	8,03	8,47	9,18	9,42	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutan dan perikanan / jumlah PDRB x100%
41.	Kontribusi Setor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,95	14,17	15,20	16,32	18,16	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan / Jumlah PDRB x100%
42.	Kontribusi Setor Industri terhadap PDRB	%	22,29	21,23	21,48	21,94	22,87	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri / Jumlah PDRB x100%
43.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	%	23,08	26,83	28,61	30,78	34,11	Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga / Jumlah PDRB sektor Industri x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
44.	Pertumbuhan Industri	%	9,47	10,23	12,81	15,20	119,92	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)}^{**}}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun n}} \times 100\%$
II.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rupiah	12.043	12.480	11.983	12,850	13.644	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$
2.	Nilai Tukar Petani	%	87,89	84,12	86,78	89,20	94,78	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
3.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	%	53,21	53,55	53,88	54,22	54,56	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$
4.	Produktivitas Total Daerah	%	27,09	28,92	31,54	33,19	37,61	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke-i}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$
5.	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 100\%$
6.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	Rasio	0,8012	0,8241	0,8610	0,8840	0,9410	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di bank umum}}{\text{Dana pihak ketiga di bank umum}}$
7.	Rasio Simpanan terhadap Simpanan di BPR	Rasio	0,7940	0,812	0,825	0,875	0,925	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di BPR}}{\text{Dana pihak ketiga di BPR}}$
8.	Angka Kriminalitas yang Ditangani	%	80,92	83,76	85,91	87,42	90,54	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
9.	Rasio Ketergantungan	%	43,50	43,17	42,96	42,71	42,58	$\frac{\text{Penduduk usia<15 th+usia>64}}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
A.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**							
1.	**Pendidikan**							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	68,27	69,44	71,24	72,04	74,84	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100\%$
1.2.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun	104,55	105,06	105,62	105,98	106,24	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun *t* dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan *h* $P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan *h*
1.3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun	10,48	10,61	10,75	11,00	11,50	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$ Dimana: h = jenjang pendidikan t = tahun P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t P^t = total jumlah penduduk pada tahun t
1.4.	Angka Partisipasi Murni	Rasio	102,08	102,38	102,62	103,10	103,50	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	107,80	108,18	108,50	108,95	109,50	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96,37	96,58	96,75	97,25	97,50	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100$
1.7.	Angka Partisipasi Sekolah	Rasio	102,08	102,38	102,62	103,10	103,50	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ dimana h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a
1.8.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Rasio	107,80	108,18	108,50	108,95	109,50	$\frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$
1.9.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Rasio	96,37	96,58	96,75	97,25	97,50	$\frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$
1.10.	Angka Putus Sekola (APS) SD/MI	%	0,074	0,060	0,052	0,044	0,022	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.11.	Angka Putus Sekola (APS) SMP/MTs	%	0,238	0,230	0,220	0,210	0,200	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.12.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya x100%
1.13.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya x100%
1.14.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,81	98,96	99,15	99,25	99,45	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya x100%
1.15.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	70,86	72,93	73,65	74,88	76,92	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SD/MI x100%
1.16.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	78,42	79,94	81,88	82,94	84,18	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs x100%
1.17.	Rasio Ketersedian Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,0014	0,0015	0,0016	0,0017	0,0019	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn x10.000
1.18.	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,047	0,052	0,057	0,064	0,071	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) x10.000
1.19.	Rasio Guru terhadap Murid Rata-Rata Sekolah Dasar	Rasio	25,95	25,74	25,50	25,30	25,00	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas / Jumlah murid pendidikan dasar x1000
1.20.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	100	100	100	100	100	Banyaknya lulusan SD / Banyaknya penduduk usia 12 tahun x100%
1.21.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)	%	99,91	99,93	99,94	99,95	99,97	Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf / Banyaknya penduduk usia 15-24 x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.22.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,65	99,66	99,68	99,70	99,74	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota / Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota x100%
1.23.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	45,32	45,59	47,84	49,78	53,45	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs x100%
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0,21	0,18	0,17	0,16	0,14	$AKB = \frac{D_{0-s1th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ Dimana: D_{0-s1th} =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0,79	0,82	0,83	0,84	0,86	$AKH = \frac{D_{0-s1th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ $AKHB = (1 - AKB)$ Dimana: 1 = per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR) D_{0-s1th} =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.3.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	4,22	4,12	3,92	3,70	3,48	$AKB = \frac{D_{0-s5th}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$ Dimana: D_{0-s5th} =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.4.	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi Per 1000	0,15	0,12	0,11	0,10	0,08	$AKB = \frac{D_{0-s1bln}}{\sum Lahir\ Hidup} x\ 1000$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
		Kelahiran Hidup						Dimana: D_{0-1bln} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
2.5.	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	62,187	61,996	61,745	61,256	60,982	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di satu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.00$
2.6.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	17,7902	12,8333	13,7624	14,3920	16,8825	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$
2.7.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	0,4504	0,4674	0,4782	0,4840	0,5027	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,0151	0,0156	0,0158	0,0160	0,0164	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.9.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio	0,5320	0,4297	0,4365	0,4452	0,4678	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.10.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	4,6343	4,8312	4,9561	5,1765	5,3172	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.12.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,44	91,65	92,40	93,60	95,80	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.13.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	(UCI)							
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama x100%
2.15.	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan di Indonesia 2.100 Kkal/kap/hari)	%	29,91	28,97	25,62	23,18	20,15	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/ kapita/ hari / Jumlah balita x100%
2.16.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Mendapatkan Imunisasi Campak	%	88,27	89,62	90,38	91,72	93,18	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun / Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama x100%
2.17.	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	0,0148	0,0145	0,0144	0,0143	0,0140	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan / jumlah penduduk < 15 tahun x100%
2.18.	Cakupan Balita Pnemunio yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun / Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x100%
2.19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	100,28	100,36	100,45	100,55	100,75	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun / Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama x100%
2.20.	Tingkat Pervalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Orang Per 100.000	1.008	1.1046	1.095	1.080	1.050	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) / Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama x100.000

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.21.	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Per 1.000 Penduduk	Orang Per 100.000	10,8829	10,0390	9,8265	9,5130	9,0621	$\frac{\text{Jumlah Paisen TB yang meninggal}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.22.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	%	100,19	100,62	100,84	101,26	102,48	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan menahi DOTS}}{\text{Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}} \times 100\%$
2.23.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.24.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.25.	Penderita Diare yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)}} \times 100\%$
2.26.	Angka Kejadian Malaria	Orang Per 100.000	41,06	39,22	37,48	35,91	30,32	$\frac{\text{Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun}} \times 100.000$
2.27.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Orang Per 1.000	0,1360	0,1286	0,1162	0,1038	0,8870	$\frac{\text{Jumlah kematian tersangka malaria}}{\text{Jumlah penduduk berisiko pada kurun waktu 1 tahun}} \times 1000$
2.28.	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	%	1,18	1,21	1,25	1,50	2,00	$\frac{\text{Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$
2.29.	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	%	81,43	82,11	83,52	84,48	86,91	$\frac{\text{Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita positif dalam 1 tahun}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,3024	0,3018	0,3050	0,2894	0,2561	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama x100%
2.31.	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	%	65,11	67,18	69,20	71,24	74,57	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir / Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan ter
2.32.	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	91,08	93,65	94,50	95,75	97,75	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu / Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama x100%
2.33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	86,71	88,92	89,75	91,26	94,18	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 / Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten x100%
2.34.	Cakupan Kunjungan Bayi	%	85,12	86,05	88,24	90,75	93,00	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x100%
2.35.	Cakupan Puskesmas	%	150	150	175	187,50	212,50	Jumlah puskesmas / Jumlah seluruh kecamatan x100%
2.36.	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	58,02	58,02	60,49	61,73	64,20	Jumlah pembantu puskesmas / Jumlah seluruh desa x100%
2.37.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	78,04	79,64	80,39	82,55	85,78	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatsl K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu / Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama x100%
2.38.	Cakupan Pelayanan Nifas	%	83,31	84,60	86,21	87,76	90,15	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.39.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$
2.40.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	86,91	87,46	88,27	89,93	91,84	$\frac{\text{Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
2.41.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	84,18	85,27	87,75	88,75	90,75	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin}} \times 100\%$
2.42.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	88,58	89,62	91,51	92,98	94,85	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS}} \times 100\%$
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Rasio	73,25	74,59	77,42	78,82	80,24	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
3.2.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Rasio	2,56	2,66	2,79	2,92	3,10	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
3.3.	Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	12,48	12,22	12,12	12,00	11,50	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 / Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk x100%
3.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	73,25	74,59	77,42	78,82	80,24	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x100%
3.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	68,82	70,12	71,50	72,00	74,00	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasi (Km) / Panjang seluruh jalan kabupaten (Km) x100%
3.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km) / Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km) x100%
3.7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	96,48	97,05	97,25	97,50	98,00	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi / Jumlah rumah tinggal x100%
3.8.	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) / Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km) x100
3.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	92,38	93,14	94,40	94,95	95,75	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x100%
3.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	18,26	17,38	16,25	15,50	12,00	Luasan daerah yang tergenang / Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang x100%
3.11.	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor / Jumlah seluruh wilayah rawan longsor x100%
3.12.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	97,28	98,07	98,25	98,50	99,00	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Luas irigasi kabupaten x100%
3.13.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0,0028	0,0228	0,0230	0,0232	0,0236	Panjang saluran irigasi / Luas lahan budidaya pertanian

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
3.14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,27	86,78	88,15	88,30	90,00	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3.15.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	85,27	86,78	88,15	88,30	90,00	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$
3.16.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
3.17.	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	38,12	38,91	40,25	42,25	47,50	$\frac{\text{Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA}}{\text{Total volume sampah}} \times 100\%$
3.18.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio	0,082	0,082	0,090	0,095	0,010	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.19.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Rasio	0,9492	0,8941	0,8945	0,8950	0,8960	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.20.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	Rasio	30,34	30,83	30,95	31,05	32,00	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$
3.21.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	28,66	28,71	28,95	29,15	29,30	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$
3.22.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Rasio	17,82	18,53	19,50	20,00	22,50	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber – IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
3.23.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	%	2,30	2,28	2,10	2,00	1,50	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
3.24.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan	Rasio	0,6074	0,6123	0,6705	0,6825	0,7093	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}}$
3.25.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**							
4.1.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,9515	0,9740	0,9755	0,9770	0,9815	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$
4.2.	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	12,35		80,25		100,00	$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
4.3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,15	97,40	97,55	97,70	98,15	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.4.	Persentase Rumah Yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	%	69,83	72,61	75,00	77,75	82,50	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.5.	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	99,98	99,99	100	100	100	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$
4.6.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
4.7.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	%	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	$\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	2,15	1,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan / Jumlah seluruh rumah x100%
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,00	0,00	2,50	5,00	10,00	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu x100%
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1.	Cakupan PetugasPerlindungan Masyarakat(Linmas)	%	100	100	100	100	100	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru / 1 Wilayah kerja kabupaten/kota x100%
5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	75	80	85	90	100	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x100%
5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran / Luas wilayah kabupaten/kota x100%
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x100%
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	75	80	85	90	100	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x100%
6.	**Sosial**							
6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	35	50	60	70	90	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan / Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x100%
6.2.	Persentase PMKS yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x100%
6.3.	Persentase PMKS Skala yang	%	100	100	100	100	100	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar							
6.4.	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	13,82	16,78	20,80	24,95	30,00	Jumlah FMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis / Jumlah FMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis x100%
6.5.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	15,61	16,67	18,75	20,50	24,00	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos / Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x100%
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	n.a	0,00	10,00	15,00	25,00	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos / Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala x100%
6.7.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%
6.8.	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	100	100	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala x100%
6.9.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	72,50	77,18	81,50	84,50	90,00	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun x100%
B.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**							

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.	**Tenaga Kerja**							
1.1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Rasio	2,96	2,83	2,80	2,75	2,50	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$
1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	69,17	70,83	72,50	75,00	80,00	$\frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
1.3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	34,39	36,14	40,44	43,16	49,25	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
1.4.	Keselamatan dan Perlindungan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n}} \times 100\%$
1.5.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	54,84	56,94	61,00	64,00	70,00	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$
1.6.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	3,18	2,63	2,00	1,00	0,00	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda}} \times 100\%$
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	83,26	85,14	87,50	88,50	90,50	$\frac{\sum \text{perusahaan yang telah diperiksa}}{\sum \text{perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\sum \text{peralatan yang telah diuji}}{\sum \text{peralatan yang telah terdaftar}} \times 100\%$
1.9.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	35,72	38,25	42,50	45,00	50,00	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$
1.10.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	22,25	25,45	30,00	35,00	45,00	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.11.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	1,18	1,82	2,00	4,50	10,00	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$
1.12.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Rasio	0,476	0,481	0,485	0,490	0,500	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2,33	2,34	2,38	2,42	2,46	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	20,00	17,14	17,14	17,14	17,14	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$
2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	32,19	33,83	35,45	37,82	41,50	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
2.4.	Rasio KDRT	%	17,38	16,20	14,00	12,00	8,00	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
2.5.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	%	2,11	2,07	2,05	2,00	1,75	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$
2.6.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	13,82	13,87	14,25	14,50	15,00	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
2.7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.8.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	0,06	0,012	1,00	1,50	2,00	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih cipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu x100
2.9.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu.	%	n.a	1,25	2,50	5,00	10,00	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos / Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos x100%
2.10.	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	82,45	85,74	86,90	87,61	88,50	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x100%
2.11.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum x100%
2.12.	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan / Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT x100%
2.13.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya / Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial x100%
2.14.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	Rasio	0,909	0,911	0,913	0,915	0,920	APM-SD perempuan / APM-SD laki-laki

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.15.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	Rasio	1,043	1,039	1,035	1,030	1,020	$\frac{\text{APM-SMP perempuan}}{\text{APM SMP laki laki}}$
2.16.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	Rasio	1,303	1,328	1,320	1,300	1,200	$\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun}}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun}}$
2.17.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi	Rasio	1,255	1,251	1,245	1,225	1,175	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan di ringkat pendidikan tinggiusia 19-24}}{\text{Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24}}$
2.18.	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Rasio	0,985	0,992	0,993	0,994	0,996	$\frac{AMH_{15\text{-}24}\ \text{perempuan}}{AMH_{15\text{-}24}\ \text{laki-laki}}$
2.19.	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor NonPertanian	%	13,82	13,87	14,25	14,50	15,00	$\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian}}{\text{Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian}} \times 100\%$
3.	**Pangan**							
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	120	125	130	135	145	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3.2.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	152,82	154,20	156,50	157,25	159,50	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD}}{100}$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
3.3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	87,62	89,15	91,25	92,50	94,50	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.	**Pertanahan**							
4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,62	35,35	40,81	45,12	55,51	$\frac{\text{Jumlah Luas Lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$
4.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
4.3.	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	1000	100	100	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100\%$
5.	**Lingkungan Hidup**							
5.1.	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
5.2.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
5.3.	KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air	Indeks	49,12	50,00	52.14	52,48	53.37	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,26	85,92	87,57	87,84	88,70	**IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]**
5.6.	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	60,74	61,23	67,05	68,25	70,93	$IKTL = 100 - ((84{,}3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LHD yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan olch Pemerintah Daerah kabupaten/kota}} \times 100\ \%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
5.8.	Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2	3	5	7	12	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
5.9.	Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1	1	1	1	6	Jumlah MHA yang diakui
5.10.	MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverfikasi	Kelompok	1	2	2	2	10	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.11.	Hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Hak	n.a	1	1	1	5	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.12.	Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1	1	1	1	6	Jumlah penetapan hak MHA
5.13.	Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$
5.14.	Penyediaan Sarana/Prasarana yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ diberikan\ sarana/prasarana}{Jumlah\ Total\ MHA} \times 100\%$
5.15.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat yang di Laksanakan	Diklat	1	1	1	1	5	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota
5.16.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup yang di Lakansakan	Kegiatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
5.17.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	$\left(\frac{Pengaduan\ Masyarakat\ yang\ ditangani}{Total\ jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ teregistrasi}\right) \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
5.18.	Timbunan Sampah yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	$\frac{volume\ timbulan\ sampah\ yang\ ditangani}{total\ timbulan\ sampah} \times 100\%$
5.19.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	42,76	44,82	46,88	48,44	52,50	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
5.20.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	33,60	35,43	37,50	40,00	45,00	$\frac{luas\ area\ pelayanan\ pengelolaan\ sampah\ (km2/ha)}{luas\ area\ kabupaten/kota\ (km2/ha)} \times 100\%$
5.21.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	75,42	76,55	77,50	78,00	80,00	$\frac{jumlah\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{total\ jumlah\ timbulan\ sampah\ di\ kabupaten/kota(ton)} \times 100\%$
5.22.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/Kota	Nilai	75,00	77,25	78,00	79,00	81,00	Nilai TPA (Program Adipura) > 71
5.23.	Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	$\frac{jumlah\ izin\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta\ yang\ terbit}{jumlah\ izin\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta\ yang\ diajukan\ dalam\ satu\ tahun} \times 100\%$
5.24.	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	38,65	39,77	42,50	45,00	50,00	$\frac{jumlah\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta\ yang\ taat\ pada\ peraturan}{jumlah\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta} \times 100\%$
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
6.1.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,93	1,0192	1,0110	1,0112	1,01,15	$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia > 17\ yang\ ber\ KTP}{Jumlah\ penduduk\ usia > 17\ atau\ telah\ menikah}$
6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,8573	0,8917	0,9250	0,9500	1	$\frac{Jumlah\ bayi\ berakte\ kelahiran}{Jumlah\ bayi}$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,87 : 1	0,91 : 1	0,93 : 1	0,96 : 1	100	Jumlah pasangan nikah berakte nikah / Jumlah keseluruhan pasangan nikah
6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Data	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Penerapan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah/Belum
6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,38	101,92	101,100	101,125	101,150	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP x100%
6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	85,73	89,17	92,50	95,00	100	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan / Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan x100%
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	93,54	95,16	96,77	100	100	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik / Jumlah seluruh pemerintahan desa x100%
7.2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	2	2	3	4	6	Jumlah kelompok binaan LPM / Jumlah LPM
7.3.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	4	5	8	10	14	Jumlah kelompok binaan PKK / Jumlah PKK
7.4.	Persentase LPMAktif	%	100	100	100	100	100	Jumlah LPM AKtif / Jumlah LPM x100%
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	4,84	7,06	12,90	16,12	22,58	Jumlah LPM berprestasi / Jumlah LPM x100%
7.6.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	Jumlah PKK aktif / Jumlah PKK x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
7.7.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	42,72	45,49	47,18	49,62	53,84	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,00	0,54	0,53	0,52	0,50	$r=\{(\frac{P_t}{P_0}) \times (\frac{1}{t}) - 1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 $Pt = Po + (B \quad D) + (Mi \quad Mo)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (*birth*) = Jumlah kelahiran selama periode 0 t D (*death*) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Kelahiran	2,98	2,96	2,93	2,90	2,86	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\,i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ji=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	58,22	64,71	70,59	76,47	82,35	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100$
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	55,88	61,76	73,52	82,35	88,23	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.5.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda/ Perkada	n.a	1	1	1	5	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
8.6.	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	1	1	2	2	3	Jumlah Sektor
8.7.	Jumlah Kerjasama	Kerjasama	5	8	11	15	20	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan							
8.8.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	2,40	2,35	2,25	2,20	2,10	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
8.9.	Ratio Akseptor KB	%	77,51	75,30	76,80	77,30	79,50	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.10.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	77,51	75,30	76,80	77,30	79,50	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.11.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	%	15,72	15,49	15,30	15,10	14,80	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	12,49	12,44	12,20	12,00	11,60	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.13.	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,73	11,55	11,45	11,35	11,25	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	8,95	9,86	10,42	11,78	13,65	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100\%$
8.15.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	78,54	78,92	79,50	81,25	84,00	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100\%$
8.16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
8.17.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
8.18.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	12,67	12,69	12,75	12,85	13,15	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
8.22.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	38,26	39,15	39,50	40,00	41,00	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100\%$
8.23.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Rasio	1	1	1	1	1	$\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.24.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah alkon per jenis kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota}}{\text{Jenis dan Permintaan Masyarakat}} \times 100\%$
8.25.	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan jejaring}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	sesuai dengan Standarisasi Pelayanan							
8.26.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia / Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga x100%
8.27.	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%						Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) / Jumlah remaja x 100%
8.28.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga / Jumlah kelompok kegiatan x100%
8.29.	Cakupan Keluarga Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	100	100	100	100	100	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang / Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak x100%
8.30.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	21,22	21,38	21,47	21,56	21,82	Jumlah umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama) / Jumlah wanita menurut usia kawin pertama
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,340	0,745	0,765	0,781	0,810	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB / Jumlah APBD dan APBDes
9.	**Perhubungan**							
9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Juta Orang	2,089	1,568	1,782	2,175	2,594	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
9.3.	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0010	0,0003	0,0004	0,0005	0,0007	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan / Jumlah penduduk
9.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	2.904	2.814	3.118	3.343	3.326	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
9.5.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
9.6.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,14	0,18	0,19	0,20	0,22	(Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat) x100%
9.7.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	79,96	78,47	81,29	83,21	86,98	(Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n / Jumlah angkutan umum pada Tahun n) x100%
9.8.	Pemasangan Rambu-Rambu	%	68,47	72,15	76,68	79,81	84,72	(Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n / Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia) x100%
9.9.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	2,97	2,90	2,89	2,88	2,87	Panjang Jalan / Jumlah Kendaraan
9.10.	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Juta Orang	3,189	2,568	3,782	3,175	3,594	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
9.11.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Juta Orang	3,189	2,568	3,782	3,175	3,594	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
10.	**Komunikasi dan Informatika**							

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
10.1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	51,61	51,61	83,87		80,00	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Rasio	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$
10.3.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	93,86	94,95	95,48	96,09	97,32	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
10.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Rasio	58,72	62,45	68,97	76,18	85,38	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
10.5.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Rasio	0,292	0,315	0,324	0,341	0,366	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
11.1.	Persentase Koperasi Aktif	%	81,76	83,28	84,35	85,48	87,91	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
11.2.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	79,18	80,24	81,28	82,32	84,72	$\frac{\text{Jumlah UKM non BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM}} \times 100\%$
11.3.	Persentase BPR/LKM Aktif	%	83,55	85,12	86,28	87,38	89,32	$\frac{\text{Jumlah BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh BPR/LKM}} \times 100\%$
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,76	78,64	78,42	78,20	77,96	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
12.	**Penanaman Modal**							
12.1.	Jumlah Investor Berskala	Badan	5	5	8	10	50	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	Nasional (PMDN/PMA)	Usaha						
12.2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	1.679,327	2.252,867	2.718,726	2.992,910	3.892,195	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
12.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	24,80	25,20	30,45	32,96	36,58	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN / Jumlah seluruh PMA/PMDN
12.4.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	n.a	34,15	34,65	34,82	35,84	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi / Realisasi PMDN sebelum evaluasi x100%
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**							
13.1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda x100%
13.2.	Persentase Wirausaha Muda	%	1,32	1,46	1,75	2,25	3,25	Jumlah wirausaha muda / Jumlah seluruh wirausaha x100%
13.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	Jumlah cabang olahraga yang dibina / Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar x100%
13.4.	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	%	100	100	100	100	100	Jumlah pelatih bersertifikat / Jumlah seluruh pelatih x100%
13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	100	100	100	Jumlah atlit pelajar yang dibina / Jumlah seluruh atlit pelajar x100%
13.6.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	2	2	3	4	14	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.
13.7.	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	2	2	3	4	14	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
14.	**Statistik**							

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
14.1.	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
14.3.	Buku "PDRB"	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
15.	**Persandian**							
15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	5,88	5,88	8,82	11,74	17,64	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100$
16.	**Kebudayaan**							
16,1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	5	5	5	6	30	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	24,42	25,93	27,68	29,25	33,84	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
16.3.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya	8	10	12	14	18	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
16.4.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	1	1	2	2	6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
17.	**Perpustakaan**							
17.1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Rasio	0,021	0,022	0,023	0,024	0,026	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$
17.2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	17.751	18.751	20.751	22.751	26.751	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
17.3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	0,248	0,252	0,256	0,260	0,268	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
17.4.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	7.211	7.317	7.517	7.717	8.117	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun
17.5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	12.348	12.643	12.843	13.043	13.443	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
17.6.	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	%	12,50	16,80	20,25	25,50	30,50	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$
18.	**Kearsipan**							
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	52,94	64,70	70,58	76,47	88,23	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	1	1	1	1	5	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
C.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**							
1.	**Pariwisata**							
1.1.	Kunjungan Wisata	%	5,40	6,18	7,50	8,50	10,00	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.2.	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2,25	2,42	2,75	3,00	3,50	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun
1.3.	PAD Sektor Pariwisata	%	3,11	3,82	4,45	5,55	7,75	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
2.	**Pertanian**							
2.1.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	19,48	19,46	21,06	21,41	22,10	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.2.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	10,66	12,15	14,32	15,94	17,58	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x100%
2.3.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	62,19	61,58	63,26	65,79	68,24	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x100%
2.4.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n / Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n x100%
2.5.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	506	518	525	530	550	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) / Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) x100%
2.6.	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	2,04	2,18	2,25	2,50	3,00	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n / jumlah kelompok tani x100%
3.	**Perdagangan**							
3.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	20,00		60,00		100,00	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
3.2.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	10,81		7,50		2,50	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n / Jumlah kelompok pedagang/usaha informal x100%
4.	**Perindustrian**							
4.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	15,79	16,07	16,56	17,12	17,86	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n / Jumlah kelompok pengrajin x100%
5.	**Kelautan dan Perikanan**							
5.1.	Produksi Perikanan	%	102,68	103,16	105,84	107,92	110,58	Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) x100%

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
5.2.	Konsumsi Ikan	%	124,98	128,72	131,43	133,78	140,00	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$
5.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	15,52	16,96	17,24	18,31	20,58	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$
5.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	60,92	62,84	64,25	66,50	70,28	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$
5.5.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	86,61	88,82	89,15	90,20	92,45	$\frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{\text{80\% dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$
5.6.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Rasio	0,6784	0,6784	0,6812	0,6820	0,6825	$\frac{\text{Kawasan lindung perairan}}{\text{Total luas perairan teritorial}}$
5.7.	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	103,78	105,42	106,61	107,54	110,18	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$
D.	**Fokus Layanan PendukungUrusan**							
1.	**Perencanaan**							
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
1.4.	Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak ADa

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	87	89	91	94	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$
2.	**Keuangan**							
2.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10,16	9,06	8,85	8,65	8,25	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.3.	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	2,78	2,53	2,25	2,15	1,75	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Program dalam APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
2.4.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	24,28	24,77	25,12	25,45	25,75	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.5.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	11,36	11,70	12,10	12,50	13,30	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.6.	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Perbandingan	51,46 : 49,54	51,55 : 49,45	51,65 : 49,35	51,75 : 49,25	51,95 : 49,05	$\frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.7.	Bagi Hasil Kabupaten dan Desa	%	6,42	6,71	6,95	7,08	7,25	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
2.8.	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian**							
3.1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	29	29	29	29	29	
3.2.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	136	136	136	136	136	
3.3.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	
4.	**Pendidikan dan Pelatihan**							
4.1.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari	2,35	2,68	2,75	2,85	3,05	
4.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	61,44	63,50	66,25	69,75	75,00	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
4.3.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	13,33		20,00		24,44	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$
5.	**Penelitian dan Pengembangan**							
5.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
5.2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
	Penerapan SIDa							
5.3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	29,41	35,29	38,24	41,62	45,87	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
5.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$
6.	**Pengawasan**							
6.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	75,00	82,25	85,00	87,50	92,50	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\%$
6.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	1,58	1,43	1,32	1,21	1,00	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
6.3.	Jumlah Temuan BPK	Temuan	966	819	784	692	558	
7.	**Sekretariat Dewan**							
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada
7.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2019	Prediksi Tahun 2020	Target 2021	Kondi Akhir RPJMD	Rumus
7.3.	Terintegrasinya Program – Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	DOkumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak Ada

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Bangka merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023 tahun kedua. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2021 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2021. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2021, mengacu pada analisis isu - isu strategis.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan pendanaan pembangunan

7.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam 1 (satu) program maupun kegiatan antar program, dalam 1 (satu) instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021, tidak hanya memuat kegiatan - kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun .
4. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
5. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
6. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
7. OPD Kabupaten Bangka dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan sebaik - baiknya untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal.
8. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun APBN, maka setiap OPD perlu membuat Rencana Kerja OPD (Renja OPD) tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik OPD (Renstra OPD) dengan mempedomani RKPD ini.
9. Sistematika Rencana Kerja OPD paling sedikit memuat antara lain :

- Pendahuluan;
- Hasil evaluasi Rencana Kerja OPD tahun lalu;
- Tujuan dan sasaran OPD;
- Rencana kerja dan pendanaan OPD;
- Penutup

10. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Bangka berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2021 ke dalam Rencana Kerja OPD dan Kebijakan Umum APBD 2021 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD Tahun 2021.

7.2. Kaidah - Kaidah Pendanaan Pembangunan

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini tidak hanya mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).

a. Usulan kegiatan yang diajukan oleh OPD harus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Kabupaten Bangka juga diusulkan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN seperti dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK).
b. Dokumen RKPD 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
c. Peningkatan sumber - sumber pendapatan pemerintah daerah dilakukan baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun yang dapat dikembangkan lebi lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

d. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta serta pola kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha.

e. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten, kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dan dunia usaha serta penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.